mizan

SALIM SAID

DARI GESTAPU KE REFORMASI

serangkaian kesaksian

MIZAN PUSTAKA: KRONIK ZAMAN BARU adalah salah satu lini produk (*product line*) Penerbit Mizan yang menyajikan buku-buku bertema umum dan luas yang merekam informasi dan pemikiran mutakhir serta penting bagi masyarakat Indonesia.

DARI GESTAPU KE REFORMASI

serangkaian kesaksian

SALIM SAID

Buku ini saya persembahkan
kepada almarhum Haji Said dan almarhumah Hajjah Salma,
orangtuaku yang telah mempersiapkan saya
menjadi apa adanya sekarang.
Semoga kubur mereka dilapangkan, rahmat dan maghfirah
dilimpahkan, serta segala dosa mereka dihapuskan Allah Swt.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada nama-nama berikut yang secara bersama-sama telah memberikan dukungan bagi penulisan dan peluncuran buku ini. Mereka adalah:

1. Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan
2. Ir. Haji Isran Noor (Bupati Kutai Timur)
3. Kim J. Mulia (PT Asuransi Intra Asia)
4. Dr. Ir. Haji Akbar Tanjung

Belum Sebuah Memoar:

Prakata Singkat Penulis

Buku ini belumlah sebuah memoar. Saya merasa belum cukup penting dan berada dalam posisi meminta kesediaan orang lain membaca tentang diri saya. Wartawan biasanya menyebut saya sebagai "pengamat", atau "pakar", dan memang itulah kira-kira saya. Selalu hanya mengamati, menganalisis, lalu mengomentari. Saya belum pernah duduk pada posisi yang diamati dan dikomentari. Maka, rasanya agak lucu kalau saya ikut-ikut menulis memoar.

Namun, sebagai orang yang selama seperempat abad menjadi wartawan, puluhan tahun menjadi peneliti—terutama mengamati tentara yang berpolitik—dan sebagai aktivis kesenian untuk waktu cukup lama serta kebetulan selama tiga setengah tahun dipercayai menduduki kursi duta besar, banyak peristiwa penting yang saya saksikan. Pada masa lalu, sebagian besar kesaksian itu tidak mudah dibeberkan. Sebagai akibat runtuhnya rezim otoriter Soeharto dan bangkitnya Reformasi, hal yang dulu dianggap tabu, alhamdulillah kini sudah mungkin diungkapkan. Dalam hal itu, buku ini sebenarnya juga layak berjudul *Now It Can Be Told*.

Ketika saya memasuki usia 70 tahun, muncul dorongan untuk berbagi kepada mereka yang mungkin tertarik dan barangkali akan mendapat manfaat dari berbagai kesaksian saya tersebut. Banyak yang terdapat di buku ini merupakan penjelasan terhadap sejumlah pertanyaan yang selalu diajukan para mahasiswa saya tentang apa sebenarnya yang terjadi pada masa lalu dan mengapa terjadi demikian. Para mahasiswa saya dan anak-anak muda segenerasinya serta generasi yang akan datang ada-

lah pembaca yang saya bayangkan ketika mempersiapkan buku ini.

Sumber utama buku ini adalah pengamatan dan pengalaman. Catatan kesaksian ini dipersiapkan bertahun-tahun secara perlahan-lahan. Sejumlah wawancara—yang sebagian besar direkam—sudah mulai saya lakukan sejak pertengahan tahun delapan puluhan ketika secara berangsur, para pelaku politik dan militer Orde Baru mulai memasuki masa pensiun. Tatkala seorang tokoh memasuki masa pensiun, pada umumnya mereka tiba-tiba sadar tidak ingin pengalaman masa lalunya hilang begitu saja. Mereka ingin didengar, karena itu menulis memoar atau membuka diri diwawancarai. Kesempatan demikian menguntungkan saya. Dan saya manfaatkan dengan baik.

Karena kandungan buku ini sebagian ditulis sekian puluh tahun kemudian, demi lebih mendekati keakuratan, saya sering melengkapi ingatan dan catatan dengan bahan bacaan—utamanya memoar dan dokumen—di samping sejumlah wawancara baru. Untunglah mereka yang dulu berperan dalam kegiatan yang saya saksikan itu sebagian masih hidup. Umumnya mereka dengan senang hati membantu merekonstruksi ingatan saya sehingga kemudian merasa cukup percaya diri menulis kesaksian-kesaksian tersebut. Kepada setiap narasumber selalu saya sampaikan ketakutan saya membuat fitnah. Untuk maksud itulah, tulisan-tulisan dalam buku ini—harus saya umumkan—sebelum naik cetak, merupakan karya saya yang terbanyak dibaca oleh para tokoh yang pernah berperan pada masa lalu. Dengan catatan, tambahan, saran, dan koreksi, mereka semuanya, para tokoh itu, secara berjamaah telah berjasa menolong menghindarkan saya dari berbuat fitnah dan kecerobohan.

Dengan berkata demikian, saya tetap saja tidak bisa menjamin bahwa semua tulisan dalam buku ini pasti sudah bebas dari kecerobohan. Saya juga manusia biasa dengan segala kelemahan. Maka, seandainya Anda masih menemukan sesuatu yang mencurigakan sebagai berbau fitnah, percayalah itu semata akibat kecerobohan saya saja, bukan suatu kejahatan terencana.

Sayalah yang harus dipersalahkan untuk kecerobohan demikian. Bukan siapa-siapa.

Dorongan menulis kesaksian ini—antara lain—bersumber pada beratnya beban saya sebagai seorang yang karena penakut, tidak berani menulis secara terbuka apa saja yang saya ketahui dan saksikan pada masa Orde Baru dahulu. Sejak menulis disertasi tentang peran politik militer Indonesia, hingga jatuhnya rezim Soeharto—dalam keadaan cemas—saya selalu berdoa kepada Allah agar hamba-Nya yang pengecut ini dihadiahi kiranya kesehatan dan umur panjang supaya suatu kali mendapat peluang mengungkapkan apa yang sebenarnya saya alami dan saksikan pada masa itu. Alhamdulillah, kini sebagian besar yang dulu ditabukan sudah boleh dengan bebas dipercakapkan. Harapan saya semoga kesaksian penulis—yang sekarang mungkin tidak lagi terlalu baru, apalagi dramatis—yang terkumpul dalam buku ini bisa sedikit lebih memperkaya pengetahuan Anda tentang apa yang sebenarnya terjadi pada masa otoriter dulu.

Buku ini terbit pada usia saya yang ke-70. Semoga diterima Allah sebagai tanda syukur saya atas segala anugerah-Nya. Saya amat berterima kasih kepada segala macam rezeki yang dianugerahkan Allah kepada saya sekeluarga selama ini. Semoga aliran rezeki tersebut terus menyertai kami hingga tarikan napas yang terakhir. Kepada semua narasumber yang jumlahnya sangat banyak dan teman-teman yang mendukung usaha penulisan dan penerbitan buku ini, saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf—karena terlalu banyak—saya tidak bisa menyebut nama mereka satu per satu. Harapan dan doa saya, semoga Allah membalas kebaikan mereka semua.

Karena tulisan-tulisan dalam buku ini ditulis secara terpisah dan dalam rentang waktu yang panjang, beberapa pengulangan tidak mudah terhindarkan. Mohon pengertian dan maaf terhadap hal demikian.

Salim Said
Jakarta, Maret 2013

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kata Sambutan Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik dan menyampaikan penghargaan atas terbitnya buku karya Prof. Dr. Salim Said, berjudul *Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian Kesaksian* ini. Meskipun telah banyak buku yang ditulis oleh Pak Salim Said, tetapi buku yang ditulis bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahunnya yang ke-70 ini, tentu mempunyai makna dan nilai tersendiri.

Sebagai seorang sahabat, saya telah lama mengenal dan mempunyai kenangan tersendiri tentang Pak Salim Said. Itu semua berawal ketika pada suatu hari, pada tahun 1988, saya bersama dua orang teman seangkatan dalam pendidikan di Akademi Militer, yaitu Pak Sjamsul Ma'arif dan Pak Eddi Budianto (alm.), saat itu kami bertiga berpangkat Mayor, datang menemui Pak Salim Said. Kedatangan kami pada waktu itu adalah atas arahan Bapak Letjen TNI (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo, Gubernur dan Guru kami di Akademi Militer dan juga mertua saya. Tujuannya agar kami dapat berbincang dan berdiskusi dengan Pak Salim Said, untuk menambah wawasan, baik di bidang militer maupun

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

bidang-bidang lainnya. Sejak saat itulah, saya mulai mengenal lebih dekat dan bersahabat dengan Pak Salim Said.

Di kalangan militer, banyak yang mengenal Pak Salim Said sebagai pengamat militer, tetapi saya sendiri melihatnya lebih dari itu. Atensi dan sifat kritisnya dalam melihat dan memandang berbagai masalah, ditambah profesi awalnya sebagai seorang aktivis dan jurnalis, menjadikannya sebagai sosok pengamat yang tajam dan produktif, tidak hanya di bidang militer, tetapi juga dalam berbagai masalah kenegaraan lainnya. Beliau juga seorang budayawan, guru, dan dosen yang baik dalam bidang-bidang tersebut, khususnya di bidang politik dan militer. Oleh karena itu, meskipun jiwa aktivis dan jurnalisnya selalu melekat pada diri Pak Salim Said, tetapi dunia akademis tidak pernah ditinggalkannya.

Dalam bukunya *Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian Kesaksian* ini, jelas tergambar bahwa kepedulian, keseriusan, dan ketajaman Pak Salim Said dalam mencermati dan mengkritisi persoalan-persoalan militer, politik, juga sosial budaya, menjadikannya kaya memori, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat berharga. Banyak informasi penting yang ditulis dalam buku ini, yang selama ini belum banyak diketahui orang. Banyak pula cerita di balik berita yang berguna dalam mencerahkan pengetahuan pembaca.

Seperti yang terbaca dalam buku ini, ada saatnya Pak Salim Said harus berhadapan dengan berbagai macam kekuatan. Karena sikap, tampilan, dan ungkapan-ungkapan kritisnya, sering menjadikannya harus berhadapan dengan kalangan birokrasi atau kekuasaan, kekuatan sosial, politik, dan kekuatan-kekuatan lainnya. Ini semua terjadi karena memang ada sesuatu nilai yang

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

selalu dibawa dan diperjuangkannya. Terlebih di era yang sistemnya menempatkan sebuah kebebasan berpendapat sebagai barang yang mahal, maka benturan dan konsekuensi sebuah pemikiran kritis memiliki tantangannya sendiri.

Namun, cara berpikir dan bersikapnya yang tidak sekadar partisan dan jangkauannya yang bukan hanya untuk kepentingan sesaat, disertai dengan kesungguhan dan ketulusan dedikatifnya, menjadikan pemikiran dan pandangan Pak Salim Said bukan saja menarik bagi teman yang sehaluan, melainkan juga bagi mereka yang berseberangan sekalipun. Di balik "keteguhan sikap" yang bersumber pada rasa cinta akan kebenaran demi kepentingan bangsa yang lebih besar, tersimpan kekuatan keluwesan berkomunikasi dengan siapa pun yang memiliki komitmen yang sama. Perbedaan posisi dan jalan pengabdian tidak pernah menghalangi Pak Salim Said untuk melakukan komunikasi seperti itu. Pak Salim Said mampu menembus sekat-sekat komunikasi dengan berbagai tokoh pelaku sejarah perjalanan panjang bangsa ini, seraya tetap memegang teguh prinsip dan sikapnya itu.

Catatan dari pencermatan, komunikasi, diskusi, dan perdebatan dengan tokoh-tokoh pelaku sejarah perjalanan bangsa yang dituangkan dalam tulisan ini, telah menjadikan bukunya menarik untuk dibaca. Sebuah referensi historis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang cukup lengkap. Meskipun referensi historis tidak jarang membawa serta sisi subjektivitas penulisnya, tetapi dari sana pula saya berkeyakinan pembaca akan memperoleh kekayaan pengetahuan dan wawasan yang berharga.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Melalui kata sambutan ini, saya juga ingin mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-70 kepada Prof. Dr. Salim Said, serta sekali lagi selamat atas penerbitan buku *Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian Kesaksian* ini. Semoga bermanfaat bagi para pembaca, serta dapat menjadi tambahan referensi yang sangat berguna bagi siapa pun yang ingin terus ikut memajukan bangsa dan negaranya.

Akhirnya, semoga Allah Swt. senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita bersama, dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta.

Terima kasih,
***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.**

Jakarta, September 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Isi Buku

Gestapu: Dari Daulat ke Pembantaian

Dengan sepeda tua, saya tiba di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jumat pagi, satu Oktober kala itu. Kampus kami terletak di Jalan Diponegoro, persis di depan Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo. Jaraknya hanya sekitar dua kilometer dari pondokan saya di Jalan Matraman Raya. Gedung yang dipakai oleh Fakultas Psikologi itu adalah milik Persatuan Sekolah Kristen Djakarta (PSKD). Fakultas Sastra terlebih dahulu telah mempergunakan ruangan-ruangan tersebut, sebelum fakultas yang kini bernama Fakultas Ilmu Budaya itu dipindahkan ke Rawamangun untuk akhirnya menempati lokasi permanennya di Depok.

Masa itu adalah hari-hari perpeloncoan bagi mahasiswa baru. Tidak ada kuliah, dan para senior umumnya bersenang-senang saja. Sebagai reporter muda, saya tidak punya kesempatan bersenang-senang. Harus terus bekerja. Pada 30 September hingga larut malam, misalnya, saya meliput pengajian di kediaman resmi Panglima Angkatan Laut (sekarang bernama Wisma Elang Laut), Laksamana Madya TNI R. Eddy Martadinata, yang terletak di Jalan Diponegoro. *Deadline* kami malam itu agak terlambat sebab menanti selesainya pidato Presiden pada acara Musyawarah Nasional Teknik (Munastek) di Gelora Bung Karno, Senayan.

Seperti biasa, pidato Presiden/Pemimpin Besar Revolusi selalu berlangsung lama. Saya pulang dari kantor lepas tengah malam dan dalam perjalanan pulang masih sempat membeli nasi bungkus untuk makan malam saya di sebuah restoran Minang di Pasar Senen. Terlambat tidur, esok paginya bangun kesiangan. Dan karena tidak punya radio, saya tidak tahu perkembangan politik terakhir sebelum meninggalkan kamar pondokan di Jalan Matraman Raya 51.

Belum lagi turun dari sepeda, seorang teman yang berdiri di halaman depan fakultas berteriak kepada saya, “Lim, *babe*-nya Rully diculik. Katanya, agen CIA.” Rully adalah putri Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat waktu itu. Putri Jenderal Yani itu adalah mahasiswi yang berada setahun di belakang saya. Yani diculik dan dituduh agen CIA? Ini segera mengingatkan saya pada desas-desus beberapa waktu sebelumnya tentang “Dewan Jenderal” yang menurut PKI, dengan bantuan CIA akan melakukan kudeta.

Tidak jadi masuk ke halaman tempat para plonco (Cama dan Cami, panggilan mereka waktu itu) berkumpul, saya langsung mengayuh sepeda ke rumah Wiratmo Sukito di Jalan Cilosari 37, Cikini. Pondokan Wiratmo itu adalah tempat kami—seniman, cendekiawan, budayawan, dan aktivis—sering berkumpul dan mendiskusikan perkembangan politik dan budaya. Sebelum meninggalkan halaman fakultas, saya berpapasan dengan Imam Waluyo, seorang aktivis yang dekat dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang sudah dibubarkan Presiden Sukarno pada 1960. “Lim, Sukarno sekarang ada di Halim,” kira-kira begitu katanya sambil berlalu. Halim Perdanakusuma adalah nama Pangkalan Angkatan Udara yang terletak di daerah Cililitan, Jakarta Timur.

Tiba di rumah Wiratmo Sukito, jam dinding (saya belum punya arloji waktu itu) menunjukkan waktu menjelang pukul 11 siang. Wiratmo bersiap berangkat. Katanya ke gereja. Sebagai seorang penganut Katolik yang taat—sebelum akhirnya, pindah kembali ke Islam ketika kawin dengan seorang hakim agung—Wiratmo memang rajin ke gereja. Nanti ketika kembali beragama Islam, Wiratmo juga rajin bersembahyang di masjid. “Ini pekerjaan PKI,” kata Wiratmo, sambil bergegas pergi.

Saya melanjutkan mengayuh sepeda ke Jalan Diponegoro 54, rumah Brigjen TNI Soegandhi. Jenderal yang lama mendampingi Presiden Sukarno sebagai Ajudan Senior itu adalah Direktur Penerangan Staf Angkatan Bersenjata (SAB) yang juga pemimpin umum koran *Angkatan Bersenjata*, tempat saya bekerja sebagai reporter pemula. Jarak antara pondokan Wiratmo dan rumah

Soegandhi sekitar satu kilometer. Soegandhi dikenal sebagai perwira tinggi yang memperkenalkan singkatan **Gestapu** untuk Gerakan 30 September.

Sebelum saya datang, beberapa pegawai SAB sudah menunggu di sana. Tidak lama kemudian, tuan rumah muncul. Soegandhi baru saja pulang dari rumah beberapa jenderal yang jadi korban pembantaian pagi itu. Dia bercerita mengenai darah yang masih berceceran di rumah-rumah para koleganya yang dibantai menjelang subuh. Mengingat ketegangan antara PKI dan kaum anti-Komunis, terutama dengan Angkatan Darat, yang hari-hari itu memang makin memuncak, tidak sulit bagi kami pagi hari itu untuk dengan cepat berkesimpulan, PKI-lah yang berada di balik peristiwa berdarah tersebut.

Salim Said bersama Brigjen TNI Soegandhi dalam penerbangan ke Manado, 1969.

Hari itu hari Jumat, tapi tidak ada lagi di antara kami yang ingat sembahyang Jumat. Bersama Soegandhi beramai-ramai kami berangkat ke Markas Kostrad, di Jalan Merdeka Timur. Mengapa ke Kostrad? Pada mulanya saya juga tidak tahu. Pokoknya ikut saja. Tapi, tampaknya Soegandhi sudah dapat informasi tentang kegiatan di Kostrad. Nama Mayor Jenderal TNI Soeharto, Panglima Kostrad (Pangkostrad) waktu itu, hampir tidak dikenal masyarakat. Tapi, karena saya pernah membaca komik tentang Serangan Umum Yogyakarta di bawah pimpinan Overeste [Letkol, bahasa Belanda] Soeharto, jadi saya tahu siapa Panglima Kostrad tersebut.

MARKAS KOSTRAD BELUM BEGITU RAMAI menjelang tengah hari itu ketika kami tiba. Usaha menarik tentara yang dikerahkan Gestapu di lapangan Monumen Nasional (Monas) masih sedang dilakukan. Saya melihat banyak perwira yang berseliweran de-

ngan pakaian sipil. Salah seorang yang saya ingat adalah Kolonel Polisi Militer (CPM) Cokropranolo (kelak Letnan Jenderal dan sempat menjadi Kepala Intel Hankam, Sekretaris Militer Presiden, dan akhirnya Gubernur Jakarta).

Saya jumpa lagi dengan Cokropranolo di Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) pada 1969. Waktu itu dia sudah berpangkat Brigjen dan menjadi Kepala Intel Hankam. Suatu hari saya harus ikut tes bebas Gestapu sebagai syarat mendapat izin berangkat ke Negeri Belanda. Jenderal Cokro melihat saya dan bertanya, "Ada apa *you* di sini?" Ikut tes bebas Gestapu, jawab saya. "Ah, *you*, kan tidak terlibat Gestapu. Tidak usah ikut tes. Sampaikan kepada tukang tes, Pak Nolly bilang *you* tidak usah dites." Begitulah awal ceritanya mengapa sampai Orde Baru jatuh, saya tidak pernah ikut tes bebas Gestapu.

Rupanya, Pak Nolly, panggilan akrab Cokropranolo, melihat saya ikut mondar-mandir di Kostrad pada satu Oktober itu. Sekian tahun kemudian, pada Juni 1970, ketika Bung Karno meninggal dan jasadnya disemayamkan di Wisma Yaso (Museum Satria Mandala sekarang), saya terhindar dari kewajiban antre bersama orang banyak yang datang melihat jenazah. Di sana yang bertugas adalah Pak Nolly, Sekretaris Militer Presiden, dan saya dipersilakan masuk lewat jalur VIP. Sebagai wartawan, kesempatan itu saya manfaatkan memotret jenazah Bung Karno dari jarak dekat.

SUASANA DI KOSTRAD TEGANG. Sebagian besar yang ada di sana siang itu hampir sepakat bahwa penculikan dan pembunuhan para jenderal adalah pekerjaan PKI. Tapi, bagaimana persisnya? Belum jelas. Yang saya ingat, timbul juga kecurigaan kepada Angkatan Udara, yang pimpinannya memang diketahui punya hubungan baik dengan PKI. Pimpinan Angkatan Udara secara terang-terangan mendukung Nasakom serta mengajarkan Marxisme di balai pendidikan tinggi mereka. Kecurigaan makin menjadi-jadi karena lewat radio, Panglima Angkatan Udara, Laksamana Madya Udara (sekarang Marsekal Madya) Omar Dani, mengumumkan

dukungannya kepada gerakan "pembersihan revolusioner" yang dilakukan Gestapu terhadap pimpinan Angkatan Darat.

SAYA BERUMUR 22 TAHUN ketika peristiwa itu terjadi dan sudah dua tahun menjadi penduduk Jakarta. Hidup amat sulit waktu itu. Inflasi mengamuk dengan dahsyat dan barang-barang sulit ditemukan di pasar. Harga keperluan sehari-hari berubah dan beranjak mahal setiap harinya. Kualitas barang di pasar amat buruk. Sebagai contoh, mandi dengan sabun *Brisk* keluaran Unilever—sabun produksi dalam negeri terbaik waktu itu—menyebabkan kulit jadi bersisik segera setelah badan dikeringkan. Obat-obatan, terutama antibiotik, harus diperoleh di pasar gelap. Dengan harga mahal, tentu saja. Saya pernah ikut "ngobjek" jual obat bersama dr. Abdul Gafur (kemudian menjadi Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olahraga pada masa Orde Baru) dengan keuntungan tipis. Waktu itu, untuk *survive*, sebagian besar orang memang terpaksa terlibat "ngobjek", kata lain dari *nyatut*.

Untuk menambah sedikit uang di saku, sebelum bekerja sebagai wartawan, saya bekerja paruh waktu di sebuah toko sandang pangan yang menyalurkan beras murah dan minyak tanah kepada penduduk. Toko-toko sandang pangan bisa ditemukan di mana-mana waktu itu. Untuk membeli beras murah dengan kualitas rendah tersebut, orang harus mendapat kartu dari kelurahan. Sebagai penjaga toko sandang pangan, saya dibayar dengan beberapa liter beras. Pada malam harinya, setiap akan makan, sebagian dari beras murah itu saya tukarkan dengan nasi uduk yang penjualnya mangkal di pinggir jalan.

Kendati dengan segala kesulitan hidup demikian, saya dan teman-teman selalu dengan saksama mengikuti perkembangan politik dan secara teratur mendiskusikannya di rumah pondokan Wiratmo. Selain hampir tiap hari mendengarkan pidato Presiden Sukarno yang sama sekali tidak berhubungan dengan kondisi ekonomi yang makin memburuk, dengan uang yang amat terbatas kami juga secara bersama selalu mencari dan membeli koran-koran yang pada umumnya sudah dikuasai PKI dan kekuatan kiri

lainnya. Sebagai seniman, setiap hari Sabtu kami "wajib" membeli koran *Bintang Timur* yang mempunyai rubrik kebudayaan *Lentera* asuhan Pramoedya Ananta Toer.

Pramoedya Membabat

Rubrik pada koran milik Partindo (Partai Indonesia) itu adalah lembaran budaya yang mengkhususkan diri "membabat" (istilah yang diperkenalkan Pramoedya) para seniman, budayawan, serta karya-karya seni dan budaya yang dituduh oleh Pramoedya sebagai "kontrarevolusioner dan antek Nekolim". Anehnya pula serangan keras kepada musuh-musuh Komunis dan kaum kiri itu tidak selalu mudah ditemukan pada koran serta media-media yang secara resmi diterbitkan oleh PKI sendiri. Saya menduga waktu itu memang ada pembagian tugas. Serangan yang masih agak beradab dilancarkan dari media yang diterbitkan sendiri oleh PKI, sementara yang kasar dan brutal menjadi pekerjaan harian *Bintang Timur* terutama lewat lampiran *Lentera*. Partindo disusupi PKI atau Partindo hanya sejalan dengan PKI? Tidak jelas buat kami waktu itu. Setelah **Manifes Kebudayaan**—pernyataan sikap budaya para seniman dan budayawan non-Komunis—dilarang oleh Sukarno pada 1964 dan para pendukungnya jadi sasaran pengganyangan PKI, lampiran kebudayaan di koran Partindo itu secara teratur juga memuat nama dan alamat para penandatangan Manifes Kebudayaan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dengan alamat di tangan, para pemuda Komunis dengan mudah melancarkan teror kepada seniman-seniman yang mereka juluki sebagai pengikut "Manikebu" itu.

Salim Said mewawancarai Pramoedya Ananta Toer di Pulau Buru, 1977.

Makin mendekati operasi Gestapu, makin galak saja "pembabatan" yang dipimpin oleh Pramoedya. Tokoh-tokoh seperti Hamka adalah salah satu target Pramoedya. Kelak, pada Desember 1977, saya berkesempatan mewawancarai Pramoedya di Pulau Buru. Tidak mengaku sebagai Komunis, meski pernah menjadi petinggi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang merupakan organisasi kebudayaan PKI, kepada saya Pramoedya menjelaskan latar belakang pemakaian bahasa kasar dan brutal kepada lawan-lawan Komunis itu seperti berikut ini:

> Karena saya kecewa terhadap hasil Revolusi. Dalam menulis sastra, saya berhadapan dengan diri saya sendiri, dalam menulis artikel saya berhadapan dengan dunia. Berbeda. Saya mengharapkan yang lebih baik dan lebih cepat kepada dunia ini. Mungkin itu yang menyebabkan bahasanya jadi kasar.

Namun, menurut catatan penyair Taufiq Ismail,

> Agresi Pram itu searah-seirama dengan geladi resik PKI mencobakan jurus-jurus pukulan politik dan fisik bertarung melawan kekuatan anti-PKI di seluruh bidang politik, ekonomi, buruh, tani, pemuda, mahasiswa, seni budaya, sebagai latihan menuju perebutan kekuasaan Kudeta 1 Oktober 1965.

Fenomena Pramoedya yang sibuk "membabat" dan senantiasa menggunakan bahasa kasar dan keras kepada musuh-musuh politik PKI di samping berbagai aksi politik PKI yang makin lama makin berani, adalah bagian dari latar belakang yang menjadi dasar bagi kami pada satu Oktober 1965 untuk tidak terlalu terkejut dengan kejadian dramatis pagi hari itu. Dari bacaan, informasi, dan diskusi kami yang sering berkumpul di pondokan Wiratmo Sukito yang punya hubungan luas dengan gerakan-gerakan anti-Komunis di kalangan sipil maupun militer, kami sudah cukup lama berkesimpulan bahwa pada akhirnya bakal datang hari ketika PKI akan bentrok dengan Angkatan Darat. Bentrok pasti tak terhindarkan. Tapi, kapan? Cuma itulah pertanyaannya waktu itu. Ya, kapan?

Berita tentang sakitnya Bung Karno sudah kami dengar pada awal Agustus 1965, bahkan secara terbatas beredar cerita sang Presiden akan dirawat di Rumah Sakit Katolik St. Carolus yang terletak di Jalan Salemba Raya. Lebih dramatis lagi disebutkan bahwa Sukarno bakal membacakan pidato 17 Agustus 1965 dari rumah sakit tersebut. Selain ketegangan politik yang makin menjadi-jadi antara PKI dan golongan anti-Komunis menjelang tragedi berdarah itu, seingat saya ada dua informasi lain yang kemudian ikut mendorong kami lebih cepat mencurigai PKI berada di balik Gestapu.

Pertama adalah informasi dari teman kami, Zainal Zakse, tentang rencana PKI merayakan ulang tahun Peristiwa Madiun. Pada perayaan yang PKI rencanakan berlangsung pada 30 September, menurut informasi Zakse, orang-orang Komunis itu "akan mengarak foto-foto para jenderal yang mereka tuduh sebagai jenderal korup dan kapitalis birokrat". Teman kami itu adalah mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan anggota Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos). Dia berasal dari Medan dan rupanya tetap memelihara hubungan baiknya dengan teman-teman sedaerah yang aktif di Lekra, organisasi kebudayaan PKI itu.

Markas Lekra terletak di Jalan Cidurian 19, tidak jauh dari rumah Wiratmo yang terletak di Jalan Cilosari 37, Cikini. Kantor pusat Lekra itu juga berdekatan dengan Mes Cakrabirawa yang terletak di Jalan Cidurian 15. Letkol Untung Samsuri, Komandan Gestapu, kabarnya tinggal di mes tersebut. Kalau orang-orang Lekra itu malam-malam berjalan mencari kopi dan ketan bakar di Gang Ampiun, mereka harus melewati rumah Wiratmo. Kami sering melihat mereka, bahkan kadang berpapasan, tapi tidak saling menegur.

Cerita Zakse waktu itu kami tafsirkan sebagai bagian dari makin meningkatnya aksi ofensif-revolusioner PKI yang sejak lama memang telah mereka lancarkan. Lama setelah Gestapu, saya mendapat informasi bahwa kontak Zakse di dalam Lekra adalah Prof. Bakri Siregar, sastrawan terkemuka Lekra. Zakse konon pernah menjadi murid kesayangan Bakri Siregar ketika masih belajar

di SMA di Medan. Beberapa tahun setelah Gestapu, saya pernah melihat Bakri berjalan dengan santai melintas di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Waktu itu hampir semua temannya sudah berada dalam tahanan. Sengaja dilepas untuk diikuti atau memang dia adalah orang yang ditanam militer dalam Lekra? *Wallahu a'lam*.

Yang *kedua* adalah taklimat (*briefing*) dari Brigadir Jenderal TNI Soegandhi, selaku Direktur Penerangan Staf Angkatan Bersenjata (SAB). Kepada kami, para wartawan dan para stafnya, secara teratur Soegandhi memang selalu memberi taklimat politik. Biasanya dua pekan sekali. Taklimat yang saya anggap paling penting ini adalah yang diadakan beberapa hari sebelum Gestapu beraksi. "PKI sekarang sedang mempropagandakan bahwa ada Dewan Jenderal di Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta," kata Soegandhi. "Dewan Jenderal ini, menurut PKI, bekerja sama dengan CIA untuk menggulingkan Bung Karno."

"Kau Sudah Dicekoki Nasution."

Pada 30 September siang, saya jumpa dengan atasan saya itu di kantornya di Merdeka Barat—kantor Kementerian Pertahanan sekarang. Soegandhi menceritakan dengan nada sedih bahwa beliau pagi itu menemui mantan bosnya itu di Istana Merdeka untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang disebut "Dewan Jenderal" dalam Angkatan Darat. Soegandhi juga mencoba meyakinkan Sukarno bahwa Jenderal Yani itu sangat loyal kepadanya dan bahwa Aidit itu sedang merencanakan perebutan kekuasaan. "Gandhi, kau tau apa? Kau sudah dicekoki Nasution," kata Sukarno dengan marah sambil membentak dan mengusir mantan ajudannya itu, sebagaimana yang diceritakan Soegandhi kepada saya siang itu. Di kemudian hari, baru kami tahu bahwa sebelum mendatangi Sukarno di Istana Merdeka, Soegandhi juga telah mengunjungi Jenderal Yani untuk menyampaikan informasi bahwa PKI akan melakukan kudeta. Dengan alasan yang berbeda, Sukarno dan Yani menyepelekan informasi Soegandhi. Informasi

Menkohankam KASAB A.H. Nasution bersama tokoh-tokoh Nasakom, Ketua PNI Ali Sastroamidjojo, Ketua NU Idham Chalid, dan Ketua PKI D.N. Aidit, Jakarta, 1963.

yang demikian kabarnya memang sudah beberapa kali, oleh beberapa orang, disampaikan kepada Yani. Bukannya meningkatkan kewaspadaan, Yani malah memulangkan tambahan pasukan yang diperbantukan kepada pengawal tetap yang menjaga kediamannya.

Pada taklimat-taklimat sebelumnya, soal autentik-palsunya *Dokumen Gilchrist* telah pula jadi bahan taklimat dan pembicaraan. Dalam dokumen yang menggunakan kertas surat Kedutaan Besar Inggris di Jakarta itu, disebut adanya *our local army friends*, artinya ada kolaborator dalam Angkatan Darat Indonesia yang merupakan antek Inggris/Barat. Di kemudian hari terungkap bahwa yang membuat dokumen itu adalah Ladislav Bittman, seorang intel Cekoslowakia yang bekerja untuk dinas rahasia Uni Soviet, KGB. Di kemudian hari, Bittman membelot ke Amerika Serikat dan membongkar semua yang telah dilakukannya untuk KGB. Termasuk memalsukan dokumen yang populer disebut sebagai *Dokumen Gilchrist* itu.

Adapun ketegangan antara Sukarno dan Angkatan Darat, kemudian kita tahu lebih terperinci setelah Rosihan Anwar menerbitkan bukunya, *Sebelum Prahara*, yang merupakan catatan harian wartawan senior itu selama masa Demokrasi Terpimpin. Kegiatan menulis catatan harian itu dimulai Rosihan tak berselang lama setelah korannya, *Pedoman*, ditutup Sukarno. Melalui jaringan lama Partai Sosialis Indonesia serta pertemanan masa sekolah di Yogyakarta pada tahun-tahun terakhir penjajahan Belanda, Rosihan mendapatkan banyak informasi politik pada masa tegang tersebut dari beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Semua

dicatatnya dengan rapi setiap harinya. Menurut Rosihan kepada saya, salah satu sumber informasinya adalah Brigjen TNI M.T. Haryono, mantan teman sekolah Rosihan di Yogyakarta sebelum invasi Jepang. M.T. Haryono kemudian terkenal sebagai salah seorang Pahlawan Revolusi setelah dibantai Gestapu pada satu Oktober pagi.

SEMENTARA ITU, DARI JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR sejak tahun 1962 makin banyak saja cerita mengenai ketegangan yang melanda hubungan golongan santri dan kaum Marhaenis, di satu pihak, dan PKI di pihak lain. Konflik, bahkan bentrok fisik terjadi sebagai akibat aksi sepihak Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi tani PKI. Bentrok menyiratkan makin meningkatnya kepercayaan diri yang pada gilirannya memicu agresivitas PKI. Selain pembantaian terhadap Pembantu Letnan Satu (Peltu) Sudjono di Sumatra Utara (dikenal sebagai *Peristiwa Bandar Betsy*) oleh anggota-anggota BTI; di Kanigoro, Jawa Timur, suatu acara pelatihan kader Pemuda Islam Indonesia (PII) diserang secara fisik oleh pemuda-pemuda Komunis.

Pada pagi buta 15 Januari 1965, tatkala para peserta pelatihan sedang bersiap-siap melakukan sembahyang Subuh di masjid, orang-orang Komunis itu secara mendadak menyerang mereka. Selain secara fisik menganiaya kader-kader PII itu, Kitab Suci Al-Quran juga mereka injak-injak. Aksi yang menistakan Al-Quran ini memicu kemarahan para kiai di hampir semua pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nanti setelah Gestapu, para santri dari berbagai pesantren tersebut kabarnya banyak yang ikut memainkan peran dalam pembantaian orang-orang Komunis.

Dalam gerakan aksi sepihak BTI, salah satu yang menjadi sasaran adalah tanah-tanah milik pesantren (umumnya tanah wakaf) selain milik tokoh-tokoh Marhaenis. Yang juga jadi sasaran PKI dan ormas-ormasnya adalah agama pada umumnya. Di Jawa Tengah, misalnya, **Bakoksi** (Badan Koordinasi Ketoprak Seluruh Indonesia), grup ketoprak yang berafiliasi ke Lekra, berkeliling memainkan lakon “Matine Gusti Allah”, artinya matinya Tuhan

Allah. Orang Katolik juga jadi sasaran. Anggota Bakoksi juga memainkan lakon "Paus Rabi" yang mengisahkan Paus kawin. Pertunjukan wayang kulit juga menjadi media mereka untuk mengejek agama Islam. Pada titik inilah barangkali bisa dikatakan terjadinya persinggungan antara visi Komunis terhadap agama, dan sikap orang-orang abangan yang pada dasarnya risi terhadap kaum santri.

Sebagai reaksi terhadap pelecehan agama dan gerakan aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI, di Jawa Tengah dan Jawa Timur berkali-kali terjadi bentrokan fisik antara BTI melawan kaum nasionalis dan orang-orang pesantren. Di Jakarta, hubungan PNI dengan PKI boleh mesra-mesraan, tapi di pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur pengikut mereka, jauh sebelum Gestapu, sudah saling menyerang secara fisik. Menurut pengakuan pimpinan BTI Jawa Timur, sebagaimana yang dikutip Prof. Aminuddin Kasdi dalam bukunya, *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*, antara 17 Agustus 1964 hingga Januari 1965, empat kader PKI/BTI terbunuh, 43 petani "revolusioner" luka-luka, 409 kader ditahan, 50 hektar tanaman hancur, dan 13 rumah anggota BTI dirusak. Sayang, koran yang menjadi sumber tulisan Profesor Aminuddin tidak mencatat jumlah korban lawan-lawan PKI waktu itu.

Bersamaan dengan ketegangan di pedalaman tersebut, di Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya, hampir tiada hari terlewatkan oleh orang-orang Komunis dan golongan kiri lainnya tanpa berdemo menuntut pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), pengganyangan Manifes Kebudayaan (disingkat "Manikebu" oleh PKI), pembersihan para kapitalis birokrat (maksudnya para jenderal Angkatan Darat, terutama yang duduk dalam pimpinan perusahaan negara bekas milik Belanda), di samping pengganyangan Malaysia. Kedutaan Malaya, Kedutaan Amerika Serikat, Perpustakaan United States Information Service (USIS), dan Kedutaan Inggris (berhasil dibakar pada 18 September 1963), serta apa saja yang mereka anggap sebagai antek-

antek neokolonialisme/imperialisme (Nekolim), semua jadi sasaran demonstrasi.

Pada hari-hari menjelang Gestapu, sasaran terpenting pengganyangan PKI adalah HMI, organisasi mahasiswa terbesar waktu itu. "Kalau tidak bisa membubarkan HMI, pakai sarung saja," kata Aidit menghasut para anggota CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia), organisasi mahasiswa Komunis, dalam pidatonya di Istora Senayan beberapa hari sebelum Gestapu. Kalau HMI berhasil mereka bubarkan, maka organisasi-organisasi independen lainnya bukan soal serius lagi bagi PKI menghancurkannya. Menyadari taktik PKI tersebut, tentara dan kekuatan anti-Komunis lainnya bersama-sama melindungi HMI. Sukarno tidak sampai membubarkan HMI, tampaknya karena tidak ingin melihat rusaknya keseimbangan kekuatan antara PKI dan kekuatan-kekuatan anti-Komunis, terutama Angkatan Darat.

SEMENTARA ITU, HAMPIR SEMUA KORAN dan media massa sudah dikuasai PKI bersama kekuatan kiri lainnya. Sebagian terbesar berita yang tersaji adalah kabar mengenai kegiatan pengganyangan yang dilakukan PKI terhadap kekuatan-kekuatan yang mereka sebut sebagai kaum "kontrarevolusioner". Koran-koran yang tidak sejalan dengan garis PKI sebagian besar telah berhasil mereka kuburkan. Tentu saja dengan menggunakan tangan Sukarno. Kantor berita **Antara** yang memainkan peran sebagai sumber berita bagi media-media yang belum sanggup memelihara koresponden di berbagai tempat, juga berhasil dikuasai PKI setelah menyingkirkan tokoh-tokoh senior yang bersama Adam Malik dulu merintis pembentukan kantor berita tersebut. Abdul Hakim, ayah Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim dan Rahmat Nasution, ayah pengacara terkenal Adnan Buyung Nasution (Abang Buyung) adalah dua dari pimpinan lama Antara yang ditendang keluar oleh PKI. Djawoto yang PKI didapuk memimpin kantor berita nasional tersebut. Memimpin Antara untuk waktu singkat, Djawoto lalu dikirim Sukarno ke Beijing sebagai duta besar. Kemu-

dian tercatat, Djawoto tidak pernah kembali ke Indonesia. Kabarnya dia meninggal dalam pelarian dan berkubur di Paris.

Membunuh Sukarno dengan Sukarnoisme

Puncak penghancuran kekuatan anti-Komunis di kalangan media terjadi ketika, atas tekanan PKI dan golongan kiri lainnya, Sukarno membubarkan **Badan Pembela Sukarnoisme** (BPS). Kegiatan BPS adalah menyebarluaskan ajaran-ajaran Bung Karno sebagai usaha membendung kampanye politik dan ideologi PKI. Sejumlah besar koran memuat seri tulisan Sayuti Melik—dikenal sebagai murid politik Bung Karno sejak zaman Pergerakan Nasional—mengenai ajaran Bung Karno tersebut. BPS dituduh oleh PKI "membunuh Sukarno dengan Sukarnoisme". Anehnya, Presiden Sukarno sepakat dengan tuduhan PKI. BPS bukan saja dibubarkan, sebagian besar koran yang pernah memuat seri tulisan Sayuti Melik juga diberangus. Pengangguran wartawan secara besar-besaran terjadi.

Pada waktu yang sama, sebagai hasil aksi ofensif-revolusioner kaum Komunis, sejumlah universitas juga telah berhasil mereka bersihkan dari para pengajar, dosen, dan profesor yang tidak berhasil mereka "jinakkan". Para profesor ekonomi di Universitas Gadjah Mada, misalnya, dicap Sukarno sebagai "textbook thinking" yang tidak mengerti revolusi. Mereka bahkan dituduh reaksioner. Dalam posisi demikian, para profesor itu lalu dengan mudah menjadi sasaran empuk pengganyangan para mahasiswa kiri di Gadjah Mada.

Dalam bidang kebudayaan, sebagai akibat pelarangan Manifes Kebudayaan, misalnya, dosen dan kritikus sastra terkemuka Indonesia, Dr. H.B. Jassin, terusir dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Yang juga jadi korban adalah Taufiq Ismail. Sebagai dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), rencana keberangkatan Taufiq melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat "ditunda" oleh rektor hanya beberapa hari sebelum keberangkatannya. "Keputusan penundaan, saya terima empat hari sebelum kami

direncanakan berangkat. Tiket, visa, dan semua dokumen sudah di tangan," kenang Taufiq Ismail, penyair terkenal dan salah seorang penanda tangan Manifes Kebudayaan.

Akibat tekanan bahkan pengejaran PKI dan kekuatan kiri lainnya, para seniman penanda tangan Manifes Kebudayaan, di Jakarta maupun di daerah-daerah, tidak bisa mengumumkan karya mereka dengan menggunakan nama sebenarnya. Saya ingat penyair dan penulis esai Goenawan Mohamad, penyair Taufiq Ismail, dan kolumnis budaya dan politik Wiratmo Sukito terpaksa menulis dengan menggunakan nama samaran. Buku-buku para seniman yang dituduh PKI sebagai Manikebuis dilarang beredar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang waktu itu dipimpin Prof. Dr. Priyono. Sejatinya Priyono adalah orang Murba, tapi langkah-langkahnya waktu itu sulit dibedakan dari orang-orang Komunis. Mungkin karena itu, dia mendapat bintang Stalin dari Moskow.

Masih di sekitar kegiatan budaya, saya tidak pernah lupa malam renungan Proklamasi yang diadakan para seniman Jakarta pada 16 Agustus 1965 di Gedung Balai Budaya, Jalan Gereja Theresia, Jakarta Pusat. Karena para seniman selalu menjadi sasaran serangan media-media Komunis dan Kiri lainnya, pada acara malam renungan tersebut mereka hadir sebagai peserta pasif saja. Acara pertunjukan diisi dengan suatu sandiwara anak-anak muda dari Menteng Dalam yang dibina oleh anak cabang **Lesbumi** (Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia) yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama.

Balai Budaya adalah satu dari hanya beberapa arena kesenian bermutu di Jakarta sebelum Gubernur Ali Sadikin membangun Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, pada 1968. Pada malam itu, para seniman senior Jakarta harus "menelan penghinaan" PKI dan kaum kiri lainnya yang memaksa mereka menerima suguhan pertunjukan yang sangat amatiran. Sandiwara yang dimainkan pada sebuah panggung darurat di depan Gedung Balai Budaya itu membawakan kisah berjudul "Cengkau". Cerita mengenai bahaya lintah darat itu dikarang dan dimainkan sendiri

oleh anak-anak muda tersebut. Di sekitar hari-hari itu juga, pelukis senior Zaini dan Trisno Sumardjo—keduanya penanda tangan Manifes Kebudayaan—memberanikan diri mengadakan pameran lukisan di Balai Budaya. Pameran tidak bisa berlangsung tenang sebab batu-batu, yang entah dilemparkan dari arah mana dan oleh siapa, berjatuhan di atap seng gedung pameran. Waktu itu yang dicurigai melemparkan batu-batu tersebut adalah para anggota Pemuda Rakyat.

Sebelum pembersihan kaum yang dilecehkan oleh golongan kiri sebagai "Manikebu", pada 1962 Prof. Mochtar Kusumaatmadja sudah terlebih dulu disingkirkan oleh Presiden Sukarno. Profesor yang kelak beberapa kali menjadi menteri pada kabinet Soeharto itu dipecat hanya karena tuduhan dan hasutan dari para mahasiswa kiri di Universitas Padjadjaran (Unpad) tempat Prof. Mochtar mengajar. Mochtar dituduh melecehkan Presiden Sukarno dan juru bicara Manipol-Usdek, Dr. Ruslan Abdulgani. Banyak saksi di Fakultas Hukum Unpad yang membantah Mochtar mengucapkan apa yang difitnahkan kepadanya. Tapi karena tekanan golongan kiri begitu hebat, Sukarno yang waktu itu berada di Tokyo, tidak menunggu untuk balik ke Jakarta sebelum memerintahkan pemecatan Mochtar.

SEMENTARA PENERBITAN legal dari pihak anti dan non-Komunis dilarang, di dalam masyarakat beredar luas pamflet-pamflet anti-Komunis yang waktu itu tidak jelas dari mana sumbernya. Pamflet-pamflet anti-Komunis itu secara dramatis mengisahkan tindakan kejam penguasa Komunis di Uni Soviet, Eropa Timur, dan Tiongkok terhadap lawan-lawan politik mereka. Kisah pembantaian oleh Stalin serta pembuangan lawan-lawan politiknya ke Siberia digambarkan dengan jelas dalam pamflet-pamflet tersebut.

Bacaan anti-Komunis ini sebenarnya sudah beredar sejak awal Orde Lama, yakni ketika Sukarno sudah terlihat melindungi PKI dengan memperkenalkan doktrin Nasakom. Tapi, arus deras penerbitan anti-Komunis menjadi-jadi terutama sejak awal 1965.

Seperti mengantisipasi bakal datangnya gerakan berdarah kaum Komunis, bacaan-bacaan yang tidak pernah jelas sumbernya itu berperan besar dan amat berhasil meningkatkan kewaspadaan, bahkan ketakutan masyarakat terhadap bahaya dan ancaman Komunisme.

Pater Beek, Pastor Jesuit

Pada masa menjelang Gestapu itulah juga untuk pertama kalinya saya mendengar nama Pater Beek, seorang pastor Jesuit keturunan Belanda, yang aktif dalam gerakan bawah tanah melawan Komunis. Menjelang Gestapu, saya mendengar dari Wiratmo Sukito bahwa Pater Beek melarikan diri ke Negeri Belanda karena dikejar oleh agen-agen intel Subandrio dari Badan Pusat Intelijen (BPI) Indonesia. Sebagai seorang Katolik, dan sama-sama melawan Komunis, Wiratmo memang mempunyai hubungan erat dengan Beek, bahkan besar kemungkinan bagian dari jaringan kegiatannya. Nama Pater tersebut beberapa kali saya dengar dari Wiratmo dalam hubungannya dengan kegiatan bawah tanah anti-Komunis waktu itu.

Di kemudian hari, Wiratmo Sukito menjelaskan bahwa Beek punya hubungan erat dengan CIA dan kontaknya di Hong Kong adalah Pater Laszlo Ladany, seorang pendeta Jesuit asal Hongaria yang bergiat dalam mengamati Tiongkok (*China Watcher*). Pater Beek ini juga, menurut Wiratmo di kemudian hari, merupakan salah seorang yang aktif membuat dan menyebarkan bacaan anti-Komunis tersebut. Selain berhubungan dengan Pater Beek, waktu itu Wiratmo Sukito juga banyak berhubungan dengan tentara, terutama dengan para perwira di sekitar Jenderal Nasution.

Nama Pater Beek ini kemudian di kalangan elite politik Indonesia sering menjadi bahan percakapan setelah Gestapu, yakni setelah bahaya Komunis berhasil dijauhkan dari Indonesia. Waktu itu, Beek konon melihat hari depan Indonesia menghadapi pilihan antara dua setan, setan kecil dan setan besar. Kedua setan berwarna hijau: hijau Islam dan hijau militer. Terhadap "dua ba-

haya hijau" tersebut, Brian May, wartawan *Agence France-Presse* (AFP), dalam bukunya *The Indonesian Tragedy* (1978), menulis,

> Setelah kudeta, elemen asing dalam kepemimpinan Katolik memutuskan siapa yang akan mereka dukung. Dalam sebuah percakapan dengan penulis, salah seorang dari mereka menjelaskan, "Dengan Komunis tidak lagi merupakan suatu kekuatan, hanya ada dua kemungkinan pemerintahan: Islam atau tentara. Kami memilih tentara." Pater Beek menjalankan pengaruhnya terutama melalui golongan Cina yang Katolik. Salah seorang di antaranya adalah Lim Bian Kie.

Masih mengenai Pater Beek, pada 2008, terbit buku *Pater Beek, SJ: Larut Tetapi Tidak Hanyut*. Penulis buku tersebut adalah J.B. Soedarmanta. Menurut penulis, pada 1961 para pastor dari ordo Jesuit bersepakat mendirikan suatu lembaga yang diberi nama **Biro Dokumentasi**. "Biro Dokumentasi diharapkan dapat membantu problematika umat Katolik untuk menghadapi perkembangan sosial dan politik masyarakat."

Pater Beek adalah pemimpin Biro dengan, antara lain, Dr. Soedjati Djiwandono dan Kajat Hartoyo, sebagai pembantunya. Harry Tjan Silalahi dan Lim Bian Kie (kini Jusuf Wanandi) juga aktif dalam biro tersebut. Lembaga pimpinan Pater Beek itu mengumpulkan bahan untuk menganalisis perkembangan situasi politik. Hasil kajian itu diedarkan ke berbagai kalangan, seperti aktivis mahasiswa atau partai politik, tapi terutama para aktivis Katolik. Dalam keadaan sibuk dan tegang menjelang dan setelah Gestapu, bisa dimengerti jika tidak banyak aktivis yang sempat berpikir secara sistematis, komprehensif, dan strategis. Di situlah hasil kerja kelompok Pater Beek memainkan peran penting. "Pidato-pidato Cosmas Batubara sebagian besar disiapkan oleh biro pimpinan Pater Beek itu," kata seorang mantan aktivis mahasiswa pada masa awal Orde Baru. Cosmas adalah pimpinan Perkumpulan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang juga menonjol sebagai Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pusat pada bulan-bulan awal pasca-Gestapu.

Lewat Wiratmo, saya sering membaca, bahkan ikut menyebarkan analisis-analisis dari kubu Pater Beek. Tentu saja waktu itu saya tidak tahu sumbernya. Sebagai kegiatan rahasia, Wiratmo jelas tidak memberi tahu sumber analisis tersebut. Rahman Tolleng, seorang tokoh mahasiswa Bandung waktu itu, masih ingat Wiratmo Sukito dan Fikri Jufri—di kemudian hari menjadi Pemimpin Umum majalah *Tempo*—tidak lama setelah Gestapu, pernah datang ke Bandung dengan membawa bahan-bahan yang bersumber pada Biro Dokumentasi tersebut.

Tidak Akan Mudah Soeharto Mengajak Mereka

Biro Dokumentasi sebenarnya adalah semacam tangki pemikir (*think-tank*) golongan Katolik, jauh sebelum CSIS (Centre for Strategic and International Studies) didirikan. Bahkan, tidak terlalu salah untuk menyimpulkan bahwa CSIS, lebih kurang, adalah kelanjutan Biro Dokumentasi. Selain Soedjati Djiwandono, Jusuf Wanandi, dan Harry Tjan Silalahi, sejumlah mantan anak buah Pater Beek di Biro Dokumentasi kemudian melanjutkan kegiatan mereka di CSIS.

Menurut cerita Jusuf Wanandi dalam memoarnya, *Shades of Greys*, CSIS didirikan pada 1 September 1971, setelah orang-orang Pater Beek itu tiba pada kesimpulan tidak akan mudah bagi Soeharto mengajak mereka ke dalam pemerintahan karena latar belakang etnis.

> Lalu, bagaimana caranya agar kami bisa berguna? Logis saja kalau kami berpikir mengenai tangki pemikir. Itu akan lebih masuk akal dan memberi kami lebih banyak kebebasan. Pemerintahan yang baru, menurut pendapat kami, memerlukan gagasan-gagasan segar dari luar dirinya .... Bagi Soeharto, masa itu soal strategi adalah strategi militer tanpa kebutuhan masukan dari kalangan sipil. Kami berpendapat lain. Tapi, kami juga mengerti tentara harus dilibatkan. Untuk posisi pengayom, kami memilih perwira yang bisa berpikir—Ali Murtopo dan Sudjono Humardani .... Dukungan mereka amat menentukan hari-hari itu. Pada masa itu belum lazim Lembaga Swada-

> ya Masyarakat terlibat dalam urusan-urusan strategi dan keamanan. Bantuan Pak Ali dan Pak Jono memungkinkan kami mendapatkan dukungan Soeharto menerima berdirinya CSIS. Pak Ali bahkan meminta kami menjadi tangki pemikir Presiden. Saran itu tidak kami terima .... Kami berpendapat bahwa kami akan lebih berguna bagi Presiden jika kami berada di luar pemerintahan .... Dukungan Pak Ali juga memudahkan pembiayaan kegiatan kami. Kalau kami perlu bantuan, Pak Ali dan Pak Jono akan menelepon beberapa cukong dengan berkata, "Tolong bantu ...," dan itu saja yang kami perlukan, kami mendapat bantuan dana dan kantor di Jalan Kesehatan III/13 di Jakarta Pusat.

Namun, ada pendapat lain mengenai sejarah terbentuknya CSIS ini. Mantan Pangkopkamtib Sumitro, dalam memoarnya, *Perjalanan Seorang Prajurit Pejuang dan Profesional*, menyebut nama Ali Murtopo sebagai pendiri CSIS. Menurut Jenderal Sumitro,

> Dalam rangka mendukung Operasi Khususnya, dia mendirikan suatu lembaga *think-tank*, yang diberi nama Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Sampai sekarang lembaga itu masih ada. Karena aktivitasnya di bidang politik, CSIS mengesankan dirinya sebagai *king maker*, lembaga yang menentukan pejabat negara. Demikian pula *policy* pemerintah dikesankan datang dari CSIS. Entah maksudnya apa, Jenderal Ali saya tegur, karena telah melewati batas wewenangnya.

KEMBALI KEPADA SUASANA MENJELANG GESTAPU, pada 4 Februari 1965, pengarang novel Iwan Simatupang yang masa itu menetap di Hotel Salak—terletak di depan Istana Bogor—menggambarkan keadaan masyarakat hari-hari itu kepada temannya, Bambang Sularto, seorang pengarang di Semarang. Menurut Iwan, dalam sepucuk suratnya kepada Sularto,

> Suatu psikose menjalar kini di seluruh Nusantara: bila persis PKI mau *coup*? Aidit boleh seribu kali membantah, rakyat dan AB [Angkatan Bersenjata.—penulis] kita makin teringat kepa-

> da Madiun. Dan Aidit secara seratus persen—Aidit sudah pula menggertak.
>
> Bila di tahun 1948, PKI dengan anggotanya yang cuma 100.000 orang bisa bikin korban begitu banyak, maka bagaimana dengan PKI sekarang yang sudah punya anggota tiga juta (resmi)? Secara aljabar kelas 1 SMP: tentu seramnya bakal lebih tiga puluh kali! Jadi, mayat yang bakal bergelimpangan akan berjumlah tiga puluh kali; darah kering di gedung-gedung pembantaian (yang mungkin juga nantinya bakal mereka sebut *Marx House*) tebalnya tiga puluh kali dari darah kering yang ditemukan di ubin *Marx House* di Madiun tempo dulu.
>
> Semua gambaran seperti ini memang seram, Larto! Dan memang, bukan tak punya alasan rakyat kita untuk mengenangkan kembali Madiun di tingkat pergolakan politik seperti kini ini di Tanah Air kita ….

BERPERAN PENTING MEMPERPANAS SUHU POLITIK ADALAH SUBANDRIO, Wakil Perdana Menteri (Waperdam), Menteri Luar Negeri, dan Kepala BPI. Pada Januari 1965, pejabat tinggi dan pembantu dekat Sukarno itu dikutip luas oleh pers mengatakan, pada 1965 itu mungkin akan terjadi keadaan yang menyebabkan kawan jadi lawan. "Kita mungkin akan terpaksa berpisah dengan sahabat-sahabat pribadi dan *comrades in arms*." Pernyataan Subandrio mendapat perhatian publik politik karena posisinya sebagai pemimpin intel di samping pembesar yang paling dekat dengan Sukarno.

Dari kedudukannya sebagai pemimpin intel itulah, Subandrio memanfaatkan Dokumen Gilchrist untuk secara tidak langsung membuat Sukarno makin takut kepada Angkatan Darat. Adalah Subandrio yang mengumumkan adanya dokumen tersebut di Kairo lewat koran utama Mesir, *Al Akhram*. Sukarno dan Subandrio bersama sejumlah pejabat tinggi Indonesia memang tertahan di Kairo selama beberapa hari karena rencana pertemuan Asia-Afrika gagal diadakan di Aljazair sebagai akibat terjadinya kudeta militer Kolonel Khuari Boumidienne yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Presiden Ben Bella.

Di kemudian hari, yakni setelah Gestapu, beredar analisis bahwa yang jadi sasaran Subandrio sebenarnya adalah pimpinan Angkatan Darat yang waktu itu memang tidak secara serius melaksanakan perintah Sukarno menjalankan konfrontasi dengan Malaysia. "Ketidakseriusan" itulah, antara lain, yang dijadikan bukti dan alasan Presiden Sukarno menuduh pimpinan Angkatan Darat sebagai "tidak loyal kepada Pemimpin Besar Revolusi".

Mengenai tuduhan "tidak loyal" sehubungan dengan soal ganyang Malaysia sebagai pelaksanaan program anti-Nekolim Sukarno, Jusuf Wanandi sebagai orang dekat Benny Moerdani dan Ali Murtopo, dalam memoarnya ada bercerita mengenai sebuah pertemuan penting antara Letjen Yani dan Mayjen Soeharto pada pertengahan 1965. Dikisahkan oleh Wanandi—mengaku mendengarkan cerita itu dari Ali Murtopo dan Benny Moerdani, yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut—Yani menyampaikan kecemasannya mengenai konfrontasi itu. Panglima Angkatan Darat itu menjelaskan bahwa sebagian besar pasukan berada di Kalimantan Utara sehingga tidak ada cukup pasukan di Pulau Jawa kalau PKI mengadakan perebutan kekuasaan. Untuk tujuan itulah, Yani mempertahankan pasukan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) di Karang Menjangan, Solo, dan Cijantung di Jakarta. "Saya tidak ingin RPKAD terlibat dalam konfrontasi," kata Yani. "Saya tidak punya pasukan lain," tambahnya.

Pada saat itulah Ali Murtopo, mantan anak buah Yani di Banteng Raiders Diponegoro, angkat bicara. "Pak Yani, saya ingin bertanya, kenapa Konfrontasi terus dijalankan kalau Bapak sudah tahu itu akan merusak kita? Kenapa Bapak tidak menghentikannya saja?" Jawab Yani, "Kalau tergantung saya, akan segera saya hentikan, tapi Bung Karno yang memulainya." Ali Murtopo lalu berkata, "Kita harus mencoba mengakhirinya. Mengapa kita harus saling membunuh dan nanti berhadapan dengan Cina?" Yani tampaknya sepakat dengan tekad Murtopo. "Tapi, siapa yang akan melakukannya?" Dengan yakin Murtopo menjawab, "Serahkan kepada saya." Menurut Jusuf Wanandi, dengan restu

Yani, Murtopo memulai geraknya dengan membentuk Opsus (Operasi Khusus).

Yang tidak diceritakan Wanandi adalah peran Soeharto dalam pertemuan tersebut. Apakah Murtopo sebagai bawahan Soeharto bisa dibayangkan berbicara dengan Yani sembari menyepelekan panglimanya yang hadir di situ? Apakah Yani hanya berdialog dengan Murtopo mengenai hal sepenting itu tanpa melibatkan Soeharto yang ada di dalam ruangan? Bahwa kemudian Soeharto berperan penting mengakhiri Konfrontasi, hal demikian sudah tercatat dalam sejarah. Yang kurang masuk akal bagi saya adalah jalannya pembicaraan ketika kesepakatan memboikot Konfrontasi itu diputuskan. Terkesan peran Murtopo dilebih-lebihkan oleh Wanandi. Tapi, ada atau tidaknya percakapan Yani dengan Murtopo sebagaimana yang dikisahkan Jusuf Wanandi, keputusan dan adanya kenyataan pemboikotan Konfrontasi adalah bukti yang cukup bagi Sukarno untuk berkesimpulan bahwa Angkatan Darat "tidak loyal" menjalankan perintah Panglima Tertinggi.

Beberapa hari sebelum Gestapu melakukan operasi, pada 13 September, lewat sebuah pidatonya di Istana, Sukarno menyerang tentara tanpa menyebut nama. Pada pidato di depan Gubernur se-Indonesia itu, Sukarno, untuk kesekian kalinya, berbicara tentang adanya "anak-anak Revolusi" yang tidak loyal kepada Pemimpin Besar Revolusi. Menurut catatan seorang wartawan senior pada masa itu, selain Sukarno, praktis sepanjang September 1965, PKI juga menyerang secara makin berani lawan-lawan politiknya, terutama pihak Angkatan Darat. Untuk menunjukkan dukungannya kepada Pemimpin Besar Revolusi, media-media PKI ikut melancarkan kampanye terhadap kelompok yang dituduh tidak loyal kepada Sukarno. *Harian Rakjat*, koran resmi PKI edisi empat September bahkan secara terang-terangan menuduh para perwira Angkatan Darat melancarkan taktik "maling teriak maling" dengan memfitnah PKI sebagai sedang merencanakan sebuah kudeta.

Ibu Pertiwi Sudah Hamil Tua

Tidak kurang penting untuk dicatat adalah pernyataan Anwar Sanusi, seorang tokoh PKI, beberapa hari sebelum 1 Oktober 1965. Anwar Sanusi menggambarkan dengan baik keadaan waktu itu. Katanya, "Ibu pertiwi sudah hamil tua." Dari perut ibu pertiwi itu, katanya pula, bakal lahir satu kekuatan baru lewat sebuah revolusi. Pernyataan Anwar Sanusi tersebut kemudian dijadikan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa PKI merencanakan Gestapu. Yang juga ditafsirkan sebagai bukti bahwa PKI tahu sebelumnya dan bahkan merencanakan Gestapu adalah pojok edisi akhir pekan *Harian Rakjat* yang beredar Sabtu, 2 Oktober, dan diperkirakan dicetak sebelum Gestapu. Pada pojok itu terbaca:

> Makan tak enak
> Tidur tidak njenjak
> Nasi dimakan serasa sekam
> Air diminum serasa duri
> Siang djadi angan-angan
> Malam djadi buah mimpi
> Teringat tjelaka badan diri,
> Bukan salah bunda mengandung
> Salah anak buruk pinta
> Sudahlah nasib akan digantung
> Djadi si laknat setan kota ....

KETIDAKPASTIAN DAN KETIDAKJELASAN POSISI serta keberadaan Presiden Sukarno pada satu Oktober pagi itu ikut menimbulkan dan menambah kecemasan dan ketidakpastian pada banyak perwira, terutama mereka yang dulu pernah mengalami peristiwa berdarah pemberontakan Komunis di Madiun pada 1948 dan sikap keras dan tegas Sukarno kepada Muso, pimpinan PKI waktu itu. Tapi, sampai menjelang petang tidak terdengar sikap Sukarno terhadap pembantaian para jenderalnya. Yang dipikirkannya malah mencari pengganti Panglima Angkatan Darat yang hilang. Sukarno sama sekali tidak memikirkan nasib Yani dan teman-temannya yang jelas telah dibantai oleh kekuatan kiri di kalangan TNI. Di Kostrad mulai beredar dua analisis tentang Sukarno: Pemim-

pin Besar Revolusi itu tidak bebas atau justru memihak pembunuh para jenderal.

Saking cemas dan paniknya, Kolonel Komar—anak buah Soegandhi yang dulu ikut bertempur merebut kembali Madiun—mengajak saya dan beberapa anggota staf SAB ke rumahnya di Jalan Kemiri, Menteng, tidak jauh dari Markas Kostrad. Di sana, kami bersama membongkar gudang senjata koleksinya. Kembali ke Kostrad, kami sudah dalam keadaan bersenjata. Meski waktu itu saya belum pernah berlatih menembak, bahkan belum pernah pegang senjata, saya toh kebagian *jungle rifle*. Senapan bekas Perang Dunia II yang bentuknya artistik itu saya sandang sembari mondar-mandir di kompleks Kostrad. Lucunya, tak seorang tentara pun menegur saya. Suasana betul-betul seperti akan ada perang. Setiap orang cemas. Tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Belum ketahuan dengan jelas siapa lawan, siapa kawan. Siap dengan senjata waktu itu tampaknya dianggap cara terbaik menghadapi segala kemungkinan. Beberapa hari kemudian, saya mendapat informasi mengenai dipersenjatainya sejumlah mahasiswa anti-Komunis pada sore hari itu. Ini adalah cara menghadapi kemungkinan serangan dari anggota Pemuda Rakyat yang dipercayai sebagian cukup banyak memang sudah mengikuti latihan militer di daerah Lubang Buaya.

MENJELANG SORE, PASUKAN RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo muncul di halaman Kostrad. Sebelum matahari terbenam, pasukan RPKAD di lapangan, lewat radio, sudah melaporkan keberhasilan mereka merebut dan menguasai kembali gedung Telkom dan studio pusat Radio Republik Indonesia (RRI), keduanya terletak di sekitar lapangan Monumen Nasional (Monas), berseberangan dengan Markas Kostrad. Dua orang jenderal yang bertanggung jawab soal penerangan, Brigjen TNI Soegandhi dan Brigjen TNI Ibnu Subroto (Kepala Penerangan Angkatan Darat) segera bersiap-siap berangkat dengan truk RPKAD ke RRI.

Saya diajak ikut oleh Soegandhi sebab dianggap tahu seluk-beluk studio RRI. Saya dulu memang pernah magang di sana. Cita-cita saya bekerja di RRI adalah menjadi reporter radio seperti Darmosugondo yang sangat terkenal waktu itu. Tapi, kemudian saya dipecat dengan tuduhan ikut Manikebu. Kesalahan saya sebenarnya bukan karena ikut Manikebu. Saya tidak pernah menandatangani dokumen macam apa saja yang PKI sebut sebagai "Manikebu" itu. Para penggagas Manifes Kebudayaan adalah seniman-seniman senior yang semuanya saya kenal baik. Tapi, saya masih sangat junior waktu itu. Kesalahan saya adalah karena dianggap anak buah Wiratmo, Kepala Siaran Kata RRI, sponsor saya bekerja di studio milik pemerintah tersebut. Wiratmo memang merupakan konseptor utama Manifes Kebudayaan. Dan karena Wiratmo dipecat, saya ikut juga ditendang keluar.

Sebelum berangkat, saya usulkan agar rombongan membawa serta Darmosugondo, reporter senior RRI yang selalu melaporkan dan mengomentari acara-acara Presiden Sukarno. Alasan mengajak itu saya jelaskan dan diterima dengan baik. "Kau tahu rumahnya?" tanya Soegandhi kepada saya. "Tidak jauh dari rumah Bapak," jawab saya. "Jemput sana," kata atasan saya itu. Dengan mobil sedan Holden milik Kolonel Djoko Basuki, Asisten III Pangkostrad, saya berangkat menjemput Darmosugondo. "Eh, itu senjatanya ditinggal saja dulu," kata seorang perwira.

Saya berhasil membawa Darmosugondo ke Kostrad dalam waktu yang singkat. Jarak Kostrad dengan rumah Darmosugondo hanya sekitar lima kilometer. Kota sepi, perjalanan lancar tanpa hambatan apa pun. Jakarta masa itu memang belum berkenalan dengan penyakit macet. Sepanjang jalan, wartawan senior itu kelihatan sangat ketakutan. "Saya mau diapakan?" tanyanya. Saya jelaskan, nasib Bung Karno belum diketahui orang banyak. "Dengan mendengar suara Pak Darmo, yang selalu mengomentari pidato Bung Karno, pendengar akan lebih mudah diyakinkan bahwa Pemimpin Besar Revolusi baik-baik saja." Penjelasan itu bersumber pada salah satu teori yang baru saja saya pelajari sebagai mahasiswa psikologi. Teori itu, kalau saya tidak salah ingat,

dikenal sebagai teori asosiasi. Kalau dengar suara Darmosugondo, orang akan teringat Bung Karno.

Namun, ketika saya tiba kembali di Kostrad rupanya pikiran para jenderal itu sudah berubah. Mereka tidak lagi perlu Darmosugondo. Dan sejak itu, seingat saya, suara reporter senior RRI itu tidak pernah terdengar lagi. Di Markas Kostrad, saya menerima kembali senjata panjang saya. Tapi, ketika akan naik truk menuju RRI, seorang perwira berteriak kepada saya, "Eh, jangan bawa itu," sambil menunjuk senapan yang saya sandang. Dan *jungle rifle* saya lalu ditukar dengan pistol yang saya juga belum tahu bagaimana menggunakannya.

Dari Kostrad, truk RPKAD yang kami tumpangi berjalan perlahan menuju studio pusat RRI dengan memotong jalan di lapangan Monas yang masih dalam proses penyelesaian. Di tengah perjalanan, Mayor Jusuf Sirath, salah seorang anak buah Soegandhi, meloncat dari truk dan berjalan kaki sembari merunduk bersama pasukan yang mengawal truk. "Saya takut peluru nyasar," katanya menjelaskan keputusannya kemudian.

Berada di Bawah Letnan Sintong Panjaitan

Di studio RRI ternyata tidak banyak yang masih harus saya lakukan. Pegawai Siaran Angkatan Bersenjata (SIAB), salah satu acara tetap RRI yang dikelola anak buah Brigjen Soegandhi, telah memainkan peran sebagai *guide* bagi tentara yang lebih dulu telah menduduki studio radio tersebut. Jadi, saya jalan-jalan saja sembari mengajak ngobrol pegawai-pegawai RRI yang sebagian besar memang sudah saya kenal. Tidak mudah. Teman-teman lama saya itu pada ketakutan, meski tidak ada kekerasan dalam pengambilalihan gedung studio yang terletak di Jalan Merdeka Barat itu. Salah seorang yang sangat ketakutan adalah Hamid Ismail. Menurut cerita teman-teman ketika saya masih magang, Hamid tadinya adalah orang Masyumi. Tapi, untuk mempertahankan kedudukannya di RRI setelah partainya dibubarkan, dia secara berangsur berubah bersikap dan bicara layaknya seorang

revolusioner yang makin lama makin sulit dibedakan dari orang-orang kiri. Fenomena kiri mendadak seperti itu memang banyak terjadi di penghujung masa Orde Lama. Orang-orang ini sebenarnya menjadi kiri sekadar untuk selamat saja.

Menjadi kiri dan Sukarnois adalah modus untuk *survival* pada masa itu. Karena itu tidak selalu mudah membedakan mereka yang revolusioner mendadak, yang Sukarnois, dan yang Komunis. Tapi, orang seperti Hamid Ismail dan banyak lagi pencari selamat lainnya, akhirnya jadi korban pembersihan pasca-Gestapu. Saya tidak tahu persis nasib Hamid. Setelah Gestapu, dia hilang begitu saja. Tidak jelas apa dia ditangkap atau "menghilangkan diri" agar terhindar dari pembersihan. Pokoknya dia tidak beredar lagi di RRI.

Ketika Soegandhi sedang memberikan taklimat kepada para petinggi RRI di ruang depan studio tersebut, saya kebetulan berdiri di samping Brigjen Ibnu Subroto. Saya teringat sesuatu dan spontan saja membisikkan hal itu ke telinga Pak Ibnu. Jenderal Ibnu Subroto menginterupsi Soegandhi. "Eh, itu lagu 'Nasakom Bersatu' tidak usah diputar lagi." Sejak itu, lagu ciptaan komponis Lekra, Subronto K. Atmodjo, itu tidak terdengar lagi di Indonesia.

Pasukan RPKAD yang merebut RRI itu berada di bawah komando Letnan Dua Sintong Panjaitan, komandan peleton dari Kompi Oerip Soetjipto. Saya baru mengenal secara pribadi perwira para komando tersebut kelak setelah dia berpangkat Mayor Jenderal. Ketika Sintong dan pasukan Baret Merah tiba di RRI, orang-orang Gestapu memang sudah pada pergi. Itulah penjelasannya mengapa pengambilalihan studio pusat RRI tidak menggunakan kekerasan. Yang lucu, rekaman pengumuman Gestapu ternyata masih terus disiarkan. Pegawai RRI takut menghentikannya, sementara Sintong dan anak buahnya tidak memperhatikannya. Akibatnya, para jenderal di Markas Kostrad bingung ketika mendapat laporan dari lapangan mengenai telah dikuasainya RRI. "Bagaimana dikuasai? Itu siaran mereka masih terus terdengar," teriak Kolonel Sarwo Edhie lewat radio dari halaman

Kostrad. Barulah Sintong sadar dan segera memerintahkan penghentian pemutaran rekaman tersebut. Lain cerita pengambilalihan gedung Telkom di Jalan Merdeka Selatan. Anggota Pemuda Rakyat (PR)—dipersenjatai untuk menjaga pusat telekomunikasi tersebut—sempat melakukan perlawanan. Tentu saja dengan mudah mereka dilumpuhkan oleh anak buah Sarwo Edhie.

MALAM ITU SAYA TIDUR di kantor Staf Angkatan Bersenjata (SAB) yang terletak hanya beberapa ratus meter dari gedung RRI. Gedung itu sekarang masih merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan. Komandan Markas waktu itu adalah Brigjen TNI H.V. Worang yang di kemudian hari pernah menjadi Gubernur Sulawesi Utara. Kami nyaris tidak mungkin tidur, sebab selain karena kami hanya tergeletak di teras depan pintu keluar gedung belakang (berseberangan dengan kantor Menko KASAB Nasution dan kantor Menhan sekarang) tanpa alas, para jenderal dan kolonel itu juga menghabiskan waktu untuk ngobrol sembari memantau perkembangan dengan menggunakan radio militer.

Sebagai wartawan muda, saya tertarik pada obrolan berdasarkan pengalaman para perwira yang berjuang pada zaman Revolusi tersebut. Dari cerita-cerita mereka itulah saya dengar lebih jauh tentang pemberontakan PKI di Madiun (1948) serta pengalaman para perwira itu menumpasnya. Juga ada yang bercerita mengenai bagaimana Sukarno yang berjanji memimpin perang gerilya kalau Yogyakarta diserang, tapi akhirnya malah memilih menyerah kepada Belanda pada 19 Desember 1948.

Para perwira yang bergerilya bersama Panglima Besar Sudirman pada umumnya anak-anak muda yang sebagian besar berumur sekitar 20 tahunan. Waktu itu mereka terlalu muda untuk mengerti politik. Yang mereka tahu bahwa Sukarno dan Hatta pernah berjanji akan ikut bergerilya jika Yogyakarta diserbu Belanda. Mereka juga tahu bahwa ketika pemerintah Prancis menyerah kepada Jerman pada awal Perang Dunia II, tentaranya otomatis ikut menyerah.

Sudirman dan anak-anak muda itu tidak mau menyerah bersama Sukarno, sebab tindakan itu mereka anggap melanggar sumpah tentara. Dan karena Sukarno adalah juga Panglima Tertinggi, maka keputusan menyerah itu mereka anggap sebagai suatu pelanggaran sumpah, suatu pengkhianatan. Itulah salah satu akar dan cikal bakal konflik tentara, khususnya Angkatan Darat, dengan Sukarno. Yang waktu itu tidak disadari para perwira TNI tersebut, keputusan Sukarno tidak ikut bergerilya bukanlah suatu keputusan pribadi, melainkan hasil rapat kabinet yang menghasilkan keputusan berdasarkan pemungutan suara. Janji Sukarno memimpin gerilya juga seharusnya dilihat sebagai lebih merupakan suatu trik politik menggertak Belanda dan sama sekali tidak dimaksudkan sebagai janji kepada pasukan TNI. Tapi apa boleh buat, pengertian dan tafsiran para perwira muda usia itu terhadap keputusan para pemimpin politik masa itu memasuki sejarah dan mengendap di sana tanpa pernah mengalami re-evaluasi. Akibatnya, sikap merendahkan kekuatan politik sipil kemudian mewarnai dengan pekat pola pikir dan cara pandang militer Indonesia.

Bagi anak muda seusia saya waktu itu, cerita-cerita dari masa lalu tersebut tergolong hal baru yang sebelumnya tidak pernah saya dengar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pengalaman dan informasi yang saya dapatkan malam itu kelak ikut berperan penting mendorong saya menjadi peneliti peran politik militer Indonesia. Terutama ketika tentara sudah dengan sempurna menguasai panggung politik.

DALAM KEADAAN KURANG TIDUR, pagi hari dua Oktober saya ikut Brigjen Soegandhi ke kompleks Gelora Bung Karno, Senayan. Sejak semalam, beberapa gedung di perkampungan atlet internasional gelanggang olahraga bekas tempat penyelenggaraan Asian Games dan Ganefo (di tempat itu sekarang berdiri Plaza Senayan dan beberapa apartemen) memang difungsikan sebagai markas komando darurat. Pasalnya, pada malam hari ada info, Angkatan Udara kemungkinan akan mengebom Kostrad. Menu-

rut Brigjen Supardjo kemudian, dialah yang punya gagasan mengebom Kostrad, dan soal itu dibicarakannya dengan Omar Dani di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Di kemudian hari, Marsekal Muda TNI Suyitno Sukirno, Panglima Komando Pertahanan Udara waktu itu, mengungkapkan bahwa perintah kepadanya pada malam itu agar menyiapkan dua pesawat MiG 17 untuk "menggempur mereka yang anti-Nasakom".

Ada kemungkinan perintah itu berasal dari Leo Wattimena yang malam itu selama enam jam terbang dengan pesawat Herkules bersama Omar Dani sebelum akhirnya mendarat di Madiun pagi harinya. Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh di Malang juga mendapat perintah mengirim pesawat pengebom ke Jakarta. Di tengah jalan, sebagian pesawat dari Malang itu dialihkan ke Bandung oleh Kolonel Udara Penerbang Ashadi Cahyadi, Komandan Pangkalan Udara Husein Sastranegara di Bandung. Yang sempat mendarat di Halim Perdanakusuma menjadi sasaran pengempesan ban oleh para prajurit RPKAD yang memasuki pangkalan udara itu keesokan paginya.

Dari pesawat Herkules, Leo Wattimena juga mengirimkan pesan keras kepada Pangkostrad agar jangan menduduki Halim sebab itu wilayah Angkatan Udara. "Akan kami hadapi," ancamnya kalau Pangkalan Halim Perdanakusuma diganggu. Ancaman itu disesali oleh Omar Dani di kemudian hari sebagaimana yang dikemukakan oleh mantan Pangau itu dalam pembelaannya di depan Mahmillub (Mahkamah Militer Luar Biasa). Karena pimpinan Angkatan Udara yang ada di Halim Perdanakusuma bertekad menghindari konflik, pasukan RPKAD dibiarkan masuk. Dan tak terjadi apa-apa yang dramatis selain pengempesan ban pesawat yang parkir di sana.

"Manfaatkan Perintah Pangti!"

Mungkin merasa kurang aman di Senayan, siangnya Markas Kostrad beralih lagi ke kompleks Pusat Pendidikan Departemen Sosial yang terletak di tepi perkebunan karet di Kelurahan Gandaria

Selatan. Lokasi itu kini terletak di pertigaan Jalan Radio Dalam dan Jalan Haji Nawi. Dari markas darurat itulah, Pangkostrad Soeharto berangkat ke Bogor, pada dua Oktober, memenuhi panggilan Presiden Sukarno. Itu adalah pertemuan pertama Soeharto dengan Sukarno sejak meletusnya Gestapu. Daud Sinyal—terakhir wartawan senior koran *Sinar Harapan*—waktu itu anggota Tim Juru Bicara Menko Hankam/KASAB, bertugas di markas darurat Kostrad tersebut. Berikut ini kutipan dari catatan Daud Sinyal mengenai kegiatan di sana pada hari itu:

> Soeharto berangkat ke Bogor dengan pengawalan sejumlah panser, dan baru kembali menjelang tengah malam. Para jenderal segera berkumpul di sebuah ruangan untuk mendengar laporan tentang pertemuan Bogor itu.
>
> Untuk diketahui, kompleks Pusdik Depsos itu terdiri dari sejumlah bangunan berwujud sekolahan dengan ruang-ruang kelasnya. Jendela-jendelanya dibiarkan terbuka, tapi karena tingkapnya cukup tinggi, orang di luar tidak bisa melongok ke dalam. Percakapan di dalam tidak bisa terdengar, dengungnya saja yang terpantul keluar. Namun, ada satu suara yang cukup jelas terdengar. Bunyinya, "Manfaatkan perintah Pangti!". Itu adalah logat Batak-nya Jenderal Nasution.

Perintah kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban memang diberikan Sukarno hanya secara lisan. Beberapa jam setelah pertemuan Bogor itu, Presiden Sukarno merekam sebuah pidato radio yang disiarkan oleh RRI pusat pada tiga Oktober pukul 1.30 pagi. Lewat pidato singkat itu, Sukarno menjelaskan,

> Pimpinan Angkatan Darat pada dewasa ini berada langsung dalam tangan saya, dan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat sementara saya tunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro, Asisten III Menpangad. Untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang bersangkutan dengan peristiwa 30 September tersebut telah saya tunjuk Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad sesuai dengan kebijaksanaan yang saya gariskan.

Dengan pidato singkat yang disiarkan lewat radio di tengah malam itu, Sukarno sebenarnya menerima kenyataan bahwa Soeharto-lah yang berkuasa. Pranoto Rekso Samudro tidak pernah sempat berfungsi sebagai pelaksana pimpinan Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian Asisten Personil Menteri Panglima Angkatan Darat itu, atas perintah Soeharto ditahan dengan tuduhan terlibat Gestapu. Di tangan Pranoto kabarnya ditemukan surat dari Kolonel Latif.

Mengikuti penugasan Sukarno dan petunjuk Nasution, Soeharto memerlukan waktu sepekan sebelum akhirnya membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan mengangkat dirinya sebagai Panglima. Dalam wawancaranya dengan Kepala Pusat Sejarah ABRI, Brigjen TNI (Tituler) Dr. Nugroho Notosusanto pada tiga Maret 1977, Soeharto menjelaskan tentang Kopkamtib itu sebagai inisiatifnya sendiri tanpa Surat Perintah dari Presiden Sukarno. “Saya hanya berpegang pada perintah lisan bahwa mengenai pemulihan keamanan masih diserahkan kepada saya,” kata Soeharto.

Presiden Sukarno dan Jenderal Soeharto.

BAHWA KOSTRAD MEMINDAHKAN markas komando karena takut dibom, waktu itu mudah dimengerti mengingat besarnya kecurigaan para jenderal itu kepada Angkatan Udara setelah pada satu Oktober mendengar dari radio pengumuman dukungan Panglima Angkatan Udara, Omar Dani, kepada Gestapu. Kecurigaan itu kemudian berdampak pada sikap amat tidak bersahabat para prajurit Angkatan Darat kepada rekan-rekan mereka dari Angkatan Udara. Untuk waktu yang cukup lama, di tempat umum sulit dijumpai perwira Angkatan Udara yang muncul dengan pakaian seragam mereka. Dalam pembelaannya di depan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub), perlakuan kurang pantas terhadap anak buahnya itu dikisahkan oleh Omar Dani:

> Mobil Laksda Aburachmat, mobil Letnan Udara Satu (LUS) Wara Chusnul Chotimah, dan lain-lain ditabrak oleh jip-jip RPKAD. Ibu-ibu AURI yang belanja di luar Halim diludahi, juga pasukan karbol yang berdiri di pinggir jalan dalam sikap sempurna dan memberi hormat pada iring-iringan jenazah para jenderal korban G-30-S, mukanya diludahi pasukan Angkatan Darat yang berada di atas panser.

Kalau saya renungkan sekarang, keputusan mengungsi ke Senayan dan kemudian ke Gandaria itu memang terasa lucu. Sebab seandainya Angkatan Udara sejatinya berencana melakukan pengeboman, intel mereka tentu akan segera tahu juga bahwa pimpinan sementara Angkatan Darat sudah mengungsi ke Senayan dan kemudian ke Gandaria. Yang akan mereka bom pastilah Senayan atau Gandaria, bukan Markas Kostrad di Jalan Merdeka Timur yang sudah ditinggalkan. Tapi, itulah bukti bagaimana tingginya tingkat ketidakjelasan keadaan waktu itu. Hal demikian mudah menimbulkan kepanikan. Maka, gampang dimengerti kalau hari-hari itu semua orang mencari informasi, yang selalu diikuti dengan *briefing*. Kata yang terakhir ini waktu itu dimaknai sebagai usaha menyebarkan sembari mencocokkan info. Begitu membudayanya kata “info” dan “briefing”, beberapa waktu kemudian, yaitu ketika gerakan mahasiswa gencar melakukan demonstrasi

anti-Gestapu, anti-PKI, kemudian akhirnya menjadi anti-Sukarno, kata "info" berubah makna menjadi suplai makanan, sedangkan "briefing" berarti kumpul untuk makan.

SEBAGAI REPORTER PEMULA hari-hari itu saya sibuk dengan tugas meliput aksi-aksi demo anti-Komunis yang mendadak melanda Jakarta. Mula-mula sporadis dan diikuti oleh sejumlah kecil orang saja. Tapi, setelah pemakaman para jenderal dan Ade Irma Suryani Nasution, putri Jenderal Nasution, sebagai korban-korban Gestapu, demo bertransformasi menjadi aksi massa dengan peserta yang makin lama makin membesar. Tema demonstrasi: "bubarkan PKI".

Demonstrasi besar pertama berlangsung di Taman Surapati—terletak di depan Gedung Bappenas sekarang—pada empat Oktober. Suasana amat tegang dan penuh kecurigaan tentang siapa teman dan siapa yang mungkin lawan. Teman saya, Fachruddin Yahya, yang menyebarkan pamflet anti-PKI, entah bagaimana ceritanya, dikeroyok massa. Saya curiga ada kesalahpahaman. Saya sendiri hampir menjadi korban pemukulan Fahmi Idris yang—menurut pengakuannya sekian puluh tahun kemudian—mencurigai saya anggota CGMI.

Salim Said sebagai demonstran '66.

Pada masa itu, saya dan Fahmi memang belum saling kenal, tapi Ekky Syahruddin, juga tokoh HMI, sering jumpa dan ngobrol dengan kami di rumah Wiratmo Sukito. Ekky bahkan pernah mengajak saya masuk HMI dan dijanjikan duduk dalam kepengurusan HMI Jakarta. Tapi, karena merasa diri sebagai seniman, saya tidak tertarik masuk organisasi apa pun. Fahmi dan Ekky berjalan bersama memasuki Taman Surapati pada hari demonstrasi yang panas itu. Saya melihat mereka berjalan bersama dari arah Wisma Yani. Ekky menghindar ketika Fahmi berjalan ke arah saya. Fahmi menggeledah saya dikelilingi orang-orang yang berwajah garang dan siap menerkam. Hanya kesaksian dan pembelaan Winarno Zain, seorang pengurus HMI asal Pekalongan, yang sudah saya kenal lama, yang akhirnya menyelamatkan saya.

Dicurigai sebagai CGMI dan digeledah oleh Fahmi Idris bukan pengalaman dicurigai satu-satunya yang pernah saya alami. Di kemudian hari, setelah lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) saya dicurigai sebagai HMI dan karena itu ditolak menjadi asisten dosen. FISIP Universitas Indonesia waktu itu memang dikuasai oleh orang-orang anti-HMI. Nanti pada tahun sembilan puluhan oleh para aktivis anti-pemerintah dari berbagai LSM, saya dicurigai sebagai intel tentara karena banyak berhubungan dengan militer yang merupakan objek penelitian saya. Menjadi diri kita sendiri, bebas dari afiliasi partai dan golongan memang tidak mudah di Indonesia, sebuah negeri yang hingga kini masih belum menghargai kebebasan, pilihan, dan pencapaian pribadi. "Individualisme datang terlambat di Asia Tenggara," tulis Wertheim dalam bukunya *Indonesia Society in Transition*. Akibatnya, orang tidak dikenal sebagai siapa dia melainkan orangnya siapa, dari ormas atau partai mana dia, anak buah siapa atau dari golongan mana dia.

PADA HARI YANG SAMA, empat Oktober, jenazah para jenderal diangkat dari dalam sumur mati yang ditutupi sampah di daerah Lubang Buaya. Esoknya, pada lima Oktober, Hari Angkatan Bersenjata, mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kali-

bata. Suasana menjadi sangat dramatis dan tragis karena hari itu direncanakan digelar peringatan ulang tahun ke-20 ABRI secara besar-besaran. Ironisnya yang terjadi adalah pemakaman sebagian besar pimpinan Angkatan Darat.

Jenazah diberangkatkan dari Markas Besar Angkatan Darat dengan ucapan perpisahan oleh Jenderal Nasution yang berdiri dengan dipapah menyampaikan pidato di sela-sela tangisnya yang tak tertahankan. Di dalam ruangan tempat para jenazah dibaringkan terdengar isak tangis dari anak dan istri para jenderal yang hari itu jenazah mereka segera dimakamkan. Yang saya ingat sangat memilukan tangisnya adalah istri Letjen TNI Suwondo Parman, Kepala Intel Angkatan Darat. Jenderal Parman adalah suami kedua Ibu Parman. Suami pertamanya juga tewas di tangan kaum Komunis pada Pemberontakan Madiun 1948.

Amukan massa anti-Komunis seperti air bah tak tertahankan setelah pemakaman para jenderal dan menjadi-jadi setelah pemakaman Ade Irma Nasution, beberapa hari kemudian. Ade Irma adalah putri bungsu Jenderal Nasution yang tertembak ketika pasukan Gestapu menggerebek rumah Menko Hankam/KSAB di Jalan Teuku Umar 40, Menteng, pada subuh satu Oktober. Jenderal Nasution lolos dengan memanjat pagar rumahnya, lalu meloncat ke halaman kantor Kedutaan Besar Irak, tetangganya.

Salah satu kegiatan anti-Komunis yang saya liput beberapa hari setelah pemakaman-pemakaman tersebut adalah aksi pembakaran kantor Central Comite (CC) PKI di Jalan Kramat Raya yang terletak di depan kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) sekarang. Gedung yang belum selesai dibangun itu sedang terbakar ketika saya tiba dengan sepeda tua saya. Baru beberapa menit berada di depan kantor PKI yang sedang dilalap api, datang berita bahwa rumah D.N. Aidit di Jalan Pegangsaan Barat diserbu massa. Saya bergegas ke sana.

Ketika tiba, massa telah bubar setelah memorakporandakan kediaman resmi Menko (Menteri Koordinator) Aidit tersebut. Dengan menunjukkan kartu wartawan yang ditandatangani oleh Brigjen Soegandhi, polisi yang berjaga di sana mengizinkan saya

masuk. Rumah Wakil Ketua MPR, Aidit, itu (sekarang kantor Golkar DKI) sudah berantakan. Sembari mengamati ruangan demi ruangan yang telah diobrak-abrik massa, seorang tua pelan-pelan muncul dari arah dalam. “Bapak siapa?” tanya saya dengan sopan. “Saya Abdullah Aidit, bapaknya D.N. Aidit.”

Antara Solo dan Boyolali

Saya meninggalkan rumah dinas pemimpin tertinggi Komunis Indonesia dengan mengantongi satu rol kecil pita rekaman. Saya menduga rekaman itu dokumen politik penting. Tapi, ketika pita rekaman itu kami putar ternyata isinya pengajian Islam yang dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Di kemudian hari, saya baru tahu bahwa pada masa kecil di kampungnya, D.N. Aidit bukan saja belajar mengaji Al-Quran, bahkan beberapa kali menamatkan kitab suci tersebut. Pada masa kecilnya, D.N. Aidit konon juga dikenal di lingkungan dekatnya sebagai pembaca Al-Quran yang fasih.

Sukarno dan D.N. Aidit menyanyi bersama, 1965.

SEKITAR SEBULAN SETELAH MELETUSNYA GESTAPU, sebagai reporter muda, pada awal November saya mendapat tugas ke Jawa Tengah. Pada penugasan pertama di luar kota tersebut, saya harus meliput operasi RPKAD membersihkan Gestapu dalam tubuh Kodam Diponegoro. Beratnya tugas Sarwo Edhie itu sebagai komandan operasi akan mudah disadari kalau kita tahu bahwa dari tujuh batalion Diponegoro yang waktu itu berada di

Jawa Tengah, lima sudah dikuasai para perwira beraliran kiri. Juga dua dari tiga Komando Resort Militer (Korem) telah mereka pengaruhi. Komandan Korem Yogyakarta, Kolonel Katamso dan wakilnya, Letnan Kolonel Sugiono, malah diculik, dan dengan sadis dibantai sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam lubang yang dangkal. Aneh memang, pasukan-pasukan yang tidak berkecenderungan kiri waktu itu justru sedang ditugaskan ke Kalimantan Utara dalam rangka Konfrontasi dengan Malaysia.

Dibekali dengan surat pribadi Jenderal Soegandhi kepada Kolonel Sarwo, saya berangkat ke Solo dengan kereta api. Sarwo sudah berada di Solo waktu itu setelah memulai tugasnya di Semarang. Apa isi surat tersebut, saya tidak pernah tahu. Tapi, sejak itu saya selalu diminta berada dekat dengan Komandan, dalam perjalanan darat maupun penerbangan dengan helikopter ke berbagai kota di wilayah Jawa Tengah. Kesempatan ini memberi peluang kepada saya menjadi akrab dengan Kolonel Sarwo dan sekaligus mengikuti jalannya operasi dari pusat komando. Persahabatan saya dengan Pak Sarwo Edhie itu berlangsung terus hingga beliau jatuh sakit sebelum akhirnya meninggal pada 1989.

Kedekatan saya dengan Komandan RPKAD itu tampaknya menimbulkan perasaan tidak senang seorang asistennya. Mayor Gunawan Wibisono, asisten Operasi RPKAD dan teman sependidikan L.B. Moerdani di Bandung, pernah memperingatkan saya agar menjaga jarak dengan Komandannya. "Eh, Wartawan, itu Kolonel, kamu harus tahu," katanya setengah membentak saya ketika kami berada di Purworejo. Tapi kalau saya menjauh, Kolonel Sarwo selalu mencari saya. Akibatnya, Mayor Gunawan selalu memandang saya dengan muka kecut.

Pengalaman dengan mayor itu kemudian mengajarkan kepada saya bahwa pada umumnya tentara itu memang mengharapkan kita orang sipil menghormati komandannya sebagaimana dia sendiri menghormati atasannya. Mayor Gunawan tidak sanggup menyadari bahwa saya bukan anak buah komandannya seperti dirinya. Tapi, karena untuk waktu lama militer menguasai

Indonesia, pengalaman kurang menyenangkan dengan Mayor Gunawan selalu menjadi pegangan pada diri saya dalam berhubungan dengan para pemimpin tentara, terutama di hadapan para anak buahnya.

BERSAMA PASUKAN RPKAD, kepada pimpinan Operasi diperbantukan satu kompi Polisi Militer Angkatan Darat yang berkualifikasi para (Yon Pomad Para). Tugas polisi militer ini memproses anggota tentara yang ditahan karena dicurigai terlibat Gestapu. Di berbagai kota yang kami kunjungi dalam rangka operasi itu, saya menyaksikan anggota-anggota Yon Pomad Para ini selalu sibuk memeriksa tentara-tentara yang ditahan. Ternyata Biro Khusus PKI cukup sukses dalam membina tentara. Seingat saya, kebanyakan yang ditahan adalah perwira yang mengurusi intelijen, teritorial, dan personalia. Tiga pos sensitif dalam organisasi militer.

Harus saya katakan bahwa selama ikut operasi ini, saya hanya sekali melihat mayat. Dalam perjalanan antara Kota Solo dan Boyolali, mobil Komandan mendadak berhenti. Kolonel Sarwo turun dan tentara yang berjaga di sekitar situ langsung memberi laporan. Katanya, mayat di tengah jalan yang ditutupi rumput kering itu adalah tokoh PKI tingkat kecamatan yang dicurigai mengorganisasi perlawanan orang-orang PKI di Manisrenggo yang terletak antara Solo dan Boyolali. "Singkirkan segera mayat itu, jangan menimbulkan kepanikan rakyat," perintah Sarwo Edhie.

Sebagai orang yang takut melihat darah, saya berdiri jauh dari mayat tersebut. "Eh, Wartawan, sini, harus lihat ini," seru Kolonel Sarwo kepada saya. Secara perlahan saya berjalan mendekati mayat tersebut. Rupanya yang tertembak persis kepalanya. Sebagian tengkoraknya hilang dan otaknya berhamburan di sekitar situ. Di dekat mayat, saya lihat selongsong peluru. Korban jelas ditembak dari jarak dekat.

Nanti ketika berada di Purworejo, kota kelahiran Sarwo Edhie dan Ahmad Yani, tempat pasukan berada untuk beberapa hari,

saya sempat bergaul dengan para prajurit yang melakukan pembersihan di Manisrenggo. Orang-orang Komunis di desa itu, menurut informasi pasukan RPKAD, sudah diindoktrinasi oleh para pejabat partai bahwa pasukan yang berbaret merah itu adalah tentara Neokolonialisme dan Imperialisme (Nekolim), dan senjata mereka hanya berisi peluru kosong, nyaring suaranya tapi tidak membunuh. Cerita tentang RPKAD yang dikampanyekan sebagai tentara Nekolim tersebut sebenarnya bukan cara baru kaum Komunis dalam menghadapi TNI. Ketika melakukan operasi terhadap para pemberontak Komunis di Madiun pada 1948, Siliwangi (SLW, singkatannya waktu itu) juga dikampanyekan oleh para pimpinan Komunis sebagai singkatan dari *Stood Leger Welhelmina*. Artinya, pasukan militer Ratu [Belanda] Welhelmina.

Dengan informasi itulah, orang-orang desa digalakkan agar berani menantang pasukan Siliwangi pada masa pemberontakan Madiun 1948 dan RPKAD pada masa Gestapu. RPKAD memang berbaret merah, tapi tentu saja beroperasi dengan senjata berpeluru tajam dan siap tempur. Sambil menari-menari (konon ada yang sambil menyingkap rok atau kain sarungnya dan menghadapkan pantat mereka kepada para prajurit) di tengah jalan, mereka menantang pasukan yang masuk ke wilayah yang sebelumnya telah mereka deklarasikan sebagai Desa Soviet. Imbauan tentara dan tembakan ke udara, mereka abaikan. Menunggu lama, instruksi tembak dikeluarkan. Banyak yang mati. Salah seorang prajurit berhasil mengumpulkan sejumlah daun kuping mayat-mayat itu dan dijadikan semacam suvenir yang dirangkai dalam bentuk kalung. "Pak Salim mau lihat?" tanya prajurit itu. "Tidak, ah, saya takut."

ROMBONGAN SARWO EDHIE memasuki Surakarta dari Semarang pada 22 Oktober. Ketika konvoi RPKAD tiba di Kartasura, pinggiran Surakarta, datang perintah dari Panglima Kodam Diponegoro di Semarang, RPKAD sebagian menuju Boyolali. Laporan dari kota kabupaten itu menyebut adanya pembantaian di banyak desa yang dilakukan orang-orang PKI dan BTI terhadap la-

wan-lawan politiknya, yakni kaum Marhaenis dan pemuka-pemuka Islam. Catatan di Kabupaten Boyolali pada hari-hari menjelang datangnya RPKAD menunjukkan 117 orang yang dibantai oleh kaum Komunis. Menurut sejarahwan Restu Gunawan dalam buku *Malam Bencana 1965*, menghadapi ketakutan rakyat kepada PKI yang masih kuat di kabupaten itu,

> Sarwo Edhie mengadakan rapat umum. Dia berkata, "Siapa mau dipotong kepalanya, saya bayar lima ribu." Karena tidak ada yang tunjuk tangan, dia melanjutkan bertanya, "Siapa yang mau dipotong kepalanya, saya bayar seratus ribu." Karena tetap tidak ada reaksi, dia melanjutkan lagi, "Dibayar seratus ribu saja tidak ada yang mau dipotong kepalanya," dan agar kepala massa pendengar tidak dipotong dengan gratis, "maka PKI harus dilawan."

Waktu kami di Purworejo, saya menyaksikan sejumlah tokoh masyarakat datang menemui Kolonel Sarwo menyampaikan ketakutan mereka terhadap tetangga sekampung yang Komunis. "Mereka mengasah parang di depan rumah secara mencolok," kata seorang anggota delegasi itu. Para pemuka masyarakat tersebut meminta RPKAD datang ke desa mereka. "Wah, kalau setiap desa harus kami jaga, pasukan RPKAD tidak cukup," kata Kolonel Sarwo.

Akhirnya ditemukan jalan keluar, pasukan RPKAD melatih pemuda-pemuda desa mengatasi ancaman PKI. Pelatihan pemuda anti-Komunis itu adalah jalan keluar Sarwo Edhie mengatasi terbatasnya pasukan RPKAD di tengah-tengah kecemasan masyarakat terhadap ancaman fisik dari PKI. Usaha memperoleh tambahan kekuatan tidak bisa dipenuhi oleh Jenderal Soeharto yang masih memerlukan banyak pasukan di Jakarta, antara lain untuk menghadapi angkatan lain yang belum berhasil dinetralisasikannya. Kegiatan melatih pemuda sebenarnya sudah terlebih dulu dipraktikkan di Solo. Di sana para pemuda Islam dan pemuda Marhaen dilatih secara militer selama tiga atau empat hari. Setelah itu mereka dilepas beraksi menghadapi PKI. Pada hari-hari per-

tama pasca-Gestapu, gerakan menangkapi orang-orang PKI memang terjadi secara sporadis dan kecil-kecilan.

Hasil dari pelatihan yang dilakukan RPKAD terlihat dengan jelas dan cepat. Mereka yang telah dilatih itulah yang menjadi pemimpin berbagai kegiatan penggerebekan kantor-kantor PKI dan tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi persembunyian orang-orang Komunis. Menurut cerita yang saya dengar lama setelah meliput operasi RPKAD itu, sebagian besar mereka yang telah dilatih itu juga berperan penting dalam pembantaian orang-orang Komunis di daerah masing-masing.

Ada cerita lucu yang muncul di sekitar pengejaran, penangkapan, dan pembantaian anggota PKI waktu itu. Kalau sebelumnya tidak mudah menangkap copet atau pencuri yang dikejar, pada masa itu mudah sekali membekuk pelaku kejahatan tersebut. Teriaki saja mereka "PKI", copet atau maling itu akan segera berhenti dan tanpa ditanya akan membuat pengakuan, "Saya memang copet, tapi bukan PKI." Artinya, lebih aman mengaku maling atau copet daripada ditangkap sebagai PKI.

Diwarnai oleh Keahlian Ben Anderson

Tafsiran alternatif terhadap Gestapu mulai muncul untuk pertama kalinya ketika di Jakarta beredar secara terbatas dan dari tangan ke tangan, sebuah analisis yang kemudian lebih populer disebut sebagai **Cornell Paper**. Naskah dari Cornell University itu sebenarnya adalah hasil analisis sementara dua ahli Indonesia (Ben Anderson dan Ruth McVey) pada pusat studi Asia Tenggara di universitas tersebut. Kalau penjelasan resmi pemerintah Orde Baru menyebut PKI sebagai pelaku tunggal Gestapu, analisis dari Cornell University tersebut melihat Gestapu sebagai masalah internal Angkatan Darat. Menurut para peneliti di Cornell University itu, sudah lama berkembang sikap kritis di kalangan para perwira di Kodam Diponegoro, Jawa Tengah, terhadap para perwira di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta.

Syahdan, menurut analisis sementara tersebut, para perwira di Semarang itu melihat senior-senior mereka di Jakarta sudah terkorup oleh kehidupan metropolitan dan telah mengkhianati prinsip-prinsip kerakyatan dan kesederhanaan yang masih kuat dianut di Jawa Tengah. Singkatnya, para peneliti dari Cornell University lebih melihat Gestapu sebagai akibat konflik internal Angkatan Darat, lebih khusus lagi internal Kodam Diponegoro. Dan PKI dipandang hanya jadi korban. Anehnya, PKI pun ingin Gestapu dilihat hanya sebagai konflik internal Angkatan Darat.

Analisis dari Amerika itu banyak diwarnai oleh keahlian Ben Anderson yang sebenarnya lebih menonjol sebagai ahli budaya Jawa. Dengan pengetahuannya mengenai budaya Jawa, dia melihat para perwira Diponegoro yang melawan jenderal-jenderal mereka di Jakarta itu lebih digerakkan oleh sistem nilai budaya Jawa daripada motivasi politik. Tapi, jika memang demikian halnya, para perwira tersebut telah menjadi korban manipulasi Biro Khusus PKI. Adalah Biro Khusus PKI yang memberi bungkus dan motivasi politik terhadap ketidakpuasan para perwira di Jawa Tengah itu. Dengan kata lain, Gestapu merupakan pertemuan kepentingan PKI dan para perwira di Jawa Tengah yang tidak puas kepada para pimpinan Angkatan Darat.

Analisis Ben Anderson dan Ruth McVey tersebut diterima dengan kemarahan di Jakarta. Beberapa jenderal bahkan menyebut adanya konspirasi Yahudi di balik naskah tersebut. Ben Anderson maupun Ruth McVey, penulis-penulis risalah tersebut, bukan Yahudi. Yang jelas mereka berdua berkecenderungan kiri dan memang mempunyai hubungan baik dengan orang-orang kiri di Indonesia. Ketika Ruth McVey berada di Jakarta, PKI mengundangnya untuk memberikan ceramah pada Akademi Politik Ali Archam. Konon, Ruth amat bangga dengan undangan tersebut.

Saya sendiri secara kecil-kecilan pernah terlibat dalam diskusi mengenai garis pemikiran Paper tersebut. Dalam sebuah kesempatan jumpa Ben Anderson di rumah Soe Hok Gie yang terletak di Jalan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 1967, saya sempat beradu argumentasi dengannya. Saya katakan kepada Ben bahwa kalau

dia berada di Jakarta dari 1963 hingga Oktober 1965, seperti saya, dan dengan saksama mengikuti perkembangan politik, akan sulit sekali baginya untuk tidak melihat bahwa PKI memainkan peran penting di balik Gestapu. Tafsiran bahwa PKI secara tunggal berada sepenuhnya di balik Gestapu memang dominan dan satu-satunya tafsiran waktu itu. Bahkan, jauh sebelum mulai bekerjanya secara sistematis mesin kampanye militer dalam menumpahkan semua kesalahan hanya kepada pihak Komunis.

Pada 1967 itu, Ben Anderson masih bebas masuk Indonesia, antara lain untuk melengkapi bahan bagi penulisan bukunya tentang peran pemuda di Jawa pada masa Revolusi. Tidak lama kemudian, selama hampir 30 tahun dia dicekal masuk ke Indonesia. Saya jumpa Ben lagi di Amerika ketika saya sudah menjadi mahasiswa pascasarjana di Ohio. Waktu itulah Ben mengisahkan kepada saya, hubungan baiknya dengan sejumlah tokoh Pemuda Rakyat dan CGMI yang terbina ketika dia melakukan penelitian disertasinya di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.

Kehadiran serta penelitiannya di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin itu membawanya pada kesimpulan adanya persamaan aktivitas para pemuda Komunis pada masa itu dengan kegiatan pemuda kiri pada masa Revolusi. Inilah yang mendorong Ben bersimpati kepada para pemuda Komunis pada masa Demokrasi Terpimpin seperti dia bersimpati kepada pemuda kiri pada masa Revolusi yang menjadi sasaran penelitian disertasinya. Dalam pertemuan di Athens, Ohio, pada 1980 itu, Ben Anderson menjelaskan kepada saya kesedihannya terhadap terbantai dan terbabatnya banyak temannya di kalangan muda PKI yang terjadi pada masa pasca-Gestapu.

Cerita Ben Anderson yang punya banyak teman di kalangan anak-anak muda golongan Komunis Indonesia itu, lebih kurang sama dengan yang saya dengar dari Profesor Wertheim di Amsterdam pada 1970. Wertheim marah kepada Soeharto yang membasmi Komunis, antara lain, karena banyak tokoh Komunis, terutama yang sarjana, adalah bekas murid Wertheim ketika sang Profesor mengajar di Indonesia pada tahun lima puluhan. Seperti

kita ketahui, Wertheim yang berkecenderungan sangat kiri itu adalah orang yang memperkenalkan apa yang umum disebut sebagai teori *missing link* yang menuduh Pangkostrad Mayjen TNI Soeharto sebagai orang yang berada di balik Gestapu.

Cinta Indonesia dan Nasihat Ikut Jalan Mao

Ben Anderson dan Wertheim adalah sarjana-sarjana ahli Indonesia yang berpengetahuan luas dan mendalam tentang sejarah, politik, dan budaya Indonesia. Keduanya mengaku amat mencintai Indonesia. Tapi, justru dari cinta itulah munculnya bahaya bagi objektivitas kesarjanaan mereka. Karena mereka sangat cinta Indonesia, tanpa mereka sadari muncullah tabiat paternalistik yang terlihat pada sikap mereka yang merasa tahu apa yang harus dilakukan orang Indonesia dan jalan apa yang mesti mereka tempuh untuk membangun negeri mereka. Sikap demikian dinilai banyak orang sebagai kelanjutan dari arogansi kaum kolonialis dan imperialis yang merasa membawa misi suci ke negeri-negeri yang mereka jajah. Pada tahun 1970 itu, misalnya, Wertheim menjelaskan dengan yakin kepada saya di Amsterdam bahwa Indonesia harus mengikuti kebijakan pembangunan Mao yang waktu itu berkuasa di Tiongkok. Saya tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Wertheim mengenai Tiongkok yang makmur sekarang ini justru karena Deng Xioping mengambil jalan lain dari Mao. Wertheim meninggal dunia dalam usia amat lanjut beberapa tahun sebelum kisah sukses Cina mencengangkan, bahkan mengubah dunia.

Menarik untuk diketahui bahwa untuk bertemu dengan Wertheim pada 1970 itu tidaklah mudah. Dia menolak bertemu orang-orang Indonesia yang punya hubungan dengan Orde Baru. Profesor itu mengaku menolak berjumpa dengan Nono Anwar Makarim dan Adnan Buyung Nasution. "Tangan mereka berdarah," katanya kepada saya. Bagaimana saya sebagai wartawan koran tentara, *Angkatan Bersenjata*, berhasil jumpa dan mewawancarainya?

Salah seorang asisten Wertheim waktu itu, Dr. Basuki Gunawan, menyarankan agar saya memperkenalkan diri sebagai mahasiswa ilmu sosial saja. Waktu itu saya memang mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (IPK) Universitas Indonesia, setelah pada 1968 meninggalkan Fakultas Psikologi. Nasihat Dr. Basuki Gunawan menolong saya masuk ke kantor Wertheim, berdiskusi, dan sekalian mewawancarainya. Bahasa Indonesianya masih lancar meski sudah lama tidak berkunjung ke Indonesia.

Berikut ini penggalan wawancara tersebut yang sebagian pernah disiarkan oleh majalah *Ekspres*, edisi 22 Agustus 1970:

> Tidak .... Tidak betul PKI terlibat. Mereka tidak bodoh. Tapi, memang ada pimpinan yang terlibat karena diprovokasi oleh agen tentara. Saya tidak yakin Syam dan Pono orang Komunis. Mereka berdua diselundupkan tentara ke dalam PKI.
>
> Memang Cornell Paper sekarang sudah tidak benar semua. Tapi, saya punya bukti-bukti bahwa PKI tidak terlibat. Berapa banyak anggota PKI di Indonesia? Saudara tahu?
>
> Mereka memang PKI Indonesia, tapi toh PKI adalah partai modern satu-satunya yang dimiliki Indonesia. Saingannya hanya tentara. Jadi, tidak masuk akal kalau PKI terlibat, sedangkan anggota-anggotanya tidak dipersiapkan ....
>
> Tapi itu semua akibat kesalahan dan kebobrokan politik Sukarno. Dia itu Raja Jawa saja. Feodal, terlalu kebapakan dan dialah yang [merasa] tahu pasti Indonesia harus ke mana. Orang lain mesti ikut saja dia. Tentara yang dulu punya andil menegakkan Indonesia dan sekarang punya alat dan organisasi modern, memang tidak tahan melihat Sukarno. Mereka mencoba menyingkirkan Sukarno dengan menggunakan tangan lain berkali-kali. Selalu gagal. Lalu, usaha memancing PKI yang berhasil.
>
> Meskipun [berhasil] menyingkirkan Sukarno, saya tidak percaya tentara bisa memperbaiki Indonesia. Tentara fasis, tidak demokratis. Juga mereka korup.

KESEMPATAN MENJADI MAHASISWA PASCASARJANA di Ohio, Amerika Serikat, belasan tahun setelah Gestapu, membuka kesempatan untuk memuaskan hasrat ingin tahu saya mengenai

apa dan siapa saja sebenarnya yang berada di balik Gestapu. Buku-buku dan dokumen-dokumen tentang Gestapu, yang sulit ditemukan di Jakarta, hampir semuanya berhasil saya baca di perpustakaan Ohio University, Athens, Ohio. Dari bacaan itu kesimpulan saya tentang Gestapu berangsur menjadi tidak sesederhana keyakinan kami di Indonesia pada hari-hari dan tahun-tahun pertama setelah tragedi satu Oktober 1965. Meski demikian, saya tetap yakin bahwa PKI terlibat Gestapu—sebagai yang juga diakui sendiri oleh Sudisman, anggota Politbiro PKI, di depan Mahmillub pada 21 Juli 1967—serta Brigjen Supardjo dalam testimoninya pada Mahmillub yang menjadi populer lewat buku John Roosa, *Pretext for Mass Murder*. Tapi, saya juga yakin PKI bukan perancang dan pemain tunggal gerakan berdarah itu. Lalu, bagaimana kejadian atau jalan cerita sebenarnya? Harus cepat saya jawab, mungkin tidak akan pernah secara persis kita tahu apa sebenarnya yang terjadi dan siapa saja yang bermain. Tapi, berikut ini adalah hasil dari percobaan saya merekonstruksi duduk soal dan latar belakang tragedi berdarah tersebut.

Angkatan Darat versus PKI

Bahwa waktu itu ada konflik yang makin tajam antara PKI dan Angkatan Darat yang mendapat dukungan golongan masyarakat anti-Komunis, itu sudah suatu kenyataan sejarah tak terbantah. Waktu itu Angkatan Darat "bertransformasi" menjadi garda depan kekuatan anti-Komunis sebagai reaksi dari dilemahkannya oleh Sukarno kekuatan anti-Komunis dalam masyarakat. Mereka yang kritis terhadap PKI disebut Sukarno sebagai menderita "Komunisto phobi", itu artinya sama dengan "kontrarevolusi". Pada masa kekuasaan Sukarno, semua yang dituduh "kontrarevolusi" hidupnya susah karena terus-menerus menjadi sasaran pengganyangan PKI dan kekuatan kiri lainnya.

Bahwa hubungan Angkatan Darat dengan Presiden Sukarno terus makin memburuk, masa itu juga bukan rahasia di Jakarta, terutama menjelang berakhirnya sejarah Demokrasi Terpimpin.

Bahwa PKI makin meningkatkan aksi ofensif-revolusioner dan agitasi politiknya di hampir segala sektor, itu juga sesuatu yang terdokumentasi dengan saksama dalam koran-koran terbitan masa itu dan dianalisis dengan baik dalam buku *Indonesian Communism Under Sukarno* karya sarjana Australia, Rex Mortimer. Retorika PKI waktu itu adalah teriakan-teriakan ganas layaknya kekuatan yang sebentar lagi menyerbu dan memusnahkan lawan-lawannya.

Yang barangkali kurang diperhatikan orang di Indonesia waktu itu adalah adanya semacam perbedaan-perbedaan sikap terhadap Sukarno dan PKI di kalangan militer, khususnya dalam Angkatan Darat. Masa itu di dalam Angkatan Darat ada kelompok Nasution yang amat kritis terhadap sikap lunak kelompok Ahmad Yani kepada Sukarno; juga ada kelompok Kostrad pimpinan Soeharto yang merasa dianggap remeh oleh kelompok Ahmad Yani. Tentu tidak boleh dilupakan kelompok perwira "*progressive* revolusioner" yang dikenal juga sebagai "perwira berpikiran maju" yang sejak lama telah dibina oleh Biro Khusus PKI.

Di luar Angkatan Darat, ada Angkatan Udara pimpinan Omar Dani, sangat loyal kepada Panglima Tertinggi ABRI, dan cenderung bersikap antagonistik terhadap Angkatan Darat. Angkatan Kepolisian, meski sibuk menyatakan loyalitasnya kepada Bung Karno, perpecahan dalam tubuhnya merupakan soal yang mempersulit Sukarno mengerahkan polisi menjadi kekuatan anti-Angkatan Darat sebagaimana yang berhasil dilakukan Pemimpin Besar Revolusi itu kepada Angkatan Udara. Angkatan Laut, di bawah pimpinan Laksamana Madya Martadinata, berhasil menjaga hubungan baiknya dengan Angkatan Darat terutama karena Nasution, antara lain, adalah teman lama Martadinata di Bandung pada zaman Jepang. Kendati demikian, tugas Martadinata menjaga Angkatan Laut agar tidak diadu dengan Angkatan Darat tidaklah mudah. Seperti di berbagai satuan Angkatan Darat, di Angkatan Laut juga ada banyak pengikut fanatik Sukarno. Yang paling mencolok adalah Letnan Jenderal KKO Hartono, Panglima Korps Komando (nama Marinir waktu itu). Ketika posisi Presiden

makin terdesak setelah Gestapu, Jenderal KKO Hartono secara berani dan menantang mengumumkan dukungannya kepada Sukarno, “Putih kata Bung Karno, putih kata KKO, hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO.”

Pengganti Martadinata sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Mulyadi, juga seorang Sukarnois. Keduanya, Hartono maupun Mulyadi—setelah Soeharto mengonsilidasi kekuasaannya—mengakhiri karier militer mereka dengan menduduki kursi duta besar, masing-masing di Pyongyang (Hartono) dan Moskow (Mulyadi). Menarik untuk dicatat bahwa kematian mendadak dan berdarah Dubes Hartono terjadi pada 1970 di Jakarta. Sampai hari ini kematian tersebut bagi banyak orang masih tetap sebuah misteri. Nasib buruk yang menimpa Hartono itu seingat saya diumumkan sebagai akibat bunuh diri. Tapi, waktu itu banyak yang percaya bahwa sebenarnya dia dibunuh. Yang jadi pertanyaan buat saya, mengapa dia harus “dihabisi”, padahal sejak dicopot dari jabatan pemimpin tertinggi KKO, dia tidak lagi punya pengaruh dan kekuatan yang bisa dianggap sebagai potensi ancaman terhadap kekuasaan Soeharto.

Cara Melumpuhkan Lawan

Secara sederhana bisa dikatakan bahwa di sekitar terjadinya Gestapu tersebut, terdapat paling sedikit empat kelompok dengan kepentingan masing-masing terhadap kekuasaan dan kelanjutan politik Indonesia yang waktu itu dipimpin Sukarno. *Pertama*, tentu saja Sukarno sendiri. Presiden pertama Indonesia itu berkuasa dan bertahan pada singgasananya—terutama sejak Indonesia memberlakukan kembali UUD 45 pada 1959—selama konflik antara kekuatan Komunis dan anti-Komunis bisa dikelolanya dengan baik. Pengelolaan konflik itu ditopang oleh ideologi yang dipopulerkan Sukarno sebagai Nasakom. Dalam rangka ini juga orang bicara mengenai apa yang populer waktu itu disebut sebagai politik menjaga keseimbangan atau *balance of power politics.*

Kedua, PKI. Partai Komunis Indonesia pada puncak masa Perang Dingin itu terus-menerus dikejar ketakutan terhadap Angkatan Darat, terutama sejak berita sakitnya Sukarno mulai tersiar pada awal Agustus 1965. Kalau terjadi sesuatu dengan Pemimpin Besar Revolusi itu, PKI terpaksa harus menghadapi sendiri Angkatan Darat tanpa perlindungan siapa pun. Orang-orang Komunis itu tahu meski mempunyai banyak pengikut, mereka tidak bisa melawan Angkatan Darat. Terutama selama Angkatan Darat masih dipimpin oleh jenderal-jenderal anti-Komunis.

PKI sangat sadar kondisi tersebut. Oleh sebab itu, sebagai taktik, mudah dimengerti jika PKI memilih strategi mendukung Nasakom, dan memainkan peran sebagai pendukung militan Presiden Sukarno. Presiden dan Pemimpin Besar Revolusi itu adalah satu-satunya kekuatan yang sanggup, berani, dan selalu dengan konsisten melindungi PKI dari ancaman Angkatan Darat. Bagi Sukarno, PKI bukan hanya salah satu pilar Nasakom, melainkan juga sebuah kekuatan politik yang dimanfaatkannya mengimbangi Angkatan Darat. Sebagai politikus yang canggih, tanpa kekuatan pengimbang, dia amat yakin akan mudah menjadi sandera para jenderal.

Ketiga, setelah PSI dan Masyumi—benteng utama kekuatan sipil anti-Komunis—dibubarkan oleh Presiden Sukarno pada 1960, secara perlahan tapi pasti Angkatan Darat terdorong ke posisi garda depan kekuatan anti-Komunis. Di dalam masyarakat kekuatan anti-Komunis juga memang menggantungkan harapan mereka pada sikap tegas Angkatan Darat dalam menghadapi PKI. Angkatan Darat merespons positif harapan masyarakat tersebut. Untuk golongan Islam, misalnya, Angkatan Darat antara lain mengadakan organisasi Pengajian Dakwah Islam (Padi). Sebagai Ketua Padi, Jenderal Soegandhi secara teratur mengadakan pengajian di rumah para pimpinan tentara dengan penceramah yang didatangkan dari berbagai organisasi Islam. Angkatan Darat juga membangun Perguruan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) yang diharapkan berfungsi sebagai lembaga dakwah dan pendidikan untuk menghadapi kampanye-kampanye ideologis PKI. PTDI itu

didirikan pada 1960 oleh Mayjen TNI R. Soedirman (mantan Panglima Brawijaya) bersama Mayjen TNI Sarbini (mantan Panglima Diponegoro dan Brawijaya). Gagasan awal pendirian PTDI adalah untuk mengimbangi Universitas Rakyat yang didirikan PKI di berbagai kota.

Untuk organisasi massa, Angkatan Darat pada Oktober 1964 memelopori berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Sekber Golkar adalah tempat berlindung sejumlah besar organisasi massa anti-Komunis (jumlahnya lebih dua ratus) yang berusaha menghindar dari pengejaran dan "persekusi politik" PKI yang makin bersemangat dalam melancarkan aksi ofensif-revolusionernya.

Dengan para pimpinan organisasi mahasiswa, juga terbina kontak-kontak. Ketika sejumlah organisasi mahasiswa lokal terancam dibubarkan karena bukan organisasi yang bersifat nasional sesuai dengan ketentuan masa itu, pihak militer mendorong mereka bergabung dalam sebuah Sekretariat Organisasi Mahasiswa Lokal (Somal). Dr. Syarif Thayeb, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) adalah seorang mayor jenderal yang berperan penting dalam menggagas pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) beberapa saat setelah pecahnya Gestapu.

Para pimpinan HMI—sasaran terpenting untuk dibubarkan oleh PKI—membina hubungan yang baik dengan Jenderal Ahmad Yani serta sejumlah pimpinan tentara lainnya. Dr. Fahmi Idris (beberapa kali menjadi menteri pada masa pasca-Orde Baru) menceritakan kepada saya pertemuan-pertemuannya dengan Jenderal Yani membicarakan bahaya PKI. "Yang membuat janji untuk kita jumpa Pak Yani adalah Rully yang anggota kami," kata Fahmi. Rully Yani mahasiswi Fakultas Psikologi, adalah anggota HMI yang cukup aktif, meski putri Yani yang lain tercatat sebagai anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berafiliasi kepada Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dekat dengan Presiden Sukarno.

Selain dengan Yani, Fahmi dan teman-temannya juga punya kontak teratur dengan Jenderal Achmad Sukendro, tokoh intel Angkatan Darat, Jenderal Alamsyah yang bertugas di Markas Besar Angkatan Darat, dan Jenderal Muchlas Rowi yang amat dekat dengan Nasution. "Saya dan beberapa teman bahkan pernah diikutkan pada pendidikan *combat intelligence* di Jawa Barat," cerita Fahmi kepada saya. Salah satu yang diajarkan dalam latihan intelijen itu adalah cara melumpuhkan lawan tanpa menggunakan senjata api. Setelah Gestapu, dr. Sulastomo, Ketua HMI waktu itu, sibuk menyelamatkan anak-anak HMI yang diselundupkan sebagai petugas intel ke dalam PKI. "Wah, repot, mereka dikira PKI betulan," kata Sulastomo. Menyelundupkan anak-anak HMI ke dalam PKI dimungkinkan oleh adanya kerja sama HMI dengan jaringan intel Angkatan Darat.

Kelompok *keempat* adalah pihak asing dengan kepentingan masing-masing. Dalam hal ini Amerika, yang kewalahan di Vietnam dan terus dihantui oleh teori domino, tentu saja tidak ingin melihat Sukarno lebih lama menjadi pelindung PKI yang tumbuh makin subur dalam alam Nasakom. Amerika makin lama makin cemas Indonesia akan jadi negara Komunis, suatu hal yang jelas akan mempersulit usaha mereka membendung perkembangan Komunisme di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, Inggris yang terpaksa menghabiskan dana dan daya mendukung dan melindungi Malaysia yang terus-menerus diganyang oleh Sukarno (konfrontasi), tentu juga ingin segera mengakhiri ketegangan politik, bahkan bentrokan bersenjata yang sudah sering terjadi di perbatasan Kalimantan Utara waktu itu. Jadi, masuk akal kalau CIA dan MI6—masing-masing intel Amerika dan Inggris—berusaha dan memanfaatkan segala kesempatan untuk secepatnya mengakhiri kekuasaan Sukarno.

Termasuk kelompok keempat ini adalah dinas rahasia Uni Soviet dan Cina. Hubungan Beijing-Moskow waktu itu sudah sangat tegang. PKI memihak Beijing, sesuatu yang sejalan dengan politik luar negeri Sukarno yang membangun poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Beijing, dan Pyongyang. Bagaimana KGB dan dinas

Astronaut Yuri Gagarin, Kruschov, Sukarno, dan Brezhnev di Moskow.

rahasia Cina menerjemahkan ketegangan Beijing-Moskow itu ke dalam konflik segitiga TNI, Sukarno, dan PKI ? Itulah yang hingga kini belum terungkap. Tapi, cerita tentang Dokumen Gilchrist bisa ditafsirkan sebagai usaha KGB memprovokasi Sukarno agar secepatnya menindak apa yang disebut PKI sebagai "Dewan Jenderal". Demikian juga dengan apa yang waktu itu disebut sebagai "Dokumen PKI" yang berisi rencana perampasan kekuasaan oleh golongan Komunis yang sempat jadi bahan debat panas antara Chaerul Saleh dan D.N. Aidit dalam sebuah sidang kabinet di Istana Bogor pada Desember 1964. Ada kemungkinan "Dokumen PKI" itu—seperti halnya dengan Dokumen Gilchrist—adalah juga buatan intel asing sebagai bagian dari usaha memprovokasi Angkatan Darat untuk secepatnya bertindak terhadap PKI.

SEKARANG MARI KITA memperhatikan lebih jauh kelompok ketiga, Angkatan Darat. Seperti sudah saya katakan tadi, pada pihak ini paling sedikit ada empat subkelompok dengan sikap berbeda waktu itu: subkelompok Nasution, Ahmad Yani, Soeharto, dan perwira-perwira binaan Biro Khusus PKI. Kendati memiliki perbedaan sikap terhadap Sukarno, ketiga subkelompok pertama itu sepakat dalam menghadapi PKI. Mereka semua anti-Komunis.

Terhadap Sukarno, subkelompok Nasution menganut garis lebih keras, pihak Yani mencoba merangkul sang Pemimpin Besar Revolusi dengan alasan dan harapan agar tidak terlalu dekat kepada PKI, sementara Soeharto berdiri di sudut dengan perasaan yang diremehkan oleh kelompok Yani yang berkuasa. Kalau Nasution menilai Soeharto sebagai oportunis sejak zaman Revolusi, Yani atau orang-orang di sekitar Panglima Angkatan Darat ka-

barnya menilai Soeharto sebagai "Jenderal Bodoh". Yang jelas menurut Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo, Soeharto dan perwira-perwira dalam kelompoknya memandang kelompok Yani dengan perasaan cemburu. "Ada perasaan inferior pada mereka," kata Sayidiman. Subkelompok Yani memang lebih elitis, kosmopolitan, dan umumnya berbahasa Belanda di antara mereka. Tentang hubungan Yani dengan Soeharto, Sayidiman—seorang perwira menengah di markas Jenderal Yani waktu itu—selanjutnya bercerita:

> Meskipun tidak ada ketentuan resmi tertulis, namun Pak Yani memperlakukan Pak Harto sebagai Orang Kedua di TNI-AD, setelah Menpangad. Mungkin Pak Yani melakukan itu untuk menjaga hubungan baik secara emosional dengan Pak Harto, karena ketika di lingkungan Kodam Diponegoro Pak Harto lebih senior dari Pak Yani. Jadi, Pak Yani selalu menjaga agar tidak ada perasaan kurang kondusif ketika sekarang keadaan terbalik, yaitu Pak Yani sebagai Menpangad dalam posisi senior terhadap Pak Harto yang Panglima Kostrad.
>
> Meskipun Pak Yani selalu menghormati Pak Harto dan menjaga hubungan emosional yang baik itu, namun saya merasa bahwa Pak Harto tidak terlalu "sreg" dalam hubungan beliau dengan SUAD [Staf Umum Angkatan Darat]. Saya merasakan itu acap kali kalau menghadap Pak Harto untuk minta pendapat beliau tentang keadaan dan perkembangan organisasi. Saya merasa bahwa kami sebagai perwira SUAD oleh Pak Harto dianggap kelompok Yani dan sikap Pak Harto terhadap kami terasa "dingin".

Sebuah sumber di kalangan Angkatan Darat pernah bercerita kepada saya tentang pernyataan Ali Murtopo—anggota terpenting kelompok Kostrad—dalam sebuah pertemuan di kalangan terbatas setelah kekuasaan Soeharto terkonsolidasi. Konon Murtopo waktu itu berkata, "Zaman Yani sudah lewat, sekarang zaman Soeharto." Para perwira yang dianggap dekat kepada Yani, secara berangsur memang tersingkir untuk digantikan oleh orang-orang Soeharto. Saya tidak heran jika cerita itu benar adanya, sebab para pengikut Nasution juga mengalami nasib yang kurang

lebih sama setelah Jenderal Yani naik menjadi Pangad menggantikan Nasution.

Sebelum Gestapu, sikap kelompok Soeharto terhadap Sukarno dan PKI tidak pernah tercium. Kendati demikian tidak ada yang meragukan sikap Soeharto terhadap PKI. Bukankah Pangkostrad itu pernah dimarahi Sukarno, ketika sebagai Panglima Diponegoro, dia berani mengingatkan sang Presiden mengenai bahaya Komunisme? Ini terjadi setelah pemilihan umum daerah yang di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada 1957 dimenangi oleh PKI.

Akibat perbedaan dalam menghadapi Sukarno itulah memuncaknya konflik antara subkelompok Nasution dan Yani pada awal 1965. Konon waktu itu (Januari 1965) pada suatu hari Letnan Jenderal Ahmad Yani memerintahkan Mayor Jenderal TNI Suprapto, salah seorang deputinya—kemudian lebih dikenal sebagai salah seorang Pahlawan Revolusi—menangkap Jenderal Nasution. Perintah yang tampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan loyalitas Yani kepada Sukarno itu dibatalkan secara mendadak beberapa hari kemudian, sehingga bentrok antara pendukung masing-masing kubu yang nyaris terjadi, berhasil terhindarkan.

Brigadir Jenderal TNI Abdul Kadir Besar, S.H., seorang anggota kelompok Nasution, mengisahkan kepada saya bagaimana kubu mereka sudah menyiapkan senjata untuk secara fisik melawan jika Menko Hankam Kasab itu ditangkap. Ketegangan kabarnya terhindarkan hanya karena campur tangan sejumlah jenderal senior seperti Jenderal Sarbini, Jenderal Soeharto, Jenderal R. Sudirman, dan Jenderal Basuki Rahmat. Mereka beramai-ramai menentang rencana Yani tersebut.

JENDERAL ABDUL KADIR BESAR menjelaskan bahwa ketegangan sebenarnya sudah muncul ke permukaan sebelum rencana penangkapan yang batal itu. Pada bulan-bulan terakhir 1964, Yani memerintahkan penarikan pasukan dari Markas Besar Angkatan Darat yang berjaga di rumah Nasution. Siliwangi merespons tindakan Yani dengan mengirimkan satu peleton tentara mengawal

kediaman Panglima pertama mereka. Maka ketika berita rencana penangkapan itu sampai kepada orang-orang di sekitar Nasution, pasukan pengawal dari Siliwangi itu juga siap siaga.

Sebelum konflik yang nyaris menyebabkan "pertempuran" antara kelompok Yani dan kelompok Nasution itu, Jenderal Muchlas Rowi—mantan Komandan Batalion di Brawijaya semasa Revolusi, mantan Kepala Pusat Perawatan Rohani Angkatan Darat (Pusroh AD), dan terakhir Duta Besar di Turki—pernah dimarahi oleh Jenderal Yani karena menjalankan perintah Nasution tanpa sepengetahuan Pangad. Padahal waktu itu, Jenderal Rowi sudah dimutasikan dari Mabes Angkatan Darat ke kantor Menko Hankam/KSAB Nasution. Anehnya dalam kemarahan itu, Yani sekalian juga menyatakan sikapnya yang secara pribadi memusuhi Nasution. Menurut penuturan Jenderal Rowi dalam memoarnya, *Catatan Perjalanan Hidup, Pemikiran, dan Pemahaman M. Muchlas Rowi* yang terbit pada 2000, Yani dikutip berkata kepadanya:

> Asal *ye* [kamu] tahu saja, bahwa saya tidak respek lagi kepada Jenderal Nasution, karena dia berani menentang Presiden Sukarno. Saya tidak akan menginjakkan kaki lagi di kantor Menko Hankam.

Apakah sikap memusuhi Nasution ini menunjukkan Yani telah tunduk tanpa reserve kepada Sukarno? Tidak juga. Hubungan sehari-hari Yani dengan Sukarno memang tetap baik, antara lain karena Yani merasa harus memenangi persaingan dengan PKI dalam merangkul Paduka yang Mulia Presiden dan Pemimpin Besar Revolusi. Tapi, ketika pada 14 Juni 1965 di Istana Olahraga Senayan, Jenderal Yani memberi taklimat kepada para perwira sehubungan dengan dibantainya Pembantu Letnan Satu (Peltu) Sudjono oleh BTI di Bandar Betsy, Sumatra Utara, Panglima Angkatan Darat tersebut dikutip sebagai berkata,

> *Als de grote Bung veel vrouwen wil hebben, kan hij zijn gang gaan. Maar als de grote Bung met de PKI will gaan flirten, dan heeft hij met the Angkatan Darat te maken.*

> Terjemahannya kira-kira, kalau Bung Besar kepengin punya istri banyak, biarkan saja. Tapi bila Bung Besar mau main mata dengan PKI, maka dia akan berurusan dengan Angkatan Darat.

Peter Dale Scott, seorang sarjana Amerika, kemudian muncul dengan pendapat bahwa pertemuan para jenderal Angkatan Darat pada Januari 1965 yang menggagalkan rencana penangkapan Nasution itulah yang justru meyakinkan Sukarno untuk tidak lagi percaya kepada Yani. Dengan kata lain, kesetiaan Yani kepada Pemimpin Besar Revolusi mulai diragukan Sukarno. Tampaknya rencana penyingkiran Yani mulai bersemi di kepala Sukarno sejak itu.

KETIKA KITA MEMBICARAKAN konflik dalam Angkatan Darat waktu itu, faktor para perwira Diponegoro yang dimunculkan secara menarik oleh Cornell Paper tentulah harus dibicarakan. Pengalaman saya di tengah masyarakat Jawa Tengah ketika menjadi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Solo selama tiga tahun dan sebagai wartawan yang meliput operasi militer pembersihan elemen-elemen Gestapu dalam militer di Jawa Tengah pada November 1965, serta bacaan-bacaan tentang masyarakat dan budaya Jawa, membawa saya pada kesimpulan bahwa fenomena yang ditengarai para ahli dari Cornell University itu bukannya tidak ada.

Kendati demikian, tatkala beraksi pada satu Oktober, tindakan para perwira di Jawa Tengah itu adalah hanya bagian dari gerakan besar yang dirancang secara terpusat oleh Biro Khusus PKI di Jakarta. Di kemudian hari, setelah penangkapan dan interogasi orang-orang Komunis yang militer maupun sipil, terbongkarlah sebagian besar jaringan Biro Khusus tersebut.

Mengenai jaringan tersebut, menarik untuk menyimak informasi yang saya dapatkan dari Brigjen TNI (Purn.) Dr. Saafroedin Bahar yang pernah menjadi hakim militer di Mahkamah Militer Kodam III/17 Agustus di Sumatra Barat. Proses pemeriksaannya

berhasil membongkar jaringan Biro Khusus PKI di wilayah Sumatra Barat dan Tengah. "Di Sumatra Barat, Kepala Biro Khusus adalah Baharuddin Hanafi, dengan wakilnya Jayusman alias Mamak. Di Riau, Ketua Biro Khusus adalah Mohammad Amin Zein. Mereka ini selalu berusaha secara sistematis memengaruhi perwira-perwira teras Kodam III/17 Agustus. Mereka juga ikut dalam rapat-rapat Biro Khusus yang dipimpin D.N. Aidit," tulis Saafroedin Bahar lewat surat elektroniknya kepada saya pada April 2012. Informasi Saafroedin Bahar ini memungkinkan kita menyimpulkan bahwa Biro Khusus PKI bekerja di semua instansi dan daerah militer.

Bahwa perwira-perwira Diponegoro di Jawa Tengah itu mengeluhkan gaya hidup para jenderal pimpinan Angkatan Darat di Jakarta yang mereka anggap mewah dan jauh dari kesederhanaan, bagi mereka yang kenal budaya Jawa Tengah masa itu, memang tidak sulit dimengerti. Tapi, yang membungkus keluhan itu dengan ideologi dan mengarahkannya menjadi suatu gerakan politik dan akhirnya militer, jelas adalah Biro Khusus PKI. Menarik untuk dicatat bahwa keluhan itu sama sekali tidak ditujukan kepada Soeharto yang bukan saja tidak termasuk kelompok Yani, melainkan juga karena kehidupan ekonominya sebagai jenderal senior waktu itu kabarnya memang tergolong sederhana. Soeharto dan para anak buahnya di Kostrad juga memang jauh dari gaya kehidupan kosmopolitan.

Dayino, seorang tokoh PSI Yogyakarta dan mantan pemuda Patuk, teman Soeharto semasa Revolusi di Yogyakarta, mengungkapkan kepada saya pada 1984 bahwa menjelang Gestapu itu, Ibu Tien Soeharto pernah menyampaikan kepadanya rencana Soeharto keluar dari tentara. Menurut istrinya, Soeharto merencanakan mencari pekerjaan lain untuk membiayai keluarga yang tidak bisa lagi ditopang oleh penghasilannya sebagai seorang Panglima Kostrad.

Dalam memoarnya, Jusuf Wanandi membenarkan cerita Dayino tentang rencana Soeharto keluar dari militer. Tapi, alasannya lain. Menurut Jusuf Wanandi—ceritanya bersumber pada Jende-

ral Sudjono Humardani—Soeharto memutuskan akan berhenti dari tentara karena kecewa tidak diangkat menjadi Panglima Kolaga dalam rangka Dwikora pengganyangan Malaysia. Jabatan tersebut diberikan Sukarno kepada Laksamana Madya Udara Omar Dani, Panglima Angkatan Udara, yang jauh lebih junior dari Soeharto. "Dia menulis surat pengunduran dirinya dari Angkatan Darat pada Mei, tapi diintersep oleh Letnan Kolonel Sudjono Humardani hingga tidak sampai ke tangan Nasution," tulis Wanandi.

KESAN SAYA, PARA PERWIRA DIPONEGORO yang terlibat Gestapu itu sebenarnya tidak semuanya Komunis. Beberapa di antara mereka hanya Sukarnois. Tapi, rata-rata mereka menganut ideologi nasionalisme dengan lapisan xenofobia yang kental (penuh curiga kepada orang asing, terutama orang kulit putih) disertai pandangan kerakyatan yang ditandai oleh kesederhanaan dan keprihatinan hidup. Hal demikian itu umum ditemukan di kalangan kaum abangan di Jawa Tengah pada masa tersebut. Sebagai Sukarnois yang kerakyatan, mereka memang tidak sulit dihasut oleh Biro Khusus PKI untuk melawan "Dewan Jenderal yang bekerja sama dengan CIA dan tidak loyal kepada Pemimpin Besar Revolusi".

Bayangan Madiun 1948

Pembantaian besar-besaran di Jawa Tengah dan Jawa Timur pasca-operasi Gestapu, tidak bisa dilepaskan dari persepsi dan trauma golongan Islam dan Nasionalis kepada kaum Komunis yang membantai mereka setelah PKI menguasai Madiun pada September 1948. Itu kesan kuat yang saya peroleh dari banyak tokoh masyarakat Jawa Tengah ketika meliput operasi RPKAD dalam rangka pembasmian Gestapu di kalangan militer. Jangan lupa bahwa Gestapu terjadi hanya 17 tahun setelah peristiwa pemberontakan Komunis di Madiun tersebut. Ingatan banyak orang di Jawa Timur dan Jawa Tengah terhadap kekejaman Komunis di Madiun pada 1948 masih sangat segar ketika Gestapu terjadi.

Sebagai reporter muda yang meliput operasi anti-Gestapu pada November 1965 di Jawa Tengah waktu itu, saya banyak berjumpa dengan mereka yang dulu mengalami Peristiwa Madiun. Masih dengan ingatan jernih mereka berbicara mengenai kekejaman PKI waktu itu. Karena itulah, mereka sangat takut jika Gestapu/PKI menang. Latar belakang seperti inilah yang membuat mereka umumnya bersikap dan bertekad: "Dibunuh atau membunuh duluan". Dengan memperhitungkan faktor trauma Madiun itulah, antara lain, kita harus mengerti terjadinya pembantaian besar-besaran pengikut PKI, atau yang dituduh PKI, di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada masa itu.

LALU, SIAPA SEBENARNYA yang berada di balik Gestapu? PKI sendiri, kata pemerintahan Orde Baru; akibat pertentangan internal Angkatan Darat, kata PKI dan para ahli Indonesia di Cornell University; CIA, kata Peter Dale Scott; Soeharto, kata Wertheim; PKI, Tentara, dan Nekolim, kata Presiden Sukarno.

Sukarno, Soeharto, dan Tradisi Daulat

Aksi pertama Gestapu muncul dalam bentuk penculikan. Sejumlah jenderal diculik dari kediamannya. Oleh karena itu, saya ingin memulai diskusi tentang siapa saja kira-kira yang mungkin berdiri di balik Gestapu dengan menyegarkan ingatan kita semua kepada tradisi **daulat**, **mendaulat**, dan **pendaulatan** yang pada zaman Revolusi sering muncul dalam bentuk penculikan. Yang paling mencolok tentu saja penculikan Sukarno dan Hatta oleh para pemuda Jakarta menjelang Proklamasi 1945. Kedua pemimpin Indonesia itu digiring dengan "setengah dipaksa" oleh para pemuda ke Rengas Dengklok (Jawa Barat) untuk didaulat mengumumkan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin.

Di kemudian hari, juga ada penculikan Perdana Menteri Syahrir di Solo oleh elemen pemuda dan tentara yang antidiplomasi. Dengan penculikan Syahrir, diharapkan perundingan dengan Belanda bisa dicegah. Setelah didaulat, Kabinet Syahrir malah bu-

bar, tapi sang Perdana Menteri selamat. Kabinet yang menggantikannya, dipimpin oleh Amir Syarifuddin, tetap saja menjalankan perundingan. Dengan restu Sukarno, tentu saja.

Syahrir, Sukarno, dan Hatta diculik tanpa dianiaya secara fisik. Tapi, penculikan Dr. Muwardi, pemimpin Barisan Banteng di Solo, berakhir dengan kematian. Hingga kini belum juga terungkap siapa persisnya yang menculik dan bagaimana tewasnya Dr. Muwardi. Tidak pernah jelas apakah memang Dr. Muwardi diculik untuk dibunuh atau kematiannya disebabkan oleh sesuatu yang berada di luar rencana. Kasus pendaulatan cukup banyak terjadi pada zaman Revolusi, karena pada zaman itu menjadi salah satu modus operandi melakukan perubahan elite atau kebijakan. Dalam organisasi ketentaraan pada awal Revolusi, ketika sistem pergantian komandan belum tercipta, daulat-mendaulat sering ditempuh dalam mengganti pimpinan pasukan. Hal demikian dengan menarik dikisahkan oleh Jenderal TNI Abdul Haris Nasution dalam bagian awal memoarnya.

Yang ingin saya tekankan sehubungan dengan cerita culik-menculik tersebut adalah kegiatan culik sebagai modus penting dalam perubahan elite di sebuah zaman ketika aturan main yang ada terutama adalah aturan main revolusi. Tapi, apa pun nama dan ceritanya, culik sebagai cara mendaulat rupanya telah mengendap rapi dalam sejarah dan budaya politik Indonesia. Terutama bagi generasi yang mengalami revolusi fisik dahulu. Dalam pidatonya pada Rapat Pimpinan ABRI di Pekan Baru pada 1980, misalnya, Presiden Soeharto masih berbicara tentang penculikan anggota sebagai cara mencegah terjadinya kesepakatan di MPR jika muncul usaha mengubah Undang-Undang Dasar 45.

PRESIDEN SUKARNO YANG MAKIN KEWALAHAN menghadapi Angkatan Darat—terus menolak Nasakom, tidak secara serius melakukan konfrontasi, dan makin sibuk mengatur barisan kaum anti-Komunis—mendorong sang Presiden tiba pada kesimpulan untuk tidak punya pilihan lain, kecuali mengganti Panglima Angkatan Darat, Letjen Ahmad Yani. Penggantian pimpinan Angkat-

an Darat dengan damai telah Sukarno lakukan kepada Nasution pada 1962. Tidak ada ketegangan yang terjadi ketika Nasution digantikan oleh Ahmad Yani waktu itu. Pergantian pimpinan Angkatan Darat terjadi setelah sebelumnya pada 1960, Nasution—dengan dukungan para perwira senior—menolak melepaskan jabatan KSAD. Pada Juni 1962 dengan janji akan diangkat menjadi Panglima ABRI, Nasution berhasil dibujuk menyerahkan Jabatan KSAD kepada Ahmad Yani.

Namun kemudian, menurut Sukarno, para pimpinan angkatan lain tidak siap berada di bawah pimpinan seorang Jenderal Angkatan Darat. Sukarno memperlihatkan bukti dengan menunjukkan surat Omar Dani yang menyebut Angkatan Udara tidak bersedia berada di bawah seorang Jenderal Angkatan Darat. Nasution yang telah terkecoh itu akhirnya harus puas hanya menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB) tanpa garis komando ke pasukan. Sejak saat itu, berakhirlah karier panjang Nasution sebagai komandan yang mengendalikan pasukan. Tidak terlalu sulit ditebak surat Omar Dani dibuat atas petunjuk Sukarno.

Sebagai rangkaian dari usahanya menguasai militer, Sukarno menciptakan Komando Operasi Tertinggi (Koti) pada Juli 1963 dengan dirinya sebagai Panglima Besar. Koti sebenarnya adalah kelanjutan dari Koti Pembebasan Irian Barat (Koti Pemirbar) yang dibentuk pada Januari 1962. Setelah soal Irian Barat selesai dan Konfrontasi terhadap Malaysia menjadi kesibukan baru, Koti urusan Irian Barat bertransformasi menjadi Koti urusan Konfrontasi dengan Malaysia.

Lewat Koti versi terakhir tersebut, Sukarno praktis telah menjadi Panglima ABRI (Pangti *in function* menurut istilah Sukarno) yang memimpin tentara dengan dibantu oleh seorang Wakil Panglima Besar (A.H. Nasution) dan seorang Kepala Staf (Ahmad Yani), empat Deputi (Intelijen, Operasi, Pengerahan Tenaga, Logistik dan Politik Sosial Ekonomi). Perlu diingat bahwa Deputi Intelijen adalah Dr. Subandrio yang waktu itu mendapat pangkat kehormatan sebagai Laksamana Udara. Dari posisi itulah, Subandrio kemudian juga menjadi Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI). De-

ngan Koti versi Konfrontasi Malaysia tersebut, Istana secara otomatis telah menjadi Mabes ABRI, jauh sebelum di kemudian hari (1969) Soeharto mengintegrasikan tentara dan membangun Mabes ABRI yang kini berkantor di Cilangkap, Jakarta Timur.

Pada 1965, suhu politik domestik, regional, dan internasional (Perang Dingin) makin mendidih. Keengganan Angkatan Darat melaksanakan perintah Konfrontasi, kesibukan mereka melindungi musuh-musuh PKI, dan mengganjal agenda Nasakomisasi, di mata Pemimpin Besar Revolusi tersisa hanya ada satu jalan untuk menyingkirkan Jenderal Yani dan para pembantunya. Jalan itu adalah **daulat** dalam bentuk penculikan ala Rengas Dengklok atau ala penculikan Syahrir di Solo. Artinya, diculik untuk didaulat melepaskan posisi pimpinan Angkatan Darat. Cara melengserkan Nasution tiga tahun sebelumnya tidak bisa lagi dipakai Sukarno.

Dari titik inilah kita sebaiknya mengerti, keputusan Sukarno—sebagaimana yang dikisahkan oleh Kolonel (KKO) Bambang Widjanarko dalam buku *The Devious Dalang*—menggantikan Yani dengan cara daulat. Menurut penuturan Widjanarko, pada empat Agustus 1965 Presiden Sukarno memanggil komandan pengawalnya, Letnan Kolonel Untung, untuk menerima perintah melaksanakan rencana sang Presiden.

Saya sangat sadar kesaksian Bambang Widjanarko—Ajudan Senior yang "melekat" pada Sukarno—itu disangsikan sejumlah orang, terutama para pengikut dan pembela Sukarno. Tapi, saya juga yakin Kolonel (KKO) Bambang Widjanarko dan para interogatornya bukan orang-orang yang kreatif dan canggih serta terampil mengarang cerita berbau detektif yang berkisah tentang seorang presiden merancang penculikan pimpinan tentaranya dengan menggunakan pengawal pribadi sang presiden sendiri.

Dengan kata lain, dengan meletakkan pada konteks dan situasi politik masa itu, saya melihat banyak kebenaran dalam kesaksian Kolonel Bambang tersebut. Lagi pula kesaksian itu diberikan setelah Sukarno meninggal pada Juni 1970. Hasil interogasi Tim Pemeriksa Pusat (Teperpu) atas diri Bambang itu secara resmi tidak pernah diumumkan, tidak pernah dipakai untuk menu-

duh Sukarno terlibat Gestapu, bahkan sama sekali tidak pernah dipergunakan di pengadilan. Kita tahu mengenai adanya dokumen itu setelah bocor atau sengaja dibocorkan ke luar negeri dan diterbitkan di Negeri Belanda.

Sumber-sumber yang dekat dengan Soeharto dan Nasution pada hari-hari pertama pasca-Gestapu yakin bahwa sejak Untung ditangkap dalam pelariannya, Soeharto, Nasution, dan orang-orang di sekitar mereka sebenarnya sudah mencium keterlibatan Sukarno dalam Gestapu. Salah satu sumber kecurigaan adalah desakan Untung kepada para penangkapnya untuk memperhadapkan dirinya langsung kepada Sukarno, dan tidak ke Kostrad. Cerita mengenai ini waktu itu tidak begitu mendapat publikasi di dalam negeri, tapi dilaporkan oleh John Hughes, wartawan *The Christian Science Monitor*, dalam korannya yang terbit di Boston, Amerika Serikat. Soal tertangkapnya Untung ditulis kembali dalam buku John Hughes, *Indonesian Upheaval* (1967).

Bayi Perempuan Sukarno

Sehubungan dengan ini juga menarik mendengar kesaksian Patnaik yang diceritakannya kepada sejarahwan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), A.B. Lapian di Hotel Oberoy, Bali, pada 31 Januari 1993. Shri Biju Patnaik adalah seorang pilot dari India yang pernah diutus Perdana Menteri Nehru ke Yogyakarta pada zaman Revolusi dengan menerobos Blokade Belanda. Patnaik berada di Yogyakarta ketika Megawati lahir. Waktu itu Yogyakarta dilanda angin ribut, dan Sukarno bertanya kepada Patnaik bahasa Sansekerta buat fenomena alam tersebut. “Mega,” kata Patnaik. Maka bayi perempuan Sukarno, yang kelak menjadi Presiden ke-5 Republik Indonesia itu, diberi nama Megawati oleh ayahandanya.

Patnaik adalah sahabat banyak pembesar Indonesia sejak masa Revolusi. Terakhir kali pilot Patnaik jumpa Bung Karno adalah pada 30 September 1965 tengah malam, di Istana Merdeka, sepulang Sukarno dari memberi pidato di Istora Senayan, hanya bebe-

rapa jam sebelum Gestapu bergerak. Setelah pembicaraan penting mengenai konflik India-Pakistan selesai dengan janji Sukarno tidak akan membantu Pakistan menyerang India, Patnaik diminta oleh Sukarno agar meninggalkan Jakarta sebelum subuh. “Sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang,” kata Sukarno. Pertanyaannya, kenapa dan buat apa Lapangan Terbang Kemayoran akan ditutup oleh Sukarno setelah subuh esok harinya?

Masih di sekitar terlibat-tidaknya Sukarno, Jenderal Yoga Sugomo, Kepala Intel Kostrad pada saat Gestapu, adalah perwira yang pada pagi hari satu Oktober yang meyakinkan Pangkostrad Soeharto bahwa PKI ada di balik Gestapu. Indikator Yoga—sebagai yang diceritakan dalam buku *Memori Jenderal Yoga*—adalah Letkol Untung yang dikenalnya secara pribadi ketika bertugas di Sumatra Barat dalam operasi penumpasan PRRI. Menurut Yoga bahkan semasa di Jawa Tengah, Untung sudah dikenal sebagai perwira beraliran kiri.

Mendengar siaran radio yang menyebut nama Untung sebagai pemimpin Gestapu, Yoga tidak ragu lagi, ini pekerjaan PKI. Pertanyaan Soeharto selanjutnya pada taklimat di Kostrad pagi itu, apakah kira-kira Presiden Sukarno terlibat dalam gerakan tersebut? Jawab Yoga dengan yakin, “Ya.” Kepala Intel Kostrad itu —orang Indonesia satu-satunya yang mendapat pendidikan tinggi intel di Jepang—berpegang pada keyakinan Pangad Ahmad Yani bahwa PKI tidak akan berani melawan Angkatan Darat karena Presiden ada di belakang Angkatan Darat. “Dengan demikian, PKI baru akan berani bergerak kalau Presiden berada di belakang mereka.”

Laporan John Hughes dan kesaksian Patnaik makin memperkuat kecurigaan bahwa, paling sedikit, Sukarno tahu Gestapu akan melakukan operasi. Dalam laporan Pengemban Supersemar kepada Ketua MPRS pada satu Februari 1967, Soeharto antara lain menyampaikan “ … kepada Presiden Sukarno dirasakan perlu diminta pertanggungjawaban, baik dalam rangka ketatanegaraan maupun pidana”. Tidak dijelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan “pidana” oleh Soeharto. Apakah itu berarti Soeharto

mempunyai bukti keterlibatan Sukarno dalam Gestapu? Lalu tindakan apa yang harus dilakukan terhadap Pemimpin Besar Revolusi tersebut? Di situlah kabarnya untuk pertama kalinya setelah Gestapu, terjadi perbedaan antara Jenderal Nasution dan Mayjen Soeharto. Nasution ingin Sukarno diadili, sementara Soeharto bertekad menyelesaikannya secara politis, bukan hukum. Kalkulasi Soeharto, pengaruh Presiden Sukarno dalam ABRI dan masyarakat waktu itu masih sangat kuat. Kalau Sukarno diadili, perang saudara hampir pasti bakal sulit dihindari. "Untuk tujuan itulah pengadilan atas diri Untung diarahkan agar tidak mengungkap keterlibatan Sukarno," kata seorang pensiunan hakim Mahmillub kepada saya sekian tahun silam.

Sementara itu, menjelang Gestapu konon memang beredar cerita yang menyebut Yani akan dicopot dari posisi Pangad untuk didudukkan pada tempat yang lebih tinggi tanpa kontrol terhadap tentara. Trik seperti ini, seperti kita ketahui, telah dilakukan Sukarno kepada Nasution sebelumnya. Untuk Jenderal Yani kabarnya Sukarno merencanakan menciptakan jabatan Wakil Perdana Menteri (Waperdam) IV di samping tiga Waperdam yang sudah ada. Tidak pernah diperoleh informasi mengapa rencana Sukarno itu—kalau memang pernah ada—tidak terlaksana. Apakah Yani, dengan dukungan para jenderal senior Angkatan Darat, menolak "ditendang ke atas"? Mungkinkah karena penolakan itu, Sukarno tidak punya pilihan lain kecuali melakukan penggantian dengan cara daulat?

Yang kita tahu, menurut rencana pada satu Oktober, Jumat pagi, Yani diagendakan menghadap Presiden. Kepada seorang stafnya, Yani konon sudah bercerita bahwa mungkin di Istana dia akan diminta Sukarno melepaskan jabatan Panglima Angkatan Darat. Apakah Yani akan menerima atau menolak perintah Sukarno tersebut? Tidak tersedia informasi mengenai itu. Untuk diketahui, Nasution—dengan dukungan para perwira senior Angkatan Darat—menolak tawaran Sukarno menjadi Menteri Pertahanan pada 1960 jika syaratnya adalah melepaskan jabatan Kepala Staf Angkatan Darat.

NAH, SEKARANG TENTANG UNTUNG. Mengingat bahwa Komandan Pengawal Presiden ini sudah lama berada dalam pembinaan Syam Kamaruzzaman, Ketua Biro Khusus PKI, rencana daulat gubahan Sukarno itu tentu saja mudah bocor. Menjadi tentara binaan Biro Khusus PKI sebenarnya bukan pengalaman baru bagi Untung. Menurut Soeharto, Untung sudah dekat dengan PKI sejak sebelum bertugas di Resimen Solo, pada 1950. Soeharto yang Komandan Resimen Solo tahu bahwa Untung, jauh sebelum dibina Syam, sudah merupakan perwira binaan Alimin, seorang tokoh senior PKI.

Dan kalau benar bahwa Syam juga agen tentara (surat senjatanya sebagai intel Kodam di Jakarta, konon, ditandatangani sendiri oleh Pangdam Jaya waktu itu, Mayjen TNI Umar Wirahadikusuma) dan juga mungkin agen intel asing—paling sedikit menurut cerita Dr. Subandrio dan keyakinan Prof. Wertheim—maka bisa dibayangkan dinamika macam apa yang dihasilkan oleh bocornya rencana Sukarno ke PKI dan mungkin juga ke berbagai jaringan dinas rahasia asing.

Daulat, Bukan Pembantaian

Setelah membaca hampir semua proses Mahmillub, analisis sejumlah pakar serta sejumlah buku catatan pengalaman para pelaku, saya hampir yakin bahwa pengertian Sukarno dan Soeharto, demikian juga Kolonel Latif, Brigjen Supardjo, Untung, D.N. Aidit, dan juga Omar Dani mengenai penculikan, semua sama. Yang direncanakan bukan pembantaian seperti yang kemudian terjadi, melainkan penculikan untuk pendaulatan.

Jika kesimpulan saya ini benar, maka masuk akal kalau Soeharto mengetahui, tapi membiarkan gerakan daulat tersebut. Alasan Soeharto, kegiatan yang digagas Sukarno dan dilaksanakan Untung tersebut adalah keputusan dan tindakan politik yang tidak bisa dihalangi olehnya. Lagi pula perintah Sukarno itu juga tidak merugikan Panglima Kostrad tersebut. Juga harus diingat,

seandainya pun Soeharto berkeputusan mencegah Gestapu, Kostrad waktu itu tidak punya pasukan tetap seperti sekarang ini.

Yani dan para pembantunya di Markas Besar Angkatan Darat akan diculik untuk dihadapkan kepada Sukarno. Mungkin dengan tuduhan tidak loyal menjalankan kebijakan Panglima Tertinggi, terutama dalam soal Konfrontasi dengan Malaysia dan pembangkangannya terhadap Nasakom dan penolakannya pada rencana pembentukan Angkatan Kelima. Lebih kurang begitulah mungkin skenario Sukarno. Dengan cara dan alasan itu Jenderal Yani akan didaulat untuk selanjutnya digantikan oleh jenderal pilihan Sukarno. Itulah menurut dugaan saya yang paling mungkin ada di kepala Sukarno waktu itu. Itu pula yang kemungkinan besar disampaikan Untung kepada teman-teman berkomplotnya: Syam, Kolonel Latif, dan Brigjen TNI Supardjo. Dan itu jugalah yang kemungkinan besar disampaikan Latif kepada Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto, beberapa jam sebelum operasi mulai.

Saya hampir yakin D.N. Aidit juga mengerti Gestapu sebagai hanya pendaulatan atas pimpinan Angkatan Darat. Aidit dan PKI pasti berharap pimpinan Angkatan Darat pasca-Yani akan lebih mudah diatur oleh Sukarno. Dengan cara itu diharapkan Angkatan Darat akan mendukung gagasan Nasakom dan lebih bersahabat kepada PKI, seperti sikap Angkatan Udara di bawah Omar Dani. Inilah yang saya yakini penjelasannya mengapa Aidit memerintahkan Kepala Biro Khususnya, Syam Kamaruzzaman, membantu para perwira "berpikiran maju" yang telah lama mereka bina itu. Pada tingkat ini pertanyaan yang mahapenting adalah bagaimana rencana pendaulatan yang digagas Sukarno dan "didukung" Biro Khusus PKI itu kemudian berubah menjadi "pesta" pembantaian para jenderal?

"Tego Larane Ora Tego Patine."

Tentang Soeharto, Jenderal Nasution punya komentar yang menarik. "Soeharto bukan Komunis, tapi sejak di Yogyakarta dulu adalah seorang oportunis," kata Nasution kepada saya pada No-

vember 1984. Tidak berapa lama sebelum jatuh sakit menjelang akhir hidupnya, yang juga merupakan pertemuan terakhir saya dengan Jenderal Besar tersebut, penegasan bahwa Soeharto hanya seorang oportunis, diulanginya sekali lagi.

Sebagai jenderal paling senior di lapangan dalam jajaran Angkatan Darat, kesempatan Soeharto menduduki posisi puncak angkatannya bakal terbuka setelah Yani tersingkir. Psikologi inilah menurut dugaan saya yang dimanfaatkan Kolonel Latif ketika menemui Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto beberapa jam sebelum operasi penculikan dimulai. Tentang pertemuannya dengan Soeharto malam tersebut, dalam pembelaan dirinya di depan Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) yang mengadilinya di Bandung pada Mei 1978, Kolonel Latif menjelaskan:

> … saya pada malam itu di samping memang menengok putranda yang sedang terkena musibah sekaligus untuk melaporkan akan adanya gerakan pada esok paginya untuk menggagalkan rencana *coup d'état* dari Dewan Jenderal di mana beliau sudah tahu sebelumnya.
>
> Memang saya berpendapat bahwa satu-satunya adalah beliaulah yang saya anggap loyal terhadap kepemimpinan Presiden Sukarno dan saya kenal semenjak dari Yogyakarta siapa sebenarnya Bapak Jenderal Soeharto itu …. Saya mempercayai kepemimpinan beliau seandainya berhasil dapat menggagalkan usaha *coup* Dewan Jenderal beliaulah yang terpilih sebagai tampuk pimpinan sebagai pembantu setia Presiden.

Dari cerita Latif di depan Mahmilti itu bisa diduga bahwa yang mereka, para pelaku makar itu, harapkan dari pertemuan sang Kolonel dengan Soeharto bukan bantuan untuk operasi malam itu, melainkan pengertian dan sikap lunak setelah operasi Gestapu berhasil "menggagalkan *coup d'état* Dewan Jenderal". Latif dan teman-temannya pastilah tahu adanya ketidakserasian antara Soeharto dan Yani, dan karena itu mereka berharap Soeharto sebagai Pangad pengganti Yani nantinya tidak akan bereaksi keras kepada Gestapu sebagai kegiatan pendaulatan.

Tentang sikap Soeharto malam itu masih ada dua hal yang juga harus dipertimbangkan: *Pertama*, dari percakapan singkatnya dengan Latif, hampir bisa dipastikan Soeharto tidak tahu bahwa di balik Gestapu ada Biro Khusus PKI yang berperan penting. *Kedua*, mengingat terbatasnya waktu pertemuan Latif dan Soeharto, kemungkinan besar Panglima Kostrad itu bahkan tidak punya informasi mengenai nama-nama pemimpin gerakan yang memudahkan baginya menduga siapa saja yang sebenarnya berdiri di balik gerakan malam itu.

Yang dilaporkan Kolonel Latif, menurut pengakuannya, hanyalah bahwa mereka, para perwira Angkatan Darat, akan bertindak menyelamatkan Presiden Sukarno. Bukankah beberapa hari sebelumnya Latif sudah melaporkan kepada Soeharto mengenai adanya "Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta"? Dari informasi Latif, Soeharto tahu dirinya tidak dipandang sebagai anggota "Dewan Jenderal". Jadi aman. Kalau pasti aman dan bahkan ada kemungkinan mendapat jabatan yang lebih tinggi, buat apa juga repot-repot di tengah malam, bukan?

Di kemudian hari memang muncul pertanyaan mengenai dua batalion, masing-masing dari Jawa Tengah (454) dan Jawa Timur (530) yang dipakai Gestapu. Kedua batalion yang didatangkan Soeharto (atau Mayjen TNI Pranoto Rekso Samodra sebagai Asisten Personil Menpangad?) untuk parade peringatan Hari Angkatan Bersenjata itu diperintahkan datang dengan perlengkapan siap tempur. Sementara Batalion 328/Kujang Siliwangi dari Jawa Barat mendapat perintah yang berbeda. Apakah ini bisa ditafsirkan sebagai bantuan tidak langsung kepada Gestapu? Siapa yang memberi bantuan? Soeharto atau Pranoto? Mengenai soal ini, perlu diketahui bahwa Mayjen TNI Pranoto adalah Asisten Personalia Pangad yang merekrut Letkol Untung dari Kodam Diponegoro dan memasukkannya ke Resimen Cakrabirawa, pengawal Presiden. Waktu itu sebenarnya Presiden Sukarno menginginkan Mayor Infantri L.B. Moerdani, tapi karena Benny menolak, masuklah Untung. Kedua perwira menengah itu memang sama-sama pe-

megang Bintang Sakti sebagai ganjaran dari keberanian mereka di Palagan Irian Barat.

YANG JELAS MALAM ITU Soeharto tercatat tidak memainkan peran apa-apa dalam Operasi Gestapu, kecuali berdiam diri dan pulang tidur setelah mendapat laporan dari Kolonel Latif. Dan seperti juga para perwira dan petinggi operasi Gestapu, Pangkostrad itu jelas tidak membayangkan kegiatan penculikan tersebut akan berakhir sebagai pembantaian para jenderal pimpinan Angkatan Darat.

Nah, ketika para jenderal ternyata bukan cuma diculik tapi malah dibantai, maka sebagai orang Jawa Soeharto langsung saja mengamalkan filsafat leluhurnya: "*Tego larane, ora tego patine*", maksudnya, sampai hati melihat teman-teman jenderal didaulat, tapi tidak rela menerima kematian mereka. Sampai hati melihat Yani disingkirkan, tapi tidak tega melihat Yani dibantai. Bisa diduga bahwa pada saat yang sama Soeharto tentu juga sangat marah kepada Latif karena merasa telah dibohongi oleh kolonel yang mantan anak buahnya itu. Kemarahan itu kemudian tecermin pada siksaan keras yang diterima Latif dalam tahanan Orde Baru. Maka setelah pagi harinya yakin PKI berada di balik Gestapu, Soeharto lantas saja mengamuk dengan bertindak keras kepada para pengikut partai tersebut. Para pengikut Sukarno dalam politik dan militer kemudian juga terimbas pembersihan. Tindakan yang terakhir ini terpaksa dilakukannya karena Sukarno terus-menerus mempertahankan, bahkan membela PKI.

Secara tidak langsung sikap Sukarno ini ikut berperan memperhebat kegiatan pembantaian orang-orang PKI atau mereka yang dicurigai sebagai PKI. Kecemasan akan bertahannya PKI, artinya tidak dibubarkan, menimbulkan ketakutan yang menghantui orang-orang anti-Komunis waktu itu. Seandainya Sukarno cepat mengutuk dan membubarkan PKI, ada kemungkinan pembantaian dan pembersihan tidak sedramatis dan setragis seperti yang kemudian terjadi.

Mengapa Sukarno menolak membubarkan PKI meski secara terang-terangan sudah menyebut tindakan D.N. Aidit—dalam percakapannya dengan A.M. Hanafi—sebagai "keblinger"? Apakah Sukarno seorang Komunis? Suatu kali soal ini saya bicarakan dengan Dr. Ruslan Abdulgani, mantan juru bicara Manipol Usdek [ideologi Demokrasi Terpimpin] dan orang dekat Sukarno. Menurut Pak Ruslan,

> Bung Karno seorang nasionalis sejati, tapi terlalu *over-confidence*, terlalu percaya diri. Dia kira dia bisa mengontrol PKI. Lagi pula pengetahuan Bung Karno tentang Komunisme dasarnya adalah Komunisme pada masa mudanya, yakni yang mendorongnya merumuskan ideologi Nasakom. Komunisme waktu itu adalah alat melawan kolonialisme, bukan Komunisme dalam zaman Perang Dingin seperti sekarang. Pada zaman perjuangan nasional dulu, semua kekuatan dan golongan bisa diajak bersatu melawan kolonialisme. Sekarang ceritanya lain lagi, tapi Bung Karno masih tetap gandrung pada persatuan berdasarkan Nasakom.

Menurut catatan Pusat Sejarah TNI, ketegangan antara Jenderal TNI Soeharto dan Presiden Sukarno bersumber pada sikap mereka yang bertentangan terhadap PKI dan Komunisme. Dalam salah satu dokumen Pusat Sejarah TNI tertulis bahwa,

> Mengenai kedudukan PKI dalam masyarakat Indonesia, Presiden Sukarno berpendapat bahwa PKI harus dan dapat di-Pancasila-kan. Jenderal Soeharto menganggap hal itu tidak mungkin karena PKI itu pasti berpegang pada doktrin Marxisme-Komunisme. Presiden Sukarno menganggap PKI melakukan ekses, jadi tidak perlu diambil tindakan pembubaran seperti yang diusulkan oleh Jenderal Soeharto. Menurut Soeharto, PKI sudah dua kali mencoba merebut kekuasaan negara, karena itu jangan sampai diberi kesempatan lagi.

Saya sendiri kemudian berpendapat bahwa yang sebenarnya dipertahankan Presiden Sukarno bukanlah PKI, melainkan ideologi Nasakom yang sudah dikampanyekannya ke seluruh dunia. Maka, masuk akal kalau Sukarno sebenarnya marah dan ingin

Salim Said mewawancarai Dr. Ruslan Abdulgani, 1988.

membubarkan PKI. Tapi, itu hanya akan dilakukannya setelah berdiri satu partai baru yang menggantikan tempat PKI dalam komposisi Nasakom. Dengan kata lain, Sukarno bukan Komunis dan tidak mencintai PKI. Bagi Sukarno, PKI hanya pengimbang yang dia perlukan untuk menghadapi Angkatan Darat. Pemimpin Besar Revolusi itu sebenarnya lebih mencintai diri dan gagasan Nasakom ciptaannya yang telah dipasarkannya ke seluruh dunia. Dengan gagasan yang kontroversial pada zaman Perang Dingin itu, Sukarno berharap diterima sebagai tokoh dunia yang bisa mengatasi konflik Barat dan Timur.

Pada bulan-bulan pertama setelah Gestapu, di Jakarta memang beredar cerita bakal berdirinya sebuah partai beraliran kiri dengan Nyoto—tokoh PKI yang sudah sangat dekat kepada Sukarno dan berangsur menjauh dari Aidit—sebagai pemimpinnya. Karena tahu rencana Sukarno itulah barangkali kekuatan anti-Komunis segera bertindak. Akibatnya, Nyoto dengan segera menghilang. Bahkan, tidak pernah ketahuan di mana kuburnya.

Tanpa Melibatkan Tentara

Apabila kita berbicara mengenai Angkatan Bersenjata sehubungan dengan Gestapu, faktor Angkatan Udara terlalu penting untuk

dilupakan. Seperti diketahui luas waktu itu, Panglima Angkatan Udara, Omar Dani, mempunyai hubungan khusus dengan Presiden Sukarno sejak beliau diangkat menggantikan KSAU Suryadi Suryadharma.

Omar Dani naik ke posisi pemimpin tertinggi Angkatan Udara setelah insiden tenggelamnya Kapal Perang *Macan Tutul* di Laut Arafuru pada 15 Januari 1962. Angkatan Udara dipersalahkan karena tidak memberi perlindungan udara kepada kapal perang yang bertugas menyelundupkan tentara ke daratan Irian Barat (Papua sekarang). Suryadharma membayar mahal apa yang dituduhkan sebagai kesalahannya. Dia dicopot dari kepemimpinan Angkatan Udara yang didudukinya sejak Indonesia memiliki Angkatan Udara, hampir 20 tahun sebelumnya. Kemudian, karena menolak jabatan Duta Besar di Kuba, Suryadharma diangkat menjadi penasihat militer Presiden yang praktis tidak pernah dimintai pendapat atau saran oleh Sukarno.

Sukarno dan Omar Dani, 1965.

Di kemudian hari terungkap bahwa sebenarnya Suryadharma telah diperlakukan secara tidak adil. Operasi penyelundupan pasukan ke Irian Barat lebih merupakan keputusan politik Sukarno sebagai Panglima Koti tanpa melibatkan pimpinan tentara. Angkatan Udara waktu itu bukan saja tidak tahu adanya operasi rahasia tersebut, mereka juga memang belum siap memberi perlindungan udara (*air cover*) dalam pelaksanaan perintah Sukarno itu. Ini adalah contoh sempurna bagaimana kalau operasi militer dikelola oleh politisi sipil yang sama sekali tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman militer. Kesalahan yang sama sebelumnya juga dilakukan Hitler yang menyerang Uni Soviet tanpa memperhatikan pendapat dan pertimbangan para jenderal dan marsekalnya. Akibatnya adalah kehancuran beberapa divisi tentara Jerman.

KETIKA DIANGKAT MENJADI PANGLIMA ANGKATAN UDARA, Omar Dani baru sekitar sepuluh tahun menjalani dinas militer. Menurut Nasution kepada saya, dialah yang menyarankan kepada Sukarno mengangkat Omar Dani sebagai pengganti Suryadharma. Menko Hankam/KSAB itu berjumpa dengan Dani untuk pertama kalinya di Lapangan Terbang Morotai, pada masa persiapan Operasi Trikora. Sebagai perwira yang masih sangat muda ketika menduduki jabatan pimpinan Angkatan Udara, Dani melangkahi sejumlah perwira senior dalam angkatannya. Dengan latar belakang demikian, maka bisa dimengerti kalau pimpinan baru Angkatan Udara itu menjadi sangat bergantung kepada Sukarno yang mengangkatnya.

Pada masa Revolusi, sebagai anak priayi berpendidikan bagus, Dani bekerja sebagai penyiar radio siaran bahasa Inggris di Solo. Selanjutnya pindah ke Jakarta dan bekerja pada sebuah bank. Bersama sejumlah pemuda pada 1950, Dani dikirim ke Taloa, California. Di sana dia dididik menjadi penerbang. Sepulang dari Amerika itulah, dia mengucapkan sumpah sebagai prajurit Angkatan Udara. Di mata para jenderal senior di Angkatan Darat,

Omar Dani adalah anak muda yang tidak punya pengalaman tempur masa Revolusi.

Dengan latar belakang yang demikian, Sukarno mengangkat Panglima Angkatan Udara itu menjadi Panglima Kolaga (Komando Mandala Siaga) dalam rangka Konfrontasi. Jenderal Soeharto, yang amat senior dan mantan Panglima Mandala pembebasan Irian Barat, beberapa waktu kemudian ditunjuk Presiden sebagai wakilnya. Keputusan Sukarno yang kurang bijaksana ini hanya membuat para perwira tinggi Angkatan Darat makin dongkol kepada Bapak Presiden dan Omar Dani. Dalam memoarnya, mantan Pangkopkamtib, Jenderal TNI Sumitro menulis:

> Di Komando Mandala Siaga (Kolaga), Panglimanya dari Angkatan Udara yang tidak punya pengalaman perang, tentara kemarin sore, Omar Dani. Anak kemarin sore itu belum punya pengalaman perang, tapi disuruh memimpin kami yang sudah bongkel-bongkel sejak zaman Revolusi sampai tua perang terus. Dia membawahi Pak Harto yang waktu itu wakilnya Omar Dani, sebagai Wakil Panglima Komando Mandala Siaga (Wapang Kolaga). Dalam hati kami mangkel dipimpin anak *wingi sore*, anak kemarin sore.

Di samping itu, Omar Dani mewarisi Angkatan Udara yang sejak awal tahun lima puluhan memang sudah diposisikan Suryadharma, sadar atau tidak, sebagai angkatan yang bersikap antagonistis kepada Angkatan Darat. Dengan latar belakang itulah juga kita harus melihat kedekatan Angkatan Udara dengan Presiden Sukarno. Untuk mengimbangi Angkatan Darat yang sudah lama terlibat politik, di bawah Omar Dani untuk pertama kalinya Presiden Sukarno melibatkan Angkatan Udara ke dalam kegiatan politik. Mengenai soal ini, para purnawirawan Angkatan Udara dalam buku *Menyingkap Kabut Halim 1965* menjelaskan:

> Untuk memberikan makna Angkatan Udara sebagai alat Revolusi sebagaimana yang sering dikemukakan Bung Karno, Laksdya Udara Omar Dani dalam kedudukannya sebagai Men/Pangau [Menteri Panglima Angkatan Udara], mencoba ikut memainkan peran politik di tengah-tengah retorika revolusi

> PBR (Pemimpin Besar Revolusi). Misalnya, berbicara tentang Angkatan ke-5 yang sebetulnya bukan gagasannya sendiri, melainkan hasil pembicaraan sepintas antara PM RRT [Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok] Chou En Lai dan Presiden Sukarno. Karena Bung Karno tertarik, Omar Dani pun membawanya dalam suatu pembahasan dengan rekan-rekan menteri/panglima angkatan lainnya.
>
> Tak disadari [oleh Dani] bahwa membahas gagasan itu, sangat paralel dengan keinginan PKI, yaitu terciptanya suatu militansi dan radikalisme di kalangan rakyat. Militansi rakyat yang terlihat melalui pelatihan sukarelawan pada masa operasi pengembalian Irian Barat dan perjuangan Dwikora, sangat menguntungkan PKI.

Persoalan terpenting yang melatarbelakangi konflik antara Angkatan Udara dan Angkatan Darat, terutama pada masa Demokrasi Terpimpin, pada dasarnya adalah sikap kedua angkatan yang berbeda terhadap Presiden Sukarno. Angkatan Darat menolak Nasakom, sangat waspada kepada PKI, sementara Angkatan Udara mendukung Nasakom dan hampir apa saja kebijakan politik Sukarno, termasuk gagasan pembentukan Angkatan ke-5. Pimpinan Angkatan Udara waktu itu juga tidak melihat PKI sebagai ancaman.

Jauh sebelum itu, Suryadharma sebagai pribadi sudah pula merupakan persoalan bagi Angkatan Darat. Perwira lulusan Akademi Militer Breda Negeri Belanda ini tidak ikut perang gerilya setelah Yogyakarta diserbu dan diduduki Belanda pada 19 Desember 1948. Ketika tentara di bawah pimpinan Sudirman dan Nasution memulai perang gerilya, Suryadharma ikut Sukarno dan Hatta menyerah kepada Belanda. Mengenai ketidakikutan Suryadharma bergerilya itu, dari memoar Bung Hatta kemudian bisa diketahui bahwa beberapa hari sebelum Yogyakarta diserang dan diduduki tentara Kolonial Belanda, pemimpin Angkatan Udara itu sudah tidak lagi menduduki posisi penting dalam ketentaraan. Untuk sementara, dia dibebastugaskan dari kedudukan pimpinan Angkatan Udara karena diperintahkan mengikuti perja-

lanan Presiden Sukarno ke India atas undangan Perdana Menteri Nehru.

Dalam keadaan menanti datangnya pesawat yang akan membawa rombongan ke India itulah, Yogyakarta diserang. Suryadharma ditangkap Belanda di rumah kediaman Wakil Presiden dan kemudian diasingkan ke Bangka bersama Bung Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah pengakuan kedaulatan, Sukarno mengangkat kembali Suryadharma menjadi pemimpin Angkatan Udara (KSAU). Ini adalah keputusan yang mengecewakan para perwira senior Angkatan Darat yang baru saja keluar dari hutan setelah masa bergerilya usai.

"Yang Mestinya Disalahkan Adalah Sudirman."

Sikap para perwira Angkatan Darat yang menyalahkan keputusan Suryadharma menyerah bersama Sukarno dipertanyakan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara. "Lho, Suryadharma itu mengikuti jejak Panglima Tertinggi. Yang mestinya disalahkan adalah Sudirman. Panglima Besar itu yang justru menolak menaati perintah Panglima Tertingginya." Debat dengan tema Suryadharma yang taat kepada Panglima Tertinggi, sementara Sudirman dianggap melakukan insubordinasi adalah debat yang muncul kembali ketika Omar Dani menunjukkan loyalitas penuhnya kepada Sukarno. "Apakah salah kalau kita taat kepada Panglima Tertinggi?" tanya Sri Mulyono Herlambang kepada saya dalam sebuah pertemuan dengan para mantan pejabat senior Angkatan Udara pada awal masa Reformasi. Ini soal, menurut saya, akhirnya terpulang kepada bagaimana tempat tentara dalam masyarakat, persepsi diri mereka serta hubungan sipil dan militer macam apa yang berlaku dalam masyarakat.

Tentara (Angkatan Darat) di kemudian hari mempertegas posisinya dalam masyarakat dengan menempatkan diri sebagai suatu kekuatan politik di antara kekuatan politik lainnya. Tentara pada masa Sudirman memang lebih melihat diri sebagai pejuang daripada hanya sekadar sebagai alat pemerintah. Sebagai pe-

juang di bidang militer, Sudirman juga telah mengikat dirinya dengan sebuah sumpah tentara: "Tidak kenal menyerah". Suryadharma dan Sukarno yang menyerah kepada tentara kolonial Belanda, mereka anggap melanggar sumpah tersebut.

Hubungan Angkatan Darat dengan Angkatan Udara menjadi lebih memburuk oleh sikap Suryadharma yang dianggap bersimpati kepada PKI. Utami Suryadharma, istri Suryadharma, adalah aktivis kiri yang memimpin sebuah proyek PKI mengganyang film-film Amerika (Papfias) pada zaman Orde Lama. Kakak Utami, Utomo Ramelan, adalah tokoh PKI Jawa Tengah yang menduduki kursi Wali Kota Solo ketika Gestapu terjadi. Waktu masuk di Solo pada November 1965, saya sempat melihat Utomo Ramelan berada dalam tahanan di Balai Kota Solo. Yang menjaga tahanan adalah para mantan Tentara Pelajar yang sebagian di antara mereka pada 1948 ikut menggempur PKI di Madiun.

Omar Dani memang bukan pemimpin Angkatan Udara yang memulai kedekatan angkatannya dengan Sukarno. Tapi, Panglima Angkatan Udara itu dan beberapa temannya yang memimpin Angkatan Udara di sekitar meletusnya Gestapu itu sudah amat sulit menghindar dari konflik historis, politis, dan ideologis yang sejak lama mengganggu hubungan antara Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Lagi pula konflik itu memang juga dipelihara oleh Sukarno. Omar Dani dan teman-temannya di Angkatan Udara waktu itu pada dasarnya adalah perwira-perwira muda usia pengagum berat Sukarno. Menurut Marsekal Madya Budiarjo, mantan Deputi Pangau Omar Dani, dan Menteri Penerangan pada awal tahun tujuh puluhan, "Omar Dani yakin benar bahwa Bung Karno sungguh-sungguh pemimpin besar dan dia telan mentah-mentah indoktrinasi Nasakom (Nasional-Agama-Komunis)." Para perwira tersebut merumuskan loyalitasnya kepada Panglima Tertinggi sebagai loyalitas dan dukungan kepada kebijakan politik apa saja yang dijalankan Sukarno.

Khusus mengenai Omar Dani, menurut cerita para purnawirawan Angkatan Udara yang berada di sekitar Dani menjelang Gestapu, Panglima Angkatan Udara itu memang sangat percaya

bahwa dalam tubuh Angkatan Darat terdapat "beberapa orang jenderal dan perwira yang menilai kebijaksanaan Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi, dan tidak melaksanakan ajaran Bung Karno secara konsekuen". Omar Dani juga yakin bahwa para jenderal Angkatan Darat itu bukan saja tidak setuju dengan kebijaksanaan Bung Karno, tapi mereka juga bekerja sama dengan Nekolim. Dasar yang digunakan Omar Dani mencurigai adanya kerja sama dengan Nekolim itu adalah Dokumen Gilchrist. Seperti diketahui kemudian, dokumen itu ternyata hasil rekayasa KGB, intel Uni Soviet.

YANG TAMPAKNYA TIDAK DISADARI oleh Dani dan beberapa perwira tinggi pimpinan Angkatan Udara waktu itu adalah bahwa Bung Karno terutama merupakan seorang politikus dengan ideologi kiri/Nasakom, di samping kedudukannya sebagai Panglima Tertinggi (Pangti) ABRI. Dengan Nasakom itulah, Sukarno melindungi PKI, hal yang menjadi akar tunjang konflik Sukarno dengan Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin. Loyalitas yang tidak bisa membedakan antara Sukarno sebagai Panglima Tertinggi dan Sukarno sebagai politikus secara otomatis membawa Omar Dani dan sejumlah pimpinan tertinggi Angkatan Udara masa itu ke tataran konfrontasi dengan Angkatan Darat. Dengan latar belakang seperti inilah, kita harus mengerti keputusan Omar Dani yang dengan segera mendukung Gestapu beberapa saat setelah gerakan tersebut mengumumkan langkah mereka sebagai kegiatan "membersihkan kekuatan kontrarevolusioner" di dalam Angkatan Darat. Dukungan tergesa-gesa itu akibatnya fatal. Beberapa hari kemudian dukungan tersebut diralat. Tapi, langkah dengan dukungan Sukarno itu tidak berhasil menyelamatkan Omar Dani. Mantan pemimpin Angkatan Udara itu akhirnya harus dihadapkan ke Mahmillub. Dani menghabiskan sebagian besar dari sisa hidupnya dalam penjara Orde Baru.

Sebelum Omar Dani memberikan dukungan kepada Gestapu, pada 30 September malam, beberapa jam sebelum operasi Gestapu bergerak, Letnan Kolonel Penerbang Heru Atmodjo se-

bagai perwira intel Angkatan Udara telah melaporkan kepada Omar Dani mengenai apa yang akan terjadi beberapa jam lagi. Mengingat amat dramatisnya Gestapu—penculikan para jenderal pimpinan Angkatan Darat—dan keterlibatan Mayor Udara Suyono, tokoh Gestapu dari Angkatan Udara, memang patut menjadi pertanyaan, mengapa Omar Dani memilih berdiam diri saja dan membiarkan Mayor Udara Suyono menggunakan fasilitas Angkatan Udara. Pada pagi harinya, satu Oktober, Dani bahkan berusaha memfasilitasi Brigjen Supardjo agar secepatnya datang ke Halim Perdanakusuma melapor kepada Panglima Tertinggi yang sudah ada di pangkalan udara itu. Supardjo yang bertugas di Kalimantan, memang ada di Jakarta waktu itu setelah mendapat telegram dari Syam, Kepala atau Ketua Biro Khusus PKI. Untuk itulah, Heru Atmodjo diperintahkan menjemput Panglima Komando Tempur (Kopur) Kalimantan itu dengan helikopter. Pagi hari itu Brigjen Supardjo berusaha, tapi gagal, menemui Presiden Sukarno yang memang tidak berada di Istana Merdeka.

Menurut kesaksian Heru Atmodjo, tidak ada tanda-tanda terkejut pada diri Dani ketika bersama para pimpinan Angkatan Udara menerima taklimat intel beberapa jam sebelum operasi Gestapu dilancarkan. Mengingat kedekatan Dani dengan Sukarno, tidak sulit menduga Panglima Angkatan Udara itu tahu tentang rencana Gestapu dan sikap Sukarno terhadap kegiatan penculikan tersebut. Itulah rupanya penjelasan mengapa Dani tidak berbuat sesuatu malam itu dan dengan cepat mengumumkan dukungannya kepada Gestapu pagi hari esoknya.

Brigjen Mustafa Syarif Supardjo, salah seorang tokoh Gestapu.

Seperti gagasan semula sebagaimana yang ditugaskan Sukarno kepada Untung, yang diketahui Dani tentulah hanya penculikan

untuk pendaulatan, bukan pembantaian. Jadi, informasi Omar Dani malam itu lebih kurang sama dengan posisi dan pengetahuan Soeharto—yang diterimanya dari Kolonel Latif di Rumah Sakit Gatot Subroto—pada waktu yang nyaris tak berbeda lama. Kesalahan Omar Dani terutama terjadi pagi harinya. Ketika Soeharto di Kostrad sedang sibuk berkonsolidasi menghadapi Gestapu yang membantai para jenderal, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Panglima Angkatan Udara mengumumkan dukungannya kepada Gestapu.

Dalam buku *Menyingkap Kabut Halim*, Omar Dani mengaku bahwa pada 30 September 1965, di Wisma Angkasa, kediaman resminya sebagai Pangau, bersama hampir semua pimpinan tertinggi Angkatan Udara, dia telah menerima taklimat lengkap dari Letnan Kolonel Heru Atmodjo, mengenai rencana penculikan para jenderal Angkatan Darat.

Nama semua jenderal yang akan diculik dilaporkan dalam taklimat tersebut. Juga dilaporkan keterlibatan Mayor Udara Suyono. Tapi, Omar Dani tidak berbuat sesuatu karena menganggap Gestapu adalah masalah internal Angkatan Darat. Sulit dimengerti sikap dan keputusan Dani membiarkan para jenderal itu menjadi sasaran Gestapu dengan alasan soal "internal Angkatan Darat", sementara dia tahu Mayor Udara Suyono ikut berperan aktif dan memanfaatkan fasilitas beserta senjata-senjata milik Angkatan Udara. Lebih masuk akal untuk menafsirkan sikap Omar Dani itu sebagai bukti dari pengetahuannya mengenai Gestapu yang bertolak dari rencana daulat yang digagas Sukarno.

Omar Dani pada masa tua.

Heru Atmodjo kesal panglimanya tidak berbuat apa-apa meski telah mendapat laporan lengkap tentang rencana Gestapu dan keterlibatan seorang perwira Angkatan Udara. Kesimpulan Heru Atmodjo:

> Pimpinan AURI [Angkatan Udara Republik Indonesia] mengambil sikap jalan setengah-setengah. Setengah membiarkan, tidak melarang secara tegas Mayor Suyono ambil peran, walau sudah dilaporkan sebelumnya. Mengapa jalan ini ditempuh? Karena kuatnya loyalitas Laksamana Omar Dani kepada Bung Karno, yang tanpa reserve, tanpa memikirkan akibat-akibatnya.

Heru Atmodjo pantas marah. Akibat sikap loyal mutlak Dani kepada Sukarno, Angkatan Udara jadi korban. Karier Heru sendiri akhirnya hancur berantakan. Perwira intel itu mendekam lama dalam penjara Orde Baru. Ketika meninggal—berapa tahun setelah bebas dari penjara—dia mula-mula dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tapi, makamnya kemudian dibongkar dan jenazahnya dipindahkan ke pemakaman umum. "Telah terjadi kekeliruan, Pak Heru tidak memenuhi syarat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan," kata seorang juru bicara TNI sebagaimana yang dikutip koran-koran.

Dengan mengumumkan dukungannya kepada Gestapu setelah sebelumnya membiarkan keterlibatan Mayor Udara Suyono, Omar Dani bukan saja mencelakakan diri, Angkatan Udara, dan teman-temannya, melainkan sebenarnya juga secara tidak langsung ikut mempersulit posisi PKI dan Bung Karno. Dengan tidak menghalangi keterlibatan Suyono, klaim PKI yang menyebut Gestapu sebagai hanya persoalan internal Angkatan Darat telah diporakporandakan Omar Dani. Tapi dalam urusan ini, tanpa disadarinya, Omar Dani sebenarnya hanya mengikuti jejak Syam Kamaruzzaman yang sudah lebih awal melibatkan perwira Angkatan Laut, Angkatan Udara, perwira Polisi, bahkan Pemuda Rakyat. Dengan kata lain, Syam dan Dani secara bersama, meski secara terpisah, membantah klaim dan rencana Aidit serta analisis

Cornell Paper yang ingin Gestapu dipandang semata-mata sebagai urusan "internal Angkatan Darat". Keadaan yang diakibatkan oleh tindakan Dani dan Syam itu juga akhirnya ikut mempersulit usaha Presiden Sukarno menyelamatkan PKI, Omar Dani, dan tentu saja diri sang Pemimpin Besar Revolusi itu sendiri.

Cerita di sekitar keputusan dan tindakan Pangau itu sebenarnya hanya menunjukkan bahwa Omar Dani—seorang priayi Jawa yang terdidik baik—pada dasarnya buta politik. "Angkatan Udara itu angkatan teknis, berbeda dengan Angkatan Darat," kata Laksamana Udara Rusmin Nuryadin yang menjadi Panglima Angkatan Udara pada awal Orde Baru. Secara tidak langsung, Rusmin sebenarnya mengkritik Dani dan para pemimpin Angkatan Udara lainnya yang ikut-ikut berpolitik tanpa tahu politik.

Tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa Omar Dani dan teman-temannya masa itu hanyalah Sukarnois yang menyerahkan semua pekerjaan berpikir politik kepada Sukarno. Panglima Angkatan Udara tersebut—serta banyak perwira tinggi pembantunya waktu itu—hanya ikut petunjuk Sukarno tanpa reserve. Semacam sikap "*Pejah-gesang nderek* Bung Karno" (Hidup atau mati, pokoknya ikut Bung Karno), yang populer di kalangan pendukung Sukarno di Jawa Tengah setelah Gestapu. Omar Dani adalah contoh sempurna seorang Sukarnois yang waktu itu bisa ditemukan di mana-mana, tapi terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Bung Karno itu seorang sufi," kata Dani dengan yakin kepada saya, sekian tahun setelah mantan Pangau itu dibebaskan dari penjara.

Suslov dan Agen-Agen Asing

Sampai sekarang tidak cukup bukti untuk berkesimpulan bahwa agen-agen asing memainkan peran langsung pada malam tragedi berdarah tersebut. Tapi, cukup alasan untuk mencurigai bahwa mereka ikut memainkan peran mempercepat proses dalam rangka memperpendek beban ketegangan yang mereka pikul. Masuk akal jika CIA dan MI6 ingin tentara secepatnya menumpas PKI

dan mengakhiri rezim Sukarno yang memusingkan dan merupakan beban berat bagi mereka.

Sebaliknya, agen Blok Timur, terutama Cina, bisa diduga, juga ingin secepatnya melihat Sukarno bertindak mengakhiri "pembangkangan" Angkatan Darat terhadap Nasakom, ajaran yang dipergunakan Sukarno melindungi PKI. Dalam rangka inilah, saya kira kita harus mengerti munculnya Dokumen Gilchrist serta sejumlah "dokumen" lainnya yang beredar pada bulan-bulan menjelang Gestapu. Dokumen Gilchrist buatan intel Cekoslovakia itu, misalnya, jelas memainkan peran menaikkan tensi politik yang antara lain membuat Sukarno merasa makin tidak aman menghadapi Angkatan Darat.

Subandrio memainkan peran besar dalam menjadikan Dokumen Gilchrist itu sesuatu yang menakutkan Sukarno. Tanpa mengecek autentisitas dokumen (yang autentik terbukti hanya kertasnya yang memang berasal dari Kedubes Inggris) yang katanya diterimanya lewat pos (Bagaimana menjelaskan informasi sepenting itu diterima lewat pos tanpa alamat pengirim dan lantas dipercaya sebagai autentik?), Subandrio menyebarkan salinan dokumen itu sampai kepada para pemimpin Asia-Afrika yang bertemu di Kairo beberapa bulan sebelum Gestapu. Rasa tidak aman itulah yang hampir bisa dipastikan berperan besar mendorong Sukarno merencanakan jalan daulat agar secepatnya menetralisasi Angkatan Darat dengan cara menyingkirkan Jenderal Yani dan kelompoknya yang anti-Komunis.

Keterlibatan langsung intel asing dalam merancang, apalagi melaksanakan operasi Gestapu, hingga kini masih belum ditemukan buktinya. Informasi terbaru dan menarik sehubungan dengan kemungkinan adanya peran agen asing ini saya peroleh dari Asahan Alham Aidit, adik Ketua PKI D.N. Aidit yang jumpa abangnya di Beijing pada Agustus 1965. Waktu itu D.N. Aidit dalam perjalanan pulang dari Moskow ke Jakarta memenuhi panggilan Presiden Sukarno yang dikabarkan sakit. Menurut cerita D.N. Aidit kepada adiknya, di Moskow pemimpin Komunis Indonesia itu ter-

libat debat keras dengan Suslov, ahli ideologi dan teori Komunis (ideolog) Politbiro Partai Komunis Uni Soviet (PKUS).

Perdebatan itu, menurut cerita D.N. Aidit menyangkut perbedaan prinsipil antara Sosialisme dan Revisionisme yang ketika itu sedang hangat-hangatnya diperdebatkan di kalangan gerakan Komunis internasional. Perbedaan prinsipil itu terjadi antara Tiongkok dan Uni Soviet. "PKI menyetujui sepenuhnya pandangan PKT (Partai Komunis Tiongkok) yang mempertahankan Marxisme-Leninisme (ML) dan mengkritik PKUS yang merevisi ML," tulis Asahan dalam surat elektroniknya dari Negeri Belanda kepada saya pada 25 April 2012.

Akibat sikap pro-Tiongkok PKI tersebut, Suslov dengan sangat marah mengeluarkan ancaman kepada D.N. Aidit. "Kalau PKI tidak berubah, Uni Soviet akan turut menghancurkan PKI bersama musuh-musuhnya di Indonesia." Apakah akhirnya Uni Soviet melaksanakan ancaman Suslov itu? Bukti-buktinya memang masih harus dicari. Tapi bahwa hubungan Moskow dengan Jakarta tetap terpelihara dengan baik setelah Gestapu, sementara kontak Jakarta-Beijing terputus dan beku untuk waktu lama, barangkali bisa menjadi salah satu petunjuk untuk curiga bahwa Uni Soviet memang, paling sedikit, membiarkan PKI dihancurkan.

Mendirikan Polisi Merah di Pati

Selain peran-peran agen asing, yang juga amat penting, bahkan mutlak diteliti, adalah peran Syam Kamaruzzaman bin Ahmad Mubaidah. Sebagai intel dan Kepala Biro Khusus PKI, Syam dicurigai beberapa kalangan sebagai bekerja untuk beberapa pihak sekaligus. Ketika berada dalam tahanan militer, teman-temannya sesama tawanan politik menjauhinya bahkan menurut cerita mereka yang kemudian bebas, Syam sering mereka teriaki sebagai "agen CIA".

Menurut penuturan Anak Marhaen (A.M.) Hanafi, salah seorang tokoh Angkatan 45 dan anak angkat Presiden Sukarno,

dalam bukunya yang berjudul *Menggugat Kudeta Soeharto Dari Gestapu ke Supersemar*, pada zaman Revolusi Syam Kamaruzzaman, yang lahir pada 30 April 1924 di Tuban, Jawa Timur, bekerja sebagai intel polisi di Pati, Jawa Tengah. Atasannya adalah pembesar polisi Kota Pati yang bernama Mudigdo, seorang yang berasal dari keluarga ningrat yang juga kelahiran Tuban. Dokter Tanti yang kemudian menjadi istri D.N. Aidit adalah putri Mudigdo dari perkawinannya dengan perempuan Minangkabau yang bernama Siti Aminah.

Syam Kamaruzzaman.

Jacques Leclerc, sejarahwan Prancis yang meneliti gerakan Komunisme di Indonesia, menyebut Mudigdo sebagai seorang pengikut setia Amir Sjarifuddin dan berusaha mendirikan Polisi Merah di daerah Pati setelah pecahnya pemberontakan PKI di Madiun. Mudigdo dan pengikutnya ditangkap TNI dan ditembak mati pada 21 November 1948. Leclerc juga menuturkan bahwa istri Mudigdo melanjutkan kegiatannya sebagai aktivis Komunis sampai ditahan setelah pecahnya Gestapu, 1965. Siti Aminah pernah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dan posisi tertingginya dalam kubu PKI adalah sebagai Wakil Ketua Gerwani, organisasi wanita PKI.

Di kemudian hari berseliweran informasi mengenai berbagai kegiatan intel yang pernah dikerjakan Syam. Yang paling banyak mendapat perhatian adalah kegiatannya sebagai intel tentara. Disebutkan bahwa di Jakarta, Syam pernah menjadi intel Kodam Jaya, di Jawa Barat pernah menjadi intel untuk Kolonel Suwarto, Wakil Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Yang tetap menjadi pertanyaan, apakah Syam bekerja di kalangan militer sebagai orang PKI atau dia adalah agen tentara yang disusupkan ke dalam PKI. Mengingat bahwa Syam sudah

menjadi orang kiri pada zaman Revolusi, maka saya lebih cenderung menyimpulkan Syam sebagai agen Komunis dalam tentara.

Sebagai pimpinan Biro Khusus PKI yang langsung berada di bawah D.N. Aidit, posisi Syam sebagai intel di kalangan tentara sangat menguntungkan kegiatannya dalam membina para perwira yang kemudian dikenal sebagai "perwira berpikiran maju". Selain Syam, sejumlah anak buahnya dalam Biro Khusus juga berhasil "disusupkan" ke dalam tentara di berbagai komando dan instalasi militer. Hal yang demikian ini memang tidak sulit terjadi karena jauh sebelum Biro Khusus berdiri, dalam tentara memang sudah ada perwira-perwira berhaluan kiri. Perwira-perwira seperti Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, Brigjen Supardjo, Jenderal Rukman dari Siliwangi, dan banyak lagi lainnya, sudah kiri dan dekat dengan PKI sejak zaman Revolusi. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang dulu terlibat pemberontakan di Madiun. Mereka selamat dan lolos dari pembersihan karena tentara kolonial Belanda menyerang dan menduduki wilayah Republik tidak berapa lama setelah pemberontakan PKI di Madiun. Perwira-perwira beraliran kiri dalam tentara seperti itulah yang memfasilitasi terjadinya penyusupan agen-agen PKI ke dalam tubuh tentara.

UNTUK MENGERTI GESTAPU, PERAN SYAM amat penting diungkapkan. Menurut penuturan Letnan Kolonel Penerbang Heru Atmodjo dalam bukunya, *Gerakan 30 September: Kesaksian Letkol (Pnb.) Heru Atmodjo,* adalah Syam yang sebenarnya langsung memimpin operasi militer Gestapu pada satu Oktober pagi itu.

Dalam penuturannya mengenai Gestapu, Heru Atmodjo—berada di Senko, pusat kegiatan Gestapu pada pagi hari itu—merasa heran melihat bagaimana Syam, seorang sipil, memimpin langsung operasi militer, sementara di sekitarnya ada Brigadir Jenderal TNI Supardjo, Letnan Kolonel Untung, serta Kolonel Latif. Menurut penuturan Supardjo, ketika berjumpa Heru Atmodjo di rumah tahanan militer, Syam waktu itu mengaku pernah mendapat latihan militer di Tiongkok.

Masih tentang peran Syam pada operasi militer Gestapu, dalam kesaksiannya pada pengadilan tokoh PKI, Nyoto, Maret 1966, Untung menyebut Syam dan Pono, keduanya anggota Biro Khusus PKI, sebagai bagian inti Gestapu yang mewakili Aidit. Pada pengadilan yang sama, saksi Mayor Udara Suyono menyebutkan bahwa Syam adalah orang yang menentukan dalam rapat-rapat perencanaan operasi militer Gestapu. Dalam Mahmillub yang mengadilinya pada 1968, Syam menyebut Aidit yang memerintahkan dirinya melaksanakan Gestapu dalam kedudukannya sebagai Kepala Biro Khusus. Tidak dijelaskan bagaimana, menurut Aidit, cara Syam harus melaksanakan Gestapu.

Kenyataan yang disaksikan Heru Atmodjo itu berbeda dengan kesaksian Untung maupun pengakuan Sudisman di depan Mahmillub. Sudisman menjelaskan bahwa Gestapu adalah gerakan para "perwira maju" untuk mencegah perampasan kekuasaan yang menurut PKI telah dirancang oleh "Dewan Jenderal". Dan pemimpin perwira maju itu adalah Letnan Kolonel Untung dari Cakrabirawa, komandan pasukan pengawal Presiden. Tapi, menurut kesaksian Heru Atmodjo, yang dilihatnya memimpin operasi militer Gestapu ternyata Syam, bukan Untung. Kenyataan yang dikemukakan Heru Atmodjo itu diperkuat oleh kesaksian Supardjo di depan Mahmillub maupun penuturannya kepada Heru Atmodjo tatkala keduanya jumpa di rumah tahanan militer.

Sementara itu, dari semua catatan yang ada mengenai Syam, belum kunjung ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa Syam pernah mendapat latihan militer di Tiongkok sebagai yang disampaikannya kepada Brigjen Supardjo. Lalu, bagaimana kita harus menjelaskan bahwa seorang jenderal, seorang kolonel, seorang letnan kolonel, dan sejumlah mayor, kapten, dan letnan, secara berjamaah menjadikan diri mereka anak buah seorang sipil dalam sebuah operasi militer yang begitu penting dan rumit? Apakah keputusan PKI mendukung gerakan para "perwira maju" di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung diubah oleh Syam di lapangan, dari posisi hanya sebagai "pendukung" berubah menjadikan dirinya pemimpin operasi?

Pada sidang Mahmillub, Sudisman tidak membicarakan penyimpangan yang dilakukan Syam tersebut. Sudisman hanya menegaskan bahwa Syam berhubungan langsung dengan D.N. Aidit. Artinya, Sudisman tidak tahu apa persisnya perintah Aidit kepada Syam. Maka, kalau Syam mengubah perintah Aidit, Sudisman juga tidak mungkin tahu. Perintah Aidit juga tidak mungkin diketahui secara terperinci oleh Untung, Supardjo, dan Latif. Para perwira "berpikiran maju" itu memang tidak tercatat sebagai pernah jumpa Aidit menjelang Operasi Gestapu.

Kekacauan dan akhirnya kegagalan operasi Gestapu pimpinan Syam itulah yang mendorong Heru Atmodjo mencurigai operasi Gestapu itu sebagai gerakan militer yang memang dirancang untuk gagal. Tidak terlalu sulit sebenarnya untuk mengerti dasar kecurigaan Heru Atmodjo itu. Lihat saja bagaimana pasukan yang ditugaskan di Monas tidak disiapkan logistiknya. Akibatnya, mereka kelaparan. Sebagian dari mereka (Batalion 530 dari Brawijaya) dengan mudah siang itu ditarik masuk ke Kostrad untuk disuguhi makan siang. Batalion 454 dari Diponegoro yang dalam keadaan kelaparan mundur ke wilayah Pangkalan Udara Halim, mendapatkan makan yang secara tergesa-gesa disiapkan oleh Komandan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Kolonel Udara Wisnu Djajengminardo.

Komisaris Politik

Perhatikan pula kekacauan yang terjadi di rumah Jenderal Nasution. Bukan saja para penculik gagal membawa Nasution, mereka bahkan tidak bisa membedakan antara Letnan Pierre Tendean, Ajudan Nasution, dan Jenderal Nasution. Maka yang dibawa ke Lubang Buaya untuk akhirnya dibantai, adalah Tendean. Penjelasan dari kesalahan mendasar ini bersumber pada para penculik yang, kemungkinan besar, selain kurang kenal liku-liku Kota Jakarta, mereka juga tidak kenal Nasution dari dekat. Bukan mustahil mereka juga tidak punya waktu cukup mempelajari foto-foto

Jenderal Nasution dan denah rumah Menko Hankam/KSAB itu sebelum operasi militer dimulai.

Lebih mendasar menjadi alasan bagi timbulnya kecurigaan tentu saja kenyataan operasi Gestapu yang begitu penting tidak dipercayakan kepada perwira militer dengan pangkat tinggi serta berpengalaman tempur panjang (Supardjo, Latif, dan Untung), tapi dikerjakan sendiri oleh Syam, yang ternyata sama sekali tidak punya pengalaman memimpin operasi militer. Yang tidak kurang menarik, sikap para "perwira berpikiran maju" itu membiarkan Syam memimpin operasi militer serumit Gestapu tersebut. Pertanyaan menarik di sini adalah bukankah sikap *nrimo* (menerima saja) para perwira itu merupakan bukti bahwa mereka sebenarnya adalah memang anggota partai yang harus selalu taat pada garis partai dan tunduk pada perintah pembinanya? Dari fakta-fakta ini, saya sangat cenderung percaya bahwa Syam, Ketua Biro Khusus, adalah Komisaris Politik bagi anggota partai yang disebut oleh PKI sebagai "perwira berpikiran maju" itu.

Apa pun penjelasannya, juga tidak mudah dimengerti Aidit yang ingin Gestapu dilihat hanya sebagai persoalan internal Angkatan Darat, memerintahkan seorang pemimpin Biro Khusus PKI, seorang sipil memimpin sendiri suatu operasi militer yang rumit. Padahal, PKI telah memiliki sejumlah "perwira berpikiran maju" yang telah mereka bina lama, memenuhi syarat, dan bersedia memimpin gerakan militer tersebut. Kecurigaan adanya skenario penggagalan itu lebih diperkuat oleh susunan anggota Dewan Revolusi yang diumumkan siang hari itu. Di situ nama Presiden Sukarno sama sekali tidak disebut, bahkan kabinetnya dinyatakan demisioner. Kasarnya, bubar. Kebijakan seperti ini hanya berhasil menjadikan Gestapu dan tentu saja PKI secara serentak menjadi musuh bersama kaum anti-Komunis, Angkatan Darat, dan para pengikut Sukarno.

BERTAHUN-TAHUN SETELAH GESTAPU, dalam banyak percakapan saya dengan orang yang dulu kenal Syam—pada zaman Revolusi di Yogyakarta maupun di Jakarta pada tahun lima puluhan

dan enam puluhan—umumnya mereka cenderung melihat Syam Kamaruzzaman bin Ahmad Mubaidah sebagai pada dasarnya seorang avonturir dan dalam PKI dia lebih merupakan seorang *apparatchik* (aparat) partai yang tidak tertarik pada teori-teori Marxisme dan literatur partai yang memang rumit dan banyak macamnya. Sebagai contoh mengenai watak dan karakter Syam, seorang mantan wartawan senior *Harian Rakjat* menceritakan pengalamannya kepada saya setelah dipulangkan dari Pulau Buru:

> Menjelang ulang tahun PKI ke-45, saya ikut hadir dalam sebuah rapat panitia yang dipimpin Ketua Partai. Berdasarkan pengalaman di Beijing meliput perayaan ulang tahun RRT, saya menyatakan perbedaan pendapat saya kepada D.N. Aidit mengenai rencananya mengadakan sendratari untuk merayakan pesta ulang tahun PKI bulan Mei 1965. Tiongkok punya balet nasional, kita tidak punya. Dasar apa yang akan kita pakai untuk membuat sendratari itu? Aidit marah kepada saya. Dia berdiri, saya juga berdiri. Aidit waktu itu sudah biasa menempeleng orang. Saya berdiri bukan untuk menantang sang Ketua, tapi agar mudah lari kalau dia mendekati saya.
>
> Setelah rapat, ketika berjalan ke luar halaman kantor partai, seorang mendekati kami, "Eh, anak buahmu ini sudah berani, ya, menantang Ketua," kata orang itu kepada senior saya yang berjalan bersama saya. Lalu dengan nada mengancam, orang itu berkata singkat kepada saya. "Hati-hati, ya."
>
> Saya tanya senior saya, siapa orang itu? "Itu Syam," jawabnya.

Kembali ke Senko, Pusat Kegiatan Gestapu

Namun, bagaimana bisa, dengan watak demikian, Syam untuk waktu yang cukup lama mendapat kepercayaan D.N. Aidit? Jawabannya barangkali adalah: Aidit yang makin diktatorial dalam memimpin partai lebih membutuhkan seorang pekerja partai yang menjalankan perintahnya dengan loyal tanpa banyak diskusi lagi. Mungkin jasa Syam menyelamatkan Aidit pada 1950 dari pengejaran aparat keamanan Kabinet Sukiman dan hubungan lamanya dengan keluarga istri sang Ketua, juga ikut dipertim-

bangkan Aidit dalam memercayai Kepala Biro Khusus tersebut. Menurut Asahan Alham Aidit, kelemahan abangnya, "cepat memercayai kawan-kawannya meskipun langgam hidupnya cukup waspada terhadap musuh." Asahan, kini menetap di Belanda, dalam memoarnya juga menilai abangnya sebagai, "mudah dikhianati teman-temannya karena sifat mudah percaya dan kurang waspada terhadap kawan sendiri."

Mengikuti dengan saksama kisahnya, membaca dan mendengar dari berbagai sumber, saya kurang percaya tuduhan yang menyebut Syam mengkhianati Aidit. Soalnya bukan pengkhianatan, melainkan kegagalan Gestapu lebih meyakinkan saya sebagai akibat keteledoran dan kecerobohan sang Ketua dan Kepala Biro Khususnya.

KALAU KITA KEMBALI MEMBICARAKAN soal pembantaian para jenderal, sulit membayangkan Sukarno memberi perintah atau bahkan mendiamkan/menyetujui pembasmian para jenderalnya. Seperti sudah saya katakan berkali-kali, yang diinginkan Sukarno hanyalah mengganti pimpinan Angkatan Darat dengan jenderal yang tunduk kepada Pemimpin Besar Revolusi sehingga mudah dikendalikannya. Lewat jalan daulat, Sukarno hanya berniat menempatkan di Angkatan Darat seorang pimpinan semacam Omar Dani yang loyal tanpa reserve pada Panglima Tertinggi. Membantai para jenderal hanya akan menimbulkan kerumitan baru seperti yang kemudian terbukti setelah Gestapu.

Aidit, hampir bisa dipastikan adalah konseptor Gestapu sebagai soal internal Angkatan Darat. Penjelasannya? PKI tidak siap secara fisik dan terbuka menghadapi Angkatan Darat yang merupakan kekuatan anti-Komunis paling berbahaya bagi partai tersebut. Itulah sebabnya ketika ada info dari Syam mengenai perintah Sukarno kepada Untung, Aidit cepat membuat rencana menumpang. Aidit tahu betul bahwa Angkatan Darat dan semua orang anti-Komunis di Indonesia selalu mengintai PKI, dan karena itu Partai Komunis tersebut harus ekstrahati-hati. Membunuh para jenderal, seperti terbukti kemudian, hanya akan menjadi alasan

bagi tentara dan kekuatan anti-Komunis lainnya untuk secara beramai-ramai mengeroyok dan menghancurkan PKI. Oleh sebab itu, hampir bisa dipastikan bukan Aidit yang menggagas pembunuhan para jenderal.

Soeharto juga bukan orang yang patut dicurigai membantai teman-temannya sendiri. Sudah saya katakan bahwa yang masuk akal adalah Soeharto memang tahu akan terjadi sesuatu atas teman-temannya di Markas Besar Angkatan Darat. Tapi, sesuatu itu adalah rencana Sukarno mengganti pimpinan Angkatan Darat. Soeharto tidak mudah menghalangi rencana Sukarno. Pangkostrad itu tidak punya keberanian dan kekuatan menghalangi rencana Pemimpin Besar Revolusi.

Masih berbicara tentang pembantaian tersebut, mari kita kembali ke Senko, pusat kegiatan Gestapu, yang berada di sekitar lapangan terbang Halim Perdanakusuma. Harus dicatat bahwa sebagaimana yang disaksikan beberapa tokoh Gestapu yang berada di sekitar Syam pada pagi hari pertama bulan Oktober di Senko, adalah Syam yang memerintahkan pembunuhan dua jenderal yang tiba dengan selamat di Lubang Buaya, ketika yang lainnya sudah terlebih dahulu terbunuh di rumah masing-masing. Juga perlu dicatat bahwa Brigjen Supardjo, Kolonel Latif, maupun Letnan Kolonel Untung, semua mengaku terkejut ketika tahu terjadinya pembantaian tersebut. Supardjo, Latif, dan Untung memang tidak punya akses langsung kepada pasukan yang bertugas di lapangan pada pagi itu. Ini juga fenomena yang aneh.

Kemungkinan *pertama*, kenyataan tersebut bisa diterangkan sebagai berikut: terbunuhnya lima jenderal sebelum tiba di Lubang Buaya bukan atas perintah Syam yang memimpin operasi. Tapi, terbantainya kelima pimpinan Angkatan Darat tersebut kemudian disadari oleh Syam sebagai tanda Gestapu sudah gagal. Karena itu, sisa dua jenderal yang selamat tiba di Lubang Buaya diperintahkan oleh Syam untuk sekalian saja dihabisi. Mereka berdua toh sudah tidak berguna lagi. Keduanya tidak mungkin lagi dihadapkan kepada Presiden Sukarno.

Kemungkinan *kedua*, bertolak belakang dari kemungkinan pertama, tetap terbuka kemungkinan—meski amat kecil—pembunuhan keenam jenderal adalah justru atas perintah Syam yang bertindak sesuai dengan arahan agen asing. Lewat pembantaian tersebut, agen asing, seperti telah saya uraikan—bermaksud melakukan provokasi kepada Angkatan Darat agar secepatnya bertindak melikuidasi Sukarno dan PKI. Kemungkinan yang amat kecil ini hingga sekarang belum menemukan dukungan data dan fakta pembenarannya.

Kemungkinan *ketiga*, yang jauh lebih masuk akal, pembantaian atas lima jenderal di rumah masing-masing terjadi karena kepanikan prajurit di lapangan. Perintah yang harus mereka laksanakan adalah "para jenderal itu diambil hidup atau mati". Dalam keadaan terjadi perlawanan seperti yang dilakukan Jenderal Yani, misalnya, maka kekerasan sulit mereka hindarkan. Dan Jenderal Yani serta beberapa jenderal yang melawan, akhirnya semua memang terbantai. Pembunuhan memang tak terhindarkan karena persiapan penculikan tidak dilakukan dengan perencanaan yang teliti dan saksama. Keadaan yang demikian ini hampir bisa dipastikan disebabkan oleh kepemimpinan Syam yang tidak ditopang oleh pengalaman militer dalam memimpin sebuah operasi yang rumit dan sensitif. Sebagian besar pasukan yang melakukan penculikan adalah orang baru di Jakarta. Mereka kemungkinan besar bukan hanya tidak kenal Jakarta, juga tidak kenal dengan baik mereka yang akan diculiknya. Bagi saya faktor persiapan operasi yang tidak rapi yang menyebabkan terjadinya kepanikan di lapangan ini lebih meyakinkan sebagai penjelasan terbantainya para jenderal tersebut.

Juga boleh dipertimbangkan kemungkinan bahwa di antara tentara yang bertugas menculik itu ada kader PKI yang tidak tahu skenario penculikan hanya sebagai langkah ke arah pendaulatan. Bukan tidak mungkin—meski kemungkinannya juga tidak besar—tentara yang kader PKI itulah yang memainkan peran penting dalam pembantaian para jenderal tersebut. Kader PKI, menurut Brigjen Supardjo, terutama ada dalam kompi yang berasal dari

Pasukan Pengawal Presiden, bagian dari Batalion Cakrabirawa yang berada di bawah pimpinan Untung.

YANG PALING MUNGKIN saya simpulkan sekarang dari kisah berdarah Gestapu ini adalah bahwa pembantaian para jenderal bukan berdasarkan perintah Presiden Sukarno, tidak dari D.N. Aidit, juga bukan dari Soeharto. Sukarno cuma mau menyingkirkan Yani dan kawan-kawannya di Markas Besar Angkatan Darat, dan Aidit memanfaatkan rencana Sukarno tersebut. Ini berarti bahwa gagasan awal yang kemudian muncul dalam bentuk Gestapu, bukan berasal dari Aidit, melainkan justru berasal dari Sukarno sendiri. Pemimpin PKI itu hanya menumpang dengan memanfaatkan gagasan sang Presiden.

Apakah dengan demikian PKI bisa dianggap terlibat Gestapu? Pilihan Aidit untuk ikut bermain dalam skenario karya Sukarno tersebut, bagi saya cukup masuk akal untuk berkesimpulan bahwa PKI terlibat Gestapu. Memang tidak semua pimpinan PKI tahu keputusan Aidit yang ternyata berisiko amat fatal itu. Tapi, PKI tidak bisa terhindar dari bertanggung jawab atas langkah-langkah Aidit sebab mereka memang sudah lama membiarkan sang Ketua memimpin partai secara diktatorial dan sentralistik. Tradisi partai Komunis yang dipimpin dengan cara diktatorial—Stalin di Moskow, Mao di Tiongkok, Kim Il Sung dan anak serta cucunya di Korea Utara, dan Castro di Cuba—di Indonesia diperkuat oleh tradisi kultus individu yang juga dinikmati Sukarno waktu itu. Berdasarkan keputusan Aidit melibatkan Biro Khusus ke dalam Gestapu, alasan untuk membubarkan PKI tersedia lebih dari cukup. Bahkan, jauh lebih cukup dan lebih meyakinkan juga jika dibandingkan dengan alasan yang dipakai Sukarno ketika membubarkan Masyumi dan PSI (1960) yang dituduh sang Presiden sebagai terlibat PRRI/Permesta.

Dan bahwa Sukarno bertahan untuk terus menolak membubarkan PKI, bahkan secara terbuka memuji PKI, akibatnya parah bagi anggota partai dan para simpatisannya. Selain menjadi korban pembantaian massal, sebagian cukup besar dari mereka ter-

kurung bertahun-tahun dalam sejumlah penjara atau hidup terisolasi di Pulau Buru, sementara banyak lainnya hidup terasing sebagai eksil di berbagai penjuru dunia.

Sembari tetap bertahan pada sikap bersikeras tidak membubarkan PKI, Sukarno bersibuk menjanjikan akan datangnya komando terakhir menyelesaikan Gestapu. Besar dugaan, Sukarno menunda penyelesaian sembari mencari kesempatan untuk memukul balik Soeharto.

Untuk maksud itulah, sang Pemimpin Besar Revolusi berusaha untuk tahu siapa saja di antara para petinggi militer yang masih loyal kepadanya. Untuk tugas terakhir ini, Menteri Negara Oei Tjoe Tat ditunjuk oleh Paduka Yang Mulia Presiden Sukarno. "… Saya tugaskan kamu untuk meraba-raba siapa di antara para jenderal yang masih setia dan siapa yang mengguncang-guncang kursi kepresidenan," perintah Sukarno kepada Menteri Oei. Di antara jenderal yang ditemui Menteri Oei adalah Soeharto. Berikut ini catatan Oei Tjoe Tat dalam memoarnya, *Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Soekarno*, mengenai pertemuan tersebut.

> … Jenderal Soeharto mengomel: "PKI beberapa kali menusuk kita? Waktu kita berkelahi melawan Belanda, kita ditusuk, sekarang semua pemimpin kita dibantai. Apa lagi yang mesti kita tunggu? Kenapa tidak dibubarkan saja? Tunggu apa lagi? Tahun 1955, ketika saya menjadi Panglima di Jawa Tengah, saya dikasih tahu, 'Pak, hati-hati Pemilu di Jawa Tengah, jadi merah nanti kalau tidak diambil tindakan tertentu. Merah semua, Komunis.' Jawab Presiden, 'Merah kek, cokelat kek, hijau kek, biru kek, terserah rakyat. Namanya saja Pemilu.'"
>
> "Itu apa? Bukan pemimpin namanya."

Selain dengan Jenderal Soeharto, Menteri Oei juga menemui seorang petinggi Angkatan Udara. Yang terakhir ini mengeluh kepada utusan Presiden. Katanya,

> Kita ini kecewa sama Bapak. Sudah siapkan roket di Maospati [Madiun], diarahkan ke Jakarta. Dilaporkan kepada Bung Karno, malah dimarahi. Mau merusak Indonesia? Mau merusak ibu kota? Masak Bung Karno dituduh membunuh tujuh jen-

deral. Lha, membunuh nyamuk saja tidak berani. Saya lihat sendiri. *Wong* melihat darah saja tidak berani.

Dengan bersikeras untuk tetap membela PKI sampai akhirnya Soeharto—sebagai Pangkopkamtib dan pemegang Surat Perintah 11 Maret (Supersemar)—membubarkan Partai Komunis tersebut, Sukarno hanya makin mempersulit orang-orang Komunis dan juga para pengikut Sukarno, dan akhirnya Sukarno sendiri. Gubernur Jawa Barat, Brigjen TNI Mashudi, dan Panglima Siliwangi, Mayjen TNI Ibrahim Adjie—waktu itu diketahui sebagai bersimpati kepada Sukarno—bersama-sama membujuk sang Presiden membubarkan PKI. Menurut sejarahwan Nina Herlina dalam buku *Malam Bencana 1965*, "Ibrahim Adjie dan Mashudi berpikir bahwa kalau saja Bung Karno mau membubarkan PKI waktu itu, maka pembersihan tanpa proses pengadilan itu akan terhenti …."

BERDASARKAN INFORMASI yang ada saat saya mengetik tulisan ini, sekali lagi, saya berkesimpulan bahwa pembantaian para jenderal itu lebih meyakinkan sebagai akibat kepanikan prajurit di lapangan yang bersumber pada perencanaan yang kacau. Kendati demikian, saya tetap tidak menutup kemungkinan—jika kemudian ditemukan bukti—bahwa agen asing memegang peran penting di balik pembantaian para jenderal tersebut. Kalau kemudian terbukti ada peran agen asing di balik pembantaian tersebut, maka itu mungkin bisa menjadi dasar memperkuat kesimpulan Heru Atmodjo terhadap Syam yang dicurigainya berperan memimpin sebuah operasi militer yang dirancang untuk gagal.

Kecuali, kita mendapatkan bukti itu, maka operasi Gestapu tidak bisa disebut sebagai dirancang untuk gagal. Untuk waktu sekarang ini, kegagalan operasi militer Gestapu pimpinan Syam, bagi saya, lebih merupakan akibat petualangan dan kecerobohan Kepala Biro Khusus PKI yang memimpin operasi Gestapu tanpa pengetahuan dan pengalaman memimpin operasi militer. Tapi, sebaiknya saya katakan juga bahwa kisah berdarah yang tragis ini

mungkin bisa dihindarkan jika sekiranya Presiden Sukarno tidak merasa terpaksa harus menyingkirkan Jenderal Ahmad Yani dengan cara daulat, yang ternyata dengan mudah ditumpangi PKI.

Informasi yang saya kumpulkan menunjukkan bahwa Sukarno waktu itu memang sudah sangat kehilangan kepercayaan kepada Yani, di satu pihak, di pihak lain sang Presiden juga tidak cukup kuat dan yakin untuk begitu saja dengan cara normal menyingkirkan Panglima Angkatan Darat itu. Situasi politik sudah amat berbeda dari keadaan saat Sukarno dengan mudah menyingkirkan Nasution pada tahun 1962. Konflik sudah amat tajam, masyarakat sudah sangat terbelah, dan Perang Dingin sudah amat memuncak. Nah, di tengah-tengah ketegangan politik seperti itu, Sukarno yang tetap ingin berkuasa sambil melindungi PKI (mempertahankan Nasakom), tidak lagi melihat jalan lain, kecuali kembali kepada cara tradisional, daulat. Dengan cara yang dipilihnya itu, rencana Presiden Sukarno tersebut—sebagaimana yang dikisahkan Kolonel Bambang Widjanarko dalam buku *The Devious Dalang*—memang gampang bocor ke berbagai pihak.

Lewat kebocoran itulah terjadinya pemboncengan kepentingan lain. Yang jelas dan telah terbukti, rencana daulat itu telah ditumpangi PKI lewat Biro Khusus pimpinan Syam—pembina para perwira "berpikiran maju"—yang berada langsung di bawah kendali D.N. Aidit.[]

Ke Pulau Jawa Menjadi Seniman

Dengan Kapal *Ketapang* milik Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), saya meninggalkan Pelabuhan Makassar menjelang sore delapan Agustus 1960. Meski di Parepare (150 kilometer di sebelah utara Makassar) ada pelabuhan alam yang sanggup menerima kapal-kapal besar, yang berlayar langsung ke Surabaya waktu itu hanya ada di Pelabuhan Makassar. Berlayar kurang dari 24 jam, kapal kemudian merapat ke pelabuhan di Tanjung Perak, Surabaya, pagi keesokan harinya. Dengan penuh percaya diri—masih bercelana pendek dan menjinjing tas yang terbuat dari seng—saya mencari dan menemukan stasiun trem listrik yang punya jalur langsung ke stasiun kereta api. Siang itu juga saya melanjutkan perjalanan ke Solo, nama lain Surakarta, kota yang saya bayangkan sebagai salah satu pusat kegiatan kesenian. Bayangan itu kemudian tidak seluruhnya benar. Tapi yang pasti, dengan keputusan meninggalkan Parepare, mulailah perjalanan untuk suatu cita-cita, impian bahkan ambisi.

Umur saya menjelang 16 tahun waktu itu dan sudah aktif berkesenian, bahkan sudah pula merasa seniman. Beberapa puisi dan cerita pendek telah saya tulis dan diterbitkan. Tiga tahun sebelumnya, 1957, bersama sejumlah teman kami mendirikan organisasi kesenian, Orsenim (Organisasi Seniman Muda). Penggagas utama organisasi itu bernama Darminsyah, seorang murid sekolah menengah yang sedikit lebih senior dari kami. Darmin yang waktu itu sudah menulis puisi, gaya sehari-harinya dan potongan rambutnya meniru penyair terkenal Chairil Anwar. Waktu itu tingkah laku Chairil—penyair besar yang eksentrik dan diakui sebagai pembaru puisi Indonesia—banyak jadi model para seniman. Juga di Pulau Jawa, seperti yang saya saksikan kemudian.

Kami memulai kegiatan sejak di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Di Kabupaten Parepare waktu itu hanya ada satu SMP negeri, satu Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri, serta sebuah Sekolah Guru Atas (SGA) negeri dan beberapa sekolah menengah swasta. Sebagai seniman muda, salah satu kesibukan kami adalah menerbitkan buletin kesenian yang juga kami beri nama *Orsenim*. Dengan menggunakan mesin stensil milik pemerintah daerah atau kantor Jawatan Penerangan Kabupaten Parepare, kami menerbitkan buletin tersebut. Proses kerja berlangsung setelah kami pulang sekolah bersamaan dengan tutupnya kantor pemerintah lepas tengah hari. Kami punya banyak simpatisan di kantor-kantor milik pemerintah. Merekalah yang memfasilitasi kegiatan kami.

Markas kami berada di rumah keluarga Makkarumpa Daeng Parani yang dua putranya menjadi aktivis Orsenim. Keluarga Daeng Parani tergolong keluarga terkemuka di Parepare, wali kota pertama Parepare adalah putranya. Anak sulung keluarga itu, seorang brigjen TNI, di kemudian hari menduduki kursi gubernur Sulawesi Selatan. Makkarumpa sendiri seorang pejuang kemerdekaan yang tewas di tangan pasukan Westerling. Dari posisi yang strategis inilah, Orsenim tidak sulit mendapatkan bantuan dari berbagai pejabat pemerintah Kabupaten Parepare.

Pada buletin *Orsenim*, puisi dan artikel saya sering dimuat. Karena komunikasi yang masih sulit dengan arus utama kegiatan sastra dan kesenian Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa, model yang jadi panutan atau aliran kegiatan sastra kami tidak jelas. Kegiatan kesenian yang mungkin dan selalu kami ikuti adalah hanya kegiatan kesenian di Kota Makassar, yang memang ramai waktu itu. Sesekali tulisan kami dari Parepare ada dimuat juga di koran-koran tersebut. Aktivis kesenian terkemuka di Makassar waktu itu adalah—antara lain—Rahman Arge, Hisbuldin Patunru, Andi Baso Amir, Arsal Alhabsi, Harun Rasyid Jibe, Ramli Toana (Ramto), dan sebarisan anak muda lainnya, termasuk Aspar Paturusi, penyair yang sekarang terlibat aktivitas film dan televisi di Jakarta. Seniman-seniman di Makassar itu juga tidak punya kon-

tak dengan rekan-rekan seniman di Pulau Jawa, juga Sumatra. Karya-karya mereka terbit secara lokal saja. Penerbitan sastra dan budaya dari Pulau Jawa tidak bisa ditemukan di toko-toko buku Makassar, apalagi di Parepare.

Perkumpulan seniman muda seperti yang kami dirikan di Parepare sudah lebih dahulu berkembang di Makassar. Kendati demikian cabang Orsenim kemudian terbentuk juga di kota besar tersebut. Di antara alumnus Orsenim Makassar yang sampai sekarang namanya masih terdengar, salah satunya, adalah August Parengkuan, wartawan senior koran *Kompas* yang kemudian dipercayai menjabat Duta Besar Indonesia untuk Italia. Ketika remaja di Makassar, August adalah penyair muda, tapi setelah hijrah ke Jakarta, kesibukannya sebagai wartawan menyita waktunya berkesenian.

Menarik Perhatian Anak-Anak Muda

Kegiatan kesenian di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu semua kami ikuti lewat koran-koran Makassar yang setiap hari bisa dibaca di Parepare. Kelak ketika saya sudah bermukim di Jakarta, pada 1964 dan menjadi salah seorang anggota panitia Konferensi Karyawan Pengarang Seluruh Indonesia (KKPSI), sayalah narasumber yang memberi informasi mengenai sastrawan Makassar dan Parepare yang sebaiknya diundang sebagai peserta. Dan sejak itu berakhirlah isolasi panjang para seniman dan sastrawan Sulawesi Selatan. Berakhirnya keterasingan itu menjadi nyaris sempurna setelah pemerintahan Orde Baru mulai menunjukkan hasilnya. Hubungan Sulawesi Selatan—lewat laut dan udara—dengan Jakarta makin terbuka dan berangsur ramai. Akibatnya, kegiatan kesenian berangsur berakhir sebagai *the only game in town*. Di Makassar dan Parepare, kegiatan kesenian merosot ketika kesibukan lain membuka kesempatan dan menarik perhatian anak-anak muda. Kondisi demikian diperburuk juga oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kegiatan kesenian.

Sebelum berakhirnya isolasi tersebut, apa yang terjadi di Pulau Jawa dalam perkembangan kesenian Indonesia masa itu kami tahu hanya samar-samar. Yang saya tahu, selain Jakarta, Kota Solo dan Yogyakarta adalah dua pusat kegiatan kesenian terkemuka di Pulau Jawa waktu itu. Dan karena merasa memiliki bakat besar dan tekad menjadi seniman sangat kuat, orangtua saya tidak mungkin lagi mencegah keberangkatan anak sulungnya ke Tanah Jawa. Bapak dan ibu sepakat melepas saya pergi setelah sebelumnya saya gagal melarikan diri.

Orangtua saya merasa aman melepas saya ke Solo karena di sana ada paman yang bersedia menampung saya. Tapi, kemudian ternyata saya hanya betah bertahan tinggal beberapa bulan di rumah Paman. Pindah ke Asrama Kesatuan Pelajar Sulawesi Selatan (KPSS), di sana pun saya tidak tinggal lama. Akhirnya, saya memondok dan bayar makan bersama beberapa teman di Kampung Nusukan, tidak jauh dari daerah Margoyudan, lokasi sekolah kami. Keputusan tinggal di kampung di pinggir kota itu ternyata kemudian menolong saya sebagai seorang yang belajar ilmu sosial. Selain membuka kemungkinan belajar berbahasa Jawa, saya juga mendapat kesempatan untuk lebih mengerti budaya Jawa, hal yang amat penting ketika kelak mengalami dan mempelajari budaya politik Orde Baru yang memang sangat berbau Jawa.

Ketika sudah di Solo itulah, saya baru sadar betapa ketinggalannya kami di Sulawesi Selatan, khususnya di Parepare. Di Jakarta dan Yogyakarta, sejumlah majalah budaya dan sastra telah terbit dan mati tanpa pernah kita ketahui di kampung kami di seberang sana. Seingat saya buku tentang sastra Indonesia modern yang pernah sampai di Parepare waktu itu hanya dua karya H.B. Jassin, *Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45* dan *Tifa Penyair dan Daerahnya*. Dua buku tersebut diperoleh seorang teman sebagai hadiah dari ayahnya, pebisnis yang memang sering bolak-balik ke Pulau Jawa. Di Solo kebetulan salah seorang teman sekelas saya di SMA Negeri Margoyudan, Slamet Sukirnanto, penyair muda waktu itu, mempunyai koleksi hampir semua majalah sastra yang pernah

terbit di Pulau Jawa. Nama majalah itu sebagian besar tidak pernah kami dengar di Parepare. Slamet berbaik hati mengizinkan saya membaca majalah-majalah koleksinya.

Tahu bahwa saya berminat pada sastra, seorang tetangga tempat saya memondok yang bekerja di perpustakaan Kraton Kasunanan, *Rudya Pustaka*, mengajak saya ke tempat bekerjanya yang punya koleksi majalah-majalah kebudayaan terbitan berbagai kota di Indonesia sejak masa Revolusi. Dengan bantuan tetangga itu, sebagian besar majalah tersebut sempat saya baca selama masa tiga tahun bersekolah di Solo. Di Parepare sendiri waktu itu hanya ada satu perpustakaan yang mempunyai koleksi buku-buku sastra. Pada perpustakaan milik kantor Pendidikan Masyarakat tersebut, kami selalu bisa meminjam buku-buku terbitan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Saya dan teman saya, Andi Makmur Makka, penyair dan penulis cerita pendek yang juga pendiri Orsenim, rajin ke perpustakaan itu. Karena koleksinya terbatas pada karya-karya lama, karya sastra Indonesia masa Revolusi dan karya-karya tahun lima puluhan sama sekali asing bagi kami. Kelak di Solo, saya baru berkesempatan membaca karya-karya sastra Indonesia terbaru.

Rendra Orang Solo

Di Solo bukan hanya membaca karya-karya mereka, saya bahkan sering kali juga bertemu langsung dengan para pengarangnya. Penyair dan dramawan terkenal yang pertama saya jumpa di Pulau Jawa adalah W.S. Rendra. Waktu itu Rendra mahasiswa Fakultas Sastra di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tapi karena rumah orangtuanya di Solo, Rendra sering datang ke kota asalnya. Kebetulan saya sering datang ke rumah Rendra untuk belajar bersama teman-teman. Salah seorang adiknya adalah teman sekelas di SMA Margoyudan. Praktis semua anggota keluarga Rendra saya kenal. Nasihat Rendra yang selalu saya ingat, "Banyaklah berlatih menulis."

Masih soal Rendra, yang kelak menjadi sahabat saya sampai akhir hayatnya di Jakarta, saya teringat pementasan teater arena pertama yang saya tonton. Suatu kali saya mendapat informasi rombongan teater mahasiswa Gadjah Mada akan mengadakan pertunjukan di gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Solo dengan Rendra sebagai pemain utamanya. Lakon yang akan dimainkan adalah sebuah komedi karya Anton Chekov, dramawan Rusia yang terkenal. Pementasan tidak mempergunakan panggung, tetapi sistem arena yang pertunjukannya menempatkan pemain di tengah ruangan dan para penonton duduk melingkar. Karena sangat antusias menonton Rendra dan pertunjukan teater arena yang belum pernah saya saksikan, saya menjadi penonton pertama yang memasuki gedung pertunjukan malam itu. Takut tidak kebagian tempat. Kemudian, terbukti hadirin yang membeli tanda masuk sebesar 25 rupiah, hanya menduduki setengah dari kursi yang tersedia.

Menonton teater bukan saja di Solo, melainkan saya sering juga ke Yogyakarta menyaksikan pertunjukan yang diadakan berbagai grup teater yang pemain dan penyelenggaranya adalah para mahasiswa di kota universitas itu. Berbeda dengan kehidupan kesenian di Yogyakarta sekarang, di Yogyakarta masa itu banyak grup teater mahasiswa. Mungkin karena sistem kuliah yang sekarang ketat, tidak banyak lagi kesempatan bagi mahasiswa berteater. Tokoh teater yang paling menonjol di kota kesultanan waktu itu adalah W.S. Rendra. Hampir semua pertunjukannya saya tonton. Di samping Rendra, pegiat teater di Yogyakarta yang juga dikenal waktu itu adalah Mat Dhelan, Pong Waluyo, Motinggo Boesye, Iman Sutrisno, Soekarno Hadian, dan banyak lagi yang namanya sudah saya lupa. Mereka semua mahasiswa. Bersama beberapa teman, kami biasanya berangkat dengan bus dari Solo pada sore hari dan setelah menonton acara dilanjutkan dengan ngobrol yang umumnya berlangsung di warung kopi pinggir jalan. Selepas itu, kami langsung ke stasiun bus dan pulang ke Solo dengan kendaraan pertama yang berangkat subuh. Kelak ketika sudah bermukim di Jakarta, selain rajin menon-

ton pertunjukan para mahasiswa Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI), saya juga sering ke Bandung menonton pertunjukan grup Studi Klub Teater Bandung (SKTB) pimpinan Jim Adhilimas. Salah satu pertunjukan di Bandung yang saya ingat dan berkesan bagi saya adalah pertunjukan *Hamlet* karya Shakespeare yang disadur, disutradarai oleh Jim dengan Jim sebagai pemain utama, memainkan tokoh Hamlet.

Biasanya pada pertunjukan di Yogyakarta itu kami jumpa dengan seniman-seniman teater dari berbagai kota di Jawa Tengah. Karena Yogyakarta waktu itu dipandang sebagai semacam kiblat kegiatan teater di luar Jakarta dan Bandung, maka para seniman dari berbagai kota itu pada berdatangan setiap ada pertunjukan, terutama kalau yang berpentas adalah grup pimpinan W.S. Rendra.

Harus saya katakan, pengetahuan kami tentang perkembangan teater di Pulau Jawa ketika saya masih di Parepare bersumber hanya pada satu majalah populer, yang secara tidak teratur sering kami baca di kantor Jawatan Penerangan Kabupaten Parepare. Itu adalah majalah *Aneka* yang memuat berita-berita film, teater, dan olahraga. Jadi, kami bisa sedikit-sedikit tahu kegiatan pementasan teater di Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan kota-kota lain di Pulau Jawa. Tapi, bagaimana bentuk pementasan? Bagaimana akting para pemainnya? Bagaimana penataan panggungnya? Bagaimana tata cahayanya? Bagaimana ilustrasi musiknya? Apakah pertunjukan mereka masih seperti sandiwara tempo dulu? Kami sama sekali tidak punya bayangan. Maka bisa dimengerti jika di Solo dan Yogyakarta itu, saya sangat antusias menonton sebagian besar pertunjukan teater. Hal yang sama nanti saya lakukan lagi ketika saya ke Eropa untuk pertama kalinya. Di Amsterdam, Paris, dan Berlin, saya selalu menyempatkan menonton drama. Saya ingin tahu bagaimana gaya pementasan, mutu aktor, dan penafsiran sutradara terhadap lakon-lakon terkenal yang mereka mainkan.

Kecuali, rombongan sandiwara bercampur lawak dari Jawa yang biasanya bermain pada pasar malam tahunan, di Parepare masa itu memang sesekali ada pementasan drama (waktu itu

disebut sandiwara), tapi coraknya belum beranjak banyak dari sandiwara tempo dulu. Para pemimpinnya juga masih sisa-sisa orang sandiwara tempo dulu. Salah seorang tokohnya yang masih saya ingat adalah S. Mon yang konon pada masa mudanya pernah ikut sandiwara keliling.

Menggunakan Bawang Merah

Maka, ketika di Pulau Jawa para aktor sudah mempelajari teori-teori akting (Stanislavsky dan Boleslavsky, terutama), di Parepare para pemain rombongan sandiwara itu masih menggunakan bawang merah untuk memaksa keluarnya air mata pada adegan menangis. Tokoh-tokoh sandiwara berbau masa lalu itu, kemudian berkumpul dalam sebuah kelompok yang berafiliasi dengan golongan Komunis menjelang saya meninggalkan Parepare. Di kemudian hari, saya dengar anggota kelompok teater itu sebagian besar ditahan setelah Gestapu.

Keterbatasan bacaan dan kesempatan mengikuti perkembangan kesenian itu membuat Kota Parepare terasa berangsur makin sempit saja bagi saya. Kesempitan itu makin menjadi-jadi oleh gangguan keamanan yang masih mencengkeram Sulawesi Selatan. Untuk bepergian ke Makassar, misalnya, kita dari Parepare harus berkonvoi dengan pengawalan tentara. Penghadangan-penghadangan oleh berbagai gerombolan bersenjata sering sekali terjadi, dan korbannya banyak. Ketika penghadangan bermula pada awal tahun lima puluhan, ayah saya termasuk yang jadi korban pertama. Uang yang dibawanya, arloji yang dipakainya, dan cincin berlian di jari manisnya, semua dengan paksa dirampas oleh gerombolan bersenjata. Kota Parepare yang diapit oleh pantai dan bukit adalah juga sasaran gerombolan.

Pada malam hari, Kota Parepare sering sekali ditembaki dari atas bukit. Untuk menghindari peluru nyasar, setiap keluarga menggali lubang perlindungan di bawah rumah. Harap diketahui, rumah-rumah kami adalah rumah panggung. Seingat saya, selepas Maghrib biasanya sudah mulai terdengar tembakan, dan kita

semua beramai-ramai masuk lubang perlindungan. Biasanya pada pukul sembilan atau sepuluh, tembakan mulai reda. Kami semua lalu mulai bergerak naik ke rumah untuk makan malam. Sebagai akibat gangguan keamanan itu untuk waktu lama, otoritas keamanan Parepare memberlakukan jam malam.

Sekarang, bukit itu sudah merupakan bagian dari kota yang terus berkembang. Kantor-kantor pemerintah kota, markas tentara, kampus perguruan tinggi, dan sejumlah perumahan mahal sudah meramaikan daerah perbukitan tersebut. Perubahan dan perkembangan kota dimungkinkan oleh pulihnya keamanan setelah tentara melakukan *Operasi Kilat* pada 1963-1965. Operasi yang dipimpin Kolonel Andi Muhammad Jusuf Amir, Pangdam Hasanuddin—kelak menjadi Panglima ABRI—waktu itu, berhasil membasmi gerombolan bersenjata yang lama mengacaukan keamanan Sulawesi Selatan. Inilah latar belakangnya mengapa saya selalu mengaku sebagai "pengungsi" yang datang dari daerah kacau, mencari keamanan dan kesempatan belajar di Pulau Jawa.

Wayang Orang Sriwedari

Di Solo, selain membaca majalah sastra dan kebudayaan yang dikoleksi Slamet Sukirnanto atau yang dimiliki museum Kasunanan Solo, saya juga selalu bisa membaca majalah sastra dan kebudayaan terbaru di samping buku-buku sastra mutakhir yang tersedia di toko buku. Langganan saya waktu itu adalah toko buku *Budi Laksana* yang terletak di depan Puri Mangkunegaran. Di toko buku itu semua karya sastra terbaru selalu tersedia. Bersama Slamet Sukirnanto, kami juga memelopori dan mengasuh siaran *Suara Pelajar* di Radio Republik Indonesia (RRI) Solo. Siaran tetap setiap bulan itu sejatinya ditujukan kepada para pelajar, tapi topiknya kebanyakan mengenai soal-soal seni dan budaya. Kami juga mendirikan klub teater, *Teater Margoyudan*, di sekolah kami. Pada sebuah perpisahan sekolah, di Gedung Wayang Orang *Sriwedari* kami mementaskan lakon *Pinangan* karya Anton Chekov. Saya pemain utama, Slamet bertindak sebagai sutradara dan juga

pemain pembantu. Sandiwara-sandiwara komedi Chekov waktu itu memang sangat populer dan dipentaskan di berbagai kota.

Selain bercita-cita menjadi sastrawan, saya juga sangat berminat menjadi aktor pentas. Inilah latar belakang berdirinya grup teater tersebut. Kemudian di Jakarta, saya mengikuti kuliah teater ATNI. Sebagai mahasiswa ATNI (kuliah malam) dan mahasiswa Universitas Indonesia (kuliah pagi), saya pernah mendirikan klub teater di Fakultas Psikologi dan mementaskan sandiwara *Barabah* karya Motinggo Boesye. Pada pementasan yang berlangsung di Gedung Liga Film UI Salemba itu, saya bertindak sebagai sutradara, pemain-pemainnya adalah teman-teman mahasiswa Psikologi.

Salim Said bersama teman-teman mahasiswa Psikologi UI, 1964.

Bertolak dari pengetahuan yang bersumber pada kuliah-kuliah di ATNI dan bacaan tentang teater, saya melatih beberapa calon pemain yang direncanakan tampil pada pertunjukan selanjutnya setelah pementasan karya Motinggo tersebut. Ada dua teman dari "pusat latihan" saya itu yang kelak dikenal sebagai pemain teater dan film. Yang pertama adalah Dewi Savitri Matindas, sedangkan yang lainnya adalah Silvia Nainggolan. Ketika setelah Gestapu, para alumnus senior ATNI mencari pemain wanita, dan kegiatan saya lebih terpusat sebagai aktivis mahasiswa, saya

memperkenalkan kedua mahasiswi Fakultas Psikologi itu kepada mereka. Berangkat dari sanalah, Dewi dan Silvia beredar di kalangan teaterawan Jakarta, antara lain Steve Liem (Teguh Karya) pemimpin grup *Teater Populer*. Kedua mahasiswi yang berkenalan dengan teater lewat saya itu tampil dalam beberapa pementasan yang disutradarai Teguh Karya. Dan akhirnya juga ikut bermain film ketika kelompok *Teater Populer* membuat film.

Bersama aktor Amak Baldjun pada 1978 dalam sandiwara karya Brecht, *In Search of Justice*, disutradarai Arifin C. Noer.

Pada 1969, saya berkesempatan tampil sebagai pemain utama dalam sebuah sandiwara yang dipentaskan di Teater Tertutup Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Arifin C. Noer adalah sutradara pementasan tersebut. Berasal dari Cirebon, Arifin pernah kuliah di Universitas Cokroaminoto, Solo. Tapi, seingat saya, Arifin lebih menonjol sebagai teaterawan ketimbang sebagai mahasiswa. Sewaktu dia di Solo itulah, kami berkenalan. Masuk Jakarta pada awal Orde Baru, Arifin buat sementara menumpang di rumah bujangan saya di Matraman Raya. Kami bersama lalu mendirikan klub teater yang kami beri nama *Teater Kecil*. Nama itu saya ambil dari nama klub teater orang asing yang aktif di Jakarta hingga 1965. Grup para ekspatriat itu bernama *The Little Theater*. Dalam pementasan pertama Teater Kecil itu, bersama saya juga tampil di atas pentas Taufik

Salim Said bersama para artis film, Sofia, W.D. Mochtar, dan Lenny Marlina, 1977.

Effendi (kemudian menjadi menteri pada kabinet pertama SBY) dan aktor terkemuka Amak Baldjun. Kedua teman ini adalah aktivis teater sejak mereka kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sibuk sebagai wartawan, kesempatan berkesenian menjadi makin sempit. Meski secara tetap mangkal di Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) Taman Ismail Marzuki (TIM) dan hampir tidak pernah absen menikmati berbagai pertunjukan di pusat kesenian itu, pada tahun tujuh puluhan persinggungan saya dengan kesenian berangsur terfokus hanya pada dunia film. Ini adalah akibat kesibukan saya sebagai kritikus film pada majalah *Tempo*. Antara 1971 hingga awal 1979—tahun-tahun kebangkitan kembali film Indonesia—hampir semua film Indonesia saya resensi. Karena sebagian besar film Indonesia masa itu bermutu rendah, lama-kelamaan semangat saya menulis resensi meredup. Sehubungan dengan soal mutu yang demikian itu, suatu kali saya menghadiri undangan makan malam di kediaman Dubes Belanda yang terletak di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Tahu saya salah seorang anggota dewan juri FFI yang baru saja berlangsung, Dubes Belanda mengajak saya bicara mengenai film-film Indonesia. Beberapa pertanyaan diajukan Pak Dubes.

Duduk semeja dengan saya adalah seorang ibu yang juga profesor ahli sastra Jawa dan sedang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan. Begitu selesai saya menjawab pertanyaan tuan rumah, ibu Dirjen dengan segera, dalam bahasa Belanda, melontarkan komentarnya yang amat melecehkan film-film Indonesia. "Sebagai pejabat tinggi di bidang kebudayaan, saya sering mendapat undangan menonton film Indonesia. Undangan-undangan itu saya berikan saja kepada *bedinde* [pembantu di rumah] karena saya tidak ingin menghabiskan waktu menonton film-film yang bermutu amat rendah itu," kata Ibu Dirjen. Saya kesal mendengar komentar semacam itu dari seorang pejabat tinggi kebudayaan. Tapi, saya kira yang dikatakannya banyak juga benarnya. Komentar-komentar yang sama sering juga terdengar dari teman-teman saya, orang-orang terpelajar.

Mengapa film-film Indonesia bermutu rendah? Itulah pertanyaan yang menjadi obsesi saya menjawabnya pada masa itu. Maka, ketika saya harus menulis tesis guna mendapatkan gelar Drs. di Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia, topik yang menjadi obsesi saya itulah yang saya garap. Tesis itu kemudian diterbitkan dalam bahasa Indonesia (*Profil Dunia Film Indonesia*) oleh Penerbit Grafiti Press dan dalam bahasa Inggris (*The Shadows on The Silver Screen*) oleh Penerbit Lontar. Tesis buku itu menjelaskan penyebab rendahnya mutu kebanyakan film Indonesia karena pada dasarnya film-film tersebut secara historis memang diproduksi sebagai barang dagangan. Produser, distributor, dan *exhibitor* film-film tersebut adalah para pedagang. Soal mutu sama sekali bukan bahan pertimbangan para saudagar tersebut. Pedoman mereka adalah prinsip ekonomi: dengan investasi kecil mendapatkan keuntungan yang besar. Dan film-film demikian memang terutama adalah konsumsi bagi penonton kelas bawah.

Sebagai penulis kritik film yang serius dan produktif, tapi juga galak, saya sering diejek oleh para sutradara yang meragukan pengetahuan saya mengenai film. Pertanyaan demikian saya anggap mempertanyakan otoritas saya sebagai penulis kritik film. Salah seorang yang secara terbuka mempersoalkan kebolehan saya adalah sastrawan dan sutradara film Motinggo Boesye. Saya merasa tertantang dan berniat lebih memperkaya pengetahuan saya mengenai film. Sampai pada saat itu, saya memang hanya belajar film melulu lewat sejumlah buku yang saya beli dalam berbagai perjalanan ke luar negeri sebagai *travelling correspondent* majalah *Tempo*. Toko buku di Indonesia masa itu tidak menjual buku-buku tentang film.

Salim Said menyutradarai film pendek, 1977.

Dalam rangka merespons tantangan Boesye dan teman-teman dari dunia film itulah, saya menerima ajakan Wim Umboh—sutra-

dara film terlaris—menjadi asistennya. Saya mengikuti pembuatan film *Mama* dari proses penulisan skenario hingga tontonan itu siap dipertunjukkan di bioskop. Selama sebulan magang sebagai asisten sutradara di lapangan—syuting di Jakarta, Surabaya, dan Denpasar—saya bukan saja belajar membuat film, melainkan juga mendapat pengetahuan banyak mengenai kehidupan orang-orang film, hal yang amat berguna bagi seseorang yang belajar sosiologi seperti saya.

Bapak Perfilman Indonesia

Usmar Ismail—dikenal sebagai Bapak Perfilman Indonesia—pernah mencoba membuat sejumlah film sebagai karya kreatif. Untuk tujuan itu, Usmar mendirikan Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia). Film-filmnya bagus, tapi secara komersial di pasar kalah bersaing dengan film-film dagangan yang bermutu rendah itu. Salah satu alasan di balik tidak suksesnya pemasaran karya-karya Usmar Ismail adalah tingkat selera penonton waktu itu yang masih rendah. Penonton yang terdidik dan berselera bagus jumlahnya masih sedikit dan umumnya sudah merupakan konsumen tetap film-film impor yang memang merajai bioskop Indonesia.

Kelak ketika tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi para penonton Indonesia sudah lebih meningkat, film-film sebagai karya kreatif yang dihasilkan oleh para sutradara muda lulusan berbagai sekolah film dalam dan luar negeri—Garin Nugroho, Rudi Sudjarwo, Riri Riza, Nia Dinata, Hanung Brahmantio, dan sejumlah teman segenerasinya—akhirnya secara perlahan-lahan menjadikan film-film Indonesia merebut tempat di hati masyarakat. Pada berbagai festival film internasional, film-film Indonesia juga sudah mendapat perhatian bahkan memenangi sejumlah penghargaan. Sekarang, orang tidak lagi bisa secara gampang menyimpulkan film-film Indonesia bermutu rendah. Film-film Indonesia yang bermutu tinggi sudah banyak di pasar, tapi yang murahan juga masih tetap diproduksi oleh para pedagang film.

Anda mau nonton yang mana, terserah. Semua tersaji di gedung-gedung bioskop.

DI KEMUDIAN HARI, dari pengalaman, pengamatan, dan perenungan, saya makin sadar dan yakin bahwa bakat kesenian saya sebenarnya ternyata tidak sebesar yang saya bayangkan ketika memberanikan diri hijrah ke Pulau Jawa pada 1960. Bertahun-tahun saya mengamati betapa banyak anak muda seperti saya yang masuk ke Jakarta dengan niat menjadi seniman. Sebagian besar tidak berhasil. Selain karena bakat yang memang tidak memadai, untuk menjadi seniman yang sukses, diperlukan juga ketekunan dan kecerdasan yang tinggi. Tanpa syarat-syarat itu, sulit bersaing dengan banyak perantau yang datang dengan tekad baja “menaklukkan” Jakarta.

Seniman Senen

Berada di Pulau Jawa selama lebih setengah abad, bergaul dengan kesenian dan para senimannya secara intensif, saya berkesimpulan, mereka yang sukses adalah yang bakatnya besar, tekun, dan berkecerdasan tinggi. Saya pernah kenal nyaris semua penyair dan penulis novel dan cerita pendek terkemuka Indonesia. Mereka yang sukses semua tergolong cerdas. Mereka yang tidak memiliki kecerdasan, akhirnya hanya berhasil menjadikan Jakarta “kuburan” bagi calon-calon seniman yang gagal.

Sedihnya pula, calon-calon seniman yang gagal itu kebanyakan masuk Jakarta dengan *one way ticket,* artinya tidak punya pilihan lain, termasuk pilihan kemungkinan pulang ke kota asal. Mereka tetap bertahan di Jakarta, kebanyakan terus merasa sebagai seniman, bergaya seniman yang sering tampil urakan, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Bergaul dengan mereka biasanya kurang menyenangkan. Orang-orang itu pada umumnya sangat berpretensi sebagai seniman. Beberapa orang seperti ini di Jakarta sekarang kadang-kadang masih bisa ditemukan di sejumlah warung di halaman Pusat Kesenian Jakarta. Pada masa lalu,

orang-orang seperti ini berkumpul di daerah Pasar Senen, dan karena itu mereka dulu dikenal sebagai Seniman Senen.

Kehidupan tragis seperti itu menakutkan saya. Ketakutan itu mendorong saya merevisi rencana hidup: melepaskan impian dan ambisi jadi seniman dan berkonsentrasi menyelesaikan sekolah dengan ambisi baru, menjadi ilmuwan. Menurut saya waktu itu, cita-cita menjadi ilmuwan lebih mungkin saya raih daripada menjadi seniman. Saya sadar, daya kritis saya lebih tinggi tinimbang daya kreatif yang saya miliki. Konsekuensi revisi, sekolah harus terus dan serius. Ini jelas berbeda dengan rencana awal yang hanya menargetkan gelar "pernah kuliah di Universitas Anu". Karena lama memegang dengan setia rencana awal tersebut, saya tadinya sudah enggan menyelesaikan pendidikan tinggi saya di Universitas Indonesia. Sebenarnya sudah lama saya berkesempatan mendapatkan ijazah, tapi saya malas menulis tesis, padahal semua kuliah sudah saya selesaikan. Karena perubahan rencana hidup, diploma lalu terasa mutlak wajib saya miliki. Dengan selembar kertas itu—yang akhirnya saya peroleh—saya bisa mendapatkan kesempatan sekolah lebih tinggi lagi. Alhamdulillah, tidak sia-sia perubahan rencana dan arah itu. Saya kemudian berhasil menyelesaikan pendidikan tertinggi saya di Amerika, mendapat gelar doktor dan menulis sejumlah karya ilmiah.

Tidak lagi berencana menjadi seniman, juga tidak lagi merasa bagian dari kelompok seniman, perhatian pada kesenian tidak pula menghilang begitu saja dari diri saya. Sebagai peminat dan penikmat seni, itulah saya sekarang. Ketika menduduki kursi Duta Besar di Praha barangkali sayalah diplomat di kota tersebut yang paling rajin menghadiri berbagai acara kesenian di ibu kota Republik Ceko itu. Saya menonton semua opera dan selalu hadir pada konser-konser musik klasik selama tiga setengah tahun saya duduk di Praha. Kedutaan Besar yang saya pimpin adalah juga perwakilan negara asing yang paling banyak mengadakan acara-acara kesenian di negara tersebut.

Tugas utama kami para Dubes Indonesia sebenarnya adalah promosi ekonomi. Tapi, bagaimana orang akan membeli barang

dagangan kita di Eropa kalau mereka tidak tahu siapa kita dan berapa tinggi peradaban kita. Untuk tujuan promosi ekonomi itulah, saya memulai langkah dengan memperkenalkan Indonesia lewat kegiatan seni dan budaya. Dengan dana yang tersedia di KBRI, saya secara teratur mendatangkan seniman terkemuka Indonesia mengadakan pertunjukan di Praha. Festival Film Indonesia setiap tahun juga saya adakan, kadang-kadang dengan mendatangkan sutradaranya. Untuk pekan film karya-karya Riri Riza, misalnya, Riri saya datangkan dan sebagai patron festivalnya kami minta Jiri Menzel, sutradara Ceko yang pernah memenangi hadiah Oscar di Hollywood. Karya pertama Jiri Menzel, *Closedly Guarded Train*, pada awal tahun tujuh puluhan merupakan film yang amat populer di kalangan para seniman dan kaum terpelajar Jakarta. Film tersebut bisa kita tonton berkat kegiatan bagian kebudayaan Kedutaan Besar Cekoslowakia yang memang sangat aktif waktu itu.

RAJIN MENGHADIRI acara-acara kesenian, terlibat diskusi sastra, teater, dan film di samping menulis buku-buku tentang film, beberapa tahun setelah selesai sekolah di Ohio, suatu kali saya di-

Salim Said sebagai juri Festival Film Indonesia (FFI) bersama Gus Dur, 1988.

minta menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), bahkan kemudian terpilih menjadi ketua. Waktu itu saya juga anggota Dewan Film Nasional dan Ketua Bagian Internasional Festival Film Indonesia (FFI). Kegiatan di Dewan Film dan FFI memungkinkan saya selalu bisa mengikuti perkembangan perfilman Indonesia dan internasional, terutama karena juga berkali-kali menjadi juri FFI di samping berkesempatan menghadiri sejumlah besar festival film internasional di berbagai penjuru dunia.

Saya dan teman-teman dipercayai mengelola DKJ selama hampir sepuluh tahun. Tekad saya sebagai pimpinan DKJ adalah bekerja tidak dari posisi sebagai seniman, tetapi terutama sebagai pengelola yang profesional dan sekalian sebagai pelayan yang memfasilitasi para seniman. Sebagai ketua yang senior, saya memusatkan diri sebagai wajah DKJ ke luar. Urusan program ditangani Ratna Riantiarno dan Adi Kurdi, keduanya orang teater terkemuka, sementara masalah kantor dan keuangan kami percayakan kepada Dr. Yulianti Parani, penari dan pencipta tari senior. Dengan kerja sama dan dukungan teman-teman seniman anggota pleno DKJ, kami berhasil menghidupkan kembali DKJ yang kiprahnya sudah lama kehilangan pamor.

Memasuki kantor DKJ, saya menemukan kantor tanpa mesin faksimile, tanpa komputer, juga tanpa mesin fotokopi. Atas persetujuan teman-teman Dewan Pimpinan Harian, saya menghubungi harian *Kompas* dan majalah *Tempo* serta jaringan bioskop *21* yang mengelola ruangan bioskop tepat di bawah kantor DKJ. Kami akhirnya mendapatkan komputer dari *Kompas*, mesin fotokopi dari grup *21*, dan mesin faksimile dari majalah *Tempo*.

Salim Said, Christine Hakim, dan Rosihan Anwar di Cannes, Prancis Selatan, 1989.

Salah satu yang saya capai sebagai pimpinan DKJ yang berurusan dengan masyarakat adalah membawa Dr. Ginanjar

Kartasasmita, Ketua Bappenas, ke Pusat Kesenian Jakarta untuk menyampaikan sebuah pidato kebudayaan. Lobi saya bukan cuma berhasil membawa Ketua Bappenas berpidato, melainkan juga sukses meyakinkan pembesar perencanaan ekonomi negara itu mengenai perlunya memasukkan kegiatan kesenian ke dalam agenda Bappenas agar mendapat bantuan. Berhasil, dan kegiatan kesenian di seluruh Indonesia mendapat dana satu miliar rupiah, suatu jumlah amat besar pada masa sebelum krisis moneter 1997, ketika nilai rupiah terhadap dolar Amerika masih satu berbanding 2.500.

Sayang hampir setengah dana itu terpotong oleh proses birokratis sehingga yang sampai ke tangan seniman jumlahnya amat terbatas. Di Irian Barat (Papua sekarang), dana itu malah sama sekali tidak sampai kepada seniman. Kantor Kebudayaan Daerah menggunakannya untuk pengadaan alat-alat kesenian serta pakaian daerah, suatu hal yang sebenarnya bisa dilakukan dengan biaya rutin. Niat memperjuangkan dana itu adalah mendapatkan pembiayaan bagi kegiatan kreatif para seniman yang mengalami kendala keuangan. Akhirnya, rencana itu gagal. Pengalaman yang kurang sedap itu menyebabkan saya pada tahun berikutnya tidak bersemangat lagi melobi Pak Ginanjar.

Salim Said dan Arifin C. Noer menghadiri festival film di Berlin, 1988.

Selain berhasil mendatangkan Dr. Ginanjar Kartasasmita, tidak kurang menarik pengalaman saya mengundang dua pembesar militer

Komando Daerah Militer (Kodam) Jakarta menonton salah satu pertunjukan *Teater Koma* pimpinan Nano Riantiarno. Pertunjukan *Teater Koma* waktu itu sering sekali dilarang oleh aparat keamanan. Suatu kali saya sarankan kepada Kolonel Infantri Susilo Bambang Yudhoyono—Asisten Operasi Panglima Kodam dan di kemudian hari menjadi Presiden Republik Indonesia—menyaksikan pertunjukan kelompok teater yang sering dilarang itu. Sebagai Ketua DKJ, saya sediakan tiket untuk tamu dari Kodam. Pada kesempatan lain, saya undang juga Brigjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Staf Kodam untuk juga menonton pertunjukan drama produksi *Teater Koma*. Kedua petinggi militer Jakarta itu ternyata senang menonton pertunjukan tersebut. "Lucu, Mas," kata SBY ketika saya minta komentarnya beberapa hari kemudian. Sjafri juga berkomentar yang lebih kurang sama. Langsung saja saya berkata, "Itulah pertunjukan yang sering kalian larang. Sama sekali tidak berbahaya, bukan? Lagi pula memang belum ada pertunjukan teater yang menyebabkan pemberontakan, apalagi revolusi." Para petinggi militer Jakarta itu tertawa. Tapi, kemudian saya tahu yang melakukan pelarangan adalah kekuasaan di atas mereka, meski yang datang ke gedung teater menyampaikan keputusan dan perintah pelarangan biasanya aparat Komando Rayon Militer (Koramil) yang sebenarnya berada di bawah komando Panglima Kodam Jakarta.

Suryadi Sudirja Gubernur dari Paris

Kegiatan kami di Jakarta menjadi lebih mudah terutama karena mendapat dukungan dari Gubernur DKI waktu itu, Mayor Jenderal TNI Suryadi Sudirja. Bapak Gubernur ini pernah sekolah militer di Paris dan karena itu tahu kehidupan kesenian di ibu kota Prancis yang terkenal sebagai kota kebudayaan terkemuka dunia. Seperti Ali Sadikin pada masa lalu, Jenderal Suryadi juga sangat percaya kepada kami para seniman pengelola DKJ. Ketika ada rencana Pemerintah Jakarta merenovasi bangunan-bangunan Pusat Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki, saya segera me-

nemui Pak Gubernur dan menyampaikan, "Apa yang akan kita renovasi? Gedung-gedung ini sejak awal sifatnya darurat dan itu sangat disadari Pak Ali Sadikin sebagai pendirinya." Lewat sejumlah rapat antara DKJ dan para pejabat DKI, Gubernur Suryadi Sudirja akhirnya setuju membangun kembali, bukan merenovasi PKJ. Ketika pembangunan dimulai, saya mendampingi Pak Gubernur pada upacara pemancangan tiang pertama. Tapi, tiba-tiba Indonesia dilanda krisis moneter. Akibatnya, diperlukan waktu lama dan urun kerja beberapa gubernur sebelum pembangunan gedung-gedung pusat kesenian itu selesai dan mulai bisa dimanfaatkan.

Salim Said bersama Gubernur Suryadi.

Masa kepengurusan kami juga merupakan kesempatan satu-satunya bagi DKJ—sepanjang sejarahnya—diterima Presiden Soeharto di Istana. Ceritanya bermula ketika kami berhasil mengadakan musyawarah Dewan Kesenian se-Indonesia di Makassar. Untuk acara di ibu kota Sulawesi Selatan itu, kami mendatangkan Menteri Dalam Negeri Jenderal TNI Rudini, Menko Kesra Letjen TNI Suparjo Rustam, dan Mensesneg Murdiono. Sebelum musyawarah dibuka, saya melobi Pak Rudini agar Pak Menteri sudi kiranya mendorong para kepala daerah membangun pusat kesenian pada setiap ibu kota provinsi. Jenderal TNI Rudini yang juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu setuju. Saran saya lalu muncul dalam pidato Pak Menteri.

Instruksi Rudini disebarluaskan oleh media. Presiden Soeharto rupanya membaca berita tersebut. Maka ketika menghadap beliau, sebelum keputusan musyawarah kami sampaikan, Bapak Presiden sudah menyatakan persetujuannya dengan gagasan

Mendagri. Alhamdulillah, kita tidak perlu menghabiskan waktu meyakinkan Pak Harto lagi. Sayangnya, Mendagri yang menggantikan Rudini, Letjen TNI Yogi Memet, tidak pernah bersedia menerima pimpinan DKJ. Petunjuk Bapak Presiden agar DKJ membicarakan pelaksanaan gagasan pembangunan pusat kesenian tersebut lebih lanjut dengan Menteri Dalam Negeri, tak kunjung terlaksana. Akibatnya, cerita pembangunan pusat kesenian di daerah-daerah berakhir nasibnya hanya sampai pada tataran "petunjuk Bapak Presiden".

Ketika kami dilantik menjadi anggota DKJ di Gedung Balai Agung pemerintah DKI, gubernurnya masih Letjen TNI Wiyogo Atmodarminto. Pak Wiyogo yang lulusan Akademi Militer (AM) Yogyakarta, selain pernah menjadi Panglima Kostrad adalah juga mantan Duta Besar Indonesia di Tokyo. Pengalamannya di kota metropolitan Tokyo mempermudah kami berkomunikasi dengan Pak Gubernur.

Entah dari mana asalnya, suatu kali muncul gagasan mencari sumber pembiayaan kegiatan kesenian dan pengelolaan PKJ dari masyarakat. Sebelum itu, biaya pengelolaan DKJ dan PKJ seluruhnya bersumber pada dana yang disediakan oleh pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Gubernur Wiyogo mendukung gagasan tersebut dan dibentuklah sebuah yayasan. Kalau tidak salah, yang mengetuai yayasan adalah Drs. Umar Abdallah Siregar, seorang bankir terkemuka waktu itu.

Pada mulanya semua berjalan baik-baik saja. Tapi, ketika yayasan mulai ingin mencampuri program yang sejak awal menjadi *domain* DKJ, timbul konflik antara seniman dan pihak yayasan. Karena bertugas menyediakan duit, pihak yayasan merasa harus juga punya hak membuat program. Di mata para seniman, dengan mencampuri wewenang DKJ dalam hal program kesenian, yayasan telah melampaui wewenang dan fungsinya. Itulah sumber konflik. Pertentangan berlarut-larut dan kami para pimpinan DKJ terpojok dalam posisi sulit bergerak.

Saya tidak tahu bagaimana kemudian penyelesaian konflik karena saya meninggalkan DKJ secara mendadak ketika sejum-

lah seniman berhari-hari mendemo kami. Menurut para seniman dan calon seniman yang berdemo, DKJ harus direformasi setelah runtuhnya Orde Baru. Apanya yang harus direformasi? Tidak pernah jelas. Tampaknya masing-masing pendemo mempunyai agendanya sendiri-sendiri. Kabarnya ada yang merasa pantas menjadi anggota DKJ, tapi tidak kunjung dipilih; ada yang ingin mengadakan pertunjukan atau pameran, tapi dianggap masih di bawah standar dan entah alasan apa lagi lainnya. Tapi, saya sebenarnya meninggalkan DKJ tidak melulu karena kesal didemo tanpa agenda yang jelas. Saya meninggalkan DKJ karena mendadak punya kesibukan baru di luar kegiatan kesenian. Reformasi telah membuka kesempatan bagi saya bicara politik dan militer. “Salim kembali ke habitatnya,” komentar teman saya, penyair Sutardji Calzoum Bachri.

Warisan Ali Sadikin

Mungkin seniman-seniman sekarang banyak yang tidak lagi tahu bahwa PKJ dan DKJ adalah peninggalan Gubernur Ali Sadikin. Gubernur yang jenderal marinir ini ditunjuk oleh Bung Karno memimpin DKI Jakarta tidak berselang lama setelah Gestapu 1965. Pada mulanya kami para aktivis mahasiswa curiga, Ali Sadikin akan menggunakan posisi gubernur untuk ikut mempertahankan Sukarno yang mengangkatnya. Ternyata kami semua keliru. Ali Sadikin yang pernah menjabat Menteri Koordinator Urusan Maritim pada salah satu kabinet Sukarno, secara mengagumkan menghindarkan diri dari hiruk pikuk politik awal Orde Baru dan berkonsentrasi membangun Jakarta.

Dengan akal sehat, imajinasi, dan tekad yang keras serta keberanian yang luar biasa, dia sukses membangun Jakarta. Dalam waktu yang relatif singkat, Jakarta berubah. Sungguh bagaikan disulap oleh perwira tinggi marinir tersebut. Dengan cepat, Ali Sadikin menjadi tokoh yang amat populer yang dicintai oleh penduduk Jakarta dan jadi model bagi banyak gubernur dan wali kota di luar Jakarta. Salah seorang yang dengan sadar menjadikan

Ali Sadikin sebagai model adalah Wali Kota Makassar, Kolonel Infantri Muhammad Daeng Patompo. Ucapan terkenal Patompo di Makassar: "Ali Sadikin adalah Patomponya Jakarta". Saya tidak tahu apakah Patompo pernah juga mengatakan, "Patompo adalah Ali Sadikinnya Makassar." Buat saya yang terakhir ini jelas lebih pantas.

Adapun gagasan pembangunan pusat kegiatan kesenian di Jakarta yang sejak lama diimpikan para seniman ibu kota, masuk ke pusat perhatian Ali Sadikin lewat lobi tiga tokoh kesenian dan kebudayaan senior waktu itu. Mereka adalah penyair Ajip Rosidi; penyair, novelis, dan penulis biografi Ramadhan Kartahadimadja; dan budayawan yang juga diplomat, Ilen Surianegara. Tiga orang itulah yang berhasil meyakinkan Ali Sadikin mengenai perlunya membangun sebuah fasilitas kesenian di Jakarta.

Pembangunan dilaksanakan setelah terlebih dahulu menggusur dua gedung bioskop tua dan memindahkan Kebun Binatang Cikini ke Ragunan, Pasar Minggu. Kompleks Pusat Kesenian Jakarta yang terletak di Jalan Cikini Raya 73, diresmikan pada 10 November 1968. Selain pembangunan Pusat Kesenian Jakarta, langkah Ali Sadikin yang sangat diapresiasi para seniman adalah keputusannya menyerahkan pengelolaan PKJ dan DKJ kepada seniman dan larangannya kepada Dinas Kebudayaan DKI ikut campur. "Yang tahu kesenian itu seniman, bukan kalian para birokrat," begitu konon Pak Gubernur memberi petunjuk kepada para pegawainya. Maka, pengelolaan PKJ dan DKJ menjadi urusan seniman sendiri. Dalam mengelola dan menghidupkan pusat kesenian itu, Ali Sadikin sangat bermurah hati bahkan terkesan sangat memanjakan para seniman. Inilah yang menjelaskan semarak dan ramainya kegiatan kesenian di Pusat Kesenian Jakarta waktu itu.

Saya terlibat dalam pelaksanaan pembentukan Dewan Kesenian sebagai pelaksanaan keputusan Ali Sadikin membangun Pusat Kesenian Jakarta tersebut. Konsep DKJ dipersiapkan di kamar bujangan saya bersama dengan sejumlah seniman yang secara beramai-ramai menyumbangkan pikiran dan berpartisipasi

dalam diskusi perumusan konsep tersebut. Yang masih saya ingat hadir hari itu, selain Arifin C. Noer, adalah Goenawan Mohamad, Taufiq Ismail, Teguh Karya, Ed Zulverdi, Satyagraha Hoerip, L.K. Ara, dan beberapa lagi lainnya. Naskah yang kemudian disampaikan kepada Ali Sadikin ditik rapi oleh Arifin C. Noer dan mencapai tangan Gubernur lewat Christianto Wibisono yang waktu itu punya hubungan baik dengan pemerintah DKI. Yang menarik, konsep yang kami rumuskan bersama itu ditik dengan pita merah pada mesin tik *Underwood* portabel milik saya yang sudah kehabisan pita hitam.

Lama setelah pensiun sebagai gubernur, dalam sebuah percakapan saya dengan Letjen Marinir TNI (Purn.) Ali Sadikin saya bertanya mengapa dia begitu berbaik hati membiayai kegiatan Dewan Kesenian Jakarta. Jawabnya: "Sejak zaman kuno hingga kini tidak ada pusat kesenian yang membiayai dirinya sendiri. Kalau bukan pemerintah, dana masyarakat yang harus membiayainya. Bukan senimannya sendiri." Sehubungan dengan urusan pendanaan tersebut, teman-teman seniman Medan, Sumatra Utara, punya cerita menarik. Ketika saya ke Medan, mereka membawa saya ke gedung kesenian yang dibangun Gubernur. Di depan gedung yang bagus itu mereka mengeluh, tidak bisa memanfaatkan sarana tersebut. Tidak tersedia dana. Ketika mereka akhirnya beramai-ramai mendatangi Gubernur menyampaikan kesulitan para seniman. Pak Gubernur heran. Katanya, "Sudah kubangun gedung, sekarang kalian minta dana pula." Barangkali Pak Gubernur tidak punya penasihat kebudayaan yang sanggup membuat petinggi provinsi itu mengetahui beda pusat kesenian dan taman hiburan.

Barangkali pengalaman saya berikut ini boleh disebut sebuah bukti kemurahan Ali Sadikin kepada para seniman. Suatu kali pada 1977, sebagai salah seorang kepala proyek di DKJ, saya diundang menghadiri festival film eksperimental di Kota Oberhausen, Jerman Barat. Biaya dan fasilitas di lokasi festival ditanggung pengundang, tapi biaya penerbangan harus ditanggung oleh yang diundang. Ajip Rosidi, ketua DKJ masa itu, menyampaikan

persoalan saya kepada Pak Gubernur. Respons Ali Sadikin cepat. Lewat Ketua DKJ, Gubernur DKI memberi petunjuk agar saya menjumpai Wardiman Djojonegoro—pejabat DKI yang di kemudian hari pernah menjadi Menteri Pendidikan dalam salah satu kabinet Soeharto—guna mendapatkan dana yang saya perlukan. DKI memberi tiket *full fare* yang tentu saja jumlah uangnya banyak. Saran Wardiman, tukarkan ke tiket *special fare* dan sisa uangnya digunakan sebagai uang saku.

Masih soal dana, pada suatu hari sebuah rombongan pimpinan yayasan kebudayaan Amerika datang meninjau DKJ dan PKJ. Tentu saja terjadi kesibukan di kompleks pusat kesenian itu. Ketika tahu rombongan datang menjajaki kemungkinan memberi bantuan kepada pusat kesenian tersebut, entah bergurau atau serius, Gubernur Sadikin berkomentar: "Sulit amat cari duit, pakai bahasa Inggris segala. Kepada saya *mah* tidak susah, tidak perlu pakai bahasa Inggris. Dan saya bisa kasih lebih banyak." Ali Sadikin memang memberi banyak bantuan sehingga para seniman bebas mencipta dan berpeluang mempersembahkan ciptaan-ciptaan mereka di PKJ. Masa Ali Sadikin sebagai Gubernur memang merupakan saat ketika PKJ tidak pernah sepi dari kegiatan. Seniman dari hampir seluruh Indonesia datang mempertunjukkan karya mereka di pusat kesenian yang sebagian ruangannya dulu merupakan kebun binatang.

Tanpa direncanakan, PKJ lantas dianggap sebagai standar ukuran bermutu atau tidaknya suatu karya seni. Bagi para seniman daerah, tampil di PKJ sudah langsung berarti karya mereka bermutu karena sudah lolos saringan Dewan Kesenian Jakarta. Ini mengingatkan saya kepada suatu masa ketika karya sastra para pengarang harus terlebih dahulu dimuat pada majalah sastra pimpinan H.B. Jassin sebelum sang pengarang mendapatkan semacam "pengakuan" sebagai penyair atau penulis prosa tingkat nasional.

Karena hal demikian inilah, maka Wisma Seni—semacam losmen sederhana bagi seniman luar Jakarta yang mengisi acara di PKJ—selalu penuh dengan seniman-seniman daerah yang sedang

mengadakan pertunjukan di PKJ. Ketika pembangunan kembali PKJ memerlukan lebih banyak ruangan, Wisma Seni tergusur. Tapi, waktu itu seniman daerah memang tidak lagi membanjiri Jakarta seperti pada awal sejarah PKJ. Dana yang ada memang tidak lagi tersedia seperti pada zaman Ali Sadikin, sementara fasilitas daerah juga nyaris tidak memadai, kalaupun ada. Artinya, kegiatan kesenian di Indonesia berangsur menjadi barang langka.[]

Pokoknya Lewat Kemayoran

Sekarang ini ramai orang mengejar gelar doktor. Berbagai perguruan tinggi beramai-ramai menawarkan program tersebut. Iklan perusahaan yang bergiat dalam membantu penyiapan disertasi juga bermunculan di berbagai media cetak. Ini suatu peningkatan dari tahun tujuh puluhan dulu. Pada masa itu yang dikejar-kejar barulah gelar doktorandus (Drs.). Beberapa universitas swasta menawarkan kuliah di kantor-kantor atau bahkan di markas tentara. Letnan Jenderal TNI (Marinir) Ali Sadikin suatu hari mengeluh, "Teman-teman saya sudah pada jenderal, tapi belum puas juga kalau belum punya gelar Drs."

Obsesi terhadap gelar yang dicantumkan di depan atau di belakang nama, tampaknya sesuatu yang hampir merata di Indonesia dulu maupun kini. Ini mungkin karena status seseorang dalam masyarakat memang banyak ditentukan oleh gelar atau rangkaian gelar yang dimilikinya. Dalam masyarakat feodal, gelar bangsawan menempatkan seseorang pada lapisan atas. Kemudian, gelar Haji—apalagi Kiai Haji (K.H.)—dalam masyarakat Islam tradisional menjadi alasan menempatkan sang pemilik gelar pada posisi tinggi dan terhormat. Dengan berkembangnya pendidikan, maka gelar akademik menambah alasan dalam menempatkan seseorang pada posisi yang lebih terhormat dalam tatanan masyarakat.

Kecuali gelar kebangsawanan, gelar-gelar lainnya sering dicapai dengan cara yang tidak wajar. Waktu saya kecil di kampung, ada istilah Haji Singapura. Ini gelar yang diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak sampai di Makkah, melainkan hanya di Singapura. Di kota itu mereka membeli pakaian haji, kemudian pulang ke kampung dan memperkenalkan diri sebagai haji betul-

an. Pada zaman ketika perguruan tinggi bisa ditemukan di mana-mana, setiap orang bisa dengan mudah memperoleh gelar akademik. Soal mutu, itu urusan lain.

Keadaan menjadi makin rumit ketika pendidikan menjadi komoditas perdagangan. Maka, untuk mendapat gelar apa saja, banyak bergantung pada uang. Pada masa itulah tampaknya kita berada sekarang. Tanpa kuliah, tanpa sibuk di perpustakaan, tiba-tiba sudah punya gelar doktor. Boleh dari dalam negeri, juga bisa dari luar negeri. Lebih gawat lagi, tanpa mengajar, tanpa menulis karya ilmiah, tiba-tiba sudah mencantumkan gelar profesor di depan namanya pada undangan perkawinan ketika mantu.

Dalam rangka obsesi pada gelar itulah pada tahun lima puluhan, wartawan senior Haji Rosihan Anwar, pernah memperkenalkan sebuah gelar baru, HBA. Gelar ini tidak didapatkan sebagai warisan keluarga, lewat perguruan tinggi, atau dengan melakukan ibadah haji, tetapi hanya dengan cara bepergian ke luar negeri. HBA itu singkatan dari *Has Been Abroad*. Artinya, sudah pernah ke luar negeri. Kesempatan bepergian ke luar negeri pada masa itu memang jauh lebih langka dan lebih sulit dibanding dengan kesempatan mendapatkan gelar doktor sekarang.

Menariknya, orang yang pulang haji, meski sudah pernah ke luar negeri, tidak lazim diberi gelar HBA. Selain karena secara otomatis sudah mendapat gelar haji atau hajjah, mungkin karena yang dianggap luar negeri waktu itu adalah terutama Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Pokoknya negara-negara maju. Atau, mungkin karena gelar haji sudah mengandung makna HBA juga, terutama di kalangan umat Islam. Bahkan di kalangan umat Islam, terutama di pedalaman atau masyarakat tradisional, gelar haji berada di atas segala macam gelar. Saya tiba-tiba teringat pada film *Si Doel Anak Modern* yang dibintangi oleh Benyamin S. sebagai Doel. Dalam film itu ada adegan teman-teman bisnis Doel merancang membuat kartu nama. Mereka pada memasang gelar Drs. di depan nama mereka. Doel ditanyai, apakah juga ingin gelar Drs.? “Kagak. Gue pakai haji aje,” jawab anak Betawi asli itu.

Kecuali untuk naik haji, waktu itu memang belum cukup banyak orang Indonesia yang sanggup membayar biaya perjalanan ke luar negeri seperti sekarang ini. Orang Indonesia yang sekolah di luar negeri juga belum begitu banyak dan mereka yang beruntung itu adalah pelajar-pelajar yang dikirim pemerintah, mendapat beasiswa dari sekolah atau pemerintah tempatnya bersekolah dan lembaga-lembaga yang membantu calon-calon pemimpin dari negara-negara yang baru merdeka. Yang sekolah dengan biaya keluarga masih bisa dihitung dengan jari. Sejumlah seniman juga sering ke luar negeri karena Presiden Sukarno waktu itu sangat aktif mempromosikan Indonesia di berbagai penjuru dunia.

Ini adalah zaman ketika kunjungan ke luar negeri menjadi harapan, bahkan rebutan pejabat negara. Para pedagang sedikit sekali yang berkunjung ke luar negeri. Yang terakhir ini adalah akibat saja dari masih kecilnya *magnitude* perekonomian kita. Bagi yang bukan pegawai pemerintah, dan tidak mendapat kesempatan mendapatkan beasiswa belajar ke negeri jauh sana, kesempatan ke luar negeri hampir tidak ada.

Untuk para wartawan, kesempatan ke luar negeri hanya ada jika mengikuti kunjungan Presiden Sukarno yang waktu itu memang sering tetirah ke berbagai penjuru dunia. Kebiasaan tetirah ini dinikmati kembali oleh Gus Dur dalam masa kepresidenannya yang singkat. Tapi, bisa juga karena diundang oleh kedutaan asing yang butuh promosi di Indonesia. Ini adalah juga zaman ketika para wartawan cukup rajin menghadiri pesta-pesta di kedutaan dan koran mereka biasanya bermurah hati memuat keterangan dan bahan-bahan yang dikirimkan oleh kantor penerangan berbagai kedutaan. Harapannya sederhana, siapa tahu diundang ke negara asing tersebut. Artinya, ke luar negeri.

Karena sulit dan langkanya kesempatan ke luar negeri, mereka yang pernah ke luar negeri dipandang sebagai orang istimewa. Mereka lalu dapat gelar yang dipopulerkan Rosihan Anwar sebagai HBA tersebut. Berbeda dengan gelar doktor yang sekarang kurang dihargai masyarakat (habis, begitu mudah memperolehnya dan begitu banyak yang pakai gelar doktor), mereka

yang pernah ke luar negeri pada masa lalu itu tergolong orang terpilih dan umumnya dihormati. Paling sedikit dalam lingkungan pergaulannya.

Penghasilan Juga Lebih Besar

Nah, keadaan seperti ini kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Presiden Soeharto pada awal kekuasaannya. Para jenderal yang tidak bisa dimanfaatkannya, atau dipandang berpotensi membahayakan kekuasaannya, dengan mudah dialihtugaskan menjadi duta besar (dubes) dan diparkir di luar negeri. "Didubeskan", menurut istilah populernya waktu itu. Sebagian besar yang didubeskan itu menikmati penugasan mereka, sebab selain berkesempatan ke luar negeri, penghasilan mereka juga jauh lebih besar dari yang mungkin diperoleh di Indonesia. Harap diingat, ini terjadi pada awal Orde Baru, ketika perekonomian Indonesia masih belum beranjak jauh dari kebangkrutan ekonomi zaman Sukarno. Kelak ketika para jenderal sudah gampang dapat duit di dalam negeri dan ke luar negeri bukan lagi soal sulit, banyak juga di antara mereka yang menolak menjadi duta besar. Mereka kebanyakan memilih kegiatan wiraswasta. Jenderal TNI Sumitro, mantan Pangkopkamtib, salah seorang yang menolak didubeskan, memilih jadi pedagang saja.

Pokoknya ke luar negeri waktu itu mewah, menaikkan gengsi, dan tentu saja membuat keluarga di Tanah Air ikut bangga. Tidak terlalu penting luar negeri yang mana, pokoknya pergi melewati lapangan terbang internasional Kemayoran—bandara tunggal untuk ke luar negeri masa itu—dengan diantar keluarga dan teman-teman. Pada umumnya orang Indonesia waktu itu memandang kunjungan ke luar negeri sebagai sesuatu yang pasti amat menyenangkan. Tapi sekian puluh tahun kemudian, ketika bertugas sebagai duta besar di Praha, Republik Ceko, saya berkesempatan mendengar cerita-cerita menyedihkan mengenai nasib para mahasiswa kita yang dikirim ke luar negeri waktu itu. Cerita

mereka membantah bayangan orang bahwa negeri jauh itu selalu menyenangkan.

Dokter Setyarto Mangunkusumo, misalnya. Dia yang tiba di Praha untuk belajar kedokteran pada 1960, mendapatkan kota tempatnya akan belajar itu amat berlainan dengan gambaran luar negeri yang dibayangkannya ketika masih di Indonesia. "Kami tiba malam. Lapangan terbang sepi, kota gelap, dan kami bingung akan ke mana. Tidak ada yang jemput," katanya mengenang pengalaman pertamanya dengan luar negeri.

Banyak cerita lainnya yang tidak kurang menyedihkan. "Kami hanya bisa mencicipi pisang menjelang tahun baru. Untuk tujuan itu, pisang diimpor khusus dari Amerika Latin oleh Pemerintah Cekoslowakia." Setyarto dan teman-temannya suatu kali tidak bisa minum kopi. Tidak ada kopi di pasar. "Kami terpaksa menggongseng terigu sampai hangus. Itulah yang kami siram air mendidih untuk kami minum sebagai pengganti kopi." Menurut cerita para mahasiswa yang belajar di negara-negara Komunis Eropa tersebut, mereka hanya bisa menikmati hidup yang lebih enak pada musim panas. Caranya, menyeberang ke negara-negara kapitalis di Eropa Barat. Bekerja sementara selama libur dan dengan itu menikmati makanan enak dan membeli pakaian-pakaian "borjuis".

Pengalaman Setyarto, lebih kurang, adalah juga pengalaman Ami Priyono, anak tunggal Prof. Dr. Priyono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Karena ayahnya seorang Menteri Pendidikan dan pemegang Bintang Stalin, Ami tentu dengan mudah mendapat kesempatan belajar sinematografi di Moskow pada awal tahun enam puluhan. Ami pernah cerita kepada saya pengalamannya ke Eropa Barat bekerja di musim panas. Pulangnya dia membawa sejumlah celana *blue jeans* yang harganya amat mahal di pasar gelap Moskow.

Bumbu-bumbu masakan Indonesia juga merupakan barang dagangan yang dibawa pulang ke Moskow oleh para mahasiswa yang libur dan bekerja di Eropa Barat, terutama Belanda. Mereka yang tidak sempat libur ke Belanda, tapi memerlukan bumbu un-

tuk sesekali menikmati makanan Indonesia, harus membelinya dari teman-teman mereka yang pulang dari Belanda dengan membawa dagangan bumbu dapur. Lewat kegiatan "penyelundupan" demikian, mahasiswa Indonesia di Uni Soviet dan negara-negara Komunis lainnya mendapat tambahan uang saku untuk memperbaiki gizi dan mengobati rasa rindu Tanah Air.

Mafia Berkeley

Cerita lain yang indah tentang luar negeri tentu tidak kurang juga. Tapi, kisah jenis ini hanya terdengar dari mereka yang bersekolah di negara-negara kapitalis, utamanya Amerika Serikat. Masa itu Amerika memang sedang sibuk memikat hati para calon pemimpin di negara-negara baru merdeka agar mereka tidak jatuh ke tangan Komunis. Ini adalah zaman Perang Dingin dan Amerika masih sangat makmur. Beasiswa mereka amat besar, sehingga mahasiswa hidup senang di rantau dan pulang dengan membawa mobil. Setelah Gestapu, orang-orang didikan Amerika ini sebagian cukup besar menjadi orang-orang penting Indonesia. Yang terpenting di antara mereka adalah kelompok yang kemudian dikenal sebagai "Mafia Berkeley".

Adapun mahasiswa yang dididik di negara-negara Komunis, nasib buruk menimpa mereka dua kali. *Pertama*, tidak menikmati kemewahan luar negeri sebagai yang dinikmati teman-teman mereka yang sekolah di Barat; *kedua*, sebagian besar mereka tercegah pulang ke kampung halaman setelah Gestapu. Yang berhasil pulang pun tidak selalu bisa hidup tenang, sebab alat keamanan Orde Baru selalu mengintai mereka sebagai sasaran kecurigaan. Lebih buruk lagi nasibnya adalah mahasiswa Indonesia di Uni Soviet setelah Gestapu. Sebagai dampak perubahan politik yang amat drastis di Indonesia pada Oktober 1965—selain kemudian menyebabkan banyak yang paspornya dicabut—sikap Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) kepada para mahasiswa Indonesia di negeri itu juga berubah. Ini merupakan akibat perpecahan dalam kubu Komunis antara PKUS dan Partai Komunis

Tiongkok (PKT). PKI tak terhindar dari memikul beban perpecahan tersebut. Dekat ke garis Tiongkok—sejalan dengan kebijakan Sukarno yang memperkenalkan poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang—PKI juga ikut mendapat cap revisionis modern (remo) oleh Moskow. Dalam kunjungan terakhir Aidit ke Moskow, beberapa pekan sebelum Gestapu, Aidit memang terlibat debat keras dengan Suslov, kepala bagian ideologi Politbiro PKUS.

Tentang penderitaan mahasiswa Indonesia di Uni Soviet sebagai akibat perpecahan di kubu Komunis tersebut, Asahan Alham, seorang mahasiswa Indonesia di Moskow waktu itu, dalam salah satu bukunya menulis:

> Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang beberapa tahun sebelumnya sangat dimanjakan, diberi prioritas dalam banyak bentuk, dipuji-puji sebagai para mahasiswanya Sukarno yang jempolan, dari suatu negeri yang indah permai pula dengan rayuan pulau kelapanya yang hampir di setiap pertemuan pesta dinyanyikan, tiba-tiba semuanya direduksi karena PKI ikut Cina, kata mereka.
>
> Hubungan yang melalui organisasi mahasiswa maupun hubungan perseorangan menjadi peka, tidak sebebas dan semesra dulu lagi. Di puncak perbedaan, setelah pembantaian PKI di Indonesia, bahkan ada mahasiswa Indonesia yang diusir.

BERLAINAN DENGAN PANDANGAN yang banyak dipercaya di Indonesia, mereka yang terhalang pulang itu ternyata tidak semuanya Komunis. Sebagian mereka pada dasarnya hanya Sukarnois. Sebagian lainnya tergolong mereka yang sebenarnya tidak tahu politik dan bersekolah di negara-negara Komunis karena dikirim pemerintah yang waktu itu mempersulit pengiriman mahasiswa ke negara-negara Barat. Sebagian lagi tidak pulang karena studinya gagal. Para mahasiswa itu umumnya tidak pernah membayangkan bahwa Sukarno akan tersingkir dan Orde Baru berumur panjang. Usia mereka masih muda-muda, jauh dari kampung ha-

laman pada zaman komunikasi sangat buruk, mereka jelas tidak mungkin mengikuti dinamika dan ketegangan politik yang akhirnya meledak menjadi Gestapu.

Mereka pada umumnya tidak siap mental menerima kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mencabut paspor siapa saja yang menolak mendukung pemerintahan rezim pimpinan Soeharto. Akibatnya mereka memerlukan puluhan tahun sebelum bisa menengok kampung halaman dan keluarga. Itu pun sudah dengan menggunakan paspor negara tempat mereka hidup sebagai eksil setelah tidak lagi memiliki dokumen resmi sebagai warga negara Indonesia.

Selama tiga setengah tahun saya duduk di Praha sebagai duta besar, hanya seorang dari sekitar 30 mantan Mahid (Mahasiswa Ikatan Dinas) yang mengaku anggota PKI kepada saya. Dia dikirim partai untuk belajar sosiologi di Moskow. Yang lainnya tergolong Sukarnois atau tidak berpolitik. Ketika kenyataan ini saya ceritakan kepada seorang wartawan radio Jerman yang berkunjung ke Praha, dia lalu menjelaskan, "Di Praha memang Anda sudah sulit menemukan mereka yang Komunis, mereka sudah pindah ke Jerman, Belanda, atau Prancis." Mereka yang di Prancis bahkan secara bersama mendirikan sebuah restoran Indonesia yang cukup terkenal di Paris.

Saya lupa penjelasannya mengapa mantan mahasiswa yang mengaku Komunis tersebut akhirnya terdampar di Praha dan tidak ke Barat seperti kebanyakan teman Komunisnya yang lain. Yang menarik dari percakapan kami, kader PKI ini mengaku datang dari keluarga Islam yang taat dan menjadi Komunis karena kecewa kepada Islam lantaran mengalami teror Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Dia memang berasal dari Jawa Barat. Di Indonesia, saya beberapa kali bertemu dengan beberapa teman asal Jawa Barat yang menjadi Komunis atau sekuler ekstrem, bahkan anti-Islam, dengan alasan yang sama, diri atau keluarganya pernah menjadi korban teror DI/TII.

Berilah Kami Visa Seumur Hidup

Dengan paspor Ceko, Belanda, Jerman, atau Prancis, mereka yang dulu kewarganegaraannya dicabut oleh KBRI pada masa awal Orde Baru, kini sudah pada bolak-balik ke Indonesia. Prosedur mendapatkan visa untuk mereka yang di Ceko, kami permudah. Pada masa saya di Praha, pemerintah bahkan mengeluarkan tawaran mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia kepada mereka.

Namun, KBRI Praha hanya berhasil mengeluarkan satu paspor baru. Yang lainnya menolak dengan alasan sangat masuk akal. "Kami sudah tua, keluarga kami, anak, cucu, menantu, semua di sini. Di Indonesia, famili yang kami kenal sudah pada tua. Itu pun kalau masih hidup. Di sini kami punya keluarga, rumah, dan pensiun," kata seorang dari mereka. Ketika dulu paspor mereka dicabut, usia termuda di antara mereka adalah 24 tahun. Artinya, umur termuda di antara mereka sekarang berkisar di sekitar 70 tahun. Pada usia demikian semua mereka sudah pensiunan dan kemungkinan besar akan sulit menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampung halaman mereka dulu.

Salah satu syarat mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia, paspor Ceko mereka harus mereka kembalikan. Itu yang berat. Dengan memegang paspor Indonesia, mereka akan berstatus orang asing di Ceko. "Begini saja Pak Dubes, kalau Kedutaan Besar mau menolong kami, berilah kami visa seumur hidup agar setiap saat kami bisa berkunjung ke Tanah Air," usul seorang yang mengatasnamakan teman-temannya. Sayangnya lembaga visa seumur hidup itu belum ada.

Istri mereka semua orang Ceko, mantan teman sekolah atau mantan teman sekantor setelah mereka tamat dan mulai dipekerjakan oleh pemerintah Ceko. Selain istri, menantu-menantu mereka juga orang Ceko. Hanya satu di antara mereka yang mendatangkan calon istri bagi anak lelakinya. Nah, karena di rumah mereka nyaris tidak pernah tersedia makanan Indonesia—istri mereka tidak ada yang bisa memasak makanan Indonesia—maka

terbuka peluang bagi Kedutaan Besar untuk melancarkan *cuisine diplomacy.*

Kepada kepala rumah tangga Wisma Duta, saya arahkan untuk selalu menyiapkan makanan Indonesia yang cukup setiap ada acara di Wisma. Alhamdulillah, acara tak habis-habis. Terutama karena banyaknya kunjungan pejabat dan kegiatan studi banding dari para anggota DPR. Pada hampir semua acara menjamu tamu, para mantan mahasiswa ikatan dinas itu selalu kami undang bertemu dan berdiskusi dengan tamu-tamu dari Jakarta tersebut. Setiap diskusi selalu diawali dengan santap bersama. Pada suatu kesempatan santap bersama dengan hidangan gudeg, seorang di antara mantan Mahid itu menghampiri saya mengucapkan terima kasih diundang hadir. Lebih menarik dan lebih penting dari sekadar berterima kasih itu, dia juga dengan cara yang mengharukan menyampaikan bahwa hidangan gudeg di Wisma Duta itu adalah gudeg pertama yang dinikmatinya sejak meninggalkan Tanah Air lebih 40 tahun silam. Dia mengucapkan *matur nuwun* (terima kasih) kepada semua petugas Wisma Duta untuk kesempatan mencicipi gudeg tersebut.

Menurut ceritanya, priayi asal Solo itu sebenarnya pernah punya kesempatan mencicipi berbagai makanan Jawa—kecuali gudeg, katanya—ketika sekian tahun silam, lama sebelum Reformasi, dia berkesempatan pulang ke Jawa Tengah, kampung halamannya. Meski datang dengan menggunakan paspor Ceko, dia tetap saja tidak bisa tinggal lama. Saudara-saudaranya menolak menemuinya dan mendesaknya segera pulang ke Ceko. “Mereka takut dianggap tidak bersih lingkungan,” katanya. Salah seorang adik kandungnya merupakan jenderal polisi. Dengan sedih, dia bercerita bagaimana adiknya menghindar menemui abangnya dari Praha itu. Priayi ini sudah beranak cucu di Praha dan karena itu tidak lagi tertarik mendapatkan kembali paspor Indonesia yang dulu dirampas darinya.

Fenomena baru dan menarik di Praha akhir-akhir ini adalah kebalikan dari pengalaman orang-orang Mahid itu. Kalau dulu hampir semua mereka “dipaksa” oleh keadaan untuk beristrikan

perempuan Ceko, generasi baru pemuda Ceko justru dengan bebas memperistrikan gadis-gadis Indonesia yang mereka kenal selama belajar di Indonesia. Ini adalah akibat dari adanya beasiswa tahunan *Dharmasiswa* yang diberikan kepada sejumlah mahasiswa Ceko untuk belajar apa saja yang menarik perhatian mereka di Indonesia. Beasiswa semacam ini juga diberikan kepada mahasiswa di berbagai negara. Mereka berada di Indonesia selama setahun. Selain banyak yang pulang dengan membawa istri, banyak juga yang membawa pengetahuan tentang budaya dan kesenian Indonesia.

Fenomena membawa istri atau calon istri itu saya sebut sebagai fenomena *the empire strikes back*. Dulu hanya diperistri, kini pemuda Ceko memperistri perempuan Indonesia. Selama saya bertugas di Praha, pada Hari Lebaran atau peringatan Hari Kemerdekaan, anak-anak Indo-Ceko—hasil *the empire strikes back* itu—selalu berkumpul di Wisma Duta bersama orangtua mereka. Jumlahnya makin banyak. Gurauan saya sembari berfoto bersama, "Hari depan perfilman Indonesia tidak akan kekurangan pemain-pemain berwajah cantik kalau anak-anak ini nanti mau pulang ke Indonesia menjadi aktor dan aktris."

Yang tidak kurang menguntungkan bagi promosi budaya Indonesia sebagai hasil dari beasiswa Dharmasiswa itu adalah aktivitas seni dan budaya para mantan penerima beasiswa tersebut. Banyak di antara mereka yang rajin memamerkan kebolehan menari Bali, Minang, Jawa, serta berbagai seni bela diri yang mereka pelajari selama berada di berbagai penjuru Indonesia. Salah seorang di antara mereka bahkan mendirikan sanggar tari Bali di Kota Praha. Sebagian tugas promosi seni dan budaya KBRI, telah mereka ambil alih.

SAYA SENDIRI JUGA TENTU SAJA ingin sekolah ke luar negeri pada masa Orde Lama. Tapi, saya tidak punya koneksi. Yang berkesempatan berangkat adalah mereka yang dikirim pemerintah resminya melalui seleksi, tapi lebih banyak lagi dengan menggunakan koneksi. Mereka yang kader Komunis, tentu dikirim oleh

PKI. Di Praha, saya masih jumpa mantan mahasiswa yang dulu berangkat berkat koneksinya dengan Chairul Saleh, menteri terkemuka zaman Sukarno, Mulyadi Djojomartono, Menteri Sosial zaman Orde Lama atau tokoh-tokoh partai-partai Nasakom yang dekat dengan Sukarno. Juga saya kenal seorang yang dikirim oleh PKI. Saya hanyalah anak rakyat, yang tidak punya koneksi dengan siapa pun yang berkuasa pada masa itu.

Sebagai "pengungsi" dari Sulawesi Selatan yang keamanannya masih terganggu waktu itu, saya melanjutkan sekolah ke SMA di Solo, Jawa Tengah, dan tamat pada 1963. Mereka yang tamat dua tahun di atas saya masih punya kesempatan ikut program AFS (American Field Service), sebuah program pertukaran pelajar yang dibiayai Amerika. Karena Prof. Priyono, Menteri Pendidikan waktu itu, menghentikan kegiatan AFS, saya terpaksa harus menunggu hampir 20 tahun sebelum pada akhirnya berkesempatan menjadi mahasiswa di Amerika Serikat. Amerika memang bukanlah luar negeri pertama yang saya kunjungi. Sebagai Kepala Desk Luar Negeri majalah *Tempo* selama sembilan tahun, saya sudah bepergian ke berbagai penjuru dunia sebelum akhirnya menjadi mahasiswa pascasarjana di Amerika. Kunjungan ke luar negeri pertama saya adalah ke Belanda pada November 1969. Saya ke Belanda untuk belajar jurnalistik selama hampir setahun. Seperti telah saya ceritakan tadi, bepergian ke luar negeri waktu itu masih tergolong mewah. Jadi, bisa dimengerti kalau saya sangat *excited* ketika tahu mendapat kesempatan mengikuti pendidikan kewartawanan di Amsterdam.[]

"Naar Holland, Meneer."

Rencana awal sebenarnya bukan ke Belanda, melainkan ke Jepang. Persisnya, Okinawa. Waktu itu saya telah menerima tawaran mengikuti pendidikan intelijen pada pusat pendidikan intelijen militer Amerika Serikat untuk Pasifik di Okinawa. Lulus dari pendidikan itu, saya akan diangkat menjadi perwira intelijen. Sebagai akibat dari kekacauan intelijen yang menyebabkan tersusupinya lembaga dinas rahasia itu oleh orang-orang Komunis (PKI) menjelang Gestapu, berkembanglah gagasan membentuk korps intelijen yang perwiranya khusus dididik secara profesional dan dihimpun dalam satu korps tersendiri.

Untuk mempersiapkan diri, saya mulai membaca mengenai intelijen. Kebetulan di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, ada toko buku yang banyak menjual buku-buku tentang soal-soal militer, pertahanan, dan intelijen. Saya membeli banyak buku dari toko yang kabarnya milik seorang pensiunan tentara yang pernah bertugas sebagai pembantu Jenderal Urip Sumoharjo di Yogyakarta pada zaman Revolusi Kemerdekaan dulu.

Nasib membentangkan jalan lain bagi hari depan saya. Sekolah intel di Okinawa itu, entah dengan alasan apa, ditutup. Nah, sebagai gantinya, muncul kesempatan memperdalam jurnalisme di Amsterdam. Saya terpilih. Saya pun mempersiapkan diri untuk berangkat. Karena akan meninggalkan sekolah untuk waktu setahun, saya menemui Prof. Dr. Selo Sumardjan, Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (IPK), tempat saya terdaftar sebagai mahasiswa waktu itu. Saya mendapat izin dengan risiko akan ketinggalan dari teman-teman sekelas lainnya. Ketinggalan setahun itu merupakan ketinggalan untuk kedua kalinya sejak saya menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Ketinggalan per-

tama mengakibatkan saya kehilangan waktu lima tahun, yaitu masa studi di Fakultas Psikologi. Pada 1968, saya "terpaksa" pindah ke IPK setelah menjadi mahasiswa psikologi sejak 1963.

SEMUA PERSIAPAN bepergian ke *Holland* berjalan lancar. Di pondok bujangan saya, teman lama sesama demonstran 1966, Ahmad Sujudi—kelak menjadi Menteri Kesehatan—menemani saya malam menjelang keberangkatan. Gelisah bercampur *excited* menanti subuh, tidak bisa tidur. Saya sudah lupa apakah malam itu Sujudi bisa tidur. Menjelang subuh dengan berkendaraan becak, kami berangkat ke Kemayoran dari pondokan bujangan saya di Matraman Raya 51. Waktu itu, belum ada taksi dengan argo meter yang berkeliaran mencari penumpang atau bisa dipesan lewat telepon. Selain taksi resmi di Hotel Indonesia, yang tersedia hanya taksi gelap yang mangkal di ujung Jalan Teuku Umar, Menteng. "*Naar Holland, Meneer*," begitu suara yang terdengar dalam telinga batin saya di atas becak dalam perjalanan ke Kemayoran.

Saya gugup berkepanjangan. Sebelum hari itu saya belum pernah bepergian menggunakan paspor, belum pernah naik pesawat jet, juga belum pernah bepergian berpakaian lengkap (setelan jas, dasi, dan kopiah). Sebagai wartawan, saya sudah sering terbang, bahkan pernah dengan helikopter. Tapi, berpakaian lengkap dalam sebuah perjalanan, baru hari itulah saya alami. Berpakaian lengkap dengan kopiah adalah semacam aturan tak tertulis pada masa itu bagi mereka yang dikirim ke luar negeri. Maksudnya, agar kita dikenal sebagai bangsa Indonesia.

Sujudi dengan sabar dan tenang membantu pengurusan prosedur keberangkatan di konter KLM sampai ke pintu imigrasi. Saya baru merasa agak tenang setelah pesawat DC 8 milik perusahaan penerbangan Belanda itu tinggal landas menjelang matahari terbit pada suatu pagi bulan November 1969. Rombongan kami terdiri dari sembilan wartawan yang berasal dari berbagai kota. Kami semua belum pernah ke luar negeri. Saya tidak tahu apakah ada di antara mereka pagi itu yang lebih *excited* daripada

saya. Kami terbang dengan singgah sebentar (*stop over*) di Singapura, Bangkok, dan Beirut, sebelum pada akhirnya mendarat di Amsterdam menjelang malam.

Sebagai anggota rombongan wartawan Indonesia di Negeri Belanda, 1970.

Penerbangan siang hari ke *Holland* yang bertolak pagi sebagaimana yang saya alami tersebut, rasanya sekarang tidak ada lagi. Perjalanan ke Belanda dan Eropa pada umumnya sekarang lepas landas pada sore atau malam hari dan *stop over* biasanya hanya di satu tempat, sehingga sepanjang perjalanan penumpang bisa tidur. Dan bangun pagi menjelang pendaratan di *Airport* Schiphol, Amsterdam, Charles De Gaulle, Paris, Frankfurt di Jerman, atau Heathrow, London.

Selain pejabat KBRI, penyambut kami yang justru paling saya ingat adalah udara akhir musim gugur. Yang sensasional dan melekat secara permanen dalam ingatan saya adalah angin dingin yang menampar muka saya begitu kami keluar dari terminal. Dinginnya aneh, menusuk. Dingin yang tak pernah terbayangkan ini membuat saya mencubit paha. Bermimpi? Atau, saya memang sudah berada di luar negeri? Ternyata cubitan menimbulkan rasa sakit. Betul-betul saya sudah di luar negeri. Saya lalu teringat Rosihan. Artinya, saya sudah berhak mendapat gelar HBA.

"Itu Ucapan Selamat Datang. Jangan Marah."

Kami berjalan berombongan dengan identitas yang tidak begitu asing bagi orang Belanda, kopiah hitam bertengger di atas kepala. Di kemudian hari bisa saja rombongan yang berpenampilan sama berasal dari Malaysia atau Brunei, terutama ketika orang-orang Indonesia hanya mengenakan kopiah hitam untuk upacara

resmi. "Dari Indonesia?" tanya seorang bule, mungkin untuk meyakinkan diri. "Betul," jawab salah seorang dari kami. "Selamat datang di Negeri Belanda. *Veel plesier in Holland, Meneer*," katanya lagi. Pelesiran? Apa dikiranya kami kemari mencari perempuan? Saya ngomong sendiri dengan mendongkol.

Pak Mang (Abdurrahman) dari Yogyakarta, yang tertua di antara kami dan rupanya masih sempat mengalami pendidikan Belanda, turun tangan. Mendengar saya menggerundel, senior kami itu berkomentar, "Lho, Pak Salim, itu ucapan selamat datang. Jangan marah." Ternyata ada salah pengertian dari pihak saya. Kata *pelesiran* di Solo berarti mencari perempuan. Saya teringat zaman sebagai aktivis mahasiswa ketika saya, Ahmad Sujudi, dan beberapa teman lainnya dari Biro Penerangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (Birpen KAMI) melakukan perjalanan malam dari Malang ke Yogyakarta dan singgah di Solo.

Waktu itu kami sedang mengatur penyelenggaraan pameran foto keliling KAMI di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masuk Kota Solo—dalam perjalanan panjang dari Malang, Jawa Timur—malam sudah menjelang berakhir. Belum lagi kami *check in* pada sebuah losmen di Jalan Slamet Riyadi, seorang tukang becak sudah mendekati kami. "Pelesir, Mas? Mari saya antar." Kelelahan dari perjalanan panjang, salah seorang di antara kami langsung saja naik pitam. "*Pelesiran mbahmu*. Orang capek begini perlu tidur, bukan niduri."

Salim Said bersama Abdurahman (Pak Mang) di Amsterdam, 1970.

SENSASI KEDUA terjadi ketika pagi hari esoknya saya melihat ke luar jendela dari kamar saya di lantai lima Gedung International Center, yang terletak di samping Tropen Museum. Saya melihat pohon-pohon meranggas hitam berlumut tanpa selembar daun pun. Akibat kebakaran, pikir saya. Di ruang makan di lantai bawah, selepas sarapan, kepada petugas dapur, orang asal Indonesia yang sudah lama bermukim di Belanda, soal pohon hitam berlumut tanpa selembar daun itu saya tanyakan. "Oh, itu karena musim gugur," begitu dia menjelaskan dengan senyum. Beberapa jam kemudian ketika kami digiring makan siang ke restoran Indonesia milik Meneer Wong, seorang Tionghoa asal Jawa Tengah, saya lihat jalan ditutupi daun-daun guguran dari banyak pohon di sekitar tempat kami diasramakan.

KEGIATAN PERTAMA KAMI adalah belajar bahasa Belanda. Kuliah dan praktik memerlukan pengetahuan bahasa Belanda, kata tuan rumah kami. Saya tidak tahu mengapa waktu kami harus dihabiskan selama beberapa pekan pada laboratorium bahasa di lantai dasar Tropen Institute itu. Padahal, semua pengajar pendidikan tersebut bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Di Belanda, bahasa Inggris memang bahasa asing, tapi hampir semua mereka yang pernah melewati sekolah dasar pasti mengerti dan sebagian besar fasih berbahasa Inggris. Di negeri yang sebagian wilayahnya lebih rendah daripada permukaan air laut itu, berenang dan bahasa Inggris adalah mata pelajaran wajib di sekolah dasar. Ini juga penjelasannya mengapa Anda bisa berpariwisata di Belanda, meski Anda tidak bisa berbahasa Belanda. Asal bisa sekadarnya berkomunikasi dalam bahasa Inggris, tentu saja.

Bahasa Belanda yang saya pelajari itu tidak banyak berguna selama saya di negeri dingin itu. Praktis dengan semua orang Belanda, kami bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kuliah dan praktik kerja pada umumnya juga berlangsung dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi ketika balik ke Jakarta, saya menjadi lebih mudah bergaul dengan orang-orang Menteng yang waktu itu masih banyak menggunakan bahasa campuran Indonesia-

Belanda. Namun, hasil belajar bahasa Belanda itu baru betul-betul berguna ketika saya melakukan penelitian untuk tesis doktor saya pada Pusat Arsip Kerajaan di Den Haag pada musim panas 1984. Saat itu, seharusnya sebelum ke lapangan saya wajib ikut kuliah bahasa Belanda. Tapi karena sudah pernah berada lama dan sempat belajar bahasa Belanda, Prof. Liddle, supervisor saya, meyakinkan para anggota komite ujian bahwa saya tidak perlu lagi ikut kuliah bahasa tersebut. Ternyata kemudian, saya memang sangat tertolong oleh bahasa Belanda yang saya pelajari belasan tahun sebelumnya.

Dengan modal bahasa yang relatif terbatas itu, saya tidak mengalami kesulitan mengidentifikasi dokumen-dokumen yang saya perlukan dari koleksi Arsip Kerajaan yang terletak di samping stasiun kereta api (Central Station) Den Haag. Ketika balik ke Columbus, saya tenteng sendiri fotokopi dokumen-dokumen yang saya perlukan. Beratnya sekitar 20 kilogram. Dan yang ajaib, dokumen yang saya perlukan, dengan bantuan kamus besar bahasa Belanda-Inggris, bisa saya terjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau sekarang saya diminta mengulangi "keajaiban" tersebut, terus terang saya tidak mampu lagi.

Soto Babat Meneer Wong

Sejak mendarat di Schiphol, acara kami amat padat, sementara Amsterdam belum sempat kami lihat. Kami hanya berkutat di antara Tropen Museum, tempat belajar bahasa Belanda, dan International Center, tempat penampungan kami, serta restoran Wong yang menu utamanya soto babat. Soal babat ini juga ada kisahnya. Dulu, ketika orang Indonesia dan orang Indo belum banyak di Belanda, babat atau jeroan sapi itu hanya jadi makanan binatang. Tapi, sejak banyak pendatang dari Indonesia, babat naik kelas menjadi makanan manusia dan termasuk suguhan mahal di restoran-restoran Indonesia yang bisa ditemui di hampir semua sudut Kota Amsterdam.

Kesibukan yang berkutat di sekitar tempat penampungan, ruang belajar bahasa Belanda, dan restoran Wong itu cepat sekali menimbulkan kebosanan bagi kami yang masih *excited* berada di Amsterdam yang sama sekali belum kami jelejahi. Maka tanpa direncanakan, acara bolos teratur dan bergantian menjadi "kesepakatan" baru kami. Kesempatan bolos saya gunakan untuk berjalan kaki mengelilingi sentra, pusat kota yang ramai dengan toko-toko besar, restoran-restoran serta kantor-kantor pelayanan pariwisata.

Waktu itu di Jakarta tempat belanja yang ada baru Sarinah di Jalan Thamrin, Glodok, dan Pasar Baru. Pusat perbelanjaan Amsterdam, dengan toko-toko yang besar-besar dan barang-barang beraneka ragam, merupakan hal baru bagi kami semua. Dan jadilah tempat itu sasaran terpenting setiap kami "dapat giliran" bolos kuliah bahasa Belanda.

Lebih menarik lagi karena menjelang Natal dan Tahun Baru, obral marak di mana-mana. Ini juga satu pengalaman baru bagi kami. Di Pasar Baru, Jakarta, waktu itu memang ada toko milik orang India yang bernama "Obral", tapi nama saja yang obral. Adapun obral di Belanda, sebagaimana *sale* di Amerika, memang betul-betul obral atau *sale*, artinya murah. Dan bergantianlah kami ke sana. Dr. Naswil Idris dari mingguan *Mahasiswa Indonesia* Bandung, adalah seorang di antara kami yang paling rajin menjelajahi Kota Amsterdam. Naswil punya banyak informasi, terutama mengenai di mana saja ada obral besar-besaran dan apa yang mungkin kita beli di sana. Maka dari informasi yang dimilikinya itulah, kami menentukan harus ke mana dan dengan trem listrik nomor berapa, ketika dapat "giliran" bolos.

Tuan rumah kami tampaknya menyadari "protes" halus kami dalam bentuk bolos itu. Pada suatu hari, pelajaran bahasa Belanda ditiadakan. Dengan sebuah minibus, kami dibawa keliling kota oleh seorang gadis cantik yang juga bertindak sebagai *guide*. Kendati demikian, setelah itu agenda bolos tidak kunjung reda juga. Sudah telanjur jadi kebiasaan rupanya. Amsterdam yang berhias cantik menjelang Natal dan Tahun Baru 1970 itu terlalu

menarik untuk tidak kami jelajahi. Sebagian objek-objek penting —sejumlah museum, gedung-gedung bersejarah, daerah pelesiran—semua kami kunjungi beramai-ramai. Kami adalah kelompok wartawan, jadi kami harus tahu semua tentang Amsterdam.

PADA SUATU MALAM, saya bersama Naswil Idris mengunjungi Paradiso, sebuah gedung besar yang dicat dengan warna-warna psikedelik. Gedung itu milik kota yang di-"wakaf"-kan kepada para pengguna hasyis dan pengisap ganja. Amsterdam khususnya dan Negeri Belanda pada umumnya bersikap sangat liberal kepada para pengguna narkoba. Di Paradiso, siapa saja bebas *fly* sesuka hati mereka. Anak-anak muda di dalam gedung besar tersebut bertebaran. Ada yang sambil berbaring mengisap ganja, bergerombol minum bir serta bermacam minuman, atau berdebat tentang hal yang sulit kami ikuti.

Ketika sibuk berputar-putar dalam gedung yang dicat segala macam warna itu, kami didekati dua remaja cantik. Mengira kami orang India dan Nepal, kami didesak mengajari mereka agama Hindu atau Buddha. Waktu dua remaja itu sedang bicara dengan kami, sejumlah temannya mendekat. Semua menginginkan kami mengajar mereka. "Wah, gawat ini, Naswil. Kita pergi, yuk," kata saya. "Saya juga tidak tahan baunya. Kita pulang cepat saja," sambut Naswil. Kami berjanji kepada gadis-gadis itu untuk datang lagi besoknya. Tapi sebagai wartawan, kami merasa sudah cukup punya pengalaman dengan penghuni serta kegiatan mereka di gedung Paradiso, kami tidak pernah lagi balik ke sana.

Suatu kali kami tertarik pada selebaran yang mempromosikan *sex teater*, nama lain dari *life show*. Beberapa di antara kami berangkat ke tempat pertunjukan di daerah merah Amsterdam yang juga dikenal sebagai Zeedijk. Ternyata pertunjukan itu lebih banyak unsur tipuannya, dan terdengarlah keluhan penonton dalam bahasa Jawa, "*Wah, diapusi Londo*," (Dikibuli Belanda). Ketika pertunjukan selesai dan lampu menyala, barulah kami sadar hampir semua penonton adalah orang Indonesia. Selain kami,

beberapa wartawan, sebagian besar yang lainnya adalah anak-anak kapal.

Life show yang sebenarnya kelak saya tonton di Bangkok bersama para perwira kita yang libur dari tugas International Commision of Control and Supervision (ICCS) di Vietnam Selatan. Waktu itu sebagai wartawan *Tempo*, saya mampir di Bangkok dalam perjalanan pulang ke Jakarta dari Phnom Penh dan Saigon. Saya jumpa dengan para perwira itu di Saigon. Di Bangkok, kami tinggal di hotel yang sama, *First Hotel*, di seberang KBRI. Kontak mereka di Bangkok adalah seorang Sersan Mayor Angkatan Darat Thailand yang rupanya punya bisnis sebagai *backing* kegiatan semacam *life show* dan sejenisnya. Dengan membayar masing-masing lima dolar Amerika, kami diantar oleh Pak Sersan Mayor ke hotel tempat pertunjukan. Alih-alih bergairah menikmati pertunjukan yang diadakan di dalam sebuah kamar hotel, hati saya malah pilu. Orang kok cari makan dengan bertingkah laku seperti binatang mempertontonkan hubungan seks di depan sejumlah orang yang membayarnya. Inilah salah satu akibat kemiskinan, pikir saya. Manusia sudah menjadi binatang. Menurut keterangan Pak Sersan Mayor, "aktor" dan "aktris" pertunjukan itu memang berasal dari daerah miskin di pedalaman Thailand. Sebagian besar pelacur Bangkok yang panen pada masa Perang Vietnam—meladeni para GI yang pelesir dari medan perang—adalah juga orang-orang miskin dari pedalaman Thailand.

KULIAH-KULIAH KAMI DIBERIKAN OLEH PARA DOSEN Akademi Jurnalistik Utrecht. Mestinya kami diasramakan di sana, fasilitas yang ada di Amsterdam jauh lebih memenuhi syarat. Lagi pula jarak Utrecht-Amsterdam sangat dekat. Di Negeri Belanda yang kecil itu semua jarak memang dekat dan sistem perhubungan daratnya barangkali paling baik di dunia. Saking kecilnya Negeri Belanda, di kalangan orang-orang Indonesia muncul lelucon dalam bentuk peringatan: "Hati-hati berkendaraan di Negeri Belanda, kalau remnya blong kita bisa nyelonong ke Belgia atau Jerman."

Nanti ketika harus kerja praktik, saya pindah ke Rotterdam karena ditempatkan di koran *New Rotterdamse Courant*, koran Belanda yang dipandang paling bermutu waktu itu. Di kota pelabuhan tersibuk itu, saya harus mencari pondokan sendiri. Kebetulan saya bertemu mahasiswa Indonesia yang belajar ekonomi di Rotterdam. Saya lupa sekarang siapa nama dan bagaimana saya jumpa dengan mahasiswa tersebut. Tapi, dialah yang mengajak saya tinggal bersama di kamarnya yang besar pada sebuah kapal penumpang yang ditambatkan di sebuah kade pelabuhan. Kapal itu tidak lagi layak berlayar dan buat sementara dimanfaatkan sebagai asrama mahasiswa.

Teringat Bung Hatta dan Prof. Sumitro

Dari kapal itu saya harus berjalan sekitar satu kilometer sebelum menemukan trem listrik yang selalu mengantar saya pergi-pulang ke surat kabar tempat *training*. Setiap berangkat dan pulang, saya selalu teringat Bung Hatta dan Profesor Sumitro Djojohadikoesomo. Sekolah mereka dulu, Sekolah Tinggi Ekonomi, saya lewati setiap hari. Rotterdam adalah kota modern, sebagian besar gedungnya merupakan bangunan baru. Kota itu dulu dihancurkan oleh bom-bom Jerman selama Perang Dunia II. Amsterdam, entah mengapa, selamat dari kebrutalan Jerman, akibatnya kekunoan ibu kota Belanda itu terpelihara baik.

Pada kunjungan pertama ke Negeri Belanda itu, ada dua dari sejumlah pengalaman menarik yang ingin saya bagi dengan para pembaca catatan perjalanan ini. *Pertama*, sebagai bagian dari sejumlah kunjungan ke berbagai objek yang pihak tuan rumah ingin kami saksikan, rombongan kami suatu kali diajak ke bekas tempat tinggal Prof. Dr. Snouck Hurgronje, ahli Islam yang pada awal abad ke-20 menjabat sebagai penasihat Islam pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Gambaran tentang Hurgronje di lingkungan keluarga dan madrasah masa kecil saya di Parepare adalah seorang musuh Islam yang menyamar menjadi Muslim, memasuki Makkah untuk memata-matai mukimin Indonesia, terutama orang

Aceh. Maka ketika rombongan mulai memasuki museum profesor ahli Islam itu, saya tertegun, enggan, dan bertahan agak lama di halaman.

Gambaran buruk tentang Prof. Hurgronje menahan saya beberapa waktu sebelum akhirnya ikut masuk ke bangunan yang telah menjadi semacam museum tersebut. Di dalam bangunan itu, kami bertemu cucu Hurgronje, seorang perempuan. Dia tidak mau dipotret karena katanya Islam, menurut kakeknya, juga melarang melukis dan memotret makhluk hidup. Perempuan yang tidak lagi muda itu mengaku mengikuti kakeknya yang masuk Islam. Snouck Hurgronje memang mengaku masuk Islam dan memakai nama Abdul Gafur untuk masuk Tanah Haram, yakni Makkah dan Madinah. Selain keturunannya di Belanda, dia juga punya keturunan di Jawa Barat sebagai hasil perkawinannya dengan putri seorang *ajengan* (kiai). Terhadap persoalan Islam atau tidaknya profesor Belanda itu, hanya Allah yang tahu. Tapi, gambaran tentang dirinya dari masa kecil saya jelas amat buruk.

Kedua, hal lain yang juga saya catat dalam kunjungan pertama di *Holland* adalah pengalaman ketika kerja praktik. Pembimbing saya merupakan seorang yang usianya tidak terlalu jauh di atas umur saya. Nama lengkapnya mula-mula saya tidak tahu, tapi panggilan para koleganya adalah "Jan". Saya pun ikut memanggilnya "Jan". Suatu kali salah seorang senior di koran itu menegur saya agar tidak memanggil pembimbing dengan "Jan", tetapi Meneer Van Hart, karena itu nama keluarganya. Pengalaman ini sangat berbeda dengan pengalaman saya di Amerika sekian tahun kemudian. Di Amerika, para profesor dan kebanyakan orang lebih senang dipanggil dengan nama pertamanya (*first name*) saja. Perbedaan ini mungkin karena Eropa memang punya tradisi feodal yang panjang, sedangkan Amerika dari awal masyarakatnya lebih egaliter. Begitu kesan dan kesimpulan saya. Di Amerika juga orang sudah makin jarang yang mengucapkan "*Good Morning*," mereka hanya bilang "*Hi*" setiap berjumpa pada pagi hari. Tapi, jangan coba-coba melakukan hal yang sama di Negeri Belanda. Suatu kali kebiasaan Amerika itu saya lakukan kepada

seorang pegawai muda, seorang wanita, di Arsip Den Haag ketika meneliti pada 1984. Apa yang terjadi? Saya dijawab, "*Good morning*," dengan tekanan mengajari. Dalam hal tata krama pergaulan, orang Belanda memang tidak seliberal dan seinformal orang Amerika.

Cinta Pertama Tak Pernah Mati

Setelah bermukim sebagai mahasiswa selama sekian tahun di Amerika Serikat, pada musim panas 1984, saya datang lagi ke Negeri Belanda. Kali ini tujuan saya adalah Kota Den Haag, tempat Arsip Kerajaan Belanda tersimpan. Kota Den Haag kecil, kuno, tertata rapi, dan tentu saja tidak seramai Amsterdam dan Rotterdam. Ini adalah kota para birokrat. Kantor-kantor kementerian dan kedutaan-kedutaan semua terkumpul di kota ini.

Kecuali sikap arkhaik yang berkecenderungan feodal dalam sikap dan pergaulan warganya, Negeri Belanda di mata saya pada 1984 sudah amat berbeda dengan negeri yang memukau saya pada 1969 dulu. "Itu karena Saudara sudah melihat Amerika yang besar dan kaya," kata seorang sarjana Belanda keturunan Indonesia yang bersama saya meneliti di arsip tersebut. Negeri Belanda setelah Amerika adalah negeri amat kecil dengan bangunan kecil-kecil, tanpa *glamour* sebagaimana yang saya lihat di New York, Chicago, Los Angeles, atau bahkan Columbus. Lagi pula Negeri Belanda pada 1984 memang tidak semakmur pada 1970.

Pengalaman dengan Amsterdam yang tidak lagi memberi kesan *glamour* pada saya waktu itu mengingatkan kepada pengalaman pertama saya pulang ke Parepare setelah berada di Pulau Jawa selama sembilan tahun. Ketika memasuki rumah masa kecil saya, alangkah terkejutnya melihat rumah kami itu amat kecil. "Apakah rumah kita dipotong hingga sempit seperti ini?" tanya saya. Jawab ibu saya, "Anakku, kau telah melihat rumah-rumah besar di Pulau Jawa sana. Rumah kita masih seperti dulu, tidak berubah."

Meski rumah saya sudah "mengecil" dan kedua orangtua sudah lama meninggal dunia dan adik-adik sudah pada pergi, cinta saya kepada Parepare tidak kunjung pupus. Terlalu banyak kenangan indah masa kecil saya di sana. Saya selalu bergairah kalau ada kesempatan ke Parepare, meskipun sekarang saya terpaksa harus tinggal di hotel karena semua rumah kami sudah ditinggali orang lain. Ada yang dijual, tapi ada juga yang diwakafkan. Juga karena di rumah-rumah para sanak keluarga pada umumnya tidak tersedia fasilitas modern, yang sudah biasa kita nikmati sebagai orang kota.

Perasaan yang sama juga mendekam di hati saya terhadap Negeri Belanda. Saya juga selalu sangat bergembira kalau ada kesempatan berkunjung ke negeri penghasil keju terkenal itu. Mungkin Negeri Belanda menjadi penting bagi hidup saya karena itulah luar negeri pertama yang saya kunjungi. Malam pertama saya di luar negeri adalah di Amsterdam. Cinta pertama memang tidak pernah mati, kata orang. Kunjungan pertama ke Amerika juga sangat berkesan buat saya. Saking bergairahnya, saya tidak mengalami *jet lag* dalam kunjungan pertama pada Juni 1979. Kalau pada malam keberangkatan ke Belanda, saya tidak bisa tidur karena *excited*. Pada malam keberangkatan ke Amerika, tanpa sadar, saya terus-menerus melantunkan potongan-potongan lagu "*America the Beautiful*".

Namun, lama-kelamaan Amerika tidak lagi terlalu memikat saya. Negeri itu amat besar dan kota-kotanya hampir sama saja, kecuali beberapa kota tua yang punya ciri masing-masing. Kota favorit saya adalah New York dan Washington, DC. New York gigantik, tertata rapi (saya dan siapa pun tidak mungkin kesasar di sana, padahal di Jakarta, saya amat sering kesasar) dan menunjukkan hasil pencapaian teknologi manusia sejak pertengahan abad ke-19. Di New York, kita selalu bisa berjumpa segala macam manusia yang ada di muka bumi ini. Setiap ke New York, acara wajib saya adalah menelusuri Fifth Avenue untuk menikmati macam-macam arsitektur yang menunjukkan pencapaian dan kehebatan daya cipta manusia.

Washington, DC indah, direncanakan dengan bagus, diilhami oleh tata kota Paris, yang juga mengilhami Presiden Sukarno yang mendorongnya membangun Lapangan Monas. Chicago, Los Angeles, dan San Fransisco terlalu besar, terlalu sibuk, dan tanpa pusat kota yang jelas.

Kendati demikian, kalau untuk melakukan penelitian bagi buku-buku yang telah dan mungkin masih akan saya tulis, tidak ada tempat sehebat Amerika. Perpustakaan di universitas-universitas Amerika betul-betul fantastis, bahkan semacam surga bagi kami kaum peneliti.

SAYA TIDAK SANGGUP MENJELASKAN PERASAAN bahagia pada hari pertama saya di Amsterdam. Dua tahun setelah kembali dari *Holland*, saya mengunjungi Tokyo sebagai tamu *Gaimusho*, Kementerian Luar Negeri Jepang. Perasaan yang dulu saya rasakan pada kunjungan pertama ke luar negeri, yakni ke Belanda, tidak saya rasakan lagi. Yang pasti, perasaan itu tidak pernah muncul lagi dalam banyak kunjungan saya ke luar negeri. Juga tidak pada hari-hari pertama saya di Amerika, negeri yang mengubah jalan hidup saya. Tapi, dengan malu-malu harus saya akui perasaan demikian muncul kembali pada hari-hari awal setelah pernikahan saya, dan hari-hari pertama setelah saya tiba di pos saya sebagai duta besar di Praha. Sebagai duta besar baru, saya merasa seperti pengantin baru. Aneh, tapi begitulah yang saya rasakan waktu itu.

PADA AWAL MUSIM SEMI 1970, bersama dengan sejumlah *trainee* asing yang berada di Holland, kami diberi kesempatan mengikuti sebuah tur ke Paris. Luar biasa gembiranya saya. Perjalanan dilakukan lewat jalan darat dengan sebuah bus besar. Di Brussel, Belgia, rombongan singgah bersantap makan siang. Restoran tempat kami bersantap menyuguhkan daging bakar yang kelihatan berminyak dan menyebarkan aroma harum. Ketika anggota rombongan dari negara lain sudah mulai menikmati hidangan, saya dan Pak Mang serta beberapa teman Indonesia lainnya me-

nahan diri. “Jangan-jangan babi,” kata salah orang di antara kami.

Mau tanya, kami malu. “Kita tunggu orang-orang Mesir itu. Kalau mereka makan, kita makan juga,” kata Pak Mang. Alasan yang mendasari jalan pikiran wartawan dan dosen dari Yogyakarta itu adalah, “Mesir itu *mbahnya* Islam, masa’ makan babi.” Pak Mang rupanya tidak tahu bahwa persentase warga negara Mesir non-Muslim tidak jauh berbeda dari persentase orang non-Muslim di Indonesia. Jadi, bisa saja ada banyak orang Mesir yang makan daging babi, bukan? Di bus, kami baru dapat informasi dari panitia bahwa semua makanan yang dipesan untuk rombongan kami, halal, dan hidangan di Brussel tadi itu adalah steak daging sapi. Untung kesempatan makan steak daging sapi itu tidak kami lewatkan. Ternyata lezat dan halal pula. Alhamdulillah.

Kandang Kuda Seorang Bangsawan

Berangkat pagi dari Amsterdam, kami tiba di Paris malam hari. Capek, kami langsung saja istirahat. Bangun pagi, setelah sarapan yang enak (sampai sekarang, sarapan di hotel-hotel kecil Paris selalu enak), saya jalan-jalan di sekitar hotel. Alangkah terperangahnya, saya menemukan di samping hotel berdiri dengan megah gedung teater Comédie Française. Waktu itu saya sedang gandrung belajar teater, dan gedung pertunjukan di samping penginapan kami itu adalah sebuah lembaga yang legendaris dan historis dalam sejarah teater dunia. Beberapa hari kemudian saya berkesempatan nonton sebuah pertunjukan karya Moliere, pengarang komedi terkenal Prancis, di gedung teater tersebut. Jim Adhilimas (Jim Lim) adalah tokoh teater Bandung (SKTB, Studi Klub Teater Bandung) yang sedang belajar teater di Paris waktu itu.

Sebagai mahasiswa teater, dia mendapat fasilitas khusus untuk nonton segala macam pertunjukan teater di ibu kota Prancis tersebut. Atas bantuan Jim, saya bisa nonton di Comédie Fran-

çaise dan beberapa pertunjukan teater lainnya. Pementasan lain yang saya datangi adalah pertunjukan yang diadakan pada sebuah gedung teater kecil yang sebelum Revolusi Prancis konon berfungsi sebagai kandang kuda seorang bangsawan. Jim menjadi salah seorang pemeran penting dalam pertunjukan tersebut. Bahasa Prancisnya tidak bisa dibedakan dari orang-orang Prancis yang bermain dalam lakon tersebut.

Jim Adhilimas sedang *shooting* film di Paris, 1992.

Karena pertunjukan menggunakan bahasa Prancis, tentu saja saya tidak mengerti secara utuh jalan ceritanya. Bahasa Prancis yang saya pelajari di SMA dulu hanya sedikit menolong. Tapi, akting para pemainnya serta tata panggungnya bagus dan memikat, sehingga saya betah menonton hingga berakhir. Setelah pertunjukan selesai, seorang Nyonya Belanda ternyata juga ikut nonton karena mendapat informasi bahwa salah seorang aktor pertunjukan itu adalah orang Indonesia. Saya menemani Nyonya Belanda menemui Jim di belakang panggung. Jim Adhilimas memang orang Indonesia tulen. Walaupun tinggal di Paris selama puluhan tahun, dia tetap warga negara Indonesia yang mengikuti dengan saksama perkembangan di Indonesia. Pada 1994, saya memberi ceramah di KBRI Paris tentang perkembangan politik di Indonesia. Jim hadir dan ikut berpartisipasi dalam diskusi. Di kemudian hari Jim bukan saja berakting di panggung, tapi juga bermain film. Salah satu filmnya pernah saya tonton di Amerika.

Pengalaman nonton teater dengan bahasa yang tidak saya mengerti terulang kembali sekian puluh tahun kemudian di Stockholm, Swedia. Berada di sana sebagai tamu negara, tuan rumah yang tahu saya Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), menyediakan tiket untuk menonton pertunjukan sandiwara yang disutradarai oleh tokoh teater dan film terkenal Swedia, Ingmar Berg-

man. Bahasanya sama sekali tidak saya mengerti, tapi jalan pertunjukan amat memikat. Permainan dan penyutradaraan fantastis. Saya dan istri bertahan hingga akhir pertunjukan. Selesai menonton, saya sempat bercakap-cakap dengan beberapa penonton di lobi dalam perjalanan kami ke luar gedung teater. Ternyata orang Swedia itu seperti saya juga, menikmati pertunjukan, meski tidak mengerti ceritanya. Kata saya, "Saya sangat menikmati karya Mozart, Beethoven, Chopin, meski saya tidak mengerti. Seni memang lebih berurusan dengan perasaan tinimbang dengan pikiran dan pengertian." Persoalan utamanya memang apakah Anda menikmati, bukan apakah Anda mengerti.

Paris bagi para seniman Indonesia masa itu adalah pusat budaya dunia. Tokoh-tokoh sastra Prancis, Jean Paul Sartre dan Albert Camus—keduanya pemenang Nobel Kesusastraan—sangat populer di kalangan seniman Indonesia. Sejumlah karya mereka diterjemahkan. Bahkan, karya-karya sandiwara keduanya dimainkan oleh para mahasiwa Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI) di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Waktu itu karya sastra pemenang Nobel dari Amerika, Ernest Hemingway, dipandang sebelah mata oleh para sastrawan Indonesia. Kebudayaan Amerika bagi seniman-seniman Indonesia waktu itu belumlah sesuatu yang pantas dilirik. "Dangkal," kata mereka. Eropa, terutama Prancis, hampir segala-galanya. Ini mungkin salah satu akibat penjajahan Belanda. Budaya Belanda amat berkiblat ke Prancis.

Kelak, ketika Kine Klub di Taman Ismail Marzuki (TIM) secara teratur mempertunjukkan film-film asing, film-film Prancis gelombang baru (*New Wave*) amat menarik perhatian para seniman dan peminat film di Jakarta. Inilah latar belakang dan penjelasan mengapa saya—sebagai orang yang waktu itu merasa diri seniman—sangat diliputi gairah dan rasa bahagia berlebihan ketika mendapat kesempatan melihat Paris. Selama beberapa hari di ibu kota Prancis itu, hampir semua tempat bersejarah yang saya ingat dari belajar sejarah Revolusi Prancis serta museum-museum seni modern, saya kunjungi. Tidak terlupakan mengunjungi *Café*

de Flore di Saint-Germain-des-Prés yang pada awal abad ke-20 telah menjadi tempat para seniman dan intelektual terkenal Prancis sering kumpul. Di sana saya ditraktir segelas minuman khas Prancis oleh Jim Adhilimas. Minumannya enak, tapi saya sekarang sudah tidak ingat lagi nama minuman itu.

SELAIN KE PARIS, ROMBONGAN PARA WARTAWAN INDONESIA tersebut juga diberi kesempatan ke Berlin dan London. Kunjungan ke dua kota penting Eropa itu amat singkat, jadi tidak banyak bahan cerita. Di London, saya sangat ingin menonton sandiwara Shakespeare yang memang selalu bisa ditonton setiap malam di kota itu. Kami datang pada awal musim semi yang juga awal musim turis. Salah satu objek menarik bagi turis-turis Amerika yang datang ke London konon adalah menonton Shakespeare. Tidak bisa mendapat tiket, meski KBRI sudah berusaha membantu. Sebagian tiket itu konon memang dipasarkan di Amerika bagi turis yang akan berwisata ke Inggris.

Sekitar 25 tahun kemudian, pada suatu musim panas, saya, istri, dan anak berada di London sebagai turis. Ternyata usaha saya mendapatkan tiket untuk nonton karya Shakespeare tidak berhasil juga. Kalah lagi oleh turis-turis Amerika yang membeli tiket mereka di negerinya. Daripada sama sekali tidak pernah menikmati teater di London, atas bantuan Arya Gunawan, mantan wartawan *Kompas* yang waktu itu bekerja pada radio BBC, kami berhasil mendapatkan tiket pertunjukan *Miss Saigon*, yang sedang populer. Bertiga kami duduk di belakang setelah membayar tiket masing-masing seharga 13 pound sterling. Kira-kira dua juta rupiah nilainya pada waktu itu.

Saya berkesempatan menonton karya Shakespeare dalam bahasa Jepang di Tokyo ketika berkunjung ke sana sebagai tamu The Japan Foundation. Di Indonesia, dua kali saya berkesempatan nonton karya Shakespeare. Ada yang disutradarai Jim Adhilimas, ada juga oleh W.S. Rendra. Jadi, semua yang sempat saya tonton adalah Shakespeare dalam terjemahan, bukan dalam bahasa aslinya seperti yang dipertunjukkan di London itu. Karya Shakespeare

yang diangkat ke layar putih sebagian besar sempat saya tonton. Ada yang berbahasa Inggris (buatan Inggris dan Amerika), berbahasa Jepang, dan Rusia. Di antara film-film yang diangkat dari sandiwara-sandiwara pujangga Inggris termasyhur itu yang paling mengesankan saya adalah *Hamlet* versi Rusia, *Macbeth* dan *King Lear* versi Jepang. Dua yang terakhir ini adalah karya Akira Kurosawa, sutradara Jepang legendaris.

Check Point Charlie

Di Berlin Barat yang menjadi tontonan utama kami adalah dinding yang membelah kota tersebut. Dengan menonton dari puncak gedung milik Axel Springer yang terletak persis di samping tembok, kami bisa melihat jauh ke dalam wilayah Berlin Timur yang kumuh. Strategi Blok Barat waktu itu menjadikan Berlin Barat semacam "surga" untuk dikontraskan dengan Berlin Timur (dikuasai Uni Soviet) yang miskin dan kumuh. Mungkin strategi Barat itu sekarang boleh tergolong sebagai perang dengan menggunakan *soft power*. Strategi demikian berhasil, Soviet kemudian ambruk sendiri tanpa sebutir peluru pun ditembakkan dari kubu Barat. Tembok yang membelah Berlin dihancurkan dari kedua belah pihak oleh anak-anak muda dari kota terbelah itu. Berlin Timur bebas dan kedua bagian kota kembali bersatu. Tak lama sesudah itu, seluruh Eropa Timur mencampakkan Komunisme.

Kebetulan saya berada di Berlin pada November 1989, hanya beberapa hari setelah tembok kokoh itu roboh. Saya melihat betapa bersemangatnya para pemuda Berlin menghancurkan tembok beton itu. Kalau Anda ke Berlin sekarang, beberapa potong dari tembok itu masih berdiri tegak. Disisakan sebagai monumen. Pos perbatasan milik Amerika, Check Point Charlie, juga masih terawat sebagai objek turis. Di bekas *check point* milik Amerika terdapat museum kecil yang memperlihatkan berbagai alat dan kendaraan yang dipergunakan orang Berlin Timur melarikan diri ke Berlin Barat. Hanya sedikit yang berhasil lari dari penindasan Komunis. Sebagian besar yang melarikan diri itu tertembak pen-

jaga perbatasan Jerman Timur. Dengan relik Perang Dingin tersebut, dan dengan imajinasi yang kaya, semoga Anda masih bisa membayangkan betapa kejam rezim Komunis dan bagaimana menderitanya penduduk Berlin Timur pada masa Perang Dingin tersebut.

KEMBALI KE HOLLAND, yang juga saya anggap menarik untuk diceritakan dari pengalaman perjalanan perdana ke luar negeri tersebut adalah perubahan cara pandang saya terhadap negeri yang pernah menjajah kita itu. Pada kunjungan pertama, tentu saya kagum melihat kota-kota yang teratur rapi, bersih dengan bangunan-bangunan tua yang terpelihara. Pusat perbelanjaan di Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag kaya dengan segala macam barang yang masih sulit ditemukan di Jakarta waktu itu. Juga disiplin penduduk terhadap aturan dan waktu. Kendati demikian, pada saat yang sama saya juga beranggapan bahwa sebagian besar itu adalah hasil jarahan penguasa kolonial Belanda yang menjajah Tanah Air saya begitu lama. Kelak, setelah bertahun-tahun belajar di Amerika, cara pandang saya kepada Negeri Belanda bergeser.

Pada kunjungan pertama, sikap paternalistik sejumlah mantan kolonialis dan pandangan kekiri-kirian anak mudanya membuat saya selalu pasang kuda-kuda setiap bicara tentang Indonesia dengan orang Belanda. Waktu itu, memang masih mudah sekali menemukan orang Belanda yang pernah lama tinggal di Indonesia atau bahkan lahir di negeri jajahan mereka itu. Banyak yang totok, tapi tidak kurang juga yang Indo. Yang totok sikapnya masih banyak yang paternalistik, sedangkan yang Indo banyak yang mengeluhkan kesusahannya menyesuaikan diri dengan negeri barunya itu. Yang terakhir ini mengenang betapa indah hidup mereka di Hindia dulu. Tentu saja Hindia yang indah, yang melekat dalam ingatan mereka itu sudah tidak ada lagi sekarang. Dan untuk bisa hidup, mereka harus menyesuaikan diri dengan Holland yang tahun itu (1970) musim saljunya minta ampun dinginnya.

Di samping banyak di antara orang Belanda yang bersimpati kepada kami, tidak kurang di antara mereka yang masih menyimpan sikap paternalistik-kolonialistik yang terbawa dari negeri tanah jajahan. Kadang-kadang mereka seperti lupa bahwa kami adalah anak-anak Indonesia merdeka dan bukan *inlander-inlander* yang mereka eksploitasi untuk kemudian "ayomi" sesuai dengan politik etis. Menghadapi orang-orang tua itu, atas nama kesopanan Timur, kami selalu mencoba menahan diri. Saya teringat pada sebuah kunjungan ke rumah keluarga Indo di Leidchendam, yang ayah mereka seorang mantan pejabat kolonial yang pernah bertugas di daerah Tegal, Jawa Tengah. Orang tua ini tidak pernah mau menyebut Indonesia, selalu Jawa atau Hindia. "Pap, sekarang namanya Indonesia," kata seorang anaknya yang menemani kami dan minta maaf atas sikap papanya tersebut. "Biarkan saja," kata saya. Dan *oudeheer* itu terus juga menyebut Indonesia sebagai Hindia atau Jawa.

Sekian puluh tahun kemudian dari kedudukan sebagai dubes di Praha, saya diundang ke Denpasar sebagai narasumber untuk rapat yang membicarakan rekonsiliasi Indonesia dengan Timor Leste. Di sana saya selalu menyebut negara baru merdeka itu dengan nama lamanya, Timor Timur. Habis, sudah terbiasa seperti itu bertahun-tahun. Setiap menyebut demikian, saya selalu ditegur, "Pak, Timor Leste namanya sekarang," kata seorang anggota delegasi Timor Leste. Saya langsung minta maaf, meski kemudian nama lama saya dipakai lagi. Yang membedakan saya dengan Belanda tua di kota kecil dekat Den Haag itu adalah, saya tidak pernah merasa Timor Timur, sekarang Timor Leste, sebagai wilayah Indonesia, sementara tuan Kolonialis itu pernah lama menjadi tuan besar kita yang melihat Indonesia sebagai milik mereka, dan kini masih sulit melihat kami sebagai bukan *inlander* lagi. Kami adalah warga negara dari sebuah republik yang merdeka.

Tentang Timor Leste, perlu saya katakan bahwa ketika hasil jajak pendapat menunjukkan orang Timor Timur memutuskan untuk merdeka, beberapa jam kemudian, sebagai seorang ko-

mentator politik, saya sudah muncul di TVRI Jakarta mengakui pilihan mereka itu. Saya memang sedih kalau ingat ada 3.000 tentara kita yang cacat dan sekitar 2.000 yang tewas dalam operasi di Timor Timur, juga berapa banyak duit kita yang habis untuk membangun daerah itu. Tapi, kesia-siaan dan pemborosan itu semua adalah kesalahan pemerintah kita sendiri juga. Sebagai pengajar di beberapa lembaga pendidikan militer, selalu saya ingatkan para mahasiswa saya agar kalau nanti ada kesempatan menulis tesis doktor, salah seorang dari mereka harus menulis mengenai kegagalan militer kita di Timor Timur dulu. Doa saya: sebagai seorang profesor, semoga kelak saya tidak harus mendorong para mahasiswa saya untuk menulis tentang kegagalan kita di Irian Barat (Papua sekarang).

PEMERINTAH ORDE BARU adalah pemerintahan otoriter yang memang tidak pernah meminta pendapat rakyatnya mengenai apakah kita perlu mengintegrasikan Timor Timur ke dalam Republik Indonesia. Dan setelah Timor Timur menjadi provinsi kesekian, pergolakannya tidak pula berhasil diselesaikan hingga berakhirnya Perang Dingin. Pada periode pasca-Perang Dingin, ketakutan dunia kepada Komunisme menghilang. Bukan saja karena Uni Soviet bubar, melainkan juga karena Tiongkok sudah jadi kapitalis. Dulu dunia mendukung Indonesia mengambil Timor Timur karena takut bekas jajahan Portugis itu bakal jadi pangkalan militer Uni Soviet. Semua ketakutan itu sekarang sudah sirna dimakan waktu dan perubahan politik. Dukungan kepada "integrasi" yang tak kunjung beres itu, juga lenyap menyertai perubahan tersebut.

YANG MENYEBABKAN SAYA gampang naik pitam pada kunjungan pertama ke Negeri Belanda itu adalah sikap sebagian anak-anak muda Belanda. Umumnya mereka kekiri-kirian, gejala yang tampaknya melanda pemuda dan mahasiswa Eropa waktu itu. Suatu saat saya tidak bisa menghindar dari sebuah debat dengan seorang mahasiswa dalam suatu pertemuan yang mendiskusikan

perkembangan terakhir di Indonesia. Mereka mengundang kami, para wartawan yang sedang training. Dengan angkuh seorang di antara mereka mencoba mengajari kami mengenai bagaimana Indonesia harus dibangun. "Hati-hati kalian dengan Amerika. Mereka membantu kalian melawan Komunisme agar negeri kalian nanti jatuh ke tangan mereka yang imperialis itu. Kalian harus mengikuti cara Mao di Tiongkok membangun negerinya. Mao itu menjaga agar negerinya tidak tunduk pada Amerika, juga tidak kepada Uni Soviet." Dia juga bicara mengenai Orde Baru yang berdiri setelah Jenderal Soeharto, menurut mereka, melakukan kudeta dengan bantuan CIA. Dia sama sekali tidak bicara tentang peran PKI dalam Gestapu dan pembantaian para jenderal.

Mao dan Deng

Sebagai seorang mantan aktivis yang waktu itu masih merasa ikut punya andil mendirikan Orde Baru, saya kesal mendengar "kuliahnya" sembari telunjuknya mengapung tidak jauh dari jidat saya. "Dari mana semua omong kosong ini kau dengar?" tanya saya dengan kemarahan yang tertahan-tahan. "Saya mahasiswa Prof. Wertheim," katanya. "Wertheim itu seorang ahli sosiologi dan sejarah yang sangat tahu Indonesia. Apa kau tidak percaya kepadanya?" Karena sudah tidak tahan, saya lantas saja menyalak: "Eh, sampaikan kepada Wertheim, dia boleh berteori dan berpendapat apa saja di Amsterdam, tapi saya yang turun-temurun hidup di Indonesia sudah capek miskin. Dari kakek moyang saya di zaman kolonial sampai saya di zaman Sukarno, semua hidup miskin. Saya sudah bosan miskin. Kalau untuk terhindar dari kemiskinan negeri saya terpaksa menerima bantuan dari Amerika, itu jauh lebih baik dibanding tetap miskin dengan mengikuti nasihat Profesormu itu." Harap diingat, waktu itu masih perlu sekian tahun sebelum Mao meninggal dan Deng Xioping tampil memimpin Tiongkok. Berkat kepemimpinan Deng itulah, Tiongkok kemudian menjadi kaya dan makmur seperti sekarang.

Sikap kekiri-kirian memang sedang marak di Eropa waktu itu. Perang Vietnam sedang seru-serunya, dan demo anti-Amerika terjadi di mana-mana. Tokoh demo anti-Amerika di Paris adalah Jean Paul Sartre, sastrawan dan filosof Prancis terkemuka, sedangkan di London tokohnya adalah filosof terkemuka Inggris, Bertrand Russel. Menarik untuk diingat bahwa pada saat yang sama di Amerika Serikat juga berkembang aksi-aksi anti-Perang Vietnam oleh mahasiswa dan pemuda yang dikenal sebagai "generasi bunga". Semua pergolakan itu bisa kami saksikan lewat televisi hitam putih yang terletak di ruang duduk tempat penampungan kami. Nah, Indonesia yang baru saja memberantas PKI tidak luput jadi sasaran. Saya rajin mendatangi debat-debat tentang Indonesia yang umumnya diadakan dan didominasi orang-orang kiri itu.

Saya hadir dalam sebuah debat di Universitas Amsterdam dengan pembicara Dr. Jan Pluvier dan Ernest Utrecht. Pluvier adalah seorang yang di negerinya dianggap sebagai ahli Indonesia, sementara Utrecht adalah seorang pelarian dari Indonesia yang pekerjaan terakhirnya adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Utrecht terkenal karena keputusannya membekukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Fakultas Hukum yang dipimpinnya. Indo-Belanda ini sebenarnya bukan orang Komunis, dia hanya seorang nasionalis radikal yang bertindak menguntungkan orang Komunis. Tapi, menjelang Gestapu memang sulit membedakan antara mereka yang nasionalis radikal dan mereka yang Komunis. Waktu itu kadang-kadang kaum nasionalis radikal malah lebih galak daripada PKI. Ketika menghadapi Manifes Kebudayaan, "Manikebu" menurut PKI, kaum nasionalis radikal seperti Sitor Sitomurang dan Bagin, dua tokoh Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), organisasi kebudayaan PNI, kadang-kadang tampil lebih galak daripada tokoh-tokoh Lekra/PKI sendiri.

DI KEMUDIAN HARI, terutama setelah saya menyelesaikan pendidikan di Ohio, sikap saya terhadap Negeri Belanda dan negara

penjajah pada umumnya berangsur berubah. Kalau dulu saya menyalahkan mereka, sekarang saya sudah bisa dengan jernih melihat persoalan dan karena itu cenderung menyalahkan negara-negara terjajah itu sendiri. Dulu mudah dijajah, kini gampang menjadi kaki tangan kapitalisme dan negara-negara maju. Dari zaman kolonial hingga masa merdeka, watak sebagian besar orang-orang di bekas negara jajahan itu belum banyak berubah. Mungkin inilah yang lazim disebut "mental *inlander*". Ciri utamanya adalah selalu kagum secara berlebihan, terpukau, kurang percaya diri, dan karena itu lalu gemar meniru sesuatu yang datang dari luar sana.

Dalam urusan penjajahan atau kolonialisme ini, saya selalu teringat Karl Marx. Tidak berbeda dengan para penjajah itu sendiri, Marx melihat kolonialisme membawa kemajuan kepada bangsa-bangsa yang terbelakang, yang berperadaban rendah di mata orang Barat. Marx melihat kolonialisme sebagai suatu kewajaran saja, suatu yang tak terhindarkan dalam suatu waktu perjalanan sejarah perkembangan bangsa-bangsa. Mengapa terjadi kolonialisme? Mengapa India bisa dijajah Inggris? Ketika pertanyaan ini diarahkan kepada Marx, jawabnya singkat, "Bangsa dengan peradaban yang lebih tinggi selalu mengalahkan bangsa yang berperadaban lebih rendah."

Ada saatnya bangsa-bangsa di luar Eropa mencapai peradaban tinggi. Tiongkok, India, Persia, Mesir, Arab/Islam, pernah mencapai tingkat demikian. Dengan peradaban yang tinggi, misalnya, Islam pernah menduduki sebagian Eropa. Peninggalan peradaban Islam itu masih bisa kita saksikan di Spanyol sekarang. Peradaban-peradaban ini berangsur runtuh ketika peradaban lain tampil lebih mampu menjawab tantangan dibanding dengan peradaban-peradaban tua yang telah ada sebelumnya.

Peradaban Barat modern adalah contoh yang menarik. Melalui Abad Pencerahan, Eropa berkembang dengan cepat ketika peradaban-peradaban tua yang mendahuluinya telah mandek. Kemajuan luar biasa yang mereka capai itulah yang mendorong Eropa menjelajahi dunia untuk mencari bahan baku bagi industri,

sembari juga mencari pasar bagi hasil produksi mereka. Dalam penjelajahan itulah, Barat menyadari betapa majunya mereka dan betapa terbelakangnya dunia Timur. Akhir cerita, mereka mengolonisasi dan mengeksploitasi bagian dunia yang terbelakang tersebut.

Dalam hubungan ini menarik membandingkan dua negara kolonalis, Belanda dan Inggris. Negeri Belanda yang pedagang dan Inggris yang industrialis. Kalau Belanda menjadikan Indonesia sebagai kebun besar yang ditanami apa saja yang laku di pasar dunia, Inggris terutama menjadikan India pasar besar bagi hasil industrinya. Maka yang diperlukan oleh Belanda adalah kuli untuk bekerja di perkebunan, sedangkan Inggris memerlukan kelas menengah untuk mengonsumsi barang-barang *Made in England.* Menyadari sifat kolonialisme Inggris yang industrialis itulah, maka perjuangan kemerdekaan India antara lain diarahkan Mahatma Gandhi ke usaha boikot barang-barang buatan Inggris. Dengan latar belakang seperti inilah, kita harus mengerti gerakan menenun sendiri bahan pakaian orang India (satyagraha) yang dipelopori Gandhi. Sejak abad ke-19, India memang merupakan salah satu konsumen tekstil buatan Manchester, Inggris.

Tidak Bisa Melupakan Takdir Alisyahbana

Kalau dulu saya melihat Belanda lebih sebagai "perampok", yang pada masa lalu menguras kekayaan Tanah Air saya, kini saya cenderung berbalik mengagumi negeri kecil di ujung utara Eropa yang dingin itu. Dengan jumlah manusia yang terbatas, dan dengan persenjataan yang kadang tidak terlalu berbeda dengan senjata milik kerajaan anak negeri, Belanda bisa menundukkan untuk kemudian menguasai sekumpulan kerajaan, sejumlah besar manusia dan menguras begitu banyak kekayaan Nusantara untuk waktu lama. Rahasia kemenangan Belanda waktu itu? Peradaban yang lebih tinggi.

Dan sekian puluh tahun sebelum terpaksa angkat kaki, Belanda telah pula berhasil menyatukan seluruh Nusantara dan

karena itu—tanpa mereka rencanakan—pada suatu waktu di kemudian hari terbuka kesempatan bagi terciptanya sebuah bangsa baru yang kini dikenal dunia sebagai Indonesia. Lahirnya bangsa baru, Indonesia, adalah akibat meningkatnya peradaban anak-anak jajahan, suatu tingkat yang tidak pernah dicapai para raja dan pemimpin agama yang pada masa lalu juga memerangi Belanda.

Saya kadang berpikir apakah akan ada bangsa Indonesia seperti yang kita kenal sekarang seandainya Jenderal Van Heutz—Gubernur Jenderal dan mantan Panglima Perang penaklukan Aceh—tidak melakukan penaklukan berbagai kerajaan kecil yang nyaris masih independen hingga awal abad ke-20. Tidak sulit membayangkan betapa akan susahnya mengembangkan konsep Indonesia sebagai suatu konsep yang mempersatukan bangsa pluralistik yang mendiami Nusantara seandainya Van Heutz belum mempersatukan wilayah yang dinamainya Hindia Belanda dan secara terpusat mengontrolnya dari Batavia.

Jangan salah sangka. Saya tidak mengatakan Van Heutz berniat menciptakan Indonesia. Namun, jelas dia tidak pernah memperhitungkan dinamika dari utuh dan bersatunya Hindia Belanda yang dikontrol dari Batavia. Dia cuma berpikir praktis. Hindia Belanda dia persatukan untuk dikendalikan dari Batavia (Jakarta) agar lebih mudah dikontrol dan dipertahankan dari usaha kaum kolonialis lain yang ingin merebutnya. Yang tidak disadarinya, usaha itu malah merupakan langkah awal dari bergulirnya dinamika yang kemudian mentransformasikan Hindia Belanda menjadi Indonesia dalam waktu tidak sampai setengah abad. Tanpa disadarinya, sang Gubernur Jenderal telah menyiapkan prasarana bagi bangkitnya sebuah bangsa baru di kawasan yang lama dikuasai pemerintahan kolonial Belanda. Pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah *unintended result* dari kebijakan Gubernur Jenderal Van Heutz.

Sejarah telah mengajarkan, negeri kita dijajah karena tingkat peradaban kita lebih rendah. Bangsa Belanda datang ke Nusantara mula-mula hanya untuk berdagang. Tapi secara berangsur,

berdagang dengan menggunakan kekuatan militer untuk akhirnya, sebagai negara, resmi menjajah. Seandainya pun Belanda tidak berhasil untuk lebih dahulu menguasai Nusantara, Inggris, Spanyol, Portugis, atau Prancis tentu akan memanfaatkan kondisi rendahnya peradaban kita masa itu. Bahkan menjelang pertengahan abad ke-20, Jepang sebagai pendatang baru di gelanggang kolonialisme, masih berusaha menjajah dan menguras kekayaan Tanah Air kita.

KALAU KITA SUDAH BICARA tentang masa lalu sebagai bangsa, saya tidak bisa melupakan Sutan Takdir Alisyahbana. Tokoh Pujangga Baru itu berkali-kali menjelaskan dan berusaha menyadarkan kita mengenai kebudayaan lama kita yang disebutnya sebagai kebudayaan kalah. "Apa yang mau kita banggakan dari kebudayaan lama itu?" tanya Takdir. Yang sebenarnya dibicarakan Takdir Alisyahbana adalah peradaban, bukan kebudayaan. Dengan jalan pikiran demikian, Takdir berseru agar Indonesia belajar ke Barat dan meninggalkan cara berpikir Hindu dan Buddha yang statis. Seruan yang sama kemudian muncul juga dari Pramoedya Ananta Toer yang mudah terbaca dalam buku-bukunya *Bumi Manusia*, *Anak Semua Bangsa*, *Jejak Langkah*, dan *Rumah Kaca*.

Tokoh Minke dalam novel-novel Pramoedya itu adalah personifikasi manusia Hindia Belanda yang berjuang meninggalkan peradaban rendah bangsanya yang hingga saat itu masih belum menemukan jalan membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Minke mengaku belajar dari Barat dan bertekad meninggalkan semua budaya lemah yang meninabobokan orang pribumi sehingga mereka terus dikuasai para penjajah. Sama seperti Marx, Takdir Alisyahbana, Pramoedya juga berpendapat bahwa semua bangsa yang terbelakang akan dijajah oleh bangsa yang lebih maju. Saya sangat sepakat dengan pandangan demikian.

Pada tahun tujuh puluhan, penyair terkenal W.S. Rendra membuat marah sejumlah tokoh masyarakat Jawa. Pasalnya, sang Burung Merak itu menyebut kebudayaan Jawa masa kini sudah ba-

gaikan “kasur tua”. Yang dibicarakan Rendra sebenarnya sama dengan yang diungkapkan Takdir dan Pramoedya: peradaban Indonesia yang masih rendah dengan segala akibatnya dalam pergaulan dunia.[]

Bertemu Kapten Westerling di Amsterdam

Westerling setelah pensiun di Negeri Belanda pada tahun lima puluhan.

Pada November 1987, mantan Kapten KNIL Raymon Turk Westerling meninggal dunia di Amsterdam. Kematian itu bukan berita penting di Negeri Belanda. Di sana, di tanah airnya, nama Westerling sudah lama tidak terdengar. Pada umumnya orang Belanda mengenangnya dengan rasa malu.

Namun, di Sulawesi Selatan nama perwira pasukan khusus Belanda itu masih memerlukan waktu lama lagi sebelum mungkin menghilang dari ingatan orang banyak. Westerling adalah komandan pasukan khusus yang memimpin operasi pembantaian sejumlah besar pejuang di Sulawesi Selatan pada Desember 1946. Secara resmi korban penjagalan Westerling mencapai 40.000 jiwa. Tapi, usaha pelacakan yang dilakukan oleh Drs. Andi Makmur Makka, M.A. pada 1970 sulit menemukan jejak kematian lebih dari 3.000 jiwa. Sejarahwan Dr. Anhar Gonggong menyebut angka sekitar 10.000, "Tapi, itu memang tidak semuanya korban Westerling."

Westerling sendiri mengaku kepada saya hanya membunuh 463 orang. Tapi, tidak jelas jumlah 463 itu apakah korban yang dibunuhnya sendiri atau termasuk yang dihabisi anak buahnya.

Westerling memang tidak selalu hadir pada setiap momen pembantaian. Siapa yang memerintahkan pembunuhan itu? "Saya sendiri," jawab Westerling. Dia menjelaskan, "Dalam kemiliteran, kita hanya diperintahkan, tapi kitalah yang memutuskan bagaimana menjalankan perintah itu. Operasi-operasi itu berjalan sendiri-sendiri dan saya bertanggung jawab atas semua kejadian."

Mengapa pembunuhan itu harus dilakukan? "Pertama sekali harus saya katakan bahwa saya sendiri tidak senang dengan pembunuhan-pembunuhan itu. Tapi harus dilakukan sebab sebelum saya datang, rakyat sudah habis diteror oleh gerombolan-gerombolan, sementara tentara di bawah pimpinan [Kolonel] De Vries tidak bisa berbuat apa-apa. Akibatnya, rakyat kehilangan pegangan dan memihak kaum ekstremis. Bukan karena simpati, melainkan lantaran takut. Untuk mengembalikan kepercayaan penduduk, saya harus melakukan suatu tindakan."

Penjelasan dari pihak kaum Republik waktu itu saya dapatkan dari Burhan, seorang tokoh yang berjuang bersama Bung Hatta dalam Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru). Karena kegiatannya itulah, Burhan dibuang ke Digul bersama Bung Hatta dan Bung Syahrir. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Burhan bersama hampir semua orang buangan di Digul diungsikan oleh Belanda ke Australia. Burhan tidak bisa menolak bekerja sama dengan pemerintahan darurat Hindia Belanda di Australia. "Kalau menolak, kita dicurigai sebagai simpatisan Jepang," katanya mengenang masa buangannya di Australia.

Dalam pembentukan PBB di San Fransisco, Burhan diikutsertakan sebagai anggota delegasi Hindia Belanda bersama Van Mook dan Van Royen. Pulang ke Indonesia setelah Desember 1945, Bung Karno meminta Burhan tetap berada di sekitar Van Mook, pemimpin pemerintahan kolonial Belanda di Batavia waktu itu. "Menurut Bung Karno, dengan demikian saya bisa berbuat banyak kepada Republik." Nah, dari kedudukan di sekitar Van Mook itulah, Burhan berangkat ke Makassar sebagai anggota tim pencari fakta terhadap akibat operasi pembantaian Westerling tersebut.

Menurut Burhan, ceritanya bermula pada pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai salah satu negara boneka ciptaan Van Mook. "Bagian yang paling tidak dikuasai Belanda di negara-negara boneka itu adalah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan memang tak henti-hentinya mengirimkan pemuda untuk berjuang di Jawa. Inilah yang membuat Jenderal Spoor marah kepada De Vries, komandan tentara Belanda di Makassar. Spoor lalu memutuskan mengirimkan teman lamanya, Westerling bersama 900 anak buahnya ke Makassar." Keputusan Spoor itu tampaknya tidak dikonsultasikan dengan Van Mook, pemimpin pemerintahan. Itulah yang menyebabkan dikirimnya misi pencari fakta tersebut.

Akan tetapi, apakah Jenderal Spoor memerintahkan pembunuhan seperti yang dilakukan Westerling tersebut? Menurut temuan Burhan, "Soal membunuh banyak tentu tidak. Spoor hanya memberi kekuasaan kepada Westerling melakukan apa saja yang dianggapnya cocok untuk mengatasi keadaan yang gagal ditangani De Vries. Untuk tugas itu, Westerling tidak bertanggung jawab kepada siapa pun di Makassar." Hal menarik lainnya yang diceritakan Burhan kepada saya adalah mengenai pasukan yang dipakai Westerling melancarkan terornya di Sulawesi Selatan. Sebagian besar anak buah Westerling ternyata bukan orang Belanda. Artinya, orang-orang Indonesia juga. "Nah, ini satu hal yang menarik. Orang-orang ini kebanyakan bertindak kejam. Soalnya mereka sangat benci Sukarno, sebab katanya, mereka pernah menderita ketika zaman Jepang sebagai Romusha, Heiho, dan sebagainya yang semuanya hasil kerja sama politik Sukarno dengan Jepang waktu itu. Orang-orang ini sangat anti-Republik, sebab mereka anti-Sukarno."

Sebagai anak kecil di Parepare, yang masih terekam dalam ingatan saya dari peristiwa pembantaian Westerling adalah adegan pasukan KNIL menggiring anggota masyarakat untuk dikumpulkan di stasiun kendaraan bermotor (kandang, menurut istilah bahasa Bugis waktu itu) tempat penembakan dilaksanakan. Tidak lama kemudian, di jalan yang sama, di depan rumah saya, ke

arah kebalikannya, beriringan perempuan berjalan menangis meraung-raung. Pembantaian telah terjadi. Penembakan memang sengaja dilakukan di depan mata banyak orang yang dikerahkan ke medan pembantaian. Tujuannya, memperluas dampak teror.

Adegan seperti yang saya masih ingat itu terjadi juga pada hari-hari yang sama di berbagai kota dan desa di Sulawesi Selatan. Salah satu desa yang terkenal sehubungan dengan pembantaian itu adalah Suppa, dulu bagian dari Kabupaten Parepare, tapi kini telah digabungkan ke dalam Kabupaten Pinrang. Pemberangkatan pemuda yang bertekad berjuang di Jawa banyak dilakukan dari Suppa. Tokoh penting yang terbunuh di Suppa adalah Datu Suppa Toa (senior), Andi Makkasau, dan Datu Suppa Lolo (junior) Andi Abdullah Bau Massepe. Datu Suppa Toa adalah mantan Datu Suppa, sedangkan penggantinya waktu itu adalah Andi Abdullah Bau Massepe, putra Raja Bone, Andi Mappanyukki.

Kedua bangsawan tinggi Bugis ini memainkan peran besar dalam mengorganisasikan serta mengarahkan gerakan mendukung kemerdekaan Indonesia. Mereka berdua adalah pemimpin kaum Republik yang memprakarsai pertemuan para pemimpin masyarakat untuk menyatakan dukungan kepada Republik Indonesia. Keduanya sangat dihormati dan berpengaruh di wilayah Suppa dan sekitarnya, karena itu banyak sekali pendukungnya. Belanda tahu soal ini. Maka, selain menghabisi kedua Datu tersebut, sekitar hampir 300 orang pejuang Suppa, pengikut mereka, juga dihabisi.

Sebelum operasi Westerling, kedua bangsawan tinggi itu ikut mengatur pertemuan para pemuka masyarakat se-Sulawesi Selatan untuk mencari jalan menyampaikan dukungan kepada Proklamasi lahirnya Indonesia. Salah satu keputusan mereka adalah mengirimkan delegasi menemui Presiden Sukarno yang sudah berada di Yogyakarta waktu itu. Pemimpin delegasi adalah bangsawan muda dari Barru, Andi Mattalatta (kemudian menjadi perwira TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal dan pada masa tuanya lebih dikenal sebagai ayah penyanyi Andi Meriam Mattalatta).

Menurut aturan di Kerajaan Barru, seharusnya Mattalatta menggantikan ayahnya sebagai Raja Barru. Tapi atas "hasutan" Paiso, seorang dari kalangan pergerakan dan kakek Sophan Sophiaan (terkenal sebagai bintang film sebelum pada akhirnya menjadi salah seorang anggota DPR dari Partai Demokrasi Perjuangan, PDIP), Mattalatta menghindari jabatan tersebut. Menurut pengakuan dalam memoarnya, Mattalatta berhasil diyakinkan oleh Paiso bahwa kalau dia menjadi Raja Barru, dirinya hanya akan menjadi kaki tangan Belanda dalam memeras rakyatnya.

MENARIK BAHWA BELANDA masih sempat menghormati kepercayaan setempat yang menganggap *pamali* menumpahkan darah bangsawan tinggi. Akibatnya, Datu Suppa Toa tidak ditembak. Dia ditenggelamkan di Pantai Suppa. Badannya diberati dengan cara diikatkan ke lesung batu, kemudian dilemparkan ke dalam laut. Adapun Bau Massepe, tidak pernah jelas bagaimana matinya, meski sebuah sumber percaya Andi Abdullah dibunuh dengan cara diseret oleh kendaraan militer. Tapi lama setelah operasi teror Westerling tersebut, sejumlah pengikutnya tetap percaya Bau Massepe masih hidup dan berada dalam tahanan Belanda di Irian Barat (sekarang Papua) yang waktu itu memang masih dikuasai Belanda.

Namun, mengapa pembantaian massal? Burhan menyebut pembantaian Westerling tersebut sebagai kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dalam menyiapkan pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT). Negara bagian NIT adalah satu dari sejumlah negara bagian bentukan Van Mook, untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta tidak mewakili aspirasi seluruh penduduk Hindia Belanda. Untuk tujuan itulah segala cara ditempuh Belanda. Mereka ingin menunjukkan bahwa semua penduduk Indonesia Timur, terutama Sulawesi Selatan, mendukung proyek NIT.

Rencana itu tidak berjalan mulus. Meski sebagian besar pemuda pejuang Sulawesi Selatan sudah hijrah berjuang di Jawa, sebagian pejuang tetap bertahan di daerah masing-masing. Me-

reka inilah yang menjadi duri dalam daging Pemerintahan Kolonial Belanda. Meski kecil-kecilan, perlawanan terjadi di mana-mana. Belanda yang kewalahan akhirnya memilih jalan teror demi membungkam aspirasi rakyat yang menolak proyek NIT.

Demi terciptanya keamanan dan ketertiban, pemimpin tentara kolonial Belanda mengirimkan Westerling ke Sulawesi Selatan. Sebelum di Sulawesi Selatan, meski tidak banyak diketahui, Westerling sebenarnya sudah melakukan teror di daerah Medan, tidak berselang lama setelah dia mendarat di Indonesia. Menurut pengakuannya kepada seorang perwira Inggris yang mendarat bersamanya di Medan—sebagaimana yang tertulis dalam majalah *Historia* edisi 7 tahun 2012—Westerling pernah menunggu seorang gerilyawan pulang ke rumahnya. Begitu sang gerilyawan pulang, Westerling menangkapnya, memasukkan ke kamar mandi, memberinya makan, lalu menggorok leher sang gerilyawan hingga putus. Kepala yang sudah terpisah dengan badannya itu dibawanya untuk dipertontonkan kepada para perwira Inggris di Hotel De Boer tempat pasukan Sekutu bermarkas.

Untuk meningkatkan efektivitas terornya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, pembantaian didahului oleh kampanye perang urat saraf dengan menyebarkan kisah tentang Westerling yang kelahiran Turki dan karena itu dikampanyekan sebagai memiliki kekuatan magis. Disebarkanlah cerita bahwa sang Kapten punya ilmu kebal, juga punya ilmu yang memudahkannya mengetahui siapa yang ekstremis, siapa yang perampok, dan sebagainya. Bahwa Westerling kelahiran Istanbul, Turki, pada 31 Agustus 1919, juga jadi bahan kampanye yang efektif di Sulawesi Selatan. Turki di mata rakyat Sulawesi Selatan yang hampir semuanya penganut Islam yang taat, masih salah satu pusat Islam yang mempunyai arti tersendiri waktu itu. Jadi, ketika rakyat sudah dikumpulkan di lapangan terbuka, secara mental mereka sudah ketakutan.

Untuk meningkatkan intensitas teror, Westerling biasanya memilih seseorang dalam barisan rakyat yang telah dikumpulkannya dari berbagai penjuru kota dan desa. Orang yang dipilih

itu dipaksa menunjukkan siapa saja temannya sebagai ekstremis atau perampok. Yang ditunjuk sudah amat ketakutan sehingga tidak bisa membantah dirinya bukan perampok atau bukan ekstremis. Orang tersebut terpaksa menunjuk asal-asalan saja. Tanpa ditanya, orang yang ditunjuk langsung ditembak dengan pistol dari jarak amat dekat. Yang menunjuk juga akhirnya ditembak.

Di sebuah desa di Sulawesi Barat penembakan didahului dengan adegan adu jotos antara seorang yang dituduh sebagai ekstremis dan orang yang dengan terpaksa dan dengan penuh ketakutan ditunjuknya sebagai teman sesama ekstremis. Kalau yang ditunjuk membantah, dia harus memukul yang menunjuknya. Maka berlagalah mereka. Setelah kehabisan tenaga, keduanya dihabisi secara bersamaan dari jarak amat dekat. Dengan cara-cara demikian, semangat perlawanan betul-betul dicoba untuk dilumpuhkan.

WESTERLING TERTAWA ketika saya mengatakan bahwa di Indonesia pendapat umum menyebut 40.000 korban sebagai operasi pembantaiannya. "Tanyakan kepada Sarwo Edhie, Komandan Pasukan Khusus Indonesia, berapa banyak yang bisa dibunuh oleh pasukan khusus dalam waktu singkat," katanya membela diri. Dia hanya mengaku membunuh 463 orang. Apakah yang 463 korban itu semua dihabisi oleh tangan Westerling sendiri? Tidak juga. Di Parepare, misalnya, penembakan kabarnya dipimpin oleh Pembantu Letnan Van der Muilen, salah seorang anak buah Westerling. Di Parepare, 23 orang ditembak di stasiun kendaraan umum. Sebelum ditembak, para partisan Parepare ini terlebih dahulu ditahan pada rumah tahanan militer (asrama Polisi Militer sekarang). Salah seorang dari 23 partisan itu adalah Makkarumpa Daeng Parani yang tiga putranya ikut berjuang melawan Belanda. Satu ke Jawa, dua lainnya di Sulawesi Selatan. Di kemudian hari, dua dari tiga putranya itu menjadi pejabat penting di Sulawesi Selatan. Satu menjadi Wali Kota Parepare (Andi Mannaungi), yang lainnya menjadi Gubernur Sulawesi Selatan (Brigjen TNI Andi Oddang).

Tidak penting apakah langsung dihabisi oleh Westerling atau anak buahnya, cara dan tujuan pembantaian mereka sama saja. Pembantaian adalah cara melaksanakan teror. Tujuan teror adalah membersihkan potensi pengganggu usaha pembentukan NIT. Belanda waktu itu memang membentuk banyak negara bagian, dan yang terbesar dan terluas wilayahnya adalah NIT, sebab selain meliputi Sulawesi, juga meliputi wilayah di sebelah timurnya. Tapi, hanya untuk membentuk NIT-lah, Belanda memerlukan gerakan teror. Mengapa? Tampaknya hal ini tidak terpisahkan dari semangat perlawanan orang-orang Bugis, Mandar, dan Makassar yang baru beberapa puluh tahun sebelumnya terlibat dalam Perang Bone yang dilancarkan oleh Gubernur Jenderal Van Heutz pada awal abad ke-20. Dalam usahanya menundukkan dan mempersatukan wilayah Hindia sebagai jajahan Belanda, Van Heutz, jenderal penakluk Aceh, mengadakan perang penaklukan di berbagai penjuru Hindia Belanda.

Bone, seperti juga Aceh, Klungkung di Bali, dan sejumlah daerah lainnya, semua kemudian ditaklukkan oleh tentara yang dikirim oleh Van Heutz. Tapi, semangat perlawanan tidak berhasil dilumpuhkan. Di Sulawesi Selatan, Belanda tidak pernah menemukan ketenangan dalam usahanya menjajah kembali Indonesia setelah Jepang terusir. Belanda bahkan tidak berani menduduki Aceh setelah Jepang menyerah.

Khusus untuk Sulawesi Selatan, sejarah perlawanannya bisa ditarik jauh ke belakang. Ketika sekian abad silam armada Cornelis Speelman berhasil menaklukkan Sultan Hasanuddin, para mantan tentara Hasanuddin melanjutkan perlawanan jauh dari kampung halaman mereka. Di Pulau Jawa, sebagian mereka menjadi tentara Trunojoyo, yang lainnya menjadi tentara di Kesultanan Yogyakarta (Pasukan Daengan), sebagian menjadi perompak yang mengganggu Belanda di Selat Malaka. Di antara para bekas serdadu Hasanuddin itu juga ada yang memilih mengabdi sebagai pengawal pribadi Raja Siam (Thailand sekarang), sementara sebagian lainnya berimigrasi ke Sumatra, Kepulauan Riau, dan Semenanjung Melayu.

Semangat tak kenal menyerah itulah yang bangkit kembali setelah Republik Indonesia lahir pada 1945. Kini mereka melawan Belanda tidak lagi sebagai orang Bugis, Makassar, atau Mandar. Mereka melawan sebagai orang Indonesia untuk menegakkan dan mempertahankan Tanah Air Indonesia dari usaha kolonial Belanda melanjutkan penjajahannya. Karena ruang gerak terbatas dan tentara Belanda, dengan bantuan tentara Sekutu Australia, cepat melakukan konsolidasi, para pejuang menjadi sulit bergerak di kampung halaman mereka. Inilah penjelasannya mengapa mereka berbondong-bondong menyeberang ke Pulau Jawa, menjadi pejuang di sana. Nenek moyang mereka dulu berangkat ke Jawa menjadi pasukan Trunojoyo atau pasukan Daengan (Yogyakarta), kini mereka ke Pulau Jawa menjadi tentara Republik Indonesia yang baru lahir. Sisanya dalam jumlah kecil tetap bertahan melawan Belanda di Sulawesi Selatan. Yang bertahan inilah yang menjadi sasaran teror Westerling.

Ekstremis dan Pengikut Sukarno

Penjelasan Westerling mengenai pembantaian pada 1946 itu dalam wawancaranya dengan saya adalah bahwa mereka ditugaskan membasmi para perampok yang merajalela waktu itu. Tapi, menurut Burhan, "Itu hanya alasan. Memang ada perampokan terjadi, seperti di Parepare, tapi itu perampokan gudang Belanda. Kita perlu alat-alat [yang tersimpan dalam gudang-gudang itu]. Dan kalau ada perampokan sebagai tindak kriminal, itu hanya ekses yang tidak cukup jadi alasan untuk membunuh sekian banyak orang." Sumber lain mengatakan, sebagian aksi perampokan itu merupakan hasil rekayasa intelijen Belanda untuk meneror penduduk dan para pejuang.

Pada masa Revolusi, aksi perampokan sebenarnya terjadi di banyak tempat di Indonesia. Setiap perubahan sosial politik memang selalu memicu munculnya tindakan kriminalitas. Di sekitar Jakarta, misalnya, para perampok juga merajalela pada bulan-bulan pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan. Sasaran mereka

toko-toko dan harta benda tuan tanah Tionghoa. Tapi, kalau di sekitar Jakarta persoalannya diselesaikan oleh TNI dan barisan laskar pejuang, di Sulawesi Selatan justru menjadi alasan bagi Westerling membantai mereka yang mendukung Republik. Ketika saya desak dengan bukti-bukti bahwa yang terbunuh kebanyakan tokoh pejuang, Westerling berkilah dan bersikeras mengaku membunuh para perampok. Tapi, dia tidak membantah bahwa beberapa tokoh pejuang ikut terbantai. "Tapi, mereka itu ekstremis dan pengikut Sukarno, kaki tangan Jepang," katanya.

VERSI LAIN DARI LATAR BELAKANG TEROR WESTERLING saya dengar di Negeri Belanda pada 1969-1970. Orang-orang Belanda yang pernah lama di Indonesia melihat teror Westerling sebagai bagian dari sebuah rencana sejumlah orang Belanda, totok dan peranakan, yang ingin Indonesia merdeka dari Negeri Belanda, tapi negeri yang merdeka itu mereka rencanakan berada di bawah kepemimpinan mereka, para Indo dan Belanda totok tersebut. Itulah, katanya, alasan mengapa mereka sangat membenci kaum Republik dan memandang Sukarno dan pengikutnya sebagai kaum ekstremis.

Salah satu bukti yang ditunjukkan mereka yang percaya penjelasan ini adalah operasi Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung pada 1950. Gerakan yang dipimpin Westerling itu berhasil secara mendadak membunuh sejumlah perwira Siliwangi. Salah satu yang terbantai adalah Letnan Kolonel Lembong, mantan tokoh militer Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS). Setelah membantai di Bandung, mereka mencoba memasuki Jakarta dengan rencana mengambil alih pemerintahan Republik Indonesia Serikat.

Perwira Siliwangi korban pembantaian APRA pimpinan Westerling, Bandung , 1950.

Mereka gagal. Jakarta tetap aman, dan Westerling berhasil melarikan diri ke Singapura. "Westerling dan teman-temannya bukan ingin mengembalikan kolonialisme Belanda. Mereka ingin Indonesia merdeka. Tapi, di bawah pimpinan mereka, para Indo dan Belanda totok." Sumber saya itu menyebut Van Mook sebenarnya bersimpati kepada gagasan ini. Van Mook memang lahir di Semarang.

Westerling yang pensiun dari ketentaraan pada November 1948, memutuskan menjalani masa pensiunnya sebagai pengusaha swasta di bidang pertanian di Jawa Barat. Dia kawin dengan seorang janda keturunan Prancis dan menetap di sekitar Puncak. Tapi, Westerling ternyata tidak bisa menahan diri untuk tidak terlibat dalam gerakan Ratu Adil dan menerima posisi sebagai pemimpin Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Seperti diketahui kemudian, APRA bukan saja bekerja sama dengan Darul Islam (DI) pimpinan Kartosuwiryo, melainkan juga dengan segala elemen anti-Republik Indonesia, yakni sejumlah kawula Belanda, totok dan Indo, serta kaum federalis yang menolak gerakan pembubaran Republik Indonesia Serikat.

Kaum Republik kemudian berhasil menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah membubarkan RIS pada 1950. Dalam kemelut APRA ini, Sultan Hamid dari Pontianak terlibat. Sang Sultan ditangkap, diadili, dan dihukum 10 tahun penjara. Karier politik Hamid berakhir sejak itu dan Kesultanan Pontianak berangsur kehilangan pamor. Di kemudian hari terungkap bahwa Pangeran Bernard, suami Ratu Juliana, Ratu Belanda masa itu, juga terlibat dalam konspirasi yang berada di balik kegiatan APRA tersebut.

Gagasan seperti yang dituduhkan kepada Westerling dan teman-teman komplotannya ini tampaknya sudah ada pada awal abad ke-20. Dalam novel Pramoedya Ananta Toer, *Rumah Kaca*, yang berkisah tentang Hindia Belanda pada awal abad ke-20, diceritakan mengenai seorang Belanda, D. Douwager, yang baru datang dari Afrika Selatan, suatu negara yang dibangun oleh para kolonialis Belanda. Negeri orang Belanda di Afrika Selatan ini

barangkali bisa dibandingkan dengan koloni orang Inggris di Benua Amerika yang kemudian merdeka dengan nama Amerika Serikat, yakni setelah orang-orang di koloni itu membebaskan diri dari kontrol London. Atau, mungkin juga sama dengan orang-orang buangan Inggris ke Benua Australia yang kemudian juga mendirikan negara sendiri dengan melepaskan diri dari kekuasaan London.

Tokoh Douwager ini digambarkan Pramoedya sebagai orang yang datang dari Afrika Selatan dengan gagasan membangun sebuah negara orang-orang Belanda di Hindia yang bebas dari kontrol Den Haag. Terhadap gagasan tersebut, Pangemanann, seorang pejabat tinggi pemerintahan kolonial Hindia Belanda dalam novel tersebut berkomentar, "Tuan rupanya lupa, Belanda di Hindia tidak membuka koloni seperti di ujung selatan benua hitam sana. Peranakan Belanda di Hindia pun sangat sedikit. Belanda tidak seperti Prancis."

Sejak menapakkan kakinya di Indonesia, jumlah orang Belanda memang tidak pernah berjumlah banyak. Tampaknya alasan cuaca yang panas dan lembap merupakan penyebab mengapa orang Belanda yang cukup lama menguasai Indonesia atau Hindia, tidak pernah berniat menjadikan tanah jajahan mereka sebagai koloni bagi orang-orang Belanda dan para keturunan mereka seperti yang berhasil mereka lakukan di Afrika Selatan. Terbatasnya jumlah orang Belanda di Hindia itulah yang tidak memungkinkan mereka membikin negara orang Belanda lepas dari negeri asal mereka seperti yang dibangun oleh orang Inggris di Amerika dan Australia. Di Aljazair, yang berpenghuni banyak orang Prancis, juga pernah ada usaha mendirikan Negara Prancis yang bebas dari kontrol Paris. Perlawanan orang-orang Aljazair berakhir dengan kemenangan penduduk asli dan terusirnya orang-orang Prancis.

Banyak cerita lain yang timbul sebagai akibat kurangnya jumlah orang Belanda yang mengurus Hindia sebagai wilayah jajahannya. Ketika membangun tentara, misalnya, Belanda menggunakan banyak tentara bayaran yang mereka datangkan dari Afrika

serta dari sejumlah negara Eropa. Serdadu-serdadu bayaran itu sebagian besar tidak balik ke negara asalnya. Mereka menetap di Hindia dan kawin-mawin dengan perempuan-perempuan Indonesia. Inilah yang, antara lain, menjelaskan adanya macam-macam keturunan di Indonesia. Pada umumnya yang berkulit putih hanya dikenal sebagai Indo-Belanda. Padahal, banyak juga yang Indo-Swiss, Indo-Jerman, Indo-Prancis, dan Indo-Slavia. Orang Indonesia yang berkulit hitam dan berambut keriting juga tidak semuanya berasal dari Papua, sebab juga ada yang keturunan tentara kolonial asal Afrika.

Berkembangnya budaya pergundikan serta munculnya profesi Nyai juga bersumber pada kelangkaan orang Belanda di Hindia waktu itu. Kebanyakan pejabat pemerintah dan swasta Belanda itu datang pada usia muda dengan status bujangan. Perempuan Belanda baru mulai datang dalam jumlah relatif besar setelah Terusan Suez dibuka menjelang akhir abad ke-19.

Mudah Mendapatkan Nyai

Kekuasaan mereka yang besar, duit yang banyak, dan status sosial yang tinggi menempatkan tuan-tuan itu pada posisi mudah mendapatkan perempuan-perempuan Indonesia untuk dijadikan Nyai, yakni semacam istri tapi tidak dikawini secara sah. Menurut suatu penelitian, hingga belasan tahun terakhir abad ke-19, separuh lelaki Belanda masih hidup bersama Nyai masing-masing. Pergundikan seperti ini berlangsung lama setelah tuan-tuan besar itu bisa mendatangkan istri dari Holland. Mereka yang tertarik tentang Nyai ini, saya persilakan membaca novel Pramoedya yang berjudul *Bumi Manusia* atau menonton sandiwara *Nyai Dasima* yang di sekitar Jakarta masih sering menjadi *repertoire* lenong, sandiwara tradisional Betawi.

UDARA BERANGSUR HANGAT setelah musim yang baru tiba perlahan mengusir udara dingin yang mencekam Negeri Belanda selama berbulan-bulan. Waktu itu Juni, awal musim panas 1970,

beberapa hari sebelum saya balik ke Jakarta. Setelah sekian bulan berusaha mencari kontak, akhirnya berhasil juga. Tidak terlalu mudah. Pada umumnya orang Belanda yang mungkin mengetahui alamatnya menghindar berbagi alamat dengan saya. Macam-macam alasan yang dikemukakan. "Buat apa jumpa pembunuh itu," kata seseorang. "Westerling mestinya sudah lama mati, agar kami tidak terus diingatkan oleh tindakannya yang memalukan di Indonesia dulu," kata yang lainnya. Dari berbagai orang itu saya juga mendapat sejumlah cerita yang tidak menggembirakan tentang kehidupan Westerling selepas petualangannya di Indonesia.

Dia pernah mencoba menjadi penyanyi opera, tapi tidak berhasil. Pernah mencoba menjadi penulis, juga tidak berhasil. Hidup perkawinannya juga gagal. Dia hidup dalam lingkungan para bekas tentara Belanda yang pernah bersama dirinya di Indonesia dulu.

Entah dari siapa, saya sudah lupa, tapi akhirnya suatu hari saya dapatkan juga nomor teleponnya. Nomor telepon itu memang tak tercatat dalam buku telepon. Ketika nomor itu saya hubungi pada malam hari, Westerling sendiri yang menerimanya. Percakapan berlangsung dalam bahasa Inggris. Memperkenalkan diri, saya kemudian cerita tentang diri saya sebagai wartawan yang sedang *training* di Amsterdam, dan bahwa saya kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan. Saya jelaskan juga bahwa namanya masih terus disebut-sebut di Indonesia. "Paling sedikit sekali setahun nama Anda dibicarakan, yakni pada 11 Desember, hari peringatan dari apa yang dikenal di Indonesia sebagai korban 40.000." Dengan nada yang terdengar sedih, dia berkata, "Tapi di sini saya tersisih dan dianggap aib yang memalukan orang Belanda."

Westerling bersedia menerima saya. Di apartemennya? Bukan. "Apartemen saya kecil dan berantakan," katanya. Kami akhirnya sepakat jumpa di sebuah restoran yang terletak di belakang *Ryks Museum*, daerah yang cukup ramai di Amsterdam. Pada hari dan jam yang telah disepakati, saya tiba dengan taksi di

depan restoran tersebut. Waktu itu kesibukan makan siang sedang berlangsung. Turun dari taksi, di depan restoran saya melihat seorang berbadan tinggi besar, mengamati saya dengan saksama. Dia pasti bekas tentara dan mungkin anak buah Westerling di Indonesia dulu. Begitu dugaan saya.

Kemudian, ternyata terkaan saya benar. Mendekati pintu restoran, saya mengucapkan selamat siang sembari berkata, "*Don't worry, I am unarmed.*" Saya perlihatkan pinggang saya dengan mengangkat jas yang menutupinya. Dia memperhatikan gerak saya dengan saksama. Yakin aman, menyalami saya dengan genggaman yang kuat sambil mengucapkan, "Selamat datang," dalam bahasa Indonesia yang tidak jelek. Bekas tentara Belanda itu dengan ramah mengantar masuk dan mengarahkan saya ke sebuah meja tempat Westerling sudah duduk di tengah restoran.

Westerling, 1970.

Sembari berjalan ke arahnya, saya memperhatikan bangun tubuh dan wajah mantan kapten pasukan khusus Belanda itu. Mengapa saya teringat pada wajah serigala? Tubuhnya kekar dengan otot yang kelihatan masih kencang. Usianya 51 tahun waktu itu. Sembari mendekati meja, saya tersenyum dan mengulurkan tangan. Westerling berdiri, tersenyum, dan menerima uluran tangan saya. "Silakan duduk," katanya dalam bahasa Inggris. Sementara itu, hampir seluruh isi restoran mengarahkan pandangannya kepada saya. Mereka mungkin sudah tahu seorang wartawan Indonesia akan mewawancarai senior mereka.
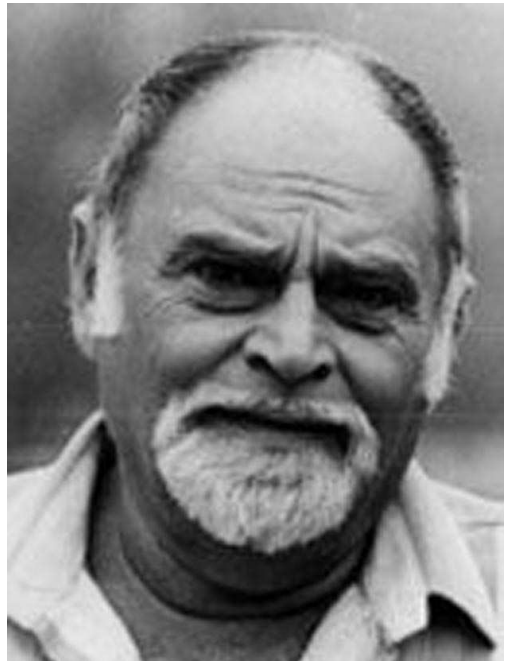
Menciptakan Mata-Mata

Agar Westerling lebih tenang, saya yakinkan dia bahwa saya datang dengan tujuan baik, yakni sebagai wartawan yang akan membuka kesempatan baginya menguraikan versinya mengenai pembantaian yang dulu dilakukannya di Sulawesi Selatan. "Anda wartawan Indonesia pertama yang menemui saya," katanya. Dia membuka pembicaraan sembari melihat ke sekelilingnya, "Inilah lingkungan dan teman-teman saya sekarang. Kami dulu sama-sama di Indonesia. Masih selalu kumpul dan tetap suka makan cabe rawit seperti di Indonesia dulu." Dengan setengah bergurau dan setengah memprovokasi, saya mulai pembicaraan, "Ayah saya hampir saja Anda bunuh di Amparita. Untung dia sempat melarikan diri karena ibu saya mendesaknya menyingkir ke Kalimantan. Ibu saya punya firasat buruk ketika para mata-mata bergantian datang mencari suaminya."

Mereka yang dikenal sebagai mata-mata Belanda tersebut amat menakutkan rakyat masa itu. Pengalaman menggunakan mata-mata dalam melawan para pejuang di Medan sebelumnya, mengilhami Westerling menciptakan banyak mata-mata di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebelum memulai pembantaiannya. Pada awal tahun lima puluhan, para mantan mata-mata ini menjadi sasaran balas dendam para pejuang yang telah menjadi tentara resmi. Saya masih ingat bagaimana Batalion Andi Selle yang bertugas di Parepare waktu itu, suatu kali melakukan serangkaian penangkapan terhadap mereka yang dianggap pernah menjadi mata-mata atau kolaborator Belanda. Orang-orang itu digiring ke luar kota, ditembak mati dan mayatnya dibiarkan membusuk sebelum keluarga mereka mengambil dan menguburkannya.

Andi Selle adalah putra Raja Alitta (Arung Alitta) sebuah wilayah yang kini menjadi bagian Kabupaten Pinrang. Arung Alitta dan dua putranya menjadi korban teror pembantaian Westerling. Dengan menarik napas panjang, Westerling menjelaskan, "Itu masa perang, dan sama sekali bukan urusan pribadi." Saya jelas-

kan kepadanya bahwa dari keluarga kami yang terbunuh adalah seorang paman yang, menurut ibu saya, memang suka ikut bapak saya menghadiri rapat-rapat politik di desa kami.

Wawancara yang diadakan dalam bahasa Inggris dan berlangsung sekitar satu jam itu, terekam dengan baik dan pernah saya terbitkan secara lengkap terjemahannya di majalah *Ekspres* edisi 22 Agustus 1970, tidak lama setelah saya balik ke Jakarta. Atas permintaan tokoh sejarah ABRI, Brigjen Dr. Nugroho Notosusanto, kaset rekaman itu saya serahkan untuk disimpan oleh pusat sejarah ABRI.

Dalam wawancara tersebut, Westerling membantah cerita-cerita tentang dirinya yang kebal dan punya ilmu gaib sehingga mudah tahu siapa ekstremis dan siapa perampok. "Itu semua perang urat saraf saja," katanya. Tapi, dia tidak menyangkal bahwa penembakan itu adalah semacam terapi kejut. Dia juga tidak membantah mengenai keterampilannya menembak dengan pistol. "Di sebuah pasar malam musim panas tahun silam, keterampilan menembak saya ternyata masih prima. Semua sasaran saya tembak dengan tepat dalam tembakan pertama," katanya dengan bangga.

Waktu di Sulawesi Selatan dulu tersiar cerita Westerling—selalu menggantungkan di pinggangnya dua pistol revolver—sering memamerkan keterampilan menembaknya dengan menjadikan anak buahnya sebagai sasaran. Para anak buah itu konon diperintahkan merentangkan kedua lengan. Menurut cerita yang beredar, peluru dari dua pistol Westerling melesat di celah jari-jari anak buahnya tanpa mencederai seorang pun. "Ah, itu dilebih-lebihkan," katanya. Yang juga disangkalnya adalah kisah tentang keahliannya menyeleksi anak buah sebelum berangkat operasi. Diceritakan bahwa Westerling tahu mana anak buah yang akan nahas kalau ikut operasi, karena itu dilarang ikut.

Yang tidak kurang menarik adalah cerita Westerling mengenai leluhurnya di Istanbul. "Ibu saya warga negara Turki berdarah Yunani. Ayah saya orang Belanda," katanya menjelaskan silsilahnya. Menurut Westerling, keluarga Westerling juga pernah bikin

ribut di Turki sana. Sembari tertawa dia berkata, “Jadi Westerling ini memang keluarga pembuat ribut.” Tidak sempat saya tanyakan apakah kekacauan di Istanbul itu menimbulkan korban sebanyak mereka yang terbantai di Sulawesi Selatan dan Bandung, sebagai akibat ulah sang Kapten.[]

Menggelinding hingga Jadi Doktor

Untuk sekolah yang lebih tinggi, saya rasanya tidak pernah punya rencana konkret. Keinginan dan harapan memang ada. Tapi, saya tahu diri. Orangtua tidak mampu membiayai saya ke jenjang perguruan tinggi. Maka setelah tamat SMA, ketika teman-teman sekelas saya di Solo kebanyakan memilih kuliah di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, saya memilih ke Jakarta. Di ibu kota, saya merencanakan bekerja untuk membiayai kuliah. Yogyakarta bukan tempat untuk sekolah sembari bekerja.

Sekolah pun tidak saya sertai dengan ambisi menjadi sarjana. Waktu itu gelar "pernah menjadi mahasiswa" saja sudah cukup gagah. Jadi, pokoknya saya harus pernah terdaftar sebagai mahasiswa. Kalau bisa di universitas yang baik. Alhamdulillah, pada 1963 saya diterima di Fakultas Psikologi dan jurusan Sastra Prancis pada Fakultas Sastra. Keduanya di Universitas Indonesia. Saya memilih Fakultas Psikologi karena letak tempat kuliahnya di dalam kota, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, sementara Fakultas Sastra berada di Rawamangun yang waktu itu terasa jauh dan masih dipandang sebagai luar kota. Jalan Pramuka waktu itu baru mulai dibangun. Dasar pertimbangan yang aneh, memang.

Untuk membiayai hidup dan pendidikan saya itulah saya pernah magang di Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta yang akhirnya dilanjutkan dengan bekerja sebagai reporter pada Harian *Angkatan Bersenjata*. Sempat magang beberapa bulan di RRI, saya kemudian terusir karena dituduh terlibat "Manikebu". Tidak lama sebelum Gestapu, ketika hampir semua koran sudah dikuasai oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan golongan kiri lainnya, Staf Angkatan Bersenjata (SAB) memutuskan mendirikan koran

sebagai pembawa suara lain di samping koran-koran kiri yang dominan waktu itu.

Untuk itu, mereka terutama mencari anak-anak muda yang belum pernah bekerja pada koran-koran yang telah ditutup oleh pemerintah. Mempekerjakan secara terang-terangan wartawan dari "koran-koran terlarang" hanya akan menjadikan koran tersebut sasaran tembak PKI dan pengikut-pengikutnya. Wiratmo Sukito yang tampaknya sudah lama kenal dengan Brigjen TNI Soegandhi—Direktur Penerangan Staf Angkatan Bersenjata (Dirpen SAB) dan Pemimpin Umum koran milik tentara itu—menulis sepucuk surat perkenalan yang saya antarkan sendiri ke rumah Pemimpin Umum koran *Angkatan Bersenjata* tersebut. Saya diterima, dan dengan penghasilan yang kecil saya bisa hidup dan melanjutkan kuliah. Selama tiga tahun sebelum bekerja, saya hidup dari kiriman orangtua. Dalam keadaan inflasi yang menggila, uang yang saya terima tidak pernah mencukupi kebutuhan hidup. Tapi, karena kebanyakan mahasiswa memang miskin waktu itu, saya tidak terlalu merasa menderita.

Kemudian terbukti, tidak mudah menjadi wartawan sambil kuliah. Kegiatan sekolah makin terganggu, terutama setelah Gestapu. Sebab selain bekerja sebagai wartawan, saya juga seorang aktivis mahasiswa. Waktu itu saya, antara lain, menjadi Kepala Biro Radio pada Biro Penerangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (Birpen KAMI) pusat yang mengoordinasikan lebih dari 500 radio mahasiswa (radio amatir namanya waktu itu). Selain itu, saya juga terlibat pengelolaan Radio Ampera di Jakarta dan bersama teman-teman mahasiswa Bandung mendirikan Radio Ampera di asrama Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Magelang.

Singkat cerita, saya harus keluar dari Fakultas Psikologi setelah kuliah di sana selama lima tahun. Waktu itu aturan belum seketat sekarang, istilah *drop out* belum dikenal, dan atas rekomendasi beberapa orang, saya dipindahkan saja ke Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, IPK, pendahulu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Pada 1976, saya akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan saya sebagai sarjana sosiologi dari Universitas Indonesia. Waktu itu saya agak kagum juga pada diri sendiri, kok, ya, bisa jadi Drs. Padahal, tadinya hanya berencana menjadi orang yang "pernah kuliah di universitas". Judul tesis saya *Profil Dunia Film Indonesia*. Ini sebuah sejarah sosial film Indonesia yang saya tulis berdasarkan penelitian dan pengalaman sebagai wartawan dan kritikus film majalah *Tempo* selama bertahun-tahun. Tesis itu kemudian diterbitkan untuk pembaca Indonesia sebelum pada akhirnya terbit juga dalam terjemahan Inggris. Waktu saya lulus, masih jarang wartawan aktif yang menyelesaikan pendidikan tinggi dan mendapat gelar. Maka, kelulusan saya itu pun menjadi berita di beberapa koran.

Tadinya saya sebenarnya sudah kehilangan semangat menyelesaikan studi saya di FISIP. Saya merasa sudah puas sebagai wartawan dengan penghasilan yang lumayan. Juga ada semacam kesombongan intelektual yang berkecenderungan antigelar sarjana yang waktu itu sudah mulai mengalami inflasi. Sepertinya semua orang terdesak untuk memasang gelar Drs. di depan nama mereka. "Para tetangga kita dulu semua sudah Drs.," kata Andi Makmur Makka—teman sejak mengaji di Parepare—suatu kali selepas menengok ibunya di kota asal kami. Gejala demikian terlihat lagi sekarang ketika muncul arus mendapatkan gelar Dr., dengan cara yang sayangnya kebanyakan kurang atau bahkan sama sekali tidak akademis.

BERTAHUN-TAHUN BERGAUL DALAM DUNIA FILM, suatu kali saya tertarik menjadi sutradara film. Saya lalu mencoba-coba melamar ke University of California di Los Angeles (UCLA). Di sana ada sekolah film yang terkenal dan mempunyai akses ke studio-studio film di Hollywood. Steven Spielberg dan George Lucas adalah dua tokoh perfilman kelas dunia alumnus sekolah film tersebut. Rencana saya mendapat dukungan dari Yayasan Rockafeller III yang siap memberi beasiswa jika saya diterima. Karena UCLA mempersyaratkan ijazah sarjana, maka saya tidak punya pilihan lain

kecuali cepat-cepat menyelesaikan studi sosiologi saya yang telantar lama. Semua kuliah memang sudah saya selesaikan, tinggal hanya menulis tesis. Bingung, akan menulis apa dalam waktu singkat, saya berkonsultasi dengan banyak senior. Saya datangi Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar, Prof. Dr. Mattulada, Juwono Sudarsono (masih menyelesaikan program doktor di London waktu itu), dan Dr. Taufik Abdullah. Akhirnya, saya mengikuti saran Juwono: "Anda tulis saja tentang film. Itu belum ditulis orang dan Anda punya banyak bahan."

Apakah saya jadi ke UCLA setelah mendapat gelar Drs.? Sayangnya, tidak. Tapi, saya tetap bersemangat ingin jadi sutradara. Tidak banyak sekarang yang tahu sebenarnya diam-diam saya sudah pernah menjadi asisten sutradara buat Wim Umboh, sutradara terkenal waktu itu, dan juga sempat menyutradarai dua film pendek. Satu dari dua karya saya itu malah ikut Festival Film Indonesia (FFI) ketika Kota Padang mendapat giliran sebagai tuan rumah. UCLA meminta terlalu banyak dokumen yang tidak semuanya bisa saya siapkan. Itulah ganjalan bagi perjalanan saya mendapatkan pendidikan menjadi sutradara. Dalam CV memang saya sebutkan pernah ikut kuliah di Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI). UCLA minta transkrip dari sekolah teater tersebut. Mana ada? ATNI pada masa saya ikut kuliah sudah lebih merupakan bengkel teater tinimbang sebuah sekolah tinggi. Saya memang rajin kuliah yang diadakan pada malam hari di sebuah gedung di depan stasiun kereta api Gambir. Tapi, mata kuliahnya adalah topik-topik praktis yang diperlukan untuk menjadi aktor dan sutradara saja. Perlu juga diumumkan bahwa sebenarnya saya adalah mahasiswa ATNI yang tidak pernah terdaftar. Saya tidak tahu apakah teman-teman lainnya pada terdaftar atau tidak.

Mahasiswa Gelap

Mulanya, pada 1964, saya baca iklan tentang pembukaan kembali ATNI setelah lama tidak aktif. Saya tertarik dan datang, masuk kelas, ikut kuliah tanpa mendaftar. Karena tidak diusir, yah, saya

terus saja kuliah. Saya bahkan termasuk yang punya catatan kuliah paling rapi di antara teman-teman saya. Lagi pula para pengajar tidak pernah mempersoalkan apa kita terdaftar atau mahasiswa gelap seperti saya. Tidak ada daftar nama mahasiswa. Yang jelas kami semua anak-anak muda fanatik teater. Pengajar yang paling bersemangat dan paling rajin datang adalah Wahyu Sihombing, Pramana Padmadarmaya, Djaduk Djajakusuma, dan Tati Maliyati Sihombing. Usmar Ismail sebagai Direktur ATNI pernah muncul satu kali. Asrul Sani, dosen senior, sama sekali tidak pernah datang, sementara Steve Liem (Teguh Karya) pernah muncul dua atau tiga kali saja. Sampai "bengkel teater" itu bubar pada 1967, tidak pernah ada ujian, dan karena itu tidak ada transkripsi angka-angka yang diminta UCLA.

Pramana waktu itu baru pulang belajar teater di Universitas Hawaii, Honolulu. Koleksi buku teaternya banyak. Karena kami bersahabat, saya selalu bisa pinjam buku darinya. Salah satu buku dari koleksi Pramana yang saya baca sampai tamat dalam waktu singkat adalah *An Actor Prepares* karya Stanislavsky, seorang sutradara Rusia terkenal. Ini adalah buku berbahasa Inggris pertama yang saya baca secara tuntas. Obsesi saya memang ingin jadi aktor pentas. Ketika masih pelajar SMA di Solo, bersama Slamet Sukirnanto, teman sekelas yang juga penyair, kami mendirikan *Teater Margoyudan* dan mementaskan lakon *Pinangan* karya Anton Chekov.

DALAM KEADAAN TIDAK LAGI PUNYA RENCANA memanfaatkan gelar Drs. untuk melanjutkan pendidikan itulah, saya berjumpa Dr. William Frederick pada awal 1978. Frederick adalah seorang sejarahwan dan pengajar di Ohio University, Athens, Ohio, Amerika Serikat. Ketika menamatkan pendidikannya di Hawaii University, Bill Frederick menulis tesis doktor mengenai dimensi sosial pergolakan di Surabaya pada masa Perang Dunia II. Waktu jumpa saya, dia sedang melakukan penelitian mengenai fenomena sosial kebangkitan musik dangdut dengan Rhoma Irama sebagai tokohnya. Bill menghubungi saya lewat Kedutaan Besar Amerika.

Menurut pejabat kebudayaan di Kedutaan, profesor dari Ohio University itu tertarik pada tesis saya tentang film Indonesia. Dia datang ke kantor *Tempo* yang waktu itu masih di Proyek Senen. Kami jumpa, lalu terlibat diskusi mengenai budaya populer Indonesia. Berbahasa Indonesia dengan aksen Surabaya, Bill dengan cepat menjadi teman akrab. Suatu kali secara sambil lalu saya bertanya, "Bagaimana caranya kalau saya ingin sekolah di Amerika?" Dengan enteng dan cepat Bill menjawab, "Apa Salim ingin melanjutkan sekolah?" Saya lalu cerita tentang rencana menjadi sutradara yang gagal karena UCLA meminta dokumen-dokumen yang tidak mungkin saya berikan. Pada pertemuan kami berikutnya, Bill sudah membawa formulir pendaftaran untuk sekolah di Ohio University. Permintaan dokumennya tidak macam-macam dan dalam waktu singkat saya penuhi.

Kairo, Jerusalem, Makkah

Setelah itu saya berangkat ke Timur Tengah. Waktu itu sedang berlangsung pertemuan Camp David di sekitar Washington, DC yang disponsori oleh Presiden Carter. Kegiatan itu mempertemukan Perdana Menteri Israel Menachem Begin dan Presiden Mesir Anwar Sadat. Hasilnya positif, Mesir dan Israel mencapai kesepakatan damai. Sebagai kepala desk luar negeri dan *travelling correspondent* majalah *Tempo*, saya ingin meliput pelaksanaan kesepakatan tersebut di lapangan, di Israel dan Mesir. *Tempo* tidak punya dana untuk rencana tersebut. Kebetulan saya baru saja menerima pembayaran dividen dari saham saya sebagai salah seorang pendiri majalah kami tersebut. Maka dengan dana pribadi itulah saya berangkat.

Salim Said di Kairo, 1978.

Menggunakan Pakistan Air Lines saya terbang ke

Kairo lewat Karachi. Dengan bantuan bagian penerangan Batalion Garuda (Indobat) yang berkantor di ibu kota Mesir, saya bisa mencapai Ismailiah, terletak tidak jauh dari Terusan Suez, markas pasukan PBB yang bertugas di Semenanjung Sinai. Panglima Pasukan PBB adalah seorang jenderal dari Indonesia, Rais Abin. Istri Jenderal Rais adalah Dewi, seorang wartawati yang sudah saya kenal lama. Atas bantuan Panglima, saya mendapat tanda pengenal sebagai pasukan PBB, dan dengan identitas itu saya bisa masuk Israel tanpa menggunakan paspor Indonesia. Dalam perjalanan ke Jerusalem, saya bermalam semalam di markas Batalion Garuda di tengah Gurun Sinai. Di sana saya menjadi tamu Kolonel Sugiarto, seorang kolonel lulusan pertama Akademi Militer Magelang yang kelak menjadi Kepala Staf Sosial Politik (Kasospol) ABRI sebelum akhirnya menjadi Menteri Transmigrasi pada salah satu Kabinet Orde Baru.

Perjalanan ke Jerusalem melewati daerah Gaza. Sopir yang mengemudikan mobil milik Indobat harus berhati-hati sebab masih banyak ranjau yang belum selesai dijinakkan oleh Batalion Polandia yang bertugas untuk itu. Di Jerusalem, kami tinggal di sebuh hotel di atas Taman Getsamane memandang lurus dari atas ke arah kota lama. Kami mendapat kamar pada sebuah hotel kecil milik seorang Palestina. Pegawai hotel itulah yang memberi tahu bahwa *escort* dari pihak pemerintah Israel yang mengantar saya ke mana-mana adalah seorang agen Mossad. "Mr. Said, *what are you doing with that Mossad guy*?" tanya pegawai itu kepada saya suatu pagi.

Saya yakin bahwa *escort* itu (saya sudah lupa namanya) memang seorang agen Mossad ketika dalam perjalanan keliling Israel, dia bercerita banyak tentang Indonesia yang tampaknya diketahuinya dengan baik. Tatkala saya, pada 28 September 1978, masuk ke kantor Perdana Menteri Menachem Begin untuk berwawancara dengan Dan Pattir, penasihatnya, sang Penasihat mengemukakan, setelah Israel dan Mesir berdamai dan segera bertukar duta besar, tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk tidak mengakui Israel. "Dan begitu hubungan diplomatik terjalin,

Kedutaan Besar bayangan kami untuk Indonesia yang kini berkantor di Singapura akan segera kami pindahkan ke Jakarta." Saya yakin *escort* saya itu adalah salah seorang yang dipersiapkan untuk bertugas di Indonesia kelak jika terbuka hubungan diplomatik antara kedua negara.

Yang terus teringat dari kunjungan saya ke Israel itu adalah, orang Israel selalu dihantui oleh ancaman rasa tidak aman. Saya, misalnya, diajak ke puncak Bukit Golan untuk melihat bagaimana *sniper* Suriah, menurut mereka, bisa dengan mudah menembak orang yang lagi berwisata di Danau Galile nun di bawah sana. Saya juga dibawa meninjau perbatasan dengan Yordania yang dipagari dengan kawat berduri yang dialiri listrik. "Untuk mencegah penyusupan teroris," kata *escort* saya. Semua karena alasan keamanan. Rasa tidak aman ini memang tidak sulit kita mengerti kalau tahu sejarah orang-orang Yahudi yang selalu merasa terancam di mana saja mereka berada sejak terusir dari apa yang kini mereka sebut sebagai "Tanah Air Kami". Puncaknya tentu adalah pembantaian Nazi pimpinan Hitler pada masa Perang Dunia II. Rasa tidak aman itu begitu besar sehingga Israel perlu dan berhasil membangun negara sendiri, meski dengan mengorbankan rasa aman bangsa lain, bangsa Palestina.

Sebelum berangkat ke Jerusalem, dengan bantuan Kedutaan Besar Indonesia di Kairo saya telah menghubungi pemerintah Mesir untuk dapat mengadakan wawancara. Dijanjikan Menteri Negara Urusan Luar Negeri, Boutros Boutros-Ghali, akan menerima saya. Tapi, ketika berada kembali di Kairo sepulang dari Israel, Boutros-Ghali amat sibuk sehingga yang menerima saya adalah Dr. Osama El Bas, penasihat utama Presiden Anwar Sadat. Keluarga El Bas adalah keluarga terkemuka di Mesir. Kelak ketika bertugas sebagai Dubes di Praha, istri Dubes Mesir mengaku sebagai keponakan Dr. Osama El Bas. Ketika meninggalkan Kairo, Anwar Sadat masih belum lagi balik dari Amerika. Begin juga tiba kembali di Israel setelah beberapa hari saya meninggalkan Jerusalem.

Dari Kairo saya terbang ke Jeddah, Arab Saudi. Di Jakarta, saya dibekali surat pribadi dari Dubes Saudi untuk Putra Mahkota, Pangeran Fahd. Dengan surat itu, saya diterbangkan oleh pihak Kerajaan dari Jeddah ke Riyadh, pusat pemerintahan Saudi. Sembari menunggu kabar dari Istana, saya diminta menanti di Intercontinental Hotel. Sampai sore tidak ada panggilan. Raja dan Putra Mahkota sibuk dengan banyak kepala negara dari berbagai Negara Arab membicarakan dampak persetujuan Mesir dan Israel. Salah satu hasil pertemuan di Riyadh itu adalah mengucilkan Mesir dari Liga Arab.

Gagal menemui Pangeran Fahd, sore harinya saya diterbangkan kembali ke Jeddah. Esoknya saya ke Makkah melakukan umrah buat pertama kalinya dalam hidup saya. Yang menjadi pendamping umrah buat saya waktu itu adalah seorang anak muda yang kelak menjadi dubes dan kemudian menteri agama. Namanya Maftuh Basyuni. Pengalaman pertama umrah itu luar biasa. Begitu melihat Ka‘bah, saya nyaris tidak bisa menahan tangis. Inilah bangunan yang telah bertahun-tahun menjadi arah shalat saya. Sulit menahan tangis. Juga ketika melakukan tawaf mengelilingi Ka‘bah. Pembimbing tawaf saya, seorang anak beranjak remaja, harus bersabar menunggu hingga saya bisa menguasai diri dari isakan panjang. Abdullah nama anak itu, dan saya beri tip 10 riyal, konon jumlah yang besar waktu itu. Sehari setelah umrah, saya terbang kembali ke Jakarta dengan *stop over* di Bahrain, Kalkutta, dan Singapura.

Penugasan terakhir saya sebagai Kepala Desk Luar Negeri majalah *Tempo* adalah memenuhi undangan pemerintah India meliput Indian International Film Festival (IIFF)

Sebagai wartawan *Tempo*, mewawancarai Perdana Menteri India, Morarji Desai, 1979.

pada Januari 1979. Selain menonton banyak film India, jumpa banyak orang film, mewawancarai sutradara terkemuka India, Satyajit Ray, saya juga sempat mewawancarai mantan Perdana Menteri India, Indira Gandhi dan Perdana Menteri yang sedang memerintah, Morarji Desai.

Tidak berselang lama, saya mendapat pesan singkat dan kepastian dari Bill Frederick, saya ditunggu di Athens, Ohio, pada awal musim panas 1979. Saya diterima pada program Master International Studies Ohio University. Timbul persoalan, bagaimana saya mendapatkan tiket untuk terbang ke Ohio, dan bagaimana pula membiayai hidup selama sekolah di sana.

Tidak lama sebelum saya berangkat, Prof. Dr. B.J. Habibie diangkat Presiden Soeharto menjadi Menteri Riset dan Ketua BPPT. Dari kedudukannya itulah, Menteri Habibie mengirim sejumlah mahasiswa melanjutkan pelajaran di berbagai negara. Semua yang dikirim adalah mereka yang belajar teknik. Saya kebagian kesempatan tersebut, meski saya tidak belajar teknologi, melainkan politik. Saya adalah satu-satunya "kader" Menteri Habibie yang belajar politik. Juga mungkin satu-satunya "kader" yang tidak pernah dimanfaatkan olehnya hingga Bapak Habibie selesai menjalankan tugas menggantikan Soeharto sebagai Presiden.

Bersama Menristek Dr. B.J. Habibie di Jakarta, 1980.

Adapun tiket ke Ohio, saya dapat dari bagian pendidikan Kedubes Amerika. Ketika tahu saya diterima di Ohio University, Linda Juwell, pejabat pendidikan di Kedubes Amerika itu berkata kepada

saya, "*I will squeeze my budget so that you can get a ticket to fly to Athens.*" Saya kemudian terbang ke Amerika dengan tiket dari Kedutaan Amerika. Singkat cerita, pada pertengahan Juni 1979, saya sudah berada di Athens, Ohio, setelah sebulan sebelumnya sempat kawin. Berita terpenting di Amerika pada hari ketibaan saya dan beberapa hari berikutnya adalah meninggalnya bintang film legendaris Amerika, John Wayne. Pada batu nisan kuburnya John berpesan agar ditulis, "John Wayne, American".

TENTANG KAWIN SEBULAN sebelum berangkat itu, harus saya akui, mungkin tidak akan terjadi kalau saya belum pasti akan ke Amerika. Waktu itu ada firasat saya akan tinggal lama di Amerika. Lagi pula usia saya sudah 35 tahun. Memang sudah waktunya kawin, bahkan sudah agak terlambat menurut kelaziman masa itu. Ibu sudah lama mengejar-ngejar saya untuk kawin. Sebagai anak tertua dari enam bersaudara, tiga adik saya memang sudah pada berkeluarga. Ibu saya yang masih menetap di Parepare waktu itu sering datang ke Jakarta dan tinggal di rumah Ali Said—adik saya, seorang fotografer—yang lebih dahulu sudah berumah tangga. Rumah Ali Said tidak jauh dari pondokan saya, maka tiap sore ibu datang dengan satu pertanyaan yang ditembakkannya setiap saya pulang kantor. "Bagaimana? Sudah ada calon?" Saya betul-betul merasa terteror.

Saya akhirnya memutuskan kawin dengan Herawaty, gadis Komering dari Muara Dua, Sumatra Selatan. Kami hanya pacaran sekitar enam bulan sebelum memutuskan untuk kawin. Sebenarnya, jauh sebelumnya saya pernah pacaran selama lima tahun dengan seorang putri Solo, mahasiswi dan kemudian sarjana lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Kami berkenalan pada kegiatan pameran foto demonstrasi KAMI 1966 di Yogyakarta.

Berdasarkan mandat dari ayah saya, Drs. Djoko Prasodjo, ayah Dr. Imam Prasodjo, Dosen Sosiologi Universitas Indonesia, melamarkan pacar saya itu pada 1970, tidak lama setelah saya pulang dari Negeri Belanda. Lamaran dilakukan berdasarkan la-

poran sang putri Solo bahwa semua ganjalan dalam keluarganya telah dia atasi. Sebelumnya memang ada soal di dalam keluarganya terhadap saya, seorang dari seberang yang pendidikannya lebih rendah dibanding dengan calon istri yang sudah Dra. ekonomi. Lamaran dilakukan berdasarkan laporan tersebut. Ternyata ditolak. Kalau dalam militer, ini operasi berdasarkan laporan intel yang tidak akurat. Walhasil, dengan berat hati hubungan terpaksa putus. Saya merasa terhina dan sangat marah waktu itu. Tapi di kemudian hari, saya bisa mengerti alasan penolakan tersebut. Orangtua yang telah mendidik putrinya hingga mendapat gelar Dra. dari Universitas Gadjah Mada, tentu tidak mudah menerima menantu seorang yang sarjana muda saja belum.

Waktu itu saya sudah punya tabungan sekadarnya untuk memulai hidup berkeluarga. Begitu gagal kawin, sebagian simpanan langsung saya belikan skuter Vespa buatan Italia. “Aduh, Lim, skuter kok, kamu samakan dengan perempuan,” gurau teman saya, Widarti Goenawan. Saya memerlukan waktu sembilan tahun menanti dan memilih-memilih, termasuk beberapa kali ditolak, sebelum bertemu Herawaty dan memutuskan menikah dengan gadis yang 13 tahun lebih muda dari saya itu.

Untuk perkawinan itu, penyair Taufiq Ismail yang mendapat giliran mewakili keluarga saya melakukan lamaran. Dalam urusan lamar-melamar, Taufiq memang berpengalaman, meski dia sendiri agak terlambat kawin. Selain saya, banyak teman seniman yang meminta jasa baik Taufiq sebagai pelamar. Setahu saya Taufiq selalu sukses sebagai juru lamar. Pada hari nikah, rombongan manten pria berangkat dari rumah Taufiq. Semua urusan dibereskan oleh Ati Ismail, Nyonya Taufiq. Sang penyair sendiri berada di London waktu itu.

BERANGKAT NIKAH, saya diantar oleh Letjen TNI (Purn.) Sarwo Edhie suami istri, dan Mayjen Soegandhi beserta istri. Rombongan pengiring manten juga disertai sejumlah seniman yang sering mangkal di rumah bujangan saya. Di antara mereka itu ada Sutardji Calzoum Bachri, Satyagraha Hoerip Soeprobo, Ed Zulverdi,

dan kawan saya sejak kecil di Parepare, Andi Makmur Makka bersama istrinya, Andi Leila. Akad nikah adalah acara tunggal, tidak ada resepsi karena saya sudah siap-siap berangkat ke Ohio. Juga karena malu, masak sudah tua masih dipestakan.

Untuk pernikahan tanpa resepsi itu, saya menggunakan jas yang dibuatkan oleh Jenderal Sarwo Edhie di Seoul dan sarung sutra Mandar hadiah dari Brigjen TNI Andi Oddang, Gubernur Sulawesi Selatan. Beberapa bulan sebelum kawin, saya kebetulan melakukan perjalanan jurnalistik ke Korea Selatan meliput latihan militer bersama Korea Selatan dan Amerika Serikat. Duta Besar Indonesia di Seoul waktu itu adalah Pak Sarwo Edhie. Mula-mula saya tinggal di hotel, tapi Bapak Dubes memerintahkan stafnya memindahkan saya ke Wisma Duta. Rumah Dubes besar sekali dan sepi, karena yang berdiam di sana hanya Bapak dan Ibu Sarwo serta seorang keponakan. Sebagai orang yang tidak pernah mendiami rumah besar dan bertahun-tahun di Jakarta mengembara dari pondokan yang satu ke pondokan yang lain, saya amat terkesan dengan kediaman sebesar itu. Di kemudian hari, ketika menjadi Dubes di Praha, Wisma Duta yang saya diami ternyata bahkan jauh lebih besar.

"Satria Kinayungan."

Nah, tentang jas untuk upacara nikah itu, ceritanya begini. Pada suatu hari Ahad di Seoul, Bapak Dubes dan Ibu Sarwo membawa saya ke pusat penjualan tekstil. Mobil dikemudikan sendiri oleh Pak Sarwo. Bahan untuk jas dibeli dan langsung dibawa ke tukang jahit langganan KBRI. Ketika jas itu dipas di Wisma Duta, Pak Sarwo berkata, "Satu untuk kawin dan satu lagi untuk *graduation* di Amerika nanti." Waktu itu Pak Dubes memang sudah saya beri tahu niat saya kawin sebelum berangkat sekolah ke Amerika. Alhamdulillah, harapan Pak Sarwo didengar dan dikabulkan Allah. Satu jas dipakai nikah, yang satunya kelak saya pakai ketika wisuda sebagai doktor. Tidak kurang menarik, yang menjadi saksi pernikahan kami adalah Pak Sarwo Edhie, Inspektur Jenderal De-

Pernikahan Salim Said - Herawaty dengan saksi Jenderal Sarwo Edhie
dan Jenderal Soegandhi, 1979.

partemen Luar Negeri waktu itu. Bahkan, hari dan jam pernikahan dipilihkan oleh mantan Komandan RPKAD tersebut berdasarkan perhitungan hari baik menurut budaya dan penanggalan Jawa. Hari Senin pukul 10 pagi 14 Mei 1979. "Satria kinayungan," kata Pak Sarwo.

Herawaty menyusul ke Ohio tiga bulan kemudian. Dia datang bersama Andi Makmur Makka yang juga akan kuliah di Athens, Ohio. Kemudian ternyata firasat saya benar. Saya mendapat kesempatan kuliah hingga mendapat gelar doktor dan berada di Amerika selama tujuh tahun. Selama tujuh tahun itu saya mendapat dua gelar master, satu gelar doktor, dan seorang anak perempuan. Putri kami itu lahir di Columbus, Ohio, dan kami beri nama Ainun Hersa Amparita, panggilannya Rita. Amparita adalah nama desa kelahiran saya di Sidenreng Rappang, dulu bagian dari Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan. Nama tengahnya, Hersa, adalah singkatan dari Herawaty dan Salim Said. Jadi, Rita tidak lagi perlu menggunakan nama saya sebagai nama keluarga, nama kami suami istri sudah melekat sebagai nama tengah (*middle name*). Adapun nama awalnya, Ainun, saya ambil dari nama istri Prof. Dr. B.J. Habibie, Menristek dan Ketua BPPT waktu itu. Bapak

B.J. Habibie berperan besar dalam memungkinkan saya belajar di Amerika. "Sebagai tanda ingat dan terima kasih kepada Bapak," kata saya kepada Pak Habibie ketika menceritakan mengenai nama anak saya yang baru lahir itu.

Ada cerita lucu di seputar nama itu. Karena nama ketiga (*last name*) anak saya adalah Amparita, oleh rumah sakit bersalin kampus, saya lalu dikenal sebagai Mr. Amparita. Mereka mengira nama Amparita adalah nama keluarga kami. Semua dokumen dari rumah sakit bersalin menyebut saya sebagai Mr. Amparita. Ketika soal itu saya jelaskan, seorang petugas administrasi rumah sakit berkomentar, "Di negeri ini tanpa nama keluarga *you* akan hilang."

RITA LAHIR di rumah sakit kampus (*teaching hospital*) Ohio State University (OSU), putri kami itu menamatkan SMA di Columbus, Ohio, dan mendapat gelar sarjana di OSU, almamater tempat saya dulu memperoleh gelar master kedua sebelum pada akhirnya berhasil memperoleh gelar doktor. Di Amerika, pengalaman Rita ini unik. Hampir semua anak Amerika melanjutkan pendidikan tinggi di luar kota kelahiran mereka. Kalau yang lahir dan menamatkan SMA di Columbus, seperti Rita misalnya, lazimnya akan mencari perguruan tinggi di luar Columbus. Itu berarti mereka keluar dari rumah orangtua. Dan umumnya *for good*, artinya untuk selama-lamanya. Mereka biasanya hanya balik ke rumah masa kecilnya pada hari Natal atau sesekali pada libur musim panas.

Salim Said, Herawaty, dan Amparita, Columbus, 1984.

Rita memang menamatkan Sekolah Dasar dan Seko-

lah Menengah Pertama di Jakarta, tapi kemudian kembali ke Amerika setelah duduk dua tahun di SMA Lab Rawamangun, Jakarta. Tadinya dia kami kirim ke Paris mengkuti program pertukaran pelajar sembari memperlancar bahasa Prancisnya. Tapi, program di Prancis itu agak kacau pengaturannya. Rita frustrasi dan hampir setiap malam menelepon dari pinggiran Kota Paris, tempatnya memondok. Kami lalu sepakat dia ke Columbus saja menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Seperti harapannya sekian tahun sebelumnya, Liddle akhirnya dengan senang hati menampung Rita di rumahnya. Yang mengatur perjalanan Rita dari Paris ke Columbus adalah Sulaiman Abdul Manan, teman sekolah saya di Athens, Ohio. Waktu itu dia menjabat posisi Kepala Bagian Penerangan KBRI di Paris.

BERBEDA DENGAN COLUMBUS, ibu kota Negara Bagian Ohio dengan penduduk sekitar satu juta orang, Athens adalah kota kecil yang penduduknya kebanyakan mahasiswa. Pada musim panas, ketika para mahasiswa libur, kota amat sepi sehingga bioskop pun tutup. Saya datang dari Jakarta langsung masuk ke kota kecil yang terpencil jauh dari keramaian. Dan karena hasil tes Inggris saya dianggap cukup, maka tanpa ikut kursus bahasa Inggris, saya langsung kuliah pada hari keempat saya di Amerika pada awal musim panas 1979. Untuk beberapa waktu memang terasa aneh tinggal di tempat sepi setelah bertahun-tahun hidup di kota besar dengan penduduk berjuta-juta. Keanehan itu teratasi karena seluruh waktu tersedot untuk mengikuti kuliah, membaca di perpustakaan, dan menulis paper.

Selain lulus tes Inggris, ada dua hal lain yang menguntungkan saya waktu itu. Secara ajaib saya tidak mengalami *jet lag* (pasti karena saya sangat *excited*), sehingga saya sehat-sehat saja dan duduk kembali di kelas setelah sekian tahun meninggalkan bangku sekolah. Hal menguntungkan lainnya adalah hadirnya dua teman Indonesia di Athens waktu itu. Keduanya, Sulaiman Abdul Manan dan Makmur Widodo, adalah pegawai Kementeri-

an Luar Negeri yang sedang tugas belajar. Di kemudian hari keduanya menjadi duta besar.

Widodo bukan teman baru. Kami dulu satu kelas di SMA Margoyudan, Solo. Jumpa kembali di Athens setelah lama tidak sempat bertemu di Jakarta. Sungguh amat menyenangkan. Mereka berdua lebih dulu lulus, karena memang lebih dulu datang. "Semoga kalian berdua cepat jadi dubes," doa saya kepada keduanya pada hari mereka meninggalkan Athens. "Saya mau jadi doktor dulu sebelum jadi dubes," kata saya bergurau. Eh, ternyata kemudian setelah menjadi doktor dan profesor, saya diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi duta besar. Ada teman yang bilang, malaikat lagi lewat ketika gurauan itu saya ucapkan. Entahlah.

Mungkin sebaiknya saya ceritakan juga bagaimana saya harus *survive* sebagai bujangan di Athens selama tiga bulan. Saya harus memasak sendiri, padahal sebelumnya menjerang air saja hampir tidak pernah. Ada dua penjelasan: *pertama*, adat di Sulawesi Selatan menganggap tidak pantas (*matuna*) bagi lelaki ke dapur. Ini jelas bertolak belakang dengan tradisi Minangkabau yang memperbolehkan para lelaki untuk bersibuk di dapur. Inilah barangkali salah satu penjelasan di balik mudahnya rumah makan Padang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Tradisi budaya Bugis itu sekarang mungkin sudah berubah juga, buktinya di Jakarta sudah banyak restoran makanan Sulawesi Selatan yang lebih dikenal sebagai restoran ikan bakar Makassar.

Kedua, kami mahasiswa Jakarta pada umumnya bekerja sembari sekolah dan karena itu tidak ada waktu memasak. Bayar makan saja, beres. Mahasiswa Yogyakarta hanya belajar, tidak bekerja seperti kami, karena itu punya waktu untuk memasak. Sulaiman yang lulusan Gadjah Mada, sangat pandai masak. Sambal bajaknya sangat enak, dan daging masak putih (itu nama yang kami berikan kepada jenis masakan yang di Indonesia tentu punya nama lain) terasa sangat nikmat dan terkenang terus sampai sekarang.

Sebelum meninggalkan Athens, sebagian ilmu perdapuran Sulaiman sempat "diwakafkan" kepada saya. Tidak kurang penting untuk diceritakan adalah proses membuat sambal yang dipraktikkan Sulaiman waktu itu. Untuk mengulek, tidak tersedia cobek, jadi pakai saja alat peramu obat (bentuknya seperti mangkuk) yang lazim dipakai di apotik. Setahun kemudian ketika pulang ke Jakarta, sekembalinya ke Athens saya dibekali cobek oleh Widarti Goenawan. Dengan cobek itulah saya mengembangkan kreativitas sebagai pembuat sambal bajak. Berkat didikan Sulaiman selama sekolah di Ohio, teman-teman mengenal saya sebagai salah seorang pembuat sambal bajak yang lumayan andal. Sekarang, sayangnya pengetahuan dapur warisan Sulaiman Abdul Manan serta pengetahuan tambahan yang saya pelajari ketika menjadi pembantu istri di dapur, hanya tinggal kenangan. Mungkin karena memang tidak diperlukan lagi.

Setelah Sulaiman dan Makmur Widodo pulang, Makmur Makka muncul. Dia juga lulusan Gadjah Mada, artinya bisa masak. Waktu itu keahlian Makmur Makka tidak lagi saya butuhkan, sebab istri saya sudah datang, dan pintar masak. Tapi, Makmur yang satu ini punya keahlian dapur yang lain, bikin martabak. Maka, seringlah kami makan martabak. Bahkan, suatu kali dalam perjalanan darat ke Washington menghadiri Konferensi Asian Studies, bekal kami dalam perjalanan adalah martabak buatan Makmur. Dia sendiri tidak ikut ke Washington. Jaga apartemen sendirian. Waktu itu Makmur memang tinggal di apartemen kami. Istrinya belum datang.

SEBELUM BALIK KE JAKARTA, pada suatu hari Makmur Widodo memperkenalkan saya kepada Prof. William Liddle, Guru Besar Ilmu Politik dari OSU yang waktu itu secara teratur menjadi pengajar tamu di Ohio University (OU). Seperti kepada Bill Frederick, kepada Bill Liddle suatu kali saya juga memberanikan diri bertanya, "Apakah ada kemungkinan mahasiswa seperti saya masuk program doktor di OSU?" Jawab Liddle, "Kalau Anda mendapat angka rata-rata A, saya akan terima." Waktu itu baru ada satu

mahasiswa Indonesia di OSU yang belajar di bawah supervisi Liddle. Dia adalah Mochtar Mas'oed, yang di kemudian hari pernah menjadi Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada.

Pada akhir masa studi saya di Athens, ternyata angka saya rata-rata A. Tahu bahwa saya berminat melanjutkan studi ke program doktor di Columbus, dosen pembimbing saya, Prof. Felix Gagliano, menulis rekomendasi yang mendukung rencana tersebut. Maka saya diterima dan menjadi mahasiswa Indonesia kedua yang belajar di bawah supervisi Liddle. Di belakang saya kemudian ada Afan Gaffar, Makarim Wibisono, Rizal Mallarangeng, Denny J.A., Saiful Muzani, Bakhtiar Effendi, Johannes Sulaiman, Dodi Ambardi, Dina Wisnu, dan Jayadi Hanan.

Liddle berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia dengan amat bagus. Jadi, komunikasi kami semua dalam bahasa Indonesia saja. Profesor ahli Indonesia itu mempersilakan kami memanggilnya sebagai "Pak Liddle" selama kami menjadi mahasiswanya. Setelah kami lulus, kebanyakan kami memanggilnya dengan Bill saja. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang diasuh-

Bill Liddle bersama Amparita di Columbus, Ohio, 2003.

nya sepakat untuk mengakui bahwa masa belajar kami di Columbus menjadi mudah dan menyenangkan karena bantuan Liddle. Kami semua amat tertolong olehnya. Waktu Rita lahir pada 1981, Liddle menyatakan harapannya suatu waktu nanti Rita datang barang setahun belajar di SMA dan tinggal di rumahnya. Seperti sudah saya ceritakan tadi, harapan itu menjadi kenyataan. Rita menumpang di rumah Liddle (Uncle Bill) selama setahun ketika menyelesaikan sekolahnya di SMA.

Raymond William Liddle adalah ahli Indonesia (Indonesianis) lulusan Yale University yang segenerasi dengan Daniel Sahul Lev, Ben Anderson, dan sedikit lebih junior dari Herbert Feith. Lebih senior lagi adalah Clifford Geertz dan yang paling senior adalah Benda dan George Kahin. Liddle mengakui kepada kami para muridnya bahwa dia belum berhasil berbuat banyak kepada studi Indonesia seperti yang telah disumbangkan oleh Ben Anderson, Feith, Kahin, Benda, dan Geertz. Obsesi memperbesar sumbangannya kepada studi Indonesia itulah yang mendorong Liddle terus melakukan penelitian di Indonesia. Bahkan, lama setelah dia pensiun dari jabatan guru besar di OSU, setiap tahun dia masih secara teratur datang melakukan penelitian di Indonesia.

SEPERTI DI ATHENS, di Columbus juga kehidupan saya hampir seluruhnya berlangsung antara apartemen di pinggir kampus (Buckay Village) dengan perpustakaan dan ruang-ruang kuliah di tengah-tengah kampus. Membaca, membaca, dan membaca itulah kegiatan saya. Dan para profesor kami memang "kejam". Bacaan tiap kuliah betul-betul "mengerikan" jumlahnya. Akibat "kekejaman" tersebut, selama saya di Ohio ada dua mahasiswa program doktor dari Indonesia yang pulang tanpa menyelesaikan studi setelah terus-menerus mengeluh. Mereka tidak tahan beban kuliah, juga tidak tahan udara dingin. Inilah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa tidak semua yang memperoleh gelar doktor di Amerika cemerlang, tapi yang pasti semua mereka pernah bekerja keras.

Suatu kali saya iseng menghitung halaman buku yang harus saya baca untuk sebuah *individual study* dengan lima kredit. Ternyata jumlahnya sekitar 13.000 halaman. Jumlah itu harus saya baca dalam satu kuartal (10 pekan). Atas dasar bacaan tersebut saya masih harus menulis makalah. Tugas tersebut saya dapat dari Prof. Stewart, seorang ahli Rusia di Departemen Ilmu Politik. Saya mengikuti kuliah Prof. Stewart karena minor saya dalam program doktor itu adalah sejarah politik Rusia serta Komunisme di Dunia Ketiga. Tidak ada kuliah khusus yang membahas politik dan sejarah Rusia pada periode peralihan abad ke-19 ke abad ke-20. Jalan keluarnya adalah *individual study* tersebut. Perlu diketahui bahwa untuk kuartal yang sama, saya masih tetap juga harus mengikuti dua kelas yang masing-masing berbobot lima kredit. Bayangkan berapa banyak lagi halaman yang harus saya baca untuk mendapat angka yang baik dalam 10 pekan itu.

Teror Statistik

Bagi saya sendiri pelajaran yang paling berat dalam program doktor adalah statistik. Tapi ini bukan berita istimewa. Pendidikan saya dari Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi memang selalu tersandung pada matematika atau berhitung. Pokoknya yang berurusan dengan angka-angka. Melihat banyak angka saja, kepala saya sudah pusing. Karena kebodohan saya berhitunglah saya pernah tidak naik kelas di SD, karena angka aljabar saya yang amat buruk saya harus mengulang setahun di kelas dua SMA.

Nah, untuk mengatasi kebodohan saya dalam ilmu aljabar—Almarhum Kuntowijoyo, waktu itu teman sekelas saya di SMA Margoyudan, Solo—menghabiskan sejumlah waktunya mengajar saya mata pelajaran yang bikin saya pusing tujuh keliling itu. Nanti di Jakarta, Arief Budiman kebagian tugas datang secara teratur ke pondokan saya menjadi mentor statistik saya. Di Columbus, senior saya, Mochtar Mas'oed kebagian tugas tambahan mengajar saya statistik. Supaya praktis dan agar tidak mengganggu Mochtar yang sedang bersiap-siap menghadapi ujian

doktornya, akhirnya saya putuskan mendatangkan seorang mahasiswa Amerika dengan bayaran tujuh setengah dolar per jam. Hanya berkat lobi Prof. Liddle kepada Prof. Clausen, pengajar Statistik, saya mendapat kesempatan *unlimited incomplete,* artinya boleh kapan saja saya menyelesaikan tugas untuk kelas Statistik. Asal selesai sebelum ujian akhir. Dengan susah payah, saya lulus juga akhirnya. Kalau tidak, pasti tak akan mungkin saya jadi doktor. Ironisnya, hampir semua hasil susah payah belajar statistik itu sekarang saya sudah lupa. Maka, kalau membimbing penulisan tesis mahasiswa yang menggunakan pendekatan kuantitatif, saya selalu memerlukan kerja sama dosen lain.

Masih mengenai statistik yang bikin susah itu, satu kali saya merasa sakit. Saya lalu ke Pusat Kesehatan (Health Centre) di kampus. Setelah diperiksa tubuh dan hasil laboratorium saya, dokter menyimpulkan saya sehat-sehat saja. "Tapi saya sakit, dokter," kata saya. Sang dokter lalu bertanya, mata pelajaran apa yang belum saya selesaikan? "Statistik," jawab saya. "*That is your trouble*," kata dokter itu dengan senyum. Setelah "teror" statistik selesai, penyakit saya juga hilang sendiri.

SEKARANG OSU sudah beralih ke sistem semester, jadi tidak lagi seketat masa saya jadi mahasiswa. Sistem kuartal yang saya alami dulu berlangsung 10 pekan. Akibatnya kita harus selalu pontang-panting. Maka, selama masa kuliah sama sekali tidak dimungkinkan kegiatan bermasyarakat di antara kami para mahasiswa. Kalau berpapasan di kampus, kita paling hanya saling melambaikan tangan. Tidak ada waktu ngobrol, apalagi saling berkunjung atau kumpul. Kami baru punya waktu berkunjung atau jumpa pada waktu libur sepekan (*break*) antara dua kuartal. Waktu untuk sedikit bersenang-senang, piknik atau bepergian biasanya hanya mungkin di musim panas, itu pun kalau kita tidak ikut kuliah musim panas atau kuliah dengan mengambil hanya beberapa kredit. Saya sendiri selama tujuh tahun di Ohio tidak pernah mengambil libur musim panas.

Sebagai orang yang datang dari keluarga sederhana, budaya liburan memang tidak saya miliki, hal yang harus berubah setelah anak saya masuk sekolah. Setiap menjelang liburan, Rita akan selalu bertanya, “Kita akan ke mana liburan nanti?” Alhamdulillah, ada saja rezeki anak itu. Kami pernah membawanya libur ke Paris, London, Jenewa, Tokyo, Hong Kong, Bangkok, Singapura, Bali, dan Yogyakarta. Sebagian liburan itu menjadi murah karena di berbagai kota saya punya teman di KBRI, dan karena itu boleh menumpang di rumah-rumah mereka. Rumah Makmur Widodo dan Sulaiman adalah kediaman diplomat yang paling banyak saya kunjungi.

Selama bertahun-tahun bekerja sebagai wartawan *Tempo*, saya juga tidak pernah mengambil cuti. Pokoknya kerja terus. Lagi pula akan ke mana kalau cuti? Waktu kuliah di Ohio saya hampir tidak pernah meninggalkan kampus. Sampai sekarang pun masih banyak negara bagian Amerika yang belum pernah saya kunjungi. Entah kapan saya bisa mengunjungi New Orleans, Oklahoma, dan negara bagian yang berbatasan dengan Kanada.

KENDATI SEMUA BEBAN belajar dan kerja keras sebagai mahasiswa, masa sekolah di Amerika itu barangkali masa terindah dalam hidup saya. Setelah bertahun-tahun bekerja sambil kuliah di Jakarta, di Amerika saya mendapat kesempatan belajar, membaca dan membaca apa saja yang menarik perhatian. Tentu prioritas utama adalah bacaan wajib untuk lulus pada setiap mata pelajaran. Selain urusan sekolah juga tidak ada kegiatan sosial yang meminta waktu seperti di Tanah Air. Selama di Amerika, saya tidak pernah melayat (cuma melihat orang mati lewat layar televisi), dan hanya sekali menghadiri upacara perkawinan. Itu pun karena yang kawin adalah Prof. Liddle.

Pantas Anda Hebat

Bandingkan dengan kesibukan di Jakarta. Dalam sepekan ada saja acara layat (mungkin orang Indonesia lebih banyak yang mati

dibanding dengan orang Amerika) dan hampir tiap akhir pekan ada saja pesta kawin yang harus dihadiri (banyak betul rasanya orang Indonesia yang kawin). Mungkin itulah antara lain penjelasannya mengapa masa tujuh tahun sebagai mahasiswa di Amerika terasa nikmat dan sepertinya singkat. Kalau tidak dikejar-kejar untuk segera ujian, saya asyik saja menikmati tetirah intelektual itu. Kenikmatan hidup sebagai mahasiswa itu tentu tidak mungkin tanpa ditopang oleh fasilitas yang tersedia lengkap. Terutama oleh ketersediaan bacaan secara hampir sempurna di perpustakaan. Di kampus-kampus Amerika perpustakaan memang sangat fantastis. Kehebatannya tidak pernah saya bayangkan sebelumnya.

Pada surat pertama dari Amerika untuk Dr. Taufik Abdullah, saya antara lain menulis, "Pantas Anda hebat, perpustakaan yang mendukung Anda belajar ternyata memang amat luar biasa." Taufik adalah doktor sejarah lulusan Cornell University, sebuah universitas yang koleksi buku perpustakaannya tentang Indonesia amat terkenal. Ketika di Jakarta, saya menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Indonesia, Dr. Taufik Abdullah bersama Dr. Melly G. Tan menjadi pembimbing tesis saya.

Perasaan saya yang takjub pada perpustakaan di kampus tersebut mudah dimengerti kalau Anda tahu bahwa hampir tidak ada buku atau bahan tertulis lainnya dari perpustakaan Universitas Indonesia yang bisa saya pergunakan untuk menulis tesis saya pada 1976. Selain beberapa buku dari koleksi para senior, salah satunya adalah Asrul Sani, dan bahan-bahan dari Sinematek Indonesia serta majalah dan koran-koran lama di Perpustakaan Nasional, buku-buku yang saya pakai untuk menulis tesis waktu itu terpaksa harus saya pesan sendiri dari Amerika. Kebetulan Syu'bah Asa, rekan sesama wartawan *Tempo*, sedang berkunjung ke Amerika waktu itu. Dialah yang menolong saya membeli dan mengirimkan buku-buku yang saya perlukan.

Buku-buku yang di Indonesia hanya judulnya yang pernah saya dengar, di perpustakaan sekolah kami semua tersedia. Kalau buku yang kami cari tidak ada dalam koleksi perpustakaan,

maka pustakawan akan segera mencarinya dari perpustakaan universitas lain. Yang saya kenang dengan manis, para pustakawan yang dimintai bantuan itu selalu dengan penuh kegembiraan meladeni para mahasiswa. Mereka merasa berguna jika dimintai bantuan oleh para peneliti.

Suatu kali seorang wartawan Indonesia—Dahlan Iskan, sekarang lebih terkenal sebagai Menteri BUMN—menjadi tamu di universitas kami. Seperti biasa, tamu diajak keliling melihat koleksi buku yang terpajang rapi. "Untuk apa komik-komik ini?" tanya sang tamu ketika melihat bundelan komik lama yang hampir tidak mungkin ditemukan lagi di Indonesia. Dengan sabar pustakawan pengantarnya menjelaskan, Prof. Ben Anderson pernah menulis tentang komik yang dimuat koran Jakarta, *Pos Kota*. Bahkan seorang mahasiswa Prancis pernah menulis tesis doktor tentang komik-komik Indonesia.

Jadi, komik-komik di perpustakaan itu adalah bahan studi, bukan bacaan pelipur lara atau sekadar pengisi waktu. Selain hampir semua buku terbitan Indonesia atau terbitan asing mengenai Indonesia, di perpustakaan Asia Tenggara Ohio University (Alden Library) dan Cornell University, semua pamflet dan sebagian besar brosur terbitan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) juga tersimpan rapi. Saya yakin brosur-brosur DKJ itu sudah sulit ditemukan di kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

MASA SEKOLAH DI AMERIKA itu juga amat menyenangkan berkat jasa-jasa sejumlah orang yang mengusahakan beasiswa buat saya. Selama tujuh tahun di Amerika, secara bergantian saya menerima beberapa beasiswa. Yang terbesar dan terlama mendukung hidup dan pendidikan saya adalah beasiswa dari Menteri Riset dan Teknologi/Ketua BPPT, Prof. Dr. B.J. Habibie. Yang menjamin saya untuk mendapatkan visa belajar di Amerika adalah juga B.J. Habibie. Pada mulanya saya hanya mohon bantuan dana untuk masa setahun program master. Waktu itu jumlahnya tidak besar sebab universitas membebaskan saya dari beban membayar uang kuliah.

"Tulis Surat kepada Beliau," Kata Parni Hadi

Ketika berangkat memang yang ada hanya rencana mendapatkan gelar master dan sama sekali tidak ada bayangan ikut program doktor. Tapi, kemudian saya diterima pada program doktor OSU tahun berikutnya, tanpa bayangan dari mana akan dapat biaya. Anehnya memang, saya optimistis saja. Saya teringat Parni Hadi, kepala perwakilan kantor berita Antara untuk Eropa yang waktu itu duduk di Hamburg. Parni amat dekat dengan B.J. Habibie.

Parni mendukung rencana saya. Lewat telepon internasional, dia menasihatkan, "Ambil Bung, jangan sia-siakan kesempatan." Bagaimana mendapatkan dana? Saran Parni: "Tulis surat kepada beliau dan kirimkan kepada saya. Pak Habibie dalam waktu dekat akan ke Hamburg. Nanti saya yang serahkan surat itu kepada beliau." Petunjuk Parni saya jalankan. Dan … alhamdulillah, berhasil. Tapi, sambil menanti kucuran dana dari Jakarta, saya sudah perlu uang. Bill Liddle turun tangan. Beliau mengangkat saya menjadi asisten peneliti untuk proyek bukunya yang dibiayai sekolah kami.

Kelak, ketika beasiswa dari B.J. Habibie habis sebelum seluruh program selesai, Bill Liddle turun tangan lagi mengusahakan beasiswa tambahan dari Ford Foundation Amerika, setelah sebelumnya permintaan saya ke Ford Foundation Jakarta ditolak dengan alasan hanya para dosen yang boleh mendapat beasiswa. Waktu itu saya bukan dosen. Tapi, perjalanan nasib kemudian menjadikan saya seorang profesor. Menjelang selesai, majalah *Tempo* juga membantu sedikit. Tapi, untuk penelitian ke Negeri Belanda dan Indonesia, biayanya saya tanggung sendiri. Sumber dana adalah dividen dari saham saya sebagai salah seorang pendiri majalah *Tempo*. Di kemudian hari—ketika dengan terpaksa harus meninggalkan *Tempo*—seluruh saham itu saya jual. Alhamdulillah, uangnya cukup untuk membeli sebuah rumah sederhana di Cipinang Muara, tempat tinggal kami sekeluarga sekarang.

Semua perjalanan ada awal dan mesti juga mempunyai akhir. Bulan Desember 1985, saya mengikuti wisuda sebagai doktor. Beberapa hari kemudian, dengan berat hati kami bertiga meninggalkan Columbus. Diantar beramai-ramai oleh teman-teman, kami bertiga terbang lewat New York, Amsterdam, dan Singapura sebelum akhirnya mendarat di Jakarta.

Di New York, teman lama kami, Nazar Nasution, diplomat dan mantan aktivis yang sedang bertugas pada Perwakilan Tetap Indonesia di PBB, menjadi tuan rumah kami. Nazar dan istrinya Ida, adik kandung penyair Taufiq Ismail, adalah tuan dan nyonya rumah yang sangat memanjakan kami. Mereka tinggal di daerah Queens, kawasan di luar Manhattan. Sekian belas tahun kemudian kami kembali jadi tamu Nazar dan Ida, yakni ketika Bung Nazar sudah menjadi orang kedua di KBRI Washington.

Untuk lebih menikmati New York, sebelum melanjutkan perjalanan, kami pindah ke sebuah hotel kecil di Manhattan. Sebagai turis di New York selama beberapa hari, pada hari Natal yang amat dingin, kami antara lain mengunjungi menara kembar World Trade Center, pencakar langit tertinggi di dunia waktu itu. Pada hari libur itu turis lokal dari pedalaman Amerika banyak sekali. Ketika kedua menara itu ambruk pada peristiwa teror 9/11—kebetulan waktu itu saya berada di Athens, Ohio, sebagai profesor tamu—saya tidak bisa menyembunyikan air mata saya. Kami bertiga punya kenangan manis di puncak salah satu menara yang kini hanya bisa disaksikan dalam sejumlah foto dan rekaman video.

SAYA TIBA KEMBALI DI TANAH AIR pada pekan pertama Januari 1986 sebagai doktor Indonesia pertama yang menulis disertasi mengenai peran politik militer Indonesia. Sebelum saya, ada dua sarjana Australia yang menulis disertasi dengan topik yang sama, Harold Crouch dan Ulf Sundhaussen. Jauh sebelum sempat membaca karya Crouch dan Sundhaussen, saya sudah terobsesi menulis tentang peran politik militer Indonesia. Ketika masuk program doktor, niat saya sudah bulat menulis tentang peran politik

militer Indonesia. Peran politik mereka terlalu penting dan berlangsung lama untuk dibiarkan hanya jadi pusat perhatian sarjana asing. Pada usia 23 tahun, saya sudah mengamati dari dekat peran militer kita. Sebelum Gestapu 1965, pasca-Gestapu, dan dalam perjalanan panjang Orde Baru, semua saya amati dan saksikan dari dekat. Jadi, saya memang dalam posisi yang strategis untuk menelitinya. Enam tahun (1991) setelah meninggalkan OSU, buku berdasarkan tesis saya tersebut terbit di Singapura. Judulnya, *Genesis of Power: General Sudirman and Indonesian Army in Politics, 1945-1949*. Buku itu melacak akar dan dasar pembenaran Dwifungsi.

Satu artikel yang saya tulis berdasarkan disertasi itu pernah diterbitkan oleh majalah *Prisma*. Akibatnya parah. Saya dituduh oleh aparat keamanan mengadu domba sipil dan militer. Tentara Indonesia waktu itu memang "mengharamkan" diskursus hubungan sipil-militer. "Hubungan demikian tidak dikenal di Indonesia. Itu buah pikiran liberal," kata mereka. Jenderal Soegandhi terpaksa turun tangan menjelaskan kepada aparat keamanan mengenai saya yang pernah lama bekerja di bawah beliau. Kesaksian mantan bos saya itu merupakan jaminan yang menyebabkan saya tidak sampai "disentuh" aparat keamanan. Waktu itu, Pak Gandhi sudah jadi purnawirawan tapi masih petinggi Golkar dan anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Atas saran dan fasilitas Jenderal Sarwo Edhie, Ketua BP7, saya ikut penataran Pancasila (P4) tingkat nasional. Ini adalah kegiatan indoktrinasi Pancasila yang berlangsung di mana-mana waktu itu. Surat tanda bebas Gestapu dan lulus P4 adalah surat wajib untuk mendapatkan pekerjaan apa saja masa itu. Pak Sarwo tahu sikap saya yang kritis, jadi pesan beliau sebelum saya memulai kegiatan indoktrinasi tersebut: "Dengarkan saja kata para penatar, jangan didebat." Maksud beliau baik, agar saya aman-aman saja dan memiliki surat lulus P4. Pesan beliau saya pegang dengan baik. Untuk beberapa hari. Tapi, lama-kelamaan saya merasa indoktrinasi itu sudah menjadi semacam teror yang menghina akal sehat saya. Bukan karena Pancasila-nya, melain-

kan cara para penatar menafsirkan dan mengajarkan ideologi negara tersebut yang saya tidak bisa tahan. Dangkal, miskin, bahkan ada yang keliru.

Liberal dan Individualistis

Pancasila yang saya mengerti dan yakini, tampil lewat penataran itu sebagai sebuah dogma kaku yang diberhalakan. Waktu ujian akhir, salah seorang penguji yang sudah sepuh (tentara yang sudah pensiun lama, saya kira) secara terang-terangan mencurigai saya sebagai sudah terpengaruh ajaran liberal, hanya karena saya baru mendapat pendidikan di Amerika. Suasana anti-intelektual sangat terasa. Saya bahkan merasa dicekoki agar percaya bahwa kebebasan pers (“Bebas bertanggung jawab”, nama resminya) tidak dikenal di Amerika yang liberal dan individualistik. Tidak tahan menghadapi pembodohan, saya mendebat si penguji. Sesudah itu saya ketakutan sendiri.

Selesai ujian saya langsung menemui Ketua BP7. “Saya, kan sudah bilang, dengarkan saja jangan didebat,” kata Pak Sarwo. “*He insulted my intelligence,* Pak,” kata saya. Pak Sarwo tertawa. Ketika hasil ujian diumumkan saya ternyata tergolong lulus 17 terbaik. Atas dasar itu, saya terpilih jadi penatar di Istana Bogor. Tawaran dengan sopan saya tolak. Dalam hati saya berkata, “Cukup saya saja menjadi korban teror. Jangan pula saya ikut meneror orang lain.”

DIPERLUKAN WAKTU lebih 10 tahun lagi, yakni setelah berakhirnya Orde Baru, sebelum secara terbuka saya bisa berbicara di depan publik tentang politik dan militer di Indonesia. Sebelum itu, selama bertahun-tahun saya hanya sibuk bicara film, keahlian saya sebelum menjadi ilmuwan politik. Sebenarnya beberapa kali saya pernah muncul di depan kelas memberi kuliah tentang militer dan politik di Universitas Indonesia. Ini atas prakarsa Prof. Dr. Juwono Sudarsono yang menjadi Dekan FISIP UI waktu itu. Tapi, saya mengalami kesulitan karena kebencian kepada tentara di

kalangan mahasiswa sudah sangat parah. Meski saya bicara se-akademik dan seobjektif mungkin, tidak jarang toh saya dituduh promiliter. Bahkan, saya pernah mendapat surat kaleng dengan tuduhan sebagai intel tentara. Saya putuskan untuk tidak meng-ajar saja.

Sejak itu, sebagai kritikus dan sejarahwan sosial film Indonesia, saya habiskan saja waktu dengan bersibuk di dunia film. Berkali-kali menjadi juri Festival Film Indonesia (FFI) dan beberapa tahun menduduki posisi Ketua Hubungan Internasional FFI yang bertugas mempromosikan film Indonesia ke seluruh dunia. Untuk itu, saya mengunjungi sejumlah festival film terkenal di berbagai penjuru dunia. Dalam kunjungan ke festival-festival tersebut, saya sering bepergian bersama para sutradara, aktor, atau bahkan aktris. Saya pernah ke Berlin bersama Deddy Mizwar, Arifin C. Noer, Garin Nugroho, Jajang C. Noer, ke Frankfurt bersama Christine Hakim, dan ke Cannes bersama Slamet Rahardjo, Christine Hakim, Eros Djarot, dan Rosihan Anwar.

Kegiatan utama saya pada setiap festival, selain memperkenalkan film-film Indonesia, adalah menonton sebanyak mungkin film yang tidak mungkin dinikmati di Indonesia. Film-film itu bagus-bagus, bernilai seni tinggi, dan berkisah tentang hal-hal yang sulit ditemukan pada film-film Hollywood, apalagi film Hong Kong, India, dan Indonesia, yang menjadi suguhan utama di bioskop-bioskop Indonesia. Karena banyaknya film yang harus saya tonton, sering kali saya menonton sampai lima film dalam sehari. Itu berarti saya harus lari dari satu gedung bioskop ke gedung pemutaran film berikutnya. Laporan dan analisis menonton berbagai film bagus di berbagai penjuru dunia itu, kemudian saya kumpul dan terbitkan dalam sebuah buku yang berjudul *Dari Festival ke Festival*.

Kebiasaan menonton film-film bermutu karya sutradara-sutradara terkemuka dunia seperti yang saya lakukan dalam berbagai festival itu sudah saya lakukan setiap berkunjung ke Eropa, jauh sebelum saya menjadi Ketua Hubungan Internasional FFI. Suatu kali kebiasaan ini menimbulkan salah paham kecil dan lucu

dengan dubes kita di Paris pada 1977. Waktu itu dubesnya adalah Mohammad Nur, mantan Gubernur Jawa Timur. Dalam perjalanan pulang dari Festival Oberhaussen, Jerman Barat, saya singgah di Paris. Mampir di KBRI dengan niat jumpa Dr. Bur Mauna, Kepala Penerangan KBRI. Saya ingin menggunakan fasilitas KBRI menghubungi Fuad Hassan, Dubes RI di Kairo. Saya merencanakan mampir di Kairo dalam perjalanan pulang. Rencana itu gagal karena Dubes Fuad sedang tidak ada di tempat.

Di pintu keluar kebetulan jumpa Dubes Mohammad Nur. Setelah berbasa-basi, Pak Dubes bertanya, ke mana saja di Paris. "Nonton film yang tidak bisa ditonton di Indonesia," jawab saya polos. Pak Nur tertawa aneh sambil melirik kepada istrinya. Lama baru saya sadar bahwa mungkin mantan gubernur Jawa Timur itu mengira film yang saya tonton adalah film-film porno yang memang tidak bisa ditonton secara terbuka di Tanah Air.

Sebagai akibat perkembangan teknologi (*laser disc*, VCD, dan DVD serta *blu-ray*) segala macam film yang tadinya hanya bisa ditonton di berbagai festival dunia, kini telah tersedia di Indonesia. Jadi meski saya tidak lagi bersibuk di dunia film, karena berfokus pada studi politik, saya tetap bisa mengikuti perkembangan perfilman dunia. Ironisnya, justru kesempatan menonton film-film Indonesia menjadi langka, sebab makin sempit waktu berkunjung ke gedung bioskop. Dan perlu waktu lama guna mendapatkan rekaman film Indonesia (VCD atau DVD) dengan mutu layak tonton.

KETIKA SAYA MENDADAK BICARA POLITIK dan militer dan sama sekali berhenti bicara film di depan publik pada awal Reformasi, teman-teman saya di dunia film banyak yang bingung. "Kok, jadi pengamat militer? Bagaimana ceritanya kritikus film jadi ahli politik militer?" tanya Muni Cader, seorang aktor film senior, kepada saya, suatu kali. Alex Leo Zulkarnaen, waktu itu Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film (RTF) Departemen Penerangan, konon juga ikut heran, "Saya kira Salim Said itu Doktor Sinema, ternyata Doktor Politik."

Untuk tidak membingungkan orang banyak, sejak Reformasi saya hanya bicara politik dan militer, sama sekali menghindar bicara film di depan publik. Sejak itu, tanpa upacara, saya dinobatkan oleh media sebagai "pengamat militer", dan secara diam-diam berakhirlah karier saya sebagai "pengamat film". Ketika Timur Tengah dan Afrika Utara dilanda pergolakan (*Arab Spring*), saya sering menjadi narasumber di berbagai studio televisi, dan secara mendadak saya dibaptis pula menjadi "pengamat Timur Tengah". Saya memang hanya mengamati dan belum juga kunjung berhasil diamati.[]

Andi Muhammad Jusuf Amir Menjadi Panglima ABRI

Jenderal TNI Andi Muhammad Jusuf Amir dilantik di Istana Negara sebagai Panglima ABRI pada suatu hari di bulan Maret 1978. Sebagai wartawan, saya meliput upacara tersebut. Berdiri di samping Letjen TNI Wijoyo Suyono, saya berbisik kepada Panglima Kowilhan (Komando Wilayah Pertahanan) Jawa-Madura itu: "Jangan-jangan Pak Jusuf sudah tidak tahu aturan baris-berbaris." Jenderal yang juga mantan komandan RPKAD itu cuma tersenyum, tanpa komentar. Barangkali karena tahu saya wartawan. Tentu saja Jenderal itu tidak ingin dikutip berkomentar tentang panglimanya yang hari itu dilantik.

Namun, meski setengah bergurau saya sebenarnya punya dasar bertanya. Ketika dilantik menjadi Panglima ABRI, Jenderal TNI Muhammad Jusuf sudah 14 tahun meninggalkan jajaran militer aktif, yakni sejak menjadi menteri pada zaman akhir Demokrasi Terpimpin (1965). Dan dalam masa 14 tahun itu telah terjadi perubahan tata baris-berbaris ABRI. Di kemudian hari, dari Atmadji Sumarkidjo, wartawan dan penulis biografi Jenderal Jusuf, saya mendapat informasi mengenai Jenderal TNI Jusuf yang memang berlatih baris-berbaris selama tiga hari di ruang tamu kediamannya sebelum hari pelantikannya. Pengawas latihan adalah Elly Jusuf, istri sang Panglima.

Pangkat terakhir Jusuf dalam jajaran ABRI adalah Brigadir Jenderal. Jabatan militer terakhirnya adalah Panglima Kodam XIV/Hasanuddin. Kesuksesannya mengakhiri pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan menarik perhatian Presiden Sukarno. Panglima dari Makassar itu dipromosikan menjadi Menteri Perindustrian Ringan pada 1965, beberapa bulan setelah

Kahar Muzakkar tertembak mati. Nasib mujur dinikmati Jusuf lewat perannya dalam mendapatkan Supersemar pada 1966. Bersama Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal Amir Mahmud, ketiganya menjadi orang penting bagi naiknya Jenderal Soeharto ke kursi kekuasaan. Ironisnya, tiga perwira yang berhasil "mendesak" Sukarno mengeluarkan Supersemar—Kemal Idris, H.R. Dharsono, dan Sarwo Edhie—justru mengalami nasib tragis. Ketiga *king maker* tersebut tersingkir dan terbuang jauh dari pusat kekuasaan.

Nasib mujur itu bukannya datang dengan tak terencana. Cerita bermula ketika terjadi Gestapu pada 1 Oktober 1965. Waktu itu Brigjen TNI Jusuf Amir—baru beberapa bulan menjadi menteri dan berkedudukan di Jakarta—berada di Beijing bersama sejumlah besar pejabat tinggi Indonesia yang diundang pemerintah Tiongkok. Begitu mendapat kabar tentang kejadian di Jakarta, dengan segera Jusuf mencari sendiri jalan pulang. Setelah mendapatkan informasi yang cukup tentang apa yang terjadi di Indonesia selama transit di Hong Kong, Jusuf terbang ke Jakarta. Tiba di Kemayoran, dia tidak langsung melapor ke bosnya, Presiden Sukarno. Dia mengarahkan langkahnya ke Kostrad, tempat Soeharto memimpin operasi penumpasan PKI. Keputusan Jusuf yang sangat jitu itu patut diduga bersumber pada insting politiknya yang menuntunnya kepada keyakinan bahwa era Sukarno sudah akan berakhir, dan tokoh yang bakal naik adalah Soeharto.

HAMPIR SEPULUH TAHUN SEBELUMNYA di Makassar, insting politik Jusuf juga menuntunnya dengan baik. Ini berhubungan dengan cerita lahirnya Permesta (Perjuangan Semesta) yang diproklamasikan oleh Kolonel Infantri H.N.V. Sumual, Panglima Tentara dan Teritorium (TT) VII waktu itu. Jusuf adalah pendukung bahkan ikut merancang konsep Permesta. Tapi, Sumual dalam memoarnya menulis tentang Jusuf waktu itu sebagai berikut. "Begitu Permesta diproklamasikan 2 Maret, Jusuf langsung melapor ke Yani di MBAD, dan minta instruksi militer. Artinya,

memberi diri untuk menghantam kami. Padahal, dia paling aktif bersama Saleh Lahade, Dokter Engelen, dan Bing Latumahina merancang Permesta." Lewat Jenderal Yani, karier Jusuf menanjak ketika teman-temannya di Permesta terpojok untuk akhirnya menjadi pemberontak yang ditumpas TNI.

Oleh karena itu, kalau dulu Jenderal TNI Yani yang menjadi titian karier Jusuf, selepas tewasnya Panglima Angkatan Darat itu di tangan Gestapu, Jenderal TNI Soeharto, yang lebih berkuasa daripada Yani, merupakan tangga lanjutan bagi karier Jenderal dari Makassar itu. Adalah loyalitasnya kepada Soeharto—melapor langsung ke Kostrad dari Lapangan Terbang Kemayoran—yang membuka kesempatan baginya diutus bersama Basuki Rahmat dan Amir Mahmud mendapatkan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) dari Sukarno.

Soeharto adalah orang yang tahu berterima kasih kepada mereka yang mendukungnya tanpa kemudian menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Dari singgasana kekuasaannyalah Soeharto kemudian "membayar" jasa-jasa Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan Andi Muhammad Jusuf. Ketiga jenderal itu mendapat "anugerah" jabatan-jabatan tinggi. Yang pertama mendapat "anugerah" adalah Basuki Rahmat. Masih pada awal kekuasaan Soeharto, mantan Pangdam Brawijaya itu sudah didudukkan sebagai Menteri Dalam Negeri. Ketika Basuki mendadak wafat di kantornya, Amir Mahmud yang menggantikannya. Yang terakhir mendapatkan bonus istimewa adalah Jusuf.

Berbeda dengan Amir Mahmud dan Basuki yang kebagian jabatan di luar struktur militer, Jusuf yang sudah lebih lama menanggalkan pakaian dinas militer—menduduki kursi Menteri Perindustrian selama 14 tahun—justru diangkat memimpin ABRI. Bisa diduga bahwa ini adalah suatu topik pembicaraan yang hangat pada masa itu. Jusuf sendiri kabarnya terkejut. "Pak Jusuf tidak pernah mimpi apalagi membayangkan dirinya jadi jenderal berbintang empat dan memimpin ABRI," kata seorang keponakannya di Makassar kepada saya lama setelah Jusuf wafat.

NAMUN, SOEHARTO PUNYA MAU DAN KUASA. Tak berhenti pada Jusuf. Bapak Presiden juga kemudian mengangkat L.B. Moerdani ke posisi Panglima ABRI, padahal Benny lebih tidak memenuhi syarat menduduki posisi pemimpin tertinggi tentara. Tidak memiliki pengalaman komandan yang memimpin tentara lebih tinggi dari tingkat batalion, tidak pernah menduduki jabatan teritorial dan pendidikan, tidak pernah mengikuti pendidikan Sekolah Staf (Sesko) dan sebagian besar kariernya di pasukan tempur dan dunia intelijen, Soeharto toh menjadikan Moerdani sebagai Panglima ABRI. "Pengangkatan Pak Benny sebagai Pangab tidak mengikuti rute yang lazim," menurut Mayjen TNI (Purn.) Zacky Anwar. "Kekuasaannya besar dan solid. Tidak ada Panglima ABRI yang memiliki kekuasaan atau sejumlah jabatan rangkap seperti Pak Benny. Sebagai Asintel [Asisten Intelijen Hankam], dia sering melewati atau melakukan *by pass* kebijakan Kas [Kepala Staf Angkatan]," lanjut Jenderal Zacky Anwar. Seperti Jusuf sebelumnya, Benny juga terkejut menemukan dirinya duduk di kursi Panglima ABRI. "Saya tidak pernah bermimpi duduk di kursi ini. Saya sudah teken mati sebagai intel," kata Moerdani kepada saya di kantornya di Jalan Merdeka Barat, pada 14 November 1984.

Tambahan penjelasan di balik pengangkatan Jusuf menjadi Panglima ABRI bisa ditemukan dalam memoar Jusuf Wanandi, *Shades of Grey*. Wanandi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) waktu itu adalah seorang yang masih sangat dekat dengan pusat kekuasaan, jadi tentu saja dia tahu banyak pergolakan dalam tubuh pemerintah. Menurut Wanandi, dalam sebuah rapat para jenderal pada awal 1978 di Markas Besar ABRI, muncul suara-suara kritis kepada kebijakan Soeharto, terutama mengenai sikap pemerintah yang keras kepada mahasiswa sebagaimana yang dijalankan oleh Menteri Pendidikan, Dr. Daud Jusuf.

Adalah Muhammad Jusuf, Menteri Perindustrian waktu itu yang tampil sebagai pendukung utama Soeharto dan kebijakan kerasnya terhadap mahasiswa. Dia juga dengan keras meng-

ingatkan para jenderal untuk tidak melemahkan Soeharto atau bahkan mencoba merebut kekuasaannya. Jusuf mengancam para jenderal bahwa dirinya akan melawan setiap usaha melemahkan kontrol Soeharto apalagi merebut kekuasaan Soeharto.

Boleh Sibuk Debat Panjang

Dengan kekuatan apa Jenderal Jusuf, yang Menteri Perindustrian, akan melawan para jenderal yang kritis terhadap Soeharto? Yang tahu jawaban pertanyaan itu hanya Bapak Presiden. Tak lama setelah Jenderal Muhammad Jusuf mempertunjukkan kesetiaannya kepada Soeharto di depan hampir semua Jenderal, dia diangkat menjadi Panglima ABRI.

Selanjutnya kita boleh sibuk berdebat panjang untuk mengerti dasar atau alasan yang dipakai Soeharto mengangkat Jusuf, Moerdani, Panggabean, dan Sudomo sebagai Pangkopkamtib. Kita juga tidak akan kehabisan cerita mengenai tingkah laku Benny yang berangkat dari loyalitas penuh kepada Soeharto untuk berakhir dengan "de-Benny-sasi" akibat kemarahan Soeharto kepadanya. Atau, Jusuf yang lebih banyak di lapangan—membagi-bagi rezeki kepada para prajurit—daripada duduk di kursinya di Departemen Pertahanan dan Keamanan. Tapi, satu hal yang pasti, semua itu dimungkinkan oleh kekuasaan Soeharto yang luar biasa sehingga bisa berbuat apa saja, kapan saja, dan mengangkat siapa saja ke jabatan apa saja. Tapi, mengapa Jusuf? Mengapa Moerdani? Pertanyaan bisa diteruskan dengan juga menyebut nama Maraden Panggabean, Panglima ABRI yang digantikan oleh Jusuf, dan Panglima Kopkamtib, Laksamana Sudomo. Dan mengapa, misalnya, bukan Kemal Idris, atau R. Soedirman? Pertanyaan ini akan segera terjawab jika kita bisa menemukan persamaan dan perbedaan di antara mereka.

Kendati keempat yang pertama memiliki sejumlah perbedaan, di mata Soeharto, persamaan mereka jauh lebih menonjol. Semuanya tidak merupakan ancaman potensial bagi kekuasaan sang Presiden. Dengan pendekatan seperti inilah, Soeharto tidak

memilih Letjen TNI Raden Soedirman (mantan Panglima Brawijaya) untuk menggantikannya sebagai Panglima Angkatan Darat ketika jabatan itu harus ditinggalkannya. Soedirman adalah seorang santri Jawa yang saleh (setelah pensiun aktif di Majelis Ulama Indonesia) dan terkenal sebagai orang yang berani melawan Kolonel Nasution pada peristiwa 17 Oktober 1952, tapi kemudian menjadi pendukung Nasution ketika KSAD itu melawan Komunis. Di mata Soeharto, bisa diduga, Letjen TNI Raden Soedirman adalah potensi ancaman bagi kekuasaannya. Kemal Idris juga kurang lebih sama saja dengan R. Soedirman. Keduanya diperhitungkan Soeharto sebagai tidak akan memberi jaminan aman bagi kelanggengan kekuasaan Bapak Presiden.

Jenderal Panggabean yang lebih junior dari Soedirman adalah penganut Kristen Protestan, berasal dari etnis kecil Sumatra Utara dan sebagian besar dinas militernya berlangsung di luar Jawa. Jusuf beragama Islam, orang Bugis dari Sulawesi Selatan yang nyaris semua masa aktif militernya juga berlangsung di luar Jawa. Dan yang lebih penting, ketika diangkat menjadi Panglima ABRI, Jusuf sudah 14 tahun meninggalkan dinas militer. Dengan latar belakang demikian, Jusuf yang tidak berakar dalam ABRI telah diperhitungkan oleh Soeharto sebagai sulit menggunakan tentara menentang Bapak Presiden.

SUDOMO DARI ANGKATAN LAUT, meski putra seorang haji dari Malang, waktu diangkat—lewat perkawinan—dia sedang beragama Protestan. Benny Moerdani memang dari Jawa Tengah, tapi perwira Komando dan Raja intel itu beragama Katolik berdarah Indo-Jerman dan jabatan tertingginya dalam militer hanya komandan batalion. Dan karena itu, menurut perhitungan Soeharto, Moerdani juga sulit berakar dalam ABRI. Maka, ketika ternyata kemudian Moerdani mempunyai keberanian secara perlahan mengalihkan loyalitasnya dari Soeharto ke lembaga ABRI, setelah mungkin merasa kuat karena menguasai tentara lewat aparat intelijennya (BAIS), dengan cepat, mudah, dan saksama,

Soeharto menyingkirkan Kepala Intel itu dan orang-orang yang dianggap sebagai pengikutnya.

Sebagai Panglima ABRI, Jusuf dengan cepat menjadi populer, karena meski semua kegiatan publiknya selalu atas nama Soeharto (selalu menyampaikan salam Pak Harto kepada para prajurit yang didatanginya), kunjungan dan perhatiannya kepada prajurit bukan cuma menarik perhatian dan simpati tentara, melainkan juga masyarakat luas. Ketika cerita buruk tentang Soeharto dan keluarganya sudah perlahan merayap ke masyarakat luas, fokus harapan berangsur tertuju kepada Jusuf. Akibatnya, Soeharto dikabarkan mulai agak cemas. Jusuf sadar keadaan itu. Mantan Menteri Perindustrian ini tidak terlalu cemas sebab tahu dirinya terus-menerus dibayang-bayangi oleh Moerdani, Kepala Intel ABRI dan Laksamana Sudomo, Panglima Kopkamtib dan Wakil Panglima ABRI, dan Jusuf yakin Soeharto tahu Panglima ABRI sama sekali tidak melakukan hal-hal yang mengancam kekuasaan Soeharto. Setiap menghadapi hal-hal yang sensitif, dia selalu memberi perintah kepada Kepala Intelnya: "Kau laporkan ini kepada Pak Harto, Ben."

Sadar dimata-matai dan secara ketat diawasi, Jusuf toh tidak mengabaikan kesempatan menyatakan pendapatnya tentang praktik Dwifungsi waktu itu. Selain melarang tentara berdagang, melarang tentara jadi gubernur, Jusuf juga punya gagasan agar ABRI berdiri di atas semua golongan. Artinya, ABRI tidak lagi mendukung Golkar. Soeharto menilai tidak realistis gagasan Jusuf yang terakhir ini. Pada Rapim ABRI di Pekanbaru bulan Maret 1980, Soeharto dengan tegas menyebut ABRI masih akan mendukung Golkar. Soeharto memerintahkan Laksamana Sudomo mengunjungi para panglima Kodam di seluruh penjuru Indonesia menyosialisasikan keputusan Soeharto tersebut.

Tahu bahwa Soeharto sangat percaya kepada Moerdani waktu itu, konon Jusuf pulalah yang menyarankan agar Benny saja yang diangkat menjadi penggantinya. Mungkin Jusuf berpikir, "Daripada ditugasi memata-matai Panglima, sekalian saja dijadikan Panglima." Berbeda dengan Jusuf yang tidak membangun

jaringan pengikut dalam ABRI, jaringan intel yang bertahun-tahun dibangun Moerdani menjadi modal bagi Panglima ABRI dan Kepala Intel itu menguasai tentara. Kekuasaan dan kontrol yang ketat Moerdani atas ABRI kemudian malah menimbulkan ketakutan Soeharto.

Dengan demikian, setelah Moerdani akhirnya disingkirkan secara agak prematur dari posisi Panglima, Soeharto dengan cepat melancarkan pembersihan terhadap para perwira yang dipandang sebagai pengikut Benny. "Orang-orang yang dianggap dekat dengan saya sulit mendapat promosi," kata Moerdani kepada saya di kantor CSIS beberapa tahun sebelum mantan Panglima ABRI itu jatuh sakit yang kemudian berakhir pada kematiannya.

Pembersihan dalam tentara tidak perlu dilakukan Soeharto setelah dengan baik-baik menurunkan Jusuf dari kursi Panglima ABRI sesuai dengan jadwal. Jusuf memang tidak dianggap, oleh siapa saja, sebagai membahayakan Soeharto. Kendati demikian, sang Presiden kabarnya pernah juga cemas melihat popularitas Jenderal dari Makassar itu. Dalam buku *Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit* yang ditulis Atmadji Sumarkidjo, ada dikisahkan suatu pertemuan di kediaman pribadi Presiden yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Menurut Atmadji,

> Adalah Mendagri [Jenderal TNI Amir Mahmud] yang berbicara pertama kali, [bahwa] dengan semakin populernya Jenderal Jusuf selaku Menhankam/Pangab, maka diduga ada "ambisi-ambisi tertentu" Jenderal Jusuf yang perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan.
>
> Tiba-tiba Jenderal Jusuf menggebrak meja dengan tangannya. Dengan suara keras dia berkata, "Bohong! Itu tidak benar semua! Saya ini diminta untuk jadi Menhankam/Pangab karena perintah Bapak Presiden. Saya ini orang Bugis. Jadi, saya sendiri tidak tahu arti kata kemanunggalan yang bahasa Jawa itu. Tapi, saya laksanakan perintah itu sebaik-baiknya tanpa tujuan apa-apa."

Gebrakan meja Jusuf mengejutkan semua yang hadir. Soeharto sebagai tuan rumah dengan cepat membubarkan perte-

muan yang berlangsung hanya beberapa menit. Konon sejak itu hubungan Jusuf-Soeharto mulai mendingin dan sidang-sidang kabinet di Binagraha tidak pernah lagi dihadirinya. Untuk mengikuti sidang kabinet, Panglima ABRI selalu mengirim wakilnya, Laksamana TNI Sudomo.

Ambisi Itu Terbaca Soeharto

Meski kelihatan janggal, sebenarnya tidak sulit dimengerti jika Jusuf marah di rumah kediaman Bapak Presiden. Pertemuan membicarakan popularitas Jusuf mudah dipastikan tidak akan berlangsung tanpa persetujuan, kalau tidak malah digagas oleh sang Presiden sendiri. Amir Mahmud berani memulai pembicaraan mengenai soal yang sangat peka pastilah atas petunjuk Soeharto. Jenderal Jusuf yang telah dengan sadar menjaga agar popularitasnya tidak mencemaskan Soeharto jelas kesal melihat bosnya tetap saja mewaspadainya.

Dalam keadaan tegang demikian, intel-intel Soeharto ternyata tidak juga pernah mempunyai cukup informasi mengenai langkah-langkah Jusuf yang bisa dinilai sebagai sedang membangun dukungan dalam ABRI. Hal itu jelas berbeda dengan persepsi Soeharto tentang langkah-langkah Moerdani di kemudian hari yang dianggap menggunakan aparat intel dan kontrolnya atas ABRI untuk tujuan kekuasaan. Moerdani yang beragama Katolik dan berdarah Indo, menguasai intel selama 14 tahun, tapi sadar bahwa dirinya tidak mungkin menjadi presiden. Maka, masuk akal jika Moerdani ditengarai hanya berambisi menjadi *king maker.* Dan ambisi itu kabarnya terbaca oleh Soeharto. Maka, ketika Try Sutrisno—di mata Soeharto sudah jadi orang binaan Moerdani—dicalonkan ABRI menjadi Wakil Presiden, Soeharto dengan cepat melihat Moerdani berada di balik pencalonan tersebut.

Sebaliknya, sebagai orang Bugis, penganut Islam yang taat dan berasal dari Kodam kecil di luar Jawa, Jusuf tahu betul jabatan Panglima ABRI adalah jabatan dengan kekuasaan tertinggi yang mungkin dicapainya.

Jabatan Wakil Presiden pun tidak akan diraihnya selama Soeharto masih berkuasa. Lagi pula, sejak muda, dia tidak mempunyai kemampuan membina pengikut. Dalam semua jabatannya, dari pangkat letnan sebagai Ajudan Kolonel Kawilarang, selaku Panglima Kodam Hasanuddin di Makassar, hingga jenderal bintang empat yang duduk di Mabes ABRI, Jusuf dikenal sebagai orang yang selalu menghindar dari tamu, terutama keluarga dekat atau orang sekampungnya. Di atas pintu kediamannya di Jalan Teuku Umar, misalnya, Jusuf memasang Close Circuit Television (CCTV) sehingga mudah baginya memonitor dan menyeleksi tamu yang berkenan diterimanya. Atau, yang kebanyakan ditolaknya.

Kesalahan Jusuf sebagai Panglima ABRI barangkali adalah kurangnya kepekaan sang pemimpin tentara kepada publikasi yang berlebihan mengenai diri dan kegiatannya. Ketika di televisi (hanya ada TVRI dengan satu saluran waktu itu) setiap malam

Panglima ABRI, Jenderal TNI M. Jusuf di Papua, 1981.

berita Jusuf mengunjungi prajurit di seluruh penjuru Indonesia dan berbicara spontan kepada mereka dengan aksen Bugisnya yang kental—suatu tontonan yang jelas lebih menarik dibanding dengan penampilan Soeharto yang monoton—tentu saja Bapak Presiden merasa terganggu. Popularitas demikian difasilitasi oleh Panglima dan Menhankam itu dengan menyediakan kamera dan peralatan elektronik canggih kepada Pusat Penerangan (Puspen) Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam) agar setiap saat dan dalam waktu singkat bisa mengirimkan laporan perjalanan Jusuf ke TVRI dari mana saja di seluruh pelosok Indonesia. Citra Jusuf dan popularitas Jenderal dari Makassar tersebut bisa juga ditafsirkan sebagai ekspresi kebosanan masyarakat kepada Soeharto. Jadi, kewaspadaan Soeharto kepada Jusuf bukan terutama karena curiga kepada Jusuf secara pribadi. Yang tampaknya lebih ditakuti Bapak Presiden adalah opini publik yang dirasakannya makin kurang positif terhadap diri, keluarga, dan rezimnya, yang terdorong ke permukaan oleh aktivitas dan popularitas sang Panglima.

Jusuf sendiri sesungguhnya adalah tokoh kontroversial. Terlahir sebagai bangsawan tinggi Bugis, Putra Arung (raja) Kajuara, Bone, di kemudian hari—pada masa Demokrasi Terpimpin—dia menghapuskan gelar bangsawan, Andi, di depan namanya. Tapi, tabiat sehari-harinya tetaplah seperti layaknya para bangsawan yang sadar akan tempatnya dalam masyarakat. Mungkin kesadaran sebagai bangsawan itulah yang membuatnya menjaga jarak dengan siapa saja. Dengan latar belakang demikian, Jusuf jelas sulit punya pengikut. Dekat dengan para prajurit sebagai kelompok, Jenderal Jusuf tidak mempunyai kedekatan pribadi hampir dengan siapa pun, juga dalam ABRI. Karakter pribadi seperti itulah yang berperan menghindarkan Jusuf dari kemungkinan berkonspirasi terhadap kekuasaan ketika banyak yang berharap dia bisa membangun kekuatan untuk menggantikan Soeharto. Karena itu, Jusuf selamat.

Sebagai tanda senang dan mungkin juga pernyataan terima kasih Soeharto kepada Jusuf, segera setelah mantan Panglima

ABRI itu pensiun dari dinas ketentaraan, Presiden mendudukkan-nya sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), suatu ja-batan yang posisi protokolnya setara dengan Presiden. Ketika kemudian kembali ke Makassar sebagai pensiunan dan mendiri-kan masjid (Masjid Al-Markaz Al-Islami), sang Presiden menge-rahkan hampir seluruh konglomerat (tidak peduli agama mere-ka) memberikan bantuan. Mobilisasi bantuan yang dikerahkan Soeharto itulah yang menyebabkan masjid, dengan arsitektur cantik, itu tercatat sebagai masjid terbesar Indonesia yang terce-pat selesai pembangunannya.[]

Kisah Tragis Tiga "King Maker"

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Kemal Idris wafat Rabu pagi 28 Juli 2010 dalam usia 84 tahun. Dengan kematian itu habislah tiga *King Maker* yang pernah bekerja keras menaikkan Soeharto ke takhta kepresidenan. Dua lainnya, Hartono Rekso (H.R.) Dharsono dan Sarwo Edhie Wibowo sudah lebih dahulu berangkat ke alam baka. Pada awal pasca-Orde Lama, mereka bertiga secara bersama telah bekerja keras menyingkirkan Sukarno agar terbuka jalan kekuasaan bagi Soeharto.

Kebanyakan orang hanya melihat kepergian Ahmad Kemal Idris sebagai pertanda nyaris habisnya generasi Angkatan 45 dalam TNI. Kemal, begitu almarhum populer dikenal, memang salah seorang tokoh penting dari angkatannya. Tapi, yang mungkin tidak menjadi perhatian orang banyak adalah peran penting Kemal pada dua peristiwa besar dalam sejarah peran politik militer Indonesia. Ketika almarhum wafat, telah terbentang jarak yang jauh antara saat Kemal menghadapkan meriam ke Istana Merdeka dan masa beliau memimpin Kostrad sebagai *King Maker* senior yang berhasil menyingkirkan Sukarno dan menaikkan Soeharto sebagai penggantinya. Memulai kegiatan militernya sebagai pemuda angkatan pertama yang dilatih oleh Jepang, keterampilan militer itulah yang mendorong Kemal memilih lapangan ketentaraan dalam mengabdikan dirinya mempertahankan Indonesia yang baru merdeka. Dia bertempur—*bertarung* istilah yang disukainya—dari Tangerang hingga Madiun untuk akhirnya kembali lagi bergerilya di Jawa Barat menjelang akhir masa Revolusi.

Namun, Kemal untuk waktu yang lama lebih dikenal sebagai seorang komandan tentara di Jakarta dengan pangkat mayor yang—atas perintah KSAD Kolonel A.H. Nasution—memasang

dan mengarahkan laras meriamnya ke Istana Merdeka pada 17 Oktober 1952. Angkatan Darat hari itu mencoba, tetapi gagal, mendesak Presiden Sukarno membubarkan Parlemen. Sebagai salah satu akibatnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nasution kehilangan posisi. Kemal memang tidak kehilangan jabatan sebagai akibat aksi pasang meriam itu, tapi sejak itu dia "dicatat" Sukarno sebagai musuh. Akibatnya, karier militer Kemal terhambat lama. Pada Juni 1956, Kemal terlibat lagi dalam suatu gerakan militer. Kali ini yang jadi target adalah justru Nasution. Sejumlah perwira—sebagian besar berasal dari Siliwangi—waktu itu bertekad menurunkan Nasution dari kursi KSAD. Tapi, usaha yang melibatkan Kolonel Zulkifli Lubis itu juga berakhir dengan gagal. Nasib Kemal pun makin memburuk, sebab selain Sukarno, kini Nasution juga memusuhinya.

Setelah bertahun-tahun tidak punya posisi dan kegiatan sebagai tentara, adalah Letjen Ahmad Yani, pimpinan Angkatan Darat pengganti Nasution, yang memasukkan kembali Kemal dalam jajaran militer. Bersama Kemal, Suwarto—dimusuhi Nasution karena juga ikut gerakan usaha penyingkiran KASAD bersama Lubis dan Kemal—juga mendapatkan peranan militer aktif kembali. Suwarto kemudian menjadi pimpinan Seskoad yang menyiapkan konsep-konsep Angkatan Darat untuk memainkan peran politik, sementara Kemal—setelah bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Kongo menemukan dirinya menjadi perwira yang ditempatkan dalam jajaran Kostrad pimpinan Mayjen TNI Soeharto.

Nama Kemal muncul di publik ketika Panglima Kostrad Soeharto, dalam rangka Konfrontasi dengan Malaysia, menugaskannya sebagai Panglima Komando Tempur (Kopur) Kostrad yang bermarkas di sekitar Medan. Tugas Brigjen TNI Kemal Idris sebenarnya adalah menyiapkan penyerbuan ke Malaysia Barat. Tapi dalam kenyataannya, dia lebih banyak melaksanakan perintah Soeharto mencari jalan damai dengan negara jiran tersebut. Untuk tujuan itulah, Kemal melakukan Operasi Khusus (Opsus) yang lembaganya kemudian, pada masa Orde Baru, digunakan Ali Mur-

topo melancarkan operasi politiknya menyingkirkan musuh-musuh politik Soeharto dan musuh-musuh politik Murtopo sendiri.

Nama Kemal lebih muncul ke permukaan setelah almarhum ditarik ke Jakarta mengambil alih pimpinan Kostrad. Kemal yang pemberani, anti-Komunis, dan musuh lama Sukarno, adalah orang yang tepat membantu Soeharto dalam operasi pemberantasan kekuatan Komunis dan penyingkiran Sukarno. Pada saat itu, Kemal berhadapan kembali dengan dua musuh lamanya, PKI yang diperanginya di Madiun dulu (1948) dan Sukarno yang selama bertahun-tahun ikut mempersulit karier militernya.

Dengan kerja sama Mayor Jenderal H.R. Dharsono, Panglima Siliwangi, dan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), Kemal yang paling senior di antara mereka dengan cepat mentransformasikan trio itu menjadi *King Maker* yang merancang, mendukung, bahkan mendesak Soeharto untuk secepatnya menjadi Presiden menggantikan Sukarno. Kemal adalah tokoh yang menggagas beroperasinya pasukan tanpa tanda satuan yang mengepung Istana Kepresidenan pada 11 Maret 1966. Pelaksana operasi adalah Kolonel Sarwo Edhie.

Kalau pada 17 Oktober 1952, Kemal gagal memaksa Sukarno membubarkan Parlemen, pada 11 Maret 1966 Kemal berhasil memaksa Sukarno menyerahkan "kekuasaan" kepada Soeharto. Seperti diketahui, beberapa jam setelah operasi anak buah Sarwo Edhie di seputar Istana itu, Sukarno menyerahkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Soeharto. Dengan mandat dari Presiden, Pemimpin Besar Revolusi dan Panglima Tertinggi ABRI itulah Soeharto segera membubarkan PKI, menangkap

Pangkostrad, Mayjen Kemal Idris, 1967.

sejumlah anggota kabinet, dan melakukan pembersihan dalam tubuh militer. Mula-mula yang disingkirkan adalah mereka yang berhaluan kiri, tapi kemudian para simpatisan Sukarno juga mendapat giliran. Setelah yang kiri dan Sukarnois dibersihkan, barulah tiba giliran teman seiring, para pendukung, disingkirkan.

Sebagai jenderal yang punya insting politik yang canggih, Soeharto tahu riwayat hidup Kemal, seorang pejuang berwatak pemberang, berpendirian tegas, dan tidak kenal kompromi. Jenderal seperti Kemal Idris itu, bagi Soeharto, keberadaannya di Jakarta hanya akan membahayakan kekuasaan sang Presiden. Setelah memantapkan kontrolnya selepas menghancurkan PKI dan menyingkirkan para loyalis Sukarno, tibalah giliran Kemal untuk "dibereskan". Melepaskan jabatan Panglima Kostrad, Kemal dikirim ke Makassar menduduki posisi Panglima Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan), lembaga yang baru saja diciptakan tanpa wewenang yang jelas.

"Kamu Masih Militer, Nggak?"

Bersama Kemal, Dharsono dan Sarwo Edhie juga terlempar dari posisi strategis yang secara bersama telah mereka pergunakan untuk menaikkan Soeharto. Sarwo Edhie ditugaskan ke Medan sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam), dan Dharsono ke Bangkok sebagai Duta Besar. Beberapa waktu kemudian Sarwo Edhie dilempar lebih jauh lagi, sebagai Pangdam di Papua. Sebenarnya Sarwo tadinya sudah diwacanakan mendapat pos sebagai Duta Besar di Moskow. Tapi, pada saat terakhir terjadi perubahan, entah apa alasannya. Adapun Dharsono, dia juga kemudian dimutasi ke negara yang jauh lebih kecil dan terpencil, sebagai Dubes di Phnom Penh, Kamboja.

Di markasnya di Makassar, pada September 1972 Kemal tiba-tiba mendapat perintah menyerahkan jabatan Panglima Kowilhan kepada Jenderal Witono. Perintah disampaikan oleh Jenderal TNI Sumitro, Pangkopkamtib. Pada saat yang sama, Kemal diminta bersiap-siap ke Beograd menduduki jabatan Duta Besar

untuk Yugoslavia. Terkejut karena tidak pernah membayangkan dirinya dilempar jauh sebagai Duta Besar, Kemal ke Cendana "mengadukan nasib"-nya langsung kepada Soeharto. Bapak Presiden cuma berkata, "Kamu masih militer, nggak? Kalau kamu masih militer, ini perintah." Kemal tidak punya pilihan lain. Sebagai tentara, Kemal tidak bisa menolak perintah. Dia berangkat ke pos barunya, meski jabatan itu tidak disukainya.

Sebagai Duta Besar di Beograd, almarhum harus tinggal beberapa tahun di Yugoslavia menghabiskan banyak waktunya berburu di hutan-hutan sekitar ibu kota bersama Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia waktu itu. Ketika berkunjung ke Jakarta pada 1974, Kemal kebetulan jumpa Laksamana Sudomo yang waktu itu memimpin Kopkamtib. Dari Sudomo-lah, menurut Kemal, dia tahu bahwa laporan tentang dirinya kepada Soeharto bersumber dari Ali Murtopo.

BERTAHUN-TAHUN MENJADI ATASAN KEMAL, Soeharto sebenarnya tidak memerlukan laporan Ali Murtopo untuk menyingkirkan mantan anak buahnya itu. Soeharto tahu riwayat hidup serta sepak terjang Kemal. Soeharto pasti juga tahu bahwa Kemal sebagai Pangkostrad pernah menolak saran Sultan Hamengkubuwono IX dan Mashuri, S.H. untuk mengambil alih kekuasaan dari Soeharto yang mereka nilai terlalu lamban menyelesaikan urusan Sukarno. Loyalitas Kemal kepada diri sang Presiden itu tetap saja tidak menggoyahkan kecurigaan Soeharto kepadanya.

Ketika kemudian balik ke Jakarta sebagai pensiunan Dubes dan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, dengan penuh harga diri Kemal menolak tawaran fasilitas bisnis dari Soeharto. "Pak Harto sudah sibuk mengurusi negeri ini, biarlah saya mengurusi diri saya sendiri," begitu kira-kira ucapan Kemal menolak tawaran fasilitas dari Soeharto. Setelah itu, Kemal dikenal sebagai "Jenderal Sampah", sebab perusahaannya memang bergerak di bidang pengolahan sampah. Pilihan jenis bisnis itu bagi seorang pejuang seperti Kemal, menjelang akhir hayatnya, sangat simbolis tapi sekaligus juga ironis. Pada waktu itu, dia sering mengeluh terhadap

perlakuan para pejabat di kantor Gubernur Jakarta (DKI) yang berurusan dengan perusahaan pembersihan sampah miliknya. Tapi, Kemal tidak lagi punya kekuasaan untuk berbuat sesuatu kepada para birokrat yang dinilainya sangat korup. Dia hanya jenderal pensiunan yang tidak pula dekat dengan lingkaran kekuasaan Soeharto.

Ketika jumpa Soeharto pada suatu reuni para mantan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor, Kemal menyampaikan kepada sang Presiden pengalamannya berurusan dengan DKI. "Apa komentar Pak Harto?" tanya saya. "Dia senyum saja," kata Kemal. Kisah Kemal tak berakhir pada sampah. Ketika dilihatnya Soeharto sudah menjadikan dirinya penafsir tunggal konstitusi dan Pancasila pada 1980, Kemal secara terbuka menyatakan simpatinya kepada para pemrotes yang secara bersama menandatangani petisi (Petisi 50), meski Kemal sendiri tidak ikut bertanda tangan. Tentu saja sejak itu Soeharto makin kesal kepadanya. Dan seperti biasa, makin sulitlah kegiatan bisnis Kemal.

JIKA DIBANDINGKAN DENGAN DHARSONO, sebenarnya nasib Kemal masih lebih baik. Dharsono malah sempat dipenjara karena dituduh terlibat Peristiwa Tanjung Priok. Padahal, yang dilakukannya bersama A.M. Fatwa hanyalah menyatakan protes terhadap pembantaian rakyat di kawasan Tanjung Priok oleh pasukan ABRI. Bersama A.M. Fatwa, Dharsono mendekam sekian tahun di penjara. Sekali lagi nasib Dharsono lebih buruk, bukan cuma menjadi narapidana, melainkan semua tanda jasanya juga dicabut. Ketika meninggal, Dharsono dimakamkan di pemakaman umum Bandung tanpa upacara militer. "Seperti menguburkan kucing saja," gerutu Kemal di pemakaman teman seperjuangannya itu.

Berbeda dengan kedua teman sesama *King Maker* lainnya, Sarwo Edhie—seorang kolonel di antara dua koleganya yang Jenderal waktu itu—tidak pernah jelas apa kesalahannya yang menjadi alasan bagi Soeharto untuk secara perlahan "menamatkan" karier militernya. Cerita yang beredar waktu itu adalah bah-

Panglima Siliwangi Jenderal H.R. Dharsono bersama Komandan RPKAD, Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, 1966.

wa dalam penyingkiran Sarwo, Ali Murtopo memainkan peran besar. Ali yang sejak awal kabarnya sudah memproyeksikan dirinya suatu kali akan menggantikan Soeharto, masuk akal kalau sejak dini—dengan menggunakan "tangan Soeharto"—secara perlahan menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggapnya potensial bakal jadi saingannya pada masa mendatang.

Berbagai sumber waktu itu menjelaskan bahwa isu Sarwo Edhie bakal me-Najib-kan (menyingkirkan Soeharto seperti Kolonel Nasser di Mesir menyingkirkan Jenderal Najib, seniornya yang bersamanya menggulingkan Raja Farouk) kabarnya berasal dari kelompok Ali Murtopo. Isu demikian memang sempat beredar di kalangan terbatas di Jakarta. Dalam rangka isu itu, tatkala menjabat sebagai Panglima di Medan, pada suatu hari pagi-pagi sekali Brigjen TNI Sarwo Edhie mampir di rumah pondokan saya di Matraman Raya dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Cijantung. "Dari mana Bapak pagi-pagi sekali?" tanya saya dengan sedikit heran. "Dari Cendana," jawab beliau. Cendana itu tempat kediaman pribadi Presiden Soeharto. Acara penting pertemuan Sarwo Edhie dengan Soeharto pagi itu adalah membicarakan soal

isu "Sarwo akan menggulingkan Soeharto". Sarwo bertanya, "Pak Harto, apakah soal itu sudah Bapak cek?" Apa jawab Soeharto? "Beliau hanya tersenyum." Tidak ada komentar Sarwo atas jawaban Soeharto yang jelas mengecewakannya itu.

Mengetahui rekam jejak Sarwo yang wataknya bertolak belakang dari Kemal yang pemberang, dan Dharsono yang suka politik (dekat dengan orang-orang Partai Sosialis Indonesia, PSI), Soeharto hampir bisa dipastikan tidak mudah percaya Komandan RPKAD itu akan menggulingkannya. Ali Murtopo mungkin saja mencoba menghasut Soeharto, tapi kebijakan sang Presiden diputuskannya tentu berdasarkan kalkulasi untung rugi bagi kelanggengan kekuasaannya sendiri.

"Tidak Menduga Sama Sekali."

Pengalaman bertahun-tahun bersahabat dengan Sarwo Edhie meyakinkan saya bahwa almarhum bukan orang yang tahu politik, juga bukan seorang yang ambisius. Sarwo cuma tentara, suatu profesi yang dicintainya, tidak lebih dari itu. "Apakah Bapak tidak curiga pada pagi 1 Oktober 1965 itu PKI ada di balik Gestapu?" tanya saya kepada beliau sekian belas tahun kemudian setelah peristiwa berdarah itu. "Tidak menduga sama sekali, sebab PKI itu, kan menerima Pancasila, Manipol, dan selalu menyatakan kesetiaannya kepada Pemimpin Besar Revolusi," jawab beliau dengan polos. Ini buat saya merupakan indikator yang jelas mengenai ren-

Ahmad Yani, Sarwo Edhie, dan Suryo Sumpeno (duduk) sebagai perwira PETA pada zaman Jepang.

dahnya pengetahuan dan minat Sarwo kepada politik. Padahal, beberapa hari sebelum terbunuh pada subuh satu Oktober itu, Panglima Angkatan Darat, Ahmad Yani datang berkunjung ke markas RPKAD dan memberi taklimat kepada pasukan pimpinan Sarwo. Yani dan Sarwo adalah teman lama sejak latihan militer pada zaman Jepang. Keduanya berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Satu sumber mengisahkan kepada saya bahwa suatu saat Yani sebenarnya ingin mengambil Sarwo sebagai ipar. Kedekatan kedua perwira TNI asal Purworejo itulah kabarnya yang ikut membakar kemarahan Sarwo kepada PKI setelah Gestapu.

Bahwa Sarwo sebagai Komandan pasukan khusus dalam masa tegang antara Angkatan Darat dan PKI sama sekali tidak tahu perkembangan politik, itu berarti Yani tidak mengajaknya bicara politik. Kemungkinan besar Yani tidak merasa perlu bicara politik kepada Sarwo yang kesetiaannya jelas tidak dia ragukan. Tapi, juga bukan tidak mungkin karena Yani tahu bahwa Sarwo itu hanya tentara yang ikut perintah komandan dan tidak tertarik politik.

Kemudian, terbukti bahwa memang ada pejabat-pejabat penting Angkatan Darat masa itu yang tidak tahu atau tidak tertarik politik. Panglima Jakarta Raya waktu itu, Mayjen TNI Umar Wirahadikusuma adalah salah satunya. Fahmi Idris, tokoh HMI yang kemudian menjadi menteri pada era pasca-Orde Baru, punya cerita menarik mengenai Umar dan politik. Syahdan, pagi hari satu Oktober 1965, Fahmi Idris dan Ekky Syahruddin, juga tokoh HMI, menemui Umar di markasnya yang terletak di depan kantor Pertamina sekarang. "Pak Umar tidak tahu dan tidak curiga kalau kejadian pagi hari itu di belakangnya ada berdiri PKI. Kami mencoba meyakinkannya, tapi sulit," cerita Fahmi. Dalam perjalanan pulang dari Markas Kodam, Ekky curiga, jangan-jangan Umar terlibat. "Ah, tidak mungkin. Dia tidak tahu saja," kata Fahmi pula.

Kembali ke kasus Sarwo Edhi, untuk mengerti langkah Soeharto menyingkirkannya harus dicari penjelasan lain. Baik Jusuf Wanandi maupun Julius Pour dalam buku mereka masing-masing

bercerita bahwa Soeharto mulai tidak percaya bahkan curiga kepada Kolonel Sarwo Edhie pada hari kedua pasca-pembantaian Jenderal oleh Gestapu. Ceritanya bermula ketika dari pangkalan udara Halim Perdanakusuma, Sarwo yang baru saja menyelesaikan pendudukan lapangan terbang itu berencana melapor ke Soeharto. Laksamana Muda Udara Herlambang meyakinkan Sarwo bahwa Jenderal Soeharto ada di Bogor. Dan kalau Sarwo mau ke Bogor, sang Kolonel dipersilakan ikut terbang bersama dengan menggunakan helikopter yang akan membawa Herlambang ke Istana Bogor. Sarwo dengan pengawalan Mayor Gunawan Wibisono, ikut terbang bersama perwira tinggi Angkatan Udara itu. Tiba di Istana, Soeharto ternyata masih dalam perjalanan. Sarwo malah sempat jumpa Sukarno yang berpakaian dalam dan tidak pakai kopiah. Komandan RPKAD yang memang tidak pernah melihat Sukarno dari dekat, tidak segera mengenal "orang tua" itu. Kepada saya, Sarwo menceritakan kedongkolannya kepada "orang tua" yang memandang terbunuhnya Yani sebagai hal biasa dalam Revolusi. "Orang dibunuh kok, soal biasa," kata Sarwo kesal.

SOEHARTO MENGANGGAP Sarwo melapor kepada Sukarno sebelum kepada Pangkostrad. Soeharto marah. Sarwo boleh kesal kepada Sukarno, tapi pertemuannya dengan Pemimpin Besar Revolusi itu mendorong Soeharto menganggap Komandan RPKAD itu punya rencana sendiri yang berbeda dengan kebijakannya sebagai pimpinan sementara Angkatan Darat. Kecurigaan dan kemarahan Soeharto kepada Sarwo itu berakibat fatal. Karier militer mantan Komandan RPKAD dibunuh secara kejam meski perlahan-lahan. Dari Medan dilempar ke Papua, dari Papua ke Akabri Magelang. Dari Magelang dikirim ke Korea sebagai Dubes. Pulang ke Jakarta didudukkan di Departemen Luar Negeri sebagai Inspektur Jenderal (Irjen). Dari Pejambon rencananya Sarwo akan dilempar lebih jauh lagi, ke Brasil. Entah mengapa, terjadi perubahan. Digeser beberapa puluh meter dari kantor Irjen Deplu, Sarwo menemukan dirinya mengurusi kursus Pancasila di BP7.

Tidak bisa menolak keputusan Soeharto mendudukkannya pada kursi Kepala BP7, Sarwo Edhie hanya bisa merasa sedih terhadap perlakuan atasannya itu.

> Kepada kami anak-anaknya, Papi sempat mengutarakan rasa sedihnya. Ya, benar, dia sempat merasa kecewa dengan keputusan itu. Bukan berarti Papi mengecilkan arti BP7, melainkan karena dia merasa langkahnya mendadak dibelokkan ke arah yang tidak pernah dia bayangkan. Papi terlahir sebagai orang yang sangat mencintai dunia militer. Dia masih memiliki hasrat berkobar untuk meneruskan semangat "Sarwo Edhie" seperti yang dia tunjukkan saat peperangan kemerdekaan Agresi Militer Belanda ke-2, masa-masa memimpin RPKAD, dan era pemberantasan PKI.

Begitu cerita Ani Yudhoyono, salah seorang putri Sarwo Edhie, dalam bukunya, *Kepak Sayap Putri Prajurit*. Sarwo sebenarnya sudah merasa disingkirkan ketika dia akan dikirim sebagai Dubes di Korea Selatan. Saya ingat waktu itu dia bertekad menolak dan akan pensiun saja. Di Cijantung di depan Ibu Sarwo, saya berusaha meyakinkan Jenderal itu agar menerima posisi Dubes, sebab kalau dia pensiun, pasti akan selalu diintai intel. Artinya, hidupnya tidak akan tenang. "Bapak nikmatilah posisi dubes itu," bujuk saya. Sarwo yang pernah Sesko di Australia, kemudian bersedia menjadi Dubes asal ditempatkan di Canberra. "Pak, posisi di sana itu baru saja diisi oleh Jenderal Hertasning." Akhirnya, Pak Sarwo berangkat juga ke Korea Selatan sebagai Dubes Indonesia pertama di Seoul. Ketika saya mengunjunginya di tempat tugasnya, saya tidak melihat atau mendengar keluhan dari Pak Dubes. Sarwo seorang serdadu yang terbiasa melakukan perintah atasannya sebaik mungkin tanpa mengeluh, apalagi di depan orang lain.

KALAU ANDA PERCAYA PADA MISTIK JAWA, dengarlah penjelasan seorang paranormal mengenai akar buruknya hubungan Soeharto-Sarwo. Cerita paranormal itu disampaikan kepada saya di

Praha beberapa waktu setelah Soeharto meninggal. Kata paranormal tersebut, Soeharto yakin bahwa yang punya wangsit (wahyu) setelah dirinya adalah Sarwo Edhie. Untuk memperpanjang dan mengamankan kekuasaannya, maka semua jalan yang dipandang Soeharto mungkin dimanfaatkan Sarwo Edhie mempergunakan wahyunya untuk "naik takhta", harus ditutup.

Itulah, katanya, penyebab dihabisinya karier militer Sarwo Edhie sedini mungkin. Kata paranormal itu lagi, Soeharto lupa bahwa wangsit Sarwo itu tidak kembali ke langit ketika mantan Komandan RPKAD itu wafat setelah koma selama sekitar setahun. Wangsit itu tetap padanya untuk akhirnya hinggap ke putrinya, Herawati Kristiani Yudhoyono. Itulah, kata sang paranormal, penjelasan di balik terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden Republik Indonesia. "Ah, itu cerita omong kosong. Pak Harto marah kepada Bapak karena ke Bogor itu. Bapak dicurigai sebagai orang ambisius oleh Soeharto," kata Ibu Sunarti Sarwo Edhie, istri Jenderal Sarwo Edhie, kepada saya pada 29 Desember 2012 di rumah Cijantung, Jakarta Timur.

Masih mengenai hubungan Soeharto dengan Sarwo Edhie, Daud Sinyal, wartawan senior yang bersama saya meliput operasi

Soeharto dan Sarwo Edhie, 1966.

RPKAD di Jawa Tengah pada November 1965, mempunyai penjelasan tambahan. "Sarwo itu teman Yani, sementara Soeharto tidak suka kepada Yani." Dan pada hari-hari awal Gestapu, Sarwo melapor langsung kepada Jenderal Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata waktu itu. Baru setelah Soeharto menjadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), Sarwo melapor langsung kepada Soeharto. Faktor ini tentu berpengaruh juga terhadap sikap Soeharto kepada Sarwo Edhie. Tapi, penyingkiran Sarwo Edhie bisa dilihat juga sebagai bagian dari kebijakan Soeharto membersihkan teman-teman Yani dari pusat kekuasaan militer.

SAYA BERSAHABAT dengan Sarwo Edhie sejak almarhum masih berpangkat kolonel pada masa operasi pembersihan terhadap Gestapu. Persahabatan berlanjut hingga akhir hidupnya pada November 1989. Kami berjumpa di Solo dalam posisi saya sebagai reporter muda yang meliput operasi RPKAD membersihkan Gestapu di kalangan militer Jawa Tengah waktu itu. Persahabatan kami berlangsung hampir 30 tahun lamanya. Nah, selama bergaul dengan almarhum tidak sekali pun saya mendengar almarhum menggerutu mengenai Soeharto. Satu-satunya kritik Sarwo Edhie kepada Soeharto yang diucapkannya pada tahun delapan puluhan adalah: "Kok, Pak Harto itu tak seorang pun anaknya yang jadi tentara." Anak lelaki serta tiga mantu Sarwo memang semua tentara. Putranya, Jenderal Pramono Edhie Wibowo, bahkan berhasil menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) setelah sebelumnya menjadi Komandan Jenderal Kopassus, Panglima Kodam Siliwangi, dan Panglima Kostrad.

Prinsip Soeharto tampaknya adalah, kalau bisa kaya raya dengan cepat, mengapa harus bersusah-susah jadi bawahan sebelum akhirnya jadi jenderal. Lagi pula jadi jenderal pun belum tentu kaya. Buktinya adalah Sarwo Edhie sendiri. Almarhum adalah seorang Jenderal terkenal yang tetap tidak punya apa-apa—bahkan tidak punya rumah pribadi—hingga akhir hayatnya. Dalam hal ini, Soeharto jelas lebih cerdik, praktis, dan realistis tinimbang

Sarwo Edhie. Buktinya, anak-anak Soeharto difasilitasi untuk berdagang saja. Dan memang semua kemudian menjadi kaya raya.[]

Sudomo, Laksamana di Tengah Lautan Jenderal

Sudomo yang meninggal pada 18 April 2012 adalah salah seorang tokoh terkemuka zaman Orde Baru yang bertahan lama di pusat kekuasaan. Berkat hubungan khususnya dengan Presiden Soeharto sejak masa *Operasi Trikora* Pembebasan Irian Barat, Sudomo menjadi satu-satunya perwira Angkatan Laut yang menduduki posisi penting hampir sepanjang sejarah Orde Baru. Sudomo pernah menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Laut, pernah memimpin Kopkamtib, Wakil Panglima ABRI, Menteri Perburuhan, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam), dan akhirnya menduduki kursi Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Jauh sebelum jabatan-jabatan penting di tingkat pusat itu, Kolonel (waktu itu) Sudomo sudah menjadi komandan operasi yang melibatkan beberapa kapal Motor Torpedo Boat (MTB) Angkatan Laut dalam operasi penyusupan pasukan ke daratan Irian Barat pada 1962. Kisah tentang operasi yang dipimpin Sudomo itu menjadi amat terkenal karena salah sebuah MTB yang dikomandoinya bernama *Macan Tutul*. Ikut berlayar di kapal tersebut
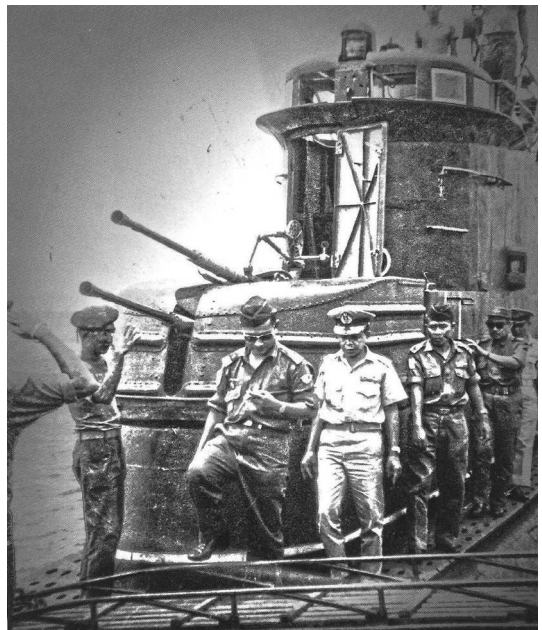
Panglima Mandala, Soeharto dan Kolonel Sudomo memeriksa kesiapan Angkatan Laut menjelang operasi merebut Irian Barat, 1962.

adalah Laksamana Pertama TNI Yos Sudarso. Sang Laksamana tewas bersama sejumlah anak buahnya ketika MTB yang ditumpanginya pada 15 Januari 1962 dipergoki dan akhirnya ditenggelamkan oleh kapal perang Belanda di Laut Arafuru.

Sudomo kemudian ditarik ke Makassar membantu Panglima Mandala, Mayjen TNI Soeharto. Kedudukan Sudomo di Makassar adalah Panglima Angkatan Laut Mandala. Kerja sama Soeharto-Sudomo di Makassar itulah yang menjadi awal sebuah hubungan kerja yang berlangsung puluhan tahun.

Bersama Sudomo, juga ada Leo Wattimena. Leo, seorang penerbang tempur, dipercayai menduduki jabatan Panglima Angkatan Udara Komando Mandala. Hubungannya dengan Soeharto waktu itu sangat baik. Kalau Leo terbang, biasanya Soeharto menanti di pangkalan udara sampai Leo mendarat kembali. Tapi, hubungan Leo dengan Soeharto menjadi rusak waktu Gestapu. Karier Leo berakhir pada posisi sebagai Duta Besar Indonesia di Italia, berkedudukan di Roma. Dalam kunjungan saya ke Italia pada 1970, saya jumpa Leo. Waktu itu dia masih berharap dapat ditempatkan di Dephankam kalau pulang ke Jakarta selepas jadi Dubes. Tapi, bagi Soeharto dia sudah selesai.

Mendekati rekor Sudomo di sekitar Soeharto—berkuasa selama 32 tahun—hanya ada tiga orang penting Orde Baru lainnya: B.J. Habibie, menduduki jabatan Menteri Riset dan Teknologi dari 1978 sampai akhirnya menjadi Wakil Presiden; Harmoko, menjadi satu-satunya orang Indonesia yang berhasil menduduki jabatan Menteri Penerangan sepanjang lebih dari 10 tahun tanpa henti, dan beberapa tahun terakhir dirangkap pula dengan jabatan Ketua Golkar sebelum menjadi Ketua Parlemen; L.B. Moerdani, adalah kepala intel militer terlama (14 tahun) dalam sejarah Indonesia dan Pangab satu-satunya yang tidak pernah memimpin satuan lebih besar dari batalion. Sudharmono juga sebaiknya dicatat sebagai Sekretaris Negara terlama, sebelum akhirnya menjadi Wakil Presiden.

Banyak di Antara Mereka Dikirim ke Penjara

Menjelang Sidang Umum MPR bulan Maret 1978, para pimpinan mahasiswa dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bogor mendatangi Istana Kepresidenan pada tanggal 18 bulan itu. Tujuan kunjungan, mendesak Soeharto agar tidak lagi melanjutkan kekuasaannya sebagai Presiden lewat sidang MPR bulan Maret tahun itu. Soeharto tidak ada di Istana. Tapi dua hari kemudian, Pangkopkamtib Sudomo mulai bertindak.

Sejumlah koran nasional diberangus. Mereka dituduh membesar-besarkan kegiatan mahasiswa. Langkah Sudomo berikutnya, tentara dikerahkan menduduki sejumlah kampus. Aparat Kopkamtib menahan 143 mahasiswa. Banyak di antara mereka dikirim ke penjara setelah diadili. Dan surat kabar-surat kabar yang terberangus hanya bisa terbit kembali setelah terlebih dahulu setuju dengan syarat—kesediaan menyensor diri sendiri—yang disiapkan oleh Sudharmono, Sekretaris Negara waktu itu.

Dalam kedudukannya sebagai Pangkopkamtib dan Wakil Panglima ABRI, Sudomo juga "ditugaskan mengawasi" Panglima ABRI Jenderal Jusuf. Tahu dirinya terus diamati, Jusuf menikmati kedudukannya sebagai Panglima dengan menyibukkan diri berkeliling meninjau pasukan di hampir seluruh penjuru Indonesia. Jenderal Jusuf adalah Menteri Hankam dan Panglima ABRI yang menghabiskan paling banyak waktu di lapangan. Sebagian besar urusan kantor diserahkan Jusuf kepada Sudomo, Wakilnya. Dengan Moerdani, Kepala Intel dan Sudomo sebagai Wapangab dan Pangkopkamtib yang secara bersama "bertugas" mengawasi Pangab, Jusuf memang tidak mungkin menjadi ancaman bagi Soeharto.

Oleh karena itu, ketika Jenderal Jusuf mencoba angkat bicara politik dengan menyebut ABRI harus berada di atas semua golongan, dan bahwa para jenderal tidak boleh dagang atau menjadi gubernur, adalah Sudomo yang ditugaskan Soeharto berkeliling ke Kodam-Kodam menyampaikan pesan Bapak Presiden yang menyebut pendapat Pangab itu tidak realistis. Sudomo juga

bertugas meyakinkan para petinggi Golkar, ABRI akan tetap mendukung mereka.

MESKI LAMA JADI ORANG PENTING, Sudomo dalam tahun-tahun terakhir Orde Baru bukan lagi pejabat yang diperhitungkan. Sebagai Ketua DPA tugasnya hanya menasihati pemerintah, dan masukan itu sifatnya rahasia, artinya tidak untuk disebarkan kepada publik. Menurut beberapa mantan anggota di DPA, kebanyakan masukan mereka tidak dihiraukan Soeharto. Karena itu banyak yang memplesetkan DPA sebagai Dewan Pensiunan Agung. Mungkin karena pernah lama menjadi pejabat pemerintah yang selalu menjadi sumber berita pers, Sudomo sudah amat terbiasa berurusan dengan wartawan. Dan dalam suasana persaingan pers yang makin ketat, wartawan tentu senang mendapatkan berita dari orang seterkenal Sudomo. Dengan latar belakang seperti inilah, munculnya sejumlah komentar Sudomo yang kadang menimbulkan kebingungan publik menjelang berakhirnya rezim Orde Baru.

Tentu tidak bisa kita menuduh Sudomo sebagai menderita *post-power syndrome*, sebab mantan Laksamana ini kabarnya waktu itu masih mempunyai akses cukup besar ke Presiden Soeharto sampai saat terakhir hidup sang mantan Presiden. Paling-paling kita bisa melihat Sudomo sebagai orang yang sudah pindah kursi, tapi merasa masih duduk di kursi lamanya. Barangkali karena dihinggapi "penyakit" lupa—yang kabarnya sering menyerang pembesar yang telah kehilangan jabatan penting—itulah, maka Sudomo yang tetap bersahabat dengan wartawan, kadang menjadi sumber berita untuk hal-hal yang bukan lagi wewenangnya.

Pada suatu hari menjelang krisis Orde Baru, misalnya, Sudomo mendadak muncul secara dramatis di berbagai media. Waktu itu ada kerusuhan di Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai bagian dari kerusuhan menjelang jatuhnya Orde Baru. Mengulangi kebiasaan lamanya sebagai Pangkopkamtib atau Menkopolkam, Sudomo mengomentari kerusuhan tersebut dan dengan yakin menyebutnya sebagai didalangi oleh DI/TII. Menurut teman yang

mendengarkan penjelasan Sudomo itu, gaya penjelasan itu santai tapi meyakinkan, persis seperti ketika Sudomo masih memimpin Kopkamtib dulu. "Jangan-jangan beliau masih merasa berada di kantor Kopkamtib," gurau teman saya itu. Tapi, teman wartawan itu tiba-tiba dengan serius bertanya kepada saya, "Menurut Bung, apakah mungkin masih ada DI/TII yang potensial mengacau?"

Dari dulu saya tidak yakin ada DI/TII yang mengacau pada masa Orde Baru ini. Bukti yang dikemukakan pemerintah waktu itu kurang meyakinkan saya sebagai peneliti maupun sebagai wartawan. Yang saya dengar sepanjang usia Orde Baru sehubungan dengan soal DI/TII, terutama ketika Ali Murtopo masih hidup, soal tersebut adalah hasil rekayasa Opsus pimpinan Ali Murtopo. Untuk tujuan politiknya, Ali Murtopo memang terkenal menggunakan cara apa saja. Ketika, misalnya, beroperasi memberantas PRRI di Sumatra Barat, Ali Murtopo bahkan menggunakan orang-orang Komunis (terutama Pemuda Rakyat) untuk mengejar orang-orang PRRI. Ketika melawan PKI setelah Gestapu, dan kemudian untuk mendiskreditkan kekuatan politik Islam agar tidak menjadi saingan Golkar, Ali Murtopo menggunakan jaringan lama DI/TII yang sebelumnya telah berhasil "dijinakkan" oleh Siliwangi di Jawa Barat. Dan seperti diketahui, dengan menggunakan berbagai nama organisasi, orang-orang DI/TII itu di kemudian hari disikat sendiri oleh Ali Murtopo ketika kegunaan mereka sudah tidak diperlukan lagi.

Namun, seandainya memang benar DI/TII menjadi otak kerusuhan di Tasikmalaya atau di mana saja dan Sudomo memiliki bukti, seyogianya mantan petinggi Kopkamtib itu melaporkan temuannya itu kepada Pangab/Ketua Bakostranas yang bertanggung jawab atas keamanan waktu itu. Artinya, Sudomo yang bukan lagi pejabat keamanan tidak sewajarnya mengumumkannya sendiri, sebab itu bukan wewenangnya. Keamanan dan ketertiban tidak mungkin tercapai jika aturan main kita langgar semau kita saja. Saya yakin Sudomo tentu amat mafhum tata krama itu. Bukankah beliau lama memimpin Kopkamtib yang tujuannya menciptakan keamanan dan ketertiban?

Lagi pula sebagai mantan perwira tinggi, sudah sepatutnya Sudomo memberikan contoh bagaimana menghormati dan mempercayai perwira-perwira ABRI juniornya yang bertugas menangani urusan keamanan. Dengan mengumumkan langsung sinyalemennya kepada masyarakat, Sudomo memberikan kesan kuat dia tidak lagi percaya kepemimpinan ABRI. Ironisnya pula, ketika aparat keamanan mencoba melacak sinyalemen yang diumumkan Sudomo, hasilnya ternyata berbeda. "Tidak ada itu DI/TII dalam kerusuhan Tasik. Saya ini, kan lurahnya di sini, yang lebih tahu tentang Tasik," kata Mayjen TNI Tayo Tarmadi, Pangdam Siliwangi waktu itu. Pangdam Siliwangi sebelumnya, Mayjen TNI Himawan Sutanto menyebut para mantan DI/TII yang dimanfaatkan oleh Murtopo itu sebagai sesuatu yang "jadi-jadian".

BERITA BERIKUTNYA tentang Sudomo menyangkut keherananannya mengapa mantan Laksamana ini dituduh anti-Islam. Ini kejadian sebelum berakhirnya Orde Baru. Saya sendiri sulit percaya seorang pejabat tinggi Indonesia memiliki sikap anti-Islam. Republik Indonesia adalah negeri dengan penduduk Islam terbesar di dunia, dan persentase umat Islam di Indonesia jauh di atas 80 persen. Dengan data seperti itu bagaimana mungkin seseorang bisa menduduki jabatan pemerintah sembari membenci rakyat banyak di negeri yang dikelola berdasarkan Pancasila dan kedaulatan rakyat? Ini tentu tidak logis. Tapi, yang logis itu juga sudah terbukti tidak selalu benar, bukan?

Sekali lagi di sini terjadi proses lupa pada diri Sudomo. *Pertama*, dia lupa bahwa DI/TII pada masa Orde Baru dulu itu pada dasarnya sengaja "dibangkitkan dari kuburnya" oleh Ali Murtopo untuk dipakai menakut-nakuti, memojokkan, dan menekan aspirasi politik Islam. *Kedua*, Sudomo lupa bahwa Orde Baru pada tahun-tahun terakhirnya tidak lagi melihat Islam sebagai musuh. Buktinya, Soeharto mendukung berdirinya Bank Muamalat dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), bahkan mendorong B.J. Habibie, menteri kesayangannya, menjadi Ketua ICMI. Dalam keadaan begini, maka Sudomo terasa tampil sungguh ba-

gaikan makhluk yang datang dari masa lalu. Dengan latar belakang seperti ini pula tidak mengherankan jika banyak orang marah. Sedemikian marahnya, hingga banyak yang menuduh Sudomo—waktu itu beragama Protestan—sebagai anti-Islam.

"*You* Umur Berapa Sekarang?"

Beberapa tahun setelah Soeharto meninggal, pada suatu sore saya kebetulan jumpa Sudomo di kamar kecil Hotel *Jakarta Hilton* atau *The Sultan* sekarang. Sebagai wartawan, saya dulu sering mewawancarai Sudomo dalam kedudukan beliau sebagai Pangkopkamtib maupun sebagai Menko Polkam. Yang saya ingat, dalam segala jabatan yang didudukinya, di mana pun saya jumpa, sikapnya selalu sama: ramah, hangat, dan bersahabat. Meski memimpin Kopkamtib, lembaga yang menakutkan masa itu, pada masa tuanya Sudomo tidak pernah bersikap salah tingkah.

Beliau ini tampaknya masih ingat saya. Tapi, tentu ceritanya kini sudah lain. "*You* umur berapa sekarang?" Setelah mendapat jawaban, dia mulai bercerita tentang kesibukannya sebagai penyelam dan kesenangannya main golf yang masih dilakoninya pada usia tuanya. Sudomo kelihatannya bangga betul bahwa dalam usianya yang amat lanjut, dia masih sehat dan tetap beraktivitas, termasuk menyelam di laut. "Pak Domo, kenapa Anda tidak menulis memoar?" tanya saya. Jawabnya dengan cepat: "Saya ingin menikmati sisa hidup saya dengan tenang. Saya tidak mau ribut-ribut." Beliau, katanya, tidak ingin terlibat ribut seperti yang terjadi antara Jenderal (Purn.) Sumitro dan Jenderal (Purn.) Maraden Panggabean yang terpicu oleh memoar Sumitro.

Berbeda dengan para mantan pembesar yang dulu kerap "mengorbankan" banyak orang pada masa berkuasanya pada zaman Orde Baru dan karena itu cenderung bertingkah serbasalah pada masa pasca-Orde Baru, Sudomo biasa-biasa saja. Dia seperti orang yang tidak pernah bersalah, meski pernah memimpin Kopkamtib. Ketika fenomena Sudomo itu saya bicarakan dengan seorang purnawirawan Angkatan Laut, dia menjelaskan:

"Sudomo itu tahu diri. Sebagai perwira Angkatan Laut dia tahu dirinya hanya alat bagi Soeharto. Jadi, tidak pernah benar-benar merasa berkuasa." Kendati demikian, Laksamana purnawirawan yang dulu pernah menjadi pembantu Sudomo itu menjelaskan bagaimana Sudomo secara diam-diam menyelamatkan sejumlah aktivis mahasiswa yang semestinya harus ditahan setelah Peristiwa Malari dan Peristiwa Bandung 1978. Bahkan, beberapa tokoh mahasiswa diberinya kesempatan menyelesaikan pendidikan mereka di luar negeri, meski statusnya adalah orang yang masih dicekal. Konon Dr. Syahrir dan Dr. Rizal Ramli adalah tokoh-tokoh mahasiswa yang diberi kelonggaran menyelesaikan pendidikan tinggi mereka di Amerika.

Rizal Ramli adalah salah seorang tokoh mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang ditangkap saat pergolakan mahasiswa pada awal 1978. Waktu itu, mahasiswa ITB bersama sejumlah mahasiswa beberapa kampus menolak Soeharto yang akan dilantik kembali menjadi Presiden pada Sidang MPR 1978 itu. ITB diserbu oleh tentara yang tidak berada di bawah komando Siliwangi. Pangdam Siliwangi waktu itu, Mayor Jenderal TNI Himawan Sutanto, memang menolak menggunakan kekerasan terhadap mahasiswa. Di kemudian hari baru diketahui bahwa Pangkopkamtib Sudomo mendapat perintah langsung dari Presiden Soeharto untuk menindak ITB dengan menggunakan pasukan yang tidak berasal dari Siliwangi. Maka, selain sejumlah mahasiswa ditangkap, Rektor ITB, Iskandar Ali Syahbana, juga diberhentikan.

Sebagai orang yang pada dasarnya baik, dan mungkin sadar sebagai hanya alat kekuasaan Soeharto, Sudomo "terpaksa" menunjukkan loyalitasnya kepada Bos dengan bertindak keras kepada para seniornya yang tidak disenangi Soeharto. Kalau Benny Moerdani menghindarkan Jenderal Nasution untuk jumpa Soeharto, Sudomo menindak para penanda tangan Petisi 50 yang tokoh utamanya adalah Letjen Marinir Ali Sadikin. Adalah Sudomo, menurut pengakuannya sendiri, yang mencekal para penanda tangan Petisi 50, menutup jalur bisnis, dan mencegah mereka berhubungan dengan media. Dengan kata lain, Sudomo yang

"menghukum mati secara perdata" para pengkritik Soeharto tersebut. Akibatnya, Ali Sadikin—mantan senior Sudomo di Angkatan Laut—dan teman-temannya tidak bisa berbisnis karena semua bank dilarang memberi kredit kepadanya, teman-temannya, dan keluarganya. Para wartawan juga dicegah memberitakan kegiatan dan pernyataan-pernyataan para penanda tangan Petisi 50 tersebut. Keputusan drastis Sudomo tersebut adalah ongkos yang harus dibayar Laksamana itu untuk tetap bertahan di sekitar Soeharto yang mengendalikan secara terpusat semua kekuasaan di bumi Indonesia masa itu.

SEBENARNYA SUDOMO—yang lewat perkawinan beragama Islam lagi setelah dulu beralih dari Islam ke Protestan, juga karena perkawinan—masih akan lebih berguna pada masa tuanya seandainya dia suka menulis memoarnya. Sebab meski hanya jadi alatnya Soeharto—seperti hampir semua petinggi tentara waktu itu—Sudomo tahu banyak intrik politik dan kekuasaan yang berkecamuk di sekitar bosnya itu. Sebagai perwira Angkatan Laut yang berada di pusat kekuasaan di tengah lautan jenderal Angkatan Darat, Sudomo bisa bercerita banyak mengenai bagaimana Soeharto menciptakan, mengelola, dan memanfaatkan konflik yang berkembang di kalangan para perwira tinggi Angkatan Darat yang mengelilingi sang Presiden. Salah satu di antara banyak cerita intrik Istana itu adalah kisah yang dibocorkan Sudomo kepada Kemal Idris. Menurut mantan Pangkowilhan itu adalah Sudomo yang kemudian memberi tahu Jenderal Kemal Idris bahwa dia terlempar menjadi Duta Besar di Yugoslavia karena Ali Murtopo meyakinkan Soeharto mengenai apa yang disebutnya sebagai bahaya yang mengancam sang Presiden dari Kemal. Yang mungkin kurang disadari Sudomo adalah bahwa Soeharto lebih tahu Kemal daripada Ali.

Seandainya Sudomo berani dan mau jujur dalam menulis memoarnya, niscaya kita akan dapat lebih banyak cerita menarik mengenai sejumlah intrik di sekitar Soeharto. Kita misalnya tidak tahu bagaimana pertimbangan Soeharto di balik pengangkatan

L.B. Moerdani menjadi Panglima ABRI, padahal karier tertinggi Moerdani sebagai pemimpin pasukan hanya sebagai Komandan Batalion RPKAD dengan pangkat mayor. Kita juga tidak tahu dengan pasti alasan sebenarnya yang membawa Soeharto kemudian secara mendadak menyingkirkan Benny dengan cara yang dramatis dan kemudian mengangkatnya ke kursi Menhankam. Kita akhirnya hanya bisa menduga-duga. Yang saya tahu dari almarhum Letjen TNI (Purn.) Hasnan Habib, adalah Sudomo yang berhasil membujuk Soeharto agar mengangkat L.B. Moerdani ke posisi Menhankam setelah dicopot secara prematur dari jabatan Panglima ABRI.

Dalam melakukan lobi untuk Moerdani, Sudomo kabarnya memulai ceritanya dengan menyebut sejumlah pejabat intel yang karena kecewa kepada presidennya bertindak nekat membunuh sang presiden. Tampaknya Soeharto ngeri juga membayangkan nasib yang menimpa Jenderal Park Chung Hee yang dihabisi oleh Kepala Intelnya. Dan Benny Moerdani pun kebagian kursi di kabinet. Begitu kesimpulan saya setelah mendengar cerita Hasnan Habib.

Masih banyak intrik dan kerumitan politik pada masa kekuasaan Soeharto yang kita tidak tahu hingga hari ini. Kalau punya sedikit keberanian, jauh setelah Soeharto meninggal dunia, Sudomo sebenarnya bisa berbuat banyak menolong sejarah kita.[]

Versi singkat tulisan ini pernah dimuat harian *Kompas*, edisi 19 April 2012.

Telepon dari Sarwo Edhie

Telepon rumah berdering pada suatu sore pada tahun 1988, istri saya mengangkatnya. "Dari Pak Sarwo," katanya. Saya belum sempat bertanya apa pun, dari rumahnya di Cijantung, Letjen TNI (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo sudah langsung bicara. Katanya, "Dik Salim, saya akan kirim Bambang dan beberapa temannya ke rumah Dik Salim. Tolong diajak bicara anak-anak muda itu." Tidak dijelaskan apa saja yang harus kami bicarakan. Malam harinya tiga orang perwira muda, semua berpangkat mayor—siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad)—memasuki halaman rumah saya. Mereka adalah Mayor Infantri Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kebetulan juga menantu Jenderal Sarwo Edhie, Mayor Infantri Syamsul Maarif, dan Mayor Infantri Edi Budianto. Di ruang tamu yang sempit, selama sekitar dua jam kami bertukar pikiran.

Menurut penuturan SBY kepada saya pada 11 Januari 2013, Pak Sarwo Edhie memang sering berdiskusi dengan menantunya yang kelak menjadi Kepala Staf Sosial Politik (Kasospol) ABRI, menteri di kabinet, pemimpin partai, dan akhirnya duduk di Istana sebagai Presiden.

> Yang dibicarakan utamanya adalah urusan militer dan pertahanan, meskipun terkadang juga berkaitan dengan persoalan negara dan politik. Sesekali teman-teman seperti Syamsul Maarif juga ikut diskusi itu. Nah, dalam salah satu pembicaraan kami, beliau bilang punya sahabat muda yang sering bersama pada masa perubahan politik di awal Orde Baru. Beliau lalu minta kami mendatangi Mas Salim. Almarhum berpendapat perwira masa kini perlu memiliki wawasan lebih luas, bukan melulu mendalami ilmu militer dan pertahanan.

Mayjen Dr. Syamsul Maarif, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bersama KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Begitu cerita SBY kepada saya di kantornya di lingkungan Istana Kepresidenan.

Pada kesempatan lain, Syamsul Maarif—teman sekelas SBY—menceritakan aktivitas mereka ketika masih menjadi taruna di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) di Magelang dan ketika sudah menjadi perwira muda. Menurut Mayjen TNI Dr. Syamsul,

> Sejak masa Taruna pada 1972, kami sering melakukan diskusi-diskusi dengan SBY, Prabowo, dan Agus Wirahadikusuma. Ketika teman-teman pesiar pada hari Minggu, kami sering tetap berada di kampus berdiskusi. SBY dan Prabowo adalah sumber inspirasi kami. Saya hanya pengikut mereka.

SBY membenarkan pernyataan Syamsul. Katanya,

> Kami adalah taruna yang tidak puas dengan keadaan waktu itu. Kami ingin melakukan perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Waktu itu kami masih muda, tapi sudah memikirkan perlunya tentara yang lebih modern dari segi pelatihan, persenjataan, dan doktrin. Nanti waktu berpangkat Kolonel dan kemudian jenderal, kritik saya adalah Dwifungsi ABRI sudah berjalan terlalu jauh. Dalam sebuah seminar di Seskoad ketika saya sudah menjadi Panglima Daerah Militer di Palembang [Sriwijaya], saya menulis makalah yang berisi koreksi atas implementasi Dwifungsi.

Cerita Syamsul selanjutnya,

> Lewat berbagai diskusi, kami melihat bagaimana hari depan negara dan kemungkinan peran kami di sana. Sebagai taruna, waktu itu saya telah memproyeksikan akan jadi apa kelak.

> Pada 1998 terjadi diskontinuitas [Reformasi]. Tapi, setidaknya kami waktu itu sudah ada di puncak. SBY, Prabowo, dan Agus Wirahadikusuma, semua sudah bintang tiga. Saya bintang dua. Yang kami capai pada 1998 merupakan usaha yang kami mulai sejak masa taruna.

Yang tidak kurang menarik dari pengalaman Syamsul adalah perhatian Jenderal Sarwo Edhie kepada para mantan anak didiknya di Akabri. Tutur Syamsul,

> Suatu ketika, saya menjabat posisi Kepala Operasi Detasemen di Bali dengan pangkat Kapten, Pak Sarwo suatu malam menghubungi saya lewat telepon. Perang Teluk sedang berkecamuk di Timur Tengah masa itu. Beliau tanya pendapat saya mengenai perang tersebut. Waktu itu belum ada internet, jadi saya mencari koran dan membaca sebanyak mungkin mengenai Perang Teluk. Pertanyaan mengenai keadaan di Timur Tengah itu menyangkut soal strategis dan politik internasional. Almarhum memang selalu berusaha agar mantan anak didiknya tidak terkungkung dalam suatu kotak perhatian saja.

Pada pertemuan pertama saya dengan tiga anak muda berpangkat Mayor itu, saya tidak lagi ingat apa persisnya yang kami bicarakan. Tapi, menurut SBY,

> Waktu itu kita bicara banyak hal, antara lain mengenai Dwifungsi. Mas Salim menjelaskan mengenai doktrin Dwifungsi dan sejarahnya. Sebagai militer profesional, saya berpendapat fungsi militer harusnya berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan. Tapi, bisa saja TNI ikut memikirkan urusan negaranya jika keadaan mengharuskan, meski tidak boleh menghilangkan fungsi utamanya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan.

SBY kemudian bicara mengenai konsep dan kegiatannya pada saat Reformasi. Waktu itu posisinya adalah Kepala Staf Sosial Politik (posisi itu kemudian berubah nama menjadi Kepala Staf Teritorial).

> Sebagai *drafter* konsep Reformasi militer dan Ketua Fraksi ABRI di MPR, dari sekian puluh orang yang bertemu dengan saya, hanya ada dua orang yang sebenarnya bisa saya ajak bicara secara intensif, Cak Nur [Nurcholish Madjid] dan Mas Salim. Waktu itu kita bertemu berkali-kali. Kadang bertemu bertiga dengan Cak Nur, tapi sering juga berdua saja. Yang Mas Salim sampaikan waktu itu turut menjadi bagian yang mengubah negara. Kita berbicara banyak waktu itu mengenai perlunya perubahan.

Apa saja pengalaman menarik SBY sebagai tokoh Reformasi ABRI?

> Suatu kali saya hadir dalam sebuah pertemuan para jenderal purnawirawan. Mereka semua dari generasi Angkatan 45, beliau-beliau yang dulu berhasil mencapai pangkat bintang tiga dan bintang empat. Salah seorang di antara para pinisepuh itu bertanya kepada saya, "Kamu yang namanya Bambang Yudhoyono?" Jawab saya, "Siap." Mantan Jenderal itu melanjutkan bicaranya. Katanya, "Kamu harus mengerti sejarah. Tidak ada itu namanya Dwifungsi mau diganti dan ditinggalkan. Itu bagian hidup dari TNI."

Saya jelaskan kepada para senior itu secara persuasif. Intinya, peranan politik tentara dihapuskan, dan itu berarti Dwifungsi berakhir.

Apakah ada jenderal aktif yang menolak kebijakan meninggalkan Dwifungsi waktu itu?

> Ada. Tidak usah saya sebutkan nama mereka. Ketika saya menyusun draf Reformasi ABRI pada awal 1998, saya siapkan daftar pertanyaan tertulis kepada sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri. Ada 15 pertanyaan yang saya minta mereka jawab. Saya ingin tahu sikap mereka mengenai hari depan Dwifungsi. Hasilnya, 60 persen setuju perubahan dengan syarat tidak terlalu dramatis. Lima belas persen ingin perubahan yang lebih radikal. Sisanya yang 25 persen mengatakan tidak setuju perubahan. Mereka berpendapat Dwifungsi sudah benar, yang

salah adalah implementasinya. Jadi, yang ingin mempertahankan Dwifungsi tetap ada. Tapi, mereka minoritas.

Begitulah, lebih kurang, cerita Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Syamsul Maarif mengenai pertemuan pertama kami pada suatu malam di tahun 1988, kelanjutannya dan dinamikanya di kemudian hari. Ketika catatan ini saya tulis, Mayjen TNI (Purn.) Edi Budianto sudah lama meninggalkan kami semua. Yang saya ingat cerita Jenderal Budianto, dia ke rumah saya waktu itu karena diajak SBY. Katanya "untuk belajar politik".

Satu cerita lucu yang tersisa dari pertemuan pertama kami itu bersumber pada Syamsul Maarif. Harapan Syamsul yang dikemukakannya malam itu adalah keinginannya menjadi bupati di kampungnya di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Menurut ceritanya, ayah Syamsul adalah seorang Pembantu Letnan Satu (Peltu) dengan kedudukan sebagai Komandan Komando Rayon Militer (Koramil) di kampungnya. Di mata putra seorang Komandan Koramil, jabatan bupati tentu sudah amat tinggi. Pada masa awal kemiliterannya, tentulah Syamsul belum sanggup membayangkan bakal terjadinya *social upward mobility* yang kelak membuka kesempatan bagi dirinya mencapai pangkat Mayor Jenderal, memegang jabatan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Brawijaya di Surabaya, Gubernur Akademi Militer di Magelang, dan akhirnya posisi setingkat menteri dalam urusan penanggulangan bencana (BNPB). "Sebagai anak seorang Peltu, di mata saya waktu itu jabatan Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) saja sudah amat tinggi. Apalagi Bupati," kenang Dr. Syamsul Maarif sekian puluh tahun kemudian.[]

Fenomena Benny Moerdani

Pertemuan pertama kami berlangsung di Saigon, 10 November 1974. Mayor Jenderal TNI Leonardus Benyamin Moerdani (LBM)—Kepala Intel Strategis, Kepala Intel Kopkamtib, kemudian juga merangkap Wakil Kepala Bakin—datang dari Seoul, Korea Selatan, sedangkan saya waktu itu datang dari Phnom Penh, Kamboja. Kami sama-sama menginap di Hotel Caravelle. Mungkin hotel terbaik di Saigon waktu itu.

Benny Moerdani datang bersama rombongan Jenderal TNI Surono, Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Mereka mampir di Saigon menengok pasukan Indonesia yang mendapat tugas PBB sebagai salah satu anggota ICCS (International Commission of Control and Supervision) dalam rangka penyelesaian konflik Vietnam Selatan-Vietnam Utara setelah Amerika menarik tentaranya dari Vietnam. Kolonel Infantri Dading Kalbuadi adalah Komandan Kontingen Indonesia di Saigon waktu itu.

Saya sudah lupa siapa yang memperkenalkan kami. Yang jelas secara pribadi kami belum pernah bertemu. Keadaan demikian terutama terlihat pada kecurigaannya terhadap saya, sesuatu yang konon lazim bagi orang intelijen. Benny memancarkan kesan seorang pendiam, tapi terasa angker. Itu kesan pertama saya. Biasanya kalau kita diperkenalkan kepada seorang perwira intel waktu itu, sang intel umumnya akan berkata, "Ah, saya kenal *you*, tapi *you* tidak kenal saya." Ada nada intimidasi di sana. "Eh, *you* jangan macam-macam, saya tahu *you* siapa, dan berbuat apa saja." Kira-kira begitu terjemahannya. Benny tidak bicara apa-apa. Tanpa ekspresi di wajahnya, dia menerima uluran tangan perkenalan saya.

Sebagai wartawan, waktu itu saya baru saja mewawancarai Presiden Kamboja, Jenderal Lon Nol, dan sejumlah pejabat tinggi negeri itu. Benny tertarik dengan kisah saya mengenai Kamboja yang keadaannya memang beranjak parah. Kami lalu bicara tentang pengalaman singkat saya di Kamboja. Di bawah Presiden Lon Nol, negeri itu bukan hanya terancam oleh Khmer Merah—kemudian mengambil alih negeri itu dan menjadikannya *Killing Field*—melainkan juga oleh perpecahan dalam pemerintahan negeri itu sendiri. Salah satu akibat perpecahan itu adalah gagalnya tentara Kamboja memanfaatkan prajurit Komando Angkatan Darat mereka yang telah dilatih di Pusat Latihan pasukan khusus Indonesia di Batu Jajar, Jawa Barat. Tidak lama kemudian, seperti diketahui, Presiden Lon Nol melarikan diri ke Bali dalam perjalanannya ke Honolulu, Hawaii. Mantan Presiden yang terusir itu menetap di Amerika Serikat hingga akhir hayatnya.

Pada malam harinya, Moerdani mengajak rombongannya makan malam di restoran hotel yang terletak di lantai paling atas. Hari itu tanggal 10 November. Dading Kalbuadi menarik saya ikut serta. Di lift—setelah memberi tahu hari itu kebetulan hari ulang

Salim Said mewawancarai Pangab Benny Moerdani, 1984.

tahun saya—dengan bergurau saya berkata kepada Benny, "*General, are you going to give me a treat for my birthday*?" Jawabannya sungguh amat mengejutkan. Tanpa basa-basi, tanpa ucapan selamat, dengan dingin dan ketus Moerdani berkata, "*If you have money, why don't you go buy your self birthday dinner*."

Semacam Bekicot

Di meja makan, pelayan meletakkan di depan Moerdani pesanannya berupa sepiring *escargot,* semacam bekicot yang di Prancis konon tergolong makanan mahal. Kami memang makan di restoran yang menyuguhkan hidangan Prancis. "*You* tidak boleh makan ini," katanya kepada saya sambil menunjuk *escargot* di dalam piring di depannya. "Buat orang Islam, ini makruh." Secara spontan saya puji pengetahuan Moerdani mengenai Islam. Pujian saya rupanya melekat lama dalam ingatannya. Pada suatu wawancara kami bertahun-tahun kemudian, Benny menyebut kembali pujian saya kepadanya tatkala kami jumpa di kota yang kini telah berganti nama menjadi Ho Chi Minh City itu.

Besok paginya, saya ikut rombongan Jenderal TNI Surono meninjau pasukan Indonesia. Kolonel Dading sangat ramah dan mengajak saya berangkat satu mobil dengannya bersama Benny. Di kursi belakang sedan yang kami tumpangi itu saya dipersilakan duduk di tengah. Moerdani dan Dading mengapit saya. Benny Moerdani memulai pembicaraan dengan melancarkan insinuasi, dengan menyebut majalah *Tempo* (tempat saya bekerja waktu itu) sebagai media yang selalu mengecam pekerjaan Benny. Aneh, sebab waktu itu ABRI umumnya, Kopkamtib khususnya, terutama setelah Malari (Malapetaka 15 Januari 1974) sangat ditakuti wartawan. Bagaimana pula kami mengkritik Benny yang sebagian terbesar kegiatannya tidak kami ketahui. Lagi pula Moerdani belum begitu lama di kedudukannya sebagai Kepala Intel. Ketika Benny melancarkan insinuasinya, Kolonel Infantri Dading merangkul saya sembari berkata, "Tidak, ah, Pak Salim ini teman kita."

Saya dengan cepat menafsirkan tingkah laku insinuatif Benny itu sebagai indikasi betapa besar kekuasaannya sehingga bisa bicara apa saja, di mana saja, kapan saja, dan mungkin kepada siapa saja. Benny waktu itu secara perlahan mengontrol hampir semua badan intel dan aparat sekuriti penting pada suatu zaman otoriter yang hampir segala perbuatannya tidak perlu dipertanggungjawabkan. Maka tentu saja sangat menakutkan, terutama bagi kami para wartawan. Di kemudian hari, yakni lama setelah Benny tidak lagi berkuasa, ketika perlakuan Benny kepada saya di Saigon dan ketakutan saya kepadanya saya ceritakan kepada seorang Jenderal, sang petinggi militer menanggapi, "Apa Pak Salim kira cuma Pak Salim yang takut? Kami semua dulu juga sangat takut kepada Pak Benny dan aparat intelnya." Dengan aparat intel yang menciptakan rasa takut di kalangan para perwira itulah, antara lain, saya kira Benny Moerdani mudah mengontrol ABRI.

Benny yang memang tidak pernah melihat ancaman dalam waktu dekat akan datang dari luar, memusatkan perhatiannya mewaspadai apa saja yang dipersepsikannya sebagai potensi ancaman bagi kekuasaan Soeharto dari dalam negeri. Maka selain mengawasi secara ketat kekuatan-kekuatan kritis dalam masyarakat, ABRI juga diamati dengan saksama oleh jaringan intel Benny. Inilah mungkin sebabnya mengapa Ben Anderson dari Cornell University konon melihat ABRI waktu itu sebagai berfungsi sama dengan tentara KNIL pada zaman kolonial Belanda dulu. KNIL memang tidak disiapkan melawan musuh dari luar. Tugas utama tentara kolonial Belanda adalah menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri. Pertahanan terhadap ancaman dari Utara telah mereka serahkan kepada Amerika di Filipina dan Inggris di Singapura. Maka, ketika Filipina dan Singapura direbut Jepang, dalam waktu singkat Hindia Belanda bertekuk lutut.

Jauh sebelum jumpa di Saigon, saya telah mendengar banyak cerita yang nyaris legendaris mengenai Benny. Dia adalah pahlawan di Palagan Irian Barat (sekarang Papua) dan pertempuran menghadapi PRRI/Permesta. Di Pekanbaru, dia terjun payung sebelum sempat berlatih terjun. Kehebatannya sebagai perwira

intel yang menyamar sebagai pegawai perusahaan penerbangan Garuda di Bangkok serta berbagai cerita kehebatan dan keberanian prajurit komando tersebut, semua memukau saya. Keberaniannya terjun ke wilayah Irian Barat semasa Operasi Trikora menyebabkan Presiden Sukarno menyematkan sendiri Bintang Sakti kepada Benny. Bintang Sakti adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada mereka yang melakukan tugas melampaui apa yang harus dikerjakannya (*beyond the call of duty*).

CERITA-CERITA ITU SEMUA membuat saya melihat Benny sebagai semacam selebriti sehingga ketika jumpa, saya sulit menyembunyikan kekaguman dan keterpukauan saya kepadanya. Inilah saya kira sebabnya mengapa perlakuan kasarnya kepada saya pada pertemuan pertama kami di Saigon tidak terlalu saya masukkan di hati. Tapi, tentu saja tidak bisa saya lupakan. Lagi pula selama Orde Baru saya beberapa kali juga mengalami atau melihat perlakuan kasar tentara kepada kami orang-orang sipil.

SEPULUH TAHUN KEMUDIAN, saya jumpa lagi Benny Moerdani. Waktu itu, November 1984, Penguasa Intel itu sudah hampir dua

Salim Said (paling kiri) bersama Presiden Kamboja, Lon Nol, setelah mewawancarai pemimpin negeri itu di Phnom Penh, 1974.

tahun menduduki kursi Panglima ABRI (Pangab) dengan pangkat Jenderal bintang empat. "Kursi ini ternyata sangat *powerfull*," katanya, sambil menepuk-nepuk pegangan kursi yang didudukinya. "Saya sebenarnya telah teken mati jadi intel. Tidak pernah bermimpi duduk di kursi ini," katanya seperti mencoba meyakinkan saya. Pertemuan kami waktu itu berlangsung di kantornya di Jalan Merdeka Barat, bagian depan kantor Kementerian Pertahanan sekarang.

Sebagai mahasiswa program doktor yang sedang menyiapkan disertasi mengenai peran politik ABRI, waktu itu selama sebulan lebih saya berada di Jakarta mewawancarai sejumlah pembesar tentara dan politik, aktif maupun yang sudah pensiun. Beberapa hari sebelum jumpa Benny, saya mewawancarai Jenderal TNI (Purn.) A.H. Nasution. Tahu saya akan jumpa Moerdani, Nasution berkata, "*You* akan senang bertemu Benny. Dia suka pada orang sekolahan, Benny itu suka membaca," kata Nasution kepada saya. Ternyata Nasution tidak salah. Pertemuan dan wawancara saya dengan Benny di kantornya berlangsung sangat menyenangkan. Tidak ada lagi ucapan kasar, insinuasi, dan sikap curiga. Wawancara yang tadinya dijadwalkan hanya akan berlangsung satu jam, berkepanjangan menjadi hampir dua jam. Akibatnya, seorang jenderal polisi harus menunggu lama di luar sebelum perwira tinggi Kepolisian itu diterima Pangab.

Wawancara direkam dan sebagian telah saya kutip dalam disertasi saya yang kemudian terbit sebagai buku pada 1991 di Singapura. Yang belum pernah diungkapkan adalah pernyataan Benny yang waktu itu tidak saya mengerti maksudnya. Wawancara itu berlangsung hanya beberapa hari setelah Perdana Menteri India, Indira Gandhi, tewas tertembak oleh orang-orang Sikh, pengawal pribadi Perdana Menteri. Indira Gandhi dengan segera digantikan oleh Rajiv Gandhi, putranya sendiri. Dua puluh tahun sebelumnya, pada 1964, ketika perdana menteri pertama India, Jawaharal Nehru meninggal, Indira Gandhi, putrinya, tampil menggantikannya.

Ketika soal itu kami bicarakan, Benny tiba-tiba menunjuk potret Presiden Soeharto, yang tergantung di dinding kantornya, sembari berkata, "Saya jamin anaknya tidak akan menggantikannya." Di kemudian hari ketika Siti Hardianti Indra Rukmana (Mbak Tutut), putri tertua Soeharto, mulai muncul di tataran politik sebagai salah seorang pemimpin Golkar, bahkan kemudian anggota kabinet, saya teringat ucapan Benny tersebut. Apakah Benny waktu itu sudah melihat gejala Soeharto sedang mempersiapkan putri sulungnya menjadi penggantinya kelak?

PULANG DARI AMERIKA Januari 1986, saya berusaha menjumpai Benny. Saya ingin menyerahkan sendiri *copy* disertasi seperti yang saya janjikan kepadanya dalam wawancara kami. Tidak berhasil. Usaha mantan Pangkopkamtib, Jenderal TNI (Purn.) Sumitro mengatur pertemuan yang saya harapkan itu juga gagal. Sementara itu, beredar di masyarakat kisah tentang Benny Moerdani yang makin menakutkan banyak orang, terutama para aktivis Islam. Peristiwa pembantaian orang-orang Islam di Tanjung Priok dua tahun sebelumnya, secara meluas dituduhkan kepada Benny. "Kami tahu bahwa beberapa saat setelah penembakan, Benny bersama Try Sutrisno sudah muncul di Tanjung Priok memberi ucapan selamat kepada komandan pasukan yang membantai orang-orang Islam di sana," kata seorang aktivis Islam kepada saya.

Mereka Umumnya Kecewa kepada Polisi

Cerita tentang Petrus (penembak misterius) juga sudah berlalu ketika saya tiba kembali di Jakarta. Tatkala masih sebagai mahasiswa di Ohio sana, cerita tentang Petrus banyak saya dapatkan melalui surat-surat sejumlah teman dari Tanah Air, di samping berita-berita yang juga kadang bisa ditemukan di media Amerika. Kabar dari Indonesia pada umumnya bersikap positif terhadap operasi pembunuhan para penjahat tersebut. Mereka umumnya kecewa kepada polisi yang mereka anggap gagal mengatasi ke-

ganasan para penjahat yang semakin meningkat, sehingga tentara terpaksa harus turun tangan. Reaksi saya kepada operasi Petrus waktu itu, antara lain, saya sampaikan lewat surat kepada Kolonel Infantri Soejono, Ajudan Presiden yang menantu Mayjen TNI Soegandhi. Kepada teman lama itu saya utarakan kecemasan bahwa Petrus bisa menjalar dari pembunuhan kriminal menjadi pembunuhan politik.

L.B. Moerdani dilantik menjadi Panglima ABRI dan Pangkopkamtib pada 29 Maret 1983. Tanggal tersebut tidak berjarak jauh dari dimulainya operasi pembunuhan preman yang sebelumnya sudah dilancarkan di Yogyakarta. Operasi yang dipelopori oleh Letnan Kolonel Infantri Mohammad Hasbi, Komandan Distrik Militer (Kodim) Yogyakarta, itu kemudian secara diam-diam diambil alih oleh Pangkopkamtib Moerdani untuk diberlakukan di seluruh Indonesia.

Setelah banyak korban, dan protes dari luar negeri yang dirasakan mulai "mengganggu" pusat kekuasaan di Jakarta, Moerdani tampil di depan pers. Kepada para wartawan, Pangkopkamtib itu menyebut korban-korban tersebut sebagai akibat perang antarkelompok gang kriminal. Moerdani dan Jenderal Polisi Anton Sudjarwo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) waktu itu, secara bersama membantah keterlibatan pemerintah dalam pembantaian para penjahat tersebut. Tapi dalam memoarnya yang terbit pada 1989, Soeharto mengakui keterlibatan pemerintah dalam pembantaian tersebut. Sebagai "terapi kejutan", menurut sang Presiden. Moerdani yang menjabat Menteri Pertahanan ketika buku tersebut terbit, sangat kesal. Dia merasa dipermalukan oleh atasannya.

Yang tidak banyak diketahui waktu itu adalah bahwa penembakan misterius tersebut ditengarai juga sebagai mempunyai dimensi politik. Konon banyak penjahat yang dibantai itu tadinya adalah para kriminal yang dibina Opsus pimpinan Ali Murtopo. Kelompok kriminal yang di Jawa Tengah dikenal sebagai Gali (Gabungan anak liar) tersebut terutama dipakai pada kampanye pemilihan umum untuk meneror saingan-saingan politik pemerin-

tah. Di kemudian hari, Opsus tidak mampu mengendalikan para kriminal binaannya itu. Dan para Gali itu mulai mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat luas. Karena itulah, operasi pembantaian para kriminal itu juga ditafsirkan sejumlah wartawan dan pengamat masa itu sebagai usaha pembersihan kaki tangan Ali Murtopo. Hubungan Soeharto dengan Ali Murtopo memang sudah dikabarkan berangsur memburuk sejak pasca-Malari. Kemudian terungkap bahwa preman-preman itu memang dipekerjakan untuk memenangkan Golkar dalam kampanye Pemilu 1977 dan 1982, sebagai yang ditulis oleh Jusuf Wanandi dalam memoarnya, *Shades of Grey.*

Penting untuk diperhatikan bahwa selain operasi Petrus, setahun setelah duduk sebagai Pangkopkamtib, pada Mei 1984 Moerdani juga membubarkan Opsus yang dibangun, dipimpin, dan selama bertahun-tahun menjadi kendaraan operasi politik Ali Murtopo. Sulit dibayangkan pembubaran Opsus sebagai sesuatu yang murni kehendak dan prakarsa Moerdani. Tanpa petunjuk Soeharto, Moerdani bisa dipastikan tidak akan berani membubarkan lembaga yang dibangun dan dikendalikan oleh Murtopo yang untuk waktu lama juga dimanfaatkan oleh Soeharto.

PADA SAAT YANG SAMA JUGA BEREDAR kisah dipersulitnya para perwira berlatar belakang santri dalam ABRI. Robert Lowry, mantan Atase Militer Australia di Jakarta menulis mengenai soal ini dalam bukunya *The Armed Forces of Indonesia*. Menurut Lowry, "Praktis semua penganut Islam yang taat, dikenal sebagai santri, tersingkir sejak awal rekrutmen." Moerdani "yang mengumpulkan di sekitarnya kaum abangan, orang-orang Kristen, dan kaum yang berlatar belakang minoritas, mendorong banyak kaum santri dalam ABRI percaya bahwa mereka tidak mungkin bisa naik ke posisi puncak," tulis R. William Liddle, seorang ahli Indonesia, dalam sebuah artikelnya yang dimuat oleh *The Journal of Asian Studies* (1996).

Sebagai peneliti peran politik militer, saya terutama penasaran mengenai kisah yang saya sebutkan terakhir ini. Saya tidak

mudah begitu saja percaya macam-macam informasi yang berseliweran mengenai kegiatan Benny Moerdani waktu itu. Tapi saya baru bisa mendapatkan informasi yang bisa digolongkan sebagai solid setelah Benny pensiun.

Jadikan Dulu Pangkowilhan

Sementara itu, sebelum sempat jumpa dan kemudian mewawancarai Benny, saya beberapa kali mewawancarai Jenderal TNI (Purn.) Sumitro, mantan Pangkopkamtib. Hubungan saya agak dekat dengan Jenderal Sumitro sejak saya menulis disertasi mengenai peran politik militer Indonesia. Sumitro—di samping A.H. Nasution dan T.B. Simatupang, serta banyak lagi jenderal lainnya—adalah salah satu narasumber penting yang beberapa kali saya wawancarai.

Dalam keadaan sudah pensiun dan menjadi pengusaha yang berkantor di daerah Kemang, Jakarta Selatan, Sumitro ternyata masih memelihara hubungan dengan Benny Moerdani dan sejumlah perwira senior lainnya. Dari Sumitro-lah saya banyak mendapat informasi mengenai Benny maupun mengenai Soeharto dan hubungannya dengan ABRI yang berangsur memburuk waktu itu. Menurut Sumitro, hubungan Benny dengan Soeharto perlahan memburuk setelah Benny menjadi Pangab. Sumitro mengaku sebenarnya tidak sepakat dengan keputusan Soeharto mengangkat Benny menjadi Pangab menggantikan Jenderal Jusuf. "Saya sarankan agar Benny dijadikan dulu Pangkowilhan, jangan langsung jadi Pangab."

Memberi pengalaman teritorial kepada seorang jenderal memang sesuatu yang dikenal sebagai sikap Sumitro bagi perwira tinggi yang akan duduk dalam pimpinan tinggi militer. Untuk itulah, Brigjen TNI Sayidiman Suryohadiprojo pada 1968 dikirim ke Makassar menduduki kursi Panglima Kodam Hasanuddin sebelum akhirnya diberi kepercayaan memegang posisi penting di Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) pada 1970. Jenderal Hasnan Habib tadinya juga akan dikirim menjadi Pangdam

Iskandar Muda di Aceh, tapi kegiatan pengintegrasian ABRI di bawah arahan Sumitro pada 1968-1969 rupanya sangat memerlukan Hasnan. "Kesempatannya jadi Panglima Kodam menjadi hilang," kata Sumitro.

Benny Moerdani, seperti umum diketahui, tidak punya pengalaman teritorial, tidak punya pengalaman staf, tanpa pengalaman sebagai pendidik, dan juga tidak pernah mengikuti Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad). Nyaris seluruh pengalamannya berlangsung di pasukan khusus dan intelijen. Inilah yang dilihat Sumitro sebagai kelemahan Benny sehingga mantan Pangkopkamtib itu tidak setuju Kepala Intel tersebut langsung menjadi Pangab. "Tidak ada waktu lagi," konon jawab Soeharto kepada Sumitro.

Mengapa "tidak ada waktu?" Sumitro jelas tidak berani menanyakannya lebih jauh kepada Bapak Presiden. Robert Lowry, masa itu Athan Australia di Jakarta, lewat surat elektroniknya kepada saya, mencoba menjelaskan keputusan Soeharto waktu itu. "Salah satu tugas Benny sebagai Panglima ABRI adalah menghapuskan Kowilhan [Komando Wilayah Pertahanan] yang belasan tahun sebelumnya diciptakan untuk memberi tempat kepada sejumlah jenderal, marsekal, dan laksamana." Sekian tahun kemudian, sebagai akibat makin ketatnya kontrol Soeharto atas militer—terutama karena bantuan Moerdani—akomodasi tersebut tidak diperlukannya lagi. Komando-komando ABRI sudah bisa dirampingkan dan disentralisasikan. Dari kedudukannya sebagai Panglima ABRI, Moerdani bukan saja menghapuskan Kowilhan, melainkan juga memperkecil jumlah Komando Daerah Militer (Kodam). Organisasi yang ramping itu juga memudahkan kontrol Panglima atas ABRI.

"Doktrin Macam Apa Dwifungsi Ini?"

Jenderal Sumitro waktu itu sudah lebih 10 tahun berada di luar jajaran militer. Seperti semua jenderal lainnya—aktif atau purnawirawan—mantan Pangkopkamtib itu tidak punya daya apa-apa

terhadap Soeharto. Dia hanya bisa mengeluh dan "berdoa saja", katanya. "Kekuatan dan kekuasaan satu-satunya di Indonesia sekarang ada di tangan Soeharto. Dwifungsi sudah lama tidak jalan," keluh Sumitro. Dengan caranya sendiri, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo juga mengungkapkan hal yang dikeluhkan Sumitro tersebut. Pada 1995, Sayidiman sebagaimana dikutip oleh majalah *Forum Keadilan* mengatakan: "Kekuatan politik di Indonesia sekarang bukan Golkar, bukan PDI atau PPP, juga bukan ABRI. Kekuatan politik utama di Indonesia sekarang hanyalah Soeharto." Baik Sumitro maupun Sayidiman, keduanya tidak pernah sempat menjelaskan bagaimana doktrin Dwifungsi akhirnya hanya berhasil menjadi alat berkuasa Soeharto secara hampir mutlak. Dan untuk waktu yang lama.

Soal Dwifungsi dan kekuasaan Soeharto itu pernah menjadi topik diskusi saya dengan Letnan Jenderal (kehormatan) Dr. (HC) T.B. Simatupang. Secara provokatif, dengan menggunakan bahasa Inggris, dalam sebuah pertemuan kami, saya bertanya kepada mantan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) itu: "Doktrin macam apa Dwifungsi ini? ABRI menaikkan Soeharto ke singgasana kekuasaan, tapi kemudian tidak bisa mengontrolnya?" Simatupang marah sampai pukul meja. "Saudara jangan menganggap enteng generasi muda TNI," ucapnya. Pernyataan dan kemarahan Simatupang tersebut sampai sekarang belum juga berhasil saya mengerti. Apakah Simatupang percaya generasi muda TNI nanti akan berhasil mengakhiri penyalahgunaan Dwifungsi dan kekuasaan otoriter Soeharto? Kalau itu ramalan dan harapan Simatupang, maka mantan KSAP sudah jelas terbukti salah. Soeharto "dimakzulkan" oleh "krismon" (krisis moneter 1997-1998), bukan oleh generasi muda TNI.

BENNY MOERDANI, menurut Sumitro, bukan saja dipercayai memimpin intelijen sembari menjadi Panglima ABRI, melainkan juga terus dibebani kesibukan sebagai *security officer* yang bertugas menjaga keamanan Soeharto dan keluarganya. Peran menjaga keamanan Soeharto dan keluarganya ini sebenarnya sudah diker-

Bersama mantan Pangkopkamtib, Jenderal (Purn.) Sumitro, 1995.

jakan Moerdani sejak pulang dari Seoul. Dalam melaksanakan tugas demikian itu sebenarnya Benny lebih sebagai seorang kepala *bodyguard* daripada seorang Kepala Intel. Di kemudian hari, sejumlah perwira intel memang lebih cenderung menilai Moerdani lebih sukses sebagai Kepala Keamanan Soeharto daripada sebagai Kepala Intel strategis. "Lihat saja kegagalannya di Timor Timur," kata perwira intel tersebut.

Nah, mungkin dalam rangka tugas menjaga Soeharto itulah, setelah antara lain berdiskusi dengan Sumitro, dan juga mungkin dengan beberapa senior lainnya, pada suatu hari Benny Moerdani, dalam kedudukannya sebagai Panglima ABRI, memberanikan diri menemui Soeharto dan dengan amat hati-hati menyarankan agar Bapak Presiden mulai mencari orang lain untuk menggantikannya. Soeharto waktu itu memang sudah sekitar 20 tahun menduduki kursi kepresidenan. Cerita tentang jaringan bisnis anak-anak dan kroninya sudah pula tersebar luas. Soeharto marah.

Benny menyampaikan kemarahan itu kepada Sumitro. "Kau salah, Ben," kata Sumitro. "Yang harus menyampaikan saran itu bukan kau, tapi kami, teman segenerasinya." Sampai meninggal, tidak pernah terdengar cerita Sumitro atau tokoh segenerasinya

mendapat kesempatan menemui Soeharto meminta sang Presiden mencari penggantinya. Tapi di kemudian hari, lama setelah pensiun, mantan Pangab Try Sutrisno, dalam suatu wawancaranya dengan saya, mengaku pernah memberanikan diri menyampaikan keresahan sejumlah senior ABRI kepada Pak Harto. Menurut Try, Soeharto ingin tahu siapa para senior itu. Try mengaku menyebut hanya satu nama, Jenderal Sumitro. "Mereka tanya kapan regenerasi." Reaksi Soeharto?

> Saya ini pejuang. Saya memperjuangkan idealisme bangsa. Pejuang itu tidak pernah pamrih, yang ada panggilan. Kalau saya masih dipercayai rakyat, saya terpanggil untuk mengabdi ke Indonesia. Sampai mati berdiri pun saya jalani.

Try Sutrisno juga mengaku menyampaikan keprihatinan para jenderal senior mengenai kegiatan bisnis putra-putri Presiden. Tanggapan Soeharto:

> Try, apakah ada aturan, atau undang-undang yang melarang anak pejabat berbisnis? Kalau ada, saya tidak mau jadi Presiden. Kan, tidak ada larangan itu. Mau jadi tentara, pegawai negeri, atau pengusaha, semua boleh.

Mengenai soal regenerasi, Sayidiman juga ada bercerita kepada saya pengalamannya "menasihati" Presiden Soeharto. Pada 1986, mantan Pangkostrad itu merencanakan penerbitan buku tentang dirinya. Salah satu yang diminta menulis adalah Jenderal Sayidiman. Mula-mula Sayidiman mengira permintaan itu tidak serius, sebab mantan Duta Besar (Dubes) RI di Tokyo itu sadar dia tidak
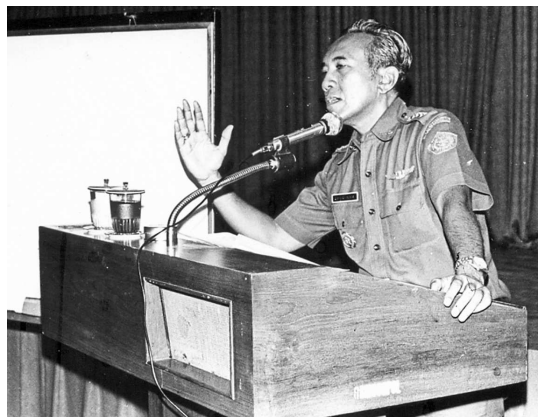
Letjen TNI Sayidiman.

tergolong lingkaran-dalam Soeharto. Karena itu, dia tidak membuat tulisan.

Namun lewat ajudan, Soeharto menagih tulisan dari Sayidiman. Dengan tergesa-gesa mantan Dubes yang juga mantan Gubernur Lemhanas itu membuat tulisan yang diantarkan sendiri ke Jalan Cendana keesokan harinya. Dalam tulisan itu, menurut Sayidiman,

> Saya kemukakan semua faktor yang menunjukkan keunggulan dan kekuatan Pak Harto, baik sebagai *strateeg* militer maupun politik, sebagai *family man* yang membina keluarganya dengan setia dan saksama, sebagai pemimpin yang dekat dengan petani dan nelayan tanpa dibuat-buat. Tapi kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung menggambarkan kelemahan. Seperti, mengapa Pak Harto yang sudah begitu kuat masih menunjukkan sikap kurang percaya diri dengan bertindak secara berkelebihan terhadap pihak-pihak yang kurang disukai. Saya akhiri tulisan dengan saran. Apakah tidak lebih baik, ketika Pak Harto berada pada puncak kekuasaan dan karier mengikuti jejak Deng Xiaoping dan Lee Kuan Yew, yaitu melepaskan diri dari pimpinan negara secara formal. Sebagai Ketua Badan Pembina Golkar, Pak Harto masih tetap tokoh yang menguasai politik Indonesia.

Sepekan kemudian Sayidiman menerima pesan dari Jalan Cendana. Presiden Soeharto sudah membaca karangan tersebut, tapi hanya setuju menerbitkan bagian depan tulisan. Bagian akhir yang mengandung kritik dan saran, terpotong gunting sensor Bapak Presiden. Kepada para editor, Sayidiman menolak kompromi. Tapi tulisan tetap terbit sesuai dengan kemauan Soeharto.

SEBELUM KEMARAHAN SOAL sebagai Presiden yang duduk lama di Istana, beberapa ketegangan juga memang sudah muncul dalam hubungan Soeharto dan Panglima Benny. Dalam sebuah pertemuan Sumitro dengan Soeharto, Bapak Presiden mengeluhkan kegiatan bisnis orang-orang di sekitar Benny. Soeharto menyebut nama Setiawan Jody, Robby Ketek (Robby Sumampau), dan

Teddy Rusdy. Ketika informasi itu disampaikan Sumitro kepada Benny, Pangab itu membela diri dan mengaku tidak punya alasan mencegah Jody dan Robby Ketek berbisnis. "Mereka bukan pejabat," kata Benny. Kendati bukan pejabat, Soeharto dan orang banyak waktu itu tahu Robby Ketek berbisnis dengan fasilitas dari Benny, terutama di Timor Timur. Adapun Setiawan Djody, pemusik ini—menurut cerita Sudwikatmono, sepupu Soeharto—mendapat fasilitas berbisnis lewat hubungan dekatnya dengan anak-anak Soeharto, terutama dari Bambang Trihatmojo.

Tentang kegiatan Teddy Rusdy berbisnis, alasannya mengumpulkan uang bagi kegiatan operasi intel. "Kegiatan Teddy Rusdy itu saya benarkan, sebab kegiatan intel di dalam dan di luar negeri memang memerlukan dana besar," kata Sumitro. Tentang Jody, menurut Teddy, Benny bukannya tidak bertindak. "Untuk mencegahnya mengajak anak-anak Soeharto berfoya-foya di luar negeri, Benny pernah mencabut paspor Jody."

"Dia Itu Merah," Kata Sumitro

Mengaku bukan cuma memikirkan regenerasi pada jabatan kepresidenan, bersama sejumlah perwira segenerasinya, Sumitro juga berusaha menghalangi Soeharto mengangkat Sudharmono ke kursi Wakil Presiden. "Dia itu merah," kata Sumitro. "Tapi sumber kesalahan sebenarnya ada pada saya. Pada saat menjabat Pangkopkamtib saya sibuk membersihkan yang di bawah, lalai melihat ke atas. Sudharmono lolos." Untuk melaksanakan agenda penyingkiran Sudharmono, kampanye besar-besaran lewat media mereka lakukan waktu itu. Sumitro mengaku mendesak Moerdani, sebagai Pangkopkamtib, bertindak.

Mengenai Sudharmono, Sarwono Kusumaatmadja—mantan Menteri Lingkungan Hidup dan mantan Sekjen Golkar pada saat Sudharmono menduduki posisi pimpinan Golkar—mempunyai dua cerita lain yang tidak kurang menarik. Dalam sebuah pertemuan Sarwono dengan Presiden di kediaman pribadi Jalan Cendana, Sarwono mempertanyakan pengetahuan dan sikap Soeharto ter-

hadap Sudharmono yang waktu itu gencar diserang sebagai "merah". Dengan tersenyum Soeharto membantah tuduhan tersebut. Tapi ketika Sarwono bertanya mengapa Soeharto tidak menjelaskan soal Sudharmono itu kepada para penuduhnya, sang Presiden menjawab dengan ringan, "Yah, tidak apa-apa, diamkan saja. Sekali-sekali Sudharmono ada problem, kan tidak apa-apa."

Cerita kedua Sarwono bersumber pada Ketua Umum Golkar itu sendiri. Sebelum Golkar secara resmi mencalonkan Sudharmono menjadi Cawapres, Soeharto sebenarnya sudah terlebih dahulu memberi tahu Ketua Umum Golkar itu tentang rencana promosinya. Tapi Sudharmono, sebagai pembantu Soeharto sejak awal Orde Baru, tahu dengan baik cara kerja Bapak Presiden. Kata Sudharmono kepada Sarwono,

> Orang yang sudah diberi tahu diangkat menduduki jabatan tertentu dengan Surat Keputusan Presiden saja, bisa gagal. Keppresnya dibatalkan dan saya yang harus menyampaikan berita buruk tersebut kepada orang yang bersangkutan. Pokoknya, sampai Sidang Umum MPR nanti ketuk palu, saya belum percaya saya akan menjadi Wakil Presiden.

Tentang kontroversi Sudharmono ini, Benny pernah menjelaskan kepada saya bahwa sebagai Pangkopkamtib, dia menandatangani *security clearance* bagi Sudharmono untuk jadi Wakil Presiden. "Kami tidak menemukan bukti yang dituduhkan oleh intel-intel tua itu," kata Moerdani. Menurut perhitungan saya, penandatanganan tersebut terjadi setelah pembicaraan serius Sarwono Kusumaatmadja dengan Benny sebagai yang akan saya kisahkan nanti. Kendati demikian usaha mengganggu pengangkatan Sudharmono menjadi Wapres dari dalam ABRI masih tetap jalan.

Yang paling mencolok di antara gangguan itu adalah interupsi Brigjen TNI Ibrahim Saleh. Anggota Fraksi ABRI ini menerobos ke mimbar dengan rencana memprotes agenda pemilihan Sudharmono menjadi Wakil Presiden. Tindakan nekat Ibrahim itu

dilihat banyak orang waktu itu sebagai sesuatu yang di belakangnya berdiri kelompok Moerdani. Dalam wawancaranya dengan saya pada Januari 1997, Ibrahim Saleh menjelaskan bahwa semua tindakannya sepengetahuan Letjen TNI Harsudiono Hartas, Ketua Fraksi ABRI di MPR, dan Benny Moerdani, lewat seorang perwira penghubung.

Sudharmono dalam memoarnya, *Pengalaman Dalam Masa Pengabdian*, memang ada mencatat tingkah laku aneh Moerdani terhadap pencalonan dirinya. Dalam rapat para jenderal di Markas Bais yang membicarakan rencana pencalonan wapres, Benny terang-terangan menolak Sudharmono. Cerita yang dikisahkan Sudharmono dalam memoarnya tersebut diperkuat oleh cerita Julius Pour dalam bukunya, *Benny: Tragedi Seorang Loyalis*. Dalam buku tulisan Pour itu Benny digambarkan mengemukakan agar Pangab Try Sutrisno yang dicalonkan. Perlu diingat, Jenderal TNI Try Sutrisno waktu itu baru beberapa hari menduduki posisi Pangab, menggantikan Moerdani.

Selain gangguan Ibrahim Saleh, juga tidak boleh dilupakan kasus Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jailani (Johny) Naro yang mencalonkan diri sebagai salah seorang calon Wakil Presiden. Hartono Marjono, Ketua Fraksi PPP di MPR menjelaskan kemudian bahwa pencalonan Naro itu adalah permainan ABRI dalam usaha mereka mengganjal majunya Sudharmono ke posisi Wapres. Jenderal TNI (Purn.) Sumitro membenarkan Hartono Mardjono. Menurut Sumitro kepada saya dalam salah satu wawancara kami, "Ternyata yang mendorong Naro itu Benny. Bodoh Benny itu. Dia tidak tahu Naro itu orangnya Ali Murtopo. Dan Naro itu orang Parmusi. Pak Harto masih alergi terhadap golongan Islam [waktu itu]."

DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI SEKJEN GOLKAR, Sarwono Kusumaatmadja menjumpai Moerdani menjelang pencalonan Sudharmono. Menurut Sarwono, sebenarnya tidak ada masalah pribadi antara Benny dan Sudharmono. "Soalnya Soeharto tidak memberi tahu Benny bahwa Pak Dharmono disetujui sang Pre-

siden menjadi Wapres." Benny terkejut ketika Sarwono menyampaikan keputusan Soeharto tersebut.

> *My God*, ini gila. Saya, kan pembantunya, mengapa saya tidak diberi tahu. Sampai sekarang saya masih tetap yakin Pak Umar Wirahadikusuma akan terus menjadi Wapres. Kalau mau Sudharmono, mengapa saya tidak diberi tahu?

Menurut mantan Sekjen Golkar tersebut, itulah cara kerja Soeharto dalam mengelola politik Indonesia.

> Untuk mempertahankan kekuasaannya, Pak Harto selalu memastikan agar di antara orang-orang di bawahnya selalu ada konflik. Akibatnya, para pembantunya menjadi rival di antara sesama mereka. Semua akhirnya bergantung pada Soeharto. Kalau salah satu pihak menjadi sangat kuat, pihak itu disingkirkan. Inilah penjelasannya mengapa Sumitro, Ali Murtopo, dan Benny Moerdani disingkirkan. Dengan menjadikan Sudharmono sebagai Wapres, sebenarnya mantan Menteri Sekneg itu juga ditendang ke atas.

Tidak jauh berbeda dengan pengamatan Sarwono, adalah komentar Jusuf Wanandi, pimpinan CSIS yang sangat dekat dengan Moerdani dan Ali Murtopo. Sehubungan dengan keputusan Soeharto menjadikan Sudharmono Wakil Presiden dan resistensi ABRI terhadap pilihan tersebut, Jusuf Wanandi dalam memoarnya menulis:

> Pak Harto seharusnya memberi tahu mereka rencananya mengangkat Sudharmono sebagai Wakil Presiden untuk masa jabatan 1988-1993 karena loyalitas dan kerja kerasnya. Soeharto juga harus menjelaskan bahwa dia akan terus duduk di kursi kepresidenan sepanjang masa lima tahun dan tidak akan berhenti untuk memberi kesempatan bagi Sudharmono jadi Presiden, sebagai yang dicemaskan oleh para pimpinan ABRI. Tapi percakapan seperti ini tidak pernah terjadi karena Pak Harto bersikap apa saja yang diinginkannya akan menjadi hukum, karena dia seorang Raja. Menurut norma-norma para Raja Jawa, Raja berkuasa karena dilimpahi "mandat" dari Atas untuk berkuasa dan memerintah. Semua bawahannya harus

> bergantung kepada sang Raja dan melaksanakan apa saja yang telah diputuskan di singgasana.

Membaca pendapat Wanandi tentang Soeharto sebagai Raja Jawa, saya teringat percakapan saya dengan Marzuki Arifin—teman wartawan—yang pernah dekat dengan keluarga Cendana. Dalam suatu penerbangan ke Hong Kong pada pertengahan tahun tujuh puluhan, saya jumpa Marzuki (Juki, panggilan teman-teman) di atas pesawat. Pada kesempatan itu, Juki bercerita banyak tentang pengetahuannya mengenai keluarga Cendana. Salah satu yang menarik adalah percakapannya dengan Ibu Tien Soeharto. Konon istri Presiden Soeharto itu pernah berkata kepada Juki, "Bapak itu sebenarnya Raja, tapi sekarang istilah Raja tidak dipakai lagi. Yang dipakai Presiden saja."

"Semua ABRI Tidak Suka Harmoko."

Langkah berikut Sumitro dan teman-teman senior serta para petinggi ABRI adalah berusaha mencegah jangan sampai Sudharmono—yang akhirnya berhasil menjadi Wakil Presiden—naik ke jabatan Presiden lewat pemilihan umum berikutnya. Untuk itulah, maka Dewan Pimpinan Golkar harus mereka kuasai. "ABRI punya banyak calon," kata Panglima ABRI Jenderal TNI Edi Sudrajat. Untuk tujuan itu, menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, Pimpinan ABRI sudah menempatkan para perwiranya pada hampir semua posisi pimpinan Golkar wilayah. Untuk jabatan Ketua Umum Golkar, sebagai pengganti Letjen TNI (Purn.) Wahono, mereka menyiapkan Letjen TNI Susilo Sudarman.

Pokoknya ABRI sudah siap menguasai Golkar. Tapi kemudian terbukti, untuk kedua kalinya, para jenderal gagal "memaksakan" kehendak mereka kepada Soeharto. Keputusan Bapak Presiden menjadikan Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar tak terbendung oleh ABRI. Apakah Benny atau Edi Sudrajat tidak suka kepada Harmoko? "Tidak usah ditanya. Semua ABRI tidak suka Harmoko," kata Sumitro. Karena itu para jenderal tidak tinggal

diam. Tidak berhasil mencegah Harmoko menjadi Ketua Umum, sebagian besar dokumen dan alat kerja di kantor pusat Golkar diobrak-abrik dan dihancurkan oleh orang tidak dikenal. "Harmoko harus mulai lagi menyusun daftar nama para kader yang sudah kami kerjakan pada masa kepemimpinan Pak Dharmono," kata Sarwono.

Pihak ABRI bertekad menguasai Golkar guna mencegah apa yang mereka cemaskan sebagai kemungkinan Sudharmono menggunakannya menjadi Presiden lewat pemilu berikutnya. Tapi sebenarnya, disadari atau tidak, langkah tersebut juga untuk secara perlahan membatasi gerak Soeharto. Dalam urusan ini tampaknya Benny yang sudah purnawirawan memang tidak tampil memainkan peran terlalu penting lagi. Tapi sikap kurang positif Benny terhadap pencalonan Sudharmono sebagai Wapres, menurut Sumitro, membuat Soeharto tetap curiga kepada Benny. Soeharto juga tentu tahu bahwa pemikir utama langkah-langkah politik para jenderal waktu itu adalah Moerdani. Hubungan baik Moerdani dengan CSIS juga menimbulkan kecurigaan Soeharto kepada lembaga tersebut sebagai tangki pemikir bagi Benny.

Kecurigaan Soeharto kepada Moerdani juga berdasarkan pengamatan Bapak Presiden atas Benny yang memang sangat tidak percaya kepada politisi sipil. Padahal, salah satu tugas Sudharmono sebagai Ketua Umum Golkar adalah merekrut tokoh-tokoh sipil dengan rencana mengisi jajaran pimpinan organisasi tersebut. "Pak Harto memberi petunjuk agar secara berangsur Golkar mengurangi ketergantungannya kepada ABRI," kata Sarwono. Pada waktu Sudharmono menjadi Ketua Golkar, misalnya, selain Sarwono Kusumaatmadja (ditunjuk langsung oleh Soeharto menduduki kursi Sekretaris Jenderal bahkan sebelum Munas), posisi penting lain di Golkar kemudian juga banyak diduduki oleh orang-orang sipil seperti Akbar Tanjung, Siswono Yudhohusodo, Fahmi Idris, dan Rahmat Witoelar.

"Pukul Anak Sindir Menantu."

Benny, Edi Sudrajat, Try Sutrisno, dan para jenderal pimpinan ABRI lainnya tidak senang melihat langkah Soeharto mengarahkan Golkar bergerak makin independen dari ABRI. Mereka ingin ABRI tetap mengontrol kekuasaan. Jadi, sebenarnya Sudharmono hanya sasaran antara, karena pada dasarnya, target serangan adalah kebijakan Soeharto. Ini juga lebih kurang sama dengan cerita di balik kebencian ABRI kepada Habibie yang menguasai hampir semua industri strategis, termasuk industri yang sebelumnya berada di bawah penguasaan ABRI. Semua itu merupakan keputusan dan kebijakan Soeharto sendiri. Jadi, permusuhan ABRI kepada Habibie, sebenarnya sama saja duduk soalnya dengan sikap ABRI yang memusuhi Sudharmono dan Harmoko. Sasaran sebenarnya adalah Soeharto. Dan para pembantu Bapak Presiden itu cuma sasaran antara. "Pukul anak sindir menantu," kata orang Melayu pada zaman dulu.

BENNY MOERDANI KELAHIRAN CEPU, tapi dibesarkan di Solo, Jawa Tengah. Beragama Katolik, putra dari seorang ibu berdarah Indo-Jerman dan beragama Katolik, Yohana Roeche, kelahiran Tuban, Jawa Timur, dan bapak Raden Bagus Moerdani, yang beragama Islam. Sebagian saudaranya dari ibu lain (istri pertama Raden Moerdani) beragama Islam. Tapi Pangab itu dibesarkan sebagai penganut Katolik.

Latar belakang pribadi yang demikian itu—Indo dan Katolik—tampaknya ikut memacu Benny lebih membuktikan bahwa dia seorang Indonesia tulen dan patriot sejati yang mampu mengatasi semua aspek yang ada pada latar belakang pribadinya. Prof. Dr. Umar Kayam pernah bercerita suatu hal kepada saya tentang Benny remaja di Solo pada zaman Revolusi. Menurut Kayam, Benny pernah hampir membunuh ayahnya hanya karena sang ayah bekerja pada perusahaan kereta api yang dikuasai Belanda.

Solo waktu itu adalah wilayah Republik Indonesia yang diduduki tentara kolonial sebagai akibat dari Agresi Belanda II. Benny

remaja, berusia 14 tahun, ikut bergerilya bersama sejumlah anggota Tentara Pelajar. "Kalau tidak dicegah oleh anggota-anggota Tentara Pelajar yang lebih senior, Benny bisa nekat menembak bapaknya," kata Umar Kayam yang ada di Solo pada masa itu. Masih tentang ayahnya pada masa pendudukan itu, suatu kali ada laskar yang menahan Raden Moerdani, ayah Benny. Kabarnya Raden Moerdani dipermalukan. Benny amat marah. Tampaknya pasukan laskar itu adalah orang-orang Islam, dan konon sejak itulah Benny dan saudaranya mengembangkan sikap negatif terhadap Islam. Harry Moerdani, saudara kandung Benny, perwira yang bertugas di Siliwangi, kabarnya bahkan pernah mendapat hukuman karena menganiaya seorang tawanan, anggota DI/TII yang ditangkap pasukannya.

Penelitian saya mengenai sikap atau kebijakan Moerdani sebagai Panglima ABRI terhadap Islam tidak membuahkan hasil yang bulat. Sejumlah perwira merasa punya bukti bahwa mereka diperlakukan secara diskriminatif karena mereka beragama Islam. Sejumlah yang lainnya, terutama yang lebih junior, tidak merasa apa-apa. Setelah mempelajari latar belakang perwira-perwira itu, saya berkesimpulan bahwa mereka yang dicurigai adalah para perwira yang oleh Benny dan para pengikutnya ditengarai sebagai menonjol keislamannya, misalnya dengan cara mengirimkan anak ke pesantren kilat pada masa libur atau sering menghadiri pengajian. Umumnya perwira seperti ini tergolong dalam apa yang di Jawa Tengah dan Jawa Timur biasa disebut sebagai orang-orang yang berlatar belakang santri.

Mayor Jenderal TNI Edi Budianto—terakhir Asisten Intel Kepala Staf Umum (Kasum) TNI sebelum meninggal tak lama setelah pensiun—pernah menceritakan kepada saya pengalamannya ketika sebagai perwira pertama berdinas di Bais, dia pernah ditugaskan mengawasi seorang kolonel. Perwira menengah senior itu mengirimkan anak gadisnya ke pesantren kilat pada masa libur. "Dicurigai fundamentalis," kata Budianto.

Dalam pertanyaan yang harus dijawab oleh para perwira yang mengikuti tes untuk kesempatan mendapatkan pendidikan

militer lanjutan, dicantumkan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan mengetahui apakah para perwira itu bersedia menerima pemuda non-Muslim sebagai suami bagi anak gadisnya. Kalau jawabannya menekankan perlu iman yang sama, maka perwira tersebut kabarnya bisa diduga akan bernasib buruk. Tidak dapat kesempatan sekolah. Sang perwira dicap fanatik. Artinya, hari depan karier militernya suram. Apakah ini kebijakan yang digariskan Benny atau hanya tafsiran para anak buah yang cenderung *over acting*?

Dari perlakuan terhadap perwira berlatar belakang santri itu mungkin bisa disimpulkan bahwa tafsiran Benny terhadap ideologi TNI adalah semacam ideologi sekuler yang melihat agama semata urusan yang sangat pribadi, yang harus disembunyikan dari mata umum terutama bagi mereka yang anggota TNI. Dan para perwira harus tunduk pada ideologi TNI sesuai dengan tafsiran sekularistik tersebut. Sebuah sumber menyebutkan Benny pernah menegur Pangdam Jaya, Mayjen TNI Try Sutrisno, yang melaksanakan ibadah shalat Jumat dengan berbaju koko dan bersarung. Moerdani kabarnya mengharuskan para perwiranya melaksanakan ibadah di masjid dengan tetap berpakaian seragam militer.

Iklan Free Masonry di Praha

Dalam rangka ini penting untuk dicatat pengamatan Marsekal Muda TNI (Purn.) Teddy Rusdy yang bertahun-tahun menjadi pembantu dekat Benny. Menurut Teddy,

> Dalam melihat masyarakat Indonesia, Benny menggunakan teori pendulum. Benny melihat pergeseran ke kiri dan ke kanan dalam masyarakat Indonesia. Ada saatnya ke kiri, yakni selama Orde Lama, dan ke kanan setelah Orde Lama tumbang. Intelijen yang disusunnya sangat memperhitungkan gerak pendulum tersebut.
>
> Maka kebijakan Benny yang banyak dipandang sebagai anti-Islam, mungkin sebaiknya juga dilihat dengan memperhitungkan teori pendulumnya tersebut.

Ideologi TNI versi Benny yang sekularistik itu mengingatkan saya kepada sebuah iklan Free Masonry di Praha ketika saya bertugas di negeri tersebut. Iklan itu dimuat oleh koran berbahasa Inggris, *The Prague Post* yang mengumumkan dibukanya pendaftaran menjadi anggota baru. Orang Islam juga boleh masuk, tapi syaratnya, "mereka tidak melaksanakan syariat Islam". Ini juga mengingatkan saya pada Islam ateis di Uni Soviet dahulu. Geider Aliyev, anggota Politbiro yang berasal dari Asia Tengah adalah contoh Islam ateis. Artinya secara budaya Islam, tapi tidak menjalankan syariat Islam, dan sebagai Komunis bahkan kemungkinan besar juga tidak percaya adanya Tuhan.

Sikap dan persepsi Benny yang sekularistik itulah yang kemungkinan besar diterjemahkan oleh bawahannya yang kadang ekstrem, bahkan *over acting* dan lalu menjadi bahan pembicaraan sehingga akhirnya Benny dituduh anti-Islam. Tapi tokoh terkemuka Nahdlatul Ulama (NU) Abdurrahman Wahid alias Gus Dur—pernah menjadi Presiden untuk waktu singkat—menampik pandangan demikian. Dekat dengan Moerdani, menurut pengakuannya, sejak 1975, dalam sumbangannya pada buku *L.B. Moerdani: Langkah dan Perjuangan* (2005), Gus Dur menulis:

> Sebagian teman menyatakan kepada penulis bahwa Benny Moerdani adalah musuh Islam yang sesungguhnya, tetapi penulis melihat kesimpulan itu sebagai sesuatu yang salah. Justru Pak Benny adalah orang yang melaksanakan pola hubungan negara dan agama seharusnya. Di antaranya, dia memegang pendiriannya bahwa harus ada perbedaan yang tegas antara mana yang menjadi tanggung jawab negara dan mana milik agama itu sendiri.

SALAH SATU TINDAKAN *OVER ACTING*, kabarnya pernah terjadi di Kopassus pada masa kepanglimaan Benny. Kisahnya seperti berikut. Seorang perwira senior menginspeksi ruang kerja para perwira bawahannya. Ketika melihat sajadah tersampir di kursi, sang Komandan bertanya, "Apa ini?", jawab sang perwira, "Sajadah untuk shalat, Komandan." Dengan membentak, sang Komandan

berkata, “TNI tidak mengenal ini.” Komandan yang sama juga kabarnya sering mengadakan rapat staf pada saat menjelang waktu ibadah Jumat sehingga mempersulit para perwira yang akan shalat Jumat.

Mengenai perlakuan buruk terhadap perwira-perwira yang beragama Islam, politikus partai Islam, Hartono Mardjono, pernah dikutip oleh koran *Republika* (terbitan 3 Januari 1997) sebagai mengatakan bahwa rekrutmen untuk menjadi perwira Kopassus sangat diskriminatif terhadap mereka yang beragama Islam. Menurut informasi Hartono Mardjono, kalau direkrut 20 orang, 16 di antaranya adalah perwira beragama Kristen atau Katolik, dua dari Islam, satu Hindu, dan satunya lagi Buddha.

Masih berhubungan dengan agama, menarik untuk dicatat bahwa Benny yang Katolik, menurut cerita Letjen TNI (Purn.) Soedibyo—dalam buku peringatan 70 tahun usia Benny—pernah memasuki wilayah Masjidil Haram di Makkah, ketika mengawal Presiden dan keluarganya melakukan ibadah umrah. Yang terakhir ini jelas bukan kesalahan Benny. Sebagai seorang Muslim, Soeharto seharusnya mengingatkan para pengawalnya bahwa yang bukan Muslim tidak dibolehkan menginjak Tanah Haram, yakni wilayah di sekitar Makkah dan Madinah yang disucikan dan dimuliakan umat Islam. Ketika bercerita di kantor Bais mengenai pengalamannya masuk ke Makkah, Benny kabarnya menyatakan kekagumannya kepada Masjidil Haram dan menganjurkan kepada para anak buahnya yang Muslim agar menyempatkan berziarah ke tempat suci tersebut.

Bahwa Benny nekat masuk ke wilayah Masjidil Haram, itu suatu petunjuk bagaimana *security officer* itu sangat serius dalam mengawal dan menjaga keamanan Bapak Presiden dan keluarganya. Untuk urusan keselamatan Soeharto, Benny tidak pernah percaya orang lain. Ke mana Soeharto pergi, Benny harus menyertainya. Bahkan, dalam acara-acara keluarga di Cendana, tanpa diundang, Benny hampir selalu hadir. Konon Ibu Tien Soeharto pernah mengeluhkan kegiatan pengamanan Benny itu sebagai mengganggu privasi keluarga.

Negara Adalah Segala-galanya

Jadi siapa sebenarnya Benny Moerdani? Atau, mungkin pertanyaan yang tidak kurang relevan adalah siapa sebenarnya Soeharto yang menciptakan fenomena Moerdani? Itu memang pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tidak lama setelah menjadi Pangab, kepada wartawan *Far Eastern Economic Review*, David Jenkins, Benny mengaku hubungannya dengan Soeharto bagaikan hubungan bapak dengan anak. Beda umur Soeharto-Benny adalah 12 tahun. Pertanyaan terhadap pernyataan Moerdani ini adalah apakah Soeharto juga melihat hubungannya dengan Benny bagaikan hubungan anak dengan bapak?

Benny mengenal Soeharto dari dekat ketika keduanya bertugas dalam Operasi Trikora. Soeharto Panglima Mandala dan Moerdani Komandan *Operasi Naga* yang diterjunkan di belantara Irian Barat. Kelak ketika Soeharto sudah menjadi Presiden sementara Benny masih di Kuala Lumpur dan kemudian Seoul, setiap Kepala Negara ke luar negeri Benny selalu didatangkan khusus dan ditugasi sebagai konsultan pengamanan. Ini berarti Soeharto sejak

Soeharto melantik Benny Moerdani menjadi Panglima ABRI, 1983.

lama sudah mengenal dan mengakui keandalan Moerdani sebagai *security officer*.

Meski jauh di luar negeri, Moerdani secara teratur mengikuti perkembangan politik dan keamanan di Indonesia. Ketika terjadi kisruh di seputar Malari, Januari 1974, dengan radio khusus Benny mengikuti perkembangan. Maka ketika telepon panggilan dari Ali Murtopo diterimanya, Moerdani langsung siap meninggalkan Seoul dengan penerbangan terakhir ke Hong Kong untuk keesokan paginya melanjutkan penerbangan ke Jakarta.

Dengan segala kekuasaan yang dipercayakan Soeharto kepada Moerdani, ternyata hubungan mereka tidak bersifat emosional sebagaimana layaknya hubungan anak dengan bapak. Ketika Moerdani sudah mulai mendeteksi ada yang kurang beres pada tingkah laku Soeharto dan keluarganya, sikapnya mulai berubah. Soeharto juga mendadak menjaga jarak kalau tidak bahkan menjauhkan Moerdani dari lingkungannya. Adapun Benny menurut Dr. Ben Mboy—dokter militer yang ikut terjun bersama Moerdani di wilayah Irian Barat pada masa Trikora—menganggap negara adalah segala-galanya. Dia menuntut pengabdian semua orang kepada negara. Termasuk Soeharto. Ironisnya, pada saat yang sama, Moerdani juga memandang Soeharto layaknya seorang kawula melihat rajanya. Lama setelah disingkirkan oleh Bapak Presiden, Benny masih marah kepada siapa saja yang menjadikan Soeharto bahan lelucon. Tampaknya sulit baginya membedakan antara Soeharto dan negara. Kegalauan pada cara pandang yang demikian itulah yang bisa diduga menjadi sumber tragedi bagi hidup Moerdani.

Mantan Pangab dan mantan Raja Intel itu adalah seorang patriot yang sejak muda memilih tentara sebagai lapangan pengabdiannya. Moerdani tampaknya berpendapat bahwa ideologi tentara—pengabdian total kepada negara—yang dianutnya harus menjadi pegangan semua orang Indonesia. Oleh karena itu, siapa saja yang bersikap lain dari sikap ABRI dicurigainya. Kecuali sikap dan cara pandang kenegaraan ABRI—suatu cara pandang yang tidak dilihatnya ada dalam kalangan sipil—bagi Moerdani,

semua sikap dan cara pandang lain tidak punya tempat di Indonesia, terutama dalam ABRI. Ini juga, saya duga, penjelasan bagi sikapnya yang kemudian enggan mendukung kebijakan Soeharto yang menugaskan Sudharmono mengarahkan Golkar makin independen dari ABRI.

Benny memang menganggap rendah politisi sipil sejak Sukarno menaikkan bendera putih di depan Gedung Negara Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Dalam hal ini, Benny sebenarnya tidak sendiri. Hampir semua perwira TNI generasi pertama menganggap rendah para politisi sipil. Orang yang memberi landasan doktrin kepada sikap ini adalah Nasution. "Jalan Tengah" dan doktrin "Dwifungsi" adalah pernyataan paling jelas dari ketidakpercayaan—kalau bukan kebencian mendasar—militer Indonesia generasi pertama kepada kaum sipil.

Sebagai seorang Katolik, Moerdani mengaku kepada saya dia bukan Katolik yang baik. Sebagai orang Jawa Tengah, Benny mungkin memang lebih tepat digolongkan sebagai Katolik abangan. Sikapnya yang kurang bersahabat kepada Islam, hingga dia dituduh anti-Islam, mungkin sebagian besar bersumber pada latar belakang budayanya yang abangan.

JAUH SETELAH BENNY TERSINGKIR dari pusat kekuasaan, beberapa tahun sebelum dia jatuh sakit yang akhirnya mengantarkan kepada kematiannya, saya berkesempatan beberapa kali mewawancarainya di CSIS, yang terletak di Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat. Wawancara dimungkinkan oleh bantuan Harry Tjan Silalahi, salah seorang pendiri dan pimpinan di CSIS dan teman lama Benny.

Pertemuan pertama kami dibuka dengan agak dramatis. "*You* ICMI, ya?" tanya Benny dengan nada setengah menuduh, ketika saya baru saja duduk. Karena dia tidak berkuasa lagi, meski saya masih tetap takut padanya, saya tertawa sambil dengan santai berkata, "Bagaimana Bapak ini? Masa Raja Intel tidak tahu saya ini tidak pernah masuk organisasi, kecuali Persatuan Wartawan

Indonesia (PWI). Itu pun karena wajib bagi kami yang mencari makan sebagai wartawan."

Kepada Benny saya jelaskan, saya bukan anggota ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), tapi itu tidak berarti saya anti-ICMI. Dulu sebagai mahasiswa yang beragama Islam, saya juga tidak masuk HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia), atau IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Bukan karena saya anti, melainkan karena saya malas saja. Teman saya dulu banyak di HMI, PMII, dan IMM, seperti sekarang banyak juga di ICMI. Tapi barangkali karena saya punya kecenderungan tidak suka diatur, maka saya pilih jadi orang bebas saja. Mungkin karena saya seniman, kata saya lebih menjelaskan. Waktu itu saya kebetulan memang sedang menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

Diusir dari Malaysia

Setelah itu Benny mulai bercerita tentang bahaya ICMI sebagai organisasi sektarian, suatu tuduhan yang sering juga saya dengar dari Gus Dur (Abdurrahman Wahid). Benny cerita bagaimana dia berkali-kali mengingatkan Soeharto mengenai bahaya ICMI. Dia menyebut nama Imaduddin Abdurrahim, seorang tokoh ICMI, yang katanya diusir dari Malaysia karena sikapnya yang radikal. Karena sang Presiden tampaknya sudah berketetapan mendirikan ICMI, peringatan Benny disepelekannya saja.

Terhadap sikap Moerdani kepada ICMI tersebut, Teddy Rusdy menjelaskan,

> Moerdani sebagai minoritas ganda, sadar betul tentang kerawanan dan "*sense of survival*" minoritas *vis a vis* mayoritas. LBM berpandangan, kalau ingin mencerdaskan umat Islam, cerdaskan seluruh rakyat Indonesia yang lebih 80% beragama Islam. Jadi, kehadiran ICMI dipandangnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ini adalah sikap ABRI dan disuarakan juga oleh Jenderal Try Sutrisno dan Jenderal Edi Sudrajat yang beragama Islam.

Tentang ICMI dan latar belakang dukungan Presiden Soeharto terhadap perkumpulan cendekiawan Muslim itu, Sarwono Kusumaatmadja punya informasi menarik. Berikut ini penuturannya kepada saya pada 10 Mei 2012:

> Setelah ICMI terbentuk, sejumlah orang meminta saya menjadi ketua PCPP [Perkumpulan Cendekiawan Pancasila Pembangunan]. Saya menolak dengan alasan, menyebut diri cendekiawan adalah satu sifat arogansi. Itu juga alasan saya menolak masuk ICMI. Penolakan saya itu tak lama kemudian saya ceritakan kepada Pak Harto. Komentar Pak Harto, "Ah, orang-orang itu ketakutan saja kepada ICMI. Nggak usah khawatir kepada ICMI. Itu, kan saya yang bikin. Maksudnya untuk mengandangi, termasuk yang radikal, agar tahu mereka maunya apa dan lagi mengerjakan apa. Untuk memastikan ICMI itu terkendali, saya pasang Habibie di situ. Mengapa Habibie? Ya, karena kalau saya taruh Sarwono di situ, susah dipercaya, namanya nama Jawa. Kalau Habibie, namanya Baharuddin Jusuf, ya, pasti Islam. Saya senang Situ menolak jadi ketua PCPP. Mereka itu konyol saja dan tidak tahu ICMI itu bikinan saya untuk mengerangkeng orang-orang itu."

Informasi yang saya peroleh dari Sarwono itu mendapat dukungan Robert W. Hefner, seorang profesor antropologi dari Boston University, yang dapat dibaca dalam bukunya *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia* (2000). Menurut Hefner:

> Jelas sekali bahwa sejak awal ICMI tidak akan pernah menjadi sebuah badan independen sebagaimana yang diimpikan oleh para mahasiswa dan aktivis [Islam]. Soeharto dari semula sudah bermaksud memanfaatkan ICMI untuk tujuan politiknya sendiri. Habibie juga dari awal sudah berencana mengontrol ICMI dengan menggunakan teman-temannya para birokrat. ICMI adalah hanya lembaga terbaru yang diciptakan Soeharto untuk mengooptasi dan mengerangkeng oposisi.

SERANGAN KEPADA ICMI menjadi makin serius karena B.J. Habibielah yang menjadi ketuanya. Waktu itu Habibie sudah lama dikabarkan sebagai tidak populer di kalangan pimpinan ABRI karena sebagian besar proyek tentara yang berhubungan dengan tekno-

logi diserahkan Soeharto kepadanya. Salah satu proyek itu adalah pabrik kapal terbang Nurtanio di Pangkalan Udara Husain Sastranegara, Bandung. Pabrik kapal terbang yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia (PTDI) itu, pada mulanya milik Angkatan Udara yang dipelopori pembangunannya oleh Nurtanio.

Habibie merencanakan perluasan pabrik dan untuk itu kegiatan militer di pangkalan udara tersebut harus dipindahkan. Soeharto pada mulanya mendukung gagasan Habibie. Pangab Moerdani gagal meyakinkan Soeharto mengenai bagaimana mahal dan sulitnya memindahkan sebuah pangkalan udara militer. Benny memerintahkan Marsekal TNI Sukardi, Kepala Staf Angkatan Udara, untuk bicara langsung kepada Bapak Presiden. Soeharto akhirnya berhasil diyakinkan. Penggusuran Pangkalan Militer Husain Sastranegara batal.

Selain menjadi menteri, Habibie waktu itu memang memimpin sejumlah perusahaan strategis. Sedemikian rupa sehingga ketika Soeharto memintanya memimpin ICMI sebagai Ketua, Habibie pada mulanya menolak. Dia merasa sudah tidak punya waktu tersisa lagi. Baru setelah Soeharto menjelaskan apa arti ICMI kepada Habibie yang waktu itu memang tidak banyak tertarik soal politik, jabatan ketua diterimanya. Begitu cerita orang-orang di sekitar B.J. Habibie kepada saya. Apa sebenarnya yang disampaikan Soeharto kepada Habibie ketika membujuk Menteri Riset dan Teknologi itu menerima kedudukan Ketua ICMI, itulah yang menarik. Sayangnya saya belum berhasil mendapatkan informasi yang sepenuhnya bisa saya percaya mengenai itu.

Tentang Habibie, Benny juga bercerita mengenai apa yang disebutnya sebagai "kebohongan" Menteri Riset dan Teknologi itu kepada Soeharto. Ini mengenai prospek penjualan helikopter Puma rakitan Bandung. Cerita tentang Habibie, dalam versi yang sama, saya dengar juga dari Teddy Rusdy. Menurut cerita Teddy,

> Pada suatu hari dalam suatu sidang kabinet, Habibie melaporkan rencana Iran membeli helikopter Super Puma yang dirakit

> di Bandung. Waktu itu sedang berkecamuk Perang Iran-Irak. Kami orang intel ingin tahu apakah Iran hanya akan membeli helikopter kosong atau dengan senjata? Kalau dengan senjata, apa senjatanya? Kemudian kami tahu bahwa yang akan dijual itu adalah helikopter yang dilengkapi senjata Exocet yang memang dibuat di Indonesia dengan izin Prancis dan Jerman.
>
> Saya diperintahkan Benny terbang ke Prancis mengecek apakah Habibie punya izin menjual Exocet itu ke negara ketiga. Mereka terkejut dan mengancam mengembargo Indonesia jika senjata itu dijual ke negeri ketiga. Akhirnya, rencana penjualan senjata itu berhenti di tengah jalan setelah Benny dan saya melapor ke Pak Harto.

Masih mengenai Habibie, menurut seorang purnawirawan yang pernah bertugas di Bais, Benny juga sangat khawatir melihat Menteri Ristek itu bekerja selama tiga bulan di pabrik kapal terbang Jerman, tempat Habibie dulu memulai kariernya pada industri kapal terbang. Katanya, kegiatan di Jerman itu atas persetujuan Soeharto. Tapi dengan alasan keamanan, Benny berpendapat seorang menteri tidak boleh merangkap jabatan lain di luar negeri. Habibie memang seorang pejabat tinggi di pabrik kapal terbang MBB (Messerschmitt Bolkow-Blohm) sebelum dipanggil kembali oleh Presiden Soeharto. Terhadap pernyataan serta sikap Benny dan Teddy Rusdy mengenai B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia itu, lewat sebuah wawancaranya dengan saya pada sembilan Januari 2012, memberi tanggapan sebagai berikut:

> Saya banyak pekerjaan di sini. Begitu banyak jabatan saya, tidak ada cukup waktu. Bagaimana mungkin saya bisa ke MBB selama tiga bulan ketika saya telah jadi Menteri? Yang benar saja, dong.
>
> Saya ini seorang profesional dan tahu mengenai apa arti embargo. Bagaimana mungkin saya akan menjual helikopter kepada Iran yang waktu itu perang dengan Irak dan sedang diembargo oleh Barat. Saya sampaikan rencana penjualan helikopter di sidang kabinet? *Never*. Silakan periksa semua laporan sidang kabinet di Sekneg.

> Saya memang pernah diundang ke Iran waktu itu. Tapi saya tolak. Saya tidak mungkin kerja sama dengan mereka. Saya tidak mau melanggar embargo.
>
> Bisa saja ada orang lain yang menggunakan nama Habibie. Lagi pula kita di Bandung tidak membikin Exocet. Dari mana ceritanya saya mau ekspor Exocet?

Tentang hubungannya dengan Benny Moerdani, kepada saya Habibie memulai ceritanya pada hari-hari pertamanya di Jakarta pada 1974 setelah dipanggil pulang dari Jerman. Menurut penuturannya sendiri, Habibie tiba di Indonesia beberapa saat setelah Malari. "Saya tiba di Jakarta ketika jam malam baru saja dicabut." Habibie lalu bercerita bagaimana pertemuan pertamanya dengan Kolonel Moerdani yang selalu dipanggilnya dengan "Mas Benny".

> Entah apa alasannya, Pak Harto memutuskan saya harus dijaga. Yang ditugaskan adalah Benny Moerdani. Waktu itu Benny masih Kolonel, baru ditarik dari Seoul. "Kenal Benny?" tanya Pak Harto. "Tidak." Yah, bagaimana saya kenal, siapa orang itu? Pak Harto selanjutnya mengatakan, "Dia akan jadi Kepala Intel Hankam dan saya tugaskan menjaga kamu biar tidak diganggu oleh siapa pun." Ketika saya jumpa di markas intel di Tebet, sekarang Balai Sudirman, dia baru saja naik pangkat menjadi Brigjen. Kami berbahasa Belanda. Semua pembantunya dia kenalkan kepada saya waktu itu.

Untuk waktu yang lama, hubungan Benny dengan Habibie amat dekat. Habibie mengaku sangat hormat kepada Benny yang dipandangnya sebagai seorang pahlawan yang sangat loyal dan penjaga keamanan Soeharto dengan serius dan sepenuh hati. Di Gedung BPPT, Jalan M.H. Thamrin, kantor Habibie, Benny juga mendapat kantor. Seorang teman dekat Moerdani bercerita bagaimana Benny menjaga Habibie layaknya aparat sekuriti Amerika menjaga Werner Von Braun, ahli roket Jerman yang dibawa Amerika dari Jerman setelah Perang Dunia II berakhir.

Menurut Habibie, hubungan dirinya makin lama makin erat dengan Soeharto, sementara hubungan Bapak Presiden dengan Benny—terutama setelah menjadi Pangab—makin lama makin

berjarak. Hubungan Habibie-Moerdani memuncak buruk ketika Benny tersingkir dari lingkungan Soeharto. Habibie merasa sejak itu Benny cemburu kepadanya. Tersingkirnya Benny digambarkan Habibie sebagai berikut:

> Benny yang sangat profesional sebagai intel melihat gejala kedekatan keluarga Pak Harto dengan kalangan bisnis sebagai bisa merusak kedudukan dan citra Pak Harto. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas keselamatan Presiden, Benny menyampaikan kecemasannya tersebut. Ini disalah-mengerti, lalu dimanfaatkan oleh orang banyak di sekitar Soeharto yang memang tidak senang melihat Benny yang amat berkuasa. Benny itu korban saja.

"Soeharto Itu yang Anti-Islam."

Pada wawancara kedua di tempat yang sama, saya mulai memberanikan diri bertanya tentang sikapnya terhadap tuduhan anti-Islam yang diarahkan kepadanya. Benny marah, mukanya merah, dan terdiam cukup lama. Saya jadi ketakutan. Tiba-tiba dia berkata, "Kok, saya yang dituduh anti-Islam. Soeharto itu yang anti-Islam." Moerdani tidak memerinci lebih jauh alasannya menuduh Soeharto anti-Islam. Tapi sebagai peneliti peran politik tentara, saya tahu bahwa pada awal Orde Baru, Soeharto memang ada menunjukkan sikap alergi pada Islam. Saya sendiri pernah menyaksikan Soeharto melotot kepada seorang santri wanita yang menyarankan agar demonstrasi dukungan kepada ABRI yang berlangsung di halaman Kostrad pada hari-hari pertama pasca-Gestapu itu, ditutup dengan doa.

Harry Tjan Silalahi, Sekretaris Jenderal Partai Katolik yang bersama Subchan Z.E. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) berperan penting pada pengganyangan PKI pasca-Gestapu sering kali jumpa Pangkostrad/Pangkopkamtib Soeharto. Harry yang kemudian dekat dengan Soeharto bisa cerita banyak mengenai sikap negatif sang Jenderal terhadap Islam. Bersama Subchan Z.E., Harry suatu hari menemui Soeharto di Markas Kostrad pada awal Orde Baru. Menjelang akhir pertemuan, Subchan me-

nyampaikan rencana aksi massa berikutnya dengan mengucapkan kata *Insya Allah.* Soeharto amat terganggu. "Mengapa harus pakai Insya Allah?" tanyanya dengan kesal. Ketika sudah berada di luar, Subchan yang berasal dari keluarga santri daerah Kudus, Jawa Tengah, berkomentar kepada Harry, "Wah, Soeharto ini memang abangan tulen."

Cerita lain tentang Soeharto dan Islam dari Harry bisa dibaca pada buku *Tengara Orde Baru: Kisah Harry Tjan Silalahi* yang terbit pada 2004. Pada buku tersebut dikisahkan pertemuan Harry Tjan bersama beberapa tokoh masyarakat dengan Soeharto di Markas Besar Angkatan Darat pada 24 Februari 1966. Tokoh-tokoh anti-Komunis yang menjumpai Soeharto itu, antara lain, Kasimo dari golongan Katolik, Kiai Dahlan dari NU, dan Lukman Harun dari Muhammadiyah. Soeharto didampingi Jenderal Alamsyah, Jenderal Panggabean, Jenderal Sugiarto, dan Jenderal Basuki Rahmat. Dalam pertemuan tersebut Soeharto menyempatkan bertanya kepada Kiai Dahlan mengenai kegiatan NU membicarakan kembali "Piagam Jakarta". Kiai Dahlan menjelaskan bahwa dalam Piagam tersebut umat Islam diwajibkan menjalankan "syariat Islam".

Soeharto menukas dengan bertanya, "Apa itu *sarengat* (*sarengat* (Jawa) = syariat) Islam?" Lalu, Kiai itu menjelaskan secukupnya dan Soeharto kembali bertanya, "Bagaimana dengan saya yang abangan ini dan orang-orang Islam abangan lainnya? Apakah akan dipaksa-paksa melakukan sembahyang dan lain-lainnya?" Oleh Kiai Dahlan dijawab, bahwa hal tersebut bergantung pada orangnya. Maka dikatakan oleh Soeharto bahwa persoalan Piagam Jakarta tidak perlu dipersoalkan dan meminta agar persoalan Piagam Jakarta itu tidak diteruskan.

Menurut Harry, Lukman Harun kemudian mengomentari kejadian tersebut dengan menyimpulkan bagaimana alerginya Soeharto terhadap Islam. Tapi Harry yang lahir di Yogyakarta dan dibesarkan dalam budaya Jawa, tahu bahwa sikap Soeharto itu adalah sikap kaum abangan sejati. "Soeharto selalu mengatakan dia Islam, tapi dia Islam *hakekat*, bukan Islam *syariat*. Bersama

Sudjono Humardani, Romo Giat, Romo Misran, Romo Budi, semua mereka itu orang kebatinan, penganut Islam *hakekat*, bukan Islam *syariat*," kata Harry. Inilah yang menyebabkan Harry—bahkan lama setelah Soeharto meninggal—tetap percaya bahwa ber-Islam-Islam-nya Soeharto—menjalankan syariat—pada masa tuanya, lebih banyak disebabkan oleh pertimbangan politik. "Mencari dukungan Islam," katanya.

Pendapat yang sama juga pernah saya dengar dikemukakan oleh Gus Dur. Tapi Lukman Harun, tokoh Muhammadiyah yang berlatar belakang budaya Islam Minangkabau, percaya bahwa menjelang akhir kekuasaannya Soeharto mendapat hidayah Allah, bertobat, lalu jadi Muslim yang taat. Karena perbedaan pandangan terhadap Soeharto itu, Harry Tjan dan Lukman serta kaum mereka masing-masing berselisih jalan pada 10 tahun terakhir kekuasaan Soeharto. Padahal, mungkin saja Soeharto memang "mendapat hidayah Allah" secara pribadi—dalam masyarakat Jawa hal demikian bukan jarang terjadi—tapi sebagai politikus lain lagi ceritanya. Sejarah karier politik Soeharto menunjukkan dengan jelas kecanggihan mantan Presiden itu memanfaatkan siapa saja bagi keutuhan dan kelanggengan kekuasaannya. Soeharto tidak pernah bergantung pada dukungan siapa pun, ABRI, kaum sekuler maupun Islam. Yang terjadi justru sebaliknya, semuanya bergantung pada Bapak Presiden.

Pada masa awal kekuasaan Soeharto, setelah membereskan PKI, para pengikut Sukarno dan para tokoh pelopor Orde Baru (Kemal Idris, H.R. Dharsono, dan Sarwo Edhie) dan kekuatan Islam politik menjadi target Soeharto berikutnya. Yang mula-mula menjadi operator melaksanakan kebijakan anti-Islam Soeharto adalah Ali Murtopo. Waktu itu Moerdani masih menjabat Konsul Jenderal di Kuala Lumpur sebelum kemudian pindah ke Seoul. Dalam rangka itulah, kemudian munculnya cerita mengenai *Komando Jihad* yang diciptakan untuk kemudian dihancurkan. Ini adalah salah satu cara Ali Murtopo "meneror" kekuatan politik Islam, terutama menjelang Pemilihan Umum 1971. Waktu itu kubu Soeharto masih belum yakin pada kesanggupan Golkar—kenda-

raan politik tentara—mengumpulkan suara secara signifikan dalam pemilihan umum pertama Orde Baru.

Kelompok yang dipakai Murtopo untuk operasinya itu, antara lain, adalah para mantan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) yang menurut para perwira Kodam Siliwangi sudah lama mereka "jinakkan". Orang-orang Siliwangi itu amat kesal kepada kegiatan Murtopo "membangkitkan" kembali para mantan DI/TII tersebut. "Komando Jihad" itu menurut Panglima Siliwangi waktu itu, Mayor Jenderal TNI Himawan Sutanto, adalah "jadi-jadian". Tapi, para perwira di Bandung tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi pembantu dekat Presiden tersebut.

Memanfaatkan para mantan DI/TII itu adalah taktik Murtopo yang mula-mula dipraktikkannya ketika menghadapi PKI. Dia, antara lain, menggunakan para mantan DI/TII itu untuk menghadapi orang-orang Komunis setelah Gestapu. Jauh sebelumnya, di Sumatra Barat, sebagai perwira intel dalam pasukan yang beroperasi menumpas PRRI, Ali Murtopo melakukan hal yang sebaliknya. Di Sumatra Barat, Murtopo menggunakan anggota-anggota Pemuda Rakyat (PR), organisasi pemuda Komunis, dalam mengejar tokoh-tokoh PRRI. Menurut sebuah sumber di Padang, Kolonel Dahlan Jambek, seorang tokoh PRRI dan mantan pejabat tinggi di Markas Besar Angkatan Darat, tewas di tangan PR ketika dia dalam perjalanan menyerahkan diri ke pos pasukan TNI.

DI/TII yang dibangkitkan dan dimanfaatkan Ali Murtopo itu kemudian ternyata tidak seluruhnya bisa dijinakkannya kembali. Ini lebih kurang sama ceritanya dengan menggunakan Gali di Jawa Tengah yang akhirnya berada di luar kontrol Murtopo. Para Gali dihabisi oleh Petrus, sementara kegiatan mantan-mantan DI/TII dalam bentuk Negara Islam Indonesia (NII) masih terus menghantui masyarakat. Salah seorang korban "cuci otak" NII adalah keponakan saya. Bukan cuma kuliahnya berantakan, keponakan kami itu juga "dipaksa" melakukan tindak kriminal yang menjadikan milik orangtuanya sebagai sasaran. Keluarga kami memerlukan waktu lama untuk "mengobati" anak tersebut sebe-

lum pada akhirnya bisa kembali kuliah setelah kehilangan waktu selama enam tahun.

PADA MASA TUANYA SIKAP SOEHARTO memang terlihat berangsur berubah terhadap Islam. Menurut Jusuf Wanandi,

> Pada awal masa kepresidenannya, hubungan Soeharto lebih dekat kepada mistik Jawa daripada ke Islam. Tapi pada akhir delapan puluhan, dia menjauhkan diri dari mistik (serta ingatannya kepada Sudjono Humardani, teman seperguruannya dalam Mistik Jawa) demi menaikkan citranya di mata masyarakat Islam. Tapi adalah juga benar bahwa sejak Sudjono meninggal pada 1986, perhatian Soeharto ke praktik Kejawen menjadi berkurang.

Wiratmo Sukito Beralih Agama

Perubahan pada diri Soeharto mungkin terjadi karena pada umurnya yang makin tua, muncul keperluan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melaksanakan syariat, bukan melulu melalui jalan kebatinan. Pada dasarnya orang-orang abangan memang religius, sehingga tidak sulit bagi mereka berubah menjadi Islam yang serius, Katolik atau Protestan yang taat. Perubahan cara beragama banyak terjadi lewat perkawinan. Dalam hal ini Wiratmo Sukito—tergolong cendekiawan anti-Komunis terkemuka pada masa Orde Lama—adalah contoh bagus yang saya saksikan sendiri.

Sebagai orang Jawa abangan kelahiran Solo, pada tahun lima puluhan Wiratmo Sukito, atas kemauan sendiri, memutuskan menganut agama Katolik. Dia lalu dipermandikan dengan nama baptis Antonius Paulus. Sebagai penganut agama Katolik, dia sangat taat, rajin ke gereja, dan tulisan-tulisannya sering mengutip Alkitab. Pada awal Orde Baru, Wiratmo yang lama membujang memutuskan kawin dengan seorang Hakim Agung yang kebetulan beragama Islam. Wiratmo beralih agama. Sebagai orang Islam dia menjalankan agama barunya dengan sangat khusyuk dan tulisan-tulisannya juga banyak mengutip ayat-ayat dari Al-Quran.

Persis seperti dulu ketika beragama Katolik, dia gemar mengutip Alkitab.

Perubahan keberagamaan yang terjadi pada Soeharto kemungkinan besar bisa juga dimengerti jika melihatnya dari segi latar belakangnya yang abangan itu. Tapi dari titik pandang politik, yang saya duga ikut mendorong perubahan itu adalah keberhasilan Soeharto melumpuhkan kekuatan Islam politik. Artinya, kekuatan Islam politik bukan ancaman lagi bagi kekuasaan sang Presiden. Masih dari sudut politik, perubahan itu juga kemungkinan muncul dari kecemasan terhadap berbaliknya kekuatan-kekuatan yang dulu dipelihara dan dimanfaatkan Soeharto—antara lain dengan menggunakan Murtopo dan Moerdani—untuk memojokkan kekuatan Islam politik.

Menarik untuk diingat bahwa pada awal tahun sembilan puluhan, kekuatan-kekuatan yang pada awalnya merupakan pendukung penting Soeharto, terutama dalam menghadapi Islam, secara perlahan mulai berbalik gagang bersamaan dengan berubahnya sikap Soeharto terhadap Murtopo dan Benny. Gejala perubahan politik ini makin mencolok setelah ICMI terbentuk. Sebagai reaksi terhadap ICMI, sejumlah organisasi cendekiawan, yang mendasarkan diri pada asas kebangsaan, mendadak bermunculan. Mula-mula ada Persatuan Cendekiawan Pembangunan Pancasila (PCPP). Tapi karena sambutan Soeharto dingin terhadap organisasi ini, muncul kemudian Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan (YKPK) dengan Letjen TNI (Purn.) Bambang Triantoro, orang dekat Moerdani, menduduki posisi Ketua dan selaku Sekretaris Jenderalnya tampil Matori Abdul Djalil, yang waktu itu dikenal sebagai anak buah Gus Dur. Berbagai organisasi ini muncul sebagai reaksi terhadap ICMI.

Nama Benny, Edi Sudrajat, dan Try Sutrisno disebut-sebut sebagai dekat dengan kekuatan anti-ICMI (baca: anti-Soeharto) tersebut. Harry Tjan menampik adanya kedekatan Benny kepada aktivis-aktivis yang kritis terhadap Soeharto itu. "Benny tidak berani melawan Soeharto," kata Harry. Moerdani memang tidak berani secara frontal melawan Soeharto, juga ketika masih men-

duduki posisi penting. Kendati demikian, sebagai pengagum Jenderal Sudirman, sebagai seorang patriot, Moerdani juga tidak bisa tinggal diam ketika Soeharto sudah dipandangnya sebagai telah membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan sikap itulah, saya duga, Moerdani bersedia hadir dalam sebuah diskusi terbatas Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia (YPPI) di rumah Fahmi Idris pada suatu malam pada paruh pertama 1991.

"Ini Harus Hati-Hati. Soeharto Itu Orang Jawa."

Bersama Presiden Soeharto, Benny adalah Penasihat YPPI yang didirikan oleh para mantan tokoh demonstrasi 1966 dengan dukungan Ali Murtopo. Hadir di rumah Fahmi pada malam itu para pemimpin demonstrasi 1966 seperti Cosmas Batubara, dr. Abdul Ghafur, Firdaus Wajdi, Suryadi, Sofyan Wanandi, Husni Thamrin, dan sejumlah tokoh. Topik pembicaraan, situasi politik waktu itu. Firdaus Wajdi, Ketua Harian YPPI, ingat malam itu Moerdani bicara mengenai Soeharto yang menurut Menhankam itu, "Sudah tua, bahkan sudah pikun, sehingga tidak bisa lagi mengambil keputusan yang baik. Karena itu sudah waktunya diganti."

CARANYA BAGAIMANA? Seorang peserta pertemuan bertanya. Benny menoleh kepada Drs. Suryadi, Ketua Partai Demokrat Indonesia (PDI) waktu itu sambil bertanya, bagaimana PDI? "Ah, PDI itu partai kecil, tidak usah diperhitungkan," respons Suryadi merendah. Benny kemudian bertanya kepada Husni Thamrin dari PPP. Jawab Husni, "Ini harus hati-hati. Soeharto itu orang Jawa. Tidak ada yang bisa menerka dia." Benny kemudian bertanya kepada pihak Golkar. Banyak tokoh muda Golkar di majelis itu, tapi tak seorang pun yang berani menjawab. Benny kemudian bicara mengenai gerakan massa sebagai jalan untuk menurunkan Soeharto. Firdaus menanggapi, "Kalau menggunakan massa, yang pertama dikejar adalah orang-orang Cina dan kemudian gereja."

Cara yang lebih aman, kata Firdaus, "Kuasai MPR. Lewat MPR, Soeharto bisa dengan lebih aman diturunkan."

Pertemuan di rumah Fahmi itu bocor dan dilaporkan kepada Soeharto. Sebuah sumber menyebutkan laporan mencapai Presiden lewat Azwar Anas, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat waktu itu. Atas dasar laporan itulah, Soeharto dan para pembantunya, termasuk Tutut, putrinya, mempersiapkan daftar calon sebagai antisipasi terhadap daftar calon anggota MPR dari pimpinan Golkar yang dicurigai Soeharto dan orang sekelilingnya sebagai kemungkinan telah berada di bawah pengaruh Moerdani.

Map yang berisi daftar calon yang disampaikan Ketua Umum Golkar, Wahono, dan Sekjennya, Rahmat Witoelar, diterima Soeharto untuk seterusnya dimasukkan ke laci meja kerjanya di kediaman Jalan Cendana. Dan dari laci itu dikeluarkan map yang berisi daftar yang telah disusun atas petunjuk Bapak Presiden. "Pakai ini saja," kata Soeharto kepada Wahono. Daftar itulah yang kemudian menghasilkan anggota DPR dan MPR yang waktu itu dikenal sebagai "ijo royo-royo".

KEMBALI KEPADA SOEHARTO yang berubah terhadap Islam pada 10 tahun terakhir kekuasaannya, kita sebaiknya juga harus memperhitungkan dampak gerakan pembaruan Islam yang dilancarkan Nurcholish Madjid dan teman-temannya sejak 1970. Saya melihat gerakan Nurcholish dan teman-temannya itu sebagai suatu usaha pembebasan umat Islam Indonesia dari apa yang sering saya sebut sebagai "teologi Pemilu 1955" yang dulu mewajibkan umat Islam memilih hanya partai yang berjuang bagi tegaknya negara berdasarkan syariat Islam. Dengan pembaruan tersebut, umat Islam akhirnya tidak lagi wajib menjadi anggota atau mendukung partai Islam, meski beberapa partai tetap mengaku memperjuangkan terbentuknya negara berdasarkan syariat Islam. Semboyan yang diperkenalkan Nurcholish, "Islam Yes, Partai Islam No", kemudian menjadi pegangan mayoritas masyarakat Islam Indonesia, bahkan hingga masa pasca-Orde Baru sekarang.

Salah satu akibat dari populernya pemikiran pembaruan Nurcholish itu adalah berkurangnya kecurigaan tentara dan penguasa kepada Islam, sebagaimana yang tecermin dalam kebijakan Soeharto. Terhadap kalangan Islam sendiri, langkah-langkah Nurcholish dan teman-temannya mengakibatkan lenyapnya hambatan bagi kader-kader Islam (NU maupun Muhammadiyah, dan HMI) untuk masuk Golkar atau bahkan PDI yang kelak menjadi PDI Perjuangan (PDIP). Sulit membayangkan Dr. Ir. Akbar Tanjung, mantan Ketua HMI, menjadi Ketua Golkar tanpa sebelumnya ada usaha pembaruan Nurcholish Madjid dan kawan-kawannya tersebut.

Dengan latar belakang itulah semua, antara lain, kita harus melihat kebijakan Soeharto yang membolehkan jilbab dipakai murid-murid sekolah yang sebelumnya dilarang oleh Menteri Pendidikan Daud Jusuf. Soeharto juga memfasilitasi berdirinya Bank Muamalat serta dibentuknya ICMI. Daud Jusuf, salah seorang pendiri dan tokoh CSIS, tidak mendukung kebijakan Soeharto yang "bersahabat" terhadap Islam Syariah, karena itu tidak lagi duduk dalam kabinet. Daud adalah seorang doktor didikan Prancis yang sangat kagum pada sekularisme yang dipraktikkan negara tempatnya belajar. Berbeda dengan sekularisme Amerika yang toleran terhadap agama, sekularisme Prancis berpangkal pada Revolusi Prancis yang memusuhi agama (*anti-cleric*). Jenderal Mustafa Kemal dari Turki adalah tokoh yang juga penganut sekularisme Prancis. Maka setelah berhasil menghapuskan Kesultanan Ottoman—Kemal sebagai

Soeharto dan Ibu Tien di Padang Arafah ketika menjalankan ibadah haji, 1991.

Presiden pertama Turki menerapkan sekularisme Prancis di negara yang dipimpinnya.

Lebih Merupakan Tipu Daya Politik

Pada 1991, Soeharto sekeluarga melaksanakan ibadah haji. Waktu itu banyak pemerhati politik yang belum melihat langkah Soeharto berhaji sebagai suatu yang serius. Di Jakarta waktu itu sejumlah orang cenderung melihat langkah itu sebagai lebih merupakan tipu daya politik menjelang Pilpres 1993. Menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci, kepada pimpinan NU Jawa Timur, Kiai Haji Misbah dan Dr. Saleh Aljufri, yang menemuinya di Cendana, Soeharto menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah merencanakan berangkat berhaji sejak masa Pelita (Pembangunan lima tahun) Pertama, tapi batal. Pada Pelita II gagal, masa Pelita III baru sempat melakukan umrah, dan pada masa Pelita IV batal lagi. "Baru pada Pelita V ini saya takut kepada Allah untuk menunda kembali karena saya tahu pergi haji itu wajib hukumnya," kata Soeharto.

Terhadap kepergian Soeharto ke Tanah Suci itu, Benny cemas. "Wah, kalau Bapaknya serius, bakal repot kita," katanya. Soeharto ternyata kemudian memang tidak main-main ke Makkah. Selain menyempurnakan namanya menjadi Haji Mohammad Soeharto, sikap politiknya terhadap Islam juga terlihat makin simpatik. Apa pun alasan dan motifnya, Benny dan sejumlah jenderal tidak bisa mengerti, apalagi menerima perubahan sikap dan kebijakan Soeharto tersebut. Raja Intel itu bersama sejumlah golongan anti-Soeharto akhirnya melanjutkan *crusading* mereka terhadap kebijakan baru Bapak Presiden terhadap Islam, terutama terhadap ICMI. Akibatnya, Benny akhirnya yang menerima tuduhan sebagai anti-Islam.

Sehubungan dengan ketegangan hubungan antara Soeharto dan mantan Panglima ABRI itu, menarik untuk memperhatikan satu dari sejumlah cerita dalam memoar Jusuf Wanandi mengenai Moerdani dan Soeharto. Ini mengenai pertemuan Soeharto

dengan Moerdani yang lolos dari pengamatan pers dan para musuh Benny. Kepada Wanandi, Moerdani bercerita bahwa atas usaha Tutut, mantan Pangab itu berhasil jumpa Soeharto. Konon itu adalah perjumpaan pertama Benny dengan Soeharto sejak Ibu Tien Soeharto meninggal dunia. Sejumlah hal dibicarakan kedua mantan pembesar Republik tersebut. Salah satu hal penting yang disampaikan Benny kepada Soeharto dalam pertemuan di rumah Sigit Harjojuanto—salah seorang putra sang mantan Presiden—adalah informasi mengenai lima dari 10 Pangdam waktu itu adalah mereka yang disebut Moerdani sebagai jenderal "hijau".

Menurut Jusuf Wanandi, Benny menuliskan nama-nama Pangdam yang dinilainya "hijau" itu dan menyerahkannya kepada Soeharto. Soeharto mengirimkan daftar nama tersebut kepada Wiranto, Panglima ABRI di bawah Presiden B.J. Habibie. Wiranto, menurut Wanandi, memerlukan waktu hanya sebulan untuk melengserkan lima Pangdam yang ada dalam daftar Moerdani tersebut.

Selain soal pelengseran para Pangdam yang dianggap "hijau" berdasarkan informasi Moerdani, Jusuf Wanandi juga mencatat kontak Wiranto lainnya dengan Benny. Menurut petinggi CSIS tersebut, beberapa saat setelah dilantik sebagai KSAD pada Juni 1997, Wiranto menemui Moerdani untuk minta bantuan. Respons Benny,

> Jangan berilusi. Orang tua itu tidak senang pada saya, tidak percaya kepada saya. Jadi, kau harus tetap di situ sebab kau satu-satunya orang kita di situ. Jangan berbuat salah dan jangan dekat dengan saya sebab kau akan dihabisi Soeharto jika dia tahu.

Kebetulan saya jumpa Jenderal Wiranto di Studio Metro TV pada 22 Oktober 2012. Kami sama-sama menjadi narasumber pada acara *Mata Najwa* yang membicarakan prospek para mantan jenderal yang akan menjadi calon presiden pada Pilpres 2014. "Tidak benar semua cerita itu," komentar Wiranto mengenai apa

yang ditulis Jusuf Wanandi mengenai hubungannya dengan Benny. Kata Wiranto selanjutnya,

> Demi Allah, saya tidak pernah berhubungan dengan Pak Benny secara pribadi. Saya jumpa hanya pada acara-acara resmi. Dan tidak ada lima Panglima Kodam yang saya ganti waktu itu. Dalam soal ABRI "Hijau" dan "Merah Putih" saya memang selalu kena fitnah.

PADA MULANYA BARANGKALI BENNY memang hanya menjalankan kebijakan Soeharto. Tapi mengingat sikap dan latar belakangnya yang secara prinsipil dari awal memang kurang bersahabat kepada Islam, maka masyarakat Islam Indonesia akhirnya cenderung melupakan bahwa Soeharto-lah sebenarnya yang mula-mula menggariskan kebijakan sikap keras terhadap Islam. Benny dan Ali Murtopo hanya menafsirkan serta melaksanakannya. Tentu menurut penafsiran dan selera masing-masing kedua tokoh intel tersebut.

Dalam mencoba mengerti kebijakan Orde Baru terhadap Islam, ketika menjadi mahasiswa di Ohio State University, saya pernah menulis sebuah makalah untuk kelas perkembangan politik di Dunia Ketiga. Yang mengajar waktu itu adalah Prof. Dr. Ali Mazrui, guru besar tamu dari Kenya, Afrika Timur. Pada makalah tentang Islam di Indonesia tersebut, saya mengemukakan sinyalemen saya mengenai adanya kesinambungan antara kebijakan Islam Snouck Hurgronje (penasihat urusan Islam pemerintah Kolonial Belanda pada awal abad ke-20) dan kebijakan Islam yang dijalankan Soeharto. Unsur paling penting kebijakan tersebut adalah: Islam sebagai ibadah harus didukung, Islam sebagai kegiatan sosial harus diawasi, sedangkan Islam sebagai kegiatan politik harus dicegah.

Nah, dalam melaksanakan pencegahan itulah tampaknya para pelaksana kebijakan Soeharto membuat penafsiran-penafsiran yang mengacaukan antara Islam sebagai ibadah, aktivitas sosial, dan Islam sebagai gerakan politik. Kesalahan atau kekacauan tersebut tidak harus dilihat melulu sebagai kesalahan tak teren-

cana. Bukan tidak mungkin "kesalahan" itu adalah justru bagian dari sebuah rencana berdasarkan pandangan dan kepentingan tertentu. Saya mendapat kesan kuat waktu itu bahwa perubahan pada Soeharto terjadi justru karena sang Presiden menyadari telah terjadinya kesalahan penafsiran atau salah menjabarkan perintah oleh para anak buahnya. Dan salah menafsirkan yang berujung pada salah implementasi itu menyulitkan posisi politik Soeharto di mata kaum mayoritas.

TELAH MENJADI KEBIASAAN SAYA UNTUK MEMBERIKAN TRANSKRIP rekaman wawancara kepada tokoh yang saya wawancarai. Maksudnya untuk menghindari keliru catat, dan sekaligus memberi kesempatan kepada narasumber untuk mengoreksi atau bahkan mengubah hasil wawancaranya. Hal yang sama saya lakukan juga kepada Benny Moerdani. Beberapa hari setelah transkrip terkirim melalui CSIS, saya kebetulan berjumpa dengan mantan Pangab itu di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Pada hari itu diselenggarakan upacara timbang terima KSAD dari Jenderal Hartono ke Jenderal Wiranto. Saya memberi salam. Jawab yang saya peroleh bukan salam, tapi pertanyaan bernada menuduh: "*You* kerja untuk siapa?" Khas pertanyaan seorang intel yang memang selalu hidup penuh curiga terhadap sekelilingnya.

Lho, kok saya dicurigai menjadi kaki tangan orang lain. "Jenderal, saya seorang ilmuwan, saya tidak bekerja untuk siapa-siapa." Saya tidak tahu dari mana saya tiba-tiba mendapat keberanian menantang sang mantan Raja Intel dan mantan Panglima ABRI. Kata saya, "Saya ingin jumpa Pak Benny." Beberapa jam kemudian, tak lama setelah saya tiba di rumah, telepon berbunyi. "Dari CSIS," kata istri saya. Pesannya, "Pak Benny menunggu Pak Salim hari Rabu siang di Tanah Abang." Hari itu Senin, jadi besok lusanya saya akan jumpa Benny di CSIS.

Rabu tiba. Dalam perjalanan ke CSIS pagi itu segala doa yang pernah diajarkan almarhum Ayah, yang harus dibaca kalau ingin jumpa pembesar, saya baca dengan khusyuk. Doa-doa itu, menurut ayah saya, akan melunakkan hati sang pembesar yang akan

kita temui. Harus saya akui hari itu saya masuk ke gedung CSIS dengan rasa takut. Benny resminya memang tidak lagi berkuasa, tapi bagi saya, masih tetap saja menakutkan. Dugaan saya, mantan anak didik serta perwira-perwira binaannya masih banyak di dalam ABRI.

Tampaknya doa-doa yang saya baca sepanjang perjalanan diterima Allah. Ketika pintu saya ketuk, Benny membukakan sendiri pintu bekas kantor Ali Murtopo tempat wawancara berlangsung. Bisa diduga, dengan wajah datar, tanpa emosi. Melihat langsung ke matanya, kalimat pertama saya setelah duduk: "Pak Benny, saya itu takut kepada Anda." Jawab Moerdani dengan spontan, "Kalau saya tidak percaya pada *you*, tidak akan *you* sampai di tempat ini." Ketakutan saya mendadak sirna. Dan wawancara berlangsung lancar.

Dalam suasana yang lebih santai, pertanyaan saya makin berani. "Ada apa sebenarnya yang terjadi antara Anda dan Pak Harto, kok bisa sampai Anda dimusuhi?" Tidak jelas jawaban Benny. Mungkin dia memang tidak suka menjawab pertanyaan tersebut. "Pak Benny tidak ingin membicarakan soal itu," kata seorang mantan anak buahnya. Mungkin juga tidak ingin orang tahu dia ada persoalan dengan mantan bosnya. Harry Tjan yang sejak beberapa menit lalu bergabung ke majelis wawancara tersebut diam sembari terus memperhatikan wajah Benny. Menanti agak lama, saya memberanikan diri menjawab sendiri pertanyaan saya: "Di mata Soeharto Anda sudah sangat kuat, dan itu menakutkan sang Presiden."

Saya lalu cerita kasus-kasus kepala intel yang berhasil menyingkirkan presidennya atau mereka yang disingkirkan bahkan sebelum berbuat apa-apa. Shaari Goma di Mesir disingkirkan dengan cepat oleh Presiden Anwar Sadat—tidak berselang lama setelah menggantikan Presiden Nasser—karena mencium rencana makar sang Kepala Intel. Beria di Uni Soviet yang sangat berkuasa atas KGB dengan cepat disingkirkan oleh Khruschev setelah orang Ukraina itu sukses menggantikan Stalin. Di Korea

Selatan, Kepala Intel malah berhasil menembak mati Presiden Park Chung Hee.

Benny berusaha membantah penjelasan saya. Tapi Harry Tjan menengahi, "Saya kira Salim benar." Sebenarnya saya masih ingin mengelaborasi jawaban saya, tapi tiba-tiba kehilangan semangat. Yang rencananya ingin saya katakan kepada Benny: "Karena Anda menjadi sangat kuat oleh besarnya wewenang dan kekuasaan yang dilimpahkan Soeharto, Anda makin menguasai ABRI, terutama dengan menggunakan semua jaringan intelijen. Atas dasar kekuasaan yang amat besar itu, di mata Soeharto Anda cukup kuat untuk mengalihkan loyalitas dari dirinya ke lembaga ABRI."

Benny mungkin tidak menyadari akibat dari langkah-langkahnya. Dia "menegur" Soeharto bisa jadi justru bertolak dari rasa hormat dan cintanya kepada orang yang telah "memungut" dan memercayainya dengan kekuasaan tak terkira besarnya. Saya hampir yakin bahwa Benny justru berusaha menyelamatkan Soeharto, sembari juga mungkin untuk menyelamatkan Indonesia dan kekuasaan ABRI. Tapi Soeharto, apa boleh buat, melihatnya dari titik pandang lain.

Soeharto tampaknya menafsirkan langkah-langkah Benny tersebut sebagai bagian dari rencana sang Kepala Intel dan Panglima tentara itu menggunakan ABRI untuk mengoreksi, bahkan mengontrol kekuasaan sang Presiden. Inilah, saya yakin, penjelasan mengapa Benny dicopot dari jabatan Panglima ABRI secara mendadak sebelum Sidang MPR 1988 itu. Menurut beberapa sumber, Soeharto waktu itu takut Benny akan memengaruhi jalannya sidang MPR yang salah satu agendanya adalah mengangkat Sudharmono menjadi Wakil Presiden. Mungkin Soeharto curiga Benny sudah kena pengaruh "intel-intel tua" yang menuduh Sudharmono Komunis.

Di kemudian hari, pada memoar Jusuf Wanandi, saya mendapatkan informasi baru yang mungkin ikut mendorong Soeharto melengserkan Moerdani secara mendadak. Dikisahkan Wanandi mengenai sejumlah pengikut Benny yang ternyata memang me-

lakukan kegiatan dalam rangka mengusulkan nama panglima mereka kepada Soeharto agar diangkat menjadi wakil presiden. Untuk tujuan tersebut para loyalis Moerdani sudah memulai langkah mereka dengan menyosialisasikan gagasan tersebut kepada para Atase Pertahanan (Athan) Indonesia dengan mengumpulkan mereka di Bangkok dan Aljeer (Aljazair). Seperti diketahui, mereka yang menduduki posisi Athan pada waktu itu pada umumnya adalah orang-orang Bais, perwira intel, yang hanya mungkin menduduki posnya berdasarkan persetujuan Moerdani. "Orang-orang Benny seperti Marsekal Muda Teddy Rusdy cenderung melihat Soeharto sebagai harus memperhatikan kehendak ABRI karena kekuasaannya bergantung pada dukungan ABRI," tulis Jusuf Wanandi.

Soeharto Pergi ke Kamar Kecil

Jusuf dan Harry Tjan berpendapat sebaliknya. Bagi para pembesar CSIS itu, ABRI yang justru bergantung pada Soeharto. Menurut Jusuf, Harry menjelaskan kepada Teddy Rusdy bahwa dia dan teman-temannya tidak akan pernah berhasil memaksakan kemauan ABRI kepada Soeharto, juga seandainya dia bisa menyatukan ABRI untuk melakukan pemaksaan tersebut. Rencana para pengikut Benny—yang mungkin saja tidak disepakatinya, tapi tidak pula dilarang oleh sang Raja Intel—tentulah diketahui Soeharto. Syahdan, pada suatu kesempatan bermain biliar di Cendana, Benny memberanikan diri secara langsung menyampaikan kritiknya terhadap tingkah laku anak-anak Soeharto yang dianggap sang Panglima sebagai "bisa membahayakan keamanan Bapak Presiden". Menurut catatan Julius Pour, penulis biografi L.B. Moerdani, dalam pertemuan di kamar biliar itu Benny meyakinkan dukungan ABRI kepada Soeharto, tapi terhadap anak-anak Soeharto, Benny menjelaskan, "Saya tidak bisa menjamin mereka juga bakal mendukung putra-putri Bapak." Soeharto meletakkan tongkat biliar, lalu meninggalkan Benny sendirian. Moerdani mengira Soeharto pergi ke kamar kecil. "Ternyata dia me-

ninggalkan saya untuk tidur. Maka saya sadar dia marah atas kata-kata yang baru saja saya ucapkan," kata Benny kepada Julius Pour.

SOEHARTO TENTU TERKEJUT melihat keberanian Moerdani menegurnya mengenai hal yang amat sensitif bagi sang Presiden. Keterkejutan itu besar kemungkinan juga dilatarbelakangi informasi yang dipunyai Soeharto mengenai adanya gerakan memaksakan dirinya menerima Benny sebagai Wakil Presiden. Di samping itu, Bapak Presiden memang sangat peka jika bisnis anak-anaknya diungkit-ungkit. Soeharto miskin dan menderita pada masa kecilnya. Dia tidak ingin anak-anaknya mengalami penderitaan itu lagi, begitu pendapat banyak orang yang kenal sejarah hidup dan kebijakan Soeharto kepada anak-anaknya.

Selain Moerdani, dalam soal anak-anak Bapak Presiden itu kabarnya Menteri Pekerjaan Umum, Radinal Mochtar, juga pernah "kena batunya". Ketika putri sulung sang Presiden, Tutut, bermaksud menjadi pemborong Jalan Tol Cawang-Priok hingga ke lapangan terbang Cengkareng, Radinal menghadap Bapak Presiden. "Itu pekerjaan sulit, dan Mbak Tutut belum berpengalaman mengerjakan proyek besar demikian," kira-kira begitu kata Radinal. Jawab Soeharto, "Kalau dia tidak tahu, Saudara ajari anak itu." Dan selesailah cerita. Jawaban Soeharto adalah perintah yang harus dikerjakan Menteri Radinal Mochtar.

Jauh sebelum Moerdani memberanikan diri menegur Soeharto mengenai bisnis anak-anaknya, Mashuri, S.H.—mantan tetangga Pangkostrad di Jalan Agus Salim, kemudian Menteri Pendidikan dan Menteri Penerangan Orde Baru—pernah mengingatkan Soeharto mengenai adiknya, Probosutejo, mantan guru Taman Siswa di Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara. Adik Soeharto ini pada awal Orde Baru mendadak menjadi pebisnis besar. Jawab Soeharto, "Kalau saya bisa memperkaya orang lain, mengapa saya tidak boleh memperkaya keluarga saya sendiri." Masih mengenai kegiatan bisnis anak-anak Soeharto, Teddy Rusdy, da-

lam wawancaranya dengan saya pada 10 Agustus 2010, menjelaskan:

> Karena percayanya Pak Harto kepada Pak Benny, Presiden tidak hanya minta Pak Benny sebagai Asisten Intel, tapi juga untuk mengamankan keluarganya. "Mengamankan" itu sebuah kata multitafsir. Pak Harto tidak pernah bilang "Ben, bisnisnya anak-anak itu dibantu."
>
> Pak Benny kemudian mendiskusikan dengan saya arti kata "mengamankan" itu. Kalau itu menyangkut bisnis, hal demikian bisa memukul balik Pak Harto. Itu yang kami sampaikan kepada anak-anak Pak Harto. Tapi bagi anak-anak, yang mereka kehendaki harus kita turuti dan bantu. Tutut pernah datang dengan 10 proyek. Saya bilang kepadanya, dua boleh, yang delapan tidak. Tommy datang dengan empat, Pak Benny bilang yang satu bagus, yang tiga tidak bisa.
>
> Nah, ada beberapa jenderal yang kendati tidak dititipi oleh Pak Harto, tapi karena ingin mendekati Cendana, kehendak anak-anak itu mereka turuti. Inilah yang menyebabkan timbulnya citra buruk Pak Benny di mata Cendana.

Agar Agum dan Hendro Melindungi Megawati

Yang juga makin memperburuk hubungan Soeharto dengan Benny Moerdani adalah sikap Panglima ABRI terhadap Sudharmono sebagai Ketua Golkar waktu itu. Sudharmono bertekad Golkar menang 70 persen pada pemilu menjelang Sidang Umum MPR 1988. Benny berpendapat kemenangan demikian tidak akan bisa tercapai tanpa melibatkan usaha paksa dari ABRI. "Wah, ini tidak benar. Merusak ABRI," kata Benny, menurut penuturan Teddy Rusdi. Tapi karena Sudharmono menjalankan kebijakan Presiden Soeharto yang Ketua Dewan Pembina Golkar, "Maka pendapat Pak Benny dinilai sebagai tanda tidak loyal," kata Teddy. Pada masa itu, Benny malah dituduh mendukung Megawati dan PDI.

Mengenai dukungan terhadap Megawati ini, menurut Jusuf Wanandi, dalam ABRI waktu itu memang muncul dua kelompok. Satu yang bersimpati kepada Megawati, yang lainnya tidak ingin melihat putri Soekarno itu memimpin PDI. Termasuk yang ber-

simpati kepada Megawati adalah Brigjen TNI Agum Gumelar dan Mayjen TNI Abdullah Mahmud Hendropriyono. Menurut Wanandi, Moerdani menyarankan kepada Agum dan Hendro melindungi Megawati. "Kita tidak boleh membiarkannya tersingkir. Saya tahu orang tua itu ingin terbebas dari Mega. Tapi, itu tidak *fair*," begitu konon kata Benny kepada dua jenderal juniornya tersebut. Tapi menurut pengakuan Jenderal Hendropriyono kepada saya,

> Saat Munas PDI, saya tidak pernah menerima perintah atau pesan apa pun langsung dari Jenderal Benny untuk menyukseskan Megawati, kecuali mungkin secara tidak langsung jika melalui orang-orangnya. Di pos saya di Kodam Jaya, orang-orang tersebut adalah Letjen TNI Ary Sudewo (Waka Bais ABRI) dan Letjen TNI Haryoto P.S. (Kasospol ABRI). Namun anehnya, mereka berdua juga terlihat bingung ketika saya berpendirian keras, bahwa Munas PDI di daerah tanggung jawab saya harus berlangsung secara demokratis. Kedua senior saya itu setuju dengan kesimpulan saya bahwa kalau berlangsung demokratis, Megawati akan menang. Menurut saya mereka berdua adalah simpatisan Megawati. Tapi, saya tidak mendengar dari keduanya bahwa ada bisikan dari Benny Moerdani. Saya sendiri memang bersimpati kepada Megawati karena Bung Karno idola saya.
>
> Ketika jumpa Pak Harto di Halim Perdanakusuma, saya katakan, Munas PDI saya jamin aman jika pemilihan saya kawal sesuai dengan aspirasi *floor* dan hampir pasti Megawati akan terpilih kembali sebagai Ketua Umum. Pak Harto tersenyum lalu berkata, "PDI itu partai kecil sehingga siapa pun yang menjadi ketua umum tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap stabilitas nasional."

Cerita tentang Megawati, PDI, dan Moerdani sebenarnya sudah bermula pada 1987, ketika Benny sebagai Pangab dan Pangkopkamtib, membiarkan partai tersebut melakukan kampanye pemilu besar-besaran di Jakarta dengan peserta berpakaian merah sembari membawa gambar-gambar Bung Karno. Pada hari-hari kampanye itu, Jakarta berubah menjadi kota yang metal, merah total. Para peserta kampanye bukan cuma orang-orang PDI, anak-anak kelas menengah yang umumnya bukan konsti-

tuen PDI, juga ikut memanfaatkan kesempatan kampanye sembari berhura-hura dengan mobil-mobil mewah mereka.

Saya menonton kampanye itu di beberapa tempat. Kesan saya, selain merupakan hura-hura anak muda, keramaian itu sekaligus juga sebagai semacam pernyataan protes kepada pemerintah lebih dari sekadar dukungan kepada PDI. "Lewat koneksi pribadinya dengan orang-orang PDI dan keluarga Bung Karno, Benny lalu bekerja sama dengan Agum dan Hendro. Itu yang diceritakan Benny kepada Harry dan saya di kemudian hari," tulis Wanandi dalam memoarnya.

Yang barangkali tidak diceritakan Benny kepada Jusuf adalah Mantan Pangab itu pernah "dilamar" oleh Sukarno untuk menjadi suami Megawati tidak lama setelah Moerdani mendapatkan Bintang Sakti. Benny menolaknya dengan alasan sudah punya pacar. Pilihan Benny adalah Hartini, seorang pramugari yang kemudian menjadi istrinya. Juga tidak dijelaskan dalam memoar Wanandi tindakan Moerdani "membantu" Megawati dan PDI membuat Soeharto murka karena Bapak Presiden melihat Megawati sebagai potensi saingan, bahkan ancaman bagi Tutut, putri sulung sang Presiden. Dan seperti yang kita ketahui, nanti pada era Reformasi, Megawati sempat menjadi Presiden (menggantikan Gus Dur), sementara Tutut tersisih.

Yang juga perlu dicatat sehubungan dengan episode kedekatan Moerdani dengan PDI ini adalah sikap ABRI kepada Golkar waktu itu yang tidak lagi sekompak masa-masa sebelumnya. Secara terang-terangan menjelang Pemilu 1993, ada 40 purnawirawan ABRI berpangkat kolonel ke atas memutuskan bergabung ke PDI.

Namun dari semua kegiatan Moerdani, tampaknya yang paling mendongkolkan Soeharto adalah saran Benny agar secepatnya sang Presiden memilih orang lain melanjutkan kepemimpinan nasional Indonesia. Sang Presiden mungkin berpikir, "Ini anak yang saya 'pungut' dari ujung utara dunia sana sudah berani mengajari saya." Perlu diketahui bahwa posisi dan nasib Benny memang mendadak berubah menjadi amat penting berdasarkan

keputusan Soeharto menariknya dari jabatan Konsul Jenderal di Seoul segera setelah Malari 1974. Benny tiba dari Seoul sebagai Kolonel dan dalam beberapa hari sudah jadi Brigadir Jenderal dengan kekuasaan hampir tak terbatas atas berbagai lembaga intelijen penting.

Minta Waktu 10 Tahun

Keributan di Jakarta pada awal 1974 tersebut mendorong Soeharto memanfaatkan Benny setelah badan-badan intel di Jakarta kacau-balau akibat konflik yang meledak antara kubu Sumitro (Kopkamtib) dan kubu Ali Murtopo (Opsus). Atas saran Murtopo, Moerdani diperintahkan segera meninggalkan Seoul dan terbang ke Jakarta. Konon mantan Konjen itu minta waktu 10 tahun untuk membenahi intel militer dan sipil. Permintaan dikabulkan. Ternyata kemudian selama 14 tahun, Benny secara sempurna menguasai intel Indonesia yang telah ditatanya. Masa panjang menguasai intel yang demikian itu belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terjadi lagi setelah Benny tersingkir. Masa sepanjang itu menguasai intel membuka kesempatan bagi Moerdani untuk akhirnya juga menguasai ABRI.

Penataan kembali berbagai organisasi intel tersebut dilakukan Moerdani berdasarkan otorisasi Soeharto. Dalam melaksanakan perintah dan kepercayaan Soeharto, Benny juga mempertimbangkan pengalamannya pada masa Konfrontasi. Sebagai Konjen di Malaysia selepas Konfrontasi, Benny antara lain bertugas mengurus pemulangan para sukarelawan Dwikora kita yang tertangkap dan dipenjarakan di Negara Bagian Johor. Dari para sukarelawan itu, Benny tahu betapa kacaunya intel kita waktu itu. Informasi yang dibekalkan kepada sukarelawan itu banyak yang salah sehingga mereka mudah sekali tertangkap.

Pengalaman buruk masa Konfrontasi itu ikut jadi pertimbangan dalam penataan kembali intel yang dilakukan Benny. Ironisnya, dalam Operasi Seroja menduduki Dili, Timor Timur, terjadi lagi kesalahan yang sama, kalau tidak malah lebih parah. Pasukan

yang terjun di Dili pada hari pertama Operasi Seroja itu mengalami banyak kesulitan dan korban akibat saling tembak karena, antara lain, taklimat intel yang kurang akurat. Disebutkan misalnya bahwa Sungai Komoro di tengah Kota Dili itu banyak buayanya, padahal di sungai tersebut bukan cuma tidak ada buaya, tapi juga tidak ada air. Alias kering berbatu.

Menurut pandangan Letjen TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprodjo yang ditulisnya sebagai Pengantar buku Kiki Syahnakri, *Timor Timur The Untold Story* (2012), kecerobohan intel bukan soal tunggal kegagalan penyerbuan TNI ke Timor Timur. Perencanaan operasi juga semrawut. Izin Presiden Soeharto kepada Moerdani sebagai pemimpin dan pengendali Operasi Seroja, menurut yang didengar Sayidiman dari Jenderal TNI Maraden Panggabean, Panglima ABRI waktu itu, adalah Operasi Intel. Izin itu disalahartikan oleh Moerdani. Tulis Sayidiman selanjutnya,

> Pada dasarnya satu operasi intelijen adalah tertutup (*covert*), bukan secara terbuka. Jadi melaksanakan operasi intelijen dengan cara operasi militer konvensional merupakan keganjilan, bahkan kesalahan. Apalagi melakukan operasi konvensional yang begitu spektakuler berupa operasi gabungan antar-angkatan dengan disertai operasi lintas udara (*airborne operations*) pada dasarnya suatu kesalahan.

Jenderal Hendropriyono, perwira Kopassus yang pernah menjadi Panglima Kodam Jaya, mempunyai komentar lain terhadap kegagalan Operasi Seroja di Timor Timur. Katanya,

> Kesalahan strategis dalam kampanye militer di Timor Timur dulu adalah merebut kota-kota besar dengan sangat tergesa-gesa, yaitu menyerbu langsung kota-kota besar tanpa terlebih dahulu mengepungnya dari pedalaman atau desa-desa. Sasaran strategis berupa kota-kota dengan mudah direbut, jika daerah-daerah sekelilingnya telah kita kuasai, sehingga semua fasilitas seperti air, listrik, dan dukungan logistik ke kota lainnya telah kita tutup melalui operasi *interdiksi*.

Kendati kegagalan intel dan kecerobohan perencanaan operasi—semua di bawah pimpinan Moerdani—Soeharto tetap saja mengangkat Benny menjadi Panglima ABRI pada 1983. Yang mencolok tapi ditoleransi Soeharto, Benny yang sudah jadi Panglima ABRI tetap juga memimpin Bais—lembaga intel ABRI yang waktu itu bahkan lebih berkuasa dari Bakin—suatu hal yang bertentangan dengan tradisi dan aturan militer yang memisahkan antara penyedia dan pengguna intelijen. Tapi nanti ketika Soeharto mulai merasakan Benny sebagai ancaman, Bais dibubarkan. Sebagian kegiatan badan intel ciptaan Moerdani dialihkan ke lembaga intel baru, Badan Intelijen ABRI (BIA) yang tidak lagi seberkuasa Bais. Sebagian sisa kekuasaannya dikembalikan kepada Badan Koordinasi Intelijen Negara, Bakin (yang sekarang menjadi BIN).

WAKTU DIPANGGIL KEMBALI KE JAKARTA, menurut ceritanya kepada saya, mantan Konjen itu sebenarnya sedang bersiap-siap ditempatkan di Negeri Belanda sebagai Duta Besar setelah sekian tahun bertugas sebagai Konjen di Malaysia dan Korea Selatan. "*I was on my way out of the army*," katanya kepada saya. Soeharto mencegatnya di jalan dan memberinya kekuasaan yang hampir tak terbatas. Dugaan saya, sang Presiden memberi kepercayaan dan kekuasaan amat besar kepada Benny, berdasarkan asumsi bahwa sang mantan Konjen tidak punya akar dalam ABRI. Latar belakang Benny sebagai orang yang berdarah Indo-Jerman dan beragama Katolik tentu juga ikut menambah keyakinan Soeharto yang melihatnya sebagai bukan potensi ancaman bagi kekuasaan Bapak Presiden.

Sebagai tentara, Benny sudah sembilan tahun berada di luar jajaran ABRI ketika Soeharto mengangkatnya memimpin berbagai lembaga intel pada masa pasca-Malari 1974 itu. Jabatan tertinggi sebagai tentara yang pernah dipercayakan kepada Benny hanya Komandan Batalion di RPKAD dengan pangkat Mayor. Di mata Soeharto, latar belakang demikian akan selalu menempatkan Moerdani pada posisi bergantung pada Presiden. Membuat

pemimpin tentara bergantung pada Presiden sebelumnya telah dilakukan Sukarno terhadap Omar Dani. Sukarno berhasil mengendalikan Panglima Angkatan Udara itu. Sebagai akibatnya, Dani kemudian "masuk jurang" bersama sang Presiden. Hubungan Soeharto-Moerdani berakhir lain. Moerdani pintar, tapi Soeharto ternyata tidak kalah cerdik.

Menarik untuk diperhatikan bahwa sebelum Benny, Soeharto juga telah mengangkat Jenderal Jusuf, yang ketika dilantik sebagai Panglima ABRI, bahkan sudah 14 tahun berada di luar jajaran militer. Selain bukan orang Jawa, Jusuf juga berasal dari Kodam kecil, tidak punya kebiasaan mengumpulkan pengikut, dan selama memimpin ABRI selalu sadar diawasi oleh Benny dan Laksamana TNI Sudomo sebagai Pangkopkamtib.

YANG TIDAK PERNAH DIPERHITUNGKAN SOEHARTO, Benny seorang perwira para komando yang amat cerdas, berpengetahuan luas, banyak inisiatif, teguh memegang prinsip, berani, selalu bisa memanfaatkan kesempatan yang sulit macam apa pun, dan memiliki *leadership* yang mumpuni. Yang juga tidak dipertimbangkan Soeharto ketika memberi kepercayaan amat besar kepada Benny adalah sifat sang Kepala Intel yang kemudian terbukti tidak loyal kepada orang, siapa pun dia. Benny hanya loyal kepada prinsip yang diyakininya. Singkat kata, Soeharto tidak betul-betul kenal Benny ketika memercayainya dengan kekuasaan yang amat besar. Sebagai seorang yang gemar dan terampil mengelola kekuasaan, kesalahan Benny cuma satu, terlambat bertindak. Soeharto mendahuluinya.

Untuk mengenal dengan lebih baik watak perwira komando ini, kita harus tahu siapa jenderal yang dikaguminya, dan mengapa? Benny adalah pengagum berat Panglima Besar Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan model militer bagi Benny. Sudirman adalah perwira yang tidak loyal secara kaku kepada Presiden Sukarno. Ketika tentara Belanda menyerbu Yogyakarta pada 19 Desember 1948, Sukarno, berdasarkan perhitungan politik dan diplomatik, memutuskan mendukung keputusan kabinet yang

memilih sikap menyerah kepada musuh. Tapi sebelum menaikkan bendera putih di depan Gedung Agung, Presiden Sukarno masih sempat membujuk Sudirman yang sakit (paru-parunya baru saja dibuang sebelah dalam sebuah operasi medis) agar tinggal saja di dalam kota. Kepada Sudirman, Sukarno berjanji akan meminta dokter tentara Belanda merawatnya.

Berpegang pada sumpah TNI yang "tidak kenal menyerah", Sudirman mengabaikan perintah Panglima Tertingginya. Dia memutuskan masuk hutan memimpin perang gerilya. Dilihat dari segi disiplin militer, Sudirman sebenarnya melakukan insubordinasi. Tapi itu terjadi pada zaman Revolusi dan aturan yang dipakai juga "aturan Revolusi" dalam suatu negara yang belum lagi mempunyai tradisi politik dan tradisi pengelolaan hubungan sipil-militer. Bagi Benny, keputusan Sudirman bergerilya kendati dalam keadaan fisik yang sangat lemah, adalah contoh sikap seorang kesatria sejati. Sudirman di mata Benny lebih mementingkan keselamatan Tanah Air dan bangsa daripada secara militer tunduk perintah atasan, ketika perintah itu dianggap membahayakan kelanjutan hidup bangsa, negara, dan keselamatan Tanah Air.

Sikap Sudirman itulah yang dijadikan contoh dan model TNI mengenai disiplin hidup untuk membedakannya dengan disiplin mati (*cadaver*). Yang berperan besar dalam menafsirkan dan menghidupkan kembali warisan Sudirman adalah Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Pengalaman serta tingkah laku politik Sudirman ditafsirkan dan dihidupkan kembali oleh Nasution setelah kegagalan pimpinan Angkatan Darat menghadapi Parlemen dan Sukarno pada 17 Oktober 1952.

Yang paling penting dan mendasar dari pengalaman dan tingkah laku politik Sudirman dalam tafsiran Nasution adalah yang menyebut TNI pertama-tama adalah alat perjuangan dan alat negara. Konsekuensi dari sikap dan persepsi diri seperti ini, dalam keadaan tertentu tentara bisa berbeda pandangan dengan pemerintah. Dan dengan sikap dan persepsi diri demikian itulah, tentara mempunyai peran politik sebagai yang mula-mula dirumuskan Nasution lewat pidato "Jalan Tengah" yang diucapkan di

Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang pada November 1958. Sikap Soeharto kepada Sukarno pada hari-hari pertama pasca-Gestapu—tidak selalu mengikuti kehendak Presiden—berkiblat kepada model kepemimpinan Sudirman.

Nah, dengan latar belakang inilah kita harus mengerti sikap Benny yang mencoba mengalihkan loyalitasnya dari Soeharto ke lembaga ABRI. Bagi Benny, sang Presiden sudah mulai menunjukkan tanda-tanda membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Tapi Benny bukan Sudirman. Soeharto juga bukan Sukarno. Zamannya bukan zaman Revolusi, juga bukan masa gawat pasca-Gestapu. Faktor-faktor penting ini rupanya tidak begitu diperhitungkan Benny Moerdani. Akibatnya, dengan tangkas dan cepat, Presiden Soeharto "melucutinya".

Anjing Herder

Yang juga tidak diperhitungkan Benny adalah dampak pekerjaan lamanya sebagai apa yang pernah disebutnya sendiri sebagai "anjing herder penjaga Soeharto". Ketika melaksanakan pekerjaan sebagai aparat sekuriti menjaga Soeharto, Benny, mungkin tanpa sadar, telah berhasil menciptakan banyak musuh. Musuh-musuh itulah yang barangkali dilihat B.J. Habibie sebagai sejumlah orang yang melancarkan intrik terhadap Moerdani di lingkungan Soeharto. Di luar lingkungan Presiden, musuh besar Benny adalah golongan Islam. Paling sedikit Benny dipersepsikan oleh mayoritas umat Islam Indonesia waktu itu sebagai musuh yang menakutkan.

Moerdani bukan tidak sadar akan posisinya yang sulit karena persepsi golongan Islam yang demikian. Karena itu sejak lama Benny mendekati Gus Dur untuk melindunginya terhadap tuduhan anti-Islam. Maka ketika Gus Dur mengadakan Muktamar NU di Situbondo pada 1984, Moerdani membantunya habis-habisan. Menurut Jusuf Wanandi, Benny dan Gus Dur sependapat dalam soal menolak Islam politik. Pada saat yang sama, Gus Dur juga curiga kepada Soeharto yang berada di balik ICMI. Adalah kelihai-

an Soeharto merangkul golongan Islam sebagai bagian dari usahanya memperkuat barisan menghadapi apa yang mungkin dipersepsikannya sebagai potensi bahaya dari kelompok sekuler di sekitar Moerdani dan para jenderal pimpinan ABRI lainnya serta para pengikut Gus Dur. Hebatnya Soeharto, dia mendapat dukungan Islam tanpa konsesi signifikan yang mengompromikan kontrolnya terhadap kekuasaan.

Ketika kita membicarakan para musuh Benny, nama Prabowo Subianto tidak boleh dilupakan. Prabowo yang waktu itu menantu Soeharto tampaknya melihat dirinya sebagai semacam saingan Moerdani dalam berhubungan dengan Bapak Presiden. Untuk waktu yang lama terjadi ketegangan antara dua perwira berlatar belakang Kopassus itu. Masing-masing membina pengikut. Dan untuk menjaga loyalitas para pengikut, mereka berdua memerlukan dana banyak. Moerdani rajin bagi-bagi hadiah kepada para pengikut atau para perwira yang didekati untuk paling sedikit tidak berpihak kepada kekuatan yang tidak loyal kepadanya. Prabowo juga melakukan hal yang sama. Maka terjadilah kompetisi bagi-bagi duit dan hadiah. Ketika dengan alasan lain Moerdani disingkirkan Soeharto, yang kelihatannya menang pada mulanya adalah Prabowo. Tapi seperti biasa, pemenang yang sesungguhnya adalah Soeharto juga. Seperti kita ketahui Prabowo akhirnya tersingkir juga dari militer. Keadaan ini amat mengingatkan kita pada peristiwa Malari 1974 dan konstelasi kekuasaan setelah itu. Mula-mula Jenderal Sumitro yang tersingkir, dan terkesan Ali Murtopo yang keluar sebagai pemenang. Tapi secara perlahan, Murtopo juga "dihabisi". Dan pemenang sebenarnya adalah Soeharto.

KETAKUTAN YANG DITEBARKAN oleh Moerdani sejak masa pasca-Malari 1974, ternyata tidak mudah terhapuskan dari pikiran sejumlah besar orang. Begitu besar dan panjangnya usia ketakutan tersebut, pada hari pertama pasca-Orde Baru, seorang perwira tinggi yang hanya karena dicurigai sebagai "orang Benny" harus dikorbankan secara spektakuler. Jenderal itu bernama Johny Lu-

mintang. Dia Asisten Operasi di Mabes ABRI ketika malam itu diperintahkan mengambil alih kursi Pangkostrad dari Letjen TNI Prabowo Subianto. Putra Prof. Sumitro Djojohadikusumo itu secara mendadak dicopot dari jabatannya oleh Presiden Habibie. Konon atas saran mantan Presiden Soeharto, yang waktu itu masih mertua Prabowo.

Entah dari mana sumbernya, pada malam Lumintang menggantikan Prabowo, beredar dengan cepat informasi yang menyebut Johny orangnya Benny Moerdani. "Bahaya, Benny main lagi." Timbul kepanikan, Jenderal TNI Wiranto mendapat "tekanan". Dalam keadaan yang penuh ketidakpastian hari-hari itu, Panglima Wiranto terdesak membatalkan pengangkatan Lumintang setelah menduduki jabatan Pangkostrad selama hanya 17 jam. Yang tidak diketahui orang, pengangkatan Lumintang dilakukan Wiranto berdasarkan usul Letnan Jenderal TNI Fachrul Razi, Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI yang pernah disebut-sebut oleh beberapa pengikut Benny dan Edi Sudrajat sebagai tergolong kelompok "hijau". Fachrul Razi adalah putra Aceh yang taat menjalankan ibadahnya, bahkan dikenal sebagai khatib sembahyang Jumat pada masjid-masjid di berbagai markas tentara.

Ketika malam itu saya hubungi lewat telepon genggam menyampaikan beredarnya cerita "Johny orang Benny" itu, komentar Fachrul Razi dari Mabes ABRI: "Johny itu perwira profesional. Kalaupun Johny memang ternyata orangnya Benny, masak kan satu orang tidak bisa kita atasi." Kesan saya, Fachrul mencalonkan Johny, teman sekelasnya di Akabri, karena tahu Johny bukan orangnya siapa-siapa. Adapun Fachrul, meski dituduh TNI "hijau" oleh para pengikut Moerdani dan Sudrajat, Jenderal bintang empat yang pernah menjadi Wakil Panglima TNI ini mengaku, "Karier saya tidak pernah dihambat oleh Pak Benny atau para pengikutnya." Jenderal Razi yang lulusan Akabri 1970 memang masih junior pada masa berkuasanya Moerdani dan Try Sutrisno.

DI SAMPING UMAT ISLAM DALAM MASYARAKAT LUAS, di kalangan ABRI, seperti sudah saya katakan tadi, sudah lama ber-

edar pandangan bahwa di bawah Benny, mereka yang santri tidak selalu mudah mendapatkan promosi. Kebijakan Benny ini diketahui dengan baik dan dimanfaatkan dengan saksama oleh Soeharto yang membersihkan ABRI dari pengaruh Moerdani. Inilah latar belakang dipromosikannya Jenderal TNI Feisal Tanjung menjadi Panglima ABRI dan Jenderal TNI Hartono menjadi KSAD. Ini juga penjelasannya mengapa kemudian Brigadir Jenderal TNI Nyoman Suwisma, beragama Hindu Bali, gagal menjadi Komandan Kopassus meski namanya sudah lolos dari seleksi Dewan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Dan sebagai gantinya, Soeharto menarik dari Kalimantan Timur Mayjen TNI Muhdi Priopranyoto, Pangdam Tanjung Pura waktu itu.

Menurut informasi yang saya dapatkan di kemudian hari, pada mulanya Soeharto mengalami kesulitan mendapatkan calon panglima yang bisa dipercayainya mendukung kebijakan "de-Benny-isasi" yang sedang dilancarkannya. Sembari menunggu calon yang bisa dipercayainya, mantan KSAD, Edi Sudrajat, untuk sementara dibiarkan merangkap jabatan Menteri Hankam dan jabatan Panglima ABRI, dua jabatan yang sebenarnya sudah dipisahkan.

Soeharto memerlukan waktu lama untuk memercayai Jenderal TNI Feisal Tanjung sebelum berkeputusan menjadikannya Panglima ABRI. Karena terlalu lama "terpendam" di Bandung sebagai Komandan Seskoad, nama Feisal memang nyaris tak terdengar, dan karena itu lolos dari "radar pengamatan" Soeharto. Atas bantuan beberapa orang dekat Bapak Presiden—disebut antara lain nama Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Azwar Anas, Menristek B.J. Habibie, dan Prabowo Subianto—Feisal kemudian ditarik ke Mabes ABRI untuk mula-mula hanya menduduki jabatan Kasum dengan pangkat Letnan Jenderal.

Dari posisi Kasum itulah Feisal naik ke kursi Panglima menggantikan Edi Sudrajat yang duduk di kursi pimpinan ABRI selama hanya hampir tiga bulan. Sebelum menunjuk Feisal, Soeharto perlu kesaksian sejumlah orang yang dianggap kenal calon Pa-

ngab itu secara pribadi. Almarhum Mayjen TNI Zaini Azhar Maulani dan Menko Ir. Azwar Anas adalah orang-orang yang diminta bersaksi lewat rekaman yang alat perekamnya dibawakan kepadanya oleh Kolonel Kivlan Zain dan Kolonel Ismed Yuzeiri. Rekaman itu kemudian diperdengarkan kepada Soeharto. Saya tidak tahu siapa saja yang dimintai kesaksiannya sebelum akhirnya Bapak Presiden berkeputusan melantik Jenderal Feisal Tanjung menjadi Pangab.

Sembari mempromosikan para perwira berlatar belakang santri tersebut, Soeharto juga melanjutkan kesibukannya membersihkan ABRI dari siapa saja yang dianggap sebagai pengikut-pengikut Moerdani. Salah seorang yang masuk jaring pembersihan adalah Mayjen TNI Sintong Panjaitan. Kebetulan Sintong menjabat sebagai Pangdam Udayana, bermarkas di Denpasar, ketika peristiwa berdarah Santa Cruz terjadi pada 1991 di Dili. Timor Timur adalah wilayah tanggung jawab Sintong, dan Peristiwa Santa Cruz dipergunakan Soeharto mengakhiri karier militer mantan Komandan Kopassus tersebut. Kesalahan Sintong? Dia dianggap orangnya Moerdani karena sebagai Pangab, Benny kabarnya memang mempersiapkan Sintong—perwira Kopassus yang mendapatkan Bintang Sakti oleh keberhasilannya memimpin operasi penumpasan pembajak pesawat Garuda, Woyla, di Bangkok—sebagai salah seorang calon untuk menduduki jabatan KSAD. Sintong, menurut teman-teman dekatnya, sebenarnya hanya seorang serdadu profesional yang bersahaja dan apolitis.

ABRI “Hijau” dan “Merah Putih”

Dari rentetan cerita yang saya kemukakan tadi, maka sebenarnya bisa disimpulkan, dengan mempromosikan anak-anak santri tersebut (Feisal, Hartono, Muhdi, dan banyak lagi lainnya), yang dilakukan Presiden Soeharto pada dasarnya adalah memanfaatkan mereka yang tadinya disingkirkan oleh kelompok Benny. Dengan kata lain, kelompok yang “diciptakan” Benny justru dimanfaatkan oleh Soeharto dalam usaha sang Presiden menyingkirkan

para pengikut Moerdani. Penting untuk dicatat, pada masa inilah munculnya cerita tentang "ABRI Hijau", dan "ABRI Merah Putih". Mereka yang disingkirkan Soeharto menyebut diri mereka "ABRI Merah Putih" dan menggelari lawannya, yakni mereka yang dipakai Soeharto, sebagai "ABRI Hijau". Pengamatan saya mendorong kepada kesimpulan bahwa semua mereka adalah Pancasilais dan Saptamargais. Dan label serta isu "ABRI Hijau" versus "ABRI Merah Putih" adalah sesuatu yang mengada-ada dan kemudian memang dengan cepat berlalu.

Untuk diketahui lebih jauh, Feisal Tanjung adalah anak dari seorang tokoh Muhammadiyah Medan, Hartono putra dari seorang ibu yang aktivis Aisyiah di Madura. Muhdi datang dari keluarga Muhammadiyah di Yogyakarta. Mayor Jenderal TNI Hartono adalah Panglima Brawijaya di Surabaya ketika diminta oleh masyarakat Jawa Timur menjadi Gubernur di provinsi tersebut. "Try Sutrisno malah memindahkan saya ke Bandung menjadi Komandan Sesko Gabungan," kata Hartono dengan kesal. Sebelum itu Try Sutrisno sebagai Panglima ABRI juga pernah memerintahkan Hartono sebagai Pangdam Brawijaya di Jawa Timur agar tidak mendukung pembentukan ICMI yang waktu itu kongres pembentukannya akan diadakan di Malang. Tahu Soeharto mendukung ICMI, Hartono mengabaikan perintah Panglima ABRI tersebut. "Saya lebih takut kepada Pak Harto," katanya.

Feisal, lain lagi ceritanya. Mantan salah satu Komandan kompi RPKAD pada masa Gestapu ini menduduki jabatan Komandan Seskoad (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat) selama empat tahun. Normalnya jabatan tersebut hanya dijabat untuk masa tiga tahun. Begitu lamanya di Seskoad, teman-teman Feisal waktu itu meramalkan dia akan pensiun di sana. "Siapa yang bertanggung jawab menahan saya begitu lama di Seskoad?" Yah, siapa, menurut Pak Feisal, tanya saya. "Teman-teman Pak Benny itulah," jawab Feisal di kantornya sebagai Panglima ABRI pada Agustus 1997.

Dekat dengan Pangab Jenderal TNI Muhammad Jusuf dan salah seorang Komandan Kompi RPKAD kesayangan Kolonel

Sarwo Edhie pada masa penumpasan Gestapu dan di Irian Barat, Feisal adalah Brigadir Jenderal pertama dari kelas 1961 AMN. Tapi, pangkat Mayor Jenderal disandangnya selama tujuh tahun. "Alasan kualitas tidak bisa dipakai untuk diskualifikasi atau memperlambat karier anak Medan itu," kata Maulani, teman seangkatan Feisal. Maulani—pemegang penghargaan Kartika Cendekia pada angkatannya—pernah menjadi anak buah Moerdani di Bais dan dipercayai menduduki pos Atase Pertahanan (Athan) di London. Kedekatan Tanjung kepada Jusuf, menurut kecurigaan Maulani, turut menyebabkan karier Feisal terhambat.

Sumber lain menunjuk kepada kedekatan khusus Feisal dengan Sarwo Edhie yang mungkin ikut mempersulit kedudukannya pada masa kepanglimaan Moerdani. Seperti diketahui, ketika Panglima Angkatan Darat, Letjen TNI Ahmad Yani, menyelesaikan konflik antara Moerdani—Komandan Batalion—dan Kolonel Infantri Mung Parhadimulyo—Komandan RPKAD—keduanya dimutasikan keluar dari korps Baret Merah. Benny ke Kostrad menjadi anak buah Soeharto, dan Mung menjadi Panglima Kodam di Kalimantan Timur. Sarwo Edhie, teman lama Jenderal Yani dan komandan pusat latihan RPKAD di Batujajar sebelum menduduki posisi Kepala Staf RPKAD, ditunjuk menduduki posisi Komandan RPKAD. Menganggap masih ada perwira RPKAD yang lebih senior dari Sarwo Edhie, Benny memprotes pengangkatan itu. Juga karena menurutnya, "Sarwo Edhie bukan dari pasukan Komando dan belum pernah mengikuti pendidikan Para Komando." Sejak itu Moerdani secara terbuka menunjukkan ketidaksenangannya kepada Sarwo.

Karier militer Maulani sendiri juga mandek di tengah jalan. Untuk beberapa tahun Maulani—sepulang dari London—memang pernah menjadi sekretaris Pangab Jusuf. Adalah KSAD, Jenderal TNI Rudini Puspohandoyo, yang kemudian mempromosikan Maulani menjadi Pangdam Tanjung Pura di Kalimantan. Setelah itu, pada masa Try Sutrisno sebagai Pangab, Maulani dikaryakan sebagai Sekjen Departemen Transmigrasi sampai pensiun. Presiden Soeharto kemudian menunjuknya menjadi Sekretaris

Wakil Presiden B.J. Habibie. Ketika Habibie menjadi Presiden menggantikan Soeharto, Maulani dipercayai menduduki jabatan Kepala Bakin (pendahulu BIN). Kesalahan Maulani di mata Moerdani? "Benny akhirnya tahu kalau saya sebelum menjadi tentara adalah anggota PII [Pelajar Islam Indonesia]."

AKHIRNYA BENNY BICARA JUGA mengenai akibat pembersihan Soeharto yang dikenal sebagai *de-Benny-isasi* itu. "Orang yang pernah dekat dengan saya sulit mendapat posisi," katanya. "Mereka yang namanya mulai dengan F.X. juga sulit dapat tempat. Tapi saya harap ini tidak akan berlangsung lama." Untuk diketahui, F.X. (Franciscus Xaverius) adalah nama baptis Katolik. Sehubungan dengan perwira-perwira yang berlatar belakang Katolik ini, saya teringat pada 1987, Athan pada Kedutaan Besar Amerika di Jakarta menunjukkan kepada saya daftar para perwira intelijen Indonesia. "Bagaimana Anda menjelaskan kepada saya bahwa 30 persen dari mereka beragama Katolik?" tanya Athan Amerika tersebut.

Kepada saya, pada waktu wawancara itu, Benny juga mengeluh sulit mendapat teman main golf karena orang takut terlihat bersama dirinya. Saya sendiri juga menyaksikan bagaimana perwira-perwira yang dulu dengan bangga tampil sebagai "orangnya Pak Benny", kemudian beramai-beramai menghindari mantan Panglima ABRI tersebut. Tapi, para mantan anak buah Benny itu pada umumnya membela diri dengan alasan yang bukan tidak masuk akal juga. Dulu mereka dekat kepada Benny karena tugas. "Sekarang Pak Benny sudah pensiun, kami tidak ada hubungan lagi dengan beliau," kata Kolonel Sudrajat kepada saya di London. Sudrajat—pensiun sebagai Mayjen dengan posisi terakhir Duta Besar di Beijing—waktu itu menjabat Athan pada KBRI di London. Ketika masih di Bais, Sudrajat pernah menjadi Sekretaris Moerdani.

Begitu besarnya kekuasaan Benny pada masa menjabatnya dulu, saya mendengar cerita beberapa Panglima Daerah Militer (Pangdam) sangat berhati-hati kepada Kepala Intelnya (Asisten

Satu), karena sang Asisten Intel memberi kesan kuat sebagai "orangnya Pak Benny". Itu berarti ada kontak langsung dengan Bais yang tidak mudah diawasi oleh Pangdam yang membawahinya. Mengenai cerita banyaknya perwira yang dulu disebut atau mengaku sebagai "orangnya Pak Benny", Adam Schwarz, seorang wartawan Amerika yang bertugas di Jakarta selama Benny menjabat Pangab dan kemudian Menhankam, menjelaskan semua itu sebagai akibat kebijakan Benny sendiri. Berbeda dengan panglima-panglima sebelum dan sesudahnya, Benny memang memelihara sejumlah orang yang disenanginya. "Mereka itu semacam *golden boys* Benny Moerdani," kata Schwarz. Salah satu yang dikenal sebagai "anak emas" itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Sejumlah besar para "anak emas" ini berasal dari Kopassus yang memang punya latar belakang pendidikan intel. Para perwira inilah yang umumnya dipromosikan Benny ke berbagai jabatan penting dalam ABRI, terutama posisi pimpinan intelijen.

BEGITU DIANGKAT MENJADI PEMIMPIN INTEL dan kemudian sebagai panglima, yang mula-mula direkrut Benny sebagai pembantunya adalah teman-teman lamanya dari zaman awal latihan militernya di Bandung. Perwira seperti Dading Kalbuadi, Gunawan Wibisono, Suweno, C.I. Santoso, dan Sebastian Sukoso adalah orang-orang RPKAD angkatan pertama yang juga teman Benny di Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat (P3AD) di Bandung pada awal tahun lima puluhan. "Pak Benny itu orang intel. Dia merasa aman berada dan bekerja di sekitar orang yang dikenalnya dengan baik," kata Teddy. Baru di kemudian hari barisan "anak emas" tercipta, yakni ketika para teman lama telah mendapatkan posisi penting di luar kantor Benny.

"Carilah di Kalangan Minoritas."

Tambahan cerita datang dari Harry Tjan Silalahi, teman karib Moerdani. Menurut Harry, Benny berprinsip "Kalau mau mendapatkan orang loyal, carilah di kalangan minoritas". Cara pandang

inilah rupanya yang menjelaskan mengapa kaum santri, kaum mayoritas, dijauhi oleh Benny. Maka di sekeliling Benny banyak ditemukan perwira dari etnis tertentu dengan agama yang bukan Islam, atau mereka yang tergolong Islam abangan. Mayjen TNI (Purn.) Syamsuddin, perwira Kopassus yang mantan Panglima Kodam Trikora di Papua, pernah menceritakan kepada saya mengenai posisi asisten intel di berbagai Kodam yang pada zaman Moerdani. "Memang banyak diduduki oleh para perwira non-Muslim."

Kembali ke cerita "anak emas" itu tadi. Yang juga ditengarai tergolong kelompok "anak emas" itu adalah para anggota Fraksi ABRI di DPR pada awal tahun sembilan puluhan. Mayor Jenderal TNI R.K. Sembiring Meliala adalah tokoh menonjol Fraksi ABRI waktu itu. Sembiring yang di kemudian hari, setelah Reformasi, beralih menjadi anggota DPR dari PDI Perjuangan, menurut mantan KSAD, Jenderal Rudini Puspohandoyo, adalah satu dari lulusan pertama AMN yang dibina langsung oleh Moerdani.

Sembiring inilah yang dengan vokal dan secara terbuka pada November 1993 mengecam B.J. Habibie yang tampil ke depan dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Pembina Golkar. Di samping Sembiring, anggota fraksi lain yang juga vokal waktu itu adalah Rukmini, seorang perwira Polwan (Polisi Wanita). Menurut Adam Schwarz dalam bukunya *Indonesia in Waiting* (1994), Rukmini dan Sembiring adalah bagian dari sayap Moerdani di DPR. Karena kesal akan merosotnya pengaruh mereka terhadap Soeharto, Fraksi ABRI di Parlemen itu beranjak kritis. Sikap demikian kemudian berperan mendorong munculnya para vokalis dari Fraksi Golkar dan Fraksi PDI serta PPP.

ATAS PETUNJUK KETUA DEWAN PEMBINA, Haji Mohammad Soeharto, Habibie, dan semua anggota Dewan Pembina mendukung Harmoko menduduki posisi Ketua Umum Golkar, menggantikan Letjen TNI (Purn.) Wahono. Tanpa arahan Soeharto, bisa dipastikan Habibie tidak punya kepentingan, apalagi keberanian, menjagokan dan mendukung Harmoko. Penunjukan Harmoko

memimpin Golkar sangat membuat marah sejumlah besar perwira ABRI, terutama Edi Sudrajat dan Benny Moerdani. "Bukan cuma Benny dan Sudrajat, seluruh ABRI marah," kata Jenderal TNI (Purn.) Sumitro menegaskan sikap tentara.

Apakah Sumitro menolak kepemimpinan sipil di Golkar? Menurut Sayidiman yang dekat dengan Sumitro, "Kami bukan tidak setuju Golkar dipimpin orang sipil, tapi Pak Mitro tidak suka Harmoko secara pribadi yang dinilainya oportunis dan tukang ngolor belaka. Kami juga tidak setuju dengan pimpinan Golkar yang tentara seperti Sudharmono, sebab dia tidak membawa Golkar ke demokrasi yang sehat." Saya tidak tahu apakah Sumitro, Benny, Edi Sudrajat, Sayidiman, dan para jenderal lainnya waktu itu sadar bahwa baik Sudharmono, Habibie, maupun Harmoko, semuanya hanya pelaksana kebijakan dan perintah Soeharto.

Mengomentari pengangkatan Harmoko ke kursi Ketua Umum Golkar, Harold Crouch, peneliti politik Indonesia dari Australia, waktu itu menulis,

> Harmoko dilantik [menjadi Ketua Umum Golkar] bukan karena dia seorang sipil, tapi karena dia menjadi pilihan Istana. Dengan demikian, statusnya sebagai seorang sipil bukanlah perkara pokok. Dari segi itu, kedudukan Harmoko mungkin ada kesamaan dengan kedudukan salah seorang pendahulunya, yaitu Letjen Sudharmono yang dilantik sebagai Ketua Umum Golkar 10 tahun lalu. Seperti Harmoko, ciri istimewa Sudharmono bukan statusnya dari segi dikotomi sipil-militer, tapi hubungan akrabnya dengan Kepala Negara.

Sebagai teman lama Harmoko, saya hampir tidak percaya ketika mendengar *inside infos* menjelang Munas bahwa senior saya di dunia kewartawanan itu akan menduduki kursi Ketua Umum Golkar. Bagaimana bisa? Untuk jadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat saja, Harmoko perlu dikatrol oleh Pangkopkamtib Sumitro. Dan inilah kisah naiknya Harmoko menjadi Ketua PWI Pusat: Pada 1970, terjadi perpecahan dalam tubuh PWI sebagai akibat kongres Palembang yang kisruh karena diintervensi Opsus. Hasil rekayasa para anak buah Ali Murtopo itu

mengakibatkan munculnya dua pengurus. Satu dipimpin Rosihan Anwar yang lainnya dipimpin B.M. Diah. Ali Murtopo mendukung B.M. Diah, sementara Kopkamtib menolak campur tangan Opsus. Pangkopkamtib Sumitro turun tangan mengatasi konflik dengan cara mempromosikan Harmoko dari posisi Ketua PWI Jakarta ke kursi Ketua PWI Pusat.

Alasan Sumitro, Harmoko anak muda, sedangkan Rosihan dan Diah sudah sangat senior. Dari posisi pemimpin organisasi tunggal para wartawan itulah, Harmoko masuk ke "radar" Soeharto. Maka ketika dalam sebuah diskusi, Sumitro ngomel-ngomel mengenai Harmoko, saya ingatkan mantan Pangkopkamtib itu bahwa dialah yang harus bertanggung jawab terhadap tingkah laku Harmoko. Karena Sumitro-lah yang mengatrolnya dulu.

Namun, apa bedanya penunjukan Harmoko memimpin Golkar dengan pengangkatan Jenderal Jusuf dan Jenderal Moerdani menjadi Pangab? Kedua jenderal itu juga terkejut ketika kebagian posisi Pangab. Bukan cuma Jusuf dan Moerdani, kita semua juga terkejut. Ternyata kita semua tidak punya cukup imajinasi untuk membayangkan betapa berkuasanya Soeharto hingga dengan mudah menjadikan Jusuf dan Moerdani sebagai Pangab. Kedua jenderal itu sebenarnya tidak memenuhi syarat menjadi Panglima ABRI. Tapi, itulah kehendak dan keputusan Soeharto. Dengan kekuasaannya yang luar biasa besarnya, Bapak Presiden bisa mengangkat siapa saja, untuk jabatan apa saja, dan kapan saja. Aturan-aturan baku militer dan organisasi politik tidak penting baginya.

SEPERTI YANG SUDAH SAYA URAIKAN, menjelang Munas Golkar, Edi Sudrajat sebagai Panglima menyebut ABRI punya banyak calon untuk memimpin Golkar. Tidak lama kemudian, Edi Sudrajat dicopot dari kursi Pangab. Feisal Tanjung yang menggantikannya sangat mafhum kehendak Soeharto. Pangab baru itu dengan segera mengeluarkan semacam ralat. Katanya, "ABRI tidak punya calon. Terserah pada Munas."

Oleh karena itu, ketika Sembiring Meliala berkata, "Mereka itu bukan apa-apa dan akan hilang setelah Soeharto tidak lagi berkuasa," segera beredar kesan kuat bahwa Sembiring Meliala hanya "penyambung lidah" yang menyampaikan pendapat Edi Sudrajat, Benny Moerdani, dan para senior ABRI lainnya. Mantan Panglima ABRI yang juga mantan pemimpin berbagai lembaga intel itu memang tidak pernah menunjukkan kepercayaannya kepada politisi sipil. Bagi Benny, politisi sipil sudah pernah dapat kesempatan. Dan mereka gagal. Terhadap kepemimpinan sipil, Sembiring berkomentar lebih jauh, "Rakyat masih mengharapkan ABRI sebagai Presiden." Apakah Benny berambisi menjadi Presiden setelah Soeharto? Itu, antara lain, pertanyaan beberapa wartawan asing di Jakarta hari-hari itu.

"Panglima ABRI. Bukan Panglima Katolik."

Sebagai seorang berlatar belakang Indo dan beragama Katolik, Benny sangat sadar kemungkinannya menjadi Presiden hampir tidak ada. Kiai Yusuf Hasyim, paman Presiden Abdurrahman Wahid, seorang Kiai dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur, pernah menceritakan kepada saya sarannya kepada Benny agar masuk Islam saja supaya bisa jadi Presiden. Jawab Benny, "Apakah masyarakat masih akan percaya seorang yang menjadi murtad hanya karena ingin sebuah jabatan?" Menurut cerita Bill Morrison, seorang diplomat Australia yang kenal dekat dengan Benny, yang menjadi hambatan bagi Benny untuk jadi Presiden bukan cuma karena agamanya yang Katolik, melainkan juga karena kesadarannya terhadap latar belakangnya sebagai Indo.

Masih tentang urusan agama yang dianut Moerdani yang menjadi hambatannya untuk jadi Presiden atau Wakil Presiden, Jusuf Wanandi mencatat dalam memoarnya suatu adegan menarik:

> Sebagai orang Katolik, dia tidak akan pernah menjadi Presiden. Itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin dia ubah. Benny telah menjelaskan hal tersebut. Suatu malam, saya

> ingat, kami makan malam bersama: Benny, Harry Tjan, dan saya. Beberapa pemimpin redaksi yang dekat dengan Benny juga hadir: Jakob Oetama dari *Kompas* dan Fikri Jufri dari *Tempo*. Sesudah minum anggur agak banyak, Fikri tiba-tiba menangis dan bertanya kepada Benny: "Kenapa Anda tidak mau masuk Islam supaya kami bisa memilih Anda sebagai Presiden Republik ini?" Semua kami diam. Kami semua kenal Benny. Dia seorang bertemperamen dengan tingkah laku tak terduga. Benny memandang tajam ke arah Fikri. "Apa kamu pikir saya semurah itu?" Ucapnya dengan nada marah. "Meninggalkan keyakinan saya hanya untuk mendapat suatu jabatan? *Never*."

Mengenai Benny sebagai seorang berdarah Indo, Teddy Rusdy membenarkan pendapat Morrison dan mengenang mantan bosnya sebagai seorang yang sangat sadar sebagai minoritas ganda. "Dia Katolik dan juga Indo. Benny sadar betul pada posisi demikian," kata Teddy. Jenderal Sumitro pernah memarahi Benny yang tidak sowan (kunjungan kehormatan) kepada Kiai As'ad, seorang kiai karismatik di Asem Bagus, Jawa Timur, ketika Pangab meninjau latihan militer di sekitar sana. Benny membela diri, "Saya bukan Muslim." Tapi kata Sumitro kepada Moerdani, sebagaimana yang dikisahkannya kepada saya, "Ben, kau Panglima ABRI, bukan Panglima Katolik."

"Minoritas Harus Kerja Dua Kali Lebih Keras."

Harry Tjan juga ingat Benny pernah berkata kepadanya, "Har, untuk terbilang, kita sebagai minoritas harus kerja dua kali lebih keras daripada mereka yang mayoritas." Saya menduga, bukan tidak mungkin kondisi dan latar belakang seperti inilah yang membuat Benny lebih melihat prospek dan potensinya sebagai *king maker*, dan sama sekali bukan sebagai calon *king*. Potensi demikian sudah lama menjadi bahan pembicaraan di kalangan elite Jakarta masa itu. Dan seingat saya, selama Moerdani menduduki posisi penting, memang tidak pernah muncul pembicara-

an di publik yang mengarah pada adanya kecurigaan Benny berambisi menjadi Presiden atau bahkan Wakil Presiden.

Dalam biografi Teddy Rusdy, *Think Ahead*, ada diceritakan kesan perwira Angkatan Udara itu mengenai Moerdani pada awal pertemuan mereka pada 1974. Tertulis dalam buku tersebut:

> Teddy Rusdy terkesan dengan pesan dan visualisasi Pak Benny Moerdani yang mengatakan bahwa dalam menjalani kehidupan ini, manusia mempunyai dua pilihan, sebagai seorang aktor atau sutradara. Seorang aktor harus tampil di panggung membawakan peran yang diembannya, memainkan peranan sesuai petunjuk sutradara. Sedangkan sutradara merencanakan dan membuat jalannya cerita, "*making things happen*", yang dilakukannya dari belakang layar.

KETIKA HARSUDIONO HARTAS DAN PARA JENDERAL, pada 1993 nekat mencalonkan Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden, tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Presiden Soeharto dan juga Jenderal Try Sutrisno sendiri, banyak pengamat yang mencurigai Benny berada di balik punggung Hartas. Bagi orang-orang itu, Benny adalah sutradara yang "*making things happen*" sebab mantan Pangab itu, karena alasan agama dan latar belakang keluarga, memang hanya mungkin jadi "sutradara". Seperti diketahui lima tahun sebelumnya, sesaat setelah diturunkan secara mendadak dari posisi Panglima ABRI, Benny menolak dicalonkan menjadi Wapres oleh Fraksi ABRI di MPR. Dia menunjuk Try Sutrisno, Panglima ABRI yang baru, sebagai tokoh yang harus dicalonkan.

Ketika Benny menunjuk Try Sutrisno sebagai calon Wapres, alasannya, Try adalah Panglima ABRI—"Ketua Partai ABRI", menurut istilah Benny waktu itu—sedangkan Benny sudah meninggalkan posisi tersebut. Di kemudian hari baru kita ketahui Try Sutrisno memang teman lama Benny, yakni sejak keduanya bersama-sama memulai karier militer di Bandung. Waktu itu Moerdani baru saja menjadi perwira Infantri dengan pangkat Letnan

Dua, sedangkan Try masih Sersan Taruna pada Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad).

Ketika meninggalkan jabatan Ajudan Presiden, Try diajak Benny bergabung ke komunitas intel yang berada di bawah pimpinannya. Menurut cerita Try kepada saya, Benny mencoba meyakinkannya bahwa dia tidak punya hari depan di Angkatan Darat karena Try perwira Zeni, bukan Infantri. Tapi, kekuatan dan kontrol Soeharto atas ABRI terbukti telah menjadikan apa yang hampir tidak mungkin menjadi mungkin. Try Sutrisno bukan hanya berhasil menjadi KSAD, melainkan juga Panglima ABRI pertama dari korps Zeni.

Keputusan Soeharto yang berhasil melambungkan Try Sutrisno ke posisi tertinggi dalam tatanan militer Indonesia justru makin membuka kesempatan bagi Moerdani memainkan peranannya sebagai tokoh pemikir politik ABRI. Persahabatan lama Try dengan Moerdani itulah yang menjelaskan mengapa Benny diterima dengan senang hati oleh Panglima penggantinya sebagai semacam supervisor (pembimbing) selama Try duduk di kursi Panglima ABRI. Dari kedekatan itulah pikiran dan gagasan politik Moerdani mengalir ke dalam ABRI.

Sebagai teman lama, bisa diduga bahwa Benny tahu betul siapa Try, kapasitas dan kemampuannya. Dan karena itu memerlukan bimbingan Moerdani. Dalam salah satu wawancara kami, dengan nada setengah memprovokasi saya tanya Benny, "Anda ini dua kali jadi Pangab." Dengan sedikit membelalakkan mata, Benny bertanya, "Bagaimana bisa?" Jawab saya, "Waktu Pak Benny jadi Pangab, itu jelas Pak Benny Pangab. Tapi ketika Pak Try Sutrisno jadi Pangab, menurut banyak jenderal, Pak Benny juga Pangab." Komentar Benny, *"Well, in a way*."

Inilah tampaknya penjelasan mengapa sebagian staf yang dipakai Benny sebagai Panglima ABRI dimanfaatkan terus oleh Try Sutrisno. Inilah juga barangkali penjelasannya mengapa Benny menjagokan Try menjadi Wapres ketika usia Soeharto sudah beranjak sepuh. "Kalau terjadi sesuatu dengan Soeharto, orang Benny sudah siap menunggu di samping puncak kekuasaan,"

kata Jenderal Rudini yang sudah lama bersikap kritis dan waspada kepada Moerdani. Hubungan akrab Moerdani dan Sutrisno ini jugalah penjelasannya mengapa hubungan Soeharto dengan ABRI makin tidak mulus pada masa kepanglimaan Try Sutrisno.

SAYA BERADA DI MELBOURNE, AUSTRALIA, ketika Benny meninggal dunia setelah sakit cukup lama. Media-media Australia hampir semuanya memberitakan wafatnya mantan Pangab tersebut. Beberapa koran malah bercerita lebih jauh tentang tersingkirnya Moerdani dari sisi Soeharto setelah sebelumnya sangat dipercaya dan amat berkuasa. Kembali ke Jakarta, saya mendengar cerita menarik tentang hari-hari terakhir mantan pemimpin intel itu. Salah satu cerita menyebutkan, dalam keadaan fisik yang sudah amat lemah, Moerdani masih berusaha berdiri dengan sikap sempurna memberi hormat ketika televisi memperdengarkan lagu Indonesia Raya.

Tidak bisa diragukan lagi, Benny Moerdani adalah seorang patriot sejati yang membaktikan seluruh hidupnya kepada negara lewat profesi militer. Untuk waktu lama di mata Moerdani, Soeharto adalah personifikasi negara. Itulah yang menyebabkan Benny mengabdikan waktu, tenaga, dan keahliannya sebagai aparat sekuriti yang berperan sebagai "anjing herder" penjaga keamanan Soeharto dan keluarganya. Di kemudian hari Moerdani tampaknya berangsur sadar bahwa selama bertahun-tahun menyamakan Soeharto dan negara adalah kesalahan besar yang telah dilakukannya. "Hebat, ya, Pak Harto? Bisa bertahan begitu lama, sementara Sukarno hanya tahan beberapa tahun," komentar saya tentang Soeharto pada sebuah wawancara dengan Moerdani. "Ah, tidak. Kita yang bodoh," sergah Benny. Kesadaran datang terlambat. Bapak Presiden sudah amat berkuasa dan Jenderal Moerdani tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

Maka buat saya, Benny adalah korban dari kekuasaan tak terbatas yang pernah ikut dibangun, dikelola, dan dilindunginya dengan sepenuh hati, tenaga, dan fanatisme. Mungkin Benny memang pernah merasa kekuasaan di tangannya hampir tak ter-

batas. Mula-mula dengan kekuasaan itu seluruh hidupnya diabdikannya kepada Soeharto, orang yang memercayakan kepadanya kekuasaan yang begitu besar. Tapi, dinamika kekuasaan besar itu jugalah yang mendorongnya mengembangkan visi dan misinya sebagai perwira yang merasa dan percaya harus mendahulukan kepentingan negara daripada sekadar mengamankan seorang Soeharto dan keluarganya.

Benny pernah merasa dirinya seorang yang amat dekat dan spesial bagi Soeharto. Keamanan Soeharto selalu dalam pantauan dan kontrol Benny. Bahkan, sampai memasuki area Masjidil Haram, dilakukan Benny demi keamanan Soeharto. Untuk keselamatan penerbangan Bapak Presiden ke wilayah Timur Tengah, Benny pernah sampai meminta pinjaman roket dari Israel—negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia—untuk menangkal kemungkinan serangan kepada pesawat kepresidenan. Apakah memang penerbangan Presiden waktu itu terancam? Siapa yang mengancamnya? Kemungkinan besar yang tahu jawaban pertanyaan tersebut hanya Moerdani sendiri.

Gagasan Nasution

Demi keamanan Soeharto dan keluarganya, kaca-kaca dinding ruang depan kediaman di Jalan Cendana konon digantinya dengan kaca antipeluru. Untuk keselamatan sang Presiden di jalan, Benny memesan khusus mobil yang bukan cuma antipeluru, tapi juga kebal granat. Mobil berlapis baja istimewa itu akhirnya nongkrong di garasi karena terlalu berat. Lagi pula Soeharto tampaknya juga yakin tidak akan ada orang yang akan melemparinya dengan granat. Sebuah sumber malah bercerita tentang tindakan Benny menyadap kediaman Jalan Cendana. Bukan untuk memata-matai Soeharto, melainkan justru untuk tahu apa sebenarnya kemauan Soeharto.

PADA MASA KEKUASAAN SUKARNO, percobaan pembunuhan atas diri Pemimpin Besar Revolusi itu memang beberapa kali ter-

jadi. Tapi hal demikian dialami Sukarno sebelum terbentuknya pasukan pengawal Presiden yang dikenal sebagai Resimen Cakrabirawa. Menarik untuk diketahui, pembentukan Cakrabirawa adalah gagasan Jenderal Nasution setelah beberapa kali terjadi percobaan pembunuhan atas diri Sukarno. Resimen pengawal Presiden itu diresmikan berdirinya oleh Sukarno pada 6 Juni 1962. Ironisnya bagi Nasution, pasukan yang digagasnya itulah kemudian yang nyaris membunuhnya dan berhasil menewaskan putri bungsu Kepala Staf Angkatan Bersenjata tersebut.

Sebagai ganti Cakrabirawa, pada awal kepresiden Soeharto, dibangun Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang jauh lebih hebat dari Resimen Cakrabirawa dulu. Dengan jaringan pengamanan yang lebih canggih itu, Soeharto jelas tidak lagi memerlukan mobil antigranat atau rumah dengan kaca antipeluru.

Mengusir Tukang Rumput

Juga perlu saya tambahkan bahwa bisa dipastikan bukan Soeharto yang membuat aturan untuk menghindari berjumpa Nasution pada berbagai resepsi perkawinan. Adalah Benny yang mengatur agar pertemuan kedua tokoh tidak sampai terjadi. Jenderal Nasution pernah menceritakan kepada saya beberapa kali undangan yang diterimanya untuk resepsi perkawinan ditarik kembali oleh sang pengundang atas desakan aparat sekuriti kepresidenan. Pasalnya, pada jam yang sama Soeharto juga akan hadir. Ketika T.B. Simatupang mantu di gedung yang sekarang dikenal sebagai Balai Kartini, Nasution baru bisa datang pada pukul 10 malam, yakni ketika Soeharto sudah meninggalkan gedung. Menurut cerita Mangadang Napitupulu, seorang keluarga dekat Jenderal Simatupang, ketika kedua mantan pendiri dan petinggi TNI itu berangkulan, dalam bahasa Batak, Nasution berkata kepada teman sekolahnya di Akademi Militer Bandung dahulu, "Kok, begini jadinya nasib kita, Sim?"

Demi kenyamanan dan kepuasan Soeharto jugalah suatu kali Moerdani merencanakan penangkapan Nasution yang sibuk ce-

ramah di berbagai tempat. Ceramah-ceramah yang bernada kritis terhadap pemerintah itulah yang mendorong Benny bertindak. Hanya campur tangan Jenderal T.B. Simatupang waktu itu yang menyelamatkan teman seperjuangannya. Untuk itu, Simatupang harus datang sendiri ke kantor Bais, membujuk Benny agar jangan membiasakan menangkap seniornya. "Tapi orang tua itu sudah sangat jengkel," keluh Benny menjelaskan kemarahan Soeharto kepada kritik-kritik Nasution. "Ah, Nas itu sudah sakit-sakitan. Nanti saya sampaikan keluhanmu." Berhasil menenangkan Benny, Simatupang melanjutkan, "Buat apa pula kau pasang tukang jual rokok di depan rumahnya?" Tukang jual rokok itu adalah anak buah Moerdani yang dipasang di sana untuk mengawasi mantan KSAD dan mantan KSAB itu.

Menempatkan intel yang menyamar sebagai tukang rokok yang berjualan di depan rumah orang yang dimusuhi dan diawasi pemerintah rupanya sudah menjadi tradisi intel Indonesia dalam mengintai sasarannya. Penjual rokok juga di pasang di depan rumah Sudjatmoko—cendekiawan terkemuka yang juga mantan orang dekat Perdana Menteri Syahrir—oleh Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI), Dr. Subandrio, pada masa Orde Lama. Dan tentu banyak lagi penjual rokok "jadi-jadian" yang "berjualan" di depan rumah orang-orang yang dimusuhi pemerintah pada zaman Orde Lama maupun Orde Baru dulu itu.

Sebagai mantan pejabat tinggi militer, Nasution jelas tahu budaya intel Indonesia. Karena itu, dia sadar dirinya selalu dalam pengawasan. Suatu kali pada November 1984 ketika saya sedang mewawancarai Jenderal itu di depan jendela paviliun yang ditempati putrinya, seseorang sedang memotong rumput di bawah jendela tersebut. Nasution kelihatan terganggu dan kemudian mengusir si tukang potong rumput. "Wah, di mana-mana kita diikuti intel," keluhnya. Saya terkesima oleh ketakutan Nasution kepada tukang rumput yang mungkin intel, tapi bisa juga bukan. Beginilah akhirnya nasib seorang yang pernah sangat berkuasa di Indonesia, pikir saya. Dengan tukang rumput saja dia sudah ketakutan.

Pikiran demikian muncul juga di kepala saya ketika melihat potret Sukarno dengan muka membengkak—akibat tidak cuci darah meski ginjalnya sudah nyaris tidak berfungsi—ketika menghadiri perkawinan putrinya, Rahmawati. Waktu itu Sukarno memang sudah lama disingkirkan dari Istana Merdeka dan Istana Bogor. Nasib yang sama kelak dialami juga Soeharto. Meski secara fisik aman dan terjaga di Jalan Cendana setelah mundur dari jabatan Presiden, tapi tidak jauh dari kediaman pribadi mantan Presiden terlama Indonesia itu, selama beberapa hari ribuan mahasiswa berdemonstrasi dan memaki-makinya dengan aman tanpa gangguan aparat keamanan. Betapa tidak langgengnya kekuasaan, pikir saya.

MASIH TENTANG NASIB NASUTION dan sikap serta kebijakan Moerdani yang selalu menjaga keselamatan dan kenyamanan Soeharto. Ketika Nasution melayat jenazah Jenderal T.B. Simatupang, mantan KSAD dan mantan KSAB itu dengan kasar didorong-dorong ke luar ruangan jenazah oleh para pengawal Soeharto. Waktu itu Presiden Soeharto memang akan segera tiba. Kebijakan demikian jelas bukan karena kehadiran Nasution mengancam keselamatan Soeharto. Ke mana pun Bapak Presiden pergi, pengamanan secara ketat selalu menyertainya bahkan jauh sebelum ketibaannya. Maka bisa dipastikan Benny mencekal Nasution melulu demi kenyamanan Soeharto.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Laksamana TNI Sudomo terhadap Ali Sadikin dan teman-temannya para penanda tangan Petisi 50. Berbeda dengan Benny yang intel, Sudomo yang pelaut, secara polos dan terbuka mengumumkan bahwa dialah—sebagai Pangkopkamtib—yang mencekal seniornya agar tidak mempunyai kesempatan berada bersama Soeharto dalam suatu acara. Sudomo selaku Pangkopkamtib juga menjatuhkan hukuman kepada para pengkritik Soeharto dengan hukuman "mati secara perdata".

Akibat hukuman tersebut, Ali Sadikin, keluarganya, dan teman-temannya tidak bisa berbisnis. Semua bank diperintahkan

Pangkopkamtib tidak melayani mereka. Koran, radio, dan televisi juga dilarang mengumumkan pernyataan dan keterangan kelompok Petisi 50 yang oleh Sudomo dinilai hanya akan mengganggu kenyamanan Presiden Soeharto. Maka informasi kegiatan Petisi 50 harus kita cari dari media asing, sebab hanya wartawan luar negeri yang bertugas di Jakarta yang meliput kegiatan teman-teman Ali Sadikin tersebut.

Menyembelih Ayam Petelur

Sebagai seorang politisi yang canggih dan Jenderal yang berpengalaman, demi keamanan dan kelanggengan kekuasaannya, Soeharto memanfaatkan bukan cuma Benny, melainkan banyak orang lain dengan berbagai macam tugas. Di mata Soeharto tak seorang pun di antara mereka dekat dan spesial. Mereka semua hanya alat. Ali Murtopo, misalnya, pada awal Orde Baru dipandang oleh masyarakat luas sebagai tokoh amat penting dan menentukan di pusat kekuasaan. Dari penampilannya Murtopo dianggap amat berpengaruh kepada Soeharto. Ali sebagai perwira yang ikut Soeharto sejak masa kepanglimaan Bapak Presiden di

Salim Said mewawancarai Ali Murtopo, 1978.

Semarang, niscaya tahu pandangan umum tersebut. Karena itu, dia menjaga citranya sebagai orang penting di sekitar Soeharto.

Kemudian Murtopo dicampakkan begitu saja ketika masa bergunanya bagi sang Presiden sudah habis. "Saya ini bagaikan ayam petelur. Setelah tidak lagi bertelur, disembelih," keluh Ali Murtopo—pada pesta ulang tahunnya di Hotel New Otani, Tokyo —kepada Jenderal Sayidiman, Duta Besar Indonesia untuk Jepang waktu itu.

Menurut Sayidiman, waktu itu Indonesia sedang menghadapi Pemilu 1983, dan Ali Murtopo yang sedang menduduki kursi Menteri Penerangan sudah lebih dahulu memberi nama-nama calon menteri muda untuk duduk di kabinet mendatang. Salah satu nama yang diusulkan adalah Jusuf Wanandi, tokoh CSIS dan orang dekat Murtopo yang ikut mendampingi Bos Opsus tersebut di Tokyo waktu itu. Semua usul ditolak Soeharto. "Lha, kapan Jusuf Wanandi bisa jadi menteri?" keluh Murtopo kepada Sayidiman. Nama-nama yang diusulkan Murtopo untuk menduduki posisi Eselon Satu di Departemen Penerangan, juga bernasib sama. Usul yang terakhir ini disampaikan Jenderal yang Bos Opsus dengan keyakinan dirinya akan tetap menjadi Menteri Penerangan sambil menduduki kursi Menko yang katanya telah dijanjikan Soeharto padanya.

Namun, kemudian Murtopo ternyata hanya kebagian kursi di Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Artinya, sama sekali tersingkir dari kabinet dan kekuasaan. Yang menggantikannya sebagai Menteri Penerangan adalah Harmoko, pilihan yang kabarnya oleh Murtopo dianggap sebagai penghinaan yang amat menyakitkan. Sebuah sumber di dekat Soeharto mengutip Bapak Presiden berkata, "Tugas sebagai Menteri Penerangan cukup dikerjakan oleh orang seperti Harmoko saja."

Tidak lama setelah menjadi anggota DPA, Murtopo mendadak meninggal di ruang kerjanya di Gedung Dewan Pers. "Serangan jantung," kata dokter. Sekian tahun setelah kematiannya, Soeharto menjelaskan hubungannya dengan Ali Murtopo dalam

memoar sang Presiden yang berjudul *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*. Menurut Soeharto,

> Sebelum Ali Murtopo meninggal, ada yang suka menilai bahwa Ali Murtopo itulah yang menentukan. Karena apa? Mungkin karena dia pandai bicara, berani, atau dinilainya sebagai Aspri, sehingga merupakan pembantu utama saya yang terdekat dan segala sesuatunya bergantung pada dia. Dengan menilainya seperti ini, orang mengira, bahwa pemerintah tidak bisa mengambil keputusan tanpa dia. Karena Ali Murtopo memimpin CSIS yang di Tanah Abang itu, maka orang mengira bahwa lembaga itulah dapurnya pemerintah. Kalau bergantung pada Ali Murtopo, berarti kalau Ali Murtopo meninggal, pemerintah tidak bisa jalan. Kenyataan menunjukkan bahwa dengan meninggalnya Ali Murtopo, pemerintah tetap bisa berjalan. Dan saya bisa memimpin. Maka tidak benar bahwa segalanya itu bergantung pada dia.

Jenderal Sumitro juga pernah disebut orang kuat kedua Indonesia setelah Soeharto. Adalah Sumitro yang menjadi pelaksana rencana Soeharto menyingkirkan para mantan pendukungnya—Kemal Idris, H.R. Dharsono, dan Sarwo Edhie—dari pusat kekuasaan. Tapi kemudian karier militer Sumitro juga habis begitu saja, layaknya ban mobil yang mendadak kehilangan angin. Sumitro pensiun dini sebagai Jenderal bintang empat pada usia yang relatif amat muda. Berhenti sebagai Pangkopkamtib beberapa hari setelah Malari, Sumitro menolak tawaran menjadi Dubes di Washington. Jenderal yang berbadan subur itu memilih berdagang bersama sejumlah mantan anak buahnya dari masa berjuang di Jawa Timur pada zaman Revolusi dahulu.

Pengalaman menyingkirkan dengan gampang orang-orang yang pernah berjasa kepadanya itu kemudian menjadi ciri mencolok kepribadian Soeharto. Bagi Presiden terlama Indonesia ini tidak ada teman baru, teman lama, teman dekat, atau teman jauh. Semuanya sama saja, semuanya hanya alat yang ada masa pakainya. Dalam hal ini Soeharto mungkin bisa diumpamakan sebagai seorang pemeras kelapa yang andal. Dia pandai memilih

dan memanfaatkan kelapa yang bersantan banyak. Dan setelah santan diperas, ampasnya segera dibuang. Maka tidak usah mengherankan kalau ketika "santan" Moerdani, Ali Murtopo, Sumitro, Kemal Idris, Sarwo Edhie, dan H.R. Dharsono sudah diperas habis, bagi Soeharto para jenderal itu tidak bermanfaat lagi. Karena itu disingkirkan saja sebelum menimbulkan persoalan.

NASIB BENNY MOERDANI sebenarnya tidak jauh berbeda dengan nasib Jenderal A.H. Nasution, Jenderal Kemal Idris, Jenderal H.R. Dharsono, Jenderal Sarwo Edhie, beberapa tahun sebelumnya. Dengan dukungan Angkatan Darat pimpinan Nasution pada 1959, Sukarno mendapat kekuasaan amat besar sebagai Presiden dalam sebuah sistem presidensial akibat berlakunya kembali UUD 1945. Adalah Nasution yang telah "memaksakan" berlakunya kembali UUD 45. Dengan kekuasaan besar yang sudah berada di tangan, Sukarno merasa tugas Nasution sudah selesai. Pada 1962, dengan lihai Sukarno menyingkirkan Nasution. Mantan KSAD itu "ditendang ke atas" ke posisi Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB) tanpa garis komando ke pasukan dan dengan tugas yang lebih bersifat administratif.

Kemal, Dharsono, dan Sarwo Edhie adalah tiga *King Makers* yang memanggul Soeharto naik menggantikan Sukarno pada awal Orde Baru. Setelah mengonsolidasikan kekuasaannya, Kemal, Dharsono, dan Sarwo semua disingkirkan ke tempat yang tidak penting dan jauh dari pusat kekuasaan. Seperti Nasution, Kemal, Dharsono, dan Sarwo Edhie sebelumnya, peran Benny juga berakhir setelah Soeharto—dengan menggunakan tangan besi sang Kepala Intel—sudah berhasil mengonsolidasikan kekuasaannya. Nasution dan Benny Moerdani adalah dua Jenderal yang amat menonjol pada masa berkuasa mereka. Keduanya memimpin tentara sebagai kekuatan politik terpenting.

Dalam keadaan demikian, maka tidak usah heran jika sang Presiden—Sukarno maupun Soeharto—selalu waspada kepada pemimpin tentaranya masing-masing, sebab memang tidak ada kekuatan sipil yang berposisi sebagai ancaman serius terhadap

kekuasaan mereka. Sukarno maupun Soeharto menaiki takhta kekuasaan karena dukungan tentara. Oleh sebab itu, di mata keduanya hanya tentara pula yang berpotensi menjatuhkan mereka. Pada masa dinas sebagai pemimpin militer, Nasution dan Moerdani secara perlahan dipersepsikan sebagai ancaman oleh Presiden mereka masing-masing. Untuk itulah—setelah tugas mereka mengukuhkan kekuasaan sang Presiden selesai—keduanya harus secepatnya disingkirkan dari beranda pusat kekuasaan.[]

Wakil Presiden Try Sutrisno:

"Pemberontakan" ABRI kepada sang Presiden?

Pencalonan Try sebagai Wakil Presiden (Wapres) menjelang sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1993 memang suatu yang amat unik, menarik, dan sensasional. Penyebabnya, Soeharto sama sekali tidak dimintai persetujuan. Itu sesuatu yang untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah Orde Baru. Tentu saja kami para pengamat dan komentator politik waktu itu tidak tahu kisah di belakang layar rencana "perjalanan istimewa" Jenderal TNI Try Sutrisno dari Markas Besar ABRI di Cilangkap ke Istana Wapres di Merdeka Selatan.

Yang pasti pencalonan Try Sutrisno secara terbuka dan diumumkan lebih awal dari biasanya menjadi topik diskusi dan bahan spekulasi di tengah samudra desas-desus elite Jakarta hari-hari itu. Pencalonan Jenderal TNI Try Sutrisno tanpa dikonsultasikan dengan Presiden Soeharto jelas melanggar TAP MPR No. II, 1973. TAP MPR itu mengatur Cawapres harus bisa bekerja sama dengan Presiden terpilih. Untuk tahu seorang calon bisa atau tidak bisa bekerja sama dengan Presiden, maka harus ditunggu sampai munculnya Presiden terpilih. Waktu ABRI mengumumkan pencalonan Try Sutrisno, Soeharto bukan saja tidak dimintai persetujuan, dia bahkan belum terpilih kembali.

Pencalonan Pangab, yang juga mantan Ajudan Presiden (1974-1978) untuk jabatan Wapres itu diumumkan oleh Letjen TNI Harsudiono Hartas dalam kedudukannya sebagai Kepala Staf Sosial Politik (Kasospol) ABRI tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Soeharto. Itu semua kita sudah lama tahu. Yang baru saya tahu dari keterangan Try Sutrisno dalam wawancaranya dengan saya pada tanggal tiga Juli 2012, adalah: "Jangankan konsultasi dengan Pak Harto, dengan saya saja tidak." Lalu, siapa yang memu-

Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno dan KSAD Jenderal Edi Sudrajat.

tuskan Try Sutrisno sebagai calon wakil presiden yang diusulkan ABRI? "Saya tidak bisa menunjuk siapa yang memulai, tapi Kepala Staf Sospol ABRI suatu hari lapor kepada saya bahwa rapat staf Mabes ABRI memutuskan saya menjadi calon ABRI untuk jabatan wakil presiden," kata mantan Wapres tersebut. Reaksi Try: "Stop, Wapres itu dipilih oleh Presiden terpilih. Saya minta soal pencalonan itu jangan dibicarakan lagi." Perintah Pangab ini ternyata tidak dihiraukan Kasospol.

Cerita Pangab Try Sutrisno sebagai cawapres dari ABRI menyebar ke masyarakat lewat Hartas. Menurut Try Sutrisno, Hartas mengaku "keceplosan" bicara kepada wartawan selepas memberi taklimat di Departemen Dalam Negeri (sekarang Kemendagri). "Ditanya wartawan, siapa calon ABRI, dia bilang Try Sutrisno. Sudah itu Hartas datang kepada saya minta maaf dan siap dipecat akibat keceplosan itu." Sebagai orang yang selalu berprasangka baik, Jenderal Try Sutrisno percaya saja penjelasan Hartas bahwa Kasospol itu betul-betul "keceplosan".

Namun, kepada saya, Hartas memberikan keterangan lain. Dalam wawancaranya pada 14 Juli 1997 di kantor Dewan Pertimbangan Agung (DPA), kantornya waktu itu, Hartas menjelaskan, ABRI mendorong Try Sutrisno sebagai calon wakil presiden karena dari dua calon menonjol saat itu—B.J. Habibie dan Try Sutrisno—Presiden Soeharto telah memilih Try. "Tempat Habibie di bidang teknologi," begitu konon kata Pak Harto ketika Hartas dan rombongan bertemu Presiden di Jalan Cendana. Pernyataan Soeharto itu lantas ditafsirkan Hartas sebagai bukti Bapak Presiden telah memilih Try. Atas dasar penafsiran sendiri itulah, Hartas mengaku yakin dan berani mengumumkan pencalonan Pangab Try Sutrisno tanpa melaporkannya terlebih dahulu kepada

yang dicalonkan. Tapi, andai tafsiran Hartas itu memang benar adanya, persetujuan Soeharto tetap saja diperlukan, bukan? Meski mungkin hanya sekadar basa-basi. Lagi pula, hal demikian itu telah diatur oleh TAP MPR dan sudah berkali-kali dijalankan.

Sekarang bisa disimpulkan pernyataan Hartas itu bukan sikap pribadi dan juga tidak mudah dipercaya sebagai akibat "keceplosan". Pernyataan Hartas adalah keputusan kolektif para pemimpin ABRI dan Hartas hanya operator mereka. Ini terbukti dari pernyataan Moerdani dalam wawancaranya dengan Michael R.J. Vatikiotis, wartawan *Far Eastern Economic Review* di Jakarta pada 3 Mei 1993. Kepada wartawan dari media terbitan Hong Kong itu Jenderal Benny Moerdani menjelaskan dengan terbuka bahwa kesepakatan para jenderal mencalonkan Try Sutrisno diputuskan oleh para petinggi ABRI lima tahun sebelumnya, yakni pada 1988. "Setelah Sudharmono terpilih sebagai Wakil Presiden pada 1988, ABRI memutuskan Try Sutrisno harus menjadi Wakil Presiden berikutnya," kata Moerdani. Keputusan itu dicapai ketika Try Sutrisno baru beberapa hari menduduki jabatan Pangab menggantikan Moerdani.

Mengapa para jenderal "mbalelo", melanggar ketetapan MPR? Jawabannya, para jenderal belum yakin sepenuhnya pada tafsiran Hartas terhadap pernyataan Presiden Soeharto. Lagi pula pengalaman menunjukkan Soeharto adalah penguasa yang tingkah laku politiknya tidak selalu bisa diramalkan. Jadi, sebelum Soeharto berubah sikap—itu kalau tafsiran Hartas memang benar—umumkan saja dulu. Dengan deklarasi pencalonan Try yang demikian itu, Soeharto sulit berubah pendirian. Bapak Presiden akhirnya memang tidak punya pilihan lain, kecuali menerima calon wapres yang "dipaksakan" ABRI kepadanya.

Bukan Potensi Ancaman bagi Soeharto

Lebih tegas lagi adalah penjelasan Jenderal TNI (Purn.) Sumitro. Menurut mantan Pangkopkamtib tersebut, tindakan Hartas bertolak dari kecemasan para jenderal terhadap kemungkinan Soe-

harto mengangkat Habibie menduduki kursi wapres. Sudharmono dan Habibie masa itu adalah orang-orang yang dipercayai Soeharto sebagai pembantu-pembantunya yang loyal. Kedua tokoh itu—berbeda dengan para jenderal yang duduk pada pimpinan ABRI—tidak punya dukungan politik, militer, dan massa yang mungkin mereka mobilisasikan untuk mengancam kekuasaan Soeharto.

Tokoh yang juga diperhitungkan Soeharto bukan sebagai potensi ancaman bagi kekuasaannya adalah Harmoko. Inilah penjelasannya mengapa Harmoko menjadi Ketua Umum Golkar. Barangkali untuk menghindari kemungkinan "koalisi" antara Habibie dan Harmoko, keduanya di kemudian hari secara terpisah dijanjikan jabatan wapres. Harmoko akan menjadi wapres mengikuti jalan Adam Malik sekian tahun sebelumnya, menaiki kursi wapres setelah memimpin DPR dan MPR. Karena itu, menjelang pemilu terakhir Orde Baru, sebagai Ketua Umum Golkar Harmoko secara *all out* mendukung Soeharto dan meyakinkan Bapak Presiden mengenai masih besarnya dukungan rakyat kepadanya untuk melanjutkan jabatan kepresidenan lewat sidang MPR 1998. Soeharto yang sudah bicara pada saat-saat terakhir mengenai niatnya untuk *lengser keprabon*, berhasil diyakinkan Harmoko untuk tetap mempertahankan singgasananya. Terpilih kembali sebagai Presiden, Soeharto melupakan janjinya kepada Harmoko. B.J. Habibie yang dipilihnya. Maka, bisa dibayangkan marahnya Harmoko yang merasa dipermainkan.

Mengenai janji Soeharto kepada beberapa orang untuk menduduki jabatan wakil presiden, pada akhir 2012 saya mendapat cerita menarik dari Ibu Sunarti Sarwo Edhie. Ternyata menjelang sidang MPR 1988, selain Sudharmono, Presiden Soeharto diam-diam juga menjanjikan jabatan wakil presiden kepada Letjen TNI (Purn.) Sarwo Edhie. Mengikuti jalan Adam Malik yang menjadi wakil presiden melalui jabatan Ketua DPR dan MPR, Sarwo Edhie juga dijanjikan untuk terlebih dahulu didudukkan sebagai pimpinan legislatif sebelum akhirnya menjadi wakil presiden. Berbeda dengan Harmoko, Sarwo Edhie kemudian terbukti tidak pernah

menjadi ketua DPR dan MPR. Tapi seperti Harmoko, mantan Komandan RPKAD itu juga tidak pernah sampai tercatat sebagai salah seorang wakil presiden. Meski nasibnya lebih baik dari Sarwo Edhie, Harmoko tetap saja kecewa berat. Konon kekecewaan itulah yang melatarbelakangi dan memberi semangat kepada Ketua DPR dan MPR itu untuk berani mendorong Soeharto mundur menjelang 21 Mei 1998.

KETIKA ABRI—SEJAK MASA KEPANGLIMAAN Moerdani—sudah secara berangsur menunjukkan sikap tidak ingin terus bergantung kepada Soeharto, sejak itu pula Bapak Presiden beralih mengandalkan orang-orang yang secara pribadi dianggapnya loyal dan bergantung padanya. Dalam kepemimpinan ABRI, keputusan Soeharto itu terlihat pada pengangkatan ke posisi strategis para mantan ajudan dan mantan pengawal seperti Subagio Hadisiswoyo, Sjafrie Sjamsoeddin, Dibyo Widodo, Hamami Nata, Soejono, Sugiyono; serta dari kalangan keluarga seperti Wismoyo Arismunandar dan Prabowo Subianto. Pokoknya semua yang secara pribadi dikenal Soeharto. Yang tidak dikenal Bapak Presiden nyaris sulit mendapat posisi strategis.

Jadi, mudah dimengerti jika Bapak Presiden marah kepada Harsudiono Hartas yang kemungkinan besar dinilainya sebagai operator Moerdani, Jenderal yang ditengarai Soeharto sebagai ancaman. Penjelasan yang masuk akal mengapa Bapak Presiden tidak menolak pencalonan mantan ajudannya yang “dipaksakan” ABRI kepadanya, Soeharto menghindarkan dari mata publik adanya keretakan antara dirinya dan ABRI. Sebenarnya sikap Soeharto yang demikian, lebih kurang sama dengan usaha Benny Moerdani, yang dengan canggih, dan untuk waktu lama, menyembunyikan kepada orang banyak kenyataan bahwa dirinya dan Soeharto sebenarnya sudah tidak akur. Kedua jenderal itu memang berasal dari Jawa Tengah. Mereka berdua tumbuh dalam budaya yang secara saksama melatih mereka menyembunyikan perasaan.

Menurut shahibul hikayat, kesalahan Hartas di mata Soeharto bukan hanya karena melanggar TAP MPR dan karena itu dianggap lancang. Lebih dari itu, Soeharto konon sudah lama hilang kepercayaan kepada Try Sutrisno. Soeharto yang merasa sudah berhasil menyingkirkan "orang-orang Benny Moerdani" di dalam ABRI kemudian menyadari, mantan ajudannya itu ternyata sudah berhasil dibina oleh Panglima yang digantikannya. Maka, tidak sulit menduga bahwa Soeharto waktu itu curiga Try Sutrisno adalah bagian dari gerakan para jenderal yang ingin mengambil kembali kekuasaan yang pada awal Orde Baru dipercayakan ABRI kepada Soeharto.

Meski bukan Panglima ABRI lagi, Moerdani yang terkenal cerdas, pada 1988 dalam kedudukan sebagai Pangkopkamtib masih memainkan peran besar dalam merumuskan kebijakan politik ABRI. Strategi para jenderal waktu itu adalah "merebut" kursi Wakil Presiden pada sidang MPR 1993 setelah sebelumnya gagal mencegah Sudharmono menduduki kursi orang kedua di pusat kekuasaan Indonesia pada sidang MPR 1988. Calon Moerdani sejak itu sudah jelas: Try Sutrisno.

Seperti kisah Moerdani sebelumnya, posisi Try di militer memang menanjak tajam karena Soeharto. Tapi ketika Soeharto sudah "memusuhi" Benny, Try justru malah makin dekat dengan mantan Pangab yang digantikannya. Sebagian penting staf di Mabes ABRI yang ditinggalkan Moerdani dipakai terus oleh Try Sutrisno. Para pengamat politik waktu itu pada umumnya cenderung melihat Benny Moerdani yang terus menguasai intel juga dipandang sebagai tetap "mengendalikan" Try Sutrisno. Contoh yang sering dikemukakan untuk membuktikan peranan penting Moerdani atas diri Try Sutrisno waktu itu adalah tetap duduknya Marsekal Muda TNI Teddy Rusdy pada jabatan Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) di Mabes ABRI, jauh setelah Benny pensiun.

Selama Moerdani menduduki kursi Pangab, Teddy Rusdy adalah Asrenum untuk waktu empat tahun. Pada masa dua tahun pertama kepanglimaan Try, Teddy yang merupakan orang keper-

cayaan Moerdani, bertahan pada jabatan penting tersebut. Padahal, kecuali jabatan Panglima ABRI, normalnya suatu jabatan diduduki seorang perwira tinggi untuk masa dua atau tiga tahun saja. Dalam buku biografi Teddy Rusdy, *Think Ahead*, yang ditulis oleh Servas Pandur, dikisahkan bahwa sebelum Teddy meninggalkan jabatan Asrenum, Presiden Soeharto sudah tiga kali mengingatkan Pangab Try Sutrisno untuk memberhentikan Teddy. Menurut cerita Try Sutrisno, desakan Soeharto itu selalu ditolaknya. Selain untuk barangkali menunjukkan independensinya terhadap Soeharto, Pangab tampaknya memang merasa sangat puas dengan pekerjaan Teddy. Tapi, Asrenum yang tahu keadaan sudah berubah, dan orang-orang Moerdani sudah pada disingkirkan, memutuskan meninggalkan posisinya dan sekaligus pensiun dini dari Angkatan Udara pada usia 53 tahun.

KEPADA SAYA, HARTAS MEMBANTAH kalau pencalonan Try merupakan pengaruh Moerdani. "Kalau sudah pensiun, tak akan perintahnya tetap kita ikuti." Tapi, pembelaan demikian tampaknya tidak mudah diterima Soeharto. Sebagai seorang jenderal dan politisi senior, Soeharto tahu bagaimana orang intel dan

Wapres Try Sutrisno, Presiden Soeharto, dan Widjojo Nitisastro
pada acara pelantikan Ketua BPK, 1993.

kemudian Panglima ABRI membangun basis kekuatan untuk mengembangkan dan melanggengkan kekuasaan. Kegiatan demikian telah dipraktikkan Bapak Presiden selama bertahun-tahun dengan hasil yang luar biasa.

Atas dasar pengalaman panjang yang disempurnakan oleh kecanggihan berpolitik yang begitu tinggi, alasan apa saja yang dikemukakan Hartas, tidak bakal diterima Soeharto. Di mata sang Presiden, dia telah "bersekongkol" dengan sesama Jenderal untuk mengalihkan kekuasaan dari Soeharto ke Markas Besar ABRI. Soeharto sangat marah. Akibatnya, Hartas yang tadinya dikabarkan akan menduduki kursi Menteri Dalam Negeri, akhirnya dipaksa untuk cukup puas berkantor di DPA saja.

Nah, sekarang tentang Try sebagai Wapres. Menarik untuk mengingat bahwa secara mencolok Soeharto mempertontonkan ketidaksenangan dan ketidakpercayaannya kepada wakilnya itu. Selama menjadi Wapres, Try Sutrisno tidak pernah dipercayai mewakili Indonesia pada acara-acara penting di dalam dan di luar negeri. Contoh mencolok, ketika Soeharto sedang sakit tatkala ada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur, yang ditunjuk mewakili Presiden adalah Menteri Luar Negeri Ali Alatas, bukan Wapres Try Sutrisno. Pengamatan ini dikoreksi oleh Try, "Saya mewakili Presiden ke Australia untuk membalas kunjungan Perdana Keating," katanya kepada saya. KTT ASEAN jelas jauh lebih penting dari sekadar acara protokoler membalas kunjungan Keating yang memang berkali-kali datang ke Indonesia. Satu sumber di kalangan intel mengisahkan kepada saya mengenai sering hilangnya file agenda Wapres yang mencatat siapa saja yang menjadi tamu Try Sutrisno dan apa saja pembicarannya. Dari file yang hilang, Soeharto ditengarai berusaha tahu lebih jauh Try Sutrisno berbicara apa kepada siapa.

Menangkal Hujan

Secara pribadi, saya sendiri baru kenal Try Sutrisno dari dekat pada tahun-tahun awal Reformasi. Orangnya sangat hangat, ber-

sahaja, dan rendah hati. Dan yang istimewa, kalau kita mengeluh sakit, beliau akan dengan spontan mengajarkan doa-doa untuk menetralisasi penyakit tersebut. Try bukan saja sanggup mengajarkan banyak doa, mantan Wapres itu, menurut seorang bekas Ajudan Presiden, juga punya ilmu menangkal hujan. Kebolehan demikian kabarnya pernah dipraktikkannya ketika Try bertugas sebagai Ajudan Presiden.

Dalam sebuah kunjungan kerja ke Jakarta sebagai Duta Besar, saya mengadakan kunjungan kehormatan kepada mantan Wapres itu di kediamannya yang sederhana di Jalan Purwakarta, daerah Menteng, Jakarta Pusat. Ketika staf di rumah jaga melaporkan ketibaan saya dan istri, mantan Pangab itu dengan segera bergerak membukakan pintu dan menerima tamunya dengan memberi hormat militer dalam sikap sempurna. Tidak banyak hal serius yang kita bicarakan, tapi saya berjanji akan datang lagi suatu kali sebagai peneliti peran politik tentara untuk melakukan wawancara dengan beliau. Tentu saja Pak Try berjanji akan menerima saya. Jenderal Try Sutrisno menepati janji dan saya mewawancarainya pada 3 Juli 2012. Ketika meninggalkan kediamannya pada kunjungan pertama dua tahun sebelumnya, kami dibekali buah jambu dari pohon yang tumbuh subur di halaman depan kediaman mantan Jenderal itu. "Manis, sekali," kata saya. Secara spontan kami dihadiahi setangkai pohon jambu yang telah dicangkok dalam sebuah pot kecil. Kami tanam pohon jambu yang masih kecil itu di halaman rumah Cipinang Muara. Tapi karena kami harus kembali ke Praha dan tidak ada yang mengurus tanaman di halaman, pohon jambu itu akhirnya gagal memberi kami buah manis, seperti yang kami nikmati di kediaman Pak Try Sutrisno hari itu.

Satu pertanyaan penting sempat saya tanyakan dan dijawab Try Sutrisno dalam kunjungan pertama tersebut. Bagaimana beliau melihat Jenderal Benny Moerdani? Jawabannya tidak singkat. Dimulai dengan sejarah perkenalan ketika mereka berdua masih remaja di Bandung. Benny sudah perwira berpangkat Letnan Dua, sementara Try masih taruna Akademi Teknik Angkatan

Darat (Atekad). Mereka jumpa kembali di satu lapangan terbang kecil di sebuah pulau yang menjadi salah satu pangkalan Operasi Trikora pada masa perjuangan pengembalian Irian Barat (sekarang Papua). Di sana Try sebagai perwira Zeni bertugas membangun landasan terbang, sedangkan Moerdani perwira Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang sedang bersiap-siap diterjunkan ke belantara Irian Barat.

BAGI TRY SUTRISNO hanya ada dua Jenderal Indonesia yang amat dihormatinya, Panglima Besar Sudirman dan Jenderal L.B. Moerdani. Tadinya saya kira nama Soeharto akan disebutkannya juga. Bukankah Soeharto telah mengangkatnya dari posisi Ajudan menjadi Panglima Kodam, KSAD, Panglima ABRI, dan akhirnya Wapres? Bukankah Presiden Soeharto telah menjadikannya Kepala Staf Angkatan Darat, padahal Try bukan berasal dari korp Infantri? Bukan cuma orang Zeni pertama yang menjadi KSAD, Try Sutrisno adalah perwira Zeni satu-satunya yang berhasil mencapai pangkat bintang empat dan menduduki jabatan Panglima tentara Indonesia. Kendati demikian, ternyata Soeharto tidak tergolong Jenderal Indonesia yang diidolakan Try Sutrisno.

Adapun Jenderal Harsudiono Hartas, kemarahannya kepada Soeharto tidak disembunyikannya kepada saya. "Pak Salim mau tahu siapa yang merusak ABRI?" Saya masih berpikir ketika Hartas menjawab sendiri pertanyaannya. Sambil menengok ke arah foto Presiden yang tergantung pada dinding kantornya di gedung DPA, Hartas berkata dengan nada tinggi, "Soeharto!"

YANG MEMBUAT KEDUDUKAN Try amat penting sebagai Pangab dan kemudian Wakil Presiden adalah karena perwira tinggi kelahiran Surabaya itu menjabat posisi sangat strategis tersebut pada saat orang sibuk "mengelus-elus jago", ketika usia Soeharto sudah beranjak sepuh. Dan karena Fraksi ABRI—sebagai salah satu kekuatan sospol—tentu para Jenderal di Mabes ABRI merasa berhak mengirimkan jagonya ke gelanggang. Yang mereka sepakati tentulah yang tersenior di antara mereka. Tadinya Moer-

dani yang mereka ingin promosikan. Moerdani menolak. Mantan Pangab itu menunjuk teman lamanya, Try Sutrisno. Disepakati oleh para Jenderal, nama Sutrisno yang diusung Harsudiono Hartas.

Bagaimanakah seharusnya kita membaca kejadian tersebut? Sulit bagi saya untuk tidak berkesimpulan bahwa dengan "memaksakan" Try menjadi Wapres tanpa konsultasi dengan Soeharto, yang dilakukan ABRI waktu itu sebenarnya adalah sebuah bentuk "pemberontakan" kepada Bapak Presiden. Tanda-tanda mulai "berontak" itu sebenarnya sudah terlihat ketika para Jenderal berusaha menolak Sudharmono menjadi Wapres. Bahkan, ada yang menyebut tahun 1978 sebagai awal munculnya sikap kritis ABRI kepada Soeharto. Dalam satu rapat para Jenderal, muncul sikap lain terhadap kebijakan pemerintah kepada para mahasiswa. Waktu itu sejumlah tokoh mahasiswa di tangkap setelah kampus ITB di Bandung diserang tentara. Adalah Jenderal Muhammad Jusuf, Menteri Perindustrian, yang tampil dengan bersemangat membela Soeharto pada rapat yang dihadiri banyak Jenderal itu. Tak lama kemudian, Jusuf diangkat menduduki jabatan Panglima ABRI.

Meski tahu keputusan Soeharto mempersiapkan Sudharmono, Moerdani ternyata masih tetap berusaha "menggelindingkan" nama Try Sutrisno sebagi calon Wapres pada sidang umum MPR tahun 1988 itu. Try mencium gelagat Benny yang terlihat sulit beranjak dari tekad awalnya. Sebelum sidang pemilihan Wapres dimulai, Try Sutrisno mencegat Moerdani di depan ruang sidang. Menurut biografi Try Sutrisno, *Pengabdian Tiada Akhir*, pada saat itu terjadilah adegan sebagai berikut:

> "Pak, sini Pak, ngomong dulu sebelum masuk."
> "Kenapa, Try?" tanya Benny heran.
> "Saya mau tanya, sekarang siapa lurahnya ABRI?"
> "Ya, kamu …," jawab Benny.
> "Nah, kalau saya … Pak Benny harus nurut saya. Nanti kalau sidang, jangan bikin ulah macam-macam. Jangan memunculkan nama calon Wapres baru."

Sebagai tentara yang taat disiplin, Moerdani mengikuti perintah Panglimanya. Inilah penjelasannya mengapa lima tahun kemudian, ketika ABRI "menggelindingkan" nama Try Sutrisno sebagai calon mereka untuk jabatan Wapres, yang sebenarnya dilakukan para Jenderal adalah "memaksakan" kehendak mereka kepada Soeharto sebagaimana yang digagas oleh Moerdani. Mereka tidak ingin gagal lagi mendudukkan wakil ABRI pada kursi Wapres. Untuk itulah mereka menghindari konsultasi dengan Soeharto, bahkan juga dengan Try Sutrisno. Jadi, yang "dipaksa" menerima kehendak dan keputusan para Jenderal bukan cuma Soeharto, melainkan juga Try Sutrisno.

Apakah ini berarti ABRI secara kelembagaan akan kembali memainkan peranan langsung dalam politik seperti pada awal Orde Baru? Pertanyaan ini menjadi amat menarik karena sejak lama para pengamat secara diam-diam sepakat berkesimpulan bahwa ABRI sudah digiring Soeharto ke arah lebih menekankan peranan militernya dan berangsur mengurangi peran politiknya. Waktu itu pelaksanaan Dwifungsi memang nyaris semuanya sudah dikendalikan Soeharto.

MOERDANI SEBAGAI PANGAB PADA MULANYA IKUT MENARI mengikuti irama gendang yang ditabuh Soeharto. Benny adalah Pangab yang mengubah kurikulum Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) yang tadinya sarat dengan kuliah nonmiliter, maksudnya sospol, menjadi lebih berkonsentrasi pada mata kuliah militer. Pengalaman operasi militer di Timor Timur yang kurang menyenangkan karena mutu tentara dan perencanaan yang tidak memadai sehingga banyak korban, ikut mendorong Moerdani lebih memiliterkan TNI.

Namun, dalam perjalanan kariernya sebagai Panglima, sikap Benny bersama para pimpinan ABRI kepada Soeharto kemudian berubah. Di mata para jenderal, Bapak Presiden secara perlahan makin lama makin lebih mengurus kepentingan diri, keluarga, dan kroninya daripada mengurus negara. Dari kontrolnya yang ketat atas ABRI, Moerdani dan para jenderal di sekitarnya ber-

angsur mengalihkan loyalitas mereka dari pribadi Soeharto ke lembaga ABRI. Bersama para pimpinan ABRI lainnya, Moerdani "bersepakat" untuk mengambil kembali kekuasaan yang pada awal Orde Baru mereka percayakan kepada Soeharto. Itulah latar belakang "dipaksakannya" Try Sutrisno menjadi Wakil Presiden.

Apakah Try kira-kira menyadari peran yang "dipaksakan" kepadanya oleh para koleganya sesama Jenderal? Kesan saya dari dua kali pertemuan dengan mantan Wapres tersebut, dia percaya jabatan Wapres didudukinya atas keputusan Bapak Presiden, tanpa campur tangan siapa-siapa. Yang menarik, Try Sutrisno juga sama sekali tidak percaya ada konflik antara Soeharto dan Moerdani. Ketidakpercayaan itu dengan teguh dipertahankan mantan Wapres itu meski saya telah berusaha meyakinkannya, cerita ketegangan antara Soeharto dan Moerdani adalah informasi yang saya dengar langsung dari mulut Jenderal Benny.

Salah Saya Apa?

Mengingat ketatnya kontrol Soeharto atas ABRI pasca-Benny tersingkir, dugaan saya waktu itu, tidak akan terjadi perubahan drastis ketika Try didudukkan pada kursi Pangab. Tapi, dengan berlatar belakang rencana para Jenderal mengambil kembali kekuasaan setelah Soeharto tidak di singgasana kekuasaan lagi, mereka kemudian memulai langkah dengan mendorong Sutrisno duduk di samping penguasa tertinggi Indonesia. Dengan demikian, ABRI jelas merencanakan berkuasa kembali ketika Soeharto meninggalkan kursi kepresidenan.

Di kemudian hari terbukti bahwa Soeharto memang tidak ingin lagi digantikan oleh seorang tentara. Rencana Soeharto adalah "mengembalikan ABRI ke tangsi". Tapi ini bukan karena sang Presiden merencanakan membangun suatu Indonesia yang demokratis, dengan kedaulatan di tangan rakyat lewat pemilihan umum yang betul-betul bebas dan rahasia. Soeharto punya rencana lain. Memang diperlukan waktu cukup lama untuk menyadari, Pangkostrad pertama itu dalam proses mempersiapkan

pembangunan sebuah dinasti. Tanda-tanda nyata ke arah itu mulai tampak ketika putri sulungnya, Siti Hardianti Rukmana (Mbak Tutut) secara mencolok menjadi orang penting dalam Golkar, bahkan kemudian menjadi Menteri dalam kabinet terakhir ayahandanya. Seandainya saja Reformasi terlambat beberapa tahun, hampir bisa dipastikan Tutut akan menjadi Ketua Umum Golkar, menggantikan Harmoko. Dari posisi ketua "organisasi politik terbesar" itulah, putri sulung Bapak Soeharto akan menggantikan ayahandanya yang akan mengundurkan diri dengan alasan sudah amat sepuh (*lengser keprabon madek pandito*).

Skenario Soeharto ini tampaknya disadari Moerdani dan Hartas serta para Jenderal lainnya. Karena itu, Try Sutrisno mereka "paksakan" naik menduduki kursi Wakil Presiden untuk berjaga-jaga agar ABRI siap menguasai kembali Indonesia jika terjadi sesuatu pada diri Soeharto yang memang sudah sakit-sakitan waktu itu. Sebagai politisi yang canggih, Soeharto niscaya mencium rencana para Jenderalnya tersebut.

Rencana Soeharto membangun dinasti itu mungkin juga sudah mulai tercium oleh para Jenderal ketika Sudharmono menduduki kursi Ketua Umum Golkar. Seperti kita ketahui, tugas terpenting Sudharmono sebagai pemimpin Golkar adalah menyipilkan para pimpinan kelompok politik terbesar itu sembari secara berangsur mengurangi ketergantungan Golkar kepada ABRI. Sudharmono mendapat perlawanan keras dari para Jenderal waktu itu. Apakah para Jenderal sudah curiga terhadap pengangkatan Sudharmono menjadi Ketua Umum Golkar dan kemudian Wakil Presiden sebagai salah satu bagian dari langkah awal Soeharto dalam perjalanan ke arah pembangunan dinasti?

KEMUDIAN, TERNYATA TIDAK TERJADI SESUATU selama Try menjabat Wapres. Soeharto memang pernah dikabarkan sakit, tapi tetap masih mampu mengendalikan kekuasaannya. Sampai berakhirnya masa jabatan Try, Soeharto tetap mengontrol keadaan. Try kehilangan kesempatan menggantikan Soeharto. Krisis moneter yang dahsyat mendadak menerpa ketika Dr. B.J.

Habibie menjadi Wapres. Sejarah kemudian mencatat bahwa bukan ABRI dan bukan turunan Soeharto yang menjadi Presiden. Habibie yang tadinya mungkin direncanakan hanya sebagai semacam "pejabat penghangat kursi" dalam kedudukan Wapres, malah jadi Presiden mendadak. Meski untuk waktu sekitar 500 hari saja.

Jauh setelah Soeharto terpaksa mundur, ketika mantan Presiden yang berkuasa paling lama itu sakit menjelang akhir hidupnya, B.J. Habibie heran dia ditolak menengok mantan atasannya. "Saya salah apa?" tanya Habibie kepada hampir setiap orang yang membicarakan hubungan buruknya dengan mantan atasannya. Dari A.M. Fatwa—yang jumpa Tutut di rumah sakit ketika Soeharto dirawat—Habibie tahu bahwa oleh keluarga Soeharto dia dianggap pengkhianat. Soalnya dia tidak solider dan ikut mundur bersama orang yang diakuinya sebagai Guru Besarnya. "Menurut Saudara, mengapa Pak Harto memusuhi saya? Tidak mau menemui saya?" tanya Habibie kepada saya pada suatu hari pada tahun 2011. Jawab saya: "Soeharto sudah merasa gagal. Rencananya membangun dinasti berantakan. Anda sebagai 'bagian dari keluarganya' diharapkan solider mundur bersamanya. Tapi, Anda ternyata memilih bertahan."

Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya.

Meski berkali-kali mengaku dan mengumumkan dirinya sebagai murid “Profesor Soeharto”, Habibie ternyata masih tetap seorang modern hasil didikan Barat. Sebagai orang rasional, doktor lulusan Jerman itu lebih memilih menghormati konstitusi (Pasal 8 UUD 45) daripada loyal buta kepada Soeharto. Dalam hal ini, sikap Habibie terhadap Soeharto sebenarnya lebih kurang sama dengan sikap Moerdani yang mengalihkan loyalitasnya dari Soeharto pribadi kepada lembaga ABRI. Bagi Moerdani pada akhirnya, keselamatan negara lebih penting daripada sekadar keselamatan Soeharto. Akibatnya, kedua tokoh ini mendapat “hukuman” dari Soeharto. Benny dicopot mendadak dari jabatan Pangab, sedangkan Habibie ditolak berjumpa mantan “Profesornya” hingga akhir hayat Haji Mohammad Soeharto.

DALAM KEADAAN KRISIS pasca-Soeharto, ABRI ternyata sudah tidak cukup punya pemimpin yang berani, bersemangat, dan yakin bisa mendapat dukungan publik dalam melanjutkan kepemimpinan nasional. Ini adalah akibat kebijakan Soeharto memecah belah ABRI. Terutama setelah menyingkirkan Benny Moerdani. ABRI pasca-Moerdani adalah tentara yang dibikin makin tidak bersatu. ABRI atau tentara yang kompak di mana-mana memang merupakan potensi ancaman utama kepada kepemimpinan otoriter.

Di bawah Panglima Moerdani, dengan menggunakan kekuasaannya atas jaringan intelijen, Benny berhasil mempersatukan dan mengontrol ABRI. Kekuatan Moerdani berdasarkan kontrolnya atas ABRI ternyata kemudian dilihat sebagai ancaman oleh Soeharto. Sejak Benny disingkirkan dan para pengikutnya dibersihkan dari sejumlah posisi penting dalam tubuh tentara, maka praktis Soeharto-lah yang menjadi Panglima ABRI.

Cara Soeharto mengontrol tentara dan politik adalah mengusahakan dengan saksama agar mereka yang ada di bawahnya sedapat mungkin tidak akur satu dengan yang lainnya. Inilah alasan saya untuk selalu mengatakan bahwa ABRI adalah korban tragis Orde Baru. Mendirikan Orde Baru dan resminya berkuasa ser-

ta kelihatan utuh, nyatanya ABRI tidak kompak dan praktiknya hanya jadi alat Soeharto, keluarga, dan kroninya.

Tidak punya pilihan lain, ABRI yang tampil mendukung proses konstitusional peralihan kekuasaan pada 21 Mei 1998, pada April 2000, secara resmi dan atas kehendak sendiri meninggalkan Dwifungsi. Tapi seandainya kita mau jujur, maka ketika TNI secara resmi meninggalkan Dwifungsi, yang sebenarnya terjadi adalah meresmikan (*de jure*) apa yang sudah lama merupakan kenyataan (*de facto*).[]

Menyiapkan Tutut Mengganti Soeharto

Pada suatu hari di pekan pertama bulan Agustus 1997, atas bantuan Kasospol ABRI, Letjen TNI Syarwan Hamid, saya bisa mewawancarai Jenderal TNI Feisal Tanjung, Panglima ABRI waktu itu. Wawancara tersebut adalah bagian dari kegiatan saya mengumpulkan bahan untuk penulisan sebuah makalah mengenai hubungan Presiden Soeharto dan ABRI masa pasca-Benny Moerdani dan Try Sutrisno. Yang menarik adalah bahwa pada akhir wawancara itu, Jenderal Feisal bertanya, "Menurut Pak Said, ke mana arah Mbak Tutut?"

Saya tidak langsung menjawabnya. Wawancara itu adalah perjumpaan pertama saya dengan Jenderal Feisal, jadi saya belum begitu paham gelombangnya. Tapi, kemudian atas nasihat Letjen TNI Syarwan Hamid dan Letjen TNI Zaini A. Maulani, saya menjawab pertanyaan Jenderal Feisal lewat sebuah analisis tertulis. Analisis tersebut bisa Anda baca sekarang sebagai yang tercantum di bawah ini. Pada waktu ditulis dulu sifatnya sangat confidential. *Tapi yang jelas pada waktu itu, saya telah dengan yakin mengatakan bahwa Soeharto sedang mempersiapkan putrinya, Siti Hardianti Indra Rukmana (Tutut), untuk kelak menggantikan ayahandanya.*

Soeharto ditemani Tutut memeriksa hasil kerajinan rakyat.

Di kemudian hari, yakni pada sidang Badan Pekerja-MPR (BP-MPR) 1997/1998, saya dan Prof. Dr. Ryaas Rasyid diangkat menjadi penasihat Fraksi Golkar dalam BP-MPR tersebut. Menurut Ryaas, adalah Tutut yang meminta kami berdua. Saya sendiri sudah lupa siapa yang menghubungi saya waktu itu. Ketua Fraksi Golkar adalah Tutut. Luar biasa berkuasanya. Sebaliknya juga, luar biasa takzimnya anggota Fraksi Golkar kepada pimpinan mereka. Lucunya, justru dalam situasi demikian saya bisa berbuat banyak dalam menyarankan koreksi dan perubahan draf GBHN yang dibahas dalam rapat-rapat BP-MPR tersebut. Saya duduk di samping sang Ketua Fraksi, sehingga cukup banyak usul saya yang berhasil dia adopsi. Padahal, ketika gagasan perubahan saya sampaikan kepada sejumlah anggota fraksi, mereka semua enggan menyampaikannya kepada Ibu Ketua. Kesan saya mereka semua takut.

Ryaas Rasyid tidak begitu aktif. Kesan saya, dia risi melihat permainan politik tersebut. Saya, sebaliknya, bersemangat dan selalu hadir di sidang maupun pertemuan di markas Fraksi di Kebayoran Baru. "Sebagai wartawan dan pemerhati politik, ini kesempatan buat saya melihat proses politik dari dalam," kata saya kepada Ryaas. Pengalaman berada di sekitar Tutut selama beberapa hari itu makin meyakinkan saya bahwa putri sulung sang Presiden sedang dalam proses berjalan ke tempat tertinggi Golkar sebagai bagian dari usaha sang Bapak menyiapkan putrinya menduduki jabatan tertinggi di Indonesia. Langkah pertama ke arah puncak kekuasaan itu adalah menjadi anggota kabinet. "Anda lihat nanti dalam kabinet mendatang, Tutut akan jadi Menteri Sosial atau Urusan Wanita," kata saya kepada Ryaas. Ramalan saya tidak meleset. Tutut jadi Menteri Sosial pada kabinet terakhir Presiden Soeharto.

Tutut dan anaknya menyambut kepulangan Pak Harto dari perjalanan ke luar negeri.

Saya juga meramalkan, lewat Musyawarah Nasional (Munas) Golkar setelah sidang MPR, Tutut akan jadi ketua umum menggantikan Harmoko. Ramalan ini tidak jadi kenyataan karena Reformasi, secara mendadak dan tak terduga, telah menggusur kekuasaan Soeharto. Seandainya tidak terjadi Reformasi, maka menjelang, atau bahkan sebelum, sidang MPR lima tahun berikutnya Soeharto akan melengserkan diri dan mengarahkan agar penggantinya adalah pimpinan partai atau golongan politik yang paling besar pendukungnya. Pada saat itu putri tertuanya, Tutut, sudah dengan kukuh menduduki jabatan ketua umum Golkar. Jadilah putri sulung itu pewaris kekuasaan ayahandanya.

Anak Kecil yang "Mengganggu"

Pada masa penyusunan anggota MPR 1993-1998 dan pembentukan kabinet selepas sidang tersebut, B.J. Habibie memainkan peranan yang amat besar. Salah satu hasil peranan Habibie itulah yang secara sinis dulu ditanggapi oleh sebuah harian ibu kota sebagai "ijo loyo-loyo". Kemudian terbukti bahwa orang-orang pilihan Habibie dalam kabinet (Wardiman, Haryanto Danutirto, dan Billy Yudhono) bagi Presiden Soeharto kurang memenuhi persyaratan untuk kedudukan mereka. Beberapa di antara mereka bahkan ditengarai Soeharto sebagai mempunyai agenda politik sendiri.

Yang terakhir ini—mempunyai agenda politik sendiri—tentu saja membuat kesal Presiden Soeharto. Tidak sulit dimengerti bahwa bagi Soeharto yang boleh punya agenda politik hanya Bapak Presiden, Pangti ABRI, dan Mandataris MPR. Dan orang itu adalah Soeharto. Habibie, dan siapa saja yang diangkat olehnya (termasuk para pimpinan ABRI) hanya pelaksana agenda dan rencana-rencana politik Bapak Presiden. Inilah latar belakang mengapa Habibie tidak lagi memainkan peranan sebagai *political recruiter*. "Habibie terkenal dan dikenal oleh orang banyak, tapi Habibie tidak kenal orang," begitu konon keluhan Soeharto mengenai B.J. Habibie.

Soeharto memancing bersama B.J. Habibie dan Kanselir Jerman Barat, Helmut Kohl, di Teluk Jakarta.

Penjelasan tambahan, kendati tidak kurang penting, terhadap tergesernya Habibie sebagai *political recruiter* adalah ketidakpekaan Habibie kepada peranan politik Tutut. Tampaknya Habibie masih melihat Tutut sebagai anak kecil yang dikenalnya ketika Menristek itu baru saja pulang dari Jerman (1974). Habibie barangkali melihat dirinya sebagai salah seorang "anak" Soeharto yang akan melanjutkan *legacy* (warisan kekuasaan dan format politik) Soeharto kelak, dan karena itu melihat Tutut hanya sebagai anak kecil yang "mengganggu".

Karena tidak mengerti peranan politik yang digariskan dan diproyeksikan Soeharto untuk putri sulungnya (kegiatan Tutut dalam Golkar, sebagai salah satu contohnya) atau barangkali juga karena menganggap enteng Tutut, Habibie tidak sempat menyadari posisi serta kebolehan putri sulung sang Presiden dalam mewarisi kecanggihan berpolitik bapaknya.

ABRI dan Hari Depan Politik Indonesia

Bagi yang mengamati tingkah laku politik Soeharto akhir-akhir ini sulit menghindari kesan bahwa yang mempunyai peluang besar menggantikan Soeharto adalah Tutut. Dalam rangka itulah, orang harus melihat langkah-langkah Pak Harto mendorong putri su-

lungnya terlibat dalam kepemimpinan Golkar. Bisa dikatakan bahwa lewat Golkar, Tutut "dilatih menjadi pemimpin" dalam rangka mempersiapkannya menjadi pengganti ayahandanya. Sekarang Tutut adalah hanya salah satu ketua, tapi tahun depan hampir pasti, lewat Munas, dia akan menjadi Ketua Umum Golkar.

Tutut memimpin apel barisan Kirab Pemuda.

Sebagai bagian dan langkah awal dalam perjalanannya ke puncak kekuasaan pada masa pasca-Soeharto, dalam penyusunan pimpinan ABRI pun kabarnya perlahan-lahan Tutut ikut berperan, meski sekarang kontrol ayahandanya masih cukup ketat. Lewat kontrol ketat itulah kelihatannya mantan Pangkostrad itu menempatkan pada posisi kunci para perwira yang diperhitungkannya tidak akan menimbulkan soal terhadap perjalanan kepemimpinan Tutut ke puncak piramida kekuasaan Indonesia. Dalam rangka inilah juga, orang banyak harus mengerti pidato Soeharto di depan ulang tahun Golkar Oktober 1997 lalu. Lewat pidato itu untuk pertama kalinya Presiden Soeharto mengungkapkan kemungkinan suksesi yang masih memberikan tempat (sebagai pandito) kepada pemimpin yang mengundurkan diri. Konsep "kependetaan" ini mengingatkan kita kepada peran Lee Kuan Yew sebagai Menteri Senior di Singapura setelah meninggalkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.

Belajar dari pengalaman pahit memercayai hanya satu orang (L.B. Moerdani) dengan memberinya kekuasaan yang begitu besar, komposisi pimpinan ABRI sekarang diatur Soeharto sedemikian rupa, sehingga tidak ada jenderal yang dominan. Dengan cara ini tidak akan ada lagi orang seperti L.B. Moerdani yang sangat berkuasa dan mengontrol ABRI secara ketat sehingga bisa menjadikan lembaga militer itu basis kekuatannya sendiri.

Jenderal Hartono

Posisi Jenderal TNI Raden Hartono unik. Presiden Soeharto melihatnya sebagai seorang yang loyal dan berani, tapi juga seorang santri yang tak menyembunyikan keislamannya. Soeharto tentu tidak pernah lupa keberanian Hartono, waktu itu Pangdam Brawijaya, menolak perintah Pangab, Jenderal Try Sutrisno, yang melarangnya membantu ICMI yang didirikan di Malang. Inilah konon latar belakang bakal didorongnya Jenderal Hartono masuk ke ICMI. Menurut perkiraan beberapa pengurus ICMI, dalam waktu dekat—setelah pensiun—Hartono mungkin akan menggantikan Habibie sebagai Ketua ICMI. Dengan Hartono sebagai pemimpin ICMI, Pak Harto jelas ingin mantan KSAD itu mewarnai ICMI agar bisa tetap berada dalam *grand strategi* sang Presiden. Strategi seperti ini sejak awal dijalankan Soeharto, itu sebabnya Habibie yang jadi ketua ICMI dan sebagian besar pembesar ICMI adalah anggota Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia).

Menguasai dan mengontrol ICMI bukan pekerjaan yang mudah, karena sejak kebangkitan Islam di Indonesia pada permulaan abad ke-20, Islam memang tidak pernah bersatu. Perbedaan, bahkan pertentangan antara kubu tradisional melawan kubu modernis mempunyai sifat mendasar. Tapi, R. Hartono sebagai Jenderal TNI, dan santri, berada dalam posisi yang unik dan kuat bagi kemungkinan—dengan dukungan Soeharto, tentu saja—menjadi pemimpin politik Islam Orde Baru. Posisi demikian memang belum pernah ada selama ini di Indonesia. Sampai saat sekarang yang ada adalah hanya pimpinan kaum modernis atau kaum tradisional. Amien Rais (Muhammadiyah) paling-paling hanya didukung oleh kaum modernis, sedangkan Abdurrahman Wahid terutama hanya didukung jamaah NU.

Sementara itu, peranan Islam—sebagai mayoritas—amat penting dalam masa transisi pasca-Soeharto kelak. Pada saat itu nanti hanya ada dua kekuatan besar, ABRI yang terorganisasikan dengan rapi, dan Islam yang tidak terorganisasikan (kecuali kalau R. Hartono, buat sementara lewat ICMI, berhasil menjadi pemim-

pin politik Islam yang bersatu). Harus disadari bahwa tidak ada jaminan pada masa transisi pasca-Soeharto, ABRI bisa kompak, bersatu, dan siap secara utuh mengambil alih kontrol negeri ini. Kebijakan Soeharto yang menghindarkan adanya pemimpin ABRI yang kuat seperti Moerdani, telah berhasil membuat lembaga militer itu seluruhnya dikontrol Soeharto lewat sejumlah perwira kepercayaannya.

Para perwira itu tidak selalu akur antara yang satu dan yang lainnya. Ini adalah akibat rekayasa Soeharto. Dalam keadaan demikian, Tutut sebagai pemimpin memerlukan tambahan dukungan dari luar ABRI. Di sana Hartono sebagai pemimpin Islam tampaknya diharapkan Presiden Soeharto bisa menjadi pemain penting. Yang menguntungkan bagi konstalasi politik jika Islam politik dipimpin oleh R. Hartono adalah, kecurigaan dari dalam ABRI kepada Islam kemungkinan besar bisa minim, sebab mereka tahu Jenderal R. Hartono adalah salah seorang dari kalangan mereka juga. Lebih jauh dari itu adalah lebih menguntungkan bagi ABRI jika yang menjadi pemimpin Islam adalah mantan KSAD daripada orang yang mereka tidak tahu tujuan dan konsepsi politiknya. Mungkin begitulah jalan pikiran Bapak Presiden.

Namun, jika kita berbicara dari segi politik, seandainya pada masa transisi pasca-Soeharto ternyata ABRI yang menang mutlak (suatu hal yang tampaknya hampir mustahil) dalam kontes kekuasaan, bukan tidak mungkin akan terjadi perseteruan antara ABRI melawan umat Islam. Hal seperti ini dulu kita alami pada masa awal pemerintahan Orde Baru dan masa L.B. Moerdani masih berkuasa. Keadaan seperti ini dimungkinkan terjadi kalau keduanya tidak bisa menemukan modus kerja sama. Dalam keadaan demikian, ABRI tentu akan mendapat dukungan kaum sekuler dan golongan non-Muslim yang sekarang ini bersatu dalam kelompok yang dikenal sebagai *Rainbow Coalition* (Koalisi berbagai golongan anti-Soeharto). Akibatnya, atau Islam akan terpuruk kembali menjadi golongan yang selalu dicurigai, atau terjadi konflik politik berkepanjangan seperti di Turki akhir-akhir ini. Ini suatu keadaan yang pasti akan terus mengganggu stabilitas politik.

Sebagai mantan KSAD, peranan politik Hartono hanya akan berhasil jika ABRI menyadari pentingnya skenario politik yang akan dimainkan R. Hartono sebagai yang direncanakan Soeharto. Skenario politik ini juga barangkali merupakan jalan satu-satunya yang tersedia bagi ABRI dan Tutut untuk memasuki masa pasca-Soeharto tanpa gonjang-ganjing politik yang pada akhirnya hanya akan memperhadapkan militer dengan sipil di satu pihak, dan pembersihan (*purge*) berkepanjangan di dalam tubuh ABRI sendiri, di pihak lain. Yang terakhir ini, pembersihan, kita alami pada masa pasca-Gestapu dengan korban yang cukup banyak.

Dengan terciptanya hubungan kemitraan antara Islam dan ABRI, maka kedua kekuatan utama ini diharapkan oleh Bapak Presiden menjadi soko guru pendukung kepemimpinan Tutut, sebagai pelanjut kekuasaan ayahandanya. Gus Dur tampaknya mengerti strategi Soeharto ini dan menyediakan diri menuntun Tutut berkunjung ke berbagai pondok pesantren.

Dengan strategi politik seperti ini, tampaknya Soeharto berharap mencapai beberapa tujuan sekaligus: Presiden Soeharto merasa aman (ancaman terhadap kepentingan politik dan bisnis keluarganya terhindarkan), gejolak politik pasca-Soeharto bisa dihindari (stabilitas politik dan ekonomi bisa dipelihara), peranan politik ABRI (dengan cara yang lebih canggih, meski terbatas) juga tetap bisa berlangsung. Di atas stabilitas politik seperti itulah, menurut ramalan saya, Presiden Soeharto mengharapkan putrinya kelak bertakhta.[]

"Saya Akan Kembali ke Induk Saya."

Sebagai mahasiswa program doktor pada Ohio State University (OSU), pada Oktober dan November 1984 saya berada di Tanah Air mengumpulkan bahan bagi penulisan disertasi saya. Selain harus ke sebuah perpustakaan di Yogyakarta yang menyimpan koran-koran Yogyakarta terbitan zaman Revolusi, saya juga harus mencari bahan di Arsip Nasional, Jalan Ampera Raya, di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Yang tidak kurang penting adalah mewawancarai sejumlah besar mantan jenderal yang berperan pada masa Revolusi dahulu. Paling penting tentulah Jenderal A.H. Nasution, Jenderal T.B. Simatupang di samping Jenderal Soeharto, Jenderal Kemal Idris, Jenderal Suprayogi, Jenderal Azis Saleh, Jenderal Sumitro, dan banyak lagi lainnya. Karena waktu itu Jenderal Benny Moerdani berkedudukan sebagai Panglima ABRI, maka dia juga saya wawancarai.

Sejumlah politisi yang berperan pada masa itu juga saya mintai keterangan. Mohammad Natsir yang menjabat Menteri Penerangan pada masa Peristiwa 3 Juli 1946 juga berhasil saya wawancarai. Subadio Sastrosatomo dan Dayino, keduanya orang dekat Sutan Syahrir, juga saya datangi. Demikian juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang bertahan di Keraton ketika Yogyakarta diduduki Belanda. Pokoknya semua yang bisa menolong saya merekonstruksi cerita hubungan sipil dengan militer dan peranan Panglima Besar Sudirman waktu itu, saya wawancarai. Tentu termasuk pula Jenderal Supardjo Rustam, ajudan Panglima Besar yang sedang menduduki posisi Menteri Dalam Negeri ketika saya mengumpulkan bahan. Tidak ketinggalan Harsono Cokroaminoto yang pernah menjadi penasihat Panglima Besar.

Berbeda dengan ketakutan saya sebelumnya, ternyata tidak sulit mendapatkan keterangan dari para pelaku sejarah tersebut. Bahkan, beberapa di antara mereka bercerita lebih panjang daripada yang saya butuhkan. Mereka seperti ketakutan, pengalaman masa lalu mereka akan hilang begitu saja tak tercatat dan dilupakan. Dari semua janji wawancara yang sudah saya dapat, yang tidak berhasil saya temui langsung adalah Jenderal Soeharto, Presiden pada waktu itu. Kegagalan jumpa disebabkan terjadinya kecelakaan motor boat yang menimpa putra bungsunya, Hutomo Mandala Putra (Tommy). Tapi, Pak Harto mengirim pesan agar saya menyampaikan saja pertanyaan tertulis.

Jawaban terketik rapi yang saya terima dari pejabat Sekretariat Negara (Sekneg) bagian media massa, Brigjen TNI Gufron Dwipayana (Dipo), jelas sekali bersumber pada jawaban lisan yang direkam dan ditranskripsi dengan setia dari ucapan Bapak Presiden. Jawaban itu penting (mengenai Letkol Soeharto sebagai utusan Panglima Besar Sudirman jumpa Muso di Madiun pada awal peristiwa Pemberontakan Komunis di Madiun). Sayang tidak bisa saya kutip verbatim karena bahasanya amat rumit. Pokoknya saya mengerti maksudnya, itu yang penting.

G.P.H. Djatikusumo ketika masih Kolonel.

Yang paling menarik dari semua pengalaman mendapatkan informasi para mantan jenderal pejuang itu adalah wawancara dengan Letjen TNI (Purn.) G.P.H. Djatikusumo. Ketika mencoba membuat janji lewat telepon tentang maksud dan topik wawancara, Jenderal Djatikusumo sudah langsung saja mem-

beri penjelasan. "Begini, ya, Saudara, TNI itu organisasi perjuangan. Berbeda dengan ABRI. Kalau ABRI itu alat negara. Saya ini sudah pensiun dari ABRI, tapi tetap anggota TNI. Ini penjelasannya mengapa saya masih ikut memikirkan TNI, ikut bicara mengenai peran politik TNI, berbicara mengenai TNI sebagai milik seluruh rakyat dan bukan milik golongan tertentu." Saya tidak bisa memotong beliau yang terus bicara bersemangat tentang TNI dan aktivitas beliau sebagai anggota TNI yang "tidak akan pernah pensiun".

Akibatnya ... saya tidak pernah berhasil bertatap muka dengan Jenderal Djatikusumo, karena sampai beliau selesai melakukan monolog, saya tidak pernah sempat membicarakan waktu dan tempat untuk jumpa. Tapi, pesan dari cerita dan pengalaman saya dengan Jenderal Djati ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting, suatu hal yang lewat berbagai cara saya dapatkan juga dari hampir semua perwira TNI generasi awal itu.

Mewarnai dengan Kental

Penjelasan Jenderal Djatikusumo mengandung persepsi generasi Angkatan 45 dalam militer Indonesia terhadap TNI dan masyarakat sekaligus. Bagi tentara dari generasi itu, TNI adalah segala-segalanya. "TNI semua bisa", adalah ucapan populer di kalangan perwira itu ketika secara resmi TNI mendapat peran politik menjelang akhir tahun lima puluhan. Pada 1984, Jenderal L.B. Moerdani pernah mengatakan kepada saya, "Dari perwira TNI Generasi 45 kita bisa dapat apa saja, dari lurah hingga presiden." Moerdani membedakan antara tentara Generasi 45 dan mereka yang lulusan Akademi Militer pasca-Revolusi. Yang terakhir ini disebut Benny sebagai "*peace time army*", tentara masa damai. Moerdani dipandang dan memandang dirinya sebagai penghubung dua generasi TNI itu.

Sebagai organisasi perjuangan yang menggunakan senjata, TNI bagi mereka adalah kelompok yang konsisten berjuang mempertahankan Indonesia dengan loyalitas tunggal. Suatu hal yang

pada zaman Revolusi, masa muda mereka, berbeda dengan partai politik dengan macam-macam ideologi dan kepentingan waktu itu. Bagi generasi ini, TNI adalah juga organisasi perjuangan yang tidak kenal menyerah dan memang tidak menyerah meski Panglima Tertingginya, Sukarno, seorang sipil, menyerah kepada tentara Belanda di Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Pengalaman melihat pimpinan sipil menyerah sementara mereka masuk hutan bergerilya mewarnai dengan kental sikap dan cara pandang tentara generasi itu kepada politisi sipil.

Ikatan mereka dengan TNI pasti jauh lebih fanatik daripada ikatan yang sama antara mereka yang berjuang dalam partai politik dan partai mereka masing-masing. Bagi mereka, TNI adalah *the only game in town.* Inilah latar belakang mengapa Djatikusumo aktif dalam Forum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat (Fosko) pada masa Angkatan Darat berada di bawah pimpinan Jenderal TNI Widodo, lama setelah Jenderal Djati pensiun dari dinas militer. Kegiatan Fosko tidak mudah dicegah oleh KSAD. Dengan cara pandang dan dasar pemikiran yang sama, sebagai pejuang, sejumlah mantan perwira TNI juga ikut menjadi penanda tangan Petisi 50. Fosko merupakan lembaga yang dimanfaatkan oleh para purnawirawan Angkatan Darat untuk terus memberi masukan dan koreksi kepada Presiden Soeharto, sesama anggota TNI. Sang Presiden tampaknya lama-kelamaan capek menghadapi "kerewelan" teman-teman segenerasinya. Soeharto akhirnya memerintahkan pembubaran Fosko. Dan salah satu akibatnya, usia jabatan KSAD Jenderal Widodo menjadi pendek. Adapun para penanda tangan Petisi 50, lewat tangan Pangkopkamtib Sudomo, mereka "dibunuh secara perdata".

Sebagai ilustrasi guna memperjelas cara pandang TNI terhadap diri serta tempat mereka dalam masyarakat, berikut ini pengalaman saya dengan Mayjen TNI (Purn.) Slamet Danusudirjo. Pernah menduduki macam-macam jabatan sipil di lingkungan pemerintahan, setelah pensiun Slamet sibuk menulis novel. Sebagai bukan sastrawan profesional, novel yang ditulisnya dengan nama samaran Pandir Kelana, tidak jelek. Jenderal yang novelis ini me-

mang hanya menulis tentang pengalamannya selama masa Revolusi. Dia kenal baik tokoh-tokohnya, lingkungannya, dan persoalan-persoalannya. Karena sumber cerita hanya pengalaman konkretnya, maka suatu kali tidak ada lagi yang masih tersisa untuk diceritakannya. Peran dan kegiatannya sebagai novelis berakhir begitu saja. Ini berbeda dengan "keanggotaannya" dalam TNI.

Yang menarik, meski beberapa novelnya sempat difilmkan (tidak semua penulis beruntung mendapat honor dari penjualan hak film dari novelnya), Jenderal Slamet tidak pernah merasa sebagai sastrawan. Kepada saya, dia pernah mengaku menolak hadir dalam sebuah pertemuan para sastrawan. "Saya ini tentara yang menulis pengalaman zaman perang saja," katanya. Suatu kali Jenderal Slamet diminta jadi Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Tentu salah satu alasan meminta beliau menjadi kepala sekolah para seniman tersebut adalah karena selain kewibawaan beliau sebagai jenderal diharapkan membantu lebih menegakkan disiplin pada sebuah sekolah seni (pada umumnya seniman memang sulit diajak disiplin), Jenderal Slamet juga seniman (pengarang novel). Ringkas cerita, IKJ diurusnya dengan baik. Dia cukup tahu bahwa seniman tidak bisa diatur seperti tentara. Dan sampai beliau pensiun semua berjalan lancar-lancar saja di IKJ.

Mayjen TNI (Purn.) Slamet Danusudirdjo.

Nah, beberapa saat setelah pensiun sebagai kepala sekolah para seniman itulah, saya jumpa Pak Slamet di Taman Ismail Mar-

zuki. Waktu itu saya dipercayai menduduki posisi Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) yang berkantor di kompleks yang sama dengan IKJ. "Apa rencana berikutnya, Pak Slamet?" Jawabnya singkat, "Saya akan kembali ke induk saya." Anda tahu apa yang dimaksud Pak Slamet dengan "induk"? Yah, TNI Angkatan Darat. Persis sama dengan Djatikusumo yang pensiun dari ABRI, tapi tetap merasa anggota aktif TNI.

YANG MENJADI PERTANYAAN dalam kepala saya waktu itu, ke bagian mana di Angkatan Darat Jenderal Slamet kiranya membayangkan dirinya akan kembali? Kalau gambarannya tentang Angkatan Darat itu adalah organisasi perjuangan, keadaan sudah lama berubah. Waktu Jenderal Slamet pensiun dari IKJ, penanggalan sudah menunjukkan penghujung tahun sembilan puluhan. Masa itu TNI sudah nyaris sempurna menjadi alat kekuasaan Presiden Soeharto. Pada 1984 ketika Djatikusumo menyebut TNI organisasi perjuangan, "perlawanan" masih mungkin terdengar dari suara para anggota "organisasi perjuangan" tersebut. Dalam bentuk Fosko, misalnya. Tapi, menjelang tahun sembilan puluhan?

Saya tidak pernah jumpa lagi dengan Jenderal Slamet sejak beliau pensiun dari IKJ. Jadi, saya tidak tahu bagaimana jadinya dengan rencana beliau kembali ke "induk"-nya. Sebagai pengajar pada berbagai sekolah militer, dan karena itu kenal perwira-perwira tinggi TNI waktu itu, saya bisa membayangkan betapa bingungnya perwira dari generasi muda itu menghadapi Jenderal Slamet Danusudirjo yang ingin kembali ke kalangan mereka. Latar belakang mereka berbeda, etos dan motivasi jadi tentara juga lain sama sekali.

Sebagai ilustrasi perbedaan etos tersebut, izinkanlah saya menyampaikan pengalaman saya sebagai Guru Besar pada Universitas Pertahanan Indonesia dalam berhubungan dengan para perwira TNI generasi muda tersebut. Salah seorang di antara mahasiswa kami, seorang kolonel, menulis tesis mengenai orientasi serta pilihan kejuruan di kalangan para taruna Akademi Militer

Magelang. Temuan dia, mayoritas taruna di Akademi Militer (Akmil) Magelang menghindar dari memilih jurusan tempur sebagai karier selepas mengikuti pendidikan di Akademi. Pada umumnya mereka lebih memilih jurusan bantuan tempur. "Mereka melihat jurusan tempur bukan profesi yang memberi harapan hidup di masa depan," kata Kolonel itu menjelaskan tesisnya di depan para penguji. Masa bagi Kopassus sebagai pilihan para taruna pada era pasca-Reformasi ini sudah hampir tak berbekas, kata sang Kolonel menjelaskan tesisnya lebih jauh. Dalam hati saya, alangkah drastisnya perubahan sikap para calon perwira kita sekarang ini. Saya teringat cerita Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin yang hanya menulis "Kopassus" untuk 3 pilihan yang dihadapkan kepadanya ketika masih Taruna Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri). Pada akhir enam puluhan dan tujuh puluhan, Kopassus memang impian utama calon perwira Angkatan Darat.

Makhluk Aneh

Sementara itu, rekan-rekan seangkatan Pak Slamet juga sudah pula berangsur habis dimakan usia. Yang tersisa pun sudah tidak ada waktu untuk memikirkan balik ke "induk". Induk yang lama, rumah yang mereka bangun dan menjadi tempat bernaung sejak zaman Revolusi sudah berangsur hilang sejak generasi itu tiba pada puncak kekuasaan setelah runtuhnya kekuasaan Sukarno dan bangkitnya Soeharto yang bertahan hingga 32 tahun.

Pengalaman Jenderal Djatikusumo dan Jenderal Slamet adalah pengalaman para perwira TNI Angkatan 45, terutama yang memelihara cita-cita dan kemurnian semangat lama yang bersemi ketika mereka masih berusia muda di bawah pimpinan Panglima Besar Sudirman serta bertahun-tahun di bawah Jenderal Nasution pada tahun lima puluhan. Djatikusumo maupun Slamet adalah dua dari sejumlah jenderal yang setia hingga akhir terhadap semangat dan sikap masa muda sebagai pejuang yang memilih TNI sebagai organ perjuangannya. Inilah penjelasannya

mengapa orang-orang ini mengalami alienasi dari "induk"-nya secara perlahan-lahan. Hingga akhirnya mereka tampil seakan makhluk yang agak aneh pada masa tuanya.

Sebagai seorang peneliti peran politik tentara yang berkenalan dengan banyak perwira TNI sejak 1965, dan kemudian mengajar banyak perwira generasi muda sejak awal sembilan puluhan, saya dengan mudah melihat perbedaan para perwira dua generasi ini. Bagi Generasi 45, TNI adalah rumah tunggal yang mereka bangun bersama, sehingga ketika harus meninggalkan dinas militer pada umumnya mengalami rasa kehilangan yang amat besar. Bagi generasi muda, TNI adalah sebuah pilihan di antara banyak kemungkinan pilihan lainnya. Dan pada umumnya selama berada dalam "induk" pilihan itu, mereka menyempatkan dan menyiapkan diri untuk berpindah ke "induk" lain setelah purnatugas nantinya.

Tidak banyak di antara anggota Generasi 45 itu pada masa pensiun dari dinas militer menyadari bahwa secara perlahan lembaga yang mereka tinggalkan telah mengalami modifikasi, baik oleh teman mereka yang berkuasa lama maupun penghuni baru, generasi adik dan anak-anak mereka. Dan "induk" masa lalu itu pun berangsur menyelinap ke dalam ingatan dan tinggal di sana sebagai kenangan yang wujudnya di lapangan menghilang secara cepat. Dengan latar belakang seperti itulah, Jenderal Slamet pada masa tuanya merindukan kembali "induk"-nya yang sebenarnya telah hilang. Sedihnya pula, kesempatan punya dunia lain, "induk lain", sastrawan misalnya, tidak berkenan buat perasaannya. Dalam keadaan demikian, risikonya memang kesepian.

Ikatan dengan "induk" bagi para generasi awal TNI ini memang luar biasa kuatnya. Saya masih punya kisah lain tentang itu. Ketika berada di Negeri Belanda pada 1969-1970, saya mendengar cerita menarik tentang Dr. T.B. Simatupang yang pernah diundang ke Holland dalam kedudukannya sebagai salah seorang pemimpin gereja sedunia. "Simatupang datang sebagai tokoh gereja, tapi ternyata dia lebih banyak bicara mengenai TNI dan peran TNI yang penting dalam menyelamatkan Indonesia," kata

seorang petinggi gereja Belanda kepada kami, beberapa wartawan Indonesia yang sedang *training* di Amsterdam waktu itu.

Ketika berada dan berbicara di Negeri Belanda itu, Simatupang sudah keluar dari dinas militer selama sekitar 17 tahun. Simatupang adalah Jenderal Mayor (setingkat Brigjen sekarang) pertama TNI selepas Belanda meninggalkan Indonesia. Pangkat itu diperolehnya karena kedudukannya sebagai Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP). Berada dalam Angkatan Bersenjata untuk tidak lebih dari 9 tahun, Simatupang pensiun dini setelah jabatannya sebagai KSAP dihapuskan oleh Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri pada 1953. Bayangkan mereka yang sepanjang hidup, dari zaman Revolusi hingga pensiun, terus-menerus berada dalam TNI.

Sekian tahun setelah pensiun dari tentara, Jenderal Nasution pernah ditawari memimpin sebuah organisasi Islam. Mungkin karena pimpinan organisasi itu melihat Simatupang yang Kristen menjadi tokoh gereja, lalu juga berharap Nasution—yang terkenal saleh dan taat menjalankan ibadah—bersedia juga menjadi tokoh pemimpin organisasi Islam. "Kenapa Pak Nas menolak?" Tanya saya kepada jenderal Indonesia pertama mencapai pangkat bintang empat itu. "Saya ini dari dulu TNI saja. Seluruh hidup saya di sana. Susah berganti organisasi."

Meski perbedaan mereka tidak sebesar dengan perbedaan antargenerasi, Angkatan 45 dengan generasi muda pasca-Revolusi, tapi menarik juga melihat perbedaan yang ada antara generasi muda senior dan yang junior. Tergolong senior adalah mereka yang generasi Akademi Militer Magelang, tapi berkesempatan menjadi bawahan perwira Generasi 45, sedangkan yang junior adalah sisanya yang lebih muda. Pengaruh "semangat" yang diwariskan oleh senior mereka masih sering terlihat. "Semangat" yang ditanamkan Jepang kepada mereka yang berlatih dalam Peta (Pembela Tanah Air) mempunyai "mistik" yang tidak dikenal oleh tentara profesional yang tumbuh dan terdidik secara rasional dan profesional seperti para perwira TNI generasi baru.

Inilah yang menjelaskan mengapa makin lama makin susah membedakan perwira-perwira Indonesia masa kini dengan perwira-perwira negara lain. Tentara profesional mempunyai standar, dan tentara semua bangsa mengacu ke sana. Ini juga berarti bahwa TNI makin lama makin tidak unik sebagaimana yang suka dikampanyekan oleh perwira Angkatan 45 ketika masih berkuasa dulu. Mereka yang Generasi 45 dulu itu memang unik, tapi keunikan itu tidak mungkin seluruhnya diwariskan kepada generasi berikutnya. Tantangan yang dihadapi setiap generasi berbeda, jawabannya juga berlainan. Tapi, para senior itu tetap bertekad mewariskan pengalaman dan nilai-nilai mereka kepada generasi muda TNI.

Dalam rangka pewarisan nilai-nilai tersebut, suatu kali saya diundang hadir dalam sebuah pertemuan kecil di Lemhanas. Di sana hadir para perwira Angkatan 45, waktu itu sebagian besar sudah purnawirawan, meski beberapa di antara mereka masih menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Di antara mereka saya ingat hadir adalah Jenderal Cokropranolo, Jenderal Ahmad Tahir, dan Jenderal Hasnan Habib. Juga hadir sejumlah perwira lulusan Akademi Militer Magelang. Para Pejuang 45 itu bicara banyak dalam mengarahkan para junior mereka berdasarkan semangat dan pengalaman masa lalu.

Di tengah-tengah wejangan para tetua itu, saya memberanikan diri angkat tangan. Ketika saya diizinkan bicara, inilah yang saya katakan: “Apakah Bapak-Bapak ini tidak meminta terlalu banyak dari para perwira generasi muda ini? Nilai-nilai yang membentuk Bapak-Bapak semua adalah hasil dari sebuah proses menjawab tantangan-tantangan yang Bapak semua hadapi secara pribadi maupun secara kelompok di zaman Jepang serta Revolusi dulu. Zaman itu sudah lewat dan tantangan yang dihadapi para junior ini juga lain sama sekali.” Saya sudah lupa apa jawaban para senior tersebut. Tapi di luar ruangan, seorang perwira generasi muda, seorang berpangkat Brigjen, menyalami saya sambil berkata, “Anda bebas mengucapkan itu, kami tidak bisa,” katanya sambil senyum.

Hubungan Anak Buah dan Bapak Buah

Satu lagi yang membedakan antara para perwira Generasi 45 dan generasi perwira TNI masa kini. Ketika para senior itu dulu mulai memasuki masa purnawiran (pensiun), mereka masih potensial menjadi kekuatan yang kadang merisaukan Soeharto. Lewat Fosko, misalnya, G.P.H. Djatikusumo masih menjadi faktor yang harus diperhitungkan Soeharto. Djatikusumo dan para jenderal segenerasinya masih punya hubungan dan bahkan pengaruh kepada mantan anak buah yang masih ada dalam jajaran militer aktif. Ini adalah akibat hubungan antara anak buah dan bapak buah yang bermula pada masa Revolusi.

Tentara yang menciptakan dirinya sendiri (*self-created army*) seperti TNI, mencari senjata dan logistiknya sendiri dan para perwiranya mencari bintara dan tamtamanya sendiri juga. Akibatnya adalah berkembangnya hubungan *patron-client* yang erat dan berlangsung lama antara pimpinan dan bawahan (anak buah dan bapak buah). Hubungan dan ikatan seperti ini pada umumnya berlangsung sampai jauh memasuki masa pensiun mereka semua. Saya teringat pada para pegawai di perusahaan dagang Jenderal TNI (Purn.) Sumitro yang umumnya terdiri dari para mantan anak buahnya pada zaman bergerilya di Jawa Timur pada masa Revolusi.

Sebaliknya dengan generasi perwira masa kini, semua sudah disediakan negara, dari pendidikan, peralatan, logistik, dan anak buah. Sehingga setelah mereka pensiun, urus diri sendiri masing-masing saja. Keadaan seperti inilah yang tidak memudahkan tampilnya "orang kuat" dalam militer Indonesia pascapensiunnya Angkatan 45.

SEKIAN TAHUN KEMUDIAN, saya membaca buku *Lee Kuan Yew: Hard Truths to Keep Singapore Going*. Ini adalah kumpulan wawancara mantan Perdana Menteri dan Bapak pendiri Republik Singapura itu mengenai bagaimana mengelola negara kota tersebut. Lee Kuan Yew adalah penggagas pembayaran gaji mahal

bagi pejabat tinggi Singapura. Negara kota itu memang tercatat sebagai membayar paling tinggi pejabat pemerintahannya, sehingga gaji Perdana Menteri Singapura tergolong paling tinggi di antara pemimpin pemerintahan di seluruh dunia. Formulanya adalah membayar para eksekutif pemerintahan setinggi gaji pemimpin perusahaan swasta. Dengan cara ini, Singapura bisa bersaing dengan perusahaan swasta dalam mendapatkan kader terbaik untuk mengelola negara.

Pada awal kebangkitan Singapura sebagai negara, generasi Lee mempertaruhkan jiwa mereka bagi survival negeri yang menghadapi dua tantangan: terusir dari Malaysia dan ancaman Komunis di dalam negeri. Pengalaman para pendiri Singapura itu tidak banyak berbeda dengan tantangan generasi Angkatan 45 kita. Mereka semua tidak punya banyak pilihan. "Apakah generasi penerus akan berbuat sama seperti kami dulu?" tanya Lee. "Tidak. Mereka sekarang punya banyak pilihan. Anda memerlukan sebuah revolusi untuk mendapatkan pemimpin seperti generasi saya dulu," kata Lee menjelaskan. "Anda tidak mungkin mereproduksi motivasi yang sama pada generasi berikut. Kondisi sudah berbeda. Tiap generasi berbeda."

Maka agar Singapura bisa bertahan di tengah berkembangnya bisnis besar di pulau itu, para pembesarnya harus mereka bayar mahal. Kalau tidak, tenaga-tenaga terampil sebagian besar akan memilih jadi pejabat tinggi di berbagai usaha bisnis, dan hanya mereka yang bermutu rendah yang akan bekerja di kantor pemerintah.

Kalau sekarang saya, misalnya, ditanya mengenai mengapa TNI pada Rapat Pimpinan (Rapim) April 2000 meninggalkan Dwifungsi, pendapat Lee Kuan Yew ini mungkin menarik untuk saya kutip sebagai penjelasan. Adalah sangat tidak *fair* mengharapkan anak-anak generasi sekarang berkorban secara tanpa pamrih membaktikan diri kepada negara sebagaimana Generasi 45 dulu.[]

ABRI Menjelang Perubahan:

Sekadar Masukan

Kesempatan secara teratur mengajar di Sekolah Staf Gabungan ABRI (Seskogab, sekarang Sesko TNI), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), serta sering memberi ceramah atau berseminar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), memberi banyak kesempatan kepada saya berkenalan dan bertukar pikiran dengan para perwira menengah dan para jenderal TNI mengenai perkembangan politik Indonesia dan prospeknya serta peranan politik tentara.

Naskah di bawah ini ditulis atas dorongan beberapa Jenderal selepas saya berdiskusi dengan mereka. Saya tulis naskah ini pada pertengahan 1997 dan disampaikan ke Jenderal Feisal Tanjung, Panglima ABRI, oleh Kolonel Syarifuddin Tippe, staf pribadi Panglima, yang kebetulan menjadi mahasiswa saya di Universitas Jayabaya masa itu. Di kemudian hari, Letjen TNI Dr. Syarifuddin Tippe menjadi Rektor di Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia, tempat saya mengajar Ilmu Politik.

Beberapa Jenderal kemudian mengaku membaca naskah saya itu. "Ini kalian baca," konon kata Feisal Tanjung kepada sejumlah Jenderal setelah naskah itu diperbanyak di Mabes ABRI. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin bahkan mengaku masih menyimpan naskah tersebut sampai sekarang. Dengan sedih harus saya katakan bahwa Panglima Feisal Tanjung maupun Panglima Wiranto, yang menggantikannya, tidak pernah dimungkinkan berbuat sesuatu bagi perbaikan posisi dan kebijakan ABRI hingga datangnya Reformasi.

Seperti telah saya uraikan di berbagai tempat dan di berbagai kesempatan, sejak mencopot Jenderal TNI L.B. Moerdani secara

mendadak dan melakukan de-Benny-isasi *setelah itu, Soeharto tidak lagi percaya sepenuhnya kepada siapa saja yang ditunjuknya menjadi Panglima ABRI. Panglima ABRI yang sebenarnya sejak Benny dicopot adalah Soeharto sendiri. Keadaan ini banyak persamaannya dengan tahun-tahun terakhir kekuasaan Presiden Sukarno.*

Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung, 1987.

Setelah Jenderal Nasution "ditendang ke atas", *pimpinan ABRI pada masa Orde Lama itu* "dijabat" *oleh Panglima Tertinggi* in function. *Sukarno menggunakan istilah itu untuk menguasai tentara. Soeharto yang memang seorang Jenderal, mengontrol tentara tanpa istilah. Sukarno, seorang sipil yang gemar berseragam militer, memerlukan pembenaran untuk menguasai tentara. Tapi pada akhirnya praktik mereka sama, menguasai atau berusaha menguasai tentara. Soeharto berhasil, karena itu bertahan lama. Sukarno gagal, karena itu cepat terjungkir.*

SIAPA SAJA YANG DENGAN SAKSAMA mengamati politik Indonesia sekarang pastilah sulit untuk tidak setuju bahwa sebuah perubahan politik bakal terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Ada dua gejala yang menjadi tanda makin dekatnya perubahan itu. *Pertama*, usia kepala negara yang sudah di atas 70 tahun, suatu usia yang berada jauh di atas umur rata-rata yang bisa dicapai manusia Indonesia. Dan kekuasaan sang Presiden tersebut selama ini lebih banyak ditentukan oleh karisma pribadinya, kontrolnya atas militer serta kecanggihan politiknya dalam memanfaatkan berbagai institusi yang mendukungnya.

Kedua, maraknya gejolak masyarakat sebagai akibat makin dirasakannya ketidakpastian hukum, kesenjangan sosial-ekonomi, serta terasa terus menyempitnya ruang gerak masyarakat dalam ikut menentukan hari depan mereka sebagai warga negara. Gejala kedua ini makin mengemuka oleh makin vokalnya masyarakat—terutama generasi mudanya—dalam hampir semua sektor kehidupan.

Generasi muda adalah mereka yang menikmati perbaikan kualitas hidup sebagai akibat pembangunan yang dilakukan Orde Baru 30 tahun terakhir ini. Sebagai akibat dari suksesnya Orde Baru meningkatkan kualitas hidup sebagian besar anggota masyarakat, mereka kini berada dalam era *revolution of rising demand*. Kemakmuran menaik yang mereka nikmati justru membuat mereka menuntut lebih banyak lagi.

Keadaan inilah yang menyebabkan stabilitas yang selama ini kita bangga-banggakan menjadi hal yang tidak lagi bisa dipertahankan. Stabilitas yang dulu menjadi landasan pembangunan kini telah kelihatan hasilnya dengan baik. Tapi, justru karena itu diperlukan suatu stabilitas baru, lantaran stabilitas lama sudah berhasil menyelesaikan tugasnya dan kini terasa dan terlihat tidak memadai lagi.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa stabilitas yang dulu dibangga-banggakan itu kini telah berangsur luntur oleh merajalelanya tiga hal yang berlangsung di atas landasan stabilitas tersebut:

- penyalahgunaan kekuasaan,
- iklim yang korup,
- kebijakan (*policy*) yang buruk.

Penyalahgunaan kekuasaan terjadi karena kekuasaan negara yang terlalu besar, sementara perkembangan kekuatan masyarakat sangat lambat. Dua faktor penyebab keadaan ini: *pertama*, secara kultural kita mewarisi tradisi negara tradisional yang kuat terhadap kawulanya dan negara kolonial yang amat perkasa terhadap anak jajahannya; *kedua*, pembangunan kita selama ini me-

mang masih lebih menekankan pertumbuhan dan belum serius dengan pemerataan. Padahal tanpa pemerataan, yang terjadi adalah konsentrasi kekayaan pada sejumlah kecil orang yang menjadi kaya oleh koneksi, bahkan kolusi dengan penyelenggara negara. Orang yang menjadi kaya oleh koneksi dan kolusi itu akan selalu sangat bergantung kepada negara. Orang-orang seperti inilah yang secara mati-matian mempertahankan *status quo.*

Iklim yang korup adalah akibat kekuasaan yang amat besar, terpusat, dan tak terkontrol oleh masyarakat yang masih lemah. Dalam keadaan demikian, mereka yang dipercayai mengelola negara mempergunakan kesempatan seluas-seluasnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan diri dan kelompok mereka sendiri. Mereka yang semestinya bekerja sebagai abdi masyarakat akhirnya hanya menjadi abdi negara (Korpri adalah "Abdi Negara", bukan abdi masyarakat) dan kepentingan negara adalah apa yang pada umumnya mereka tafsirkan sesuai dengan *interest* mereka yang berkuasa.

Kebijaksanaan yang buruk terkait langsung kepada kekuasaan yang sangat terpusat (tak terkontrol dengan semestinya) pada negara yang dilaksanakan oleh aparatnya. Dalam keadaan demikian, aparat pemerintah bisa dengan gampang membuat aturan (*policy*) tanpa harus berpikir berkali-kali mengenai dampaknya kepada masyarakat, sebab masyarakat toh tidak mempunyai kekuatan menentangnya.

Iklim yang korup adalah akibat langsung dari kekuasaan terkonsentrasi yang dimiliki negara. Mereka yang mengelola negara bukan saja punya banyak peluang membuat kebijakan yang buruk, melainkan bahkan juga mendapat kesempatan memperkaya diri dan pengikut-pengikutnya karena mereka memiliki kewenangan besar yang didapatkannya sebagai pengelola negara yang amat kuat dan lalu membuat kebijakan yang menguntungkan diri dan kelompok mereka.

Penyalahgunaan kekuasaan, kebijakan yang buruk, serta iklim yang korup, secara bersama menciptakan keresahan dalam masyarakat. Keresahan itu timbul oleh makin meluasnya di dalam

masyarakat perasaan tidak diperlakukan dengan adil secara **ekonomis** (monopoli dan kesempatan luas bagi pengusaha keturunan Cina), **politis** (suara rakyat tak diperhatikan), maupun secara **legal** (pengadilan yang selalu menguntungkan yang kuat).

Masyarakat Indonesia yang makin sadar politik, makin lama makin tahu bahwa penderitaan yang mereka alami—diperlakukan secara tidak adil—adalah pertanda telah terjadinya pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat oleh pemerintah dan aparatnya. Keresahan itulah yang merupakan lahan subur bagi terjadinya berbagai kerusuhan yang akhir-akhir ini melanda Indonesia (27 Juli 1996 di Jakarta, Peristiwa Situbondo dan Huru-Hara Tasikmalaya).

ABRI dan Stabilitas

Semua orang yang secara saksama mengamati politik Indonesia dewasa ini tahu bahwa stabilitas yang menjadi tumpuan pembangunan Indonesia selama ini tercapai oleh kerja keras ABRI. Adalah ABRI yang menciptakan dan memelihara stabilitas itu. Kalau analisis di atas bisa diterima, ABRI sebenarnya kini dituntut lagi menciptakan stabilitas baru untuk menjadi landasan pembangunan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II. Berbeda dengan keadaan pada awal PJP I (awal Orde Baru) tatkala peranan ABRI sangat menonjol pada periode pasca-Gestapu/PKI, sementara peranan masyarakat masih sangat rendah, kini masyarakat Indonesia mempunyai potensi yang jauh lebih meningkat.

Seperti dikatakan pada awal dokumen ini, pembangunan Orde Baru telah menciptakan sejumlah orang yang kritis dan selalu mempertanyakan haknya dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat ini. Jumlah orang kritis ini terus berkembang dan makin tidak mudah diabaikan. Golongan ini harus diperhitungkan oleh ABRI dalam usahanya menciptakan stabilitas baru tersebut.

Yang juga membedakan keadaan sekarang dengan keadaan pada awal Orde Baru ialah faktor ekonomi. Orde Baru mewarisi

dari rezim Presiden Sukarno ekonomi yang nyaris lumpuh. Kini Indonesia mempunyai ekonomi dengan *magnitude* yang besar (bahkan dilengkapi dengan pasar modal). Faktor ekonomi ini mempunyai dinamikanya sendiri dalam rangka perubahan politik nanti. Dinamika itu haruslah diperhitungkan ABRI dalam usahanya menciptakan stabilitas baru tersebut. Tanpa dengan saksama memperhitungkan faktor ekonomi ini, pembangunan bukan tak mungkin terkorbankan, lalu kita harus mulai dari bawah lagi.

Namun, ABRI juga harus waspada agar dimensi ekonomi ini tidak mendikte ABRI. Perlu diingat bahwa kita sebagai bangsa belum pernah mengalami perubahan politik dengan faktor ekonomi yang begitu menonjol seperti sekarang. Kalau ABRI kurang waspada, maka bisa terjadi bahwa stabilitas yang diciptakannya bukan stabilitas sejati, melainkan stabilitas semu yang hanya menguntungkan para pemilik modal yang memperalat ABRI untuk kepentingan mereka sendiri.

Perbedaan lain antara awal Orde Baru dan sekarang adalah pada lingkungan strategis. Pada awal Orde Baru Indonesia masih berada dalam era Perang Dingin. Waktu itu cerita tentang HAM belum lagi terdengar, bahkan kubu Barat maupun Timur sama-sama mendukung rezim otoriter dan campur tangan militer dalam politik dengan alasan dan kepentingan masing-masing. Perang Dingin kini telah jadi objek tontonan dalam museum. Dunia tidak lagi menoleransi otoritarianisme, bahkan keterlibatan militer dalam politik makin lama makin dianggap sebagai suatu barang kuno sisa masa Perang Dingin yang harus secepatnya disingkirkan.

Kenyataan internasional ini mempunyai gaung yang makin kuat di dalam negeri. Di kampus-kampus kita sekarang para aktivis sering terdengar mempersoalkan Dwifungsi, dan militer mereka anggap tidak pantas menjamah politik. Keadaan ini semua tidak bisa dianggap sepi begitu saja oleh ABRI. Di sini ABRI ditantang membuktikan kehadirannya selaku kekuatan sosial politik sebagai betul-betul diperlukan untuk mengamankan dan memperlancar perubahan politik ke arah terciptanya sebuah stabilitas

baru bagi kelanjutan pembangunan bangsa. Dengan kata lain, ABRI tidak bisa lagi terus-menerus hanya menggunakan pembenaran sejarah, legitimasi filosofis, dan legitimasi hukum sebagai pembenaran keterlibatan sosial-politiknya.

Hari Depan Dwifungsi

Sementara itu, bagaimanapun tajamnya kritik terhadap peranan sosial politik ABRI, dalam waktu dekat ini belum begitu terlihat kemungkinan ABRI melepas peranan sosial politiknya. Bahkan, kritik terhadap peranan sosial politik ABRI dalam konteks Indonesia akhir-akhir ini justru harus dilihat sebagai cambuk yang melecut perlunya penyesuaian implementasi Dwifungsi terhadap perkembangan masyarakat Indonesia.

Menyadari perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia serta perubahan lingkungan strategis pasca-Perang Dingin, maka ABRI yang mungkin akan tetap mempunyai peranan dalam proses perubahan politik yang aman dan penciptaan stabilitas baru, seharusnya segera memikirkan sikap dan serangkaian kebijakan yang diperkirakan bisa menjamin peranan sosial politik ABRI agar ABRI nanti bisa tampil secara elegan, terhormat, terencana, dan akseptabel. Terencana di sini harus berarti mempunyai strategi yang bertolak dari realitas sosial politik dan tidak menempatkan ABRI sekadar sebagai lembaga pemadam kebakaran.[]

Kisah Dua Wartawan Senior

Mochtar Lubis

Ramadhan K.H., seorang wartawan dan sastrawan terkemuka, suatu kali meminta saya menulis pengantar untuk kumpulan wawancara wartawan dan sastrawan senior Mochtar Lubis. Kumpulan wawancara itu berbicara tentang banyak hal. Siapa sebenarnya Mochtar, bisa dilirik dari serentetan jawaban terhadap pertanyaan dalam wawancara tersebut. Dan tentu saja pengantar singkat saya juga mencerminkan sikap saya kepada almarhum Mochtar Lubis.

Secara pribadi sebenarnya saya tidaklah dekat dengan Mochtar Lubis. Karena itu, saya tidaklah terlalu kenal padanya. Informasi saya tentang tokoh ini hampir semuanya bersumber pada orang-orang yang mengenalnya secara dekat dan tentu saja dari banyak tulisannya. Sebagai anak muda, saya bertemu pertama kali dengan Mochtar Lubis pada hari-hari demonstrasi menjelang jatuhnya Orde Lama pada 1966. Mochtar baru bebas dari tahanan waktu itu. Sebelumnya saya sudah dengar kisah tentang Mochtar dari Arief Budiman yang menemuinya di rumah tahanan Jalan Keagungan. Arief bersemangat sekali bercerita tentang Mochtar yang digambarkannya sebagai tokoh yang sangat simpatik dengan semangat tinggi dan optimistis menyala-nyala tentang hari depan yang bebas dari rezim Sukarno.

Semangat, optimisme, dan sikap simpatik kepada anak muda itu saya rasakan juga tatkala saya berkunjung untuk pertama kalinya ke rumah Mochtar di Jalan Bonang, di samping Gedung Proklamasi. Pada pertemuan pertama kami, dia sudah berkisah mengenai sejumlah rencananya, antara lain membuat film, me-

Bersama Mochtar Lubis, 1966.

nerbitkan majalah sastra, menerbitkan kembali koran *Indonesia Raya* yang dulu diberedel Sukarno, dan banyak lagi rencana lain.

Kesan saya waktu itu Mochtar bukan cuma simpatik dan *appealing* kepada kami yang muda-muda, tapi dia juga sangat *charming*. Berada di sekitarnya sangatlah menyenangkan. Itulah sebabnya saya beberapa kali mampir ke rumahnya. Saya tidak lagi datang ke rumah Mochtar setelah suatu kali, tanpa saya duga dia membentak saya ketika saya memintanya menulis untuk Harian *Angkatan Bersenjata* tempat saya bekerja. Sebagai anak muda yang masih sangat lugu di satu pihak, dan kagum kepada Mochtar di pihak lain, waktu itu saya ingin Mochtar Lubis menulis di koran kami setelah wartawan senior yang juga saya kagumi, Rosihan Anwar, berhasil saya minta menjadi kolumnis tetap *Angkatan Bersenjata*. Kekonyolan saya waktu itu bersumber pada keluguan saya yang menyamakan Mochtar dan Rosihan.

Ketika meminta Rosihan menulis, secara halus saya ingatkan bahwa meskipun sepenuhnya saya mendapat kepercayaan Brigjen TNI Soegandhi (pemimpin Harian *Angkatan Bersenjata* waktu itu) untuk mengelola kolom dan menulis editorial, tetaplah harus kita sadari koran itu punya tentara. Rosihan mengerti maksud saya. Tapi ketika hal yang sama saya sampaikan kepada Mochtar, yang saya dapat adalah bentakan.

Sebagai anak muda, waktu itu saya sangat kecewa. Belasan tahun kemudian, setelah mendengar lebih banyak cerita dari mereka yang dekat dengan Mochtar dan membaca lebih banyak tulisan-tulisan tokoh ini, barulah saya mengerti arti bentakan pada awal Orde Baru itu. Dan dengan itu saya makin banyak tahu tentang Mochtar.

Lalu siapa sebenarnya Mochtar Lubis? Bagi Mohamad Roem, seorang politikus Masyumi, Mochtar berkepala granit, artinya seorang yang keras berpegang pada pendiriannya. Untuk Arief Budiman, Mochtar adalah manusia multidimensional dan kontroversial. "Dia multidimensional karena bakat-bakatnya yang banyak, dan dia kontroversial karena keberaniannya," tulis Arief Budiman. Bahwa Mochtar Lubis berbakat banyak, jelas bukan rahasia lagi. Dia wartawan tersohor karena berani, sastrawan terkemuka, pelukis, pemahat, pemelihara anggrek, penerbit, penyelam, juga profesional dalam soal menghuni tahanan.

Bahwa dia pemberani, itu juga terbukti dengan rekam jejaknya dalam hal menghuni tahanan. Karena keberaniannya dalam bertahan pada pendiriannya, maka dia mempunyai *record* tinggi sebagai wartawan yang berpengalaman menghuni rumah tahanan. Mochtar satu-satunya wartawan Indonesia yang bisa menulis buku mengenai pengalaman menghuni rumah tahanan Orde Lama dan Orde Baru sekaligus.

Jenderal (Purn.) A.H. Nasution menyebut Mochtar sebagai "pribadi yang teguh pada keyakinan dan perjuangan demokrasi." Betulkah demikian? Apakah menurut Mochtar, Indonesia sudah siap berdemokrasi dan untuk itu ada gunanya mendorong rakyat ke arah sana dan Mochtar bersedia berkorban untuk itu? Kalau Mochtar seorang pejuang demokrasi, mengapa dia tidak dikenal sebagai politikus yang memperjuangkan demokrasi? Mochtar waktu itu malah lebih populer sebagai tokoh antipartai.

Mochtar juga terkenal sebagai tokoh yang sangat anti-korupsi. Apakah dia optimis korupsi bisa dibasmi di Indonesia? Bagaimanakah dia melihat masyarakat Indonesia yang di dalamnya korupsi tumbuh subur? Bagaimana pula sikapnya terhadap wa-

nita dan apa hubungan sikap itu dengan keterlibatannya menyerang Presiden Sukarno yang kawin dengan Hartini pada tahun lima puluhan?

Sebagai salah seorang pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan pembela hak asasi, mengapa Mochtar ribut memprotes ketika Pramoedya Ananta Toer mendapat hadiah Magsaysay? Sebagai seorang novelis, apakah arti kesusastraan bagi Mochtar Lubis?

Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dan banyak lagi pertanyaan menarik lainnya, dijawab dengan jernih oleh Mochtar dalam kumpulan wawancara yang disunting oleh Ramadhan K.H. ini. Kumpulan wawancara ini memudahkan bagi mereka yang tertarik terhadap pribadi Mochtar Lubis, manusia langka, baik dari segi bakatnya yang macam-macam ataupun oleh sikapnya yang aneh bagi banyak manusia Orde Baru yang makin lama makin mau praktis dan pragmatis saja.

Yang membuat buku kumpulan wawancara ini penting adalah penjelasan Mochtar tentang latar belakang yang menyebabkan sikapnya yang dianggap "kepala granit", "Don Kisot", "pejuang demokrasi", "antipartai", "pejuang hak asasi", "pembela kaum perempuan", "multidimensional", dan entah apa lagi.

Sebagai wartawan yang korannya dimatikan pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, bisa dimengerti jika dia amat peka terhadap pemberangusan pers. Di balik pemberangusan itu, Mochtar melihat betapa rendahnya harkat wartawan di mata penguasa. Kata Mochtar:

> Kita ini, para wartawan, nasibnya lebih jelek daripada pembunuh. Lihat saja kalau seorang baru saja membunuh, [dia] ditangkap polisi dulu, diperiksa jaksa, selanjutnya diajukan, ada pembela hukum, kemudian hakim, baru memutuskan vonis .... Tapi kalau untuk pers, kita bisa dibunuh mati begitu saja tanpa proses pengadilan.

Bagi Mochtar Lubis pemberangusan pers tampaknya masih terus terjadi karena pemerintah terlalu menentukan dan karena

masyarakat kita masih dicengkeram oleh nilai-nilai feodal. Dalam keadaan demikian, "rakyat kita ini belum paham haknya sebagai rakyat". Rakyat tidak paham haknya karena cengkeraman nilai-nilai feodal atau sebaliknya, tidak dipersoalkan oleh Mochtar. Yang jelas, Mochtar berkesimpulan rakyat kita "belum dewasa". Di sini Mochtar sepaham dengan Bung Karno yang mengangkat dirinya menjadi "Penyambung Lidah Rakyat" karena rakyat dianggapnya belum dewasa, masih memerlukan "penyambung lidah", alias juru bicara.

Sadar akan keadaan masyarakat yang demikian, Mochtar memutuskan untuk tidak terjun ke politik karena dia takut berkuasa. Berkuasa dalam sebuah negeri di mana negara amat kuat dan masyarakat begitu lemah, akibatnya seperti yang digambarkan Mochtar sebagai berikut: "Kalau kita sendiri pun memegang kekuasaan kita selalu [akan] teperdaya memperbesar kekuasaan itu." Di sini Mochtar menyadari bagaimana ampuhnya sistem yang dengan mudah bisa mengubah manusia yang terperangkap di dalamnya.

Kebudayaan Jawa

Namun, ketika harus menjelaskan mengapa feodalisme mencengkeram kita, Mochtar menggunakan penjelasan kebudayaan. Yang disalahkannya adalah kebudayaan Jawa. Katanya: "Karena kekuasaan masih dipegang etnis Jawa, maka sikap feodal masih terbawa sampai ke pemerintahan." Sayang tidak dijelaskan olehnya etnis yang mana dari banyak etnis Indonesia yang tidak feodalistik jika berkuasa. Apakah kemungkinan itu ada? Lagi pula, etnis Jawa merupakan kelompok mayoritas Indonesia, suatu kenyataan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah yang berkuasa Sukarno dan Soeharto mewakili Jawa atau individu yang berkuasa tanpa kontrol yang memadai?

Selain tidak konsisten dengan penjelasan yang mendasari sikapnya menghindari politik praktis, di sini Mochtar juga mengha-

dapi sejumlah pertanyaan. Misalnya, betulkah sikap feodal yang mencengkeram masyarakat kita kini bersumber pada kebudayaan Jawa atau pada lemahnya masyarakat secara keseluruhan dalam berhadapan dengan negara dan kekuasaan? Apakah kebudayaan politik Jawa itu cuma satu? Bagaimana misalnya melihat nuansa perbedaan antara Presiden Sukarno yang berbudaya Jawa Timur dan Presiden Soeharto yang berbudaya Jawa Tengah? Apakah ada jaminan feodalisme akan hilang kalau yang berkuasa bukan etnis Jawa?

Kalau Mochtar tidak terjun ke dunia politik untuk memimpin rakyat, rasanya bukan melulu karena dia takut terperangkap oleh kekuasaan. Mochtar secara samar-samar mengesankan kecurigaannya kepada kepemimpinan yang mengatasnamakan rakyat untuk melakukan perubahan. Dengan kata lain, Mochtar tidak percaya lembaga "penyambung lidah rakyat" sebab, katanya, "Kalau masyarakat sendiri sudah merasa perlu ada perubahan, mereka [akan] bergerak."

Oleh para pakar ilmu sosial, perubahan ke arah demokrasi dilihat hanya akan terjadi jika di dalam masyarakat telah lahir sebuah kelas menengah yang kuat dan mampu serta merasa perlu akan terjadinya perubahan. Ada yang berpendapat golongan menengah Indonesia sudah ada dan karena itu perubahan sudah mendesak. Apa sikap Mochtar Lubis?

> Saya tidak begitu yakin dengan kekuatan golongan menengah Indonesia karena golongan menengah Indonesia dilahirkan oleh birokrasi yang korup .... Mereka sebagian besar tidak [menjadi kaya] dengan keringatnya sendiri, tapi [dengan] koneksi-koneksi khusus dengan birokrat.

Dari jawaban dan penjelasan Mochtar itu tadi terlihat dengan jelas bagaimana gambaran diri Mochtar dalam hubungannya dengan isu demokrasi. Jelas sekali dia tidak melihat demokrasi akan datang di Indonesia dalam waktu dekat. Itu penjelasannya mengapa dia tidak terutama berjuang untuk demokrasi. Karena itu agak

sulit rasanya menggolongkan Mochtar sebagai "pejuang demokrasi".

Mochtar melihat korupsi dan kolusi lebih merupakan bahaya yang harus dihadapinya sebab "dalam demokrasi pun bisa berkembang kolusi dan korupsi". Sumber korupsi dan kolusi bagi Mochtar adalah birokrasi. Itulah sebabnya, maka menurut Mochtar jalan keluar satu-satunya dari korupsi adalah dengan membersihkan birokrasi dari elemen-elemen yang korup.

Siapa yang harus membersihkannya? Jawab Mochtar: "Ya, seharusnya DPR." Lalu katanya pula: "Tapi selama ini ada kesan mereka [DPR] acuh tak acuh." Karena kehilangan harapan kepada DPR sebagai lembaga yang diharapkannya membersihkan birokrasi dari praktik korupsi dan kolusi, Mochtar berpaling ke ABRI. Tapi di sini juga keadaan kurang menggembirakan bagi Mochtar. "Kita kurang melihat peran ABRI untuk memberantas korupsi," katanya.

Kalau DPR dan ABRI tidak bisa diharapkan membersihkan korupsi dan kolusi di birokrasi, tentu ada sebabnya. Mochtar tidak menjelaskan penyebab itu. Mungkin karena dia tidak mendapat pertanyaan yang mengarah ke sana seperti yang dihadapi Letjen TNI (Purn.) Sayidiman beberapa waktu yang lalu. Terhadap ketidakberdayaan lembaga-lembaga itu, Sayidiman menjelaskan: "Kekuatan politik utama di Indonesia saat ini bukan Golkar, bukan PDI, bukan PPP, bukan juga ABRI. Kekuatan politik utama di Indonesia hanya Soeharto." (*Forum Keadilan*, 6 November 1995, h. 84.)

Penjelasan Sayidiman ini menerangkan dengan jelas betapa masalah korupsi di Indonesia sebenarnya bukan terutama soal moral, melainkan politis. Bahasa gagahnya, bukan kultural tetapi struktural.

Kendati kekuatan Negara Republik Indonesia jauh lebih besar daripada kekuatan masyarakat Indonesia—suatu keadaan yang secara teoretis tidak memungkinkan adanya stabilitas politik—orang toh berbicara tentang dicapainya stabilitas politik di bawah pemerintahan Orde Baru dan di atas stabilitas itulah pembangun-

an ekonomi dilakukan. Mochtar tidak memperdebatkan soal ada tidaknya stabilitas itu, dia cuma berpendapat: "Stabilitas politik sekarang ini selalu bersandar pada ABRI, bukan pada rakyat. Artinya kalau ABRI tidak mendukung, sudah lama pemerintah ini diganti oleh rakyat."

Terhadap pendapat ini bisa timbul pertanyaan: di tempat lain Mochtar memberikan kesan kuat belum siapnya rakyat melakukan perubahan politik, tapi di sini dikesankan rakyat bisa mengganti pemerintah jika saja pemerintah sekarang tidak ditopang oleh ABRI. Barangkali yang dimaksudkan Mochtar bukan gerakan rakyat yang mengganti pemerintah yang tidak lagi didukung ABRI, melainkan kekuatan elite lain yang sejak lama mengecam pemerintah. Jadi, soalnya bukanlah perubahan politik yang mendasar, melainkan hanya perubahan elite tanpa menyentuh rakyat kebanyakan.

Beberapa waktu lalu ada pula debat tentang golongan apa yang sebenarnya harus memimpin kita pada era pasca-Soeharto, sipil atau militer lagi? Jenderal TNI (Purn.) Sumitro menginginkan sipil. Alasan yang dikemukakan Sumitro: "Jika sipil yang memimpin bangsa ini, pertama keadaan bisa rileks, setelah tegang sekian lama. Dengan adanya kepemimpinan sipil, diharapkan kehidupan sosial politik bangsa tidak akan terganggu oleh citra kekuatan kekuasaan."

Mochtar meragukan pendapat Sumitro. "Belum tentu [sipil lebih demokrat]. Misalnya, Sukarno. Dari sipil itu," kata Mochtar. Di sini Mochtar konsisten dengan sikapnya terhadap kekuatan penentu dari masyarakat untuk sebuah perubahan politik. Karena Mochtar tidak percaya pada elite untuk melakukan perubahan, maka baginya dalam keadaan seperti itu akan sama saja jadinya presiden seorang sipil atau berasal dari kalangan militer.

* * *

DI TAMAN ISMAIL MARZUKI, perhentian terakhir sebelum Mochtar Lubis melanjutkan perjalanannya ke alam baka, bersama sejumlah pelayat, saya berdiri di dekat jenazah. Tiba-tiba saya

menyadari ada sesuatu yang hilang. Mochtar adalah manusia biasa yang hidupnya memang harus berakhir pada suatu hari. Itu betul. Tapi Mochtar bukan cuma manusia biasa seperti kebanyakan kita. Mochtar adalah sebuah sejarah, paling sedikit bagian dari sebuah sejarah perjalanan Indonesia. Sebagai satu dari sejumlah orang yang berkiprah secara aktif pada awal terbentuknya Republik Indonesia, Mochtar bukan cuma punya gagasan tentang bagaimana bangsa baru itu sebaiknya, melainkan juga bekerja keras dan berkorban untuk gagasannya.

Mochtar adalah pemuda pada awal kelahiran Republik Indonesia yang memilih bergerak pada dunia gagasan dalam membangun Indonesia yang baru lahir. Dia sebenarnya pernah punya minat dan kesempatan menjadi perwira tentara. Tapi, Adam Malik membujuknya agar menjadi wartawan saja dan tidak usah masuk Akademi Militer yang waktu itu baru dibuka di Yogyakarta. Sebagai sastrawan, selain wartawan, Mochtar menghasilkan sejumlah karya yang melukiskan dan merekam dengan baik gejolak dan semangat zamannya. Sebagai wartawan, dia tampil sebagai semacam "penjaga suci" cita-cita Indonesia merdeka, bersih, dan berkedaulatan rakyat. Sebagai sastrawan, dia tercatat dengan baik dalam *pantheon* sejarah sastra Indonesia. Tetapi sebagai wartawan, dia harus meringkuk dalam penjara semua rezim yang memerintah Indonesia.

Generasi Mochtar adalah generasi yang menjadi wartawan karena memperjuangkan cita-cita. Persis sama dengan anak-anak muda yang pada masa yang sama memilih jadi tentara dan bertempur di berbagai front bukan karena memilih karier militer, melainkan karena itulah jalan yang tersedia bagi mereka untuk mempertahankan Indonesia yang baru merdeka. Mochtar adalah pewaris dan peneguh cita-cita jurnalisme kaum pergerakan. Generasi ini terutama terkenal dengan Surat Kabar *Indonesia Raya* pimpinan Mochtar Lubis, dan *Pedoman* pimpinan Rosihan Anwar. Kedua koran ini dibantai habis oleh dua rezim otoriter yang selama sekitar 40 tahun menguasai Indonesia.

Maka jika saya merasa ada yang hilang saat berdiri di sekitar jenazah Mochtar Lubis di Taman Ismail Marzuki hari itu, barangkali saja perasaan demikian itu bisa dipandang sebagai muncul terlambat. Bukankah Harian *Indonesia Raya* dan *Pedoman* sudah lama mati, jauh sebelum para pendiri mereka meninggal dunia? Kematian kedua surat kabar tersebut barangkali saja pada suatu kali kelak akan dipandang sebagai suatu pertanda sejarah yang wajar dalam perjalanan Indonesia yang memilih jalannya sendiri terlepas dari apa yang menjadi cita-cita dan perjuangan generasi pendiri Republik ini. Jika memang demikian jadinya, maka kepergian Mochtar hanyalah momen rutin tak terhindarkan. Seorang memang harus mati pada suatu saat dalam perjalanan hidupnya.

Sebagai anak muda yang senang sastra sejak berada di bangku sekolah, tentu saya sudah "kenal" Mochtar Lubis jauh sebelum bertemu muka dengan sang tokoh. Secara pribadi, saya baru berkesempatan mengenal Mochtar pada awal Orde Baru, beberapa saat setelah dia dibebaskan dari penjara Orde Lama, yakni ketika kami para mahasiswa masih sibuk berdemonstrasi. Seingat saya waktu itu Mochtar sangat optimis pemerintah baru akan mengoreksi kesalahan-kesalahan pemerintahan Sukarno. Waktu itu dia sudah berbicara tentang Harian *Indonesia Raya* yang segera akan diterbitkannya kembali, tentang rencananya membuat film, dan tentang majalah sastra yang harus dipunyai Indonesia.

Pertemuan dengan Mochtar di hari-hari pertama Orde Baru sangat mengingatkan saya pada semangat dan harapan para pejuang kemerdekaan pada hari-hari awal sejarah Republik. Hari-hari awal Orde Baru, beberapa saat setelah lepas dari penjara, mungkin sekali dirasakan Mochtar seperti dia mengalami hari-hari pertama Republik Indonesia, terutama setelah pengakuan kedaulatan. Tapi seperti juga kekecewaan yang melandanya pada pertengahan tahun lima puluhan, tahun-tahun awal Orde Baru kemudian juga mengecewakan Mochtar. Seperti rezim Sukarno yang mematikan surat kabarnya dan memenjarakannya, rezim Soeharto juga menutup *Indonesia Raya* dan ikut jejak Sukarno

memenjarakan Mochtar. Bersama *Indonesia Raya*, Surat Kabar *Pedoman* juga ditutup kembali oleh pemerintahan Soeharto.

Selera Pembaca Berubah

Mochtar kecewa, tapi sejumlah anak muda juga berangsur kecewa kepada tokoh kita ini. Harian *Indonesia Raya* yang legendaris terkenal keberaniannya pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru menemukan pembaca yang tidak hanya memerlukan keberanian. Mochtar tetap berani, tapi mutu yang disajikannya juga tetap seperti yang diproduksinya pada masa lalu. Selera pembaca sudah berubah kalau tidak bisa dikatakan beranjak canggih.

Termasuk yang kecewa adalah Arief Budiman. Arief adalah salah seorang yang mengelola majalah sastra *Horison* yang didirikan dan dipimpin oleh Mochtar Lubis. Arief termasuk orang pertama yang menemui Mochtar di rumah tahanan sebelum para tahanan politik dibebaskan. Dengan bangga Arief menunjukkan foto-foto pertemuannya dengan Mochtar kepada teman-temannya. Sebagai seorang yang berminat filsafat, Arief kemudian kecewa terhadap komentar-komentar Mochtar pada majalah *Horison* yang lebih berupa editorial koran daripada sebuah komentar berbobot filosofis. Ketika Mochtar memproduksi film, hasilnya juga tidak lebih bagus dari film-film pasaran yang membanjiri bioskop-bioskop Indonesia waktu itu. Lama-kelamaan teman-teman yang dulunya mengagumi keberanian dan keteguhan Mochtar memegang prinsip, akhirnya sadar bahwa Mochtar adalah manusia biasa juga. Dan mitos tentang dirinya sebagian adalah kesalahan Sukarno dan Soeharto yang menutup korannya, memenjarakannya, dan dengan cara itu menjadikannya pahlawan.

* * *

BERBEDA DENGAN MOCHTAR, Rosihan Anwar tidak dipenjarakan, baik oleh Sukarno maupun oleh Soeharto. Perbedaan antara dua tokoh ini sebenarnya hanyalah perbedaan varian dalam melanjutkan cita-cita mereka yang memilih membangun Republik

dengan cara berkiprah di lapangan jurnalisme. Dalam membandingkan dua tokoh penting dunia jurnalistik Indonesia itu, mungkin tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa hidup dan perjuangan Mochtar lebih tragis dan dramatis, sementara Rosihan lebih melodramatis.

Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar adalah anak-anak Revolusi yang tumbuh bersama Republik. Mereka tetap berjalan pada garisnya ketika Republik telah berubah arah. Akibatnya, baik Mochtar Lubis maupun Rosihan, keduanya menjalani masa tua mereka sebagai wartawan tanpa surat kabar. Ketika Menteri Penerangan Yunus Yosfiah membebaskan siapa saja untuk mendirikan koran pada awal masa Reformasi, zaman bagi koran perjuangan ternyata sudah lewat. Yang terbit dan bertahan adalah koran sebagai produk industri. Ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama, yakni ketika pembangunan ekonomi Orde Baru mulai memperlihatkan hasil, berjalan sejajar dengan sikap Soeharto yang makin otoriter. Kebebasan yang makin terbatas dan kapitalisme yang makin berkembang adalah pemain terpenting dalam menjauhkan pers Indonesia dari tradisinya sebagai pers perjuangan.

Inilah yang membuat saya sadar bahwa rasa kehilangan saya di sekitar jenazah Mochtar Lubis, adalah rasa kehilangan yang terlambat. Sebab pada akhirnya, dan sebenarnya, Mochtar yang jasadnya terbaring pada salah sebuah ruangan Taman Ismail Marzuki pada hari itu, tidak lebih dari sekadar jenazah seorang tua yang sudah lama tak berdaya. Mochtar yang sesungguhnya adalah hanya sebuah episode dan salah seorang pemain dalam lakon sejarah Indonesia. Kematiannya adalah hanya pertanda pengukuh yang amat jelas mengenai sudah berakhirnya sebuah periode dalam sejarah kita sebagai bangsa.

Sejarah, seperti juga patung para pahlawan di Stalingrad yang tidak mati-matinya—menurut penyair Lekra, H.R. Bandaharo—terus mengalir. Satu periode berakhir, periode selanjutnya bermula. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan itu mudah ditebak kalau kita melihat tempat tersebut. Sejarah pada dasarnya juga demikian, ia mempunyai hukumnya sendiri yang

banyak kali berbeda dengan keinginan orang yang bahkan menjadi pemain utama sejarah tersebut. Akibatnya, banyak pelaku utama sejarah menjadi korban dari sejarah yang ikut digagasnya. Mochtar, Rosihan, Sukarno, Soeharto, Tan Malaka, Syahrir, A.H. Nasution, Benny Moerdani, dan banyak lagi tokoh lainnya di Indonesia, semua berada dalam tataran yang sama. Semua akhirnya menjadi korban sejarah yang ruhnya mereka ikut gagas dan geraknya pernah mereka pimpin. Tapi mungkin memang harus demikianlah perjalanan sebuah bangsa sebelum pada akhirnya menemukan jati dirinya. Dari perspektif inilah juga barangkali orang berbicara mengenai Revolusi yang memakan anak-anaknya sendiri. Begitulah pikiran yang berseliweran di kepala saya setelah jenazah Mochtar diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhirnya.

Siang itu udara Jakarta panas dan kering. Mampir di sebuah kedai minum yang bertebaran di halaman Taman Ismail Marzuki, dengan sebotol Coca-Cola dingin saya berharap mengatasi dahaga saya.

Rosihan Anwar

Tentu saja saya sudah kenal nama Rosihan Anwar jauh sebelum jumpa orangnya. Nun, ketika masih di sekolah menengah, tatkala mulai berambisi dan merasa berbakat menjadi sastrawan, saya sudah membaca cerita pendek Rosihan, "Radio Masyarakat". Cerita pendek itu termuat dalam buku suntingan H.B. Jassin, *Gema Tanah Air*. Beberapa buku laporan jurnalistiknya juga telah saya baca sebelum saya menjadi mahasiswa. Sejak itu hingga tua saya senang tulisan Rosihan, tidak peduli apa saja yang ditulisnya. Rosihan adalah seorang *entertainer* yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya.

Masuk Jakarta pada 1963, saya langsung menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI). Zaman itu hidup susah, kiriman almarhum Bapak tidak bisa menghidupi saya lantaran inflasi yang tangkas dan trengginas, yang secara saksama

dan dalam tempo sesingkat-singkatnya sanggup membabat nilai rupiah. Singkat cerita, untuk bertahan hidup, saya harus mencari pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang tersedia pada masa ekonomi supersusah ketika itu nyaris tidak mungkin ditemukan. Yang bekerja saja sulit hidup dari penghasilan mereka karena mengamuknya inflasi. Tapi dengan bermodalkan kesenangan menulis, dan atas bantuan almarhum Wiratmo Sukito, pada pertengahan 1965, saya mendapat pekerjaan pada Harian *Angkatan Bersenjata* pimpinan Brigjen TNI Soegandhi. Surat kabar itu baru terbit dan tidak mudah mendapatkan wartawan sebab sebagian besar tenaga wartawan yang koran-korannya ditutup oleh rezim Sukarno, tidak boleh dipekerjakan oleh penerbitan lainnya. Waktu itu nyaris semua koran telah dikuasai PKI dan *fellow travelers*-nya, demikian juga dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Ditendang Keluar

Sebenarnya mula-mula saya, juga atas bantuan Wiratmo Sukito, diterima magang pada studio pusat Radio Republik Indonesia (RRI). Waktu itu ambisi saya adalah menjadi reporter radio seperti Darmosugondo yang amat populer waktu itu. Nama Darmosugondo sudah saya kenal ketika masih di Parepare. Tapi belum lagi diangkat menjadi pegawai negeri, Presiden Sukarno sudah melarang Manifes Kebudayaan (Manikebu, menurut PKI) yang salah satu arsiteknya adalah Wiratmo Sukito. Wiratmo diganyang dan terusir dari RRI. Karena dekat dengannya, saya pun ikut ditendang keluar. Gagallah saya jadi pegawai negeri. Kelak ketika jadi Duta Besar, saya diperlakukan sebagai pegawai negeri yang setiap bulan harus membayar iuran sebesar tujuh dolar sebagai anggota Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia). Jadi, akhirnya sempat juga—meski cuma 3 setengah tahun—saya terdaftar sebagai anggota Korpri.

Nah, gara-gara dianggap Manikebuis itulah impian saya menjadi reporter RRI menguap begitu saja. Ironisnya adalah bahwa semasa merebaknya demonstrasi mahasiswa melawan Orde La-

ma, sebagai anggota Biro Penerangan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) pusat, saya mendapat tugas mengoordinasikan lebih 500 radio milik mahasiswa (radio amatir namanya waktu itu) yang menjadi pendukung gerakan mahasiswa di Jakarta. Pada saat itu suara saya sering terdengar, ketika Darmosugondo justru sudah tidak lagi dibolehkan siaran di RRI. *In a way* pada akhirnya saya toh berhasil juga "menggantikan" Pak Darmosugondo.

Setelah Gestapu, dari kedudukan sebagai redaktur kolom pada koran milik ABRI itulah saya berkenalan dengan Rosihan Anwar. Kalau tidak salah ingat, Goenawan Mohamad yang mengantar dan memperkenalkan saya kepada Rosihan. Dengan izin Brigjen TNI Soegandhi, saya meminta Rosihan menulis kolom secara teratur di koran kami. Waktu itu, awal Orde Baru, Rosihan belum lagi muncul kembali sebagai penulis setelah sejak lama "dicekal" oleh Orde Lama. Jadi dengan bangga saya boleh bilang, sayalah yang "merehabilitasi" Rosihan pada awal Orde Baru.

Selain Rosihan, sebenarnya saya juga meminta Mochtar Lubis —baru saja bebas dari tahanan Orde Lama—untuk menulis kolom di koran ABRI itu. Tentu saja saya berharap wartawan "jihad" itu untuk tidak langsung galak, karena waktu itu Soeharto belum selesai "menangani" Sukarno. Dengan syarat demikian, Mochtar langsung menolak tawaran saya. Dengan marah. Meski saya berkecil hati tawaran saya ditolak, saya toh tetap mengerti dan menghormati sikap keras Mochtar yang telah dibayarnya selama bertahun-tahun dalam penjara.

Tapi sekiranya boleh memilih pahlawan pers, Rosihan lebih berkenan di hati saya. Rosihan mengajarkan kepada kita para wartawan dan kaum intelektual, yang hidup di bawah kekuasaan rezim Sukarno maupun Soeharto, bahwa kita masih tetap bisa berbuat tanpa harus menantang dan "memaksa" pemerintah memenjarakan kita. Pada masa Orde Lama, misalnya, dengan berbagai nama samaran, Rosihan dan beberapa penulis, antara lain, Wiratmo Sukito, Goenawan Mohamad, dan Taufiq Ismail, tetap menulis tanpa menyerah kepada Sukarno.

Sebagai kolumnis *Angkatan Bersenjata,* Rosihan secara teratur menulis. Wartawan senior itu tahu betul apa yang sebaiknya dia tulis di koran tentara itu, dan apa pula yang lebih baik ditulisnya di koran-koran lain, yakni setelah dia mulai menulis di beberapa koran, seperti *Kompas*, *Pikiran Rakyat*, dan Harian *KAMI*. Rumahnya waktu itu masih di Jalan Teuku Umar, di seberang rumah Jenderal A.H. Nasution, di samping rumah Jenderal Maraden Panggabean. Dengan berkendaraan sekuter tua, sekali sepekan saya datang mengambil tulisan sekalian mengantarkan honor buat Rosihan. Seingat saya tidak pernah ada percakapan serius antara saya—yang waktu itu masih berumur 24 tahun—dengan Rosihan.

NAH, PADA 1970 TERJADILAH SUATU YANG TIDAK MUDAH SAYA LUPAKAN. Cerita bermula pada pecahnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Kongres PWI di Palembang waktu itu menghasilkan dua pengurus pusat, satu dipimpin B.M. Diah, yang lainnya dipimpin Rosihan Anwar. Menurut informasi yang beredar luas dan layak dipercaya, perpecahan adalah hasil karya Opsus/Ali Murtopo yang ingin menguasai masyarakat wartawan lewat B.M. Diah. Sejumlah wartawan muda "berontak" dengan melakukan serangkaian demonstrasi. Saya ikut berdemo ke rumah Menteri Penerangan Budiardjo (Jalan Teuku Umar) yang letaknya tidak jauh dari "markas" kami di Balai Budaya, Jalan Gereja Theresia, Menteng. Teman demo yang masih saya ingat waktu itu adalah Panda Nababan, yang di kemudian hari menjadi tokoh PDIP.

Dalam salah satu rapat konsolidasi kami sore hari di gedung Balai Budaya setelah pagi dan sorenya berdemo, Rosihan ikut hadir. Karena saya merasa sudah kenal lama dengan tokoh pers ini dan kami wartawan muda sedang berjuang membela dia, saya merasa bebas saja bicara dalam pertemuan tidak resmi itu. Maka terjadilah sesuatu yang tidak pernah saya lupakan dalam hidup saya: Tanpa jelas ujung pangkalnya, Rosihan tiba-tiba menghardik saya dengan kata-kata yang menurut saya tidak pantas di-

ucapkan di depan orang banyak, apalagi ketika kami anak-anak muda sedang berjuang membelanya. Hardikan itu bersifat sangat pribadi dan agak berbau rasialistis. Saya tidak tahu apa salah saya. Seperti teman-teman lain saya hanya ikut mendiskusikan langkah gerakan demo-demo selanjutnya. Semua yang hadir dalam pertemuan itu sempat terdiam sejenak. Saya sangat sedih, kecewa, dan marah. Tapi, saya menahan marah dengan diam.

Sesuai dengan kebiasaan dan tabiat saya, sejak itu saya tidak lagi menganggap Rosihan ada dalam hidup saya. Di berbagai kesempatan jika berpapasan dengannya, saya secara demonstratif membuang muka. Dalam hati saya, kau menghina dan melukai perasaan saya, tidak bakal dan tidak akan saya hormati kau lagi, meski kau seorang wartawan senior terkenal seperti apa pun.

Namun pada suatu hari pada tahun 1976, saya tiba-tiba menemukan diri bersama Rosihan diangkat menjadi anggota juri Festival Film Indonesia (FFI). Timbul soal, bagaimana saya harus bersikap terhadap Rosihan dalam rapat-rapat dewan juri yang anggotanya hanya tujuh orang itu? Itulah hal mendesak yang saya hadapi waktu itu. Secara kebetulan, sebelum rapat pertama dewan juri, saya jumpa Ami Priyono, seorang sutradara film, di halaman Taman Ismail Marzuki. Ami cerita jumpa Rosihan pada suatu resepsi dan bertanya pada Ami: "Apa pasal Salim Said dan Asrul Sani sudah lama tidak mau bicara dengan saya?"

Cerita Ami menyadarkan saya bahwa Rosihan rupanya memperhatikan sikap saya yang "arogan" itu. Rupanya "*the bloody arrogant*" Rosihan terganggu juga oleh kebolehan saya tampil secara artifisial sebagai "*another bloody arrogant*". Tingkah laku saya waktu itu memang saya rancang untuk menyadarkan Rosihan agar dia tahu bahwa sikapnya yang arogan dan kurang memperhatikan perasaan orang lain, memandang rendah, dan suka melecehkan orang lain, sesungguhnya melukai perasaan orang-orang tersebut. Strategi saya rupanya sukses, dan hasilnya terlihat pada rapat pertama dewan juri. Rosihan sebagai anggota Dewan Juri tertua, memulai langkah "rekonsiliasinya" dengan mempersilakan saya, anggota termuda, untuk menguraikan pan-

dangan saya mengenai pekerjaan kami menilai film-film Indonesia dalam FFI tersebut. Perlu saya jelaskan bahwa ketika menjadi juri itu, saya sudah enam tahun menulis kritik film untuk majalah *Tempo* dan juga baru saja menyelesaikan studi saya di Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia dengan tesis mengenai sejarah sosial film Indonesia. Jadi, saya tergolong orang yang punya otoritas bicara film.

YANG LEBIH MEMBUAT SAYA *SURPRISE*, Rosihan kemudian memuji dan mendukung jalan pikiran saya. *He is sending a message to me*, pikir saya waktu itu. Saya lalu menyimpulkan, beliau ingin mengakhiri "perang dingin" kami. Sebagai orang yang sejak kecil dididik menghormati orang tua, dengan cepat saya menyambut gerak pencairan "hubungan diplomatik" tersebut. Kendati demikian, sampai sekarang saya tidak yakin Rosihan tahu apa yang dulu diperbuatnya hingga memicu kemarahan saya. Kalau mengingat kembali rentetan peristiwa tersebut, saya bertanya-tanya dalam hati, kok Rosihan—lewat tahun-tahun yang bersama-sama kami jalani—tidak pernah berusaha untuk tahu apa alasan saya mendiamkannya selama tujuh tahun?

Walhasil, sejak rapat pertama juri FFI itu, hubungan kami berangsur membaik. Dalam beberapa tahun kemudian kami bahkan sering bepergian bersama di dalam maupun di luar negeri. Di Festival Film Cannes (membawa film *Cut Nyak Dhien*) 1989, kami bahkan tidur sekamar. Di Singapura kami berdua mewakili Indonesia, dan selalu bersama-sama, sebagai tamu yang diundang Singapura International Film Festival. Kami juga beberapa kali bersama menghadiri Asia-Pasific Film Festival di berbagai negara Asia.

Peninggalan Portugis

Berbicara tentang Rosihan dan film, perlu dicatat bahwa wartawan senior itu juga seorang pemain film meski tidak pernah memegang peran utama. Pada tahun lima puluhan dalam film-film karya Usmar Ismail, wajah Rosihan hampir selalu bisa ditemukan.

Rosihan memang teman sekolah Usmar Ismail di Yogyakarta sebelum perang. Setelah Indonesia merdeka, Usmar dan Rosihan menjadi keluarga dekat karena istri mereka bersaudara kandung. Di tahun-tahun tujuh puluhan dan delapan puluhan, wajah Rosihan masih sering kita saksikan di gedung-gedung bioskop. Seingat saya Rosihan terakhir kali muncul dalam film *Cut Nyak Dhien* (1989) yang disutradarai Eros Djarot dengan Christine Hakim sebagai pemain utamanya. Film itu mendapatkan kehormatan dipertunjukkan pada salah satu seksi Cannes Film Festival di Cannes, Prancis Selatan. Rosihan dan saya diajak serta menemani film itu ke Cannes. Di kota pantai Riviera itu pada musim festival sulit mendapatkan hotel. Kalau dapat juga sewanya amat mahal. Kami akhirnya mendapatkan hotel jauh dari pusat kegiatan festival. Di sana saya tidur sekamar dengan Rosihan.

Wartawan senior itu bukan cuma aktor yang pada zaman Jepang sudah muncul di panggung Gedung Kesenian dalam sandiwara yang dimainkan oleh grup amatir *Maya* pimpinan Usmar Ismail, pada masa tuanya almarhum juga sering membuat film dokumenter. Biasanya order pembuatan film tersebut datang dari Dr. Ishadi S.K., Direktur TVRI waktu itu. Suatu kali Rosihan membuat film mengenai peninggalan bangunan Portugis dan Belanda di Malaka. Saya kebetulan di Malaysia waktu itu dan diajak ikut membantu. Honornya tidak besar sebab kegiatan itu dikerjakan Rosihan lebih sebagai kesenangan seorang yang suka sejarah. Kendati demikian saya kebagian juga sekadar uang saku yang diambil Rosihan dari honornya sendiri. Kalau tidak salah jumlah yang dibagikan kepada saya, 50 dolar Amerika.

Dari semua perjalanan tersebut, hubungan kami makin meningkat akrab. Rosihan tidak pernah lagi bertindak arogan kepada saya, kalau tidak malah bersikap amat sopan. Suatu kali, entah di kota mana dalam serangkaian perjalanan bersama kami, wartawan senior itu mengharukan saya tatkala berkata, "*You* ini anak saya." Mungkin maksudnya, secara umur dia pantas menjadi bapak saya. Entahlah. Dalam keadaan hubungan kami yang makin membaik itulah, beliau pernah cerita mengenai Rektor Universi-

tas Sawerigading (sekarang nama universitas ini tidak terdengar lagi) yang pernah bermaksud memberinya gelar doktor *honoris causa* (kehormatan) dalam bidang jurnalistik. "Tapi saya harus diuji dulu," cerita Rosihan tentang sebab gagalnya pemberian gelar kehormatan tersebut. Rosihan kok mau diuji, mana mau dia, pikir saya. Lagi pula gelar *honoris causa* memang tidak pernah mempersyaratkan calon penerimanya diuji terlebih dahulu. Aturan mana pula itu?

Satu kali dalam sebuah penerbangan dari Makassar ke Jakarta, saya duduk berdekatan dengan Prof. Dr. Azyumardi Azra. Kami berdua memang baru saja menghadiri rapat Dewan Pertahanan Nasional yang pada kesempatan tersebut diadakan di ibu kota Sulawesi Selatan dengan topik pergolakan di Papua. Soal Rosihan dan gelar doktor kehormatan itu saya bicarakan. Saya lupa mengapa kami sampai pada topik pembicaraan tersebut. Tapi saya katakan bahwa Rosihan pantas mendapat kehormatan tersebut. Azyumardi tertarik. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi juga merasa Rosihan pantas mendapatkan gelar kehormatan tersebut dan bahkan bersedia mem-

Salim Said bersama Rosihan Anwar, 1988.

berikannya. Untuk itu dia minta saya "mengerahkan" sejumlah profesor untuk mengusulkan Rosihan mendapatkan gelar doktor *honoris causa*. Dengan cepat saya mendapatkan dokumen yang diperlukan itu dari Prof. Taufik Abdullah, Prof. Juwono Sudarsono, Prof. Zein Umar Purba, dan tentu saja dari Prof. Salim Said sendiri. Dalam waktu singkat, Haji Rosihan Anwar pun menjadi Dr. (HC) Haji Rosihan Anwar.

Menurut teman-teman yang menghadiri upacara di aula UIN itu, Rosihan gembira sekali menerima gelar kehormatan tersebut. Saya sendiri tidak sempat hadir karena sedang kurang enak badan. Tapi selain sedikit sakit itu, saya juga merasa tugas saya sudah selesai. Artinya, saya tidak diperlukan lagi pada upacara tersebut. Meski cuma gelar "kehormatan", Rosihan yang tidak pernah menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi mana saja, akhirnya memiliki juga gelar akademik selain gelar haji yang sejak lama menghiasi namanya.

"Dari Amristar? No"

Kembali kepada kebiasaan arogansi dan kesenangan melecehkan orang yang dianggap sebagai merek Rosihan, pertanyaannya adalah berubahkah dia kemudian setelah "hubungan diplomatik" kami pulih? Kepada saya jelas berubah, tapi kepada orang lain, sama sekali tidak. Itu saya saksikan pada berbagai kesempatan dalam dia berhubungan dengan orang-orang lain. Di Makassar (1988), misalnya, almarhum dimintai sambutan pada pembukaan seminar tentang film dalam rangka FFI. Duduk di sampingnya waktu itu antara lain Arsal Alhabsyi, Ketua Dewan Kesenian Makassar, seorang budayawan yang juga wartawan senior dan teman lama Rosihan. Tapi dalam pengantar singkatnya, dengan dingin Rosihan mengatakan (sambil melihat Arsal), "Saya tidak tahu apa kepentingannya orang ini duduk di depan hadirin." Arsal tersenyum dingin dan terlihat serbasalah.

Di Singapura, lain lagi cerita tentang Rosihan. Pada seminar film yang merupakan bagian dari kegiatan festival film interna-

sional di kota tersebut, kami kebetulan duduk bersebelahan dengan seorang anggota delegasi dari India. Mula-mula Rosihan berkenalan biasa saja dengan orang tersebut. Tapi entah setan apa yang lewat, Rosihan kemudian dengan terampil dan secara mendadak menembakkan serentetan pertanyaan, hingga orang itu tampak sekali terganggu dan kesal, bahkan berangsur marah. Anda dari Bombay? No, kata orang itu. Dari Kalkutta? No. Dari Madras? No. Dari New Delhi? No. Dari Heyderabad? No. Dari Amristar? No. Dari Puna? No, no, no, kata orang itu dengan nada suara nyaris berteriak.

Untuk apa menggoda orang itu dengan sejumlah pertanyaan yang sebenarnya tidak relevan dan hanya mengganggu konsentrasinya mengikuti pembicaraan dalam seminar tersebut? Saya takut saja orang itu meledak marah. Untunglah sampai seminar selesai produser film dari India itu berhasil mendemonstrasikan daya tahannya yang cukup tinggi terhadap "kejahilan" Rosihan. Gangguan terhadap orang India di Singapura ini jelas tidak ada hubungannya dengan arogansi. Di sini Rosihan tampil sebagai orang yang punya kebiasaan iseng dan jahil mengganggu orang lain. Dalam rangka keisengan dan kejahilan inilah juga, syahdan Bung Karno pernah marah kepada Rosihan. Soalnya, koran *Pedoman* yang dipimpin Rosihan suatu hari menulis di pojoknya tentang alasan Sukarno yang tidak akan memasang foto istrinya pada prangko. Sukarno takut "pantat istrinya dijilat" tulisnya. Iseng saja.

Dari pengamatan saya bergaul akrab selama lebih 40 tahun, di dalam maupun di luar negeri, saya mendapat kesan bahwa sebenarnya persoalan utama Rosihan adalah "demam panggung". Di depan orang banyak tingkahnya suka aneh dan selalu berusaha menarik perhatian. Pada saat seperti itulah, sikap arogannya serta kegiatan melecehkan orang lain mudah muncul. Tatkala kami berdua, Rosihan normal dan baik-baik saja. Dan dalam keadaan itulah saya melihat Rosihan sebagai manusia yang memperhatikan perasaan orang lain. Sebagai bukti Rosihan merupakan orang yang memperhatikan perasaan orang lain, teruta-

ma yang bekerja di bawahnya, bandingkanlah dia dengan wartawan senior seangkatannya, B.M. Diah dan Mochtar Lubis. Dari usaha jurnalistiknya, B.M. Diah menjadi kaya sendiri, sedangkan anak buahnya kebanyakan tidak punya apa-apa. Mochtar Lubis terkenal sendiri, sedangkan anak buahnya kebanyakan tidak pernah dikenal dan sebagian besar meninggal dalam keadaan melarat. Rosihan tetap tidak kaya hingga masa tuanya, tapi banyak mantan anak buahnya yang berhasil sebagai wartawan dan pengusaha di bidang media.

Meski hubungan kami terus membaik (saya bahkan diminta menulis pengantar untuk sebuah bukunya, sementara sebuah buku saya diberinya pengantar) ingatan terhadap pelecehan dan penghinaan Rosihan yang menyakitkan saya di Balai Budaya puluhan tahun silam tidak kunjung punah. Saya memang barangkali tergolong pemaaf, tapi pasti bukan pelupa kepada hal yang menyakitkan hati saya. Maka dalam bersama-sama dengan Rosihan, saya selalu waspada terhadap kemungkinan "disakiti" lagi. Alhamdulillah sampai akhir hidup almarhum, saya aman-aman saja. Kendati demikian saya tetap berencana untuk pada suatu hari nanti membuka kisah itu pada Rosihan, biar dia tahu latar belakang mengapa saya pernah mendiamkannya selama hampir tujuh tahun.

Namun, Allah rupanya tidak ingin rencana itu terlaksana. Saya melihat Rosihan terakhir kali di ruang ICU Rumah Sakit Harapan Kita. Waktu itu dia tertidur dalam keadaan terduduk dan bernapas dengan susah, itu pun dengan alat bantu yang diperlukan untuk mengalirkan oksigen. Karena keesokan harinya saya dan istri sudah akan berangkat umrah, saya meninggalkan saja kartu nama dengan catatan dan harapan serta doa agar wartawan senior itu cepat sembuh.

Di Makkah, beberapa hari kemudian, saya mendapat SMS dari Jakarta yang memberitakan Rosihan akan mengalami operasi jantung yang risikonya berat mengingat usianya yang sudah amat lanjut. "Mohon didoakan," pesan SMS itu. Di depan Ka'bah, saya dan istri dengan khusyuk berdoa bagi kesuksesan operasi

tersebut. Operasi kemudian memang berhasil, tapi *Malakul Maut* tidak ada urusan dengan kesehatan. Malaikat pembantu Allah dalam urusan menutup usia manusia itu datang juga beberapa hari kemudian. Dan Dr. (HC) Haji Rosihan Anwar akhirnya diberangkatkannya.

Di depan jenazahnya—di samping sejumlah pelayat—saya berusaha menyembunyikan air mata untuk seorang senior yang sebenarnya baik, tapi toh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itulah yang muncul dalam bentuk arogansi, sikap meremehkan orang lain, dan tindakan-tindakan iseng serta jahil. Di depan jenazah, saya bersaksi dalam doa bahwa dengan segala kekurangannya, Rosihan sesungguhnya adalah orang baik. Kepada Allah, saya berdoa agar segala kesalahan dan kekeliruan serta akibat sikap cuek, kegemaran menjahili orang, dan arogansi beliau dimaafkan Allah. Dan semoga perjalanannya ke hadapan Khaliknya dimudahkan. Saya sudah lama memaafkannya. Semoga Allah secepatnya menghapuskan ingatan dan bekas-bekas sakit hati saya kepada perlakuannya di Balai Budaya dulu itu. Sebagai wartawan, seniman, dan intelektual, Rosihan Anwar telah berbuat banyak bagi negeri ini. Selain menulis banyak, menerbitkan sejumlah buku, main film dan membuat film, dia juga telah mendidik banyak wartawan. Karena itu, beliau memang pantas dimakamkan di Taman Pahlawan.[]

Emil Salim Menantang Soeharto

Jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, bukanlah sesuatu yang amat mengejutkan. Ada banyak tanda yang mengisyaratkan segera berakhirnya rezim Orde Baru sekian bulan, bahkan sekian tahun sebelum Soeharto terpaksa turun panggung. Salah satu yang mencolok yang sudah hampir dilupakan oleh banyak orang adalah tantangan secara terbuka kepada rencana Soeharto mengangkat Prof. Dr. B.J. Habibie menjadi Wakil Presiden pada Sidang MPR 1998. Sepanjang sejarah kekuasaan Soeharto, masa menjelang Sidang MPR 1998 itulah munculnya secara terbuka tantangan terhadap kekuasaan Bapak Presiden. Pada sidang MPR 1988, rencana Soeharto mengangkat Ketua Umum Golkar Sudharmono memang mendapatkan "tantangan" *dari dalam ABRI. Tapi, ribut di sekitar keputusan Soeharto mengangkat Mensesneg terlama Orde Baru waktu itu terbatas di kalangan elite ABRI dan mereka yang berada di sekitar Bapak Presiden saja. Artinya, tidak melibatkan publik.*

Seperti diketahui salah satu ketetapan MPR pada masa Orde Baru mengatur dengan jelas bahwa seorang hanya akan menjadi wakil presiden (wapres) kalau bisa bekerja sama dengan presiden terpilih. Ketetapan MPR ini jelas dibuat dengan niat agar Presiden Soeharto sendirilah yang menentukan siapa yang berkenan dipilihnya menjadi wapres. Dengan kata lain, bukan MPR yang memilih wapres, melainkan sang presiden sendiri.

Ketika menjelang sidang MPR 1983, pihak ABRI—diwakili oleh Letjen Harsudiono Hartas—mencalonkan Panglima ABRI, Try Sutrisno, Soeharto sangat marah lalu menghukum Hartas dengan menempatkannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Padahal, tadinya Kepala Staf Sosial Politik ABRI itu disebut-sebut sebagai calon menteri dalam negeri.

Nah, keberanian menantang Soeharto menjadi makin tampak menjelang Sidang MPR 1998. Waktu itu sejumlah nama muncul sebagai calon meski yang paling menarik adalah nama Prof. Dr. Emil Salim. Ekonom ini, seperti kita ketahui, adalah salah seorang yang bersama Prof. Wijoyo Nitisastro merupakan arsitek ekonomi Orde Baru. Yang perlu dicatat, sampai Soeharto jatuh, bahkan lama setelah Orde Baru terbenam dalam sejarah, Emil dan teman-teman "arsitek"*-nya tidak pernah secara jelas bicara apa yang salah dengan ekonomi Orde Baru sehingga akhirnya rezim terpuruk.*

Peristiwa yang amat penting ini—serangan dan tantangan terbuka untuk pertama kalinya kepada rencana Soeharto—waktu itu saya komentari lewat sebuah tulisan. Entah mengapa tidak ada media yang bersedia memuatnya. Untuk kepentingan historis, komentar itu saya cantumkan di bawah ini.

PROF. DR. EMIL SALIM adalah satu dari beberapa orang yang dicalonkan atau mencalonkan diri untuk dipilih sebagai presiden
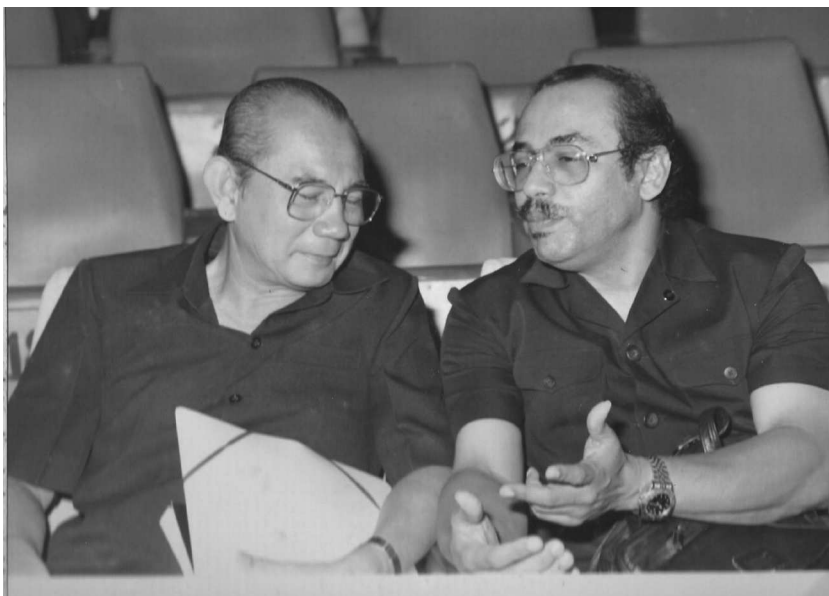
Bersama Prof. Emil Salim.

atau wakil presiden oleh MPR pada sidangnya awal bulan Maret nanti. Yang menarik dan membedakan pencalonan Emil Salim dari sejumlah calon lainnya, adalah *timing* pencalonannya, kelompok yang mencalonkannya, dan alasan yang mendorong pencalonan itu.

Pencalonan Emil diluncurkan oleh sejumlah tokoh terkemuka yang menyebut diri kelompok Gema Madani. Pencalonan mereka umumkan pada 16 Februari 1998, yakni hanya dua hari sebelum ABRI membulatkan dan mengumumkan dukungan kepada Prof. Dr. B.J. Habibie sebagai calon wapres setelah sebelumnya semua fraksi menyebut Habibie sebagai calon mereka. Memunculkan nama Emil Salim sebagai calon pada saat demikian, tidak bisa dibaca lain kecuali berarti penolakan Emil dan para pendukungnya kepada B.J. Habibie. Kejadian seperti ini, dengan cara yang lebih halus, terjadi juga pada 1988 ketika ABRI menolak pencalonan Sudharmono untuk jabatan wakil presiden. Waktu itu, Soeharto masih sangat kuat, bukan saja berhasil menjadikan Sudharmono sebagai Wapres, tapi juga menghukum para jenderal yang "mbalelo".

Tentu saja tidak ada yang salah dari langkah menolak Habibie dan mencalonkan Emil, atau siapa saja untuk jabatan apa saja di negara yang didambakan sebagai negara demokrasi ini. Tapi, mengingat bahwa mereka yang berada dalam kelompok Gema Madani adalah orang pintar-pintar—karena itu tahu jago mereka tidak bakal mengalahkan Habibie yang dicalonkan Soeharto, orang yang menentukan siapa yang bisa bekerja sama dengannya nanti. Maka, bisa dipastikan mereka tahu bahwa tidak terlalu banyak manfaatnya jika yang mereka tuju hanya sekadar menyatakan penolakan kepada Habibie, sebab hal demikian sudah pula dilakukan banyak orang, bahkan termasuk Lee Kuan Yew dari Singapura. Oleh sebab itu, saya yakin ada pesan lain yang ingin mereka sampaikan kepada Habibie dan Haji Mohammad Soeharto yang secara bersama hampir bisa dipastikan akan terpilih oleh MPR bulan depan. Apa pesan atau pesan-pesan tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita melihat penjelasan Emil Salim dan para pendukungnya. Rahmi Hatta, janda Bung Hatta, menjelaskan dukungannya kepada Emil sebagai usaha untuk "Mengingatkan masyarakat bahwa kita memerlukan orang-orang dalam pemerintahan yang bersih, punya perhatian pada masyarakat yang berlapis-lapis, terutama rakyat kecil".

Agus Purnomo, juru bicara kelompok Gema Madani menjelaskan kegiatan kelompoknya mencalonkan Emil karena Emil mereka nilai sebagai "Seorang yang bersih dari berbagai bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme". Pada koran dengan tanggal penerbitan yang sama, Zoemrotin, seorang tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung Emil Salim, menyebut kegiatan pencalonan Emil sebagai lebih kepada kegiatan "*moral force* dan pemberdayaan *civil society*". Pernyataan Zoemrotin sejalan dengan pernyataan Emil Salim sendiri. Kata Guru Besar Ekonomi itu: "Kursi bukan tujuan utama. Tetapi, motivasi utamanya adalah pendidikan politik." (*Kompas*, 18 Februari 1998.)

Menteri Lingkungan Hidup, Ir. Sarwono bukanlah orang yang secara resmi mendukung Emil Salim, tapi pernyataannya kepada pers mengenai kegiatan pencalonan itu menunjukkan simpati dan pengertiannya mengenai latar belakang pencalonan tersebut. Kata Sarwono: "Di balik ini semua saya pikir ada kerinduan akan nilai-nilai tertentu yang dipersepsikan mulai hilang di Indonesia, seperti sifat-sifat jujur, apa adanya, dan kesederhanaan."

Yang paling jelas mengungkapkan pentingnya masalah konsep dan gagasan di balik pencalonan Emil adalah Herawati Diah. Wartawan senior ini menjelaskan, "Kita tidak mendukung semata sosok Emil sendiri, tetapi juga konsep dan programnya. Kami harapkan kalaupun orangnya tidak terpilih, programnya bisa diteruskan." Tampaknya karena mempunyai konsep dan program itulah, maka Emil Salim menantang B.J. Habibie untuk berdebat demi menguji konsep dan program masing-masing. Tujuan perdebatan itu, menurut Emil Salim, "Agar dengan begitu wapres yang dipilih nantinya memang benar-benar memberikan tekan-

an, nuansa, dan akses ke dalam upaya pemulihan ekonomi pada masa lima tahun mendatang."

Tantangan berdebat ini mengubah kedudukan Emil dari posisi orang yang didorong menjadi orang yang terkesan berambisi untuk menduduki kursi wapres. Perdebatan para calon adalah tradisi yang lazim di negara yang memilih tokoh berdasarkan program, seperti di Amerika Serikat, misalnya. Tapi di Indonesia, program (GBHN) dibikin terlebih dahulu oleh MPR, dan baru setelah itu MPR memilih orang yang dianggap pantas dan memenuhi syarat melaksanakan program (GBHN) tersebut.

Sesuai dengan Petunjuk Presiden

Emil Salim yang lama menjadi orang penting Orde Baru tentulah mengerti konstitusi dan aturan main politik Indonesia itu. Ataukah dengan tantangan berdebat itu, Emil ingin mengatakan bahwa konstitusi dan aturan main itu sudah kuno dan sudah harus dicampakkan? Tentu saja dia boleh berpendapat demikian, tapi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden bulan Maret nanti, konstitusi dan aturan main yang ada masih belum diubah dan karena itu masih harus dihormati. Yang juga terasa aneh dari ajakan berdebat Emil kepada Habibie itu adalah adanya kesan kuat bahwa Emil Salim mengabaikan kenyataan konstitusional dan sejarah politik Orde Baru. Konstitusi kita yang lebih dikenal sebagai UUD 45 memberikan kekuasaan yang luar biasa besarnya kepada presiden, dan wakil presiden hanyalah pembantu presiden.

Wapres bekerja sesuai dengan petunjuk sang presiden. Kalau presidennya merasa bisa bekerja sendiri, sebagaimana yang selama ini ditunjukkan oleh Presiden Soeharto, maka wapres hadir tidak lebih dari sekadar memenuhi persyaratan konstitusi. Dan sejarah Orde Baru adalah juga sejarah wapres yang hadir terutama karena konstitusi mempersyaratkan demikian. Karena itu fungsinya tidak lebih dari ban cadangan saja.

Dengan demikian, terlepas dari sistem kita yang memberi hak kepada MPR membuat GBHN dan memilih presiden dan wa-

kil presiden untuk melaksanakannya, jika Emil Salim memang punya gagasan dan konsep pembenahan ekonomi yang sedang dilanda krisis ini, yang sebenarnya lebih masuk akal ditantangnya berdebat bukanlah Habibie, melainkan Haji Mohammad Soeharto, orang yang hampir dipastikan akan menjadi Presiden kita untuk yang ketujuh kalinya. Sebab meski Habibie akan berperan lebih besar sebagai Wapres—lebih daripada para pendahulunya, saya kira—tapi dia toh hanya akan menjalankan petunjuk Presiden dalam mengimplementasikan GBHN. Sebagai Wapres, Habibie saya kira hampir bisa dipastikan tidak akan pernah berada dalam posisi membuat kebijakan sendiri.

Dengan kata lain, meski Emil formalnya terkesan berambisi menjadi wakil presiden, dengan menonjolkan pentingnya program dan konsep yang dimilikinya itu, sulit menyingkirkan kesan, Emil Salim justru berambisi menjadi presiden. Sekali lagi ini boleh-boleh saja dan sama sekali tidak melanggar konstitusi dan peraturan apa pun di negeri ini. Tapi untuk tujuan itu, Emil tentu tahu syaratnya jauh lebih berat.

Apa pun yang dilakukan oleh Gema Madani dalam menjagokan Emil, dan bagaimanapun tingkah laku politik Emil Salim sebagai akibat adanya dukungan tersebut, satu hal yang niscaya jelas bagi pemerintah—yang sekarang maupun yang akan dihasilkan oleh sidang MPR bulan depan—masyarakat Indonesia makin kritis, makin berani, dan telah berada pada tingkatan sanggup menampilkan tokoh alternatif. Dengan memperhatikan alasan pencalonan Emil oleh Gema Madani, Habibie yang akan jadi wapres nanti tentulah bisa menimba masukan mengenai apa yang dicemaskan sejumlah orang terkemuka Indonesia terhadap dirinya.

Terhadap gejolak akibat munculnya nama Emil Salim sebagai penantang Habibie ini, kita tidak boleh lupa bahwa Emil Salim adalah salah seorang yang ikut meletakkan dasar-dasar pembangunan Orde Baru. Peran penting Emil sebagai salah seorang arsitek pembangunan Orde Baru itulah rupanya yang mendorong Dr. Afan Gaffar dari Universitas Gadjah Mada menyebut *post-power*

syndrome sebagai hal yang melatarbelakangi bersemangatnya Emil untuk menerima dukungan sebagai calon wakil presiden.

Menurut Afan Gaffar, Emil Salim "Seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap keadaan [krisis ekonomi] sekarang ini." Apakah justru karena merasa ikut bertanggung jawab itulah, maka Emil menjadi bersemangat tampil kembali ke dalam kancah pemerintahan Republik ini demi mengoreksi kesalahan-kesalahan masa lalunya? *Wallahu a'lam*.[]

Tentang
Tiga Jenderal Besar

Pada waktu Jenderal (TNI) Wiranto menerima pimpinan Angkatan Darat dari tangan Jenderal (TNI) Hartono lewat suatu upacara timbang terima di halaman Markas Besar Angkatan Darat, saya duduk di barisan kedua para tamu VIP. Di depan saya duduk Jenderal TNI (Purn.) A.H. Nasution, sementara di samping saya ada Mayor Jenderal TNI Fachrul Razi, waktu itu Gubernur Akademi Militer di Magelang.

Selesai upacara resmi, Wiranto dan istrinya mendatangi Nasution untuk memberi salam. Ketika Wiranto membungkukkan badan mencium tangan Nasution, saya tiba-tiba melihat suatu kesinambungan yang menarik. Menurut catatan, Wiranto lahir pada 1948, tahun ketika Nasution sebagai Panglima Komando Jawa sedang memimpin perang gerilya di Pulau Jawa. Sebagai seorang peneliti politik militer, kenyataan yang menarik itu merangsang perasaan dan pergolakan pemikiran dalam diri saya. Dari pergolakan itu gagasan yang lahir adalah pantasnya Nasution menjadi Jenderal bintang lima [Jenderal Besar]. Memang aneh, dan tidak bisa saya jelaskan sampai sekarang mengapa lahir pemikiran dan gagasan demikian pada saat itu. Muncul begitu saja. Mungkin tidak terlalu salah untuk mengatakan bahwa waktu itu saya lebih menjadi seorang seniman dan sejarahwan tinimbang seorang ilmuwan politik yang mempelajari peran politik militer Indonesia.

Ketika tiba acara ramah tamah, saya membicarakan gagasan mendadak saya itu dengan dua jenderal, Sayidiman Suryohadiprojo dan Zaini Azhar Maulani. Keduanya bersimpati kepada gagasan tersebut. Sayidiman menyarankan menuliskannya, tapi Maulani meyakinkan saya bahwa kalau dipublikasikan sebelumnya, Soeharto pasti tidak akan setuju. Saya kemudian berpikir, Soeharto jelas

akan menolak juga kalau Nasution dihargai lebih tinggi daripada sang Presiden. Akhirnya, saya sampai pada kesimpulan. Gagasan orisinal saya itu hanya bisa terwujud kalau Soeharto juga mendapat bintang lima. Tapi, lalu apa dasar pemberian itu? Setelah berhari-hari berpikir, saya menemukan jalan keluar. Untuk itu, Panglima Besar Sudirman juga harus dianugerahi bintang lima. Alasan yang dipakai adalah peran mereka bertiga dalam Dwifungsi. Tapi, kepada siapa gagasan itu harus saya jual supaya bisa menjadi kenyataan?

Teman baik saya, Letnan Jenderal TNI Syarwan Hamid, Kepala Staf Sosial Politik ABRI waktu itu, menawarkan bantuan mempertemukan saya dengan Jenderal TNI Feisal Tanjung, Panglima ABRI. "Ya, talk to him," kata Maulani. Ketika gagasan tersebut saya sampaikan kepada Feisal pada awal Agustus 1997, beliau ternyata tertarik. "Tolong tuliskan dasar pertimbangannya," kata Jenderal Tanjung. Pada enam Agustus, saya kirimkan dasar pertimbangan untuk gagasan saya itu. Sore harinya saya berangkat ke Nigeria membawa rombongan Dewan Kesenian Jakarta. Kami mampir dan mengadakan pertunjukan di Kairo sebelum melanjutkan perjalanan ke Lagos. Ketika balik ke Jakarta saya kebetulan jumpa Akbar Tanjung, salah seorang tokoh Golkar. "Eh, kabarnya nanti Pak Harto dan beberapa jenderal akan menjadi jenderal bintang lima," katanya kepada saya. Berita itu tidak saya komentari. Saya kemudian menelepon Nurdin, mantu Jenderal A.H. Nasution. "Kami juga mendengar kabar itu. Tapi, kita lihat saja nanti," katanya.

Singkat cerita, pada hari Angkatan Bersenjata, lima Oktober 1997, Soeharto dan Nasution sudah memakai bintang lima di pundak masing-masing. Saya berada di Hanoi waktu itu. Tapi, Jenderal Maulani menceritakan kemudian bagaimana bintang lima itu telah menimbulkan keakraban serta rasa sukacita pada Nasution dan Soeharto. "Seperti tidak pernah terjadi apa-apa di antara keduanya," kata Maulani.

Nah, naskah di bawah ini adalah dasar pertimbangan yang saya tulis atas permintaan Pangab, Jenderal TNI Feisal Tanjung waktu itu.

PADA SUATU hari di bulan Agustus tahun 1945, sebuah negara lahir di Kepulauan Nusantara. Tapi, diperlukan waktu hampir dua bulan sebelum pada akhirnya kabinet negara baru itu pada lima Oktober memutuskan untuk membentuk tentara. Dalam masa antara lahirnya negara dan terbentuknya tentara itulah para pemuda di berbagai penjuru Indonesia bangkit merebut senjata dari musuh, mempersenjatai diri, dan membentuk pasukan-pasukan guna mempertahankan negara yang baru lahir itu.

Ketika kumpulan pemuda bersenjata itu memilih sendiri pemimpinnya pada November 1945 di Yogyakarta, yang mereka pilih adalah seorang mantan Daidan Cho (Komandan Batalion) yang sebelumnya adalah salah seorang pimpinan Pemuda Muhammadiyah Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah. Orang itu bernama Sudirman, dan nama kedudukan yang diberikan oleh para pemuda yang memilihnya adalah Panglima Besar Tentara.

Boleh jadi karena komunikasi antara Jakarta—pusat pemerintahan—dan Yogyakarta—tempat kedudukan pimpinan tentara—begitu buruk pada awal masa Revolusi itu, mungkin juga karena para politisi di Jakarta tidak senang dipaksa pemuda menerima Sudirman sebagai pemimpin tentara, maka diperlukan waktu lebih sebulan sebelum akhirnya Kabinet Sutan Syahrir mengakui Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara pada Desember 1945.

Sebagai Panglima Besar yang dipilih oleh anak buahnya, dan tahu bahwa pemerintah tidak terlalu bahagia dengan dirinya sebagai pemimpin tentara, mantan Daidan Cho Sudirman ini melihat kepada anak buahnya sebagai *constituent* bagi peranannya dalam perjuangan mempertahankan Republik Indonesia. Dengan sikap seperti inilah, Sudirman dan pasukannya—yang kemudian dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI)—mengembangkan sikap politiknya tersendiri. Sikap politik ini menjadi makin mendapatkan bentuk di tengah-tengah pertikaian seru antara partai oposisi melawan partai pemerintah dalam sebuah sistem yang kini sering dikenang dengan pahit sebagai zaman liberal.

Sudirman dan para pemimpin tentara yang lebih mengutamakan keselamatan negara dari ancaman tentara kolonial Belanda, menganggap terlalu mewah pertikaian politik yang melanda kaum sipil ketika musuh sudah berdiri di ambang pintu dan setiap saat siap menyerbu. Sikap pemerintah yang cenderung mencoba jalan damai dengan cara berunding dengan musuh, juga menjadi pokok masalah yang menciptakan jarak antara tentara dan Kabinet.

Jenderal Sudirman.

Namun, Sudirman tidak selalu menarik garis batas pemisah antara tentara dan pemerintah, meski ada masa ketika Panglima Besar ikut bersama pemimpin oposisi, Tan Malaka, dalam rapat yang mengecam pemerintah. Ketika Jenderal Darsono, misalnya, melakukan percobaan perampasan kekuasaan di Istana Yogya pada 3 Juli 1947, Sudirman menolak mendukung anak buahnya itu. Tapi, ketika Komunis berontak pada 1948, Sudirman segera melaksanakan perintah Perdana Menteri Hatta menyerang Madiun.

Sebelum orang-orang Komunis bikin negara sendiri di Madiun, Mohammad Hatta merasionalisasikan tentara sebagai konsekuensi Perjanjian *Renville,* yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Belajar dari sejarah penipuan dan pengkhianatan Belanda terhadap Pangeran Diponegoro, Sudirman tidak ingin tentaranya diperkecil ketika Belanda makin menjepit wilayah Republik yang terus mengecil hingga tinggal bagaikan selembar "daun kelor". Sudirman menolak rasionalisasi tentara. Dan Hatta tidak bisa berbuat banyak.

Firasat Panglima Besar ternyata tidak meleset, Belanda kemudian menyerang dan menduduki wilayah Republik pada De-

sember 1948. Pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta, Sudirman yang berparu-paru sebelah, menolak tawaran Presiden Sukarno untuk tinggal di Yogyakarta agar bisa dirawat oleh dokter pasukan Belanda. Setelah itu, Panglima Besar meninggalkan ibu kota untuk memimpin perang gerilya.

Kelak ketika perang gerilya berakhir di penghujung 1949, diperlukan usaha khusus membujuk Sudirman untuk masuk kota. Pasalnya sederhana, Panglima Besar sudah berjanji kepada anak buahnya tidak akan meninggalkan wilayah gerilya sebelum perang berakhir dengan kemenangan. Setelah dengan enggan kembali ke Yogyakarta, muncullah soal yang paling berat bagi Sudirman. Panglima Besar diminta Sukarno menghentikan tembak-menembak dan memerintahkan anak buahnya meninggalkan semua basis gerilya sebelum perundingan dengan Belanda dimulai di Den Haag. Sudirman menolak, bahkan minta berhenti dari ketentaraan. Sukarno mengancam meletakkan jabatan. Ancam-mengancam berakhir ketika Kolonel Abdul Haris Nasution berhasil meyakinkan Sudirman untuk memilih keutuhan bangsa daripada hanya kepentingan TNI.

Sikap Sudirman sebagai Bapak Tentara yang terus-menerus sebisa mungkin menjaga keutuhan dan otonomi tentara dari berbagai usaha sipil—pemerintah maupun oposisi—untuk mengontrol atau memengaruhinya, berhasil membawa TNI melewati masa Revolusi bebas dari kendali kaum oposisi—Tan Malaka maupun Front Demokrasi Rakyat/PKI—ataupun dari kontrol penuh pemerintah. Kepemimpinan Sudirman juga membawa TNI keluar dari masa Revolusi dengan persepsi diri sebagai suatu kekuatan politik yang berjuang bersama dengan kekuatan politik lainnya dalam menjaga kelangsungan dan perkembangan Republik Indonesia.

Bebas dari ancaman kolonial Belanda, hidup dalam masa demokrasi parlementer, Abdul Haris Nasution sebagai pemimpin tentara pada tahun lima puluhan harus bekerja keras menjaga keutuhan dan otonomi tentara. Bukan saja menghadapi tekanan dari kekuatan politik di luar, dari dalam diri tentara sendiri juga

muncul ancaman—PRRI/Permesta, DI/TII, Gestapu/PKI—yang bukan saja membahayakan keutuhan tentara, melainkan juga keutuhan Republik. Semua itu secara berangsur-angsur diatasi Nasution.

Sejak penghujung tahun lima puluhan hingga 1965, soal serius yang dihadapi oleh Nasution adalah kekuatan Komunis yang makin marak, dan Sukarno yang makin ingin menentukan. Kalau pada masa Revolusi, Sukarno sering kali bersimpati kepada Sudirman, pada masa kepemimpinan Nasution, TNI sulit mendapatkan

Jenderal Besar Nasution bersama Jenderal Besar Soeharto.

simpati Sukarno. Presiden pertama Indonesia waktu itu adalah juga seorang pemain politik yang terus mencoba memperluas dukungan. Karena tidak bisa mengandalkan dukungan tentara untuk tujuan-tujuan politiknya, Sukarno akhirnya memanfaatkan golongan kiri, terutama PKI. Dan makin sulitlah posisi Nasution khususnya, TNI umumnya.

Dalam periode yang sekarang dikenang sebagai zaman Orde Lama itu, posisi TNI pada dasarnya amat defensif menghadapi aksi ofensif PKI dan Sukarno. Pada keadaan seperti itu yang tampaknya mungkin dilakukan Nasution adalah menciptakan teori-teori untuk membela peranan dan partisipasi politik tentara. Dalam rangka inilah kita harus mengerti lahirnya doktrin "Jalan Tengah" yang dicetuskan Nasution pada November 1958 pada sebuah pidato di Akademi Militer Nasional Magelang. Layaknya teori-teori yang lahir pada masa defensif, "Jalan Tengah" adalah sekadar pernyataan posisi tentara yang di satu pihak bukan tanpa peran politik. Tapi, di lain pihak bukan tentara yang berencana berkuasa seperti di negeri-negeri Latin Amerika yang masa itu memang banyak didominasi oleh pemerintahan militer.

Pada suatu hari pada awal Oktober 1965, akibat tindakan makar Gestapu/PKI, pemerintahan Sukarno ikut terperosok ke jurang kehancuran. Sebagai kekuatan terdepan barisan anti-Komunis pada masa itu, Angkatan Darat adalah kekuatan politik yang paling siap mengambil alih kekuasaan. Yang tidak dipunyai Jenderal Soeharto waktu itu adalah teori atau doktrin yang membenarkan peran dominan tentara dalam politik.

Hanya Satu Pilihan

Oleh karena itu, setelah menguasai keadaan, mengonsolidasi kekuatan, langkah penting Jenderal Soeharto berikutnya adalah menciptakan teori untuk landasan peranan tentara sebagai pengelola negara. Teori-teori peranan sosial politik yang dikembangkan Nasution pada zaman Orde Lama belum lagi memperhitungkan kemungkinan datangnya suatu masa ketika TNI berdiri

tegak di atas panggung politik Indonesia sebagai kekuatan utama. Kekosongan teori seperti itulah yang diisi Jenderal Soeharto lewat Seminar Angkatan Darat II pada Agustus 1966 di Bandung.

Pada seminar di Bandung itu, Angkatan Darat menyadari dan menyimpulkan bahwa ABRI umumnya, dan TNI Angkatan Darat khususnya, menjadi tumpuan harapan masyarakat. Karena itu yang tersedia bagi TNI hanya satu pilihan, memenuhi harapan rakyat dalam bentuk membangun pemerintahan yang kuat dan progresif. Di atas landasan harapan rakyat yang dipersepsikan Angkatan Darat pada 1966 itulah tegaknya pemerintahan Orde Baru hingga kini. Lewat Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto itulah TNI memelopori pembangunan Indonesia.

Berdiri pada Oktober 1997 sembari memandang ke belakang perjalanan sejarah TNI, terlihat garis menaik keterlibatan politik tentara di Indonesia. Pada masa kepemimpinan Jenderal Sudirman, keterlibatan awal tentara ke dalam politik bermula pada keterlambatan pemerintah membentuk tentara. Adalah suatu keputusan politik ketika para pemuda merebut senjata dari tentara Jepang, mempersenjatai diri, membentuk barisan pertahanan, dan memilih Sudirman sebagai Panglima Besar mereka. Tentara makin terlibat saja dalam politik ketika konflik pemerintah versus oposisi mewarnai politik Indonesia masa Revolusi. Tokoh utama dalam peran politik tentara ini adalah Sudirman sendiri. Mempersepsikan diri dan pasukannya lebih sebagai pejuang daripada tentara pemerintah, dia tidak merasa selalu harus terikat dengan aturan-aturan baku hubungan sipil-militer yang memang tidak dikenalnya.

Tingkah laku politik Sudirman itu tidak sepenuhnya bisa dilanjutkan Nasution. Tapi, peran politik tentara tidak bisa dihindarkan pimpinan tentara pasca-Revolusi. Untuk itulah lahirnya teori yang kemudian dikenal sebagai Dwifungsi. Lewat "Jalan Tengah", Nasution merumuskan peranan sosial politik tentara. Tapi, yang akhirnya menggunakan peran politik tentara untuk memerintah dan memelopori pembangunan Indonesia adalah Jenderal Soeharto.

Oleh karena itu, tidak salah untuk menyebut Sudirman sebagai peletak dasar peran politik tentara, Nasution perumus peran tersebut, sementara Soeharto memanfaatkannya untuk memelopori pembangunan Indonesia. Maka dalam konteks ini, jika kita meninjau sejarah ABRI sebagai kekuatan politik, niscaya terlihat adanya tiga jenderal terpenting: Sudirman, Abdul Haris Nasution, dan Soeharto.

Pada negara-negara yang tentaranya tidak memainkan peranan politik, ukuran keberhasilan seorang jenderal terletak pada prestasinya di medan tempur. Eisenhower, Omar Bradley, Marshall, dan MacArthur adalah Jenderal-Jenderal Amerika Serikat dengan bintang lima karena sukses mereka pada Perang Dunia II. Tapi, bagi Indonesia dengan tentara yang berperan politik, kepiawaian dalam memainkan peranan politik tentara dalam pembangunan bangsa adalah kriteria penting. Kebetulan juga bahwa baik Sudirman, maupun Nasution dan Soeharto, semuanya adalah Jenderal-Jenderal yang punya reputasi di medan tempur.

Sudirman adalah Panglima Besar dengan reputasi gemilang sebagai pemimpin dan komandan tempur di Palagan Ambarawa serta pemimpin perang gerilya yang legendaris. Nasution adalah konseptor perang gerilya, Panglima Komando Jawa pada masa perang gerilya, dan KSAD yang memimpin dengan berhasil penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta. Soeharto terkenal sebagai komandan yang memimpin Serangan Umum 2 Maret 1949 ke Kota Yogyakarta, Panglima Mandala pembebasan Irian Barat, dan Panglima Kostrad yang berhasil menyelamatkan negara dari ancaman bahaya Komunis.

Dalam perspektif inilah—terutama perspektif peranan politik tentara—sebaiknya kita semua harus melihat perlunya menghargai jasa-jasa tiga Jenderal terpenting TNI dengan menjadikan ketiganya Jenderal bintang lima.[]

"Dobriden" Pagi, Siang, dan Malam

Suatu siang pada 2003 saya jumpa teman lama saya, Prof. Dr. Laode Kamaluddin dalam sebuah seminar. Ketika acara selesai, kami makan sambil ngobrol. Banyak yang kami obrolkan. Yang pasti soal-soal politik. Waktu itu Laode adalah Sekretaris Wakil Presiden (Wapres), Hamzah Haz. Mungkin saya kehabisan bahan lalu cerita tentang pertemuan saya dengan para pejabat tinggi Departemen Luar Negeri pada sebuah acara makan siang di Hotel Aryaduta beberapa hari sebelumnya. Ikut hadir dalam acara itu mantan Menteri Luar Negeri, Ali "Alex" Alatas. Saya ingat, para pejabat Deplu (sekarang Kemlu) itu mengeluhkan beberapa hal yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas sebagai diplomat.

Pada akhir pertemuan, menjelang berpisah, saya bergurau kepada kedua Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri—keduanya kebetulan teman sekolah saya di Ohio, Makarim Wibisono dan Makmur Widodo. "Saya kira kalian panggil saya untuk diminta jadi Duta Besar, ternyata yang kalian sampaikan cuma keluhan." Mantan Menlu Alatas menimpali, "*You* berminat jadi Dubes, Lim? Kalau saya tahu begitu, dulu saya bisa mendubeskan Anda." Makarim menyambung Alatas, "Kami perlu orang seperti Bung Salim, mantan wartawan dan berpengalaman luas. Tapi kami sekarang tidak lagi bisa berbuat seperti pada zaman Pak Alatas dulu."

Mendengar cerita saya, Laode mengulangi pertanyaan Alatas, "Pak Salim berminat? Saya bisa usulkan lewat kantor Wapres." Tak lama kemudian, saya menerima salinan surat, ditandatangani Wapres Hamzah Haz, yang mencalonkan saya menjadi Dubes. Sesudah itu lama tidak ada kabar. Suatu hari—ketika saya

sibuk sebagai komentator politik untuk Metro TV pada hari konvensi capres Golkar—istri saya menerima telepon dari Taufiq Kiemas yang mengabarkan Presiden Megawati mengundang saya makan malam. "Ini suatu kehormatan luar biasa. Tidak banyak orang yang diundang Presiden untuk makan malam di kediamannya," kata saya kepada Taufiq ketika mengonfirmasi kesediaan memenuhi undangan istrinya. Saya pikir ini tentu ada hubungannya dengan pencalonan jadi Dubes yang prosesnya sudah dimulai oleh Profesor Dr. Laode Kamaluddin tersebut.

Menjelang jumpa Presiden Megawati, saya mencari informasi mengenai bagaimana bicara dengan putri Sukarno itu dan apa kira-kira yang akan dibicarakannya. Saya menelepon Dr. Andi Rizal Mallarangeng yang waktu masih merupakan bagian dari kubu Megawati, Roy B. Janis, dan Sabam Sirait, keduanya tokoh PDIP. Lewat telepon, Rizal menjelaskan kepada saya bahwa menghadapi Mega itu layaknya berjumpa seorang Ratu. Saya tidak tahu maksud Rizal, tapi dari penjelasannya, kesan saya ada hubungannya dengan kesadaran pada diri Megawati bahwa dia putri Sukarno. Janis menitipkan kepada saya sejumlah persoalan yang dihadapi PDIP yang menurutnya kurang mendapat perhatian Megawati. Sabam titip salam saja, tidak ada info, saran, atau komentar.

Pemilihan Umum Akan Berdarah-darah

Malam itu dingin, hujan lebat, banjir di berbagai tempat dan jalan di mana-mana macet. Karena itu saya berangkat lebih awal dan berhasil tiba tepat waktu di rumah kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Nyatanya saya harus duduk sejam di ruang tamu yang dingin sebelum akhirnya tepat pukul 20.00 Ibu Megawati berkenan menerima tamu yang diundangnya. Waktu makan malam sudah lewat dan saya jelas lapar. Jajan pasar yang manis-manis suguhan Ibu Mega tentu sulit dikonsumsi oleh seorang penderita diabetes. Jadi, saya minum air bening saja terus-menerus.

Pembicaraan berlangsung selama dua jam. Menemani Ibu Mega adalah Amris Fuad Hassan, anggota Komisi I DPR dari PDIP, partai pimpinan Ibu Mega. Yang menarik dan penting saya catat adalah bahwa hampir seluruh pertemuan itu diisi oleh Ibu Mega dengan keluhan tentang apa saja yang menyangkut persoalan politik dan pemerintahan yang dia hadapi. Salah satu di antara banyak soal yang dia keluhkan adalah kekesalannya pada sebuah pernyataan seorang Jenderal yang menyebut Pemilihan Umum akan berdarah-darah.

Saya kebetulan ingat bahwa pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Jenderal Ryamizard Ryacudu, Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu. Sebagai seorang peneliti peran politik militer, saya lantas menanggapi keluhan Ibu Presiden itu. Dengan berbahasa Inggris saya berkata, "Menurut Pasal 10 Undang-Undang Dasar kita, Ibu adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jadi, Ibu bisa memecat jenderal Indonesia mana saja yang Ibu Presiden nilai tidak mematuhi kebijakan atau aturan yang berlaku." Reaksi Megawati hanya tersenyum. Dan sampai saya keluar dari pintu dalam perjalanan pulang, soal menjadi Dubes sama sekali tidak disinggung.

HAMPIR TIGA BULAN SETELAH DILANTIK MENJADI PRESIDEN, saya kebetulan jumpa dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pesta perkawinan putri Mayjen TNI Marinir Jusuf Solihin, teman seangkatan Bapak Presiden di Akabri. "Ke Istana dong, Mas," ucapnya sambil memeluk saya. "Nanti saya minta Mas Sudi mengaturnya." Beberapa hari kemudian Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, lewat telepon, menyampaikan pesan Presiden yang mengharapkan kunjungan saya ke Istana. Waktunya lepas maghrib, tanggalnya sudah lupa. Supaya tidak terlambat, saya sembahyang Maghrib saja di Masjid Baiturrahim, di Kompleks Istana.

Pertemuan yang berlangsung di salah satu ruang tamu Istana Merdeka dihadiri Sudi Silalahi yang tidak berbicara sepatah kata pun sepanjang percakapan kami berdua. Banyak soal yang kami

bicarakan, tapi yang saya masih ingat dan anggap penting, cuma tiga hal. *Pertama*, saya sarankan agar SBY sebagai Presiden mengangkat Kepala Staf Angkatan Udara menjadi Panglima TNI. "Hubungan buruk masa lalu antara Angkatan Udara dan Angkatan Darat tidak boleh kita biarkan berlangsung terus," kata saya. Lagi pula undang-undang sudah memungkinkan, dan perwira Angkatan Laut, Laksamana TNI Widodo Adi Sucipto, sudah menjadi Panglima TNI pertama yang bukan Jenderal Angkatan Darat. SBY tahu maksud saya karena soal itu sudah pernah saya sampaikan ketika Bapak Presiden masih duduk di kursi Menko Polkam yang berkantor di Jalan Merdeka Barat. Usul yang sama sebenarnya juga pernah saya sampaikan kepada Wapres Hamzah Haz dan Presiden Megawati, lewat Taufiq Kiemas.

Beberapa waktu kemudian, ketika berkunjung ke Istana mewawancarai SBY untuk acara *talk show* saya di TVRI, saya tanya lagi, "Siapa Panglima TNI yang Anda pilih?" Jawabnya singkat, "Sesuai dengan saran Mas Salim. Kebetulan materinya bagus." Tidak berselang lama, naiklah Marsekal TNI Djoko Suyanto, mantan Kepala Staf Angkatan Udara, seorang pilot tempur, ke kursi Panglima TNI. SBY memang kenal baik Marsekal Djoko, mereka berdua satu angkatan di Akabri. Angkatan 1973. Nanti setelah meninggalkan posisi Panglima TNI, Djoko Suyanto didudukkan SBY pada kursi Menko Polhukam.

Hal *kedua*, saya sampaikan secara setengah bergurau. "Saya ini sudah lama berstatus sebagai calon Dubes, tapi tidak kunjung diangkat oleh Presiden yang Anda gantikan. Apakah kira-kira pemerintahan Anda masih berminat mengangkat saya jadi Dubes?" Sambil tertawa, SBY menjawab, "Ah, itu soal gampang, Mas. Hassan Wirajuda (Menteri Luar Negeri) malam ini akan ke sini, nanti saya bicarakan dengannya."

Hal *ketiga* menyangkut hubungan lama kami. Sejak awal saya selalu memanggil menantu Jenderal TNI (Anumerta) Sarwo Edhie itu dengan "Dik Bambang". Keluarga mertua memang memanggilnya "Bambang". Sementara beliau menyapa saya sebagai "Mas Salim". Di Istana malam itu kami membuat kesepakatan, ketika

berdua saja, sapaan lama tidak berubah. Tapi jika ada orang lain, saya akan menyapa beliau dengan "Bapak Presiden". Beliau bebas menyapa saya dengan panggilan apa saja yang beliau suka. Tapi akhirnya di depan publik, beliau menyapa saya dengan "Bung Salim".

Beberapa waktu setelah pertemuan di Istana tersebut, saya berada di Makassar memberi pidato pada acara Dies Natalis FISIP Universitas Hasanuddin (Unhas). Malam menjelang balik ke Jakarta, saya dan istri dijamu makan malam oleh Prof. Dr. Hafid Cangara, Dekan FISIP Unhas, di sebuah restoran ikan bakar tidak jauh dari Pantai Losari. Kami sedang menikmati ikan bakar ketika tiba-tiba telepon genggam saya bergetar. Wakil Presiden di ujung sana. "Pak Salim sudah jumpa Presiden?" tanya Jusuf Kalla. "Sudah, Pak Ucup," jawab saya. "Ini saya diminta Presiden untuk mencarikan tempat buat Pak Salim."

Salim Said dan Herawaty bersama Presiden dengan istri dan Wapres dengan istri setelah pelantikan sebagai Dubes, 2006.

Melampiaskan Dendam

Singkat cerita, setelah menunggu beberapa bulan, pada suatu malam saya mendapat telepon dari Imron Cottan, Sekjen Deplu. Saya diminta datang ke kantornya karena surat keputusan pengangkatan saya sebagai Dubes sudah ditandatangani Presiden. Setelah segala urusan, termasuk mengikuti orientasi di Kementerian Luar Negeri, pemeriksaan kesehatan dan *fit and proper test* di Komisi I DPR, pada akhir November 2006 saya sudah tiba di Praha siap memangku tugas negara sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko.

Harus saya katakan bahwa tidak semua urusan menjelang keberangkatan itu berjalan lancar sebagaimana mestinya. Salah satu yang hampir mengganjal saya adalah acara di Komisi I DPR. Ada dua anggota di lembaga itu yang saya nilai berbuat tidak pantas. Seorang dengan enteng meminta kami para calon Duta Besar untuk menyanyi. "Nanti para Dubes akan memimpin lagu kebangsaan di pos masing-masing, kita ingin lihat, apa bisa nyanyi." Kata seorang yang kebetulan anggota Partai Demokrat, partai pimpinan Presiden. Saya jawab dengan ketus karena dongkol dan marah, "Kalau Anda tahu protokol, Anda tentu juga mengerti tidak ada inspektur upacara yang memimpin lagu Indonesia Raya." Rupanya pernah ada calon Dubes dari diplomat karier yang "dipelonco" oleh anggota Komisi I. Calon Dubes itu terpaksa nyanyi.

Anggota yang satunya lagi menggunakan kesempatan dan kewenangannya untuk melampiaskan dendam lamanya kepada saya. Saya sangat marah dan berpikir meninggalkan ruangan. Theo Sambuaga, Ketua Komisi I, teman lama saya, yang memimpin rapat itu tampaknya menangkap suasana hati saya. "Apakah Bung Salim sakit, kok wajah Anda terlihat berubah." Jawab saya dengan sinis, "Saya tidak sakit, cuma takut kepada Komisi I."

Cerita ketegangan itu tampaknya menyebar cepat di dalam Gedung DPR/MPR, dan teman-teman saya anggota Komisi I yang sedang berada di luar ruangan pada masuk. Salah satu yang saya ingat angkat bicara mengecam dua anggota yang merepotkan

saya itu adalah A.M. Fatwa. Hari itu saya pulang meninggalkan ruang Komisi I dengan hati masygul. Salah seorang teman di Komisi I menyampaikan kepada saya bahwa di antara anggota Komisi itu ada beberapa orang yang memang bertekad menggagalkan sebanyak mungkin calon untuk menjadi Dubes. Sasaran utama mereka sebenarnya diplomat karier. Pada angkatan saya, seorang diplomat karier memang berhasil mereka gagalkan. "Ini kesewenang-wenangan. Mentang-mentang kebetulan berkuasa," kata saya.

Hasil *fit and proper test* itu saya ketahui lebih awal, yakni ketika para anggota Komisi itu baru saja selesai rapat yang berlangsung hingga larut malam. Begitu rapat selesai, Letjen TNI (Purn.) Andi Muhammad Galib, S.H., seorang anggota Komisi I dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menelepon saya. Dengan menggunakan bahasa Bugis, beliau mengucapkan selamat kepada saya sebagai Dubes yang akan ditempatkan di Praha. Lho, kok Praha? Mengapa dipindahkan dari Stockholm sebagai yang dijanjikan Presiden kepada saya? Kemudian baru saya tahu bahwa saya dipindahkan ke Republik Ceko karena dianggap bisa lebih berguna di sana sebagai seorang yang punya pengalaman berurusan dengan militer. "Kita mungkin akan beli senjata dari Ceko, jadi Anda dianggap pantas dikirim ke sana," kata Sabam Sirait, teman lama saya, dan anggota Komisi I. Akibat perubahan itu, calon yang tadinya direncanakan ke Praha, seorang wanita dan diplomat karier, dipindahkan ke Swedia. Kami tukaran tempat jadinya.

Ternyata hingga saya menyelesaikan tugas tidak pernah terjadi pembelian senjata meski peninjauan dari Jakarta mengalir tak habis-habisnya. Salah satu sasaran penting untuk dibeli waktu itu adalah pesawat jet latih tempur buatan Ceko. Dari tes pilot, Kepala Staf Angkatan Udara hingga Kepala Staf Umum TNI serta sejumlah pejabat lainnya, secara bergantian meninjau pesawat yang pabriknya terletak di luar Kota Praha. Akibatnya saya terus-menerus menunaikan pekerjaan menjelaskan kepada tuan rumah mengapa pesawat belum dibeli juga. Setiap rombongan dari

Indonesia selalu mendapat pertanyaan mengenai nasib pesawat yang sudah sering ditinjau tersebut. Apa pasal, kok belum juga dibeli? Perdana Menteri juga selalu menggunakan kesempatan pertemuan kami di pesta-pesta diplomatik atau acara kenegaraan untuk bertanya kapan Indonesia akan membeli pesawat latih tempur itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta sehingga pesawat tidak kunjung dibeli, padahal semua pejabat Angkatan Udara yang datang ke Praha memuji dan senang pesawat tersebut.

Karena senantiasa disibukkan dengan pertanyaan dari pihak Ceko, ketika ke Jakarta saya "mengadu" kepada Presiden. Dalam pertemuan kami di kediaman pribadi Presiden di Cikeas, setelah saya menguraikan persoalan yang saya hadapi di Praha, Presiden langsung memerintahkan ajudan menghubungkan beliau dengan KSAU, Marsekal TNI Subandrio. Pimpinan Angkatan Udara tersebut, lewat telepon genggam, diperintahkan untuk tidak lagi mengirim orang ke Praha. Sejak itu saya tidak lagi sibuk meladeni para peninjau pesawat yang tak kunjung dibeli itu. Tapi sampai saya pulang, pertanyaan dari pihak Ceko tetap saja tak kunjung berhenti.

SELAIN HARUS BERURUSAN dengan Komisi I tersebut, sebelum berangkat, ada macam-macam kegiatan persiapan lainnya yang harus kami kerjakan. Sebagai bukan diplomat karier, salah satu kesibukan kami suami istri adalah menemui teman-teman yang punya pengalaman sebagai diplomat. Dalam mempersiapkan diri, segala macam kemungkinan kami diskusikan dengan para diplomat tersebut. Gambaran dari pengalaman mereka macam-macam. Pengalaman mereka yang pernah bertugas di Washington, London, Tokyo, dan Moskow tentu lebih seru daripada mereka yang pernah bertugas di Budapest, Warsawa, Praha, atau Bratislava.

KESALAHAN KAMI SUAMI ISTRI adalah memukul rata saja segala pengalaman itu, dan mengira semua kegiatan di KBRI sama

sibuknya. Kesan itu tampaknya menakutkan istri saya. Akibatnya dia jadi stres dan atas nasihat dokter dirawat di rumah sakit. "Gejala tifus," kata Dr. Ibrahim di Rumah Sakit Mediros. Untung dalam beberapa hari penyakit bisa diatasi. Tapi muncul soal baru, istri saya menyarankan saya berangkat sendiri. Dia memilih tinggal di Jakarta saja. Inilah akibat gambaran yang "menyeramkan" sebagai istri Dubes seperti yang dia dengar dari berbagai sumber tadi. Hanya dengan bujukan sejumlah teman, istri saya akhirnya melunak, dan dalam keadaan fisik yang masih lemah, bersedia berangkat bersama.

Udara sudah amat dingin waktu kami tiba di Praha, dan saya masih harus menunggu sebulan sebelum menyerahkan kredensial (Surat Kepercayaan) kepada Presiden Ceko. Konon, kecuali Dubes Amerika Serikat yang diterima hanya beberapa hari setelah tiba, semua Duta Besar harus menanti cukup lama sebelum mendapat giliran diterima di Istana Kepresidenan, bekas istana raja yang amat megah, dan di Praha dikenal dengan nama Kastil. Ketika tiba giliran saya pada akhir Januari, udara sudah berada di bawah titik beku. Sebelum memasuki Istana, saya masih harus memeriksa barisan kehormatan di halaman. Menghadapi udara sedingin itu saya harus berpakaian berlapis-lapis. Sementara itu, di luar pagar Istana saya lihat banyak saja turis menonton upacara sembari membidikkan kamera-kamera mereka. Di Praha ini tidak ada musim turis khusus. Musim apa saja, dingin atau panas, turis tetap membanjir.

Ibu kota Republik Ceko memang unik, bukan cuma cantik, tapi satu dari sedikit kota Eropa yang tidak rusak sedikit pun oleh Perang Dunia II. Inilah yang menyebabkan masih terpeliharanya bangunan-bangunan dari Abad Pertengahan yang terletak di pusat Kota Praha. Berlin, Dresden, dan Warsawa nyaris hancur total oleh gempuran Tentara Merah Uni Soviet yang menyerbu dari Timur, sementara Sekutu datang dari Barat. Sisa bangunan lama yang masih bisa Anda saksikan di Berlin sekarang tidak lebih dari 20 persen. Di Warsawa bahkan lebih parah lagi, mungkin kurang dari 10 persen.

Ketika menyerahkan surat kredensial kepada Presiden Ceko, para Dubes baru harus mengucapkan kalimat yang naskahnya sudah disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri mereka. Tugas para Dubes adalah menghafalkannya untuk diucapkan saat menyerahkan surat kredensialnya kepada Presiden. Berhari-hari saya berlatih menghafalkannya. Tapi dasar pelupa, yang keluar dari mulut saya di depan Presiden Vaclav Klaus (orang yang menggantikan Presiden Vaclav Havel, sastrawan terkenal itu) tidak persis sama dengan naskah susunan Kemlu Ceko. Untunglah Presiden Klaus tidak cerewet, dan upacara berlangsung dengan aman dan tertib, tanpa pidato dari kedua belah pihak. Acara berikutnya, Dubes baru dan istri diajak masuk ke ruang dalam Istana untuk minum kopi bersama Presiden yang didampingi oleh pembantu dekatnya, termasuk seorang jenderal yang menjabat Sekretaris Militer Presiden. Pada saat menjadi tamu di ruang Presiden inilah terjadinya pengalaman kecil pertama yang menarik perhatian saya di tempat bertugas itu. Sebelum duduk, di meja tamu di depan kami sudah terlebih dahulu tersedia macam-macam minuman botol di samping kopi panas dan berbagai makanan kecil. Pembicaraan dibuka oleh tuan rumah dengan menying-

Dubes Salim Said bersalaman dengan Presiden Ceko, Vaclav Klaus.

gung soal tsunami yang melanda Aceh dua tahun sebelumnya. Belum lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dari Ceko—hal yang sudah saya rencanakan sebelumnya—Presiden Klaus sudah mendahului, "Ya, kami juga ikut mengirimkan bantuan waktu itu." Langsung saja atas nama bangsa dan pemerintah Indonesia saya mengucapkan terima kasih.

Nanti, sebagai dubes baru yang berkeliling memperkenalkan diri kepada para pejabat pemerintah, pimpinan legislatif, dan para dubes negara-negara sahabat yang diposkan di Praha, pernyataan belasungkawa atas bencana tsunami yang telah berlalu itu selalu disampaikan kepada saya. Ketika kemudian terjadi gempa besar yang melanda Yogyakarta, ucapan belasungkawa banyak lagi saya terima. "Betul-betul Dubes negeri bencana saya ini," keluh saya kepada sejumlah teman di Tanah Air, via *e-mail*.

SAMPAI PAMIT DARI PRESIDEN KLAUS, kopi panas di depan kami sama sekali tidak kami sentuh. Padahal dalam udara yang amat dingin, saya bayangkan betapa nikmatnya menghirup kopi panas. Tapi, tuan rumah minum sendiri dan mencicipi kue-kue tanpa mempersilakan kami. Aneh sekali buat saya dan istri. Pengalaman yang sama kemudian saya alami berkali-kali setiap bertamu ke para pembesar Ceko. Perlu waktu lama untuk akhirnya tahu bahwa di negeri tempat saya mewakili Indonesia itu, tidak ada kebiasaan mempersilakan tamu mencicipi hidangan yang disajikan. Pokoknya semua hidangan yang sudah tersedia di meja, silakan dikonsumsi tanpa harus menanti dipersilakan. Pengetahuan yang saya peroleh setelah lama "menderita" kering tenggorokan itu, kemudian menjadi salah satu bahan taklimat saya kepada semua tamu resmi dari Indonesia yang akan berjumpa dengan pejabat Ceko pada tingkat mana saja.

Pulang dari Istana, saya lihat bendera merah putih di Wisma Duta sudah dikerek oleh Haji Sukoyo, Kepala Rumah Tangga kami. "Bapak sudah resmi jadi Dubes di Ceko," kata seorang diplomat senior KBRI, sembari menjabat tangan saya. Sebelum menyerahkan kredensial, bendera merah putih di kediaman resmi

Dubes belum lagi boleh dikibarkan. Dan sejak upacara penyerahan kredensial, mobil dinas Dubes, sebuah Mercedes yang tidak lagi baru, sudah bisa mengibarkan merah putih setiap saya mengendarainya. Karena sudah resmi bertugas, mulailah saya dan istri, hampir setiap malam, menghadiri pesta diplomatik. Mula-mula enak juga. Bayangkan, berpakaian lengkap dengan jas buatan Jerman, Austria, Prancis atau Italia, sepatu buatan Italia, Jerman, atau Swiss, mobil Mercedes dengan sopir bule. Wah, ini bagaikan dalam film-film Hollywood yang banyak saya tonton terutama ketika masih menjadi kritikus film majalah *Tempo*, pikir saya.

Waktu diangkat menjadi Dubes, bayangan saya tentang kehidupan diplomatik penuh kesibukan seperti para diplomat yang sering saya lihat di Jakarta. Saya lupa bahwa Ceko adalah negara aman, stabil, dan tidak ada soal politik dan keamanan yang serius, kadang gawat, seperti yang sering melanda Indonesia. Di Jakarta, saya dulu termasuk wartawan yang rajin memenuhi undangan pesta diplomatik atau hanya pertemuan ngobrol dengan para diplomat di restoran-restoran hotel, karena selain untuk mendapatkan informasi, juga kesempatan untuk memakai jas yang saya koleksi dari berbagai perjalanan jurnalistik di luar negeri.

Pemimpin redaksi kami waktu itu tergolong orang yang enggan menghadiri pesta dan karena itu sering menugaskan saya mewakilinya pada berbagai resepsi diplomatik. Sebagai Kepala Desk Luar Negeri, saya memang banyak mendapat tugas bepergian ke luar negeri. Ini suatu kesempatan yang saya pergunakan juga membeli pakaian-pakaian yang di Jakarta masih agak langka. Seperti diketahui, fenomena toko pakaian yang bertebaran di berbagai pusat perbelanjaan Jakarta sekarang ini pada tahun tujuh puluhan itu masih sesuatu yang bahkan belum terbayangkan. Singapura, Bangkok, dan Hong Kong adalah tempat belanja saya. Hal demikian dimungkinkan karena saya sering melakukan perjalanan jurnalistik di Asia Tenggara dan Asia Timur, meliput peris-

tiwa-peristiwa politik di Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

"Tempat Jin Buang Anak."

Karena sudah terasa rutin kehadiran pada berbagai pesta diplomatik, pada tahun kedua, mulailah saya membagi-bagi tugas menghadiri pesta kepada para staf (*home staff*). Yang tetap harus saya hadiri adalah undangan dari kedutaan negara-negara Asia dan OKI (organisasi negara-negara Islam) atau tetangga kami di "ghetto diplomatik" Praha. Yang saya sebut "ghetto diplomatik" adalah daerah elite Kota Praha, semacam Menteng di Jakarta pada masa lalu. Pada suatu musim panas, saya berdiri di teras lantai atas memandang ke rumah-rumah para dubes tetangga kami. Tiba-tiba saya sadar, saya kini berkesempatan tinggal di daerah Menteng. Mentengnya Praha, tentu saja. Teringat bagaimana saya pada akhir tahun enam puluhan menolak ikut membeli tanah di Cipinang Muara ketika para wartawan mendapat kesempatan membeli kapling di kawasan tersebut. Kata saya dengan sombong, "Saya tidak mau tinggal di tempat jin buang anak. Saya mau tinggal di Menteng."

Waktu itu tanah yang kemudian jadi wilayah perumahan para wartawan itu masih area kosong tanpa akses jalan, dan menimbulkan kesan seram karena merupakan wilayah pekuburan Cina yang berusia sekitar 200 tahun. Wilayah tersebut tadinya memang milik tuan tanah Cina. Sekian puluh tahun kemudian ternyata saya terdampar juga di Cipinang Muara, karena jelas tidak mampu tinggal di Menteng. Ketika saya mulai menetap di area yang dikenal sebagai Kompleks PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) itu pada 1986, keadaannya sudah amat berubah dan perkampungan wartawan itu tidak lagi tergolong wilayah pinggiran. Tuhan sangat baik kepada saya, selain memberi rezeki untuk akhirnya punya rumah di Cipinang Muara, saya diizinkan juga mengalami tinggal tiga setengah tahun di Menteng. Meski hanya Menteng Praha.

LAMA-KELAMAAN SAYA MULAI malas berpakaian lengkap. Maka saya biasakanlah memakai batik lengan panjang yang memang banyak saya bawa dari Jakarta. Pokoknya begitu udara mulai hangat, Dubes Indonesia tidak lagi pakai jas. Staf kedutaan juga boleh pakai batik di kantor. Hanya kalau harus jumpa pejabat Kemlu, mereka saya sarankan sebaiknya berpakaian lengkap. Mula-mula mungkin kelihatan aneh oleh para dubes dan pejabat Kemlu Ceko, tapi lama-kelamaan batik saya justru sering menjadi topik pembicaraan mereka. Mungkin karena memang tidak banyak topik yang menarik dibicarakan. Komentar terbuka pertama datang dari Dubes Malaysia. "Batik Pak Dubes cantik-cantik," kata Datuk Zainal Abidin, yang kediaman resminya juga berada dalam "ghetto diplomatik" tidak jauh dari kediaman kami. Sesekali kemudian Dubes Malaysia juga tampil dengan batik. Batik Malaysia, tentu saja.

Beberapa hal menarik yang saya catat dari pengalaman bertugas di Praha. *Pertama*, persentase Dubes perempuan cukup tinggi. Waktu saya di Praha, Negara Filipina, Inggris, Mesir, Cina, Suriah, Latvia, Swedia, Belgia, Brasil, dan ada berapa lainnya yang saya tak ingat lagi, semua diwakili oleh seorang perempuan. Mestinya KBRI juga dipimpin oleh seorang perempuan, tapi atas saran Komisi I DPR, calon untuk Praha, seorang perempuan, dikirim ke Swedia, dan saya yang tadinya calon untuk Swedia dialihkan ke Praha. Pengganti saya kemudian adalah perempuan. Apa penjelasannya? Saya tidak tahu. Mungkin karena Praha kota yang cantik, maka perempuan pantas jadi dubes di sana.

Hal menarik lainnya adalah bahwa secara permanen ketua para dubes di Praha (*Dean of the Diplomatic Corps*) adalah Dubes Vatikan. Meskipun dia baru datang kemarin, hari ini Kepala Perwakilan Takhta Suci tersebut langsung menjadi *Dean*. Lazimnya *Dean* adalah dubes yang paling lama bertugas di suatu negara. Di Jakarta sekitar 40 tahun silam, Dubes Filipina, Modesto Farolan, seorang paman Imelda Marcos, pernah lama menjadi *Dean* karena lebih 10 tahun bertugas di Jakarta. Dubes Filipina di Praha juga bertugas lama, lebih dari 10 tahun. Cuma tidak jadi *Dean* karena

jabatan itu sudah diberikan secara permanen kepada Bapak Pastor.

Kedudukan khusus Dubes Vatikan di Praha itu menjadi unik karena Ceko adalah bangsa yang hanya 31 persen penduduknya mengaku punya hubungan dengan gereja. "Mayoritas orang Ceko tidak beragama," kata Dubes Vatikan dalam kunjungan perkenalan saya ke kedutaannya. Dari yang 31 persen itu pun penganut Katolik tergolong minoritas. Selama di Praha, saya hampir tidak pernah jumpa orang Ceko yang mengaku berhubungan dengan gereja dalam urusan kelahiran, perkawinan, dan kemungkinan besar juga nantinya dalam urusan kematian. Kendati demikian pada malam Natal, mereka semua berpesta dengan memakan ikan kapper, semacam ikan mas ukuran besar, sembari meneguk anggur putih. Menjelang malam Natal di hampir seluruh penjuru Praha, kita bisa lihat munculnya pedagang mendadak yang menjual ikan kapper. Pemandangan demikian mengingatkan saya kepada munculnya para penjual kulit ketupat sehari sebelum lebaran di berbagai penjuru Jakarta.

Apakah minimnya pengunjung gereja akibat Komunisme? Tidak ada urusan dengan ideologi. "Dari dulu sudah begitu," kata seorang dosen di Charles University ketika saya tanyai soal ini. Sebenarnya ada penjelasan panjang yang berhubungan dengan perang agama yang dulu sering melanda Eropa, tapi ceritanya saya sudah lupa. Mengapa *Dean* selalu Dubes Vatikan, juga tidak pernah jelas buat saya. Yang saya ingat Bapak Pastor itu meski berkebangsaan Italia, tapi bahasa Inggrisnya bagus sehingga orasinya pada setiap perpisahan seorang dubes, selalu memikat karena indah. Menurut ceritanya kepada saya, dia memang diplomat karier Vatikan dan telah ditempatkan di berbagai negara. Pernah lama ditempatkan di Damaskus, Suriah, saya pernah lihat Dubes Vatikan itu bercakap dalam bahasa Arab dengan Dubes Suriah.

SELAMA DI PRAHA, kami para diplomat pada umumnya tidak membaca koran Ceko. Bahasanya tidak kami mengerti. Memang

ada koran berbahasa Inggris yang terbit sepekan sekali, *The Prague Post*. Tapi isinya kebanyakan hiburan dan iklan yang lebih ditujukan kepada orang-orang asing. Berita-berita Ceko harus kami peroleh dengan cara berlangganan edisi Inggris buletin kantor berita resmi, CTK, yang beritanya pendek-pendek. Televisi Ceko juga tidak mungkin kami tonton. Juga karena soal bahasa. Kami umumnya menonton televisi lewat satelit dengan cara berlangganan dari London. Salurannya hampir seribu, tapi kami terutama hanya menonton BBC, Al Jazeera, CNN, dan kadang-kadang Discovery serta film-film pilihan. Sesekali saya menonton saluran milik Ahmadiyah yang dipancarkan dari London. Beberapa kali saluran itu menyiarkan dakwah Ahmadiyah Indonesia (dalam bahasa Indonesia) yang tentu saja direkam di Indonesia sebelumnya.

Soal bahasa ini juga menyempitkan pilihan kita untuk mendapatkan hiburan. Film-film asing pada umumnya di-*dub* dalam bahasa Ceko. Ada 1-2 bioskop yang memutar versi asli film-film impor berbahasa Inggris, tapi tidak tiap hari film itu dipertunjukkan. Di Praha juga ada kine klub yang mempertunjukkan film-film klasik. Tapi karena teks terjemahannya berbahasa Ceko, sulit juga buat kita. Maka hiburan tetap saya adalah menonton konser, balet, dan opera. Praha punya gedung opera dan gedung konser yang usianya sudah sekitar 100 tahun. Hampir semua yang dipertunjukkan di gedung-gedung itu saya tonton.

Sebenarnya Kota Praha mempunyai 27 gedung pertunjukan, tapi faktor bahasa juga yang jadi hambatan. Saya pernah menonton pertunjukan lakon *Paman Vanya* karya pengarang terkenal Rusia, Anton Chekov. Lakon yang sama saya tonton di Amsterdam hampir 40 tahun sebelumnya. Karena saya belajar bahasa Belanda, sedikit-sedikit saya bisa mengikuti jalan cerita pertunjukan di Amsterdam itu. Yang di Praha, saya sama sekali buta dan memutuskan meninggalkan gedung teater sebelum pertunjukan selesai.

Tiket untuk menonton opera memang tidak murah, tapi buat seorang duta besar tidak terlalu jadi soal. Opera di Praha meru-

pakan salah satu objek turis budaya yang menarik penonton dari negara-negara sekitarnya. Itu mudah diketahui dari mendengarkan percakapan para penonton di ruang minum ketika jeda pertunjukan. Pada saat "turun minum" seperti itu saya mendengar berbagai bahasa Eropa, dan hanya sedikit bahasa Ceko. "Untuk kebanyakan orang Ceko, harga karcis opera tergolong mahal," kata Martin Modrich, sopir dubes yang selalu rajin mengantar saya menonton opera maupun konser.

KARENA KESULITAN BAHASA itulah pula maka setiap jumpa pejabat, termasuk dengan perdana menteri, kami terpaksa menggunakan penerjemah. Kecuali dengan anak-anak muda, orang-orang Ceko umumnya tidak bisa diajak berbahasa Inggris. Selain sejumlah kecil politisi, sebagian besar pejabat masih orang lama yang dulu wajib belajar bahasa Rusia. Sebagai bagian dari basa-basi diplomatik, pada setiap pertemuan saya selalu memulai sambutan atau perkenalan dengan menyampaikan permintaan maaf karena belum bisa berbahasa Ceko. Suatu kali saya menjamu salah seorang wakil perdana menteri yang segera akan berangkat ke Bali menghadiri konferensi soal lingkungan. Seperti biasa saya memulai pertemuan dengan permintaan maaf soal bahasa tersebut. "Anda tidak perlu belajar bahasa Ceko," jawabnya serius. "Bahasa ini sukar. Dan dipakai hanya di dalam negeri kami oleh manusia yang jumlahnya hanya sekitar 11 juta jiwa," sambungnya dalam bahasa Inggris dengan aksen Amerika.

Sopir kami, yang sedikit-sedikit masih bisa berbahasa Rusia, menyebut bahasa Ceko lebih sulit daripada bahasa Rusia. Lepas mana yang lebih sulit, di kuping saya bahasa Rusia jauh lebih enak kedengarannya. Karena kesulitan bahasa tersebut, dan demi basa-basi diplomatik, kata dari bahasa Ceko yang tak terhindarkan saya kuasai hanya "*Dobriden*". Setiap pertemuan atau pidato di depan masyarakat Ceko, saya selalu memulai dengan "*Dobriden*". Selain paling mudah diingat dan diucapkan, kata itu juga berarti selamat apa saja. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya semua "*Dobriden*". Kecuali para

dubes yang pernah sekolah di Ceko, semua kami para dubes bisanya hanya "*Dobriden*".

Masih soal bahasa. Upaya saya mendapatkan kesempatan bagi para mahasiswa pascasarjana Indonesia untuk belajar di Ceko tidak membuahkan hasil. Pemerintah pusat maupun gubernur yang mempunyai universitas negeri di wilayahnya, semua bersedia menerima dan memberi beasiswa kepada mahasiswa Indonesia. Syaratnya, harus ikut kuliah pada kelas-kelas yang menggunakan bahasa Ceko. "Kuliah bahasa Inggris memang ada, tapi itu usaha para dosen sendiri, jadi statusnya swasta dan biayanya mahal," kata Gubernur Moravia di Kota Breno. Dulu ketika banyak mahasiswa Indonesia belajar di Ceko, mereka tiba di negeri itu selepas Sekolah Menengah Atas (SMA). Usia masih muda dan karena itu masih mudah belajar bahasa Ceko yang sulit itu. Sekarang hanya ke negeri berbahasa Inggris anak lulusan SMA Indonesia pergi belajar. Padahal universitas-universitas Ceko terkenal bermutu dan mempunyai tradisi akademik yang panjang. Universitas Charles di Praha, misalnya, adalah universitas tertua di Eropa Tengah.

Karena mengalami pendidikan universitas di Ceko, beberapa dubes bisa dengan fasih berbahasa setempat. Dubes yang paling lancar berbahasa Ceko waktu saya di Praha adalah Dubes Cina dan Mongolia. Dubes dari Beijing tersebut adalah seorang perempuan yang tinggi besar, amat ramah, tapi namanya tidak pernah saya ingat. Kami semua teman-temannya hanya memanggilnya sebagai Madam Ambassador. Nah, Madam Ambassador dari Tiongkok ini adalah sarjana bahasa dan sastra Ceko, suatu kebolehan yang diperolehnya setelah belajar pada Charles University, sekian tahun silam. Yang lucu kalau ada pertemuan dengan pejabat tinggi Ceko, Madam Ambassador ini berbahasa Ceko yang disambut juga dalam bahasa Ceko oleh sang pejabat, tanpa terjemahan. Kami para dubes lainnya tentu saja hanya bisa melongo.

Dubes Indonesia beberapa tahun sebelum saya, Leonard Tobing, juga lulusan perguruan tinggi di Praha. Pak Dubes ini sarja-

na ekonomi yang konon pernah sekelas dengan Presiden Vaclav Klaus, yang juga seorang ahli ekonomi. Karena itu, Pak Dubes Tobing lancar berbahasa Ceko. Orang Indonesia di KBRI yang sekarang lancar berbahasa Ceko hanya para staf lokal, yakni orang Indonesia yang sudah bertahun-tahun menetap di Praha. Beberapa di antara mereka bahkan beristrikan perempuan Ceko. Mereka inilah yang terutama menghubungkan KBRI dengan masyarakat.

Di Praha saya jumpa beberapa dubes yang menguasai lebih dari satu bahasa asing. Mereka adalah diplomat karier yang sebelum ditugaskan sudah harus lulus dari sekolah bahasa asing di negerinya atau di negara tempatnya mendapat tugas belajar. Dubes Rusia, misalnya, menguasai bahasa Ceko, Inggris, Shinghalese (Sri Lanka), dan katanya sedikit bahasa Prancis. Dubes India bisa berbahasa Arab, Prancis, Rusia, dan tentu saja Inggris. Dubes Jepang bisa berbahasa Rusia selain Inggris. Tapi, Dubes Vietnam sebelumnya hanya bisa berbahasa Prancis. Penggantinya, lebih muda, berbahasa Inggris dengan lancar. Dubes Korea Utara, selain bahasa Korea, hanya bisa Bulgaria. Maka baik Dubes Vietnam yang lama maupun Duta Besar Korea Utara selalu didampingi penerjemah, ke mana pun bergerak dan siapa pun yang ditemuinya. Ada yang bilang penerjemahnya merangkap sebagai pejabat sekuriti yang juga bertugas mengawasi Pak Dubes. *Wallahu a'lam*.

Mengeluarkan Janji Banyak

Di Praha ada pengelompokan para dubes berdasarkan wilayah asal atau organisasi, seperti ASEAN, OKI (organisasi negara-negara Islam), negara-negara Arab, Amerika Latin, dan sejumlah organisasi regional lainnya. Yang saya tahu betul dan ikut berperan adalah kelompok Asia, ASEAN, dan OKI. Kelompok Asia sudah ada dan aktif sebelum saya datang, sedangkan kelompok ASEAN baru terbentuk setahun sebelum saya pulang. OKI sudah lama ada, tapi hampir tidak pernah punya kegiatan.

Para Dubes ASEAN di Praha, 2010.

Sulit membangun kelompok ASEAN sebelumnya, sebab anggotanya sangat sedikit. Hanya lima negara ASEAN yang punya Dubes di Praha. Dubes Malaysia waktu itu sakit dan harus mengalami transplantasi jantung, sedangkan Dubes Filipina kurang berminat. Negara ASEAN lainnya tidak menempatkan dubes di Praha, tapi dirangkap dari Warsawa, Berlin, atau Wina. Dubes Singapura malah berkantor di Singapura dan ke Praha hanya sesekali. Sehari-hari Singapura diwakili Konjen Kehormatan, seorang pebisnis berkebangsaan Ceko, yang berkedudukan di Praha.

Kelompok Asia pernah mengadakan pameran budaya Asia di pusat kota yang diresmikan oleh Wali Kota Praha, Dr. Bem—seorang sahabat Sultan Hamengkubuwono X—yang banyak memberi fasilitas kepada KBRI. Selain itu acara tetap kami adalah jamuan makan siang bulanan yang secara bergilir diadakan dengan mengundang seorang pembesar Ceko sebagai tamu kehormatan. Dengan baju batik lengan panjang saya beberapa kali menjadi tuan rumah acara makan siang dan makan malam di Wisma Duta. Pada salah satu pesta itu tamu kehormatannya menurut rencana adalah Menteri Kebudayaan.

Konfirmasi kedatangan dari kantor Bapak Menteri sudah kami terima beberapa hari sebelumnya. Tapi pada saat terakhir hanya Pembantu Menteri yang datang, tanpa pemberitahuan perubahan sebelumnya. Pada jamuan tersebut pembesar Kementerian Kebudayaan itu mengeluarkan janji banyak mengenai informasi yang akan dikirimkannya. Tapi sampai saya pulang, setahun kemudian, janji tinggal janji saja. Kami sering jumpa pem-

besar itu di berbagai acara kenegaraan, tapi dia rupanya tidak merasa terganggu dengan obralan janji kosongnya kepada kami.

Yang juga tidak datang pada jamuan yang mengundang 18 tamu itu adalah Dubes India yang beberapa hari sebelumnya juga sudah menyatakan akan hadir. Tidak ada kabar dari kedutaan besarnya mengenai ketidakhadiran Dubes tersebut. Kami menanti hingga hampir 1 jam. Sembari menanti, pelayan terus-menerus menyuguhkan minuman dan makanan kecil. Dubes Korea Selatan akhirnya tidak sabar dan mendesak agar acara dimulai saja. "Saya sudah lapar," katanya. Sebelum acara makan dimulai, kursi kosong yang disediakan untuk Dubes India, ditarik keluar oleh staf kami agar tidak ada kursi kosong di seputar meja makan yang panjang. Begitulah rupanya aturan protokoler.

Beberapa hari kemudian dalam sebuah kegiatan, saya jumpa Pak Dubes India itu. Kesempatan itu ternyata tidak juga digunakannya untuk menyatakan penyesalan atas ingkar janji yang telah dibuatnya. Seperti tidak pernah terjadi suatu apa pun. Kemudian hari saya tahu bahwa baik Menteri Kebudayaan Ceko maupun teman kami, Dubes India itu, keduanya memang terkenal gemar mangkir dari acara yang sudah disanggupinya untuk hadir. Kalaupun datang, diplomat karier itu juga selalu terlambat. Kegiatan terakhir saya bersama dengan Dubes India itu berlangsung di kediaman Dubes Malaysia pada acara perpisahan dengan kami sekeluarga yang segera kembali ke Jakarta. Seperti biasa, acara makan tertunda karena menunggu Bapak Dubes India. "Ah, *India again*," kata salah seorang Dubes dengan kesal. Alhamdulillah, kali ini dia tidak mangkir, meski terlambat hampir 1 jam.

DARI KELOMPOK DUBES negara-negara berpenduduk Muslim (OKI) lain lagi ceritanya. Kelompok dubes negara-negara OKI yang paling kompak adalah mereka yang berasal dari negara-negara Timur Tengah. Semua mereka tentu saja berbahasa Arab satu dengan lainnya. Yang dari Lebanon dan Afrika Utara kadang-kadang juga berbahasa Prancis sesama mereka. Kami yang datang dari

luar wilayah itu—Indonesia, Malaysia, Pakistan, Afghanistan, Iran, Azerbaijan, Kazakstan, dan Turki—tidak selalu mudah berpartisipasi dalam percakapan mereka. Inilah saya kira, antara lain, yang menyebabkan tidak adanya kegiatan OKI untuk waktu lama.

Suatu kali ada berita yang negatif terhadap Islam dalam sebuah koran Ceko. Informasi itu kami peroleh dari Dubes Suriah, seorang perempuan yang kebetulan beragama Kristen pula. Ibu Dubes dari Suriah ini mendesak agar kita melakukan sesuatu untuk mengoreksi berita yang tidak benar itu. Berkali-kali kami jumpa untuk urusan itu, sekarang saya sudah lupa apa yang akhirnya disepakati untuk kami kerjakan. Pokoknya tidak cukup penting. Buktinya tidak saya ingat. Tapi sejak itu ada pertemuan rutin antar-Dubes negara-negara OKI. Dalam salah satu acara pertemuan rutin itu, saya melemparkan gagasan agar kita secara bersama dan berkesinambungan mengadakan kegiatan kebudayaan. "Ini cara efektif dan murah memperkenalkan Islam kepada publik Ceko," kata saya meyakinkan para dubes. Sebagai mantan kritikus film dan mantan Ketua bidang internasional Festival Film Indonesia (FFI) yang banyak menghadiri festival di berbagai penjuru dunia, saya usulkan agar kita mulai dengan festival film saja. "Biayanya murah dan gampang. KBRI sudah melakukannya dengan sukses dua tahun terakhir ini," kata saya. Tidak ada yang menolak. Tapi sampai saya meninggalkan Praha, tidak ada festival, meski Indonesia dan Azerbaijan telah menyediakan film. Memang aneh, sebab Iran, Turki, Mesir, Tunisia, Lebanon, Maroko, dan Suriah tergolong negara-negara yang memproduksi film-film bagus dan banyak berpartisipasi dalam festival-festival internasional.

DI INDONESIA, CEKOSLOWAKIA sangat terkenal sejak lama. Kendati demikian sampai sekarang masih banyak orang Indonesia yang belum tahu bahwa Cekoslowakia sudah bubar. Dan di atas bekas negara itu kini berdiri dua negara, Ceko dan Slowakia. Perpisahan berlangsung dengan damai, dan hingga kini hubungan keduanya baik-baik saja. Tidak banyak negara di dunia yang ber-

pisah secara damai seperti itu. Kendati pemisahan tersebut, saya toh masih sering menerima surat dari Tanah Air yang menyebut saya Dubes Indonesia untuk Cekoslowakia.

Keterkenalan Cekoslowakia di Indonesia itu adalah informasi tetap yang selalu saya kemukakan setiap memperkenalkan diri sebagai Dubes baru di Ceko. Mobil yang dipergunakan oleh Menteri Luar Negeri pertama Indonesia, Achmad Soebardjo, adalah sedan Skoda buatan Cekoslowakia. Mesin-mesin pabrik gula yang didirikan di Jawa pada awal ke-20 juga bermerek Skoda. Sepeda motor yang dulu pernah terkenal di Indonesia yang bermerek *Java*, juga buatan Cekoslowakia. Pada zaman Orde Lama, senjata yang dipakai RPKAD, AK-47 dan beberapa pesawat tempur MiG, selain yang buatan Uni Soviet, juga banyak yang buatan Cekoslowakia. Pada masa pemerintahan Sukarno, banyak perwira Indonesia yang dilatih di Cekoslowakia. Beberapa artis film Indonesia adalah juga peranakan Cekoslowakia. Ayah mereka orang Indonesia yang pernah sekolah di Ceko, sedangkan ibu mereka adalah putri-putri Ceko. Mereka terkesima mendengar cerita saya.

Bicara tentang teknologi dan Ceko (atau Cekoslowakia pada masa Perang Dunia II), ternyata banyak senjata canggih Jerman pada masa perang merupakan buatan Cekoslowakia. Jerman memang menduduki Cekoslowakia waktu itu. Pada masa berkuasanya kerajaan Austro-Hongaria dulu, Cekoslowakia yang merupakan bagian dari kerajaan besar tersebut memang merupakan wilayah yang paling maju perkembangan teknologinya.

Pada masa lalu, Indonesia mereka kenal karena popularitas Sukarno. Presiden pertama kita itu pernah berkunjung ke Praha dan mendapat gelar doktor dari Charles University. Tapi apakah sekarang Indonesia dikenal di Ceko? Ternyata tidak, kecuali ketika terjadi tsunami. Akibat pergantian generasi dan perubahan politik setelah runtuhnya Komunisme, perhatian orang-orang Ceko sekarang terutama tertuju ke Amerika, Eropa Barat serta negara-negara yang menjadi konsumen produksi teknologi mereka masa kini. Terhadap Amerika, mereka sangat fanatik. Ceko berusaha keras, dan kabarnya kemudian berhasil, mendapatkan

keistimewaan untuk masuk ke Amerika tanpa visa. Seorang dubes dari sebuah negara Timur Tengah yang, seperti Indonesia, negaranya dulu juga amat dekat dengan Cekoslowakia, dengan agak dongkol menyebut Ceko sekarang lebih berbahagia menjadi antek Amerika ketimbang menjadi anggota Uni Eropa. Presiden Klaus memang dikenal di Eropa sebagai *Euroskeptic*, orang yang tidak optimis pada hari depan Uni Eropa. Dan karena itu sangat rewel sehingga mendongkolkan banyak anggota Uni Eropa.

Yang kebanyakan orang Ceko tahu tentang Indonesia, dan itu bisa Anda duga, Pulau Bali. Komodo yang berasal dari Indonesia di kebun binatang Praha juga terkenal. Secara bergurau saya suka mengatakan, di Praha ini komodo lebih dikenal tinimbang Pak Dubes. Nah, tentang Bali, berulang lagilah pengalaman saya ketika masih sekolah di Amerika dulu. Untuk menjelaskan di mana Indonesia, kita menunjuk Bali, lalu mengatakan Bali itu adalah salah satu dari ribuan pulau yang membentuk Indonesia secara geografis.

Menyadari kenyataan itulah, maka saya mengarahkan staf KBRI Praha untuk secara teratur mengadakan promosi budaya Indonesia sebagai cara memperkenalkan negeri kita di Ceko. Ikut menyertai kegiatan budaya dan seni tersebut, adalah promosi wisata. Sayang sambutan Jakarta kepada usaha kami kurang memuaskan. Salah seorang kolega sesama Dubes Indonesia di Eropa suatu kali jumpa Jero Wacik, Menteri Kebudayaan waktu itu. “Berapa turis yang Anda bisa datangkan kalau saya kirimkan misi kesenian ke tempat bertugas Anda?” Wah, kalau cara berpikir dan kebijakan Pak Menteri begitu, sulit kita di sini, kata saya kepada Dubes yang jumpa Jero Wacik itu. Saya sen-

Bersama Titiek Puspa & Elly Kasim setelah pertunjukan di Praha.

diri jumpa Jero Wacik sebelum berangkat ke Praha. Ditugaskan oleh para teman-teman dubes untuk Eropa Tengah dan Timur, saya melobi Pak Menteri membantu tugas kami di tempat akreditasi masing-masing. Pak Wacik bersemangat dan berjanji mendukung agenda kegiatan kami. Tapi, kemudian terbukti janji beliau terlupakan begitu saja.

Iravati dan Aisha

Berbagai acara budaya kami adakan, sejumlah artis kami datangkan. Hampir tidak ada bulan yang lewat tanpa kegiatan budaya KBRI Praha. "*Indonesian Embassy is the most active embassy in Prague*," kata Dubes Latvia di Praha. Dubes cantik itu rupanya diam-diam sering hadir pada acara kami tanpa saya ketahui. Kalau tahu tentu saya akan menyambutnya sendiri, karena begitulah tata pergaulan diplomatik.

Kegiatan budaya juga kami adakan di berbagai kota. Yang rutin kami lakukan adalah festival film dengan mendatangkan film dan sutradaranya dari Jakarta. Riri Riza (*Laskar Pelangi*) dan Nia Dinata (*Arisan*) pernah muncul di depan ratusan penonton di teater Balai Kota Praha. Di gedung konser konservatori, Iravati Sudiarso dan putrinya, Aisha, pernah mengadakan konser duo yang memikat banyak peminat musik klasik. Titiek Puspa dan Elly Kasim bersama grup *Sangrina Bunda* juga sempat mentas di Praha dan beberapa daerah di luar ibu kota. Rombongan Sumatra Utara, Banyumas, kelompok kesenian IKIP Jakarta serta paduan suara dari Universitas Parahyangan juga ikut menyemarakkan acara kami. *Teater Mandiri* pimpinan Putu Wijaya kami

Iravati Sudiarso dan putrinya Aisha, pada Ambassador Concert 2008 di Praha.

datangkan khusus untuk pentas di Praha. Yang juga harus dicatat adalah kunjungan rombongan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang dipimpin oleh rektornya bersama penari dan koreografer terkemuka, Sardono W. Kusumo. Saya bahkan berhasil mempertemukan IKJ dengan sekolah kesenian Praha yang terkenal di Eropa. Mereka menandatangani kesepakatan kerja sama. Apakah kemudian ada *follow up*-nya? *Wallahu a'lam*.

SELAIN KEGIATAN KESENIAN, KBRI Praha juga setiap tahunnya mengadakan seminar ilmiah tentang persoalan-persoalan politik, sosial budaya, dan ekonomi sehubungan dengan perubahan Indonesia dari rezim Orde Baru ke rezim Reformasi. Untuk seminar demikian kami bekerja sama dengan beberapa lembaga ilmiah di negeri tersebut. Para pembicara kami datangkan dari Belanda (Martin Van Bruinessen), Prancis (Francois Raillon), Amerika Serikat (Bill Liddle), dan juga Indonesia (Taufik Abdullah dan Mochtar Mas'oed). Mereka semuanya adalah ahli Indonesia terkemuka.

Pembukaan Pekan Film Riri Riza di Praha.

Dari pihak Ceko tidak mudah kami menemukan pembicara sebab pusat studi Asia Tenggara di Charles University sudah lama ditutup. Maka kami datangkanlah dari Michigan, Prof. Dr. Rudolf Mrazek, warga Ceko yang sudah lama mukim dan mengajar di Amerika Serikat. Mrazek adalah ahli sejarah yang menulis mengenai Tan Malaka dan Sutan Syahrir.

Dengan publikasi yang intensif, semua acara kami mendapatkan pengunjung yang banyak. Pejabat yang menangani agenda kebudayaan KBRI, Azis Nur Wahyudi, berperan besar dalam berbagai kegiatan budaya tersebut. Bersama Azis, saya juga membangun sebuah bioskop di aula KBRI. Modal utama pembangunan bioskop adalah proyektor elektronik, layar serta alat pemutar cakram padat (DVD *player*). Dengan film-film Indonesia pilihan—telah dibubuhi teks (*subtitle*) bahasa Inggris—yang saya datangkan sendiri dari Jakarta, setiap bulan ada pertunjukan film di aula KBRI. Pertunjukan yang menarik orang-orang Indonesia dan kalangan diplomatik dan para budayawan Ceko itu selalu kita akhiri dengan santap bersama masakan Indonesia. Yang sering jadi hidangan adalah nasi soto. Mungkin inilah satu-satunya bioskop tanpa bayar yang penontonnya mendapat suguhan makanan gratis.

SEBAGAI BUKAN DIPLOMAT KARIER, saya sadar betul bahwa saya harus berhati-hati menjalankan tugas dalam bidang yang banyak aturan tak tertulisnya tersebut. Cara terbaik untuk belajar adalah dengan bertanya kepada staf KBRI yang memang diplomat karier. Satu contoh dari pelajaran itu: Dari Jakarta saya membawa mantel kulit (*over coat*) buatan Italia yang baru. Tapi menurut staf saya, mantel mahal itu sebaiknya tidak dipakai dalam acara resmi. Jadi, menjelang kredensial saya harus membeli mantel wol yang tebal. Kebetulan pula pada waktu upacara kredensial, suhu udara berada jauh di bawah titik beku sehingga mantel tebal tersebut sangat menolong. Saya juga diajari untuk tidak naik turun mobil sebelum sopir membukakan pintu mobil. Kebetulan sopir dubes adalah orang yang sudah lama bekerja di KBRI,

sudah meladeni beberapa dubes sebelum saya. Dia tahu betul aturan itu. Mula-mula saya ikut saja aturan. Tapi lama-lama saya risi sendiri. Akhirnya, saya sering rebutan dengannya membuka pintu mobil untuk naik maupun turun.

Staf diplomatik mengingatkan saya agar tidak akrab dengan pegawai lokal. Saya diminta menjaga jarak. Sekretaris saya juga tidak boleh berada semobil dengan saya. Sebagian besar aturan itu secara perlahan saya anggap berlebihan dan tentu saja saya langgar. Kalau ada pesta makan di Wisma, setelah acara resmi saya suka duduk ngobrol dengan para staf lokal. Mereka tahu banyak tentang negara tempat saya bertugas sebab telah berada di sana bertahun-tahun. Jadi, mereka sumber informasi penting bagi saya. Mula-mula mereka enggan dan serbasalah. Tapi lama-kelamaan kita bagaikan teman saja.

Sebelum berangkat ke Praha memang beberapa teman sudah mengatakan kepada saya bahwa Kementerian Luar Negeri itu adalah kantor pemerintah Indonesia yang paling feodal. Informasi teman-teman itu tidak terlalu salah. Tapi yang mungkin tidak banyak diketahui adalah bahwa menurut sejarahnya, dubes itu dulu adalah adik atau keluarga dekat raja yang menugaskannya ke suatu negeri sebagai wakilnya. Karena komunikasi pada masa lalu sulit, maka duta besar harus bisa mengambil keputusan sendiri di tempat bertugasnya. Inilah penjelasannya mengapa para dubes dipanggil sebagai Yang Mulia, dan diembel-embeli dengan tambahan gelar "Luar Biasa dan Berkuasa Penuh". Sekarang, dengan komunikasi yang sudah canggih, keputusan strategis tidak lagi berada di tangan para dubes, tetapi di ibu kota negara yang mengutusnya. Dan dalam alam demokrasi seperti yang kita alami, dubes bukan lagi adik atau keluarga raja. Tapi sisa masa lalu masih tertinggal, ya, gelar itu tadi. Juga perlakuan kepada Pak Dubes oleh para stafnya. Demi kemungkinan berhubungan langsung dengan Presiden, di kamar kerja saya tersedia sebuah saluran telepon yang aman (diacak). Tapi sampai saya pulang, keadaan selalu aman-aman saja sehingga telepon itu tidak pernah sempat saya manfaatkan.

Sebagai bukan diplomat karier yang sering mencemaskan saya adalah kalau di Wisma Duta saya mengadakan jamuan. Di sini bisa saja terjadi kesalahan yang meski tidak berakibat serius, tapi bisa jadi bahan lelucon para dubes. Dalam urusan ini pun saya banyak dibantu staf yang sudah berpengalaman. Aturan di meja makan untuk jamuan diplomatik tergolong penting mendapat perhatian khusus. Untuk itu sebelum berangkat, istri dan Kepala Rumah Tangga saya harus ikut kursus singkat di pusat pendidikan Kementerian Luar Negeri. Sebagai wartawan yang sudah sering menghadiri jamuan diplomatik di Jakarta, saya pikir ini soal kecil. Lagi pula pekerjaan mengatur tempat duduk dan penataan hidangan, itu sudah merupakan tugas staf. Yang menjadi tugas dubes adalah bagaimana "mengarahkan" acara di meja makan. Ternyata pekerjaan ini tidak semudah yang saya bayangkan. Suatu kali saya mempersilakan para tamu mencicipi makanan tanpa mendahuluinya dengan bersulang (*toast*), padahal di depan para tamu seloki sudah diisi dengan brem Bali yang khusus saya datangkan dari Denpasar. Seorang tamu, dengan wajah bertanya, menunjuk seloki di depannya. Menyadari kekeliruan, saya me-

Dubes Salim Said bercakap-cakap dengan Wapang tentara Ceko
pada resepsi diplomatik HUT RI di Praha.

nyambar seloki sambil mengucapkan, "Untuk kesehatan kita bersama dan persahabatan Indonesia dengan negeri Anda masing-masing."

Sembari memulai mencicipi hidangan nasi kuning lengkap, saya sempatkan minta maaf atas keteledoran tersebut. "Maafkan saya, tapi inilah yang Anda lihat jika mantan Ketua Dewan Kesenian menjadi Dubes," kata saya bergurau. "Jangan cemas, saya juga bukan diplomat karier," bisik Dubes Jepang yang duduk di samping saya. Sementara makan, Diplomat Jepang itu bercerita bahwa sebelum ke Praha, dia adalah pejabat tinggi Kementerian Pertanian di Tokyo.

Mangga Indonesia

Kesalahan lain yang pernah saya lakukan adalah dengan tidak sengaja terlibat debat dengan seorang tamu, Dubes Mesir, seorang perempuan, diplomatik karier. Topik debat adalah mengenai tidak adanya pusat studi Asia Tenggara umumnya, studi Indonesia khususnya, pada universitas-universitas di Timur Tengah. Ini berbeda dengan studi Islam dan Timur Tengah yang banyak dan mudah ditemukan di berbagai universitas di Indonesia. "Jadi kalau Anda ingin belajar mengenai Indonesia di Timur Tengah, Anda harus pergi ke Hebrew University di Jerusalem," kata saya.

Saya tahu soal itu karena saya pernah ke Israel dan juga telah mengunjungi banyak negara Arab. Dubes Mesir membantah dengan mengatakan bahwa di Kairo ada pusat studi Asia Tenggara. Saya tahu betul Ibu Dubes tidak mengatakan yang sebenarnya. Dari Dr. Alwi Shihab, alumnus Ainsyaam University di Kairo, saya tahu tidak ada Pusat Studi Asia Tenggara di mana saja di negara-negara Islam di kawasan tersebut. Saya agak ngotot, lupa bahwa di Praha saya bukan berperan sebagai ilmuwan atau wartawan. Untunglah di samping saya ada Dubes Siprus yang pernah bertugas di Jakarta. Diplomat senior ini rupanya dari tadi mengikuti percakapan kami. Dengan cara yang canggih, dia melibatkan diri sebagai penengah, sedemikian rupa sehingga saya perlahan-la-

han sadar, saya adalah Duta Besar dan tidak boleh berdebat dengan gaya ilmuwan atau wartawan.

Dengan pihak Mesir sebenarnya, sebelum debat di Wisma Duta itu, saya juga pernah hampir terlibat debat kecil di kediaman Dubes Mesir sebelumnya, waktu itu seorang laki-laki. Untuk kami para dubes yang baru datang, Dubes Mesir mengadakan acara *dinner*. Di meja makan pembicaraan berlangsung menarik. Salah satu topik pembicaraan adalah mengenai bibit mangga pemberian Presiden Sukarno kepada Presiden Nasser yang kemudian hari dibudidayakan di Mesir. Buah mangga itu menjadi populer sebagai jus mangga di Mesir yang diekspor ke negara-negara Timur Tengah lainnya. "Mangga Indonesia memang tergolong yang terbaik di dunia," kata saya. Istri Dubes Belgia, seorang yang berkebangsaan Filipina tiba-tiba menyela, "Saya kira mangga kami di Filipina adalah mangga terbaik di dunia." Saya hanya tersenyum dan tidak menanggapi lebih lanjut.

Pembicaraan beralih ke Raja Farouk, Raja terakhir Mesir yang terusir ke pangasingan setelah dijatuhkan melalui kudeta oleh Jenderal Najib dan Kolonel Nasser. "Rumah ini tadinya rumah Raja Farouk," kata tuan rumah menanggapi pujian saya kepada Wisma Duta kediaman tuan rumah kami malam itu. Raja-Raja di Timur Tengah waktu itu memang banyak memiliki rumah peristirahatan di Eropa. Sampai sekarang kabarnya keluarga kerajaan Saudi masih mempunyai rumah, atau bahkan istana, di Swiss, Prancis Selatan, dan Spanyol. Karena bicara mengenai Farouk, saya lantas teringat cerita tentang usahanya agar diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad.

Raja-raja di negara Islam pada umumnya memang mendasarkan legitimasi kekuasaannya pada klaim bahwa mereka turunan Nabi Muhammad. Raja Yordania sekarang, Abdullah, adalah cicit Syarif Husain, penguasa Makkah sebelum Kerajaan Arab Saudi berdiri pada awal abad ke-20. Syarif Husain dipercayai Istanbul mengelola dua kota suci (Makkah dan Madinah) karena dia keturunan Nabi Muhammad. Konon Raja Brunei Hassan Al Bolkiah, yang sebagian moyangnya memang berasal dari Hadramout, Ya-

man, juga mengaku sebagai keturunan Nabi. Sultan Pontianak Hamid Alqadri, Raja Bone Andi Mappanyukki, Sultan Ternate, Sultan Jambi, semua dianggap dan mengaku sebagai keturunan Nabi. Pendiri pesantren besar dan masyhur di Jawa, seperti Hasyim Asyari (Kakek Gus Dur) juga keturunan Nabi Muhammad. Yang terakhir ini menurut cerita Gus Dur sendiri kepada saya. Cerita Rahman Wahid ini dibenarkan oleh adiknya, Solahuddin Wahid di kemudian hari. "Yang menarik," kata saya pada jamuan makan malam itu, Farouk adalah cucu Mohammad Ali, orang Albania, pejabat tinggi pada Kesultanan Ottoman di Istanbul yang diperintahkan menjadi Gubernur Mesir pada awal abad ke-19. Waktu itu Mesir memang berada di bawah kekuasaan Kesultanan yang berpusat di Istanbul. "Bagaimana mungkin dia mengaku sebagai keturunan Nabi," kata saya.

Salim Said bersama keluarga pada hari Idul Fitri di Praha, 2009.

Yang angkat bicara menanggapi saya adalah nyonya rumah, istri Dubes, dengan nada yang terasa kurang ramah. "Saya tidak pernah mendengar kisah semacam itu di Kairo," katanya. Ibu Dubes tampaknya kurang senang mendengar cerita saya. Sebenarnya saya bisa menunjuk nama buku dan penulisnya yang menjadi sumber saya. Tapi waktu itu sebagai tamu, saya tidak bersemangat memperpanjang cerita. Aneh, waktu itu saya cepat sadar, fungsi saya di Praha adalah mewakili Indonesia, bukan terlibat debat untuk menemukan kebenaran mengenai Raja Farouk yang keturunan Nabi atau keturunan Albania.

SAYA BERTUGAS DI PRAHA SELAMA TIGA SETENGAH TAHUN, dan itu berarti saya mengalami tiga kali bulan Ramadhan dan tentu saja tiga kali Idul Fitri. Biasanya para duta besar negara-negara Islam bergantian mengadakan acara buka puasa bersama. Karena selama saya di Praha, musimnya adalah musim panas yang harinya panjang, undangan buka puasa sedikit sekali. Mungkin para diplomat itu kelelahan oleh udara panas dan matahari yang terlalu cepat timbul dan memerlukan waktu lama untuk terbenam. Yang secara teratur mengadakan acara buka puasa adalah justru Dubes Amerika Serikat. Dubes Arab Saudi pernah sekali.

Saya mengambil jalan lain, tidak mengundang buka puasa tetapi mengadakan apa yang saya perkenalkan sebagai Idul Fitri Dinner. Dengan cara seperti ini saya bebas mengundang mereka yang bukan Muslim, selain mereka yang memang beragama Islam. Hidangannya adalah makanan tradisional lebaran Indonesia yang kami sajikan secara prasmanan. Tapi ini bukan tanpa tambahan kerja. Selain harus menjelaskan sejarah, jenis, bahan baku, dan rasa hidangan, cara memakannya juga harus saya tunjukkan. Kalau saya tidak jadi pembimbing di sekitar tempat mengambil hidangan, niscaya mereka mencampur aduk saja hidangan yang mestinya dinikmati secara terpisah.

Pada hari lebaran, selepas shalat Idul Fitri kami selalu mengadakan *open house* untuk masyarakat Indonesia. Bagi keperluan itu, dapur Wisma Duta harus kerja ekstra menyediakan hidangan lebaran untuk sekitar 200 orang. Selain orang-orang Indonesia —yang sebagian sudah menjadi warga negara Ceko—juga ikut datang anak, cucu, menantu, dan besan mereka. Pokoknya ramai. Hiruk pikuk melanda Wisma Duta terutama oleh anak-anak Indo-Ceko yang berlarian dalam Wisma yang besar serta halaman yang luas. Mereka memang pada umumnya tinggal di apartemen yang kecil dan tentu saja tanpa halaman. Berada di Wisma Duta yang besar dengan taman yang luas, tentulah merupakan kesempatan yang menyenangkan bagi anak-anak tersebut.

Bahan-bahan untuk dimasak guna keperluan pesta menjamu sekian banyak orang tidak seluruhnya tersedia di Praha. Maka menjelang lebaran, istri saya ditemani juru masak dan Kepala Rumah Tangga Wisma, harus mengadakan perjalanan ke Berlin. Jarak Berlin-Praha hampir 400 kilometer, tapi lewat jalan tol (*autobahn*) yang mulus dan praktis sepi, kalau mereka berangkat lepas subuh biasanya tiba kembali di Praha lepas maghrib. Di Berlin segala kebutuhan dapur bisa diperoleh, sementara di Praha kita cuma bisa belanja di pasar Vietnam yang memang selalu menyediakan berbagai sayuran segar serta macam-macam jenis beras yang mereka datangkan dari Thailand dan Vietnam. Pasar Vietnam bisa ditemukan di hampir setiap kota di negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Orang-orang Vietnam itu dulu didatangkan sebagai pekerja di pabrik-pabrik negara-negara Komunis Eropa Tengah dan Timur. Sekarang mereka sudah menjadi kelompok besar yang bisa ditemukan di mana-mana. “Pada hari besar Vietnam, kalau mereka semua datang, kami harus menyiapkan hidangan untuk 14 ribu orang,” kata Dubes Vietnam kepada saya.

Soto Makassar dengan Buras

Haji Sukoyo dan Haji Yunarto (Tito) Priyopranoto, masing-masing Kepala Rumah Tangga dan Sekretaris Dubes, selalu punya gagasan menarik mengenai jenis makanan apa saja yang sebaiknya jadi menu utama setiap kita mengadakan pesta. Para tamu pernah disuguhi makanan Jawa Timur dengan rawon sebagai primadona, di lain kesempatan tamu dipersilakan mencicipi makanan orang Yogyakarta dengan gudeg sebagai hidangan utama. Soto Makassar dengan buras juga pernah tampil sebagai hidangan utama pada salah satu lebaran.

Setiap 17 Agustus, setelah upacara resmi selesai, para tamu—masyarakat Indonesia dengan keluarga mereka—kami suguhi makan siang. Pada acara seperti ini pilihan makanan biasanya lebih bervariasi. Tamu boleh pilih sendiri makanan yang ditempatkan di bawah tenda di halaman Wisma. Karena saya memba-

Makan siang bersama di halaman Wisma Duta Praha
setelah upacara HUT Proklamasi, 2008.

wa sejumlah besar ikan kerapu kering (sunu) hadiah dari keluarga almarhum Jenderal TNI Andi Mattalatta di Makassar, maka tamu pun pernah disuguhi ikan asin yang dihidangkan bersama sayur lodeh, pecel, tempe, tahu goreng dan tentu saja sambel terasi. Sayur-sayuran dan tahu tersedia di pasar Vietnam, terasi kami datangkan dari Indonesia, tempe bikin sendiri. Ragi untuk bikin tempe didatangkan dari Jakarta.

HIDANGAN SEPERTI INI, DENGAN IKAN ASIN, di Praha atau di KBRI mana pun mungkin baru kali itu tersedia untuk para tamu yang datang secara massal. Unik, tapi memerlukan pekerjaan tambahan. Sebab sebagai tuan rumah, selain menyediakan hidangan untuk sekitar 200 tamu, kita juga masih harus menjelaskan—terutama kepada teman-teman kami orang Ceko—jenis-jenis makanan, rasa, dan cara makannya. Lucu, tapi pengalaman yang menyenangkan. Masih bicara mengenai perayaan 17 Agustus, pesta diplomatik tidak kami adakan pada tanggal yang sama. Alasannya, 17 Agustus jatuh pada musim panas, yakni musim libur. Kebanyakan pejabat tinggi Ceko dan sebagian besar Duta Besar mengambil cuti Musim Panas di luar negeri. Kalau pesta

diplomatik kami adakan juga hari-hari itu kemungkinan tamu yang datang sedikit sekali. Maka kami tunda acara itu ke bulan September atau awal Oktober.

Yang harus saya ceritakan sehubungan dengan resepsi diplomatik itu adalah pakaian yang dikenakan para staf kedutaan (staf lokal maupun para diplomat) pada malam resepsi. Saya mengharuskan para staf memakai macam-macam pakaian daerah Indonesia. Saya sendiri mengenakan pakaian Bugis/Makassar pada resepsi tahun pertama dan pakaian Aceh pada resepsi tahun kedua. "Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita bangsa dengan berbagai suku, tradisi, dan pakaian, tapi kami tetap satu sebagai bangsa Indonesia," kata saya kepada para staf Kedutaan.

Sebagai orang yang berasal dari Sulawesi Selatan, pakaian Bugis/Makassar saya bawa sendiri dari kampung. Sedang pakaian Aceh saya dapatkan sebagai hadiah dari "Taman Iskandar Muda", perkumpulan orang Aceh di Jakarta, atas jasa-jasa baik Jenderal TNI Fachrul Razi yang berasal dari Aceh. Pada tahun terakhir, saya ingin mengenakan salah satu pakaian dari wilayah Indonesia Timur lainnya. Tapi karena tidak berhasil mendapatkannya, maka saya pakai saja seragam sebagai Duta Besar, yakni pakaian yang tadinya saya gunakan pada waktu kredensial.

WISMA DUTA DI PRAHA adalah sebuah rumah besar yang usianya sudah sekitar seratus tahun. Menurut banyak orang, rumah itu ada "penunggunya". Para staf kami yang mendapat tempat di lantai dasar memang mengaku sering diganggu. Ada yang punggungnya ditepuk, kakinya ditarik-tarik waktu tidur, ada yang dilempari bajunya yang diambil dari gantungan, dan macam-macam pengalaman lainnya. Seorang staf lokal, yang menunggui Wisma sebelum kami tiba, mengaku pernah didatangi seorang perempuan cantik yang mengajaknya tidur bersama. "Semua pintu terkunci, saya heran kok ada perempuan bisa masuk," kata Eri, staf tersebut. Tak lama kemudian perempuan cantik itu menghilang entah lewat jalan mana. Dubes kita di Bratislava yang da-

tang bertamu dan tidur di ruangan VIP di lantai dua, juga meng-alami gangguan. "Telinga saya ditiup," kata Pak Dubes. Konon di Wisma Duta ini dulu, ketika masih dihuni oleh pemiliknya sekitar 100 tahun silam, salah seorang anak gadisnya melakukan bunuh diri karena patah hati. Jadi banyak yang menduga, ruh orang bu-nuh diri itulah yang suka datang "bertamu" ke Wisma kami. Saya sendiri lebih percaya "penjaga" itu adalah jin yang kononnya su-ka menghuni bangunan-bangunan tua.

Sejumlah tamu lain juga pernah tidur di ruang VIP itu. Jende-ral Sjafrie Sjamsoeddin dengan istri, Prof. Muladi dengan istri, Dr. Syahrir dan Dr. Kartini Syahrir, Duta Besar Makmur Widodo dan istri, Duta Besar Wiryono dan istri, Duta Besar Makarim Wibisono dan istri, Elly Kasim dan Titiek Puspa juga pernah tidur di kamar VIP tersebut. Tapi tak seorang pun di antara mereka mengeluh mendapat gangguan sebagai yang dialami oleh staf kami dan Du-bes kita dari Slowakia tersebut. "Mungkin 'perempuan cantik' korban bunuh diri itu milih-milih juga waktu beroperasinya dan orang-orang yang ingin diganggunya." Komentar seorang staf lokal kami. Pak Dubes dari Bratislava itu memang ganteng dan tinggi besar. Barangkali itu sebabnya dia diganggu. Yang jelas kami sekeluarga, alhamdulillah, aman-aman saja.

Bicara tentang rumah tua yang ada "penunggunya", saya teringat cerita tentang Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Was-hington DC. Syahdan, suatu kali Sri Sultan berkunjung ke Was-hington dan menginap di Hotel Embassy Row yang terletak tepat di seberang KBRI. Pagi harinya, ketika jumpa Dubes di kantornya, Sultan bertanya, kok KBRI mengadakan pesta besar dan Sultan tidak diundang padahal hotelnya terletak persis di depan KBRI. "Pesta apa, ya? Tidak ada pesta apa-apa," kata Pak Dubes de-ngan heran. Kemungkinan besar para "penunggu" rumah tua itulah yang mengadakan pesta dengan mengundang para "pe-nunggu" rumah-rumah tua di sekitarnya yang memang banyak di sekitar KBRI Washington tersebut. Sultan sebagai Raja Jawa yang barangkali mempunyai kemampuan melihat "yang gaib" berhasil menyaksikan pesta orang-orang halus itu, sementara para pen-

jaga malam Gedung KBRI tidak melihat atau mendengar apa pun di dalam gedung tua yang dijaganya.

Saya Harus Minta Maaf

Catatan dan pengalaman menjabat Dubes di Ceko sebaiknya saya gunakan juga untuk menulis kesan mengurus berbagai rombongan studi banding para anggota DPR kita. Saya harus minta maaf kepada yang terhormat para anggota DPR tersebut, terutama karena di antara mereka banyak teman lama saya. Tapi kalau boleh jujur, maka harus saya katakan bahwa saya selalu bingung melihat rentetan rombongan para wakil rakyat tersebut berkunjung ke Praha. Tidak selalu jelas apa yang mereka studi dan apa pula yang mereka bandingkan. Waktu berkunjung amat singkat dan yang mereka tanyakan pada pertemuan dalam waktu sejam (setengah jam habis untuk terjemahan) dengan tuan rumah pada umumnya hal-hal dasar yang informasinya sebenarnya bisa mereka dapatkan dari Kedutaan Besar Ceko di Jakarta atau KBRI di Praha. Kalau sebelum berangkat mereka mengirimkan pertanyaan kepada kami, dengan segera mereka kami layani, sehingga ketika di Praha mereka bisa lebih menggali informasi yang mereka perlukan.

Dalam sebuah rapat kerja para Dubes Indonesia di seluruh Eropa, soal ini saya sampaikan kepada Menteri Luar Negeri, Hassan Wirayudha. Saya usulkan agar sebelum berangkat ke satu negara, DPR meminta dulu informasi awal dari KBRI. Atas dasar informasi tersebut mereka akan lebih siap untuk melakukan studi banding. Tapi dari teman-teman di Kementerian Luar Negeri saya dapat informasi, Kementerian Luar Negeri takut dianggap mengajari DPR, suatu hal yang konon bisa berakibat tidak menyenangkan bagi pejabat Kemlu. "Kemlu itu amat takut pada Komisi Satu DPR," tambah diplomat senior tersebut. Yah, terserah sajalah apa maunya. Pokoknya saya sudah bicara dan memberi saran berdasarkan pengalaman di lapangan.

MASIH TERSISA TIGA HAL menarik yang rasanya perlu saya singgung sebelum mengakhiri cacatan sebagai Dubes ini. *Pertama*, mengenai upacara gaya militer yang saya hapuskan. Pada peringatan proklamasi pertama yang saya alami di Praha, saya biarkan staf merencanakan upacara. Pelaksanaan upacara berlangsung di halaman Wisma Duta. Untuk upacara bendera, panitia memerlukan latihan beberapa hari. Dari jendela kamar tidur yang terletak di lantai II, suatu kali saya iseng menonton latihan tersebut. Ternyata upacara akan dilaksanakan dengan cara militer, lengkap dengan komandan upacara segala. Saya langsung intervensi. "Ini bukan acara militer dan kita bukan tentara. Tidak perlu upacara dengan cara militer." Seorang staf mencoba menjelaskan dengan menyebut upacara yang mereka persiapkan itu sudah sesuai standar upacara di Kementerian Luar Negeri. "Itu peninggalan Orde Baru yang keliru," kata saya kesal. "Lagi pula tentara itu tidak suka kita meniru-niru mereka." Saya lalu teringat satu pengalaman di Lemhanas ketika seorang pejabat sipil akan melaporkan kepada Gubernur Muladi—juga sipil murni—bahwa acara siap dimulai. Gayanya sangat militeristik, dan begitu bersemangatnya dalam membanting kaki sebelum memberi hormat secara militer, sang pejabat hampir saja tergelincir.

Setelah seminar selesai, saya bisiki Prof. Muladi, Lemhanas bukan lembaga militer dan karena itu tidak perlu upacara diadakan dengan menggunakan cara-cara militer. Lemhanas adalah lembaga sipil yang dititipkan pembinaannya oleh Presiden Sukarno kepada Departemen Pertahanan waktu itu (1965). Lebih 40 tahun dikelola militer dengan perwira tinggi sebagai Gubernur, orang lalu menganggap Lemhanas sebagai lembaga militer. Waktu menulis catatan ini Prof. Muladi sudah lama berhenti dari jabatan Gubernur, saya tidak tahu apakah cara-cara militer sudah sempat dia hapuskan di Lemhanas. Tapi di Praha, dengan otoritas saya sebagai Dubes, saya hapuskan cara-cara militer tersebut. Sebagai ganti komandan upacara, saya melatih sendiri istri seorang diplomat untuk menjadi *master of ceremony* (MC). Di kemudian hari saya mendapat informasi upacara dengan cara-cara

militer dihidupkan kembali oleh Dubes—seorang diplomat karier—yang menggantikan saya.

Kebiasaan pejabat KBRI memonopoli semua kegiatan upacara juga saya ubah. Kalau sebelumnya untuk membaca teks Pembukaan UUD 45, pembacaan teks Proklamasi, teks Pancasila, dan bahkan pembacaan doa dimonopoli oleh para diplomat di KBRI, kebiasaan tersebut saya ubah dengan melibatkan masyarakat Indonesia di negara itu. "Ini upacara kenegaraan, dan negara milik kita bersama, jadi jangan kita melakukan monopoli," kata saya. "Kita di KBRI hanya menyiapkan dan bertanggung jawab terlaksananya upacara dengan lancar dan tertib." Begitu penjelasan saya kepada para staf. Mendapatkan warga negara Indonesia untuk membaca teks-teks Pancasila, Pembukaan UUD 45 dan sebagainya tidak sulit. Di Praha cukup tersedia warga, salah seorang di antaranya adalah pegawai DHL yang oleh kantor pusatnya kebetulan ditugaskan di Ceko. Yang repot adalah pembaca doa. Waktu itu sulit mendapatkannya di Praha. Tiba-tiba saya teringat seorang mahasiswa lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang mengikuti program Doktor di Berno. Namanya Khomaini Hasan. Saya minta Khomaini didatangkan dari kota yang jaraknya sekitar 200 kilometer dari Praha. "Eh, Anda bernama Khomaini, nama meyakinkan untuk membaca doa. Nah, pada upacara besok Anda yang saya beri kehormatan membaca doa." Alhamdulillah, semua berlangsung lancar. Tiga tahun berturut-turut selama saya masih di Praha upacara tanpa meniru tentara berjalan lancar.

Hal *kedua* yang rasanya menarik juga untuk saya catat adalah petisi para staf lokal (orang Indonesia dan orang Ceko secara bersama). Mereka menuntut kenaikan gaji yang sudah belasan tahun tidak dinaikkan. Gaji mereka dalam dolar. Terakhir mereka mendapat kenaikan pada tahun 1993 yakni ketika nilai dolar sama dengan 41 korun. Pada saat petisi mereka sampaikan, nilai dolar sudah turun hingga hanya 14 korun. Sebelum petisi itu, tukang kebun KBRI, orang Ukraina, sudah lebih dulu meninggalkan pekerjaannya karena permintaan kenaikan gajinya tidak mendapat-

kan tanggapan positif. Kini mereka secara bersama menulis petisi dan kalau tidak ditanggapi dengan baik dan lalu berhenti secara berjamaah, KBRI bisa "lumpuh". Ekonomi Ceko sedang berkembang sehingga tidak sulit mendapat pekerjaan waktu itu. Karena faktor bahasa, KBRI sangat bergantung pada pegawai lokal tersebut. Kalau mereka ramai-ramai berhenti, KBRI kemungkinan amat besar tidak bisa berfungsi secara normal.

PETISI DAN AKIBATNYA JIKA DIABAIKAN, saya laporkan ke Jakarta. Seperti biasa, jawaban lambat dan tidak terlalu jelas pengarahannya. Terdesak, saya memutuskan untuk berkonsultasi ke teman-teman sesama Dubes Indonesia di berbagai negara Eropa. Mereka kebanyakan adalah diplomat karier, artinya pegawai Kemlu yang lebih tahu aturan kepegawaian dan penggajian. Semua menasihatkan saya berhati-hati. Kalau gaji pegawai lokal saya naikkan sebelum mendapatkan persetujuan yang jelas dan pasti dari Jakarta, saya nanti bisa diminta mengganti pengeluaran. Dalam keadaan terpepet saya minta Kepala Kanselerai (kepala kantor) mempelajari peraturan-peraturan yang ada untuk menemukan apa saja kewenangan Dubes dalam soal pengeluaran dana. Bertemu. Atas dasar peraturan itu saya memerintahkan Kepala Kanselerai untuk menyelamatkan KBRI dari "kelumpuhan" dengan cara menaikkan gaji para pegawai lokal rata-rata sebesar 25 persen. Mereka semua, tentu saja, amat senang. Bahkan ada yang datang mengucapkan terima kasih sembari mencium tangan saya. Alhamdulillah, sampai sekian tahun setelah balik dari Praha, saya aman-aman saja dari kewajiban mengganti pengeluaran sebagai hukuman menaikkan gaji para pegawai lokal tersebut.

Hal *ketiga* yang ingin saya sampaikan adalah mengenai kualitas staf saya di Praha. Sekali lagi, sebagai bukan diplomat karier saya berprasangka baik kepada keterampilan dan kebolehan staf saya. Sebelum berangkat seorang anggota DPR di Senayan bertanya mengenai bagaimana nanti sebagai Dubes saya akan menjalankan tugas tanpa pengalaman birokratis dan pengalaman

diplomatik? Jawab saya, seperti juga tidak ada sekolah presiden, sekolah menteri, atau sekolah untuk terpilih dan menjabat sebagai anggota parlemen, sekolah Dubes juga tidak ada. Yang ada sekolah diplomat untuk jadi pembantu Dubes. "Saya akan memanfaatkan keahlian para staf saya yang terlatih khusus dan profesional," kata saya dengan yakin.

Ternyata harapan saya tidak seluruhnya menjadi kenyataan. KBRI Praha mempunyai tujuh staf yang berstatus diplomat. Ketika saya tiba, dua di antaranya sakit serius dan meninggal tidak lama setelah tiba kembali di Jakarta. Dua orang ini sangat senior. Yang lainnya diplomat muda—penempatan pertama atau kedua—yang tampaknya kurang dipersiapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Contoh: diplomat muda yang mengurus budaya dan hubungan dengan media, sama sekali tidak memiliki pengetahuan mengenai bidang yang saya tugaskan padanya. Ketika saya perintahkan menyiapkan pekan film Indonesia, dia tidak tahu apa yang harus dikerjakannya dan siapa serta lembaga apa yang harus dihubunginya di Praha. Demikian juga halnya ketika saya perintahkan membina kontak dengan mass media.

Kebetulan Dubesnya mantan Ketua Dewan Kesenian Jakarta dan juga mantan wartawan selama 25 tahun. Akhirnya saya harus turun tangan sendiri menyelesaikan persoalan. Untuk tujuan mendidik diplomat muda itu saya selalu membawanya dalam pertemuan-pertemuan mengurus rencana kegiatan budaya KBRI. Anak muda itu sebenarnya cerdas, tapi Kemlu tidak mempersiapkan mereka dengan baik. Pernah ke Taman Ismail Marzuki? "Pernah, Pak Dubes," Jawabnya. Nonton apa di sana? "Nonton film di bioskop 21." Hanya nonton di bioskop 21 jelas tidak membantunya menjalankan tugas kebudayaan di KBRI. Seandainya anak muda itu diperintahkan oleh Kemlu magang beberapa hari di Dewan Kesenian Jakarta dan Taman Ismail Marzuki untuk belajar bagaimana pusat kesenian itu mengatur kerja sama dengan berbagai kedutaan asing dan sejumlah lembaga kebudayaan di luar negeri, maka tugasnya di Praha atau di mana saja pasti tidak akan sesulit yang saya saksikan sebagai Dubes.

Demikian juga dalam berurusan dengan pers, diplomat-diplomat muda itu tidak pernah diarahkan mengunjungi stasiun TV yang banyak di Jakarta, dan koran serta majalah yang juga banyak bisa ditemukan di ibu kota. Seandainya Kemlu mewajibkan anak-anak muda itu (menjelang penempatan pertama) berkeliling ke berbagai objek yang kemungkinan akan berhubungan dengan tugasnya sebagai pembantu Duta Besar, maka tugas Dubes, terutama mereka yang bukan karier diplomat, tentu akan lebih ringan.

Sekali lagi harus saya katakan, saya beruntung berpengalaman sebagai wartawan selama 25 tahun. Dengan pengalaman itulah saya bekerja sebagai Dubes merangkap sebagai korektor dan editor bahasa laporan-laporan yang ditulis oleh para staf saya. Bahasa Indonesia mereka pada umumnya kurang menggembirakan. Tapi harus dengan segera saya katakan, ini bukan melulu kesalahan para diplomat muda tersebut. Sebagai profesor yang harus memeriksa banyak makalah atau jawaban ujian para mahasiswa, persoalan yang sama juga saya hadapi di berbagai perguruan tinggi tempat saya mengajar. Inilah akibat pengajaran bahasa Indonesia yang salah. Dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang selalu diajarkan adalah tata bahasa. Pelajaran mengarang tidak ada, pelajaran kesusastraan hampir tidak kebagian tempat. Akibatnya generasi muda kita tidak terampil menggunakan bahasa Indonesia sebagai media ekspresi atau medium komunikasi. Dengan singkat saya ingin tekankan bahwa yang salah dalam hal ini bukan para diplomat muda itu. Mereka umumnya cerdas-cerdas. Yang salah adalah Kementerian Luar Negeri dan sistem pendidikan, khususnya sistem pengajaran bahasa Indonesia kita.

SEBELUM MENGAKHIRI CATATAN pengalaman sebagai dubes ini, saya ingin secara singkat mengenang sahabat lama saya, almarhum Dr. Syahrir yang berkunjung ke Praha bersama istrinya, Dr. Kartini Panjaitan Syahrir. Waktu itu Dr. Syahrir adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang sedang men-

Bersama Dr. Syahrir dan Dr. Kartini Panjaitan di Wisma Duta, Praha, 2009.

jalankan tugas ke Swedia. Dalam perjalanan pulang dari London, suami istri itu memerlukan menengok saya di Praha. Selama di Praha, sebagaimana biasanya, kami kebanyakan sibuk berdiskusi saja. Topik kami adalah politik dan ekonomi Indonesia. "Apa saja yang Anda nasihatkan kepada Bapak Presiden sebagai ahli ekonomi?" tanya saya. "Banyak. Semua tertulis. Tapi tidak diperhatikan." Dan mulailah Syahrir mengemukakan keluhannya dan keluhan kolega sesama anggota Wantimpres mengenai nasihat-nasihat yang tidak digubris oleh Presiden SBY. "Saya akan terbitkan nasihat-nasihat saya nanti," kata Syahrir dengan kesal. Tuhan ternyata tidak memberi peluang kepada Dr. Syahrir menerbitkan sendiri kumpulan nasihatnya. Maut menjemputnya tidak terlalu lama setelah kembali dari Praha. Kesempatan menerbitkan nasihat-nasihat yang tak tergubris itu diberikan Tuhan kepada Adnan Buyung Nasution (Abang Buyung) Ketua Wantimpres pada periode pertama kepresidenan SBY. Dan buku yang menghebohkan itu pun terbit pada tahun 2012.

Masih tentang Dr. Syahrir. Ketika saya pulang ke Jakarta, teman-teman menceritakan pengalaman Syahrir di Praha sebagai yang dikisahkannya kepada teman-teman tersebut. Menurut Syahrir, "Hebat Salim di sana, sopirnya saja orang bule." Kata saya, "Syahrir tidak tahu, bukan cuma sopir yang bule, yang cuci pakaian dalam saya juga bule." Pembantu rumah tangga Dubes di Praha memang seorang perempuan bule yang tinggi besar. Dia berdarah Jerman-Ceko.

Dari Konser Jaz ke Konser Jaz

Akhirnya tibalah saatnya kami harus meninggalkan Praha. Seperti waktu datang dulu keliling memperkenalkan diri, kini pun kami harus berkeliling mohon pamit. Karena waktu itu Ceko sedang dilanda krisis politik sehingga tidak ada Kabinet—yang lama jatuh, yang baru belum terbentuk—maka sebagian besar rencana pamit tidak bisa dilakukan. Tapi dengan Presiden—dalam negara dengan sistem parlementer—tentu tidak ada halangan apa-apa. Staf KBRI kemudian menulis surat minta waktu pamit kepada Presiden Vaclav Klaus.

Agak lama kami menunggu. Lewat telepon protokol Istana mengabarkan tawaran Presiden menerima saya pada acara konser jaz di Istana. "Kalau Yang Mulia bersedia, kami akan sediakan tempat khusus di samping Presiden," kata pejabat Istana tersebut. Kalau menolak tawaran tersebut, saya mungkin terpaksa harus menunggu lebih lama lagi. Maka saya putuskan pamit sambil menonton konser. Adalah unik bahwa acara resmi pertama saya di Praha adalah juga menghadiri konser atas undangan Presiden Klaus. Menarik untuk diketahui Presiden Bill Clinton sebagai pemain *saxophone*, pernah ikut bermain dalam salah satu konser tersebut ketika kebetulan berkunjung ke Praha.

Ditemani Sekretaris Dubes, saya datang ke ruang festival di Istana. Seperti janji protokol, kursi sudah disediakan tepat di samping Presiden dan pelaksana pemerintahan atau pejabat Perdana Menteri. Begitu mendekat, Presiden Klaus berdiri menyambut, menerima uluran tangan dan memperkenalkan saya kepada beberapa pejabat penting di sekitarnya. Duduk di kursi yang telah disiapkan, tidak tersedia waktu untuk berbasa-basi. Konser segera mulai. Seperti hanya menunggu saya datang.

Pada akhir konser, Presiden sebagai tuan rumah menyampaikan pidato singkat memuji sembari mengucapkan terima kasih kepada para pemain musik dan ... sekalian mengucapkan selamat jalan kepada Dubes Indonesia yang akan segera meninggalkan Praha. Tepuk tangan bergemuruh mendorong saya berdiri

memberi hormat dengan menganggguk dan melambaikan tangan ke segala penjuru ruangan. Acara konser dan pamit selesai. Saya balik ke Wisma dan siap meninggalkan Praha setelah bertugas di kota yang cantik itu selama tiga setengah tahun.

Beberapa hari kemudian, pada sebuah subuh yang dingin di awal musim semi, dengan diantar oleh semua Dubes ASEAN, kami sekeluarga terbang ke Frankfurt dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Di atas pesawat yang menerbangkan kami meninggalkan Eropa, seperti ada yang membisikkan ke telinga saya: "Dari sejumlah perjalanan ke luar negeri itu kau sudah berhasil mengumpulkan sejumlah gelar, mulai dari H.B.A., M.A., MAIA, Ph.D., Haji, bapak seorang gadis, hingga akhirnya Ambassador."

Bangun tengah malam di Praha beberapa jam lalu, dalam kabin kelas eksekutif *Etihad* yang menerbangkan kami dari Frankfurt, saya sangat mengantuk dan karena itu mudah tertidur. Awak kabin membangunkan semua penumpang ketika pesawat bersiap-siap mendarat di Abu Dhabi.[]

ALLAHUMMA LABBAIK ...

"Ya, Tuhan, aku datang memenuhi panggilan-Mu." Itulah ucapan yang selalu terdengar ketika rombongan berbagai bangsa berada dalam perjalanan menuju Kota Makkah yang di dalamnya terdapat Ka'bah, Baitullah, Rumah Allah. Sebagai kelompok terbang (kloter) terakhir dari Indonesia yang memasuki Kota Makkah pada musim haji 1998 itu, saya pun membaca kalimat talbiah yang berisi jawaban kepada panggilan Allah. "*Labbaik, Allahumma Labbaik*." Menurut kisahnya, setelah Nabi Ibrahim dahulu kala selesai merenovasi Ka'bah, Tuhan memerintahkan Nabi Allah itu memanggil manusia datang beramai-ramai melaksanakan ibadah haji di Baitullah tersebut. Itu sebabnya melakukan ibadah haji sering juga disebut sebagai memenuhi panggilan Nabi Ibrahim.

Ketika masih menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Gubernur Jakarta, Mayjen TNI Suryadi Sudirja, setiap tahun memberi kami jatah berhaji untuk beberapa orang. Jatah itu saya bagikan kepada seniman-seniman yang berminat menunaikan ibadah haji. Beberapa teman bertanya, "Anda sendiri kapan berhaji? Mengapa jatah itu satu pun tidak Anda manfaatkan?" Jawab saya, "Jatah dari Gubernur ini adalah amanah, tidak sepantasnya saya manfaatkan sendiri." Lagi pula waktu itu memang belum muncul keinginan dalam diri untuk berhaji. Mungkin panggilan Nabi Ibrahim belum menyentuh hati saya. Tapi suatu hari awal Reformasi 1998, saya jumpa Prof. Jimly Asshiddiqie di kantor Wakil Presiden. Jimly tadinya memang staf Wapres, tapi karena Wapresnya, Dr. B.J. Habibie, waktu itu sudah jadi Presiden, maka Jimly dari kantor Wapres menjadi pembantu Presiden yang duduk di Istana Merdeka. "Anda sudah haji, belum?" tanyanya ke-

pada saya. "Belum," jawab saya. "Kalau berminat, kita memerlukan tenaga untuk membantu Amirul Haj (Pemimpin Perjalanan Haji)," lanjut Jimly. Dengan fasilitas kelas satu, saya tidak lagi punya alasan menampik kesempatan memenuhi panggilan Nabi Ibrahim.

Singkat cerita, bersama Amirul Haj yang juga Menteri Penerangan, Letjen TNI Muhammad Yunus Yosfiah, saya berangkat ke Makkah. Satu pesawat dengan kami adalah Jenderal TNI (Purn.) Hartono, Kiai Haji Abdurrasyid Abdullah Sjafii, Kiai Haji Mustofa Bisri, Kiai Haji Dr. Umar Shihab, Sophan Sophiaan, Prof. Bachtiar Ali, dan sejumlah selebriti lainnya. Kami memulai perjalanan dalam pakaian ihram di Jeddah. Dan selama perjalanan terus-menerus membaca talbiah: *Labbaik, allahumma labbaik*. *Ya, Allah ini saya datang memenuhi panggilan-Mu.* Meski ini acara berhaji pertama bagi saya, Makkah bukanlah kota yang asing. Beberapa bulan sebelum musim haji, yakni sejak 10 hari terakhir bulan Ramadhan tahun itu, saya dan istri berada di Makkah sebagai jamaah umrah. Pada beberapa Ramadhan sebelumnya juga kami umrah dan berlebaran di Makkah. Karena itu, saya lebih tahu jalan-jalan di dalam dan di sekitar Masjidil Haram tinimbang kebanyakan penunjuk jalan yang terdiri dari mahasiswa kita yang umumnya datang dari Kairo. Ratusan mahasiswa memang dipekerjakan khusus untuk meladeni para jamaah haji Indonesia yang jumlahnya sekitar 200 ribu orang.

Rombongan kami mendapat pemondokan di daerah Aziziyah, di luar Kota Makkah, dekat ke Mina, tempat lempar jumrah. Selain melakukan ibadah, saya juga ikut sibuk mengikuti inspeksi Amirul Haj ke berbagai pemondokan dan kantor-kantor yang mengurus para jamaah. Yang saya ingat dari rangkaian inspeksi itu adalah kunjungan ke pemondokan Jamaah Sulawesi Selatan. Tahu Yunus berasal dari Sidenreng Rappang, mereka sangat gembira. Mereka menyebut diri sebagai Haji Cokelat, sebab mereka pada umumnya memang pemilik kebun cokelat. Pada masa krismon itu mereka mendapat rezeki nomplok akibat perbedaan kurs yang mendadak mencolok antara rupiah dan dolar. Biji cokelat

mereka ekspor, dan yang mereka terima adalah dolar Amerika pada saat nilai rupiah terpuruk.

Sebagai orang yang diperbantukan kepada Amirul Haj, saya mengambil prakarsa membuat catatan-catatan dari inspeksi Jenderal Yunus Yosfiah. Catatan-catatan itu kemudian menjadi bahan untuk membuat laporan perjalanan haji kepada pemerintah. Pokoknya, tanpa surat pengangkatan saya telah menjalankan fungsi sekretaris pimpinan perjalanan haji. Karena semua berjalan lancar, tidak ada hal khusus yang masuk laporan perjalanan.

SEBAGAI SEORANG YANG BERHAJI setelah berkali-kali melakukan ibadah umrah, meski tetap mempunyai perasaan tertentu setiap memasuki Masjidil Haram dan melakukan tawaf di seputar Ka'bah, saya tidak lagi *excited* seperti ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram pada 1978, yakni ketika saya untuk pertama kalinya mengadakan umrah. Pengalaman ini penting saya catat karena kebanyakan jamaah yang terinjak-injak dan tertabrak-tabrak adalah mereka yang ketika melihat dan mendekati Ka'bah *excited* luar biasa sehingga layaknya orang terpukau. Akibatnya banyak di antara mereka yang menjadi korban injakan dan impitan jamaah yang juga tidak kurang *excited.* Jamaah Indonesia pada umumnya berbadan kecil, dan karena itu dengan mudah dilabrak oleh jamaah dari Afrika yang bangun tubuhnya besar-besar atau terimpit oleh jamaah Turki yang selalu berjalan cepat sembari bergandengan tangan. Meski dari awal diingatkan bahwa ibadah haji adalah ibadah yang memerlukan tenaga fisik yang tangguh, kesulitan badaniah tetap saja bisa dikurangi seandainya para jamaah tidak terlalu *excited* sehingga semua pengorbanan, termasuk jatuh sakit bahkan meninggal di Tanah Suci mungkin dapat dihindarkan. Repotnya memang banyak juga jamaah, terutama yang sudah sepuh, berharap meninggal di Tanah Suci. Lucunya kalau ada di antara mereka yang sakit, mereka berdoa juga agar diberi kesehatan dan umur panjang untuk kembali berkumpul bersama keluarganya di Indonesia.

Oleh sebab itu, berdasarkan pengalaman, seandainya memungkinkan, maka saya ingin menganjurkan kepada para calon jamaah untuk sebaiknya melakukan ibadah umrah dulu sebelum menjalankan ibadah haji. Pada masa umrah, kesempatan beribadah di sekitar Ka'bah tersedia lebih banyak sehingga pada waktu haji, ibadah di sekitar Ka'bah dilakukan semestinya saja, sepanjang memenuhi syarat untuk menjadi haji. Kesempatan beribadah di dalam masjid lebih terbatas pada umrah Ramadhan. Soalnya pada bulan suci itu, pusat seluruh kegiatan berada di Masjidil Haram dan tidak ada pembatasan atau jatah seperti pada musim haji. Penduduk Saudi, misalnya, pada musim haji hanya mereka yang kebagian jatah yang boleh berhaji. Sisanya harus menjauh dari kegiatan ibadah haji. Tapi pada umrah Ramadhan, semua boleh ikut tanpa pembatasan.

Maka selain jamaah Saudi dan dari negara-negara Timur Tengah, jamaah dari Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara semua secara bersama memenuhi Makkah. Puncak keramaian di Kota Makkah sebenarnya adalah pada bulan Ramadhan, bukan di musim haji. Oleh sebab itu, kalau ingin beribadah yang agak tenang di Masjidil Haram, terutama bagi para pemula, buat sementara hindarilah Makkah pada musim umrah Ramadhan, terutama pada 10 hari terakhir bulan suci. Pada masa akhir Ramadhan itu, sewa kamar hotel juga jauh lebih mahal dibanding sewa kamar pada musim haji.

TEMAN-TEMAN SAYA, TERUTAMA PARA SENIMAN, dan para wartawan, pada umumnya menulis sejumlah laporan dan renungan tentang berhaji setelah pulang ke Tanah Air. Dua buku yang terkenal mengenai perjalanan ke Tanah Suci itu adalah *Mendapat Panggilan Nabi Ibrahim* yang ditulis Haji Rosihan Anwar dan *Orang Jawa Naik Haji*, karya Haji Danarto. Saya tidak punya pengalaman istimewa, apalagi yang mistis, yang menarik untuk ditulis selama berhaji, mungkin karena saya sudah berkali-kali umrah sebelum akhirnya berhaji. Tapi ada satu kejadian kecil yang mungkin lebih

disebabkan oleh faktor kelalaian atau kebetulan saja. Tapi siapa tahu bisa juga tergolong pengalaman mistis kecil-kecilan.

Dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Aziziyah pada hari-hari terakhir kami di Tanah Suci, mobil yang kami tumpangi tak kunjung menemukan belokan ke tujuan, sehingga kita berjalan terus. "Wah, ada yang tidak beres ini," kata seorang jamaah. "Jangan-jangan ada di antara para jamaah melakukan pelanggaran
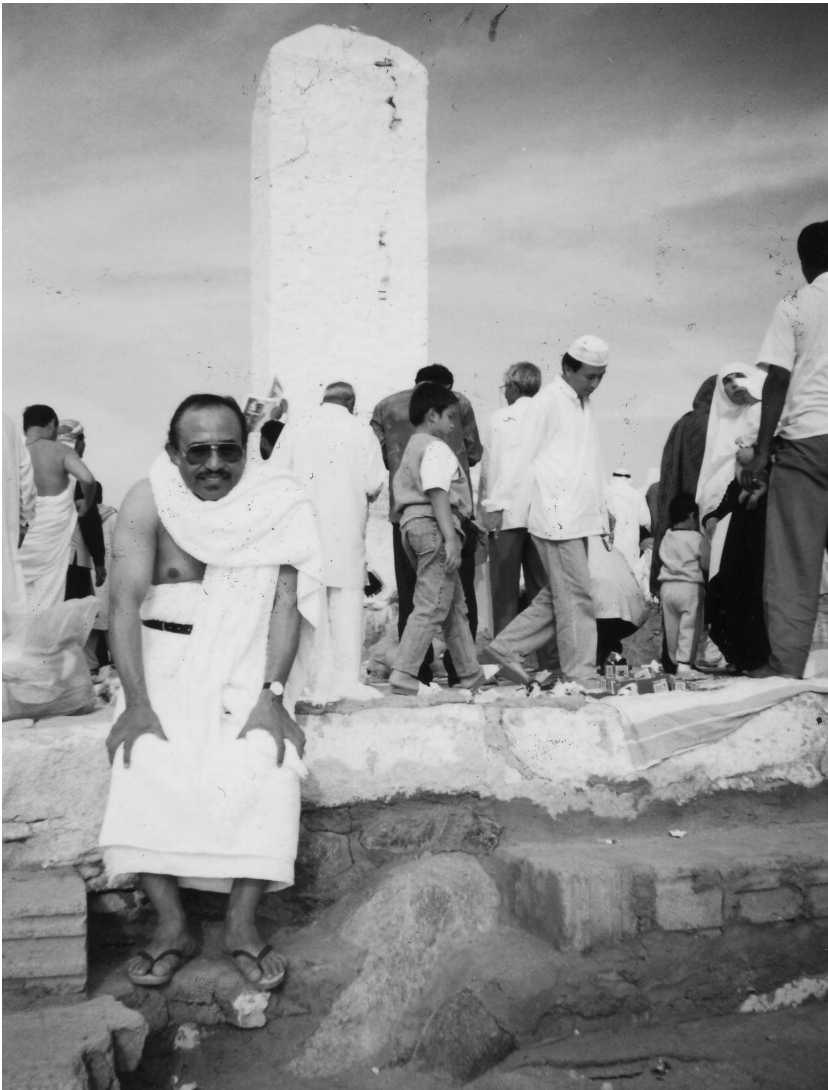
Salim Said di Jabal Rahmah, Padang Arafah.

aturan berhaji," kata yang lainnya. Cepat saja saya memeriksa tas tangan yang saya manfaatkan membawa batu-batu untuk melempar jumrah beberapa malam sebelumnya. Batu-batu itu kami kumpulkan di Muzdalifah, dan tidak boleh dibawa keluar dari kawasan pelemparan jumrah. Ternyata di dalam tas saya masih tertinggal sebuah batu kecil. Saya tunjukkan kepada Kiai Mustofa Bisri. "Ah, ini dia soalnya," kata kiai dari Rembang itu. Setelah batu saya lemparkan keluar mobil, tiba-tiba saja sopir menemukan putaran dan dengan segera kami tiba di penginapan di Aziziyah. "Nah, itulah misteri yang Anda cari," kata Mustofa Bisri kepada saya sembari tersenyum.

Sejak berada di Makkah, saya memang banyak berdiskusi dengan Kiai Mustofa Bisri yang juga pemimpin Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin di Rembang. Kiai Mustofa juga seorang penyair dan pelukis. Saya bicara kepadanya tentang misteri yang dialami banyak orang selama melakukan ibadah haji atau umrah. Saya dengar cerita tentang Prof. Harsya Bahtiar yang melihat ayahnya ikut tawaf memutari Ka'bah. Padahal waktu itu sang ayah sudah lama meninggal. Di kemudian hari juga saya dengar cerita pengalaman pribadi Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin yang melihat almarhum Sarwo Edhie bertawaf bersama rombongan Sjafrie dan Jenderal Pramono Edhie Wibowo, putra Sarwo Edhie. "Itu Babe lu ngikuti lu, Ed," kata Sjafrie kepada Pramono Edhie Wibowo sembari bertawaf. Saya inginkan pengalaman mistis. Tapi ternyata hanya kebagian batu kecil yang mengganggu perjalanan kami dari Masjidil Haram ke Aziziyah.

Berlainan dengan cerita banyak orang yang mengalami berbagai kesulitan dalam melakukan ibadah haji, saya alhamdulillah menjalani proses dengan lancar. Ketika pada malam hari mencari batu-batu kecil di Muzdalifah, saya tiba-tiba merasa seperti anak kecil mencari buah mangga yang jatuh di halaman selepas angin ribut. Saya tertawa sendiri. Terasa sangat nikmat. Dan ketika kami melontarkan jumrah dengan batu-batu dari Muzdalifah, kami selalu mendapatkan tempat melontar dalam keadaan yang tidak terlalu ramai.

Mungkin karena tidak menemukan misteri dan karena sudah sering ke Makkah, tidak banyak renungan yang bisa saya tulis. Karena itu sebagai wartawan dan ilmuwan sosial, saya lebih tertarik mencatat hal-hal empiris yang saya alami dalam berhaji dan pada berbagai kunjungan ke Tanah Suci yang terletak dalam Negara Arab Saudi serta kawasan seputarnya.

Ketika untuk pertama kalinya saya ke Arab Saudi—sepulang dari Jerusalem dan Kairo tahun 1978—negara itu secara fisik belum semaju dan sekaya sekarang. *Airport* masih yang lama dan kuno. Lingkungan Masjidil Haram belum sebesar dan secantik sekarang. Halaman yang terbentang luas di seputar masjid waktu itu masih bagian dari pasar yang mengingatkan saya pada pasar di samping Bioskop Grand di Kramat, Jakarta, pada awal tahun enam puluhan. Waktu itu kalau kita berbelanja masih lazim berhadapan dengan pedagang yang berkebangsaan Saudi.

Kini keadaan sudah berubah hampir seratus persen. Orang Saudi yang makin kaya tidak lagi bekerja di toko milik mereka. Sekarang warga negara Saudi memercayakan uang mereka yang bekerja. Semua toko di Saudi adalah milik bangsa Arab Saudi, tapi di semua pusat perdagangan itu yang bekerja bukan orang Saudi. Di Makkah dan Madinah (Tanah Haram) yang bekerja adalah orang-orang Islam dari berbagai penjuru dunia, terutama dari Yaman, selain dari Asia Tengah, Asia Selatan serta sedikit dari Indonesia. Sedangkan di Jeddah, orang Filipina yang umumnya beragama Katolik (kecuali Bangsa Moro yang berasal dari Filipina Selatan) memainkan peran pengelola toko, di samping orang Mesir dan Indonesia.

Mengenai hal ini, saya teringat Ali Akbar Navis, pengarang cerita pendek terkenal dari Sumatra Barat. Suatu kali Navis naik haji dan pulang menulis catatan perjalanannya. Salah satu yang dikisahkannya adalah pengalaman yang kurang memuaskan yang dialaminya ketika bersantap di sebuh restoran cepat saji. Komentarnya, "Mana ada orang Arab yang pintar masak." Rupanya karena yang mengelola restoran berhidung mancung, maka dianggap saja orang Arab oleh Navis. Kemungkinan yang menge-

Salim Said, Rita, dan Herawaty di Madinah.

lola restoran adalah orang Turki, India, Bangladesh, atau orang Pakistan. Yang pasti bukan orang Saudi. Para pekerja pendatang ini semua kemungkinan besar berhidung mancung dan berbahasa Arab bagus karena mereka sudah lama bekerja dan bolak-balik ke Arab Saudi. Jadi, disimpulkan saja sebagai orang Arab oleh Navis.

Bahasa Arab Tak Terdengar Lagi

Sehubungan dengan pengalaman dan kesimpulan Navis yang keliru itu, saya ingin melengkapi cerita dengan mengisahkan pengalaman perjalanan saya ke Abu Dhabi, Dubai, dan Doha, kota-kota penting Jazirah Arab di sekitar Teluk Parsi. Di hampir semua pertokoan dan perkantoran di kota-kota tersebut, bahasa Arab nyaris tidak terdengar lagi. Yang Anda dengar di berbagai pusat perbelanjaan di negara-negara Teluk kaya itu adalah bahasa Inggris dengan berbagai aksen. Yang paling menonjol adalah aksen India dan Filipina. Melihat penduduk asli juga jarang. Mereka tinggal di vila-vila mewah di luar kota dengan sejumlah pelayan yang sebagian besar berasal dari Indonesia.

Negara-negara kecil kaya raya itu memang dijalankan oleh orang-orang asing yang bekerja di sana tanpa keluarga. Kalau mereka diizinkan membawa keluarga dan lalu beranak pinak di situ, dalam waktu singkat negara-negara itu akan diambil alih orang asing, terutama mereka yang berasal dari anak benua India. Arab Saudi juga tidak mengizinkan para pekerja tamu membawa keluarga. Inilah, antara lain, penjelasan bagi kemungkinan terjadinya perkosaan. Biasanya yang jadi sasaran adalah para tenaga kerja wanita (TKW) dari Indonesia yang jumlahnya di kawasan itu mungkin sekitar dua juta orang.

Akibat kekayaan berlimpah yang dinikmati oleh para elite kerajaan dan penduduk asli yang berjumlah kecil, mereka memang tidak perlu lagi bekerja. Semua pekerjaan dibebankan kepada orang asing. Dari pelayan rumah, tukang masak, tukang kebun, sopir, penjaga toko, sampai manajer perusahaan, semua orang asing. Pekerjaan yang masih tersisa bagi penduduk asli adalah menikmati hidup dengan dana tak terbatas. "Mereka hidup dari pesta ke pesta," kata seorang penjaga toko asal Indonesia di Dubai kepada saya beberapa tahun silam. Dan pada pesta-pesta itu selalu terhidang makanan-makanan enak yang tentu saja memerlukan gerak badan untuk mencerna kalori dan kolesterol yang mengawal hidangan-hidangan lezat tersebut. Nah, di sini pula soalnya. Kebanyakan mereka sudah gemuk dan karena itu malas bergerak. Akibatnya, persentase tinggi di kalangan mereka, kabarnya, menderita diabetes dan jantung koroner.

Selain menikmati pesta dengan makanan berkolesterol, mereka juga menghabiskan waktu berwisata ke Eropa dan Amerika. Tidak tanggung-tanggung, perjalanan jauh itu juga menyertakan para pembantu mereka. Di Eropa saya sering melihat pembantu dari Indonesia berjalan, sembari menggendong anak majikan, mengikuti bos mereka yang sedang berbelanja di butik-butik mahal. Yang saya alami di Praha adalah larinya seorang pembantu Indonesia dari rumah Dubes Kuwait. Kami memang bertetangga dengan Dubes Kuwait. Tapi karena pembantu mereka tidak boleh keluar, kami tidak tahu ada warga negara kita di sana. Pak

Dubes itu punya istri dua, dan bergantian datang ke Praha. Entah apa pasal, terjadi cekcok dengan salah satu istri Dubes, sang pembantu melarikan diri. Barulah waktu itu Dubes Kuwait melaporkan persoalannya lewat telepon ke KBRI. Lebih gila lagi, Pak Dubes itu menyerahkan kopi paspor TKW yang melarikan diri kepada saya pada resepsi hari kemerdekaan Prancis. Ini suatu yang amat tidak sopan dalam pergaulan diplomatik. TKW itu akhirnya kami temukan juga. Dia mendapat perlindungan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sedang berusaha mendapatkan suaka politik kepada TKW tersebut. Ini menimbulkan komplikasi serius, sebab hidup mereka itu tidak terancam di Indonesia. Kami mengingatkan pemerintah Ceko agar jangan sampai memberi suaka. Sejak peristiwa pelarian TKW itu, hubungan saya dengan Dubes Kuwait menjadi buruk, dan tidak pernah membaik sampai saya pulang. Saya selalu menghindarinya pada setiap acara diplomatik yang kami hadiri bersama.

MEMBAWA PARA TKW Indonesia untuk dipekerjakan di luar negeri tujuan semula jelas melanggar aturan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Tapi kejadian demikian sudah terjadi sejak saya masih mahasiswa di Ohio pada tahun delapan puluhan, dan tampaknya berlangsung sampai kini. Di Ohio dulu pada suatu malam saya mendapat telepon dari pejabat hubungan internasional Ohio State University (OSU) yang menyampaikan adanya TKW Indonesia yang jatuh sakit, sementara majikannya sedang berada di Arab Saudi. Rupanya sang majikan pulang dan meninggalkan pembantunya menjaga rumah sendirian, padahal TKW itu tidak bisa berbahasa Inggris. “Saya tidak bisa dan tidak berani campur tangan, ada soal hukum dalam soal ini. Hubungi saja Konsulat Jenderal Indonesia di New York,” kata saya. Bagian hubungan internasional OSU menghubungi saya karena saya warga negara Indonesia tersenior di Kota Columbus waktu itu. Para TKW kita mungkin saja mereka perlakukan dengan baik, tapi tetap saja mereka memandang pekerja dari Indonesia itu sebagai komoditas

yang telah mereka "beli" dan boleh dibawa dan dipekerjakan di mana saja.

YANG JUGA TIDAK KURANG ANEH BAGI SAYA yang sebagai wartawan sudah berkeliling di sebagian besar negara Timur Tengah adalah kenyataan bahwa sulit menemukan toilet (WC) umum yang bersih di sana. Suatu kali di Amman, Yordania, saya membaca sebuah kolom, dalam koran berbahasa Inggris terbitan setempat. Kolom tersebut membahas betapa sulitnya menemukan toilet umum yang bersih di Yordania dan negara-negara Arab lainnya. Sang penulis melihat fenomena itu sebagai gejala tidak adanya tanggung jawab publik kepada lingkungannya. Kesimpulan sang kolumnis, inilah akibat sistem politik yang tidak memercayai rakyat. Semua diatur pemerintah, hingga orang banyak terbiasa menyerahkan semua urusan kepada yang memerintah, termasuk urusan menjaga kebersihan toilet umum. Karena pemerintah sendiri juga tidak punya perhatian kepada urusan toilet umum, maka joroklah toilet umum tersebut.

Setiap mengadakan ibadah umrah yang meliputi perjalanan ziarah ke makam Rasulullah Muhammad di Madinah, saya selalu menderita karena harus menahan buang air kecil hampir sepanjang perjalanan. Kecuali di masjid, semua toilet umum di tempat perhentian bus dalam keadaan sangat jorok. Setiap itu pula saya teringat kolom yang pernah saya baca di Amman bertahun-tahun silam. Semua sudah diurus pemerintah, dan di Arab Saudi, soal biaya kawin juga diurus Kerajaan, sehingga penduduk tidak perlu menunda perkawinan karena belum mendapatkan apartemen, seperti di Mesir. Tapi, toilet umum luput dari perhatian Kerajaan. Akibatnya, toilet jorok amat gampang ditemukan di mana-mana.

Memang toilet jorok yang bertebaran sepanjang jalan antara Makkah-Madinah dan Jeddah-Madinah kebanyakan meladeni para jamaah haji dan umrah yang sebagian besar datang dari negara yang masih berperadaban rendah. Tapi, pemerintah Saudi mestinya bisa saja mengontrak *cleaning service* (perusahaan penjaga kebersihan) untuk mengurus kebersihan toilet-toilet terse-

but. Bukankah hampir semua pekerjaan di negara itu juga sudah "dikontrakkan" kepada orang asing? Aneh, bahwa dalam soal kebersihan (kecuali kebersihan masjid), pemerintah Arab Saudi—penjaga dua Kota Suci dan dikaruniai kekayaan berlimpah oleh Allah—sama sekali tidak punya gagasan, apalagi usaha meng-atasi kejorokan toilet umum tersebut.

Seandainya saya kenal Menteri Agama Indonesia, saya ingin menyarankan kepada Bapak Menteri supaya mengusulkan ke pemerintah Saudi menyewa saja perusahaan *cleaning service* dari Indonesia untuk mengurus kebersihan toilet-toilet umum di Saudi, terutama pada wilayah yang dipergunakan untuk meladeni tamu Allah, para jamaah haji dan umrah. Kenyataan bahwa Indonesia mengirim jamaah haji terbesar ke Saudi saya kira menempatkan Menteri Agama Indonesia pada posisi yang berkepentingan untuk meminta perhatian pemerintah Saudi agar melayani dengan baik para jamaah dari Indonesia tersebut. Termasuk menyediakan toilet yang bersih. Kalau perlu, secara teratur ditarik sumbangan wajib dari tiap jamaah untuk membiayai pembersihan toilet jorok yang bertebaran antara Jeddah-Madinah dan Makkah-Madinah. Tapi kalau jamaah juga ikut mengurusi kebersihan toilet umum di Arab Saudi, buat apa pula limpahan rezeki minyak yang dianugerahkan Allah kepada Arab Saudi.

Untuk Mempermudah Proses Jual Beli

Puluhan tahun silam, ketika saya masih di Parepare, pada bulan Ramadhan kami anak-anak suka berkumpul di masjid menanti waktu buka puasa. Kesibukan kami biasanya menghabiskan waktu dengan ngobrol apa saja. Suatu kali topik pembicaraan adalah Kota Makkah. Narasumber utamanya adalah Haji Idris, anak sebaya kami, putra Imam Masjid Jami Parepare. Setahun sebelumnya Idris melaksanakan ibadah haji bersama keluarganya. Cerita Idris yang paling menarik adalah mengenai ombak Sailon (*bombanna Selong*, dalam bahasa Bugis) dan petunjuk arah dalam bahasa Indonesia di seputar Kota Makkah.

Waktu itu jamaah haji masih melakukan perjalanan laut yang biasanya menghabiskan waktu sekitar hampir sebulan untuk mencapai Jeddah. Menurut cerita Idris, ombak yang paling ganas yang mereka alami dalam perjalanan adalah yang melanda kapal mereka sebelum dan sesudah mampir di pelabuhan Sri Lanka untuk mengambil air. Maka cerita mengenai *bombanna Selong* adalah cerita yang diketahui luas di kalangan masyarakat Parepare terutama bagi mereka yang sudah dari Makkah atau baru berniat menunaikan ibadah haji. Sekarang, ketika orang berhaji lewat udara, cerita *bombanna Selong* tentulah sudah menjadi cerita yang tidak terdengar lagi.

Yang juga menarik dari cerita Haji Idris adalah mengenai petunjuk arah di Makkah yang juga menggunakan bahasa Indonesia. Kami para remaja, yang tentu saja masih kurang memiliki informasi, gampang terkagum-kagum pada fenomena tersebut. Komentar kami, "Hebat betul orang sana, mereka ngerti bahasa Indonesia." Yang waktu itu tidak kita sadari adalah bahwa Indonesia adalah negara yang memang paling banyak mengirimkan jamaah ke Tanah Suci. Untuk itu penerangan dan petunjuk arah perlu dibuat dalam bahasa para jamaah terbesar. Dan karena di Tanah Suci banyak mukimin (penetap) yang berasal dari Indonesia, maka apa sulitnya membuat petunjuk jalan dalam bahasa Indonesia. Kelak ketika saya sempat umrah dan kemudian berhaji, petunjuk jalan dalam lebih banyak bahasa bisa dengan mudah ditemukan di berbagai tempat di Makkah dan Madinah. Para jamaah memang datang dari hampir seluruh penjuru dunia.

Pada perjalanan pertama dan kedua saya ke Tanah Suci, saya masih selalu berusaha berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan para pedagang. Mula-mula saya heran ketika mereka meladeni saya dalam bahasa Indonesia. Makin sering saya berkunjung ke Makkah, Madinah, dan Jeddah, makin sadar saya betapa luasnya penggunaan bahasa Indonesia di Tanah Suci. Seorang teman yang mukim lama di Jeddah menjelaskan, jamaah dari Indonesia bukan cuma jumlahnya paling besar, tapi juga terkenal paling royal berbelanja. Godaan berbelanja di Jeddah memang tidak mu-

dah dilawan. Barangnya asal impor (Saudi memang hanya memproduksi kurma, sedikit madu, dan minyak bumi), asli dan relatif murah karena bebas pajak. Saya teringat ibu dan bapak saya yang berhaji pada 1966 yang pulang dengan sejumlah permadani dan panci-panci. Permadani serta panci-panci itu kemudian dipinjamkan kepada keluarga dan tetangga yang mengadakan pesta atau syukuran. Waktu itu di Parepare perusahaan *catering* belum lagi dikenal.

Untuk makin mempermudah proses jual beli, para pemilik toko di Arab Saudi sejak beberapa tahun lalu mulai mempekerjakan orang Indonesia yang khusus datang atau didatangkan dari Indonesia sebagai pelayan toko. Hal demikian sebenarnya bukan fenomena baru. Ketika orang Jepang mulai melanglang buana sebagai turis tatkala kemakmuran mereka memungkinkan sejak tahun enam puluhan, berbagai toko-toko penting di New York, Paris, Roma, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong juga mendatangkan orang-orang Jepang untuk melayani para turis-turis tersebut. Orang Jepang punya tradisi membawa oleh-oleh dari perjalanan untuk para senior mereka di kantor atau di pabrik. Jadi, mereka harus berbelanja. Dan mereka tentu merasa senang belanja dengan diladeni bangsa mereka sendiri. Karena turis Indonesia juga banyak yang ke Paris tahun-tahun terakhir ini, dan tentu saja suka belanja, sudah ada pula toko di Paris yang mempekerjakan pramuniaga orang Indonesia. Penerbangan internasional, seperti kita ketahui, sudah lama mempekerjakan berbagai bangsa sebagai pramugara dan pramugari.

SEHUBUNGAN DENGAN SOAL BAHASA INI, saya lalu teringat bagaimana di Bali kita selalu bisa jumpa penduduk setempat yang secara sederhana mengerti bahasa Inggris, Jepang, atau Belanda. Ini tentu akibat dari banyaknya turis asing menyerbu Bali. Konon sekarang bahasa Cina juga berangsur populer di Bali karena turis dari Tiongkok dan Taiwan makin banyak. Di Dubai lain lagi bahasanya. Karena orang kaya dari bekas Uni Soviet suka berbelanja di Dubai yang tidak memungut pajak, bahasa Rusia

makin banyak dipergunakan di pasar dan pusat pertokoan negara Teluk itu. Maka kalau Anda ke pusat perbelanjaan di Dubai jangan heran menyaksikan banyaknya informasi dalam bahasa Rusia yang ditempelkan di pintu-pintu toko atau tempat umum lainnya. Para pelayan toko memang melayani konsumennya dengan bahasa Rusia.

Pengalaman dengan fenomena hubungan antara keperluan perdagangan dan penyebaran bahasa di berbagai tempat itu mendorong saya untuk berkesimpulan bahwa bahasa, juga sekolah, selalu mengikuti perkembangan pasar dan keperluan dagang. Pada 1979, saya berangkat sekolah ke Amerika. Tiga tahun kemudian saya pulang menengok orangtua di Sulawesi Selatan. Hal baru yang sebelumnya tidak saya saksikan adalah munculnya toko-toko yang menjual komputer pribadi (PC) di berbagai tempat.

Tidak lama kemudian mulai bermunculan kursus-kursus komputer. Selang beberapa tahun berlalu sekolah tinggi ilmu komputer juga bermunculan di hampir setiap kota besar. Kesimpulan saya, bahasa dan sekolah mengikuti pasar. Kalau pasarnya memerlukan bahasa Indonesia, maka bahasa itu dengan segera berkembang di sekitar pasar. Kalau pasar memerlukan keahlian tertentu, sekolah yang mendidik para calon ahli untuk keperluan itu pasti juga akan muncul. Fenomena ini juga menjelaskan muncul dan berkembanganya bisnis meladeni jamaah umrah dan haji ONH plus. Yang mau umrah terus bertambah, dan yang sanggup dan bersedia membayar pelayanan haji dan umrah yang lebih eksklusif juga makin tersedia. Ada permintaan, maka datanglah penawaran.

KEMBALI KE MAKKAH, ada dua pengamatan penting yang selalu menarik perhatian saya setiap berada di sana. *Pertama*, adanya macam-macam variasi shalat para jamaah. Saya tekankan variasi karena pada dasarnya semua mengikuti aturan baku yang dipraktikkan umat Islam di seluruh dunia. Tapi variasi dalam melaksanakan yang baku itulah yang saya lihat. Ketika soal itu saya bicarakan

dengan seorang kiai pembimbing jamaah, penjelasannya adalah variasi bersumber pada perbedaan mazhab. Saya sendiri mengamati jamaah Indonesia dan saya lalu berkesimpulan bahwa faktor budaya lokal asal mereka juga punya pengaruh.

Faktor budaya lokal ini sudah mulai menjadi perhatian saya ketika untuk pertama kalinya saya tiba di Solo pada 1960. Pengaruh budaya lokal dalam menjalankan ajaran Islam sangat terasa di Jawa. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, memang ada dua variasi Islam: santri dan abangan. Kedua penganutnya mengaku Islam, dan mereka memang Islam. Yang merasa abangan kadang kala menyebut diri mereka sebagai Islam Jawa. Pengaruh budaya lokal kepada aliran abangan ini jauh lebih kuat dibanding dengan pengaruh terhadap praktik beragama mereka yang tergolong santri. Para ahli antropologi melihat abangan melestarikan banyak sisa tradisi agama masa lalu sebelum Islam masuk ke Pulau Jawa. Dalam politik Indonesia, kesadaran akan adanya dikotomi itu muncul setelah ahli antropologi Amerika, Clifford Geertz, mengadakan penelitian di kota kecil Pare, Jawa Timur. Hasil penelitian Geertz itu bisa dibaca dalam bukunya *The Religion of Java*.

Dikotomi abangan-santri adalah hal yang khas Jawa Tengah-Jawa Timur. Di beberapa tempat hubungan keduanya sangat antagonistis, terutama sebelum tragedi Gestapu 1965. Kaum abangan dulu menganggap diri lebih Jawa, lebih pribumi daripada mereka yang santri. Penjelasan bagi adanya dua aliran itu di Jawa, dan tidak ada di daerah lain, adalah karena penetrasi agama Hindu dan Buddha yang mendalam di dua bagian Pulau Jawa sebelum Islam diperkenalkan. Berbeda dengan penyebaran agama tertentu di bagian lain muka bumi yang dilakukan dengan memerangi bahkan membasmi agama penduduk sebelumnya, Islam datang ke Jawa secara damai. Dalam beberapa hal mengakomodasi, paling banter memberi tafsiran baru terhadap tradisi lama dan praktik agama yang masih hidup dalam masyarakat.

Sejak Orde Baru, di Jawa Tengah terlihat adanya fenomena makin mendekatnya abangan dan santri. Ada beberapa faktor,

menurut pengamatan saya, yang menjadi penyebab. *Pertama*, Islam politik makin meredup dalam kancah perpolitikan nasional. Itu berarti "ancaman" negara Islam, yang dulu amat ditakuti oleh orang abangan, kini berangsur menghilang. *Kedua*, gerakan pembaruan Islam yang dipelopori oleh Nurcholish Madjid dan kemudian juga oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) oleh para kaum abangan dipandang sebagai menunjukkan wajah damai Islam. Nurcholish dan Gus Dur memperjuangkan masyarakat Islam, bukan negara Islam. Kalau Indonesia menjadi negara Islam, kaum abangan cemas mereka akan dipaksa beribadah seperti praktik beragama kaum santri.

Satu catatan menarik mengenai soal abangan-santri ini dalam hubungannya dengan politik pada masa awal Orde Baru. Ketika militer mengampanyekan Golkar sebagai kendaraan utama bagi peran politik ABRI, kaum santri pada umumnya masih berada dalam kubu partai-partai Islam. Ketika itu orang-orang abangan sudah duduk manis dalam Golkar. Maka muncullah kesimpulan bahwa Islam adalah musuh Golkar. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kesimpulan demikian waktu itu memang tidak terlalu mudah dibantah. Tapi, jalan berpikir demikian sama sekali tidak bisa dipakai di luar Jawa. Hasil pemilu menunjukkan bahwa daerah-daerah yang pada Pemilu 1955 dikuasai oleh partai Islam Masyumi, pada pemilu-pemilu Orde Baru hampir semuanya dikuasai Golkar. Artinya, di luar Jawa yang meramaikan Golkar adalah justru orang-orang Islam, yang budayanya sama dengan budaya santri di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa dikotomi santri-abangan itu memang khas Jawa Tengah-Jawa Timur saja.

HAL KEDUA YANG SAYA PERHATIKAN setiap saya ke Makkah adalah pembangunan yang tidak selesai-selesainya di sekitar Ka'bah. Jamaah makin banyak, ruang terbatas. Hotel-hotel kecil, dan tentu saja bertarif murah, yang berada di sekitar Masjidil Haram pada dibongkar untuk membuka ruang pelebaran halaman masjid dan juga pembangunan hotel-hotel mewah yang berting-

kat tinggi. Sudah jelas ada keterbatasan ruang bagi pengembangan masjid dan hotel-hotel tersebut, sementara sulit mengurangi jamaah yang makin bertambah. Jamaah Indonesia saja sekarang sudah terpaksa harus antre beberapa tahun sebelum mendapat kesempatan berangkat haji.

Melihat fenomena itu, terpikir oleh saya perlunya pemerintah Saudi memikirkan kemungkinan membangun kota penampungan haji dan jamaah umrah di luar Kota Makkah. Kalau kota penampungan itu dibangun, maka para jamaah nantinya tidak perlu lagi ditempatkan pada hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram. Ruang sekeliling Masjidil Haram itu dimanfaatkan saja untuk memperlebar rumah Allah tersebut. Untuk mempermudah jamaah mencapai Baitullah dari kota penampungan di luar kota, sebaiknya dibangun metro dari kota penampungan jamaah langsung ke bawah Masjidil Haram. Perluasan seperti ini sudah sangat mendesak agar jamaah bisa beribadah dengan tenang dan tidak terpaksa sujud di atas bokong jamaah di hadapannya, sebagai yang sering saya alami di Masjidil Haram dan di halamannya. Terutama pada saat umrah Ramadhan.[]

Yang Keluar dari Saku Jenderal Wiranto

Ketika Jakarta terbakar pada 14 Mei 1998, saya sedang berada di Mabes ABRI Cilangkap, Jakarta Timur. Bersama dengan beberapa pimpinan ABRI dan sejumlah kecil kaum cendekiawan—antara lain Dr. Nurcholish Madjid, Eep Saifullah, Dr. Indria Samego, dan Prof. Dr. Ryaas Rasyid—kami diajak berdiskusi mengenai bagaimana sebaiknya mengatasi krisis yang sedang melanda Indonesia hari-hari itu.

Diskusi tidak bisa dilanjutkan karena telepon genggam Letnan Jenderal TNI Hari Sabarno, Ketua Fraksi ABRI di MPR, terus-menerus berdering mengabarkan makin meluasnya kebakaran yang melanda Jakarta. Huru-hara sebenarnya sudah bermula secara terbatas sehari sebelumnya, tak lama setelah empat korban penembakan mahasiswa di Universitas Tri Sakti dimakamkan.

Setelah Letnan Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Kepala Staf Sospol yang jadi tuan rumah rapat itu, meninggalkan sidang secara mendadak, kami semua sepakat mengakhiri pertemuan. Agenda kami berikutnya adalah masuk kembali ke Jakarta. Ternyata tidak mudah. Huru-hara sudah mendekati dua pintu tol di pinggir timur Jakarta yang harus kami lewati untuk masuk kota. Hanya dengan susah payah, melewati jalan-jalan tikus dari arah Bekasi, akhirnya bisa tiba di rumah kami yang terletak di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Selanjutnya, saya hanya sanggup mengikuti berita terbakarnya Jakarta lewat sejumlah saluran televisi.

Waktu itu, saya sudah sekitar 50 tahun menetap di Jakarta dan mengalami semua huru-hara yang pernah melanda Jakarta sejak menetap di ibu kota. Huru-hara yang akhirnya menjatuhkan Soeharto ini memang paling luar biasa seru dan mengerikan. Kebakaran dan penjarahan melanda semua penjuru dan kematian

ratusan manusia tak terelakkan. Saya kira ini adalah ledakan kemarahan yang sudah terpendam bertahun-tahun sehingga tidak lagi mudah menuding siapa pencetusnya, siapa yang menunggangi, dan apa targetnya.

Sebelum meninggalkan Mabes ABRI, seorang laksamana dengan cemas mendekati saya, bertanya mengenai bagaimana menghubungi para pimpinan mahasiswa. "Tidak ada lagi tokoh mahasiswa seperti zaman dulu ketika terjadi pergolakan melawan rezim Orde Lama. Organisasi mahasiswa telah diporakporandakan oleh pemerintah, khususnya pada masa Daud Jusuf menjadi Menteri Pendidikan. Yang ada sekarang adalah sejumlah grup studi yang entah siapa pemimpinnya dan di mana alamatnya." Begitu saya menjelaskan kepada perwira tinggi yang mungkin seorang dari kantor sospol atau intelijen.

SAYA SEDANG BERTAMU di rumah Letnan Jenderal TNI Mohammad Yunus Yosfia ketika berita terbunuhnya empat mahasiswa Universitas Tri Sakti masuk lewat telepon genggam saya. Yang menelepon adalah sutradara film Chairul Umam, teman lama yang seorang anggota keluarganya adalah mahasiswa yang tewas sore hari itu. Terbunuhnya empat mahasiswa itu mengingatkan saya pada tewasnya Arief Rahman Hakim di depan Istana Merdeka pada hari-hari demonstrasi 1966.

Entah Arief terkena peluru nyasar dari pasukan Cakrabirawa yang mengawal Istana atau peluru dari senjata mereka yang merencanakan penciptaan seorang martir, tidak pernah jelas sampai hari ini. Yang jelas hari tertembaknya seorang mahasiswa itu adalah titik berangkat jatuhnya Presiden Sukarno. Secara spontan, setelah menerima berita kematian mahasiswa Tri Sakti itu saya berkata kepada Jenderal Yunus, "Kita sedang berada pada hari-hari terakhir rezim Orde Baru."

Presiden Soeharto berada di Kairo tatkala huru-hara itu terjadi. Bahkan, sebelum Presiden mendarat di pangkalan udara Halim Perdanakusuma menjelang subuh 15 Mei, tidak seorang pun di antara kami yang masih yakin rezim Orde Baru akan bertahan.

Tapi, bagaimana akan berakhirnya rezim yang berkuasa paling lama dalam sejarah modern Indonesia itu? Tekanan terus meningkat agar Soeharto mundur secepatnya. Di jalanan maupun di Gedung DPR/MPR, suara tuntutan itu makin nyaring. Menjelang 20 Mei, Amien Rais, tokoh terpenting gerakan Reformasi dan tuntutan penurunan Soeharto waktu itu, mengumumkan agar pada 20 Mei seluruh rakyat membanjiri lapangan Monumen Nasional (Monas) untuk secara bersama meneriakkan agar Soeharto mundur.

Aparat keamanan mempunyai alasan kuat ketika memutuskan mencegah pengumpulan massa di Monas. Yang ditakutkan oleh para petinggi militer, massa akan merangsek ke mana-mana. Padahal, di sekitar Monas terletak sejumlah gedung vital: Istana Kepresidenan, Markas Besar Angkatan Darat, Departemen Pertahanan, gedung Telkom, Studio Pusat RRI, Bursa Efek, dan sejumlah kantor kementerian lainnya. Untuk mencegah berkumpulnya massa itulah, militer memasang barikade di semua jalan menuju lapangan Monas dengan cara mengerahkan tank, panser, berbagai kendaraan militer lainnya, serta barikade kawat berduri. Dan tentu saja disertai sejumlah besar prajurit siap tempur. Amien Rais akhirnya memang membatalkan rencana pengumpulan massa itu. Tapi, tentara tidak ingin mengambil risiko, dan Monas tetap ditutup dari segala penjuru. Dalam keadaan tertutup itulah saya mendapat telepon dari staf Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono untuk hadir pada 20 Mei, pukul 19.00 dalam sebuah rapat di Gedung Urip Sumohardjo di Kompleks Departemen Pertahanan dan Keamanan yang terletak di Jalan Merdeka Barat. Mobil saya hanya bisa mengantar sampai ke Tugu Tani di Menteng Raya sebab di sanalah "garis perbatasan" terletak.

Dari sana saya masuk ke wilayah Monas, melewati barikade, dengan mobil militer yang dikendarai oleh Mayor Benny, seorang staf kantor Kepala Staf Sosial Politik yang memang ditugaskan menjemput saya di "perbatasan". Monas sepi, jalan-jalan lengang, dan yang bergerak hanya beberapa kendaraan militer. "Penyeberangan" ke dalam wilayah Monas yang terjaga ketat

mengingatkan saya pada pengalaman menyeberang dari Berlin Barat ke Berlin Timur yang saya alami pertama kali pada musim semi 1970.

KETIKA MEMASUKI ruang rapat, sudah lebih dulu hadir sejumlah perwira tinggi ABRI—antara lain Letjen TNI Hari Sabarno—dan tim dari Universitas Indonesia (UI) pimpinan Rektor UI. Mantan dosen saya di UI dulu, seorang ahli hukum tata negara, Harun Al Rasyid, juga Prof. Zen Umar Purba, S.H., teman sekantor di majalah *Tempo* dulu, menjadi bagian dari tim UI. Di samping itu juga sudah hadir Prof. Dr. Ryaas Rasyid dan Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tuan rumah. Saya memilih duduk di samping Ryaas Rasyid.

Acara pertama adalah makan malam dengan menu nasi gudeg dalam kotak. Kami tampaknya melewatkan waktu dengan makan untuk menunggu datangnya Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto. Ketika Panglima ABRI itu datang, rapat lantas dimulai. Bambang Yudhoyono bertindak sebagai pemimpin rapat. Kalau Soeharto mundur, bagaimana sebaiknya cara mundurnya? Itulah agenda rapat.

Harun Al Rasyid menjelaskan, berdasarkan Pasal delapan UUD 45, kalau Presiden mundur atau tidak lagi dimungkinkan menjalankan tugasnya, maka Wakil Presiden yang akan mengambil alih. Tidak ada debat mengenai ini. Semua yang hadir tampaknya sepakat. Tidak lama kemudian, Panglima Wiranto meninggalkan ruangan. Bambang Yudhoyono meneruskan rapat.

Pembicaraan selanjutnya dipicu oleh pernyataan Hari Sabarno. Setuju dengan pelaksanaan Pasal delapan UUD 45, Sabarno meragukan kewibawaan Wakil Presiden B.J. Habibie untuk tampil menggantikan Soeharto. Pada titik itu, saya mendadak teringat pengalaman hari-hari awal Orde Baru ketika timbul keraguan mengenai apakah Jenderal Soeharto—yang sebelum Gestapu hampir tidak dikenal publik—cukup berwibawa menggantikan Sukarno? Atas prakarsa Jenderal Nasution, para pimpinan ABRI sepakat menyatakan dukungannya kepada Soeharto. Mantan Pangkos-

trad itu lalu menjadi yakin maju menggantikan Sukarno. Apakah sekarang pimpinan ABRI tidak bisa menyelamatkan negara dan konstitusi dengan cara mendukung proses peralihan kekuasaan secara konstitusional? Itu pertanyaan saya secara berbisik kepada Ryaas Rasyid. Kata Ryaas, "Anda bicara saja, sampaikan gagasan Anda itu."

Saya mengacungkan tangan minta bicara. Bambang Yudhoyono mempersilakan. Gagasan itu saya kemukakan. Karena sifatnya hanya saran untuk dipertimbangkan, dan karena tidak menimbulkan debat, rapat bisa dengan segera diakhiri dan kami pulang dengan masing-masing diantar sampai ke "perbatasan" tempat kendaraan-kendaraan kami menunggu.

Panglima TNI Jenderal Wiranto.

Beberapa hari kemudian, saya mendapat informasi bahwa ketika kami masih rapat di Merdeka Barat itu, Presiden Soeharto memerintahkan ajudannya memanggil Panglima ABRI, Jenderal Wiranto, dan Sekretaris Negara Sa'adillah Mursyid. Sa'adillah Mursyid diminta mempersiapkan timbang terima dari Presiden Soeharto kepada penggantinya, Wakil Presiden B.J. Habibie. Keesokan harinya di Istana Kepresidenan, seperti sudah diketahui, Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan yang didudukinya selama hampir 32 tahun. Dan Habibie langsung disumpah sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia.

PADA MULANYA tidak jelas bagi kami para peserta rapat malam itu apakah Jenderal Wiranto meninggalkan kami karena dipanggil oleh Soeharto atau karena kemauan sendiri untuk menyam-

paikan saran-saran berdasarkan rekomendasi rapat kami mengenai bagaimana sebaiknya cara Pak Harto mundur. Untuk jelasnya mengenai apa sebenarnya yang terjadi malam itu, berikut ini penuturan Wiranto kepada saya pada 12 Januari 2012 di Jakarta:

> Ketika rapat masih berlangsung saya mendapat pesan agar segera menghadap Pak Harto di Jalan Cendana, kediaman pribadi beliau. Saya ditemani oleh dua perwira tinggi, Jenderal Subagio, KSAD waktu itu dan Mayjen Endriartono Sutarto, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Sebelum masuk ruangan Pak Harto, saya diberi tahu Ajudan bahwa Pak Habibie, Wakil Presiden, baru saja juga diterima Pak Harto.
>
> Ada dua hal yang disampaikan Pak Harto kepada saya. *Pertama*, beliau menyatakan akan mundur besok pagi. *Kedua*, menyerahkan dokumen yang juga dikenal sebagai Instruksi Presiden (Inpres) No. 16 Tahun 1988 yang berisi pengangkatan saya menjadi Panglima Komando Kewaspadaan dan Keselamatan. Ini adalah sebuah Inpres yang berinduk pada Ketetapan (TAP) MPR No. V 1988 yang memberi wewenang kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam keadaan kritis.
>
> Langkah khusus itu adalah menerbitkan Inpres untuk mengangkat seorang perwira tinggi menjadi Panglima Komando dari badan baru yang disebut Komando Kewaspadaan tersebut. Badan baru itu sebenarnya, sesuai dengan petunjuk Presiden, sudah disiapkan di Mabes ABRI dalam dua pekan terakhir. Para perwira tinggi yang ikut mempersiapkannya melihat badan baru tersebut sebagai semacam Kopkamtib.
>
> Biasanya seorang atasan memberi perintah untuk dilaksanakan dan yang menerima perintah akan menerimanya dengan mengucapkan, “Siap, laksanakan!” Malam itu keadaannya lain sama sekali. Penyerahan Inpres diantar dengan ucapan, “Instruksi ini saya berikan, kamu boleh pakai, boleh tidak.”
>
> Sebelum menyerahkan Instruksi itu, kepada Pak Harto saya sempat menyampaikan posisi ABRI terhadap beliau. Saya sampaikan bahwa posisi politik beliau sudah sangat lemah. Kendati demikian, “ABRI akan tetap mempertahankan pemerintahan yang sah.” Saat itu, pemerintahan Pak Harto meski sudah amat lemah, tapi tetap masih sah karena dukungan MPR

belum dicabut. Komentar Pak Harto singkat, "Saya tidak ingin rakyat jadi korban."

Kalau Instruksi itu saya gunakan, saya dan ABRI terpaksa berhadapan dengan mahasiswa yang sudah sejak lama dan di berbagai kota telah bergolak. Saya juga akan mendapat cap sebagai pemimpin rezim militer. Itulah yang ada dalam pikiran saya dalam perjalanan dari Cendana ke Merdeka Barat (kantor Kemhan sekarang).

Di Merdeka Barat menjelang tengah malam, saya mengadakan rapat staf. "Berapa mahasiswa yang akan jadi korban kalau ABRI mengambil alih kekuasaan?" Sekitar 200 hingga 250 kata seorang Jenderal dari staf Panglima. Sejurus kemudian Kepala Staf Sospol, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) minta keputusan. "Panglima akan mengambil alih (kekuasaan)?" Jawab saya tegas, "Tidak. Besok kita bersama-sama akan mengantarkan pergantian Presiden dari Pak Harto ke Wakil Presiden Habibie lewat sebuah proses yang konstitusional."

Saya lalu menitipkan beberapa poin dan minta staf menyiapkan sebuah pernyataan Panglima. Yang menyusun pernyataan itu adalah SBY yang dengan sedikit perubahan saya bacakan setelah pergantian pimpinan negara di Istana pada pagi hari esoknya. Konsep asli tulisan SBY itu masih saya simpan sampai sekarang.

Liddle Menjelang Subuh

Yang tidak kurang menarik adalah cerita Harmoko, Ketua DPR/MPR waktu itu. Menurut mantan Pemimpin Redaksi Harian *Pos Kota* itu, beberapa saat sebelum pukul 23.00, Ajudan Presiden menelepon Ketua DPR/MPR untuk menyampaikan pesan bahwa pimpinan Dewan akan diterima Presiden di Istana pukul 9.00 keesokan harinya. Harmoko segera menghubungi Wakil Presiden B.J. Habibie untuk melaporkan rencana pertemuan tersebut. Tapi kata Habibie, dia besok pagi akan dilantik sebagai pengganti Soeharto.

Menjelang subuh, saya dibangunkan oleh Prof. William Liddle dari Columbus, Ohio. Lewat sambungan telepon internasional, Liddle bertanya, "Salim, apakah Soeharto betul mundur? Di sini sudah tersiar berita Pak Harto pagi ini akan mengundurkan diri."

Waktu di Amerika bagian timur menunjukkan pukul 4 sore hari. Antara Columbus, Ohio—terletak di Amerika bagian timur—memang ada jarak waktu 12 jam dengan Jakarta. Mereka berada di belakang kita.

Untuk lebih yakin apa yang sebenarnya terjadi, saya langsung menelepon Bambang Yudhoyono. "Betul, Mas, Pak Harto mundur pagi ini," kata Jenderal yang kini lebih dikenal sebagai SBY. Katanya lagi: "Mas, nanti perhatikan yang keluar dari saku Pak Wiranto. Itu gagasan Mas Salim pada rapat semalam."

Singkat cerita, setelah Prof. Dr. B.J. Habibie diambil sumpahnya sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, Panglima ABRI, Jenderal Wiranto, mendekati mikrofon sambil mengeluarkan selembar kertas dari saku bajunya. "ABRI mendukung proses pengalihan kekuasaan secara konstitusional," kata Wiranto sesuai yang tertulis pada kertas yang dipegangnya. Rupanya SBY memberi tahu Wiranto sumber gagasan dukungan ABRI kepada proses pergantian kepemimpinan nasional itu. Beberapa hari kemudian, di Dewan Kesenian Jakarta, kantor saya waktu itu, telepon genggam saya berdering. Jenderal Wiranto di ujung sana. "Terima kasih gagasannya. Tapi saya digebuki dari kiri kanan," kata Wiranto. Jawab saya dengan cepat, "Lebih baik Anda digebuki sekarang daripada anak buah Anda kocar-kacir kalau tidak ada arahan yang jelas mengenai bagaimana harus bersikap terhadap pergantian Presiden."[]

Kronik Reformasi

Lapisan Ozon Bocor

Saya baru saja selesai sembahyang Subuh ketika telepon berdering di rumah Wakil Dubes, Nazaruddin Nasution, di Maryland. "Dari Panglima ABRI," kata Ida Ismail Nasution, istri Wakil Dubes, ketika mengulurkan telepon kepada saya. Kami, saya, istri, dan anak memang sedang menjadi tamu Wakil Dubes selama kunjungan beberapa hari kami ke Washington, DC. Pada Juni 1998 itu, kami dalam perjalanan dari Kanada menghadiri sebuah seminar tentang Indonesia untuk akhirnya ke Washington ikut dalam sebuah seminar Bank Dunia.

Udara musim panas hari-hari itu betul-betul menyengat. Tapi lebih dari itu, lapisan ozon juga bocor hingga kita dinasihatkan jangan berada langsung di bawah sinar matahari. Yang sesungguhnya lebih mengerikan bagi kami yang berasal dari Indonesia adalah melorotnya nilai mata uang rupiah ke tingkat 17.000 per 1 dolar. Luar biasa. Akibatnya, kami tidak belanja oleh-oleh apa pun sebagaimana kebiasaan kami setiap ke Amerika. Uang dolar kami simpan baik-baik dan bawa utuh balik ke Jakarta.

Berita penting dari Jakarta pagi itu adalah tawaran buat saya menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Apakah saya bersedia menjadi anggota MPR sebagai wakil golongan cendekiawan? Jawab saya, kalau itu berguna, mengapa tidak? Masa kerjanya hanya sembilan bulan, artinya akan berakhir pada saat MPR baru hasil pemilu pertama pasca-Orde Baru terbentuk. Syarat saya cuma satu, harus duduk dalam Badan Pekerja. Kalau tidak, maka saya akan jadi penggembira saja dan cuma menjadi penting kalau ada pemungutan suara pada sidang pleno. Bebe-

rapa hari setelah tiba kembali di Jakarta, kami dilantik oleh Harmoko, ketua lembaga negara tersebut waktu itu. Bersama saya juga dilantik dr. Hariman Siregar, Fachri Hamzah, Eep Saifullah, dan beberapa teman aktivis lainnya. Saya memilih bergabung ke Fraksi Golkar dan langsung sibuk sebagai anggota Badan Pekerja yang mempersiapkan materi sidang umum.

Sebagai anggota MPR untuk waktu singkat, hasil kerja yang boleh saya banggakan hanya dua. Sayalah orang pertama yang mencetuskan gagasan dan mengusulkan dalam Badan Pekerja untuk membuat ketetapan yang membatasi masa jabatan seorang presiden, 2 kali masa jabatan saja. Usul ini mendapatkan sambutan teman-teman lainnya dan kemudian menjadi sebuah Ketetapan (TAP) MPR. Tapi di kemudian hari TAP itu ternyata dianggap keliru. Menurut mantan guru tata negara saya di Universitas Indonesia, Harun Al Rasyid, hal yang demikian itu—membatasi masa jabatan Presiden—harus diatur lewat Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD), bukan lewat TAP MPR. Pada sidang Badan Pekerja dan kemudian sidang paripurna, trauma terhadap kekuasaan Soeharto—berkuasa tak putus-putusnya selama 32 tahun—membuat kami semua tidak lagi mampu berpikir legalistik. Pokoknya tempa saja besi ketika masih panas. Jangan kejadian lagi ada Presiden yang berkuasa berkepanjangan. Dua masa jabatan cukup. Kedengarannya sungguh bagaikan kampanye keluarga berencana: dua anak cukup.

Sebenarnya gagasan membatasi masa jabatan Presiden itu secara terbuka sudah disuarakan Drs. Suryadi, Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam kampanyenya menjelang Pemilihan Umum 1993. Presiden Soeharto menganggap gagasan Suryadi sebagai usaha pengebirian UUD 45. Akibatnya fatal bagi karier politik Ketua PDI itu. Kesempatan membicarakan masa jabatan presiden itu barulah tersedia pada masa Reformasi, yakni setelah Soeharto tidak lagi berkuasa. Kesempatan itulah yang saya manfaatkan.

Untuk mengerti kebanggaan saya yang satunya, diperlukan cerita yang sedikit agak panjang. Kira-kira begini cerita pendek-

nya: Sekarang tidak banyak lagi yang ingat nama-nama ruangan dalam Gedung DPR/MPR pada zaman Orde Baru. Yang jelas semua menggunakan bahasa Sansekerta yang amat sulit bahkan untuk lidah orang Jawa, apalagi mereka yang datang dari seberang. Sekarang hampir tidak ada lagi yang ingat nama-nama yang sulit itu. Saya sendiri jelas sudah lupa juga. Saking sulitnya, Ismail Metareum, pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan salah seorang pimpinan MPR waktu itu, dalam sebuah pidatonya, menyebut nama ruang rapat utama itu sebagai ruang Kartasasmita. Seperti kita ketahui, Kartasasmita adalah nama keluarga Ginanjar, seorang tokoh politik terkemuka waktu itu. Tentu saja tawa para anggota membahana memenuhi ruangan rapat paripurna. Ini mengilhami saya mengusulkan perubahan dan penyederhanaan nama ruang-ruang rapat di gedung wakil rakyat itu.

Nama Asing

SIDANG Istimewa MPR juga menghasilkan ide istimewa bagi Salim Said. Doktor ahli militer ini, agaknya risau dengan nama-nama gedung di dalam kompleks wakil rakyat yang diambil dari Bahasa Sansekerta. "Melafalkan saja susah, belum memaknainya," kata Salim.

Nama-nama seperti Grahasabha Paripurna, Wacanasabha, Grahakarana, dan Karnadhara Samiti, ternyata asing di lidah wakil rakyat itu sendiri. "Ketua DPR/MPR sendiri sampai salah melafalkan salah satu nama ruangan dengan menyebut Kartasasmita. Ini kan ironis," ujar Salim.

Alhasil, Salim memiliki ide: nama-nama itu harus diubah. Tanpa banyak bicara, lelaki kelahiran Pare-Pare itu pun lantas bikin semacam daftar penolakan. Setelah diedarkan kepada sesama anggota MPR, terdaftarlah sekitar 200 orang, di antaranya, Feisal Tanjung (Menko Polkam), Sutiyoso (Gubernur DKI), Malik Fajar (Menteri Agama), dan Affan Gaffar yang dosen UGM Yogyakarta. Apa nama yang diusulkan Salim Said? "Banyak. Kita bisa menggunakan nama-nama provinsi, misalnya." ● aas
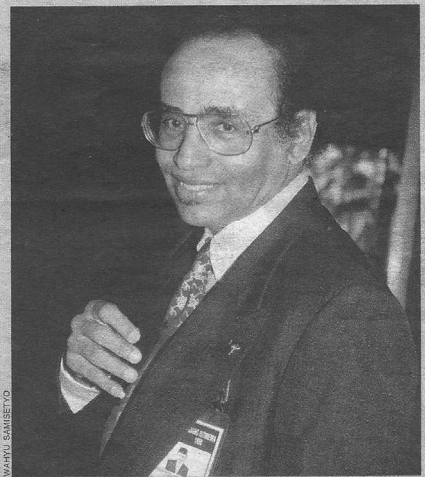
PERSPEKTIF, No. 5/ Tahun 1, 23-29 November 1998

Koran memberitakan aktivitas Salim Said memelopori pergantian nama ruangan di Gedung DPR/MPR.

Atas kesepakatan dan dukungan sejumlah anggota, saya membuat naskah petisi perubahan nama ruangan, menjadi penanda tangan pertama, juga pengedar petisi kepada para anggota MPR. Terkumpul lebih 300 tanda tangan. Naskah petisi yang sudah didukung sejumlah tanda tangan itu saya antarkan sendiri ke kantor Sekjen MPR. Tidak beberapa lama kemudian ruangan-

ruangan di gedung itu berganti nama menjadi ruang Nusantara. Semua Nusantara, dengan nomor urut yang membedakan satu ruangan dengan ruangan lainnya.

Ketika mengedarkan petisi itu, seorang teman mengingatkan saya agar berhati-hati jangan sampai teman-teman kami yang orang Jawa tersinggung. Tapi kemudian terbukti bahwa satu-satunya orang Jawa yang tidak bersedia mendukung petisi hanya Letjen TNI Agus Widjojo, pimpinan Fraksi ABRI waktu itu. Itu pun saya kira bukan karena Agus orang Jawa. Mengingat bahwa Agus Widjojo terkenal sebagai seorang jenderal pemikir, tidak menandatangani petisi saya kira karena dia punya alasan tersendiri yang hingga ini tetap sulit saya tebak. Tapi Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar, mantan KSAD, bahkan menandatangani sambil berkata, "Saya yang orang Jawa saja tidak mengerti arti nama ruangan-ruangan ini."

Kecuali dua hal tersebut di atas, tidak ada jasa saya selama sembilan bulan menjadi anggota MPR. Pengalaman yang justru selalu saya ingat dari masa itu adalah betapa melelahkannya mengikuti sidang-sidang Badan Pekerja. Karena itulah saya tidak tertarik untuk aktif dalam partai politik yang memungkinkan saya menjadi anggota DPR dan MPR. "Saya jadi ilmuwan politik saja, tidak usah jadi politikus," kata saya kepada Akbar Tanjung, teman lama saya yang Ketua Golkar. Dengan itu saya mohon agar nama saya tidak usah dicantumkan sebagai pengurus Golkar hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlangsung pasca-berakhirnya keanggotaan saya selama sembilan bulan di MPR.

* * *

"Habibie Tak Akan Diterima oleh Amerika."

Ketika saya di Washington, DC, kebetulan juga datang Prof. Dr. Ir. Mohammad Sadli disertai istrinya, Prof. Dr. Saparinah Sadli. Mohammad Sadli adalah ekonom terkemuka Indonesia yang dulu,

bersama Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, menjadi arsitek ekonomi Orde Baru. Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti yang duduk sebagai Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat waktu itu adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang salah satu Guru Besarnya adalah Mohammad Sadli.

Nah, untuk menghormati mantan gurunya yang juga mantan petinggi ekonomi Orde Baru, Duta Besar mengadakan jamuan makan malam informal di Wisma Duta di Jalan Tilden. Rumah kediaman resmi Dubes itu besar dan dibeli oleh Dubes pertama Indonesia di Washington, Ali Sastroamidjojo. Pada zaman Soeharto, pada gedung besar itu tersedia kamar khusus untuk Bapak Presiden. Tapi setahu saya, Pak Harto hampir tidak pernah tidur di sana. Dia dan keluarga serta pengiringnya lebih suka menginap di hotel.

Entah bagaimana kisahnya, saya dan istri ikut terundang ke pesta menghormati Prof. Mohammad Sadli tersebut. Mungkin karena diusulkan oleh Wakil Dubes, tapi bisa juga karena istri Dubes, Emmy, adalah teman lama saya dan pernah sekantor di majalah *Ekspres* pada 1970. Sejumlah mantan Dubes Amerika di Jakarta juga turut diundang. Para tamu duduk mengelilingi meja-meja kecil menikmati hidangan nasi campur yang antara lain berlauk sate ayam. Hidangannya sendiri kering dan kurang menarik, tapi buat saya acara itu menjadi istimewa karena saya duduk semeja dengan Paul Wolfowitz. Nanti pada masa Presiden Bush kedua, mantan Dubes Amerika di Jakarta ini menjadi orang kedua di Pentagon dan tergolong dalam kelompok *Neocon* yang bersemangat dan aktif merancang penyerbuan dan pendudukan Irak.

Presiden B.J. Habibie.

Topik pembicaraan kami pada majelis makan malam itu adalah politik Indonesia beberapa bulan setelah jatuhnya Soeharto,

kepemimpinan Presiden Habibie dan prospek pemilihan umum yang dalam beberapa bulan lagi akan diadakan di Indonesia. Kami membicarakan siapa-siapa saja yang potensial bakal menduduki kursi kepresidenan sebagai hasil pemilu nanti. Sejumlah nama kami bicarakan. Seingat saya nama Gus Dur tidak kami sebut-sebut. Megawati, Amien Rais, Sultan Hamengkubuwono X, Jenderal TNI Wiranto, dan Dr. Habibie kami percakapkan sebagai calon potensial. Ketika nama Habibie saya sebut, dengan cepat Wolfowitz mengomentari. "Habibie tidak akan diterima oleh Amerika." Saya tersentak. Bukan karena saya pro-Habibie. Saya tersinggung oleh kesombongan Amerika yang merasa mampu dan punya hak menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia. "Sejak kapan Presiden Indonesia ditentukan oleh Washington?" tanya saya dengan kesal. "Kami bangsa merdeka dan yang akan menentukan nasib kami, bukan negeri dan pemerintah Anda." Suasana makan malam agak terganggu, saya kira terutama karena saya kelihatan emosional. Saya memang sangat marah oleh ucapan Wolfowitz tersebut. Terus terang saya tersinggung oleh keangkuhannya.

Sejak itu saya sedapat mungkin menghindari Wolfowitz. Saya melihat kembali mantan Dubes Amerika itu di *media centre* pemilu di Hotel Arya Duta, Jakarta, tahun berikutnya. Kabarnya dia ikut rombongan peninjau pemilu pimpinan mantan Presiden Carter. Saya berusaha menghindar. Di Praha saya melihat Paul pada suatu konferensi tahunan yang digagas oleh mantan Presiden Republik Ceko, Vaclac Havel. Wolfowitz tahun itu berada di Praha bersama Bambang Harymurti, wartawan majalah *Tempo*. Bambang menjadi pembicara dalam konferensi tersebut. Menurut informasi yang kemudian sampai kepada saya, Paul Wolfowitz, yang memang bersahabat dengan Bambang, membujuk dan menyediakan kedudukan di Bank Dunia kepada junior saya di *Tempo* itu. Dr. Paul Wolfowitz waktu itu memang menduduki posisi tertinggi di Bank Dunia. "Dia dua kali menawari saya kedudukan VP (Vice President)." Tapi karena terlibat skandal dengan seorang perempuan keturunan Libia, Wolfowitz—yang istri per-

tamanya mahir menari Jawa—harus pergi dari bank tersebut. Keputusan itu berakibat pada Bambang yang akhirnya tidak pernah mendapat kesempatan bekerja pada Bank Dunia bersama mantan Dubes Amerika tersebut.

* * *

Semacam Dinosaurus

Muhammad Yunus Yosfiah adalah perwira Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang pangkat tertingginya Letjen. Ketika Presiden Soeharto meletakkan jabatan, Yunus baru beberapa hari menjabat Sekretaris Pengendalian Operasi Pembangunan (Sesdalopbang) yang berkantor bersama Presiden di Bina Graha. Sebelum menjadi Sesdalopbang, Yunus pernah menduduki posisi Kepala Staf Sosial Politik (Kasospol) ABRI. Juga pernah menjadi Komandan Sekolah Staf ABRI (Sesko ABRI) setelah sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Militer (Pangdam) Sriwijaya. Yunus juga pernah duduk sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infantri (Pussenif). Karier militernya mulai menonjol dalam berbagai operasi Timur Timor (Timor Leste, sekarang). Jabatan tertinggi Yunus di Timor Timur adalah Komandan Korem.

Yunus adalah tipe serdadu tulen yang tidak begitu lancar dan canggih bicara soal-soal sosial politik, meski kemudian pernah menjadi Kepala Staf Sosial Politik (Kasospol) ABRI dan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah pensiun. Nah, di sinilah bermulanya cerita menarik mengenai Yunus. Perwira komando

Sebagai Kasospol ABRI, Jenderal Yunus Yosfiah memberi keterangan kepada wartawan di Bandung, 1997.

dengan pengalaman tempur yang banyak, sebenarnya Yunus lebih pantas menjadi Komandan Kopassus atau Panglima Kostrad. Anehnya malah diangkat menjadi Kepala Staf Sosial Politik (Kasospol). Saya segera menemuinya di kantornya yang baru, di Markas Besar ABRI (Mabes ABRI), Cilangkap. Kata saya, "Kok aneh, Anda yang jago perang malah jadi Kasospol? Mengapa kacau begini ABRI?" Yunus cuma tersenyum. "Di Mabes ini mestinya Anda jadi Kepala Staf Umum (Kasum) yang berurusan dengan penggunaan pasukan," kata saya lagi.

Sebagai teman lama—berkenalan dengan Yunus sejak Kapten—saya sering jumpa Yunus di kantornya. Sebagai peneliti peran politik militer Indonesia, kami sering berbicara mengenai topik penelitian saya. Tidak ada pendapat istimewa Yunus mengenai peran politik ABRI waktu itu. Tapi suatu kali dia mengejutkan banyak orang. Lewat sebuah pidato, Yunus mengingatkan agar peran sosial politik ABRI jangan sampai menjadi semacam dinosaurus. "Karena tidak bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan, dinosaurus akhirnya punah." Seperti kita ketahui, Dwifungsi akhirnya memang mengalami nasib seperti dinosaurus. Punah, dan ditinggalkan. Setelah Reformasi, saya baru tahu bahwa sudah lama sebenarnya para perwira ABRI sadar bahwa Dwifungsi tidak berfungsi lagi. Mereka semua hanya mengikuti kemauan dan perintah Soeharto yang memang menguasai ABRI. Artinya, ketika Yunus bicara tentang dinosaurus, Dwifungsi sesungguhnya sudah sebuah dinosaurus yang bertahan hanya karena masih berguna bagi kekuasaan Soeharto. Begitu Soeharto turun takhta, Dwifungsi juga segera ditinggalkan TNI.

SAYA BERADA DI RUMAH YUNUS pada malam tertembaknya beberapa mahasiswa di Universitas Trisakti. Ketegangan politik sudah beberapa bulan melanda Indonesia waktu itu. Tertembaknya beberapa mahasiswa Trisakti itu amat mengingatkan saya pada terbunuhnya Arief Rahman Hakim pada tahun 1966—yang menjadi martir bagi mahasiswa untuk mendesak turun Sukarno—saya menyampaikan kepada Yunus ramalan politik saya. "Kita

sedang berada pada hari-hari terakhir kekuasaan Soeharto." Presiden Soeharto sedang berada di Kairo hari-hari itu. Beberapa hari kemudian Presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu ternyata memang terpaksa turun takhta. B.J. Habibie sebagai Wapres tampil menggantikannya.

Sore hari setelah pergantian Kepala Negara, Yunus menelepon saya menginformasikan bahwa dirinya ditunjuk menjadi Menteri Penerangan. "Tolak Pak Yunus, itu urusan sulit dan Anda tidak punya pengalaman." Saya sarankan kepada perwira Kopassus itu agar kalau harus jadi menteri, jadi Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja saja. "Bicarakan dengan Fanny Habibie, biar dia yang menyampaikan kepada abangnya." Selang sejam kemudian, Yunus menelepon lagi. Katanya dengan lega, "Saya sudah bicara dengan Fanny, dia berjanji akan segera menyampaikan saran Anda kepada Presiden."

Pagi hari esoknya, beberapa jam sebelum pengumuman susunan kabinet, Yunus menelepon lagi. "Wah, bagaimana ini? Saya tetap akan diangkat menjadi Menteri Penerangan." Jawab saya singkat dalam bahasa Bugis, "Apa boleh buat, terimalah nasib Anda, dan manfaatkan dengan baik kesempatan itu." Di kemudian hari saya tahu bahwa sebenarnya Yunus pada mulanya akan dijadikan Menteri Pertahanan, dan Letjen TNI Hendropriyono diarahkan menjadi Panglima ABRI, sedangkan Jenderal TNI Wiranto akan diposisikan oleh Presiden Habibie sebagai Menko Polkam. Semua gagal karena Angkatan Darat menolak Hendropriyono menduduki jabatan Pangab. Jenderal TNI Feisal Tanjung yang menduduki kursi Menkopolkam pada kabinet terakhir Soeharto dipertahankan Presiden B.J. Habibie pada posisi yang sama.

Sebagai teman lama, saya sering mampir di kantor Menteri Penerangan pada hari-hari itu. Menemani Yunus makan siang dan ngobrol, yang pertama menjadi perhatian Pak Menteri adalah bagaimana membebaskan pers. Yunus ingin membebaskan pers dari banyak aturan dalam wujud sejumlah surat izin dan berbagai peraturan yang mengekang. Yunus ingin agar siapa saja yang punya kemampuan dan modal, boleh menerbitkan koran

dan majalah. "Tugas pemerintah hanya menjaga agar kebebasan pers jangan disalahgunakan." Begitu jalan pikiran Yunus.

Untuk mengantisipasi semua limpahan soal akibat adanya kebebasan pers, saya sarankan kepada Bapak Menteri terlebih dahulu minta pendapat dan pertimbangan aparat penegak hukum, ahli hukum, tokoh pers, dan para pengacara. Saya usulkan agar Adnan Buyung Nasution secepatnya diajak bicara. Staf Menteri lalu mencari Abang Buyung. Tidak berhasil. Bambang Wijoyanto yang bisa dihubungi. "Bambang juga boleh," kata saya. Tokoh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang di kemudian hari menjadi salah seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini diminta datang ke kantor Menteri Penerangan. Saya tidak hadir ketika Yunus jumpa dengan Bambang dan para penegak hukum lainnya.

Pembebasan pers dilaksanakan Yunus setelah bertemu sejumlah tokoh yang berurusan dengan hukum dan pers. Baru setelah itu keputusannya dia laporkan kepada Presiden Habibie. Bapak Presiden menerima laporan Yunus sambil berjalan bersama ke Masjid Baiturrahim di halaman Istana Merdeka menjelang sembahyang Jumat. "Saya sampaikan kepada Presiden bahwa hari ini saya mengeluarkan perubahan Surat Keputusan Menteri nomor 1. Saya melakukan penyederhanaan dari 16 persyaratan [untuk bisa menerbitkan Koran dan majalah] menjadi 3. Yang 3 itu adalah akte notaris, susunan pengurus, dan alamat. Komentar Presiden, '*Good. It is very democratic*'," tutur Yunus kepada saya.

Sebelum keputusan membebaskan pers itu diumumkan, saya berada di kamar Menteri ketika di halaman datang demo para wartawan dan sejumlah aktivis LSM yang menuntut pemerintah memberi izin diterbitkannya kembali sejumlah koran dan majalah yang diberedel pemerintah Orde Baru pada 1994. Dilaporkan kepada Menteri nama-nama tokoh yang menunggu beliau di halaman. Disebut antara lain nama Goenawan Mohamad, mantan Pemimpin Redaksi majalah *Tempo*. "Mana Goenawan? Minta dia menemui saya agar secepatnya *Tempo* saya beri izin terbit." Yunus

kemudian menemui sendiri para pengunjuk rasa dan berjanji memenuhi tuntutan mereka.

Beberapa hari setelah mengumumkan pembebasan pers, Yunus bercerita mengenai reaksi teman-temannya para jenderal terhadap kebijakan pembebasan pers tersebut. Ada di antara mereka yang cemas kebebasan pers akan menyebabkan disintegrasi Indonesia. Jawab Yunus, "Justru kebebasan pers itu akan berfungsi mencegah disintegrasi, karena soal yang memicu kemungkinan disintegrasi dibicarakan secara terbuka oleh pers." Sambil bergurau Yunus juga berkata, "Siapa suruh mengangkat saya menjadi Menteri Penerangan?" Gagasan menciptakan kebebasan pers di Indonesia, menurut Yunus, sebenarnya sudah muncul pada dirinya ketika belajar di Amerika dan Inggris. Di sana dia melihat banyak koran dan majalah yang terbit dengan bebas tanpa direcoki pemerintah. "Kita ini bangsa besar, kok jumlah majalah dan korannya amat terbatas. Itu pun terkekang," katanya.

MENGENAI KARIER MILITER YUNUS yang tersendat, di kemudian hari saya mendapat informasi bahwa pimpinan ABRI sebenarnya 2 kali mengusulkan agar perwira berdarah Bugis kelahiran Sidenreng Rappang ini menduduki jabatan militer yang pantas baginya. "Selalu ditolak Pak Harto," kata seorang jenderal yang dekat dengan Panglima ABRI Feisal Tanjung. Mula-mula diusulkan menjadi Panglima Kostrad. Ditolak. Untuk jabatan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), juga ditolak. "Soeharto tidak mau ambil risiko, karena tidak kenal Yunus," kata Mayjen TNI Muchlis Anwar, teman seangkatan (1965) Yunus di Akademi Militer dan pernah menjabat Asisten Personil di Markas Besar Angkatan Darat. Memang pada masa itu, setelah Soeharto membersihkan ABRI dari para perwira yang dicurigainya sebagai pengikut Benny Moerdani, hanya para jenderal yang secara pribadi dikenal oleh Bapak Presiden yang bisa menduduki posisi strategis.

Akhirnya Yunus terdampar di Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI, setelah selama hanya 10 bulan menjabat sebagai Panglima Kodam Sriwijaya di Palembang. Pada masa itu jabatan

Komandan Sesko ABRI pada umumnya dianggap sebagai pos bagi mereka yang kariernya sudah mentok. Yunus memang menduduki jabatan Komandan Sesko selama tiga tahun. Seorang perwira yang bertugas di Sesko ABRI kabarnya pernah bicara di depan teman-temannya, agar mereka jangan putus asa. Katanya, "Jangan mengeluh terdampar di sini, kalau Bang Yunus belum bunuh diri." Artinya, kekecewaan para perwira itu tidak ada artinya dibanding dengan nasib Yunus yang di mata para perwira itu telah diperlakukan secara tidak adil.

Tapi bagaimana Yunus bisa jadi Kasospol? "Soeharto tidak melihat posisi itu pontensial mengancam kedudukan Bapak Presiden, jadi boleh saja diduduki orang yang tidak dikenalnya dengan baik, seperti Yunus." Soeharto kenal langsung Yunus barulah ketika sebagai Kasospol dan Ketua Fraksi ABRI Yunus datang, atas nama ABRI, meminta kesediaan Soeharto menjadi Presiden lewat sidang MPR Maret 1998. Mungkin sebagai hadiah, Yunus ditarik Soeharto menduduki jabatan Sesdalopbang yang berkantor di samping kantor Bapak Presiden di Bina Graha. Tapi Yunus cuma menduduki jabatan itu tidak sampai tiga pekan. Soeharto mundur pada akhir minggu ketiga Yunus berkantor di Bina Graha. Selama bertetangga kantor dengan Bapak Presiden, hanya sekali Yunus sempat bercakap-cakap dengan atasan langsungnya. Topik pembicaraan, keluarga Yunus yang salah seorang anaknya belajar menjadi pemain golf profesional.

Suatu kebetulan sejarah, Yunus berada di sekitar Bapak Presiden ketika upacara meletakkan jabatan itu disiarkan televisi ke seluruh dunia. Bisa diduga jalan hidup dan karier Jenderal Yunus Yosfiah akan lain seandainya Soeharto mengenalnya jauh sebelum saat lengser tiba, atau sama sekali tidak ada acara lengser, artinya kekuasaan Soeharto masih berlanjut.

* * *

Salawat Badar Terus Bergema

Saya sedang diwawancarai sebuah saluran TV Australia di depan pintu utama gedung sidang paripurna MPR ketika dari dalam gedung terdengar Salawat Badar. Gus Dur terpilih jadi Presiden. Saya ikut terharu, meneteskan air mata dan wawancara terpaksa dihentikan. Meski tidak terlalu akrab, Gus Dur adalah kenalan lama yang saya kenang sebagai satu dari hanya beberapa politikus yang berani terhadap Presiden Soeharto pada dekade terakhir Orde Baru. Sebagai seorang sejarahwan politik Indonesia, Salawat Badar yang terus bergema dalam ruang paripurna itu sungguh bagaikan ilustrasi musik yang mengiringi *flashback* pada imajinasi saya yang memunculkan rentetan adegan perjalanan peranan politik Islam, Nahdlatul Ulama (NU), dan Gus Dur sendiri dari masa Demokrasi Parlementer, Orde Lama hingga Orde Baru. Puncaknya adalah era Reformasi yang Presiden terpilih pertamanya secara demokratis adalah Gus Dur.

Dengan latar Salawat Badar itu ikut juga tiba-tiba muncul ingatan saya kepada Soltaz, seorang Sosialis Belanda yang mengenang Sutan Syahrir sebagai seorang politikus Sosialis Indonesia yang pernah menolak permintaan NU untuk "pinjam intelektual." Konon kejadian itu berlangsung tidak lama setelah NU memisahkan diri dari Partai Masyumi di awal tahun lima puluhan. Waktu itu memang hampir semua politikus Islam yang berpendidikan sekolah Belanda—disebut kaum intelek oleh para kiai NU—berada dalam Masyumi sementara Partai NU para pimpinannya adalah mereka yang berlatar pendidikan pesantren. Kelak, menjelang jatuhnya Orde Baru, perkumpulan Forum Demokrasi yang umumnya beranggotakan mereka yang lebih dekat kepada golongan sosialis dan sekuler, yang jadi pemimpinnya adalah justru Gus Dur. Hanya dalam waktu kurang dari setengah abad, keadaan sudah berbalik. NU tidak lagi perlu "pinjam intelektual" dari siapa pun. NU telah berhasil mempunyai kaum "intelek" yang bahkan juga menjadi pemimpin kaum "intelek" golongan lain.

Amien Rais dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Yang juga tidak kurang menarik dengan terpilihnya Gus Dur tersebut, posisi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden Republik Indonesia, secara bersama diduduki oleh para mantan pemimpin organisasi Islam. Gus Dur mantan Ketua NU sebagai Presiden, Akbar Tanjung mantan ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai Ketua DPR, dan Amien Rais, mantan ketua Muhammadiyah menduduki kursi Ketua MPR. Yang membedakan generasi pemimpin golongan Islam ini dengan para pendahulu mereka di tahun lima puluhan, tak seorang pun di antara pemimpin Islam mutakhir itu yang masih bicara tentang Indonesia sebagai negara yang harus berdasarkan Syariat Islam.

Tapi bagaimana Gus Dur yang partainya, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) mendapatkan suara jauh di bawah pencapaian partai pimpinan Megawati, PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) bisa berhasil menjadi Presiden? Berikut ini cerita Dr. Amien Rais—terkenal sebagai tokoh terpenting Reformasi—tentang proses perjalanan Gus Dur menjadi Presiden dan dinamika

politik masa pasca-Pemilu 1999. Cerita ini dikisahkan kepada saya di Jakarta pada 4 Januari 2013.

> Dalam sebuah pertemuan di Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan, PPSK, di Yogyakarta disadari—setelah dihitung-hitung oleh Bambang Sudibyo—perolehan suara PDIP yang 35% tidak otomatis membuka jalan bagi Megawati jadi Presiden. Penggabungan suara partai-partai berbasis Islam ternyata bisa mengungguli Golkar dan PDIP. Penggabungan itulah yang kemudian disebut oleh Bambang Sudibyo sebagai Poros Tengah. Jadi gagasan dan nama Poros Tengah itu bukan dari saya.
>
> Sementara itu, terjadi pergolakan yang kurang menyenangkan dalam masyarakat. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah para pendukung PDIP mengumpulkan tanda tangan darah untuk mendukung Megawati menjadi Presiden. Dari Makassar datang berita sejumlah orang Bugis-Makassar merencanakan dengan beberapa kapal akan datang ke Jakarta memberikan dukungan agar Habibie dipilih lagi. Tekanan seperti itu saya tidak suka. Kita baru mulai berdemokrasi, penggunaan tekanan fisik harus dihindarkan. Kondisi seperti ini makin mempertebal keyakinan saya mencari calon lain, bukan Habibie dan juga bukan Megawati. Keyakinan itu makin kuat setelah laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak MPR.
>
> Setelah rapat PPSK, saya menemui Gus Dur di Jakarta. Kepadanya saya katakan, saya harus objektif. Kalau saya maju sebagai Capres saya akan kalah kuat dibandingkan Anda. Penerimaan Anda dalam masyarakat lebih luas dibanding saya. Yang memang masih jadi soal adalah gangguan penglihatan Anda. "Seminggu lagi saya akan ke New York berobat. Nanti pasti akan melihat lagi," kata Gus Dur dengan yakin. Saya bilang, Gus pakai "Insya Allah". Dia bilang, "Tidak usah pakai Insya Allah. Ini sudah pasti."
>
> Delapan hari sebelum pemilihan presiden, sehari setelah menjadi Ketua MPR, saya menemui Megawati di Hotel Kempinski (sekarang Intercontinental). Waktu itu Megawati ditemani Laksamana Sukardi. Mengingat Megawati adalah ketua partai pemenang pemilu, saya bertanya mengenai rencana *power sharing* (pembagian kekuasaan). "Apa maksudnya *power sharing*?" tanya Megawati. Saya jelaskan, siapa dapat apa. Dalam politik, hal demikian selalu seperti itu. Di mana pun begitu aturan mainnya. Politik dagang sapi. "Mas Amien, itu rahasia

dapur saya. Tidak bisa saya buka." Pembicaraan dengan Megawati yang tidak membawa hasil itu makin mempertebal kepercayaan kami mencalonkan Gus Dur. Menyampaikan kegagalan pembicaraan dengan Megawati kepada Gus Dur, saya berkata, "Gus, kita makin mantap memilih Anda."

Tidak kurang menarik adalah kegiatan Habibie beberapa saat setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR. Saya tiba di kediamannya pukul 2 dini hari. Di sana sudah ada Jenderal Wiranto, Akbar Tanjung, Hamzah Haz, Yusril Ihza Mahendra, dan para tokoh Partai Amanat Nasional (PAN), tokoh Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera, PKS), sejumlah tokoh Golkar, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Menjelaskan keputusannya untuk tidak lagi maju sebagai calon Presiden, Habibie menyampaikan kesepakatan mereka yang hadir menunjuk saya menghadapi Megawati. "Anda yang maju," kata Habibie. Saya betul-betul terkejut. Tapi saya sudah menyatakan dukungan kepada Gus Dur. Saya lalu teringat di masa lalu tokoh-tokoh NU sering merasa di-*by pass* oleh teman-teman Masyumi (Islam modernis), maka kalau saya menerima menjadi Capres sebagai yang diusulkan Habibie dan teman-teman yang hadir malam itu, nanti akan ada cap Muhammadiyah menelikung NU. Ini akan menimbulkan luka yang memerlukan beberapa generasi untuk sembuh.

Gus Dur akhirnya jadi Presiden, dan Megawati sebagai Wakilnya. Kabinet disusun bersama dengan Megawati, Akbar Tanjung, Wiranto, dan Gus Dur sendiri. Yang mutlak diminta Gus Dur adalah jabatan Menteri Luar Negeri untuk Dr. Alwi Shihab. "Bahasa Inggrisnya bagus dan bahasa Arabnya gaya Mesir yang sempurna. Yang terakhir ini perlu untuk hubungan kita dengan Timur Tengah," begitu Gus Dur menjelaskannya. Saya meminta kursi untuk Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan. Ketika Akbar Tanjung mengusulkan Slamet Effendi Jusuf, anggota Golkar yang mantan Ketua Anshor (organisasi pemuda NU), Gus Dur menolak. Alasan penolakan, Slamet adalah lawannya dalam NU.

* * *

"Kalau Pak Harto Batuk-Batuk ...."

Tidak lama setelah duduk di istana sebagai presiden, Gus Dur memerintahkan sekretarisnya mengundang saya ke Istana. Wak-

tu itu bulan puasa tapi saya diterima sore hari, yakni menjelang waktu buka puasa. Di ruang tamu, saya dipersilakan menunggu giliran bersama Jenderal TNI Subagio Hadisiswoyo, mantan KSAD. Presiden sedang menerima Prof. Widjojo Nitisastro dan Prof. Ali Wardhana. Oleh Ratih Harjono, sekretaris Presiden, saya dipersilakan masuk setelah dua profesor itu keluar.

Ruang kerja Presiden sangat luas. Di salah satu sudut, duduk Gus Dur sang Presiden. Melangkah ke arah Presiden, saya tiba-tiba merasa geli. Bertahun-tahun orang yang duduk di ruangan itu adalah Soeharto, seorang Jenderal dan Presiden yang berkuasa lama dan amat ditakuti. Kini yang duduk di sana adalah kenalan lama saya. Saya teringat—sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta—jumpa Presiden Soeharto suatu kali di kantor itu. Untuk tidak membuat kesalahan di depan orang yang sangat berkuasa waktu itu, sebelum menghadap Bapak Presiden saya merasa perlu mendapat pengarahan dari Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Tahir—jenderal yang kenal lama Bapak Presiden—mengenai bagaimana cara bicara dengan Soeharto. Salah satu petunjuk Pak Tahir yang saya masih ingat: "Kalau Pak Harto batuk-batuk, kita harus berhenti bicara, sebab Presiden sendiri sudah akan bicara."

Kini keadaannya lain sama sekali. Mendekati meja Presiden, saya mengucapkan salam, dan ketika duduk—bahkan sebelum dipersilakan—pada kursi di depan meja Presiden, saya memegang tangan Gus Dur sambil menyebut nama saya. Saya tetap memanggil pemimpin terbaru Indonesia itu dengan panggilan lama yang bertahun-tahun saya pakai, "Mas Durahman", bukan "Gus Dur", apalagi "Bapak Presiden". Karena itu pada pertemuan pertama kami sejak Gus Dur jadi Presiden, saya bertanya apakah saya boleh tetap memanggil beliau dengan cara lama. "Silakan, itu bukan soal."

Yang kami bicarakan adalah mengenai Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Tanya Gus Dur, "Lemhanas itu lembaga militer atau sipil?" Saya jawab dengan cepat, "Itu lembaga sipil yang dititipkan pengelolaannya oleh Bung Karno kepada Depar-

temen Pertahanan dan Keamanan. Mungkin karena itu gubernurnya selalu tentara." Gus Dur melanjutkan, "Begini, saya didesak teman-teman memanfaatkan tenaga Anda. Saya juga memang perlu banyak tenaga untuk membantu saya. Sekarang saya minta Anda menjadi Gubernur Lemhanas." Ini suatu kehormatan besar menjadi gubernur sipil pertama memimpin Lemhanas. Tapi tawaran itu dengan sopan saya tolak. "Di Lemhanas itu terlalu banyak tentara dan mantan tentara. Bagaimana saya harus mengurus lembaga dengan banyak tentara padahal saya ini takut kepada tentara," kata saya. Mungkin Gus Dur dan banyak orang lainnya terkejut mendengar pernyataan "saya takut pada tentara," ketika hampir semua orang tahu saya—sebagai peneliti peran politik tentara—selama bertahun-tahun berhubungan dengan tentara. Tapi justru karena kenal tentara dalam suatu sistem otoriter itulah maka saya takut kepada aparat bersenjata dan punya peran politik dengan sejumlah kekuasaan yang kadang sulit diawasi dan tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Kepada Bapak Presiden saya usulkan agar kalau memang tenaga saya bisa dimanfaatkan, kirim saja saya menjadi Duta Besar di negeri kecil, kurang penting, dan jarang berurusan dengan Indonesia. "Anda jadi Gubernur Lemhanas dulu selama dua tahun, setelah itu Anda saya angkat menjadi Duta Besar," bujuk Bapak Presiden. Keluar dari Istana, saya menelepon Marsillam Simanjuntak, Sekretaris Kabinet dan orang dekat Gus Dur waktu itu. "Kalau Agum Gumelar bisa jadi Gubernur Lemhanas, masak Anda tidak bisa," kata Marsillam. Marsillam lupa, Agum itu seorang jenderal, saya ini kopral saja bukan.

Seperti kemudian diketahui, saya tidak pernah jadi Gubernur Lemhanas, juga tidak pernah dikirim sebagai Dubes di masa pemerintahan Gus Dur. Saya harus menunggu beberapa tahun sebelum akhirnya Presiden SBY mengirim saya ke Praha sebagai Dubes Indonesia untuk Republik Ceko.

* * *

"Dr. Salim Said Adalah Kawan Dekat Presiden."

Bersama istri dan anak, saya sedang *check in* di lapangan terbang Soekarno-Hatta dalam persiapan terbang ke Bangkok ketika telepon genggam saya berdering. Di seberang sana seorang yang belum saya kenal, memperkenalkan diri sebagai Alimun Siri dari Angkatan Udara. Dari logatnya bisa saya tebak dia berasal dari Sulawesi Selatan, kampung halaman saya. Alimun Siri minta jumpa. Tapi karena saya harus ke Bangkok sebagai pengajar tamu pada Tammasat University, kami janji jumpa sepulang saya dari perjalanan nanti. Berada di Bangkok selama 10 hari memberi kuliah setiap hari, istri dan anak saya menikmati Bangkok sebagai turis.

Sesuai dengan kesepakatan, ketika saya berada kembali di Jakarta, Marsekal Muda Alimun Siri menelepon. Akhirnya dia datang ke rumah. Siri ternyata seorang penerbang tempur yang sedang menjabat atau pernah menduduki posisi sebagai Panglima Komando Operasi Angkatan Udara yang bermarkas di Makassar. Perwira tinggi Angkatan Udara itu memerlukan jumpa saya menyampaikan keluhan Angkatan Udara yang kekurangan perwira dengan pangkat bintang tiga (Marsekal Madya). Waktu itu Angkatan Laut sudah kebagian posisi Panglima TNI, artinya punya dua laksamana bintang empat. Tapi kenapa mengeluh dan minta bantuan saya? "Kami tahu Pak Salim punya kontak luas dan berpengaruh di Mabes ABRI," kata Alimun Siri. Saya memang kenal banyak jenderal sebab mereka narasumber saya sebagai peneliti peranan politik militer, dan sebagian adalah juga mantan murid saya di Sesko ABRI atau di Lemhanas. Tapi saya jelas tidak berpengaruh. Terutama karena saya selalu menghindarkan diri mencampuri urusan dinas mereka. Begitu saya menjelaskan kepada perwira tinggi Angkatan Udara itu.

Namun, akhirnya keluhan mereka saya sampaikan juga kepada Jenderal TNI Fachrul Razi, Wakil Panglima TNI. Rupanya informasi saya mendapat perhatian di Mabes TNI. Mereka lalu men-

cari jabatan yang memerlukan seorang berbintang tiga. Yang mereka incar mula-mula adalah jabatan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI di Bandung. Tapi karena jabatan itu tiba-tiba diberikan kepada Letjen TNI Djadjak Suparman, mantan Panglima Kostrad, jabatan bintang tiga itu lepas dari incaran Cilangkap. Kini jabatan yang masih mungkin diisi adalah Kepala Badan Intelijen TNI. Tapi posisi itu tidak lagi memberi bintang tiga bagi pemangkunya.

Sementara itu oleh Cilangkap saya juga diminta membantu mencari perwira Angkatan Udara yang akan diproyeksikan mendapatkan pangkat bintang tiga. Karena saya tidak tahu apa siapa dalam Angkatan Udara, saya hubungi lagi Alimun Siri. Kami berjanji jumpa di Klub Persada milik Angkatan Udara yang terletak di dalam kompleks Halim Perdanakusuma. Pada suatu malam, lepas waktu buka puasa kami jumpa, Marsekal Muda Siri dan saya. Bersama Alimun Siri, hadir pula Marsekal Muda Ian Santoso Halim Perdanakusuma. Kemudian saya tahu itulah orang yang akan dipromosikan ke jabatan bintang tiga.

Seperti dengan mudah diketahui dari namanya, Ian Santoso adalah putra pahlawan Nasional, Halim Perdanakusuma. Patung Halim berdiri tegak di depan gedung Klub Persada. Ian Santoso adalah pilot *transport* dan kabarnya lama menjadi pilot kepercayaan Benny Moerdani. Artinya Ian adalah orang Badan Intelijen Strategis (Bais) yang dulu dipimpin Moerdani. Sebagai orang intel Ian pernah ditempatkan oleh Benny sebagai Atase Pertahanan (Athan) di Singapura. Saya tidak sempat bicara banyak dengan putra Halim Perdanakusuma malam itu. Saya hanya menjelaskan, terpaksa terlibat dalam urusan ini karena permintaan Alimun Siri. "Sebagai orang sipil saya tidak suka mencampuri urusan internal tentara," kata saya.

Tidak berselang lama, saya dengar Ian Santoso diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA) dengan pangkat Marsekal Madya. Promosi menjadi bintang tiga itu jelas sebuah hasil kompromi, sebab jabatan itu adalah posisi untuk bintang dua saja. Jenderal TNI Zacky Anwar, seorang perwira intel kawakan

dari Kopassus menduduki jabatan itu sebelumnya. Tapi karena sudah ditetapkan jabatan itu hanya posisi bintang dua, Zacky tidak mendapat promosi menjadi bintang tiga seperti Ian Santoso kemudian. Sampai pensiun Zacky tetap saja berpangkat Mayjen.

Menarik untuk saya ceritakan bahwa dalam hidup saya, hanya sekali sempat jumpa dengan Ian Santoso. Hanya di Klub Persada selepas buka puasa itulah. Tidak lama setelah Ian Santoso menduduki jabatan dengan bintang tiga di pundaknya, atas usaha Duta Besar Amerika di Jakarta, saya diatur mengunjungi Pentagon dan Kongres, di Washington, DC. Salah satu objek yang saya kunjungi di Pentagon adalah DIA (Defence Intellegent Agency), kantor intel pertahanan Amerika. Di sana saya mendapat taklimat panjang lebar mengenai sejarah, struktur organisasi, dan fungsi-fungsi DIA. Saya juga dibekali bahan-bahan mengenai struktur dan fungsi organisasi intel tersebut. Rekomendasi Dubes Amerika di Jakarta atas diri saya waktu itu adalah, “Dr. Salim Said adalah kawan dekat Presiden.” Mungkin karena itu saya mendapat perhatian dan pelayanan khusus di Pentagon. Diantar seorang kolonel Angkatan Darat, saya bertamu ke kantor Senator Patrick Leahy, seorang yang berkeras mempertahankan embargo senjata Amerika terhadap Indonesia. Saya tidak jumpa sang Senator tapi sempat berdiskusi dengan stafnya yang berusaha meyakinkan saya, dia lebih tahu Indonesia dan pelanggaran HAM oleh TNI masih belum diselesaikan oleh pemerintah di Jakarta. Usaha saya meyakinkan mereka bahwa TNI sudah berangsur berubah, sama sekali mereka tolak. Tidak bisa berbuat apa-apa, saya pergi dengan mendongkol.

Waktu pulang ke Jakarta saya berusaha menghubungi Ian Santoso untuk berbagi informasi sekaligus menyampaikan bahan-bahan tertulis yang saya bawa dari Pentagon. Sulit ditemui. Sampai hari ini, belasan tahun kemudian, lama setelah dia pensiun, saya tidak juga pernah jumpa Marsekal Madya TNI (Purn.) Ian Santoso. Kecurigaan saya waktu itu, mungkin dia menghindar karena menduga saya akan menemuinya untuk minta sema-

cam balas jasa atas promosinya menjadi Marsekal Madya. *Wallahu a'lam.*

* * *

"Angkat Fachrul."

Laksamana TNI Widodo Adi Sucipto, Kepala Staf Angkatan Laut, kemudian Wakil Panglima TNI sebelum menjadi Panglima TNI, adalah adik kelas saya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Margoyudan, Solo. Di Jakarta kami sering jumpa pada sejumlah reuni sekolah. Ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengangkatnya menjadi Panglima TNI, menggantikan Jenderal TNI Wiranto, lewat telepon genggam saya segera menyampaikan ucapan selamat.

Sebagai perwira Angkatan Laut pertama yang memimpin TNI, saya membayangkan betapa tidak mudah bagi Widodo mengelola TNI yang mayoritas anggotanya adalah Angkatan Darat dan yang sepanjang sejarahnya tidak pernah berada di bawah pimpinan perwira dari Angkatan lain. Saya menyarankan agar Panglima baru TNI itu mempunyai wakil dari Angkatan Darat. "Angkat Fachrul," seru saya lewat telepon genggam secara spontan, kepada Widodo. Mengapa Letnan Jenderal TNI Fachrul Razi? Saya sudah kenal lama dengan Fachrul. Dia orang baik, tidak macam-macam, dan mudah bekerja sama. Lagi pula Fachrul tergolong salah seorang letnan jenderal TNI Angkatan Darat tersenior waktu itu. Fachrul pernah menjadi Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI dan sedang menjabat Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan.

Tapi kemudian saya sadar, Widodo tidak punya wewenang mengangkat seorang Wakil Panglima. Kekuasaan mengangkat perwira untuk menduduki jabatan setinggi itu ada di tangan Presiden. Saya menelepon Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, teman lama dan senior saya di Universitas Indonesia. Menurut Juwono, orang yang paling pantas saya hubungi adalah Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, seorang yang sangat dekat dengan Gus

Dur. Juwono juga bercerita bahwa Gus Dur pernah berkata kepada beberapa menterinya: “Kalau urusan tentara, tanya saja Salim Said.”

Saya menghubungi Menteri Luar Negeri Dr. Alwi Shihab. Setelah duduk soal saya jelaskan, dia berjanji membicarakan usul saya itu dengan Gus Dur. Selang beberapa hari, saya mendapat telepon dari Bapak Menlu. Dari atas mobilnya dalam perjalanan ke lapangan terbang Sukarno-Hatta pagi itu Dr. Alwi Shihab menyampaikan berita penting, “Eh, Pak Salim, itu surat keputusan pengangkatan *Frankfurt* sudah ditandatangani Gus Dur.” Alhamdulillah. Saya segera menghubungi Jenderal Fachrul. Sulit dicapai. Ada rapat di Departemen Pertahanan rupanya. Saya menelepon saja Mayjen TNI Sudi Silalahi yang saya harapkan bisa dengan segera menghubungi Fachrul. Saya pesankan kepadanya agar secepatnya memberi tahu mengenai promosi Jenderal Fachrul sebagai Wakil Panglima TNI. Saya sendiri kemudian menghubungi Laksamana Widodo menyampaikan berita, seorang Jenderal TNI Angkatan Darat telah diangkat Gus Dur menjadi Wakilnya.

* * *

“Ada Telepon dari Luhut.”

Suatu hari saya sedang berada di Mabes TNI Cilangkap sebagai pembicara pada suatu seminar. Ketika seminar tentang Reformasi itu selesai, istri saya sudah menunggu dalam mobil di tempat parkir. “Ada telepon dari Luhut,” katanya ketika saya masuk mobil. Luhut yang mana? Panjaitan atau Pangaribuan? Yang pertama Jenderal dan Menteri, yang satunya pengacara. Istri saya tidak tahu beda dua Luhut kenalan saya itu. Tapi kemudian telepon genggam saya berdering. Jenderal TNI Luhut Panjaitan yang bicara. “Sidang kabinet memutuskan Anda menjadi penasihat militer Presiden. Jangan ditolak, Bung,” kata Luhut, Menteri Perdagangan pada kabinet Gus Dur.

Tidak lama kemudian, telepon berdering lagi. Menteri Luar Negeri Dr. Alwi Shihab di ujung sana. Pesannya sama dengan ka-

bar yang baru saya terima dari Jenderal Luhut. "Nama Anda keluar dari mulut Gus Dur sendiri," kata Alwi. Selang beberapa menit, telepon berdering lagi. Dari teman lama saya, Dr. Ahmad Sujudi, Menteri Kesehatan yang juga baru keluar dari sidang kabinet. Pesannya sama. Saya diangkat menjadi penasihat militer Presiden atas arahan Gus Dur sendiri.

Ini betul-betul luar biasa, tiga Menteri menelepon saya dalam rentang masa yang berdekatan. Waktu itu memang ada sedikit kekisruhan hubungan antara Gus Dur dan pihak TNI. Maka beberapa anggota kabinet sepakat mengusulkan kepada Presiden untuk mengangkat seorang yang bisa memberi informasi dan pertimbangan mengenai soal-soal yang menyangkut hubungan pemerintah dan militer. Tanpa debat, Gus Dur bukan saja setuju, tapi malah langsung mengajukan nama calon: Salim Said. Begitu cerita Dr. Ahmad Sujudi beberapa hari kemudian.

Tentu saja saya merasa amat terhormat dengan penunjukan sebagai penasihat urusan hubungan militer itu. Tapi yang lebih menarik untuk saya ceritakan, sampai Gus Dur dilengserkan oleh MPR beberapa bulan kemudian, saya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi, apalagi surat pengangkatan dari kantor kepresidenan. Dengan kata lain, saya tidak pernah menjadi penasihat urusan militer Presiden Abdurrahman Wahid.

* * *

Suka Berkunjung ke Gua-Gua

Tidak mudah menemukan presiden pada zaman modern ini yang dalam masa singkat kekuasaannya berhasil memecat sejumlah pimpinan tentaranya, di samping sibuk melakukan bongkar pasang kabinetnya. Rekor dalam bidang pecat memecat yang demikian itu berada di tangan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sebagai peneliti peran politik militer, saya sekarang hanya akan memusatkan perhatian pada aktivitas Presiden memecat para pemimpin militernya sementara kesibukan Gur Dur mengutak-atik kabinetnya pada kesempatan lain saja kita bicarakan.

Pemecatan yang pertama dan amat dramatis dan kontroversial adalah Jenderal TNI Wiranto yang dicopot dari jabatan Menkopolkam. Tentang kontroversi dan kekisruhan di sekitar pemecatan Jenderal Wiranto itu, dalam buku saya *Soeharto's Armed Forces* telah secara panjang lebar saya uraikan. Yang tidak banyak diketahui kisahnya adalah pemecatan Laksamana TNI Ahmad Sucipto dari jabatan Kepala Staf Angkatan Laut; Jenderal TNI Fachrul Razi dari Jabatan Wakil Panglima TNI (Wapang TNI), dan Letjen TNI Suaidi Marasabessy dari jabatan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.

Gus Dur dan Jenderal Wiranto.

Perlu diingat bahwa di samping berita pemecatan para jenderal dan laksamana tersebut, berita yang juga hangat dalam pembicaraan di masa itu adalah besarnya peran sejumlah orang di sekitar Bapak Presiden. Maklumlah Gus Dur mempunyai keterbatasan pada salah satu indranya sehingga dalam banyak hal dia terpaksa tergantung pada orang lain. Sejumlah "orang lain" itu ditengarai memainkan peran penting pada sejumlah keputusan Bapak Presiden. Orang-orang itulah yang masa itu populer disebut sebagai "pembisik". Nah, dalam urusan bisik-membisik yang

berhubungan dengan soal-soal militer waktu itu dikenal nama Djuanda, seorang perwira muda Angkatan Laut didikan Prancis.

Entah bagaimana jalan ceritanya, begitu terjadi Reformasi, Djuanda tiba-tiba muncul sebagai komentator urusan keamanan dan intelijen. Dia tampil di berbagai media. Dinobatkan media sebagai ahli intelijen, dia menjadi kejaran wartawan. Dia juga laris sebagai narasumber pada sejumlah diskusi. Tidak jelas juga bagaimana anak muda berpangkat mayor itu dengan cepat menjadi seorang yang berada dalam lingkaran kekuasaan begitu Gus Dur menduduki Istana kepresidenan. Djuanda juga beredar di kalangan aktivis mahasiswa serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pokoknya ada aura misterius menyelimuti perwira Angkatan Laut yang tampil di berbagai penjuru itu. Dia cerdas dan lulusan sekolah militer Prancis, tapi kepada saya, dia juga mengaku percaya hal-hal yang berhubungan dengan mistik. Bahkan mengaku mengoleksi keris "berisi". Kemudian saya ketahui dari Ir. Sarwono—mantan Menteri Lingkungan Hidup—Djuanda juga suka berkunjung ke gua-gua. Dan penyakitnya yang serius—mula-mula diduga kanker—yang akhirnya mengantarkan kematiannya dalam usia muda, menurut seorang dokter, besar kemungkinan disebabkan oleh virus tertentu yang memang hanya hidup pada gua-gua lembap tersebut.

Pimpinan Angkatan Laut resah melihat kegiatan salah seorang perwira mudanya aktif dalam kegiatan yang tidak jelas hubungannya dengan profesinya sebagai perwira pelaut. Para petinggi intelijen militer memberi perhatian kepada kasus Djuanda. Mereka semua sadar Djuanda seorang perwira yang sangat cerdas, tapi sebagai tentara dia sepertinya punya inisiatif macam-macam dan berjalan sendiri jauh di luar jalur komando unitnya sebagai perwira. Sulit dikendalikan oleh Angkatan Laut, KSAL Ahmad Sucipto kemudian merelakan Djuanda dimanfaatkan oleh Badan Intelijen TNI yang waktu itu di bawah pimpinan Letjen TNI Tyasno Sudarto. Tapi tidak lama kemudian, Tyasno menghubungi Laksamana TNI Sucipto menyampaikan kabar Djuanda tidak berhasil dikendalikan dan kini mayor itu sudah beredar lagi di ka-

langan Gus Dur di Istana. Saya kemudian mendapat informasi yang menyebut Djuanda juga berperan sebagai penasihat bagi Menteri Luar Negeri, Dr. Alwi Shihab, di samping kesibukannya di Sekretariat Negara. "Bukan penasihat, tapi memang sering datang ke kantor saya memberi masukan-masukan dan perkiraan-perkiraan intelijen," kata mantan Menlu Alwi Shihab sekian tahun kemudian.

Menurut Alwi, masukan-masukan Djuanda pada umumnya berbau teori konspirasi. "Analisisnya aneh, penuh dengan cerita mengenai negara-negara dan orang-orang yang mengancam keamanan Indonesia. Dia juga menyampaikan nama orang-orang yang harus diwaspadai. Kalau masukan Djuanda saya percaya dan pakai, maka Indonesia dan saya pribadi akan punya banyak musuh." Apakah ada posisi struktural Djuanda dalam lingkungan Gus Dur? "Tidak ada. Dia hanya teman yang sudah kenal Gus Dur sebelum menjadi Presiden. Sejak lama Djuanda memang suka mendatangi Gus Dur menyampaikan sejumlah info dan analisis intel. Tapi informasi dan analisisnya aneh-aneh saja," jelas Alwi selanjutnya.

Kewalahan mengelola Mayor Djuanda, Mabes Angkatan Laut menempatkan perwira didikan Prancis ini sebagai komandan kapal perang KRI Pattimura—berada di bawah Komando Armada Timur—yang bermarkas di Surabaya. Tujuan menempatkan Djuanda di kapal, memberi kesempatan kepadanya mendapatkan pengalaman sebagai komandan dan sekaligus menjauhkannya dari hiruk-pikuk politik Jakarta. Begitu kemudian penjelasan seorang laksamana yang mengatur personalia di Mabes Angkatan Laut waktu itu. Djuanda ternyata tidak betah di laut. Dia meninggalkan penugasannya dan kembali beredar di Jakarta.

Tanpa sempat berkonsultasi dengan KSAL, Panglima Armada Timur, Laksamana Muda TNI Fred Lonan, menaati saja surat Sekretaris Negara, Ali Rahman, yang atas nama Presiden Abdurrahman Wahid memerintahkan agar Mayor Djuanda meninggalkan jabatan komandan kapal dan pindah ke Sekretariat Negara. "Saya kira Bapak KSAL sudah tahu mengenai surat dari Sekneg itu,"

kata Fred Lonan kepada Sucipto, lewat telepon dari Surabaya. Adalah Sucipto yang menghubungi Panglima Armada Timur setelah malamnya KSAL melihat Djuanda muncul lagi di Istana. "Lho kok anak ini ada di sini lagi? Dia kan sudah saya angkat menjadi komandan kapal," pikir Sucipto dengan heran.

Tidak sulit dimengerti jika Mayor itu kemudian kesal kepada pimpinan tertinggi Angkatan Laut yang telah "mengasingkan" dirinya ke kapal ketika dia sedang asyik mengolah berbagai info dan analisis intel di seputar pusat kekuasaan waktu itu. Maka ketika secara mendadak KSAL diganti, setelah menduduki posisi pimpinan Angkatan Laut hanya belasan bulan, para perwira di Mabes Angkatan Laut sangat mencurigai Djuanda yang memainkan peran sebagai "pembisik" Gus Dur.

Tapi seandainya betul Djuanda yang membisiki Gus Dur menyingkirkan Ahmad Sucipto, apa kira-kira isi bisikan tersebut? Jawaban atas pertanyaan itu diperoleh Sucipto dari Wakil Presiden Megawati. Ketika pamit kepada Wakil Presiden setelah melepaskan jabatan KSAL, Mega bertanya kepada Sucipto, "Apa Pak Cipto tahu kenapa secara mendadak diberhentikan oleh Gus Dur?" Tentu saja mantan KSAL itu tidak tahu apa pasal dia dicopot. Mega ternyata punya informasi yang didapatkannya langsung dari Gus Dur. "Kata Gus Dur, Pak Cipto 11 kali bertemu dan terlibat rapat gelap dengan Pak Harto." Laksamana Sucipto terkejut, sebab selama hidupnya dia cuma pernah sekali jumpa Presiden Soeharto. Itu pun jauh sebelum Reformasi, pada suatu upacara militer yang berlangsung di pangkalan Angkatan Laut Tanjung Priok. Ketika itu dia masih berkedudukan sebagai Panglima Armada Barat.

KSAL Laksamana Ahmad Sucipto.

Laksamana Sucipto memang berkali-kali jumpa Soeharto. Tapi Soeharto yang ini adalah Komandan Marinir dan teman seangkatannya dalam pendidikan di Akademi Angkatan Laut. Di sekitar Gus Dur yang tahu mengenai adanya Jenderal Soeharto di Angkatan laut yang selalu berhubungan dengan Laksamana TNI Ahmad Sucipto, kemungkinan sangat besar hanya Mayor Pelaut Djuanda. Tentu juga masih harus dibuktikan apakah betul Laksamana TNI Sucipto adalah korban bisikan Djuanda.

Hubungan Djuanda dengan Presiden Abdurrahman Wahid konon merenggang setelah Mayor Pelaut itu bentrok dengan Jenny Wahid, putri tertua Gus Dur. Rupanya antara keduanya ada persaingan dalam memperebutkan "kuping" Bapak Presiden. Sang Putri menang, Djuanda tersingkir.

Selain cerita tentang Djuanda yang merepotkan Angkatan Laut, di kemudian hari Ahmad Sucipto juga mendengar cerita mengenai Dr. Said Aqil Siroj, seorang pengurus penting NU (belum Ketua NU waktu itu), yang menyebut KSAL itu sebagai "kikir". Cerita ini diperoleh Sucipto dari Adnan Ganto, penasihat ekonomi Menteri Pertahanan. Dr. Said Aqil Siroj pernah menemui Menteri Pertahanan, Profesor Dr. Juwono Sudarsono, yang menerima tamunya ditemani Adnan Ganto sebagai penasihatnya. Di sana tampaknya Dr. Said Aqil Siroj berbicara mengenai KSAL.

Seingat Laksamana Sucipto sebagai KSAL dia memang pernah didatangi Dr. Said Aqil Siroj bersama beberapa tokoh NU. Dengan menyebut kedatangan mereka sepengetahuan Presiden Gus Dur, Dr. Siroj dan rombongannya meminta bantuan tanah untuk membangun Universitas NU di Jakarta. "Angkatan Laut punya banyak tanah di daerah Kelapa Gading, hibahkanlah sedikit kepada kami," kira-kira begitu permintaan Dr. Siroj. Kepada tokoh NU itu Sucipto menjelaskan tanah-tanah itu milik negara dan Angkatan Laut hanya punya hak pakai. Kalau memang memerlukan tanah yang disebut sebagai milik Angkatan Laut itu, Dr. Siroj harus menghubungi Menteri Keuangan yang mengelola aset negara. Sampai sekarang Laksamana TNI (Purn.) Sucipto tidak

berani menyimpulkan apakah urusan tanah itu juga ikut berperan memperpendek masa jabatannya sebagai KSAL.

PELENGSERAN JENDERAL TNI FACHRUL RAZI ceritanya sedikit agak canggih. Secara resmi alasannya adalah penghapusan jabatan Wakil Panglima TNI. Trik semacam ini dipelopori penggunaannya oleh Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri sekian puluh tahun silam. Menhan Iwa menghapuskan jabatan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) yang diduduki oleh Jenderal TB Simatupang dengan menggunakan PP No. 35, 2 November 1953. Berdasarkan keputusan tersebut Jenderal Mayor TNI (setingkat dengan Brigjen sekarang) pertama Indonesia pasca pengakuan kedaulatan itu, kehilangan jabatan. Karena tidak ada posisi lagi baginya dalam Angkatan Perang, pada 1954 Simatupang pensiun dini dari dinas militer. Kalau hitungan dimulai sejak 1945, masa terbentuknya Angkatan Perang Indonesia, maka masa dinas militer T.B. Simatupang hanya 9 tahun.

Fachrul Razi lebih beruntung sebab dia sudah bertugas dalam TNI selama 32 tahun sebelum akhirnya, secara tidak lang-

Gus Dur, Jenderal Fachrul Razi, dan Laksamana Ahmad Sucipto.

sung, diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tapi masa jabatannya sebagai Wapang TNI hanya hitungan bulan. Alasan pemberhentian itu adalah informasi yang dipunyai Gus Dur yang menyebut Jenderal TNI Fachrul Razi sebagai "orangnya Wiranto". Dan karena Wiranto sudah lebih dahulu disingkirkan, maka giliran Fachrul menyusul.

Saya kebetulan kenal dekat Fachrul sejak dia baru saja berpangkat kolonel. Orangnya baik, mudah dihubungi, asyik diajak bicara tapi punya pendirian teguh sebagai seorang perwira. Ketika Wiranto diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Panglima ABRI, saya mencium sikap Fachrul yang kecewa dengan pengangkatan seorang mantan ajudan menjadi Panglima ABRI. Seorang senior Fachrul malah secara terbuka menyatakan perasaan kesalnya mengenai pengangkatan para mantan ajudan dan mantan pengawal Soeharto sebagai pimpinan ABRI. Seperti diketahui, Wiranto adalah Panglima ABRI kedua yang mantan ajudan. Sebelum itu, beberapa tahun sebelumnya ada Try Sutrisno. Dengan pengalaman dan pengamatan itu semula saya terkejut ketika beredar cerita penyingkiran Fachrul karena dianggap Gus Dur sebagai "orangnya Wiranto". Ketika Fachrul menjadi Wakil Panglima TNI, Wiranto sudah lama berada di luar jajaran militer aktif. Waktu itu kami para pemerhati politik pada umumnya yakin keputusan Gus Dur itu lagi-lagi bersumber pada kreativitas para "pembisik".

DALAM HAL GUS DUR MEMECAT PARA JENDERALNYA kisah yang paling mengasyikkan adalah yang menyangkut Letjen TNI Suaidi Marasabessy, jabatan terakhir Kepala Staf Umum (Kasum) TNI. Sebelum duduk di Cilangkap, dengan pangkat Mayor Jenderal TNI, Suaidi Marasabessy memegang posisi Pangdam Wirabuana di Makassar. Di sana dia berperan positif dalam mendukung Reformasi yang dilancarkan para mahasiswa. Desember 1999 Suaidi ditarik ke Jakarta menduduki jabatan Kasum di bawah Laksamana TNI Widodo sebagai Panglima. Menurut penuturan Suaidi kepada saya hanya sebulan setelah duduk di kursi

Kasum, dia didatangi Uni Lubis, seorang wartawati. Uni menyarankan kepada Suaidi agar berhati-hati, Gus Dur sedang mencari alasan untuk memecat Kasum yang baru menjabat sebulan itu. Alasannya? "Pak Suaidi dituduh sebagai pemasok senjata ke Maluku. Gus Dur sekarang sedang mencari pengganti Pak Suaidi," kata Uni Lubis, menyampaikan apa yang didengarnya dari lingkaran dalam Gus Dur. Masa itu Maluku memang baru saja dilanda konflik yang berdarah-darah dan Suaidi adalah satu dari beberapa putra Maluku yang dikirim dari Jakarta dengan misi mencari jalan perdamaian di daerah konflik tersebut.

Pada bulan berikutnya, Suaidi berada di Singapura menghadiri sebuah konferensi soal keamanan regional. Di sana dia diwawancarai mengenai mutasi dalam TNI. "Ah, itu soal rutin, penyegaran personalia," komentarnya. Tapi pembicaraan kemudian merembet ke soal campur tangan Gus Dur sampai ke level pengangkatan Komando Resort Militer (Korem), bahkan Komando Distrik Militer (Kodim). Suaidi berpendapat, Presiden sebaiknya tidak perlu terlalu mencampuri urusan internal tentara. Apalagi kalau "Mutasi tentara sudah dicampuri kepentingan politik. Itu tidak sehat". Wawancara itu tersiar luas lewat media-media Indo-

Laksamana Widodo A.S. Panglima TNI.

nesia. Gus Dur marah. Beberapa hari kemudian, Suaidi dipecat.

Letjen TNI Suaidi Marasabessy.

Keputusan pemecatan disampaikan Laksamana Widodo kepada Suaidi. Kasum itu bertanya kepada panglimanya, apa alasan Gus Dur? “Tidak tahu,” jawab Laksamana Widodo. Suaidi kecewa dan kesal dengan jawaban serta sikap panglimanya. Kata Suaidi kepada saya, “Waktu itu saya orang ketiga dalam TNI. Harusnya Panglima melindungi atau paling sedikit tanya kepada Presiden alasan pemecatan itu.” Melihat Suaidi marah, Widodo berjanji mencarikan posisi untuk Kasum itu. “Tidak usahlah,” kata Suaidi. Akibatnya, jabatan Kasum adalah kedudukan terakhir Suaidi dalam struktur TNI, meski sebagai jenderal dia masih seorang tentara aktif untuk sekian waktu kemudian.

Ada cerita lanjutan yang tidak kurang menarik di seputar pemecatan Letnan Jenderal TNI Suaidi Marasabessy tersebut. Ternyata keluarga Marasabessy adalah keluarga Nahdlatul Ulama (NU) terpandang di Maluku. Ketika remaja di kampungnya, selain menjadi anggota Pelajar Islam Indonesia (PII), Suaidi juga anggota yang aktif dalam Ikatan Pelajar NU (IPNU). Sebagai Nahdliyin (warga NU) Suaidi mengaku sujud syukur ketika Gus Dur terpilih jadi Presiden. Maka ketika sebagai Kasum Suaidi mendadak dipecat Gus Dur, Ketua NU Maluku datang protes ke Jakarta. Sadar orang yang dipecatnya adalah jamaah NU, Gus Dur meminta Suaidi datang menemuinya di Istana. Suaidi menolak.

Nanti ketika sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat membuat petisi menolak kemungkinan Letnan Jenderal TNI Agus Wirahadikusuma diangkat menjadi Wakasad atau KSAD, dan Gus Dur tahu Suaidi berperan penting di balik petisi itu, dikirimlah beberapa orang membujuk mantan Kasum itu agar bersedia

menemui Gus Dur. Dua dari utusan itu adalah Sharifah binti Abu Bakar Al Idrus dan Alwi Al Idrus, kakaknya. Untuk apa bertemu Gus Dur? "Untuk ditawari jabatan KSAD. Tapi kalau bertemu Gus Dur, Pak Suaidi jangan bicara soal Wiranto." Kenapa tidak boleh bicara soal Pak Wiranto? "Tidak tahu. Saya hanya disuruh menyampaikan seperti itu," kata Sharifa. Misi dua Al Idrus bersaudara itu gagal. Bapak Presiden tidak putus asa. Dikirim lagi utusan lain. Kali ini yang mendatangi Suaidi adalah Kiai Dr. Manarul, Ketua Panitia pembangunan kantor pusat NU. Pesan dari Istana tetap sama. Jawaban Suaidi juga tidak berbeda.

Menurut penuturannya, lama setelah Gus Dur dimakzulkan, mantan Kasum itu suatu kali menemukan dirinya berada dalam sebuah ruang seminar bersama mantan Presiden tersebut. Ada pembicaraan dengan Gus Dur? "Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut saya menegur dia. Saya sujud syukur ketika dia jadi Presiden, kok kemudian dia sampai hati memperlakukan saya seperti itu."

* * *

Mengerahkan Seribu Jin

Menjelang dimakzulkannya Gus Dur oleh MPR keadaan politik amat panas. Media cetak dan elektronik dipenuhi oleh berita-berita persiapan para pengikut Gus Dur di Jawa Timur untuk datang ke Jakarta membela sang Presiden jika MPR berani memakzulkannya. Saya teringat beberapa berita televisi yang memperlihatkan kesiapan fisik para pengikut Gus Dur. Selain pameran kekebalan terhadap senjata tajam, beberapa pengikutnya juga mendemonstrasikan kehebatan mereka menahan gilasan mobil. "Wah, kalau mereka datang ngamuk di Jakarta, bisa banyak korban jatuh," kata seorang teman.

Sementara itu di DPR tekanan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid makin gencar. Kasus yang jadi bahan perdebatan adalah kecurigaan korupsi kepada Gus Dur lewat skandal dana dari Bulog (Bulog Gate) dan sumbangan dari Sultan Brunei (Bru-

Jenderal Sutarto dan Salim Said.

nai Gate). Menghadapi tekanan politik di DPR muncul gagasan Gus Dur mengeluarkan Dekrit pembubaran DPR dan MPR. Gagasan tersebut membuat keadaan politik tambah kalut dan keamanan berpotensi terganggu. Selain mengancam dengan dekrit, Gus Dur juga mengancam mengerahkan 1.000 jin (ya, jin) untuk ikut mempertahankan dirinya. Gus Dur juga menyebut sejumlah wilayah Indonesia akan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika dirinya dimakzulkan.

Beberapa hari sebelum sidang istimewa pemakzulan Gus Dur oleh MPR, saya diundang makan siang di kediaman resmi Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu, Jenderal TNI Endriartono Sutarto. Makan siang itu dihadiri juga oleh Mayjen TNI Djoko Subroto, Inspektur Jenderal Angkatan Darat, dan Brigjen TNI (Purn.) Abdul Kadir Besar, S.H., paman Endriartono yang juga mantan Sekjen MPRS di bawah Ketua MPRS Jenderal TNI A.H. Nasution. Yang jadi topik pembicaraan pada makan siang itu, TNI harus berbuat apa jika muncul huru-hara pada saat para pengikut Gus Dur menyerbu Jakarta menggagalkan Sidang MPR pemakzulkan sang Presiden. Jawab saya, "Kalau polisi kewalahan, TNI sebaiknya mengambil alih kekuasaan buat sementara dan menyiapkan pe-

milu yang harus diadakan enam bulan setelah memadamkan huru-hara tersebut." Pendapat saya didukung Jenderal Abdul Kadir Besar. "TNI tidak boleh berpangku tangan jika negeri ini kacau," kata Pak Kadir.

Berikut ini cerita Jenderal TNI (Purn.) Endriartono Sutarto mengenai ketegangan dan kekalutan politik serta persoalan-persoalan yang muncul dalam tubuh TNI pada hari-hari tersebut. Keterangan Jenderal TNI (Purn.) Endriartono Sutarto di bawah ini adalah hasil wawancara kami pada 4 Januari 2013 di Jakarta.

> Barangkali orang pertama yang mendengarkan rencana Presiden mengeluarkan dekrit adalah saya. Itu hari Sabtu, beberapa bulan sebelum Sidang Istimewa MPR yang memakzulkan Gus Dur. Melalui Ajudan Presiden saya diminta datang pagi-pagi menemani Gus Dur jalan pagi di halaman Istana. Saat makan pagi Gus Dur menyampaikan bahwa bila proses *impeachment* (pemakzulan) berjalan terus dia akan mengeluarkan dekrit. Saya diminta mengatur fraksi TNI agar DPR tidak melanjutkan upaya pemakzulan tersebut.
>
> Terus terang saya kaget mendengar kemungkinan ada dekrit pembubaran DPR dan MPR. Waktu itu kita baru saja masuk alam demokrasi. DPR dan MPR merupakan wakil dari partai-partai. Kalau saja partai-partai tidak menerima maka akan terjadi konflik sosial yang sangat berbahaya. Saya hanya mengingatkan Bapak Presiden bahwa Fraksi TNI hanya 1 dari 4 Fraksi di DPR. Kami tidak menjamin bisa memengaruhi fraksi-fraksi lain.
>
> Keesokan harinya, Gus Dur mengadakan sebuah pertemuan yang dihadiri Wapres Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Widodo A.S., Kapolri Bimantoro, Kepala Staf Angkatan Laut, Udara dan saya sebagai KSAD. Marsillam Simanjuntak dan beberapa menteri lainnya juga hadir. Pada kesempatan itu Gus Dur menyampikan hal yang disampaikan kepada saya sehari sebelumnya: rencana mengeluarkan dekrit. Dengan alasan menghindari konflik sosial, saya sarankan agar rencana mengeluarkan dekrit sebaiknya dihindari. Kecuali saya, yang lain tidak ada yang bicara. Mereka semua tampaknya baru saat itu mendengar ada rencana dekrit. Saya sudah mendengar sehari sebelumnya, jadi punya bahan untuk bicara. "Silakan saja pikir kembali," saran

Gus Dur. Tapi beliau mengaku akan tetap mengeluarkan dekrit. Dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono setelah pertemuan di Istana, kami semua—termasuk Marsillam—sepakat jangan sampai Presiden mengeluarkan dekrit. Kesimpulan rapat kami sampaikan kepada Ibu Megawati yang kemudian meneruskannya kepada Presiden.

Karena tidak mampu menahan Gus Dur, saya mengeluarkan pernyataan kepada publik bahwa TNI tidak berada di belakang Presiden berkaitan dengan rencananya mengeluarkan dekrit. Mungkin sebagai akibat dari pernyataan itu, Gus Dur memanggil saya ke Istana. Kata Presiden siang itu: "Pak Tarto, saya didatangi oleh para purnawirawan dan para kiai. Kata mereka, kalau negara ini mau aman, saya harus mengganti Pak Tarto." Reaksi spontan saya: "Gus, saya berterima kasih bahwa Anda sudah memercayai saya sebagai KSAD. Tapi itu adalah kehendak Allah. Kalau Anda memberhentikan saya dari jabatan KSAD, saya juga punya keyakinan yang tinggi bahwa itu juga merupakan kehendak Allah. Jadi Gus Dur, silakan dilaksanakan." Reaksi Gus Dur terhadap jawaban saya, "Pak Tarto, ini semua bukan kehendak saya."

Begitu tiba di rumah dinas, saya sampaikan kepada istri apa yang saya alami di Istana. "Kita harus segera berkemas untuk kembali ke rumah sendiri, meninggalkan rumah dinas," kata saya kepada istri. Tiba-tiba telepon berdering. Panggilan dari Istana. Saya bilang saya baru saja menghadap Presiden. Tapi tetap saja saya diminta kembali ke Istana. Begitu bertemu Gus Dur, dia bilang baru saja bertemu dengan para purnawirawan dan kiai. "Mereka meminta agar Pak Tarto dipertahankan sebagai KSAD." Jarak antara dua pertemuan saya dan Gus Dur hanya sekitar satu jam.

Suatu kali saya mendapat telepon dari Sekretaris Militer (Sesmil) Marsekal Madya TNI Budi Santoso yang menyampaikan pesan Gus Dur. Katanya, kalau saya bersedia mendukung dekrit, saya akan diangkat menjadi Panglima TNI. Jawaban saya kepada Sesmil, kalau saya jadi Panglima justru nanti saya semakin punya kekuasaan mencegah keluarnya dekrit. Tapi akhirnya pemakzulan memang tidak bisa dihindarkan setelah dekrit keluar. TNI tidak bisa membela Gus Dur sebab proses pemakzulannya konstitusional.

Pada zaman Gus Dur, satu hal yang disesalkan TNI adalah mudahnya akses bermacam-macam orang masuk ke Istana.

Para tamu itu membawa berbagai macam informasi yang mudah memengaruhi Gus Dur. Maka dengan gampang si A jadi apa, si B jadi apa, dan si C menduduki jabatan yang mana. Orang kemudian berlomba-lomba mencari akses ke Istana. Bagi militer ini merusak hierarki. Saya pernah mengingatkan Presiden bahwa urusan demikian serahkan saja kepada TNI. Kami sudah punya mekanisme yang baku.

Waktu saya dipromosikan sebagai Wakil KSAD, saya sampaikan kepada KSAD Jenderal TNI Tyasno Sudarto agar Letnan Jenderal TNI Agus Wirahadikusuma tidak dipromosikan. Karena hubungannya dengan Gus Dur, Agus sudah dengan enteng melanggar etika keprajuritan. Dia melawan atasan secara terbuka. Kita bisa saja berdebat habis-habisan dalam proses memilih kebijakan, tapi sekali keputusan sudah ditetapkan oleh pimpinan, semua staf harus mendukung. Yang dilakukan Agus adalah mendebat pimpinan dan memublikasikan pendapatnya. Itu betul-betul sudah di luar etika kemiliteran. Saya tidak bisa tetap berada dalam TNI dengan mereka yang sudah tidak memegang etika militer. Dia atau saya yang harus keluar dari Angkatan Darat.

Satu saat saya dipanggil Menko Polkam, Susilo Bambang Yudhoyono. Berita yang disampaikannya, Presiden mengangkat saya dari posisi Wakasad menjadi KSAD. Tapi ada catatan dari Gus Dur, saya harus menerima Agus Wirahadikusuma sebagai Wakil saya. Saya menolak dia jadi wakil saya. Kata saya kepada Menkopolkam, “Kenapa Agus tidak dijadikan saja sebagai KSAD dan saya keluar dari ketentaraan.” Akhirnya saya jadi KSAD dan wakil saya adalah Letjen TNI Kiki Syahnakri.

Masih berhubungan dengan dekrit, saya memang mendukung Jenderal Polisi Bimantoro, Kapolri masa itu. Gus Dur mau menyingkirkan Bimantoro karena Kapolri itu menolak rencana dikeluarkannya dekrit. Tapi penggantian Kapolri memerlukan persetujuan DPR, sementara hubungan Presiden dengan DPR waktu itu sangat buruk. Sadar tidak akan mendapat dukungan di DPR, Gus Dur mengangkat pejabat Kapolri, Jenderal Polisi Andi Khairuddin, dan menonaktifkan Bimantoro. Dalam pandangan saya, kalau usaha Gus Dur itu berhasil terhadap Polri, maka hal yang sama akan dilakukannya juga kepada TNI. Karena harus mencegah kemungkinan itulah saya mendukung Kapolri Bimantoro.

* * *

Tidak Akan Berlangsung Lama

Atas desakan beberapa teman, saya akhirnya memutuskan minta waktu jumpa Wakil Presiden, Drs. Haji Muhammad Jusuf Kalla (JK) dan Presiden SBY. Dari teman-teman saya mendapat misi ikut menjaga keutuhan pasangan Presiden SBY dan Wapres JK. Waktu itu Februari 2006, sekitar empat bulan setelah SBY dan JK terpilih. Suasana disharmonis antara kedua pemimpin terpilih itu sudah mulai tercium. Bahkan sudah menjadi bahan pembicaraan di kalangan elite Jakarta. Mantan Dirut Pertamina, Ir. Martiono Hadianto, adalah salah seorang teman yang ikut mendesak agar saya berbuat sesuatu. "Anda teman dekat SBY dan JK, datangi mereka dan ingatkan bahwa bangsa yang sedang terpuruk ini memerlukan mereka bekerja sama dengan baik dan akur satu dengan lainnya."

JK adalah alumnus Universitas Hasanuddin di Makassar dan usianya satu tahun di atas saya, sementara saya alumnus Universitas Indonesia di Jakarta. Tapi ketika masih mahasiswa, setiap pulang kampung ke Sulawesi Selatan, saya sering menyempatkan jumpa JK. Waktu itu JK sudah dikenal sebagai tokoh mahasiswa dan tokoh pemuda terkemuka di Makassar. Inilah penjelasannya mengapa tidak sulit bagi saya minta waktu jumpa JK di kantor Wapres. Yang mengatur pertemuan adalah staf khusus Wapres, Alwi Hamu—kebetulan masih saudara dari pihak ayah kami yang berasal dari Sidenreng Rappang. Alwi yang tahu rencana saya jumpa JK mengatur agar kami ngobrol sembari makan siang. Kebetulan siang itu Ketua Bappenas Dr. Sri Mulyani berada di kantor Wapres. Oleh JK Ketua Bappenas itu sekalian diajak bergabung di meja makan.

Pada majelis makan siang itu boleh disimpulkan sayalah yang berbicara paling banyak. Rasanya seperti seorang profesor yang memberi kuliah di meja makan. Bedanya, topik "kuliah" bukan soal tata meja atau tentang olah boga, melainkan soal hubungan SBY-JK. Sri Mulyani diam seribu bahasa tapi mendengar dengan saksama sambil menikmati makan siangnya. JK dengan polos

mengemukakan keluhannya mengenai lambatnya SBY mengambil keputusan dengan akibat terganggunya pekerjaan. Berbagai keluhan lain yang sekarang sudah umum diketahui juga terdengar di seputar meja makan Wapres siang itu. Sebagai orang yang kenal SBY sejak berpangkat Mayor, di samping pengalaman saya yang pernah berada di salah satu pusat budaya Jawa selama tiga tahun, saya mencoba menjelaskan kepada JK siapa SBY, latar belakang keluarga dan budayanya, cara pandang budaya Jawa terhadap kekuasaan dan bagaimana sebaiknya memperlakukan SBY dalam hubungan kerja. Tentu pesan-pesan keprihatinan dan harapan teman-teman mengenai perlunya menjaga kekompakan antara SBY-JK, saya tekankan juga dengan serius.

Kesimpulan *pertama* saya tentang JK selepas "diskusi" sembari makan siang itu: dalam urusan mengelola kekuasaan, Wapres dari Makassar itu kurang begitu peka dalam berurusan dengan orang berlatar belakang budaya politik Jawa. SBY bergerak terlalu hati-hati, sementara JK ingin cepat karena merasa semua mendesak dikerjakan. Sebagai seorang yang sangat energik dan berpengalaman binis, tekanan pekerjaan selalu mengejar JK.

Kesimpulan *kedua*, JK kurang memperhatikan sejarah yang mencatat Indonesia sebagai negara yang tidak punya tradisi Wa-

Salim Said dan Presiden SBY di Istana.

pres yang kuat. Wapres di Indonesia pada praktiknya adalah betul-betul hanya memenuhi persyaratan konstitusi dan tugasnya tidak lebih dari pembantu Presiden dan bekerja jika sang Presiden kebetulan memerlukan bantuan Wakilnya. Sikap dan posisi Presiden seperti inilah saya duga yang mengakibatkan Mohammad Hatta meninggalkan Sukarno pada 1956. Selanjutnya, untuk waktu lama Sukarno memerintah tanpa Wapres. Di atas panggung kekuasaan selama 32 tahun memimpin Orde Baru, Presiden Soeharto juga nyaris tidak pernah memanfaatkan Wakilnya.

KEADAAN MENJADI LEBIH RUMIT dalam hubungan SBY dan JK karena jalan dan proses JK menjadi Wapres amat berbeda dengan semua Wapres sebelumnya. JK dan SBY berjuang bersama untuk masing-masing menjadi Presiden dan Wapres. Maka jika pun JK tahu dan sadar terhadap sejarah kedudukan dan fungsi Wapres yang tidak pernah penting pada masa lalu, dia toh bisa saja berkata, jabatan Wapres diperolehnya dengan berkeringat dan bukan sebagai buah kebaikan hati sang Presiden seperti praktik Soeharto dulu memilih para Wakilnya. Jadi soalnya memang tidak sederhana.

Kesan berikutnya, sebagai seorang yang berlatar belakang saudagar di Makassar, JK sukses membangun dan mengembangkan bisnis keluarganya. Sukses tersebut tampaknya sangat berdampak atau bahkan menjadi pedoman bagi JK dalam mengelola kekuasaan. Secara bergurau pernah saya katakan kepada teman-teman di sekitar JK, Bapak Wapres mengelola Indonesia layaknya mengelola NV. Haji Kalla, perusahaan keluarga yang berkembang dan menjadi besar di tangan JK. Saya berpendapat Indonesia terlalu besar dan terlalu rumit dikelola dengan cara demikian.

Beberapa hari kemudian, SBY menerima saya di Istana Merdeka. Waktu yang dialokasikan protokol mulai pada pukul 19.00. Karena takut terlambat, saya datang lebih cepat dan bersembahyang Maghrib di masjid Istana. Kepada Bapak Presiden mula-mula saya sampaikan keprihatinan sejumlah teman yang sangat berharap SBY dan JK kompak dalam mengelola negara. "Harapan ma-

syarakat kepada Anda berdua amat tinggi," kata saya. Sebagai orang yang berlatar belakang budaya Bugis, saya kemudian menjelaskan dengan sopan dan halus keseriusan JK dan cara kerjanya dalam melaksanakan tugasnya. Foto makan siang di kantor Wapres saya perlihatkan kepada SBY. "Saya juga sudah bicara kepada Pak JK mengenai soal ini," kata saya menjelaskan misi saya menemui mereka berdua. "JK sangat menghormati Anda, dia bekerja keras, tapi sebagai orang seberang dia memang punya gaya lain." Saya mencoba menjelaskan "gaya lain" itu.

Berbeda dengan JK yang dengan spontan dan terus terang menjelaskan persoalannya menghadapi orang yang diwakilinya, SBY mendengarkan saya dengan saksama tanpa komentar. Setelah panjang lebar bicara tentang bagaimana sebaiknya mengerti dan memanfaatkan JK yang sangat energik, saya mencoba meyakinkan Bapak Presiden, pada akhirnya dialah Presiden yang harus menentukan. "Andalah yang harus memberi pengarahan dan memanfaatkan Wapres Anda yang sangat dinamis dan cenderung agak kurang sabaran itu." Pada akhir pertemuan yang berlangsung hampir satu jam, SBY berkata, "*I will pull the string. That I promise you*, Mas." Saya gembira mendengar tekad SBY itu. "Yah, memang harus demikian, Anda yang Presiden, Anda yang harus mengendalikan," kata saya memuji keputusannya.

BEBERAPA BULAN KEMUDIAN saya mendapatkan kehormatan menjalankan tugas sebagai Duta Besar di Praha. Setiap bertugas ke Jakarta, biasanya selalu saya sempatkan menjumpai JK. Kesan saya hubungannya dengan SBY tidak makin membaik. Cerita yang beredar di kalangan elite dan teman-teman wartawan ikut memperkuat kesan saya. Dari lingkaran dalam SBY saya juga mendapat informasi yang mengarah kepada hubungan mereka yang tidak akan berlangsung panjang. Artinya SBY akan maju ke masa jabatan kedua dengan Cawapres yang lain.

Dalam suatu pertemuan dengan SBY di Cikeas menjelang pencalonan pasangan presiden, saya sudah sampai pada kesimpulan, kimia SBY-JK memang tidak cocok. Itu secara halus, tanpa

Makan siang bersama Wapres Jusuf Kalla dan Ketua Bappenas Dr. Sri Mulyani di Istana Wapres, 2006.

menyalahkan salah satu pihak, saya sampaikan kepada SBY. "Bukan jodoh," kata saya setengah bergurau. Menurut pengamatan saya, JK terlalu besar untuk jabatan Wapres, tapi masih harus dilihat apakah dia oleh rakyat dianggap cukup besar dan pantas dipercayai menjadi Presiden.

Yang menarik, selama pembicaraan kami, SBY sama sekali tidak pernah menyatakan keluhan mengenai JK. Ini mengingatkan saya kepada almarhum mertuanya, Jenderal TNI (Anumerta) Sarwo Edhie, yang tidak pernah mengeluh mengenai Presiden Soeharto, kendati karier militernya dihancurkan oleh orang yang dulu didukungnya menyingkirkan Sukarno di awal Orde Baru.

Sadar SBY sedang mencari Cawapres pengganti JK, dalam pertemuan di Cikeas itu—dihadiri oleh Menko Ekuin Ir. Hatta Rajasa yang diam sepanjang pertemuan itu—saya menyampaikan beberapa saran mengenai kriteria yang sebaiknya menjadi ukuran dalam memilih Wapres. Salah satu saran saya, "Wapres Anda sebaiknya orang luar Jawa dan akan lebih baik jika umat Islam mempersepsikannya sebagai bagian dari mereka. Tidak

perlu orang politik kalau dukungan partai Anda cukup besar." Beberapa bulan kemudian, khalayak semua tahu pilihan SBY sebagai pengganti JK. Dia adalah Prof. Dr. Budiono, seorang yang watak dan latar budaya politiknya nyaris kebalikan dari JK.

Seandainya saya harus memberi penilaian kepada keduanya, maka yang akan saya katakan, sebagai manusia Budiono dan JK sama baiknya dan sama serius dan dedikasinya membantu SBY. Bedanya adalah latar belakang mereka dan dampaknya kepada persepsi publik. JK orang luar Jawa yang berbudaya pesisir dan sukses sebagai pedagang. Dr. Budiono adalah seorang priayi Jawa yang berlatar belakang ilmuwan dan birokrat. Perbedaan tersebut terlihat jelas dalam penampilan dan cara kerja mereka masing-masing. Bagi masyarakat umum, kehadiran tokoh seperti JK pada posisi peringkat tertinggi pengelolaan negara adalah hal yang baru, dan karena itu langkahnya sering menimbulkan kejutan. Latar belakang JK adalah budaya pesisir luar Jawa tanpa pengalaman birokrasi negara dan sedikit pengalaman dalam tataran politik nasional. Ini tentu saja berpengaruh pada tingkah laku politiknya serta cara kerja sehari-harinya.

Banyak sudah komentar dan penilaian mengenai JK dan Budiono, kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagai Wapres. Tapi yang lebih penting kita tunggu pendapatnya sebenarnya adalah SBY, Presiden yang dibantu secara bergantian oleh dua Wapres tersebut. Manakah di antara keduanya yang paling bermanfaat dan paling berkenan di hati SBY? Kita tunggulah memoar Bapak Presiden.[]

EPILOG:

KETIKA PROF. DR. SALIM SAID BICARA TENTANG PENGALAMAN DAN KESAKSIANNYA

Catatan Dr. Anhar Gonggong*

Pendahuluan: Sebuah Pertanggungjawaban

Ketika Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo membimbing penulisan tesis saya untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada pada 1975, beliau menjelaskan, "Sebuah tulisan, apalagi tulisan tentang sejarah dan ilmu sosial pada umumnya, adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat di hari kini dan juga untuk hari depan." Sejalan dengan itu, apa yang dituturkan oleh Prof. Dr. Salim Said dalam buku terbaru ini, yang bertolak pada pengalaman pribadi yang disaksikannya, dan juga pelbagai pendapat dari pelbagai pihak yang menjadi narasumbernya, sebenarnya adalah bentuk pertanggungjawabannya terhadap masyarakat dan masa depan bangsa-negaranya.

Tuturan Prof. Dr. Salim Said disampaikannya dengan enak, "ringan", walaupun menceritakan peristiwa-peristiwa dengan makna yang "berat" atau bahkan "sangat berat". Dengan latar belakang ilmuwan politik sekaligus dengan pengetahuan sejarah yang sangat dalam dan luas, tuturannya tetap mempunyai landasan ilmiah yang akurat; dia bertutur dengan landasan sumber

---

* Sejarahwan. Tenaga Profesional Lemhanas, 1985-sekarang. Guru SMA Negeri dan SMA Muhammadiyah di Metro, Lampung, 1968-1969. Deputi Menteri Bidang Sejarah dan Purbakala, Depbudpar, 2001-2003. Pengajar Sejarah Ekonomi dan Bisnis Indonesia di Fakultas Ilmu Administrasi Unika Atmajaya, Jakarta, 1984-sekarang. Pengajar Sejarah Pergerakan Nasional dan Sejarah Kontemporer Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, 2003-sekarang. Mengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), 2005-sekarang.

yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan sumber yang dapat dipercaya, dia rela mengejar dan menunggu sang sumber dengan "sabar" dan hasil yang diperolehnya memang merupakan informasi dengan kualitas yang tinggi. Demikian pula tuturannya ditopang oleh dokumen tertulis—termasuk biografi dari tokoh tertentu—dan sejumlah wawancara yang makin memperkuat bobot tuturannya yang sedang Anda nikmati sekarang ini.

SETELAH MENINGGALKAN "kampung halamannya", Kota Parepare, Bung Salim sebagai "seniman muda" hijrah ke Solo untuk melanjutkan sekolah dan ambisi berkeseniannya. Dia belajar di SMA Margoyudan. Di sekolah yang sama juga belajar Widodo A.S.—kelak menduduki jabatan KSAL dan Panglima TNI. Di Jakarta kemudian dia menjadi wartawan Koran *Angkatan Bersenjata* untuk seterusnya menjadi salah seorang pendiri majalah mingguan *Tempo*. Dengan kegiatan sebagai juruwarta itu, Bung Salim berkesempatan untuk menyaksikan sejumlah kejadian penting dan mengenal banyak tokoh. Bung Salim adalah wartawan pertama yang memasuki markas Kostrad pada hari pertama Gestapu, 1 Oktober 1965.

Pengalamannya sebagai salah seorang aktivis Angkatan "66" yang dari dekat menyaksikan proses pergantian kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Mayjen Soeharto, merupakan kesempatan mendapatkan pengalaman yang tidak akan mudah diperoleh orang-orang muda lainnya. Bukan itu saja, kemauan dan ketekunannya untuk menerjuni bidang keilmuan, saya rasa merupakan faktor utama yang membuatnya tumbuh menjadi ilmuwan politik dan sejarah politik Indonesia yang memiliki kualitasnya sendiri. Tidak hanya karena dia memasuki Fakultas Ilmu Politik, tetapi juga karena pada awal kemahasiswaannya di Fakultas Psikologi—ilmu yang sangat berguna untuk memahami "pribadi manusia"—sangat membantunya untuk menjadi ilmuwan sosial-politik dengan kualitasnya sekarang ini. Kedudukannya sebagai

Duta Besar Indonesia untuk Republik Ceko memberikan landasan penting untuk tuturannya dalam buku ini.

Gestapu: Bukan Pembantaian, Hanya Pendaulatan

Tuturan Bung Salim dalam bukunya ini diawali dengan memberikan gambaran-informatif tentang apa yang dikenal sebagai *Gestapu*, Gerakan 30 September yang terjadi pada waktu menjelang subuh 1 Oktober 1965. Ketika awal terjadinya "pemberontakan" dan/atau "kudeta" itu, muncul berbagai pertanyaan tertentu yang mendapatkan jawaban yang "beragam". Yang *pertama* ialah siapa dalangnya? Yang *kedua*, apakah para pejabat tinggi negara yang berkuasa ketika itu—dari Presiden Sukarno, Jenderal Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Soeharto, dan lain-lain mengetahui akan terjadinya peristiwa itu; dan selanjutnya apakah memang *pembantaian* terhadap 6 *jenderal* petinggi Angkatan Darat direncanakan dan dikehendaki?

Tentang persoalan *pertama*, siapa dalangnya, telah berkembang pelbagai teori dari *Cornell Paper* (Anderson/McVey)—yang melihat Gestapu sebagai akibat dari adanya konflik internal di lingkungan Angkatan Darat—hingga teori yang melihat Presiden Sukarno sebagai berada di balik gerakan tersebut. Juga ada teori yang berkaitan dengan keterlibatan pelbagai pihak asing, dari CIA-Amerika, KGB-Uni Soviet, sampai keterlibatan Republik Rakyat Cina, dan tentu saja lebih banyak yang berpendapat PKI sebagai dalangnya. Teori yang disebut terakhir itulah yang menyebabkan *para pendukung anti-gerakan Gestapu* ini selanjutnya menyebut gerakan ini dengan Gerakan 30 September/PKI (G 30 S/PKI), 1965. Nama sebutan itulah yang terus digunakan selama masa pemerintahan Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto.

Persoalan *kedua*, apakah para petinggi negara—dari Sukarno-Nasution, Yani, Soeharto, dan lain-lain—telah mengetahui kemungkinan akan terjadinya peristiwa yang memang sampai sekarang masih tetap menyimpan "misteri" kontroversial yang tampaknya masih akan menjadi bahan polemik. Persoalan kedua ini berkait-

an dengan dilakukannya pembantaian terhadap 6 jenderal petinggi di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat. Nah, pada titik persoalan ini Bung Salim mengemukakan pendapatnya yang amat menarik dan berguna untuk menguak "misteri" dalam kaitannya dengan peristiwa yang telah melahirkan tragedi berdarah pada usia ke-20 Republik Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari keterangan yang dituturkannya ialah para petinggi negara itu mengetahui akan terjadi suatu peristiwa "besar" di dalam Republik ini. Persoalannya, kapan akan terjadi? Bung Salim juga berkesimpulan rencana penculikan diketahui oleh pihak yang saling berlawanan. Tapi, mereka semua tidak menduga penculikan akan berujung pada pembantaian.

Setelah terjadinya gerakan kudeta Gestapu itu, Bung Salim mengemukakan pendapatnya yang menarik sehubungan dengan kematian 6 jenderal petinggi Angkatan Darat itu. Menurut Bung Salim tidak ada di antara para petinggi negara itu—dari Presiden Sukarno, Jenderal Nasution, Yani, Soeharto, bahkan Ketua PKI, D.N. Aidit—yang merancang akan dilakukannya tindakan pembantaian. Yang memang akan dilakukan ialah *pendaulatan*. Yang dimaksud dengan pendaulatan itu ialah tindakan "penculikan" terhadap orang yang dianggap sebagai penghalang, mereka yang berusaha untuk merealisasi sebuah agenda.

Daulat dalam bentuk penculikan pertama dalam sejarah modern Indonesia terjadi dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945. Sukarno-Hatta diculik dengan maksud dipaksa secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sukarno-Hatta kemudian dipulangkan ke Jakarta tanpa dicederai sedikit pun.

Peristiwa pendaulatan kedua dilakukan terhadap diri Perdana Menteri (PM) Sutan Syahrir oleh kekuatan oposisi yang menolak kebijakan untuk melakukan perundingan dengan imperialisme Belanda yang hendak mengembalikan kekuasaannya di Hindia Belanda. Kedua contoh pendaulatan itu tidak mengakibatkan pembantaian, sebagaimana yang dilakukan oleh Gestapu di Lubang Buaya.

Pertanyaannya, mengapa ada rencana pendaulatan sebelum terjadinya kudeta Gestapu itu? Kembali Bung Salim menunjukkan kemampuan analisisnya dengan mengajukan latar belakang situasi persaingan para tokoh di sekitar Presiden Sukarno. Titik sentral perputaran kekuasaan memang ada pada Ir. Sukarno sebagai Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi, dan penyambung lidah rakyat. Dalam membangun kekuatan penopang kekuasaannya, tentu saja Presiden Sukarno harus melakukan usaha dan mendapat dukungan dari Angkatan Darat. Pada mulanya, Bapak Presiden menampakkan kepercayaannya kepada Jenderal Nasution yang pernah diberhentikannya dari jabatan KSAD akibat peristiwa 17 Oktober 1952, di mana TNI meminta Presiden untuk membubarkan Parlemen yang memang bersifat sementara dan di dalamnya banyak tokoh federalis. Presiden Sukarno menolak tuntutan itu dengan alasan dirinya adalah "seorang demokrat". Dalam perkembangannya kemudian, di mata Presiden Sukarno, Jenderal Nasution berangsur tampil makin kuat sehingga sang Presiden merasa terganggu dalam melaksanakan agenda politiknya. Ketakutan itu makin membesar karena tampaknya TNI-Angkatan Darat menolak gagasan Nasakom yang dikembangkan Sukarno sebagai alat pemersatu bangsa yang pluralistik ini. Sejak peristiwa pemberontakan PKI di Madiun (September 1948) Angkatan Darat senantiasa melihat Partai Komunis Indonesia sebagai musuh yang tidak bisa dipercaya.

Berkeyakinan sikap Angkatan Darat bisa dilunakkan jika Jenderal Nasution tersingkir dari posisi KSAD, Sukarno melakukan "rekayasa politik" dengan cara—istilah yang digunakan oleh Bung Salim—"menendang ke atas" KSAD ke posisi tanpa jalur komando. Dengan mendudukkan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB), jenderal berpangkat tertinggi masa itu tidak lagi memiliki kekuatan yang dapat "membahayakan" Bapak Presiden. Jenderal alternatif sebagai penggantinya ialah Letjen Ahmad Yani. Dalam urusan dengan PKI, Yani ternyata tidak berbeda dengan Nasution. Hal ini kemudian, merupakan faktor utama yang menyebabkan Bapak Presiden menghadapi situasi

yang dilematis. Pada saat yang bersamaan, terjadi lagi persoalan yang justru membuat situasi menjadi makin rumit. Ini karena Bapak Presiden dalam mengangkat KASAU, yang dipilih adalah Laksamana Udara Omar Dani. Di mata para perwira senior Angkatan Darat, Omar Dani adalah perwira usia muda yang minus pengalaman perang. Namun bagi Sukarno, pengangkatan Laksamana Omar Dani merupakan alternatif terbaik, tidak hanya karena usianya yang "relatif muda", tetapi karena tampak dalam dirinya "bibit Sukarnois" yang terus tumbuh menjadi keyakinan ideologis-nasionalisme, patriotisme yang makin kukuh. Omar Dani bukan saja menjadi Sukarnois tulen, dia juga memosisikan Angkatan Udara sebagai pendukung Sukarno dalam berhadapan dengan Angkatan Darat.

Kembali pada lingkungan TNI-Angkatan Darat. Menurut Bung Salim, di lingkungan Angkatan Darat, paling sedikit ada *empat* subkelompok dengan sikap yang berbeda pada waktu itu. Subkelompok Nasution, Ahmad Yani, Soeharto, dan subkelompok perwira binaan Biro Khusus PKI. Kendati memiliki perbedaan sikap terhadap Sukarno, ketiga subkelompok pertama itu sepakat dalam menghadapi PKI. Mereka semua anti-PKI. Lebih lanjut tentang hal ini, Bung Salim menuturkan:

> Terhadap Sukarno, subkelompok Nasution menganut garis lebih keras, pihak Yani mencoba merangkul sang Pemimpin Besar Revolusi dengan alasan dan harapan agar tidak terlalu dekat kepada PKI, sementara Soeharto berdiri di sudut dengan perasaan diremehkan oleh kelompok Yani yang berkuasa. Kalau Nasution menilai Soeharto sebagai oportunis sejak zaman revolusi, Yani atau orang-orang sekitar Panglima Angkatan Darat kabarnya menilai Soeharto sebagai "Jenderal Bodoh".

Adapun tentang hubungan antara Letjen Yani dan Mayjen Soeharto, sebagaimana yang digambarkan Letjen Sayidiman Suryohadiprojo dalam buku ini, Yani memperlakukan Pak Harto sebagai orang kedua di TNI AD setelah Menpangad, walaupun tidak ada ketentuannya. Kendati Yani selalu menghormati Soeharto,

Pangkostrad itu tetap saja tidak terlalu "sreg" dalam hubungan beliau dengan SUAD (Staf Umum Angkatan Darat).

Memasuki tahun 1965, situasi politik dalam negeri makin menampakkan situasi yang tidak menentu dan bahkan mencekam. Di tengah-tengah situasi itu, menurut penuturan Bung Salim, perbedaan dalam menghadapi Sukarno itulah memuncaknya konflik antara subkelompok Nasution dan Yani pada awal 1965. Situasi konflik antara kedua subkelompok dalam tubuh Angkatan Darat itu, digambarkan oleh Bung Salim sebagai berikut:

> Konon waktu itu (Januari 1965) pada suatu hari Letnan Jenderal Ahmad Yani memerintahkan Mayor Jenderal Suprapto … menangkap Jenderal Nasution. Perintah yang tampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan loyalitas Yani kepada Sukarno itu dibatalkan secara mendadak beberapa hari kemudian, sehingga bentrok antara pendukung masing-masing kubu yang nyaris terjadi, berhasil terhindarkan.

Rencana penangkapan Jenderal Nasution yang ketika itu berkedudukan sebagai Menko Hankam KASAB dapat digagalkan karena sejumlah jenderal senior seperti Jenderal Sarbini, Jenderal Soeharto, Jenderal R. Soedirman, dan Jenderal Basuki Rahmat beramai-ramai menentang rencana Yani tersebut.

Kembali pada pembicaraan judul ini, tentang dari daulat ke pembantaian, kalau mengacu pada periode awal kemerdekaan, pendaulatan dalam arti "sinonim" *penculikan*, maka maknanya ialah "menyingkirkan" saingan, tetapi tidak untuk dibunuh atau dibantai. Dalam arti penculikan yang terjadi pada awal kemerdekaan itu, memang hanya dr. Muwardi, tokoh karismatik dari Partai Murba—didirikan oleh tokoh Marxis-Troskis, Tan Malaka—yang diculik dan *hilang*, dan sampai sekarang tidak diketahui lokasi kuburannya.

Walaupun Presiden Sukarno membentengi diri dan kekuasaannya dengan cara mengembangkan wibawa karismatiknya dengan kedudukan resmi dan nonresmi, seperti Presiden, Panglima Tertinggi TNI, Pemimpin Besar Revolusi, dan juga gelar yang se-

ring diretorikakannya, *penyambung lidah rakyat*, dalam kenyataannya, Presiden Sukarno,

> … yang makin kewalahan menghadapi Angkatan Darat—terus menolak Nasakom, tidak secara serius melakukan konfrontasi dan makin sibuk mengatur barisan kaum anti-Komunis—mendorong sang Presiden tiba pada kesimpulan untuk tidak punya pilihan lain, kecuali mengganti Panglima Angkatan Darat, Letjen Ahmad Yani.

Persoalannya ialah cara penyingkiran Letjen Ahmad Yani dari jabatannya itu akan dilakukan dengan jalan apa? Dan dalam hal itu, Bung Salim bertolak dari apa yang pernah diungkapkan oleh salah seorang ajudan senior Presiden Sukarno, Kolonel (Laut) Bambang Widjanarko, yaitu penggantian itu *dilakukan dengan cara daulat*. Dalam bukunya itu, Kolonel Bambang Widjanarko mengungkapkan, pada 4 Agustus 1965, Presiden Sukarno memanggil komandan pengawal, Letkol Untung untuk menerima perintah melaksanakan rencana sang Presiden. Sampai seberapa benar kemungkinan keterlibatan Presiden Sukarno dalam merancang pendaulatan Panglima Angkatan Darat negaranya, dan pengetahuannya terhadap Gestapu (baca: G 30 S/PKI), untuk memperkuat argumennya, Bung Salim selanjutnya mengutip kesaksian Patnaik, yang dituturkannya kepada seorang sejarahwan senior, Dr. A.B. Lapian di Hotel Oberoy, Bali, pada 31 Januari 1993. Terakhir pilot Patnaik, dari India, bertemu dengan Presiden Sukarno pada 30 September 1965 di Istana Negara, sepulang dari memberi pidato di Istora Senayan, hanya beberapa jam sebelum Gestapu bergerak. Setelah melakukan pembicaraan penting dengan Presiden Sukarno dan dia mendapat janji dari Presiden untuk tidak membantu Pakistan dalam konfliknya dengan India, maka Presiden meminta Patnaik untuk segera meninggalkan Jakarta sebelum subuh. "Saya akan menutup lapangan terbang," kata Sukarno. Mengapa Kemayoran akan ditutup oleh Sukarno?

Dari Jenderal Benny Moerdani, sang Raja Intel, Wapres Try Sutrisno, sampai Rosihan Anwar, sang Wartawan Senior

Ketika Panglima Kostrad, Mayjen Soeharto berhasil mendapatkan kepercayaan dari kekuatan-kekuatan anti-PKI dan anti-Sukarno, maka mulailah proses—yang berjalan relatif cepat melalui jalan *quasi* konstitusional, pergantian pimpinan bangsa-negara, dari Presiden Sukarno ke Soeharto. Mula-mula sebagai Pejabat Presiden pada 1967 dan Presiden definitif pada 1968. Suatu pergantian pemimpin negara yang dilatari oleh pelbagai peristiwa dramatis yang penuh ketegangan.

Dari kedudukannya sebagai Presiden itulah Soeharto secara perlahan membangun dan mengukuhkan kekuasaannya dengan cara memperketat kontrolnya atas politik dan militer. Meski bertahun-tahun berusaha, Sukarno yang bukan tentara tidak pernah berhasil secara sempurna menguasai militer. Tapi, Soeharto yang datang dari dalam ketentaraan, sukses secara sempurna mendominasi ABRI. Menurut Bung Salim, itulah rahasianya mengapa Presiden Sukarno berkuasa singkat, sementara Soeharto bisa bertahan selama 32 tahun.

Betulkah Soeharto menguasai militer tanpa reaksi dari dalam ABRI sendiri? Sebagai peneliti peran politik ABRI, Bung Salim memberi sumbangan besar dalam menjawab pertanyaan ini. Dalam buku ini, Bung Salim mengemukakan pengamatan yang menunjukkan bahwa sebenarnya sejak 1978 para jenderal pimpinan ABRI sudah mulai menunjukkan sikap kritis terhadap Soeharto. Sikap kritis itu berkembang terus dan terlihat dalam bentuk penolakan mereka terhadap penunjukan Sudharmono untuk menduduki kursi Wakil Presiden menjelang Sidang MPR 1988. Adalah ketangkasan berpolitik Bapak Presiden yang memungkinkan duduknya Sudharmono pada kursi Wapres lewat sidang MPR tersebut. Menjelang Sidang MPR 1993, ABRI tampil lebih berani "menantang" Soeharto. Kali ini mereka "memaksa" Soeharto menerima Jenderal Try Sutrisno sebagai Calon Wakil Presiden.

Naiknya Try Sutrisno ke kursi Wapres itu oleh Bung Salim disebut sebagai "pemberontakan ABRI" terhadap Soeharto.

Dalam bukunya ini, juga bisa dibaca ada bagian yang memuat penuturannya tentang beberapa tokoh yang memiliki kekhasannya masing-masing, baik sebagai pejabat atau pekerja profesional, dan/atau pribadi yang menarik perhatiannya, baik tokoh sipil maupun militer. Dalam kaitan ini, ada bagian yang berbicara tentang Jenderal Jusuf, Moerdani, Sarwo Edhie, H.R. Dharsono, Sudomo, Ali Murtopo, Kemal Idris, Harsudiono Hartas, dan beberapa jenderal lainnya. Dua tokoh dari kalangan sipil, wartawan senior dan sastrawan: Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar juga dibicarakannya.

Tentang Mayor Jenderal Benny Moerdani yang kemudian berhasil menjadi jenderal penuh (bintang emas empat), Bung Salim memberikan tuturan pertemuan pertamanya pada 10 November 1974, di Saigon. Mereka "kebetulan" menginap di hotel yang sama: Caravelle. Kesan pertama Bung Salim tentang sosok tokoh ini: "Benny memancarkan kesan seorang pendiam, juga terasa angkuh." Selanjutnya, "Benny tidak bicara apa-apa. Tanpa ekspresi di wajahnya, dia menerima uluran tangan perkenalan saya." Ketika diajak oleh Kolonel Dading Kalbuadi untuk ikut makan malam bersama di restoran hotel, setelah memberi tahu bahwa hari itu juga adalah hari ulang tahunnya, maka dengan maksud bercanda, Bung Salim menyatakannya dalam bahasa Inggris: "*General, are you going to give me a treat for my birthday?*" Jawabannya juga dalam bahasa Inggris, "*If you have money, why don't you go buy yourself birthday dinner*." Tentu saja jawaban "yang ketus" dan tanpa basa-basi itu "mengejutkan" Bung Salim.

Namun, keterkejutannya karena jawaban ketus pada hari ulang tahunnya itu, tidak menjadi penghalang bagi Bung Salim untuk mewawancarai Jenderal Moerdani sebagai Panglima ABRI ataupun sebagai purnawirawan. Bung Salim meninggalkan hotel dan—karena ajakan Kolonel Dading Kalbuadi—naik mobil bersama Benny, bahkan duduk di tengah, di antara Mayjen Benny Moerdani dan Dading Kalbuadi. Dalam perjalanan itu, Mayjen

Benny memulai pembicaraan—menurut Bung Salim—dengan melancarkan insinuasi dengan menyebut majalah *Tempo*, tempatnya bekerja ketika itu—sebagai tidak bersahabat pada kegiatan Moerdani. Tetapi, insinuasi Moerdani itu disahuti oleh Dading Kalbuadi dengan membela Bung Salim. “Tidak, ah, Pak Salim ini teman kita.”

Tentu saja sebelum jumpa Moerdani di Saigon, Bung Salim telah mendengar pelbagai cerita tindakan hebat dan mengagumkan Benny Moerdani. Perwira komando itu terjun payung di Pekanbaru walau tidak pernah latihan terjun. Sebagai intel, dia menyamar menjadi karyawan perusahaan penerbangan Garuda di Bangkok, dan keberaniannya terjun di hutan belantara Irian Barat dalam rangka Operasi Trikora pembebasan Irian Barat. Karena keberaniannya ini, Mayor Benny mendapat Bintang Sakti yang disematkan sendiri oleh Presiden Sukarno.

Dengan latar belakang seperti itu, memang Benny menjadi tokoh militer yang pada periode berkuasanya di bawah Jenderal Soeharto perjalanan kariernya terus menanjak. Dalam periode berkuasanya itu, dia memang “amat ditakuti” dan juga ditengarai sebagai “anti-Islam”. Sepulang dari Amerika, setelah menyelesaikan studi doktornya, Bung Salim berusaha menemui tokoh militer yang telah menduduki jabatan-jabatan terpenting dalam lingkungan ABRI dan intelijen. Tapi, dia gagal menemui Jenderal Benny, walau dengan bantuan Jenderal (Purn.) Sumitro. Tentu saja untuk menemui Jenderal Benny makin tidak mudah dengan sekian banyak jabatan yang ada di tangannya. Demikian pula, ketika itu, telah terjadi tindakan represif terhadap umat Islam di Tanjung Priok. Dalam pembantaian itu, Jenderal Benny Moerdani bersama Jenderal Try Sutrisno dianggap perwira-perwira yang harus bertanggung jawab.

Salah satu tindakan represif yang dilakukan oleh Jenderal Benny Moerdani ialah apa yang disebut dengan pembunuhan misterius atau lebih dikenal dengan akronim Petrus. Aksi pembasmian preman itu berasal dari tindakan Komandan Kodim Kota Madya Yogyakarta, Letkol Muhammad Hasbi. Menurut Bung Salim,

cara pembunuhan yang dilakukan oleh Komandan Kodim Yogyakarta itu, "kemudian secara diam-diam" diambil alih oleh Pangkopkamtib untuk diberlakukan di seluruh Indonesia. Tentu saja tindakan dalam bentuk Petrus itu menimbulkan rasa takut di kalangan tertentu warga masyarakat. Mereka takut bisa jadi sasaran Petrus. Reaksi luar negeri juga mulai terlihat dan tentu saja mengganggu posisi pemerintahan. Itulah sebabnya Pangkopkamtib Jenderal Benny Moerdani mengadakan jumpa pers. Tentu saja jenderal penguasa keamanan-ketertiban itu menyangkal tindakan Petrus itu dilakukan oleh aparat negara, melainkan karena perang antarkelompok geng kriminal. Tetapi, kebohongan Jenderal Benny Moerdani dan Kepala Polisi (Kapolri) Jenderal (Pol.) Anton Soedjarwo belakangan terkuak melalui keterangan Presiden Soeharto yang termuat dalam memoarnya. Soeharto mengakui keterlibatan pemerintah dalam pembantaian tersebut. Sebagai "terapi kejutan", menurut Presiden. Tentu saja Benny Moerdani—yang ketika buku Soeharto itu terbit, berkedudukan sebagai Menteri Pertahanan—merasa kesal. Menurut Bung Salim, "Dia merasa dipermalukan oleh atasannya."

Selama periode kekuasaannya yang sangat luas dan besar itu—terutama sebagai panglima ABRI dan kepala berbagai lembaga intelijen, jenderal yang berdarah Indo-Jerman ini memang melahirkan sejumlah musuh bagi dirinya, antara lain karena tindakan diskriminatif yang dilakukannya terutama terhadap perwira-perwira berlatar santri. Tentang hal ini, Bung Salim mengutip bagian artikel seorang ahli Indonesia dari Amerika, William Liddle, yang menulis pada *Journal of Asian Studies*: "Moerdani yang mengumpulkan di sekitarnya kaum abangan, orang-orang Kristen, dan kaum yang berlatar belakang minoritas, mendorong banyak kaum santri dalam ABRI percaya bahwa mereka tidak mungkin bisa naik ke posisi puncak."

Tentang pelbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan hubungan antara Presiden Soeharto dan Panglima ABRI-nya, Jenderal Benny Moerdani, Bung Salim Said banyak mendapat in-

formasi dari mantan Pangkopkamtib, Jenderal (Purn.) Sumitro; Sumitro memberi informasi bahwa:

> … hubungan Benny dengan Soeharto perlahan memburuk setelah Benny menjadi Pangab. Sumitro mengaku sebenarnya tidak sepakat dengan keputusan Soeharto mengangkat Benny menjadi Pangab menggantikan Jenderal Yusuf. Saya sarankan agar Benny dijadikan dulu Pangkowilhan, jangan langsung jadi Pangab.

Saran Sumitro itu tentu ada alasannya, yaitu Jenderal Benny "tidak punya pengalaman teritorial". Tetapi saran Jenderal Sumitro, yang pernah menjadi pembantu dekat Presiden Soeharto sebelum Peristiwa Malari 1974, ditolak oleh Bapak Presiden. Dan Jenderal Benny Moerdani pun menduduki jabatannya dengan kekuasaan yang "sangat kuat" meski jabatan militer tertinggi yang pernah didudukinya hanya Komandan Batalion RPKAD dengan pangkat Mayor. Dalam posisi penting Moerdani sebagai Pangab serta sejumlah jabatan lainnya itu, Sumitro memberikan kesaksiannya. Tuturan Bung Salim Said tentang hal itu, sebagai berikut:

> Benny Moerdani menurut Sumitro, bukan saja dipercaya memimpin intelijen sembari menjadi Panglima ABRI, melainkan juga terus dibebani kesibukan sebagai *security officer* yang bertugas menjaga keamanan Soeharto dan keluarganya. Peran menjaga keamanan Soeharto dan keluarganya ini sebenarnya sudah dikerjakan Moerdani sejak pulang dari Seoul. Dalam melaksanakan tugas demikian itu, sebenarnya Benny lebih sebagai seorang kepala *bodyguard* daripada seorang Kepala Intel.

Dalam perjalanan posisinya sebagai Panglima ABRI, Kepala Intel, dan penjaga keamanan Soeharto dan keluarganya, Jenderal Benny Moerdani melakukan suatu langkah untuk menyentuh kesadaran dalam diri Presiden Soeharto agar merenungkan batas (waktu) kekuasaannya, termasuk batas waktu kedudukan kepresidenannya yang sampai saat itu masih dikuasainya. Tentang hal ini, Bung Salim menuturkannya:

> Nah, mungkin dalam rangka tugas menjaga Soeharto itulah, setelah antara lain berdiskusi dengan Sumitro, dan juga mungkin dengan beberapa senior lainnya, pada suatu hari, Panglima Moerdani dalam kedudukannya sebagai Panglima ABRI, memberanikan diri menemui Soeharto dan dengan amat hati-hati menyarankan agar Bapak Presiden mulai mencari orang lain untuk menggantikannya. Soeharto waktu itu memang sudah sekitar 20 tahun menduduki kursi kepresidenan. Cerita tentang jaringan bisnis anak-anak dan kroninya sudah pula tersebar luas. Soeharto marah.

Tentang adanya keprihatinan para jenderal senior, Try Sutrisno—yang pernah menduduki jabatan Pangab dan Wakil Presiden—juga mengakui pernah menyampaikannya kepada Presiden Soeharto mengenai kegiatan bisnis putra-putri Presiden. Tanggapan Soeharto:

> "Try, apakah ada aturan, atau undang-undang yang melarang anak pejabat berbisnis? Kalau ada, saya tidak mau jadi Presiden. Kan, tidak ada larangan itu. Mau jadi tentara, pegawai negeri, atau pengusaha, semua boleh."

Tentu banyak cerita yang "berseliweran" yang berkaitan dengan posisi petinggi-petinggi ABRI dalam hubungannya dengan Presiden Soeharto. Tetapi apa yang diceritakan oleh Jenderal (Purn.) Sumitro, Jenderal Try Sutrisno, dan Letjen (Purn.) Sayidiman seperti yang dikutip dalam buku ini, memang menunjukkan bahwa telah berkembang "kerenggangan" hubungan antara Presiden Soeharto dan sejumlah jenderalnya. Tentu banyak faktor yang menopang berkembangnya kerenggangan yang dimaksud. Penolakan Jenderal Benny Moerdani dan para jenderal pimpinan ABRI terhadap pencalonan Sudharmono sebagai Wakil Presiden, usaha pimpinan ABRI untuk menguasai dan mengontrol Golkar, "pemaksaan" Try Sutrisno menjadi Wapres, adalah ekspresi dari kerenggangan tersebut.

Menjadikan Golkar sebagai organisasi yang secara berangsur dikuasai sipil sesuai dengan kehendak Presiden Soeharto, tidak dikehendaki oleh pimpinan ABRI. Ini terlihat pada penolakan me-

reka terhadap pencalonan Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar. Tetapi, tidak ada yang dapat membendung kehendak Presiden Soeharto. Demikianlah selanjutnya, banyak informasi yang menunjukkan makin berkembangnya perbedaan sikap dan pandangan Benny Moerdani dan para jenderal di jajaran pimpinan ABRI dengan Presiden Soeharto.

Penutup: Apa Makna Buku Ini?

Tentu lebih banyak hal menarik di sekitar rezim Orde Baru dan tokoh-tokohnya yang bisa kita baca dari tuturan Bung Salim lewat bukunya ini daripada yang sempat saya catat dalam tulisan ini. Dan justru saya berharap Anda, para pembaca dapat membaca sendiri buku yang memberikan tuturan informatif yang kaya ini, secara saksama. Ketika selesai membaca (cepat) buku ini, saya "menerawang" ke hari depan. Karena buku ini—setidaknya dalam penglihatan saya—menyajikan pelbagai peristiwa informatif yang mungkin dapat berguna.

Salah satu hal yang sangat penting untuk menjadi bahan pemikiran yang bersumber dari buku ini ialah masalah pemimpin dan tipe kepemimpinan yang akan dapat tampil selanjutnya setelah kita menjalani usia sebagai bangsa-negara merdeka selama 68 tahun. Sebab, sebenarnya, apa yang disajikan dalam buku dari seorang wartawan yang doktor-profesor dan diplomat ini justru menggambarkan sejumlah tokoh dengan posisi jabatan tingginya masing-masing, dan dengan tipe kepemimpinannya masing-masing pula. Tetapi, pertanyaan yang harus diberi jawaban dalam kaitan dengan pemimpin dan kepemimpinannya itu adalah, "Adakah pemimpin dan model kepemimpinannya dapat menjadi contoh yang berguna untuk memegang kendali pemerintahan republik ini secara lebih baik di kemudian hari?"

Berkaitan dengan itu, maka pertanyaan selanjutnya ialah apakah sistem demokrasi yang dewasa ini dijalankan dalam periode Reformasi dapat dilanjutkan karena sudah dianggap sejalan dengan tujuan kemerdekaan dan dasar negara Pancasila,

yang sampai saat ini tetap diterima "bersama" sebagai ideologi NKRI. Atau, kita masih harus berusaha "mencari" sistem demokrasi yang dapat menjadi pegangan dalam mengatur pergantian pemerintahan tanpa konflik fisik "yang memalukan" dilihat dari sudut bangsa merdeka "yang beradab". Selanjutnya, buku Bung Salim Said ini juga akan sangat berguna sebagai sumber penulisan, baik dalam penulisan sejarah politik dan militer, maupun dalam ilmu-ilmu sosial lainnya.

Dengan catatan singkat yang menjadi penutup dari catatan saya ini, saya berharap akan dapat "memancing" pembaca untuk melakukan sesuatu—sesuai dengan kedudukan kemasyarakatan kita, terutama kepada tokoh-tokoh politik, cendekiawan, mahasiswa, dan juga pimpinan TNI dan Polri, untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik, sebagai bangsa yang merdeka, di dalam negara yang berbentuk republik ini.[]

Indeks

Tentang Penulis

Lahir sebagai anak tertua Haji Said dan Hajjah Salmah pada 10 November 1943, di Desa Amparita, Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan. Salim menjalani pendidikan dasarnya di Kota Parepare sebelum akhirnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Solo, Jawa Tengah. Selama lima tahun (1963-1968), dia belajar psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI). Salim beralih mempelajari ilmu sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI karena tidak lagi diizinkan bertahan di sekolah lamanya akibat tingkat absennya yang tinggi imbas kesibukannya sebagai demonstran dan wartawan. Dari FISIP UI, Salim Said mendapat gelar sarjana (Drs.) dalam Ilmu Sosiologi pada 1976. Pendidikan tingginya di Jakarta tersendat-sendat dan berlangsung lama karena kegiatannya sebagai aktivis mahasiswa dan kesibukannya sebagai wartawan.

Pada 1979, Salim Said memulai pendidikan pascasarjana di Ohio University, Athens, Ohio Amerika Serikat. Mendapat gelar Master of Arts in International Affairs (MAIA) pada 1980, dia kemudian diterima pada program doktor di Ohio State University (OSU) dan belajar ilmu politik di bawah bimbingan Prof. Dr. Raymond William Liddle (Bill). Salim Said mendapat gelar Master (M.A.) kedua pada 1983, dan pada Desember 1985 dia memperoleh gelar Ph.D. dalam ilmu politik dengan disertasi mengenai

peran politik militer Indonesia pada periode Revolusi Kemerdekaan.

Ketika menyelesaikan pendidikannya pada Jurusan Sosiologi FISIP UI, Salim Said menulis tesis mengenai sejarah sosial film Indonesia. Tidak terlalu sulit baginya menulis tesis tersebut karena selama bertahun-tahun dia juga bersibuk sebagai kritikus film majalah *Tempo*. Tesis itu merupakan usaha penulis menemukan jawaban atas keluhan terhadap rendahnya mutu film Indonesia. Dari penelitiannya, Salim Said berkesimpulan bahwa film Indonesia yang mendominasi pasar adalah memang buatan para pemilik modal yang memperlakukan film semata sebagai komoditas dagang. Karena kalkulasi pembuatan tontonan tersebut hanya didasarkan pada hitungan untung rugi materiel, tentu saja mutunya hampir mutlak ditentukan oleh pasar dan para pemilik modal yang memang tidak terlatih memperhitungkan aspek artistik. Tesis Salim Said terbit sebagai buku dalam bahasa Indonesia dan Inggris (terjemahan).

Menurut pengakuannya sendiri, Salim hijrah ke Pulau Jawa pada usia 16 tahun dengan ambisi menjadi seniman. Semasa remaja di Parepare, Salim mulai menulis cerita pendek dan puisi. Di Pulau Jawa kemudian dia juga menulis sejumlah telaah karya-karya sastra. Salim yang tertarik seni peran (*acting*) pernah belajar teater, menyutradarai pertunjukan drama, dan ikut tampil sebagai aktor. Di kemudian hari, dia belajar dunia perfilman, menyutradarai dan beberapa kali tampil di depan kamera.

Namun, dia secara berangsur menyadari bakat seninya ternyata tidak sepotensial daya kritisnya. Maka, dia pun beralih menjadi ilmuwan dan memusatkan perhatian pada studi ilmu sosial dan politik. Sebagai ilmuwan sosial politik, Salim Said telah menerbitkan sekitar 10 buku—dalam bahasa Indonesia dan Inggris—yang pada umumnya membicarakan peranan politik militer Indonesia. Beberapa buku mengenai film dan perfilman juga dihasilkannya. Kendati tidak lagi berambisi menjadi seniman, Salim Said tetap saja diangkat menjadi anggota Dewan Kesenian Ja-

karta, bahkan menjadi ketua lembaga kesenian itu selama hampir 10 tahun.

Dalam riwayat hidupnya, Salim Said tercatat sebagai wartawan selama 25 tahun. Dari kedudukan sebagai wartawan dan *foreign travelling correspondent* majalah *Tempo* itulah, Salim yang juga salah seorang pendiri majalah mingguan tersebut, berkesempatan berkeliling ke berbagai penjuru dunia dan menulis laporan dan analisis menarik mengenai negara-negara yang dikunjunginya. Salim Said bangga berkesempatan meliput hari-hari terakhir Kamboja sebelum jatuh ke tangan Khmer Merah yang menciptakan *killing field*, dan bulan-bulan terakhir sebelum Amerika Serikat dan rezim kanan di Vietnam Selatan secara sempurna ditendang keluar dari kawasan Indochina. Dengan usaha sendiri, Salim Said juga meliput pelaksanaan kesepakatan Camp David yang dicapai bersama Menachim Begin (Israel) dan Anwar Sadat (Mesir). Untuk peliputan ini, Salim Said harus terbang ke Kairo dengan biaya pribadi. Menyeberangi Terusan Suez dan melewati Kota Ismailia, dia melanjutkan perjalanan menuju Jerusalem melalui Gurun Sinai dan Tanah Genting Gaza.

Selama sembilan bulan pada awal masa Reformasi, Salim Said ditunjuk mewakili kaum cendekiawan pada Badan Pekerja-MPR (BP-MPR). Pada 2006, Guru Besar Ilmu Politik ini dipercayai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) untuk Republik Ceko yang berkedudukan di Praha.

Pada tahun-tahun terakhir ini, sebagai Guru Besar Ilmu Politik, Salim Said sibuk mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Pertahanan Indonesia, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI), dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dia juga sibuk melakukan penelitian bagi buku yang sedang dipersiapkannya. "Saya terobsesi menyelesaikan penelitian dan menulis buku mengenai dinamika hubungan Presiden Sukarno dan militer dari masa Revolusi hingga naiknya Soeharto," katanya.[]